

PROSIDING

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Editor:
Dr. Asrif, M.Hum.



KANTOR BAHASA MALUKU
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bahasa

6

**PROSIDING KONGRES INTERNASIONAL
BAHASA DAERAH MALUKU**

HADIAH
KANTOR BAHASA
PROVINSI MALUKU



00052716

**PERPUSTAKAAN
BADAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**PROSIDING KONGRES INTERNASIONAL
BAHASA DAERAH MALUKU**

**KANTOR BAHASA MALUKU
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

PROSIDING KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Diterbitkan oleh

Kantor Bahasa Maluku
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks LPMP Maluku
Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Kota Ambon
Maluku-97234, Indonesia

Cetakan edisi pertama 2018
Katalog dalam Terbitan (KDT)
ISBN 978-602-50294-9-3

Pengarah
Kepala Kantor Bahasa Maluku

Penanggung Jawab
Asrif

Penyunting
Dr. Asrif, M.Hum.

Reviewer
Dr. Asrif, M.Hum.

Penata Rupa dan Letak
Andi Heriyadi Z.

PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA	No. Induk : 0719
	Tgl. : 15-2-19
Klasifikasi	Ttd. : AL
499.270 6 PR0	

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

PROLOG PROSIDING KONGRES BAHASA DAERAH MALUKU

Keprihatinan terhadap kondisi bahasa-bahasa daerah di Provinsi Maluku telah lama disuarakan oleh berbagai peneliti, pemerhati budaya, termasuk para akademisi dan guru. Puluhan negeri (desa adat) telah kehilangan bahasa daerah. Di Pulau Haruku dan Pulau Saparua, sebagian besar desa adat telah meninggalkan bahasa daerah dan beralih menggunakan bahasa Indonesia, dan bahkan di Pulau Nusa Laut bahkan tidak ada lagi negeri yang melestarikan bahasa daerah. Kondisi serupa terjadi di Pulau Ambon terutama di wilayah administrasi Kota Ambon dan desa-desa adat di bagian selatan dan barat Pulau Seram. Gejala memudar penggunaan bahasa daerah itu bahkan juga telah menjalari desa-desa adat yang berada di bagian tenggara Provinsi Maluku.

Menyikapi kepunahan bahasa-bahasa daerah tersebut, Kantor Bahasa Maluku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Kongres Bahasa Daerah Maluku di Kota Ambon pada tanggal 7—9 September 2017. Kongres bertujuan mengidentifikasi penyebab kepunahan bahasa daerah dan merumuskan strategi perlindungan (penguatan) bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh Provinsi Maluku. Kongres ini melibatkan berbagai pihak terkait antara lain akademisi, peneliti, lembaga eksekutif pusat dan daerah, lembaga legislatif pusat dan daerah, organisasi kebudayaan, masyarakat adat, dan pemerhati bahasa.

Prosiding Kongres Bahasa Daerah Maluku ini terdiri atas makalah. Dari makalah tersebut, makalah-makalah ini dibagi ke dalam dua kelompok makalah, yakni kelompok kajian linguistik dan kelompok kajian sastra. Semua makalah tersebut telah dipresentasikan di hadapan peserta kongres dan juga telah melalui proses revisi serta penyuntingan.

Makalah pertama berjudul Kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Upaya Pelindungan Bahasa Daerah oleh Prof. Dadang Sunendar, M.Hum. (Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Prof. Dadang Sunendar, M.Hum. memaparkan peran negara melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pengembangan, pelindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan juga bahasa dan sastra daerah.

Makalah kedua berjudul Pelindungan Bahasa dan Revitalisasi Bahasa: Cagar Bahasa atau Gerakan Bahasa? dipaparkan oleh Prof. Jim T. Collins. Peneliti yang sejak tahun 1972 telah melakukan studi linguistik di Provinsi Maluku memaparkan diversitas bahasa daerah di Provinsi Maluku. Collins menyatakan kekhawatirannya akan daya hidup bahasa-bahasa daerah yang ada di Maluku. Sejumlah persoalan pelik sejak masa terdahulu hingga masa sekarang dipaparkan Collins sebagai penyebab keterancamannya bahasa-bahasa daerah. Dosen Universitas Kebangsaan Malaysia itu mengajukan upaya pelindungan bahasa daerah melalui program pendokumentasian dan revitalisasi bahasa daerah.

Dr. Chong Shin (Universitas Kebangsaan Malaysia) dan Jamil, M.A. (STKIP Gotong Royong Masohi) memaparkan makalah bersama dengan judul Usaha Merevitalisasi Bahasa Terancam—Bahasa Sepa. Keduanya memaparkan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah Sepa, sebuah bahasa daerah yang terancam punah di Pulau Seram, Maluku. Keduanya melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan revitalisasi melalui pendokumentasian (digitalisasi bahasa Sepa yang diunggah ke youtube), pelibatan generasi muda dan tokoh-tokoh adat, serta pembelajaran bahasa Sepa terutama pada generasi muda. Masih tentang pelindungan bahasa daerah, Dr. Sukardi Gau, M.Hum. dari Kantor Bahasa Gorontalo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan makalah berjudul Kondisi Bahasa Suwawa: Antara Ruang dan Bahasa. Sukardi Gau mengajukan ruang geografis sebagai hal utama dalam memetakan kondisi bahasa daerah Suwawa, di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Perbedaan ruang geografis penutur bahasa berdampak pada daya tahan bahasa Suwawa.

Prof. Multamia RMT Lauder dari Universitas Indonesia memaparkan makalah berjudul Kebijakan dan Strategi Pelestarian Bahasa Daerah Berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan dan RUU Bahasa Daerah. Linguis dari Universitas Indonesia itu lebih menekankan pentingnya kehadiran Undang-Undang untuk melindungi bahasa-bahasa daerah. Masih terkait pelindungan bahasa daerah, Dr. Allan F. Lauder mengajukan makalah berjudul A Strategy for Language Revitalization in Indonesia: Focus on Youth and ICT. Lauder mengajukan pendekatan baru dalam pelindungan bahasa daerah yakni dengan melibatkan pemuda yang aktif di media sosial untuk menggiatkan bahasa daerah. Pendekatan yang diajukan Lauder tersebut memperkaya

dua pendekatan sebelumnya yakni pendekatan revitalisasi bahasa dan dokumentasi bahasa. sejalan dengan Lauder, Noveria Anggraeni Fiaji menempatkan Peran Media Sosial sebagai Strategi Pemerkuat serta Pengenalan Bahasa Daerah kepada Masyarakat di Era Globalisasi. Dosen Universitas Brawijaya tersebut melihat media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan bahasa daerah.

Nadir La Djamudi memaparkan sejumlah peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Pengajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah di Pulau Buton. Menurutnya, terdapat ketidakjelasan pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah, misalnya bahasa daerah yang diajarkan tidak sesuai dengan bahasa etnik setempat. Selanjutnya Asrif menulis makalah berjudul Pelindungan Bahasa-Bahasa Daerah di Maluku. Asrif mengkritisi kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Maluku yang belum melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pelindungan bahasa daerah. Akibatnya, sejumlah bahasa daerah di Maluku diketahui telah punah.

Dr. Hurip Danu Ismadi mengajukan makalah berjudul Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengulas langkah-langkah strategis revitalisasi bahasa dan sastra yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di seluruh wilayah Indonesia. Prof. Thomas Frans memilih membicarakan Pengajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah: Peluang dan Tantangan. Guru besar linguistik Universitas Pattimura itu menyebutkan beberapa faktor kunci tantangan pelestarian bahasa daerah antara lain tidak terencananya dengan baik program revitalisasi bahasa daerah. Selain itu, Frans juga menekankan pentingnya pengajaran bahasa daerah yang menyenangkan agar disukai oleh pembelajar. Prima Zulvarina dari Universitas Brawijaya memaparkan makalah berjudul Menakar Kembali Keberadaan Bahasa Dialek Jawa Timur sebagai Upaya Mempertahankan Bahasa Daerah. Zulvarina menyoroti revitalisasi bahasa daerah Jawa yang tidak memperhatikan aspek dialek tempatan. Selanjutnya, Mariana Lewier dkk memaparkan sikap bahas masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa Melayu Ambon dan bahasa tana (bahasa ragam adat). Lewier dkk menemukan penggunaan bahasa di Negeri Soya, pada ranah keluarga, ranah sosial kemasyarakatan, ranah pendidikan, dan ranah agama lebih banyak menggunakan BMA dan BI. Sementara itu, penggunaan bahasa tana dalam upacara-upacara adat lebih banyak menggunakan gabungan bahasa tana dan BMA.

Ariesa Pandanwangi dan Krismanto Kusbiantoro memaparkan makalah berjudul Peluang dan Tantangan Muatan Lokal Bahasa Visual Daerah di Indonesia. Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha itu mengajukan pentingnya bahasa gambar (bahasa visual) daripada bahasa verbal (kata-kata) dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Menurut keduanya, bahasa gambar akan lebih

mudah diserap oleh peserta didik.

Masih tentang bahasa daerah, Ratih Rahayu dari Kantor Bahasa Lampung mengajukan makalah berjudul Kondisi Bahasa Lampung Kini, Esok, dan Nanti. Rahayu menekankan pentingnya kekonsistensian dan keberlanjutan pelaksanaan pemertahanan bahasa Lampung. Jika tidak demikian, Rahayu menduga pelestarian bahasa Lampung akan menjadi hal sia-sia.

Makalah berjudul Gagasan Revitalisasi Aksara Jawa pada Visual Kontemporer Carakan Garuda Pancasila diajukan oleh Dyah Nurhayati. Hasil penelitian Dyah Nurhayati menunjukkan bahwa upaya revitalisasi dapat memberikan pengetahuan pentingnya pengembangan nilai-nilai lokal dengan konten tradisi sebagai wacana visual baru pada media kontemporer saat ini. Meske Gaspersz, seorang guru di Kota Ambon mengajukan makalah berjudul Bahasa Daerah dalam Bingkai Otonomi Khusus di Provinsi Maluku. Guru SMA Negeri 6 Ambon itu menyatakan pelestarian bahasa-bahasa daerah di Maluku perlu melibatkan kontak antarbudaya, agama, dan politik. Ia juga menekankan pentingkan kerja sama semua pihak terkait seperti Pemerintah Provinsi Maluku dan lembaga kebahasaan pemerintah dan nonpemerintah, dan juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Maluku lainnya.

Selanjutnya, La Ode Yusri mengupas Enklave Muna di Pulau Buton. Peneliti bahasa dari Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara tersebut menyatakan enklave bahasa Muna di Pulau Buton lebih erat hubungannya dengan bahasa Muna dialek selatan. Artinya, enklave Muna di Pulau Buton merupakan variasi (secara geografis) bahasa Muna yang diturunkan dari satu bahasa purba, yaitu Prabahasa Muna (PM) yang juga menurunkan dialek-dialek dalam bahasa Muna, seperti dialek di utara (Lohia-Tongkuno) dan dialek selatan. Ernati menulis tentang Adjektiva Bahasa Hitu. Peneliti Bahasa di Kantor Bahasa Maluku itu menguraikan dengan rinci adjektiva bahasa Hitu yang terdiri atas adjektiva bertaraf dan adjektiva tidak bertaraf. Makalah ini cukup menarik karena dapat memperkaya penelitian bahasa Hitu yang selama ini masih terbatas. Nita Hadanyani Hasan dari Kantor Bahasa Maluku mengajukan dan memaparkan makalah berjudul Korpus Bahasa Daerah pada Cerita Rakyat Datuk Urlima. Makalah tersebut memaparkan aplikasi AntConc dapat digunakan untuk mengidentifikasi korpus bahasa daerah yang terdapat di dalam cerita rakyat.

Makalah terkait pendidikan karakter melalui pembelajaran drama diajukan oleh Rachmawati Patty. Dosen Universitas Pattimura tersebut menyoroti perubahan karakter generasi muda Indonesia. Ia berpandangan, peningkatan karakter dapat dilakukan melalui pembelajaran drama. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dapat ditingkatkan melalui pembelajaran drama.

David G. Manuputty memaparkan makalah berjudul Refleksi Sikap Masyarakat Sulawesi Selatan dalam Korelasi Budaya dengan Onomastika. Hasil kajiannya menemukan adanya korelasi budaya di lokasi suatu masyarakat tutur

berada dengan bahasa yang konon merupakan refleksi budaya lokal di Sulawesi Selatan. Mustafa, menulis makalah berjudul Analisis Fungsi Pelaku Dan Motif Cerita "*Datu Lumuran*". Mustafa menggunakan teori berdasarkan Vladimir Propp yang pada akhirnya berhasil mengungkap 18 fungsi pelaku dan beberapa motif cerita yang terkandung dalam cerita *Datu Lumuran*.

Makalah terkait cerita rakyat diajukan oleh Faradika Darman dengan judul Implementasi Cerita Rakyat Maluku dalam Pengajaran Bahasa Indonesia dan Muatan Lokal. Menurutnya, cerita rakyat yang memiliki banyak nilai positif dan norma kehidupan perlu dimasukkan ke dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa, sastra, dan budaya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jika ketiga unsur tersebut dapat dipadukan dengan baik dalam proses pembelajaran tentunya akan membawa dampak yang sangat baik dalam proses pengembangan dan penanaman nilai-nilai keindonesiaan pada generasi muda.

Besse Darmawati memaparkan Heroisme dalam Osong La Mappabali Daeng Tulolo: Salah Satu Wujud Revitalisasi Sastra Daerah. Ia menyatakan bahwa heroisme dalam Osong La Mappabali Daeng Tulolo adalah (1) memiliki solidaritas tinggi dalam mempertahankan tanah air, (2) cinta tanah air dan rela berkorban demi keutuhan negeri. Relevansi antara heroisme tersebut dengan kondisi sosial masyarakat Bugis dewasa ini menghendaki lahirnya pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan tanpa mengedepankan kepentingan pribadi semata. Uniawati mengajukan makalah tentang sastra berjudul Cerita Rakyat Cermin Multikultural di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, cerita Pepeliano Ole ano Owula dan Wamboro-Wamboro adalah dua dari banyaknya cerita di Sulawesi Tenggara yang memperlihatkan kesamaan motif sekaligus keberagaman budaya. Keberagaman budaya itulah yang membentuk masyarakat multikultural di Sulawesi Tenggara.

Heksa Biopsi menyatakan mitos Martandu mengalami demitifikasi. Selain kesakralannya memudar, kisah ini juga nyaris tidak dikenal lagi oleh masyarakat pemiliknya. Pemunculan kembali kisah ini dalam tula-tula tumburiou dapat menjadi pilihan sebagai upaya revitalisasi Mitos Martandu. Rahmawati memaparkan makalah berjudul Menumbuhkan Wawasan Multikulturalisme melalui Cerita Rakyat. Ia menyatakan bahwa membiasakan membaca cerita pada anak berarti memberi kesempatan kepada anak untuk mengetahui adat istiadat di berbagai daerah. Pemahaman mengenai keberagaman budaya tersebut akan menanamkan wawasan multikulturalisme pada diri anak. Heksa Biopsi Puji Hastuti memaparkan makalah berjudul Mitos Martandu: Fungsi dan Upaya Revitalisasi.

Selanjutnya, Yulianeta bersama Suci Sunduniah dan Halimah dari Universitas Pendidikan Indonesia memaparkan makalah berjudul Revitalisasi Naskah Klasik Hikayat Raja Kerang ke dalam Film Animasi sebagai Media Pembelajaran Sastra

di Era Digital. Pemakalah mengajukan gagasan menarik tentang upaya alih wahana naskah klasik Hikayat Raja Kerang ke dalam film animasi. Naskah klasik Hikayat Raja Kerang yang memiliki nilai-nilai edukasi dialihwahanakan ke dalam bentuk film animasi yang berguna sebagai media pembelajaran sastra pada era digital.

Dr. La Ode Ali Basri memaparkan Multikulturalisme dalam Tradisi Lisan Orang Bajo. Antropolog Universitas Halu Oleo tersebut menyatakan bahwa multikulturalisme dalam tradisi lisan orang Bajo antara lain tertuang dalam tahang diri (tahan diri) dan ngatonang diri (tahu diri), tradisi falia (pantang larang), dan tradisi resolusi konflik orang Bajo, berupa model penyelesaian konflik melalui sistem arbitrase yakni bila ada pihak-pihak yang berkonflik, maka harus ada pihak ketiga yang bertindak mendamaikan (mediator). Masih terkait tradisi lisan, Helmina Kastanya mengajukan makalah berjudul Revitalisasi Tradisi Lisan dan Peran Masyarakat Adat di Maluku. Pemakalah menekankan pentingnya merevitalisasi tradisi lisan di Maluku agar kejatidirian dan norma-norma positif kemalukuan tetap terpelihara. Dengan begitu, Maluku tidak hanya populer sebagai penghasil rempah, tetapi juga populer sebagai negeri berbudaya.

Penerbitan prosiding ini kami pandang perlu mengingat makalah-makalah yang telah dipaparkan dalam Kongres Internasional Bahasa Daerah Maluku merupakan makalah-makalah terpilih yang dinilai bermanfaat bagi pelindungan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah. Makalah-makalah ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan bahasa daerah di Maluku, tetapi lebih luas dapat menjadi referensi bagi para peneliti dan pemerhati bahasa untuk digunakan di wilayah bahasa daerah yang berbeda. Naskah yang telah diterbitkan nantinya akan disebarluaskan ke pihak-pihak terkait sebagai pemerdayaan referensi ilmiah mengenai pelestarian bahasa-bahasa daerah.

Ambon, April 2018
Penyunting ahli,

Asrif

KATA PENGANTAR

KEPALA KANTOR BAHASA MALUKU

Pelaksanaan Kongres Internasional Bahasa Daerah Maluku tahun 2017 didasari kekhawatiran Kantor Bahasa Maluku (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) terhadap status bahasa-bahasa daerah (bahasa ibu) yang tersebar di berbagai wilayah di Maluku. Sejumlah bahasa daerah telah punah terutama bahasa-bahasa daerah yang ada di Pulau Buru dan Pulau Seram. Akibatnya, puluhan negeri adat telah kehilangan bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah yang masih bertahan juga sebagian besar tidak dalam kondisi stabil (aman). Sebagian besar bahasa-bahasa daerah di Maluku telah berada dalam kondisi terancam punah. Menyikapi hal itu, Kantor Bahasa Maluku melaksanakan kongres yang bertujuan menelaah problematika dan merumuskan langkah-langkah perlindungan bahasa-bahasa daerah tersebut.

Kongres Bahasa Daerah Maluku telah terlaksana dengan baik di Kota Ambon pada tanggal 7—8 September 2017. Para pembicara utama, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI; Pemerintah Provinsi Maluku, Universitas Indonesia; dan Universitas Kebangsaan Malaysia berperan aktif dan menyatakan dukungan terhadap penguatan bahasa-bahasa daerah yang ada di Maluku. Selain para pembicara utama, pembicara lain yang turut berpartisipasi dalam kongres tersebut berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, peneliti, guru, pemerintah daerah, dan pemerhati budaya di Indonesia.

Kongres yang mengusung tema “Pelindungan Bahasa-Bahasa Daerah sebagai Aset dan Jati Diri Bangsa” menghasilkan sejumlah butir rekomendasi yang ditujukan

terutama bagi Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Maluku, DPRD se-Maluku, Perguruan Tinggi, Kantor Bahasa Maluku, dan lembaga-lembaga lain terkait. Rekomendasi kongres diharapkan dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama melalui program-program pelestarian dan pengembangan bahasa-bahasa daerah yang ada di Maluku.

Makalah-makalah yang dipaparkan dalam kongres tersebut diterbitkan dalam bentuk prosiding agar dapat dibaca oleh masyarakat luas. Kami berharap prosiding ini dapat bermanfaat bagi pengkajian/penelitian, pelestarian, dan pengembangan bahasa daerah, terutama bagi bahasa daerah yang ada di Provinsi Maluku.

Ambon, Februari 2018.

Dr. Asrif, M.Hum.

DAFTAR ISI

- v — Prolog
- xi — Kata Pengantar
- xiii — Daftar isi
- xvi — JADWAL KONGRES INTERNASIONAL DAN LOKAKARYA
BAHASA DAERAH MALUKU
- 1 — KEBIJAKAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
BAHASA DALAM UPAYA PELINDUNGAN BAHASA DAERAH
Dadang Sunendar - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- 11 — PELINDUNGAN BAHASA DAN REVITALISASI BAHASA: CAGAR
BAHASA ATAU GERAKAN BAHASA?
James T. Collins - Universitas Kebangsaan Malaysia
- 39 — USAHA MEREVITALISASI BAHASA TERANCAM—BAHASA SEPA
Dr. Chong Shin - (Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti
Kebangsaan Malaysia)
Jamil, M.A. - (STKIP Gotong Royong Masohi)
- 51 — PELINDUNGAN BAHASA SUWAWA: ANTARA RUANG DAN
BAHASA
Sukardi Gau - Kantor Bahasa Gorontalo
- 61 — REVITALISASI NASKAH KLASIK HIKAYAT RAJA KERANG KE
DALAM FILM ANIMASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN
SASTRA DI ERA DIGITAL
Yulianeta - Suci Sundusiah - Halimah - Universitas Pendidikan Indonesia
- 67 — MENUMBUHKAN KARAKTER ANAK SEKOLAH DASAR MELALUI
PEMBELAJARAN APRESIASI DRAMA
Dr. Rachmawati Patty - Universitas Pattimura
- 79 — PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PEMERKUAT SERTA
PENGENALAN BAHASA DAERAH KEPADA MASYARAKAT DI ERA
GLOBALISASI
Noveria Anggraeni Fiaji - Pusat MPK Universitas Brawijaya
- 89 — KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELESTARIAN BAHASA DAERAH
BERDASARKAN UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN RUU
BAHASA DAERAH
Multamia RMT Lauder - Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya - Universitas Indonesia

- 123 — A STRATEGY FOR LANGUAGE REVITALIZATION IN INDONESIA:
FOCUS ON YOUTH AND ICT
Allan F. Lauder - Universitas Indonesia
- 153 — PENGAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH DI PULAU
BUTON: PELUANG DAN TANTANGAN
Nadir La Djamudi - Universitas Muhammadiyah Buton
- 163 — PELINDUNGAN BAHASA-BAHASA DAERAH DI MALUKU
Asrif - Kantor Bahasa Maluku
- 169 — MENAKAR KEMBALI KEBERADAAN BAHASA DIALEK JAWA
TIMUR SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN BAHASA DAERAH
Prima Zulvarina - Universitas Brawijaya
- 175 — KORPUS BAHASA DAERAH PADA CERITA RAKYAT *DATUK
URLIMA*
Nita Handayani Hasan - Kantor Bahasa Maluku
- 185 — REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA DAERAH
Hurip Danu Ismadi - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 195 — PENGAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH: PELUANG
DAN TANTANGAN
Thomas Frans - Universitas Pattimura
- 195 — PENGAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH: PELUANG
DAN TANTANGAN
Thomas Frans - Universitas Pattimura
- 205 — ADJEKTIVA BAHASA HITU
Erniati, S.S. - Kantor Bahasa Maluku
- 231 — PELUANG DAN TANTANGAN MUATAN LOKAL BAHASA VISUAL
DAERAH DI INDONESIA
Ariesa Pandanwangi - **Krismanto Kusbiantoro** - Fakultas Seni Rupa
dan Desain Universitas Kristen Maranatha
- 239 — KONDISI BAHASA LAMPUNG KINI, ESOK, DAN NANTI
Ratih Rahayu - Kantor Bahasa Lampung
- 249 — SIKAP BAHASA DALAM KERANGKA PEMERTAHANAN BAHASA
TANA SEBAGAI BAHASA ADAT DI NEGERI SOYA, KECAMATAN
SIRIMAU, KOTA AMBON
**Mariana Lewier, Falantino Eryk Latupapua, Grace Somelok,
Elsa Latupeirissa, Leonora Farilyn Pesiwarissa** - Universitas Pattimura
- 265 — GAGASAN REVITALISASI AKSARA JAWA PADA VISUAL
KONTEMPORER *CARAKAN GARUDA PANCASILA*
Dyah Nurhayati - Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung

- 275 — REFLEKSI SIKAP MASYARAKAT SULAWESI SELATAN DALAM
KORELASI BUDAYA DENGAN ONOMASTIKA
David G. Manuputty - Balai Bahasa Sulawesi Selatan
- 285 — ANALISIS PELAKU DAN MOTIF CERITA *DATU LUMURAN*
Mustafa - Balai Bahasa Sulawesi Selatan
- 299 — ENKLAVE MUNA DI PULAU BUTON
La Ode Yusri, M.A. - Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara
- 315 — BAHASA BENDA : Arkeologi dan Sejarah Tutur di Maluku
Marlon Ririmasse - Balai Arkeologi Maluku
- 323 — MULTIKULTURALISME DALAM TRADISI LISAN ORANG BAJO
La Ode Ali Basri - Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Kendari
- 335 — BAHASA DAERAH DALAM BINGKAI OTONOMI KHUSUS DI
PROVINSI MALUKU
Meske Gaspersz - SMA Negeri 6 Ambon
- 345 — IMPLEMENTASI CERITA RAKYAT MALUKU DALAM
PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DAN MUATAN LOKAL
Faradika Darman - Kantor Bahasa Maluku
- 355 — REVITALISASI TRADISI LISAN DAN PERAN MASYARAKAT ADAT
DI MALUKU
Helmina Kastanya - Kantor Bahasa Maluku
- 359 — Daftar Gambar

JADWAL KONGRES INTERNASIONAL DAN LOKAKARYA BAHASA DAERAH MALUKU

Ambon, 7—8 September 2017

HARI & TGGL	WAKTU	PEMAKALAH	INSTANSI/ LEMBAGA	JUDUL MAKALAH	MODE-RATOR	PEN-CATAT
Kamis, 7 September 2017	07.30–08.30	Registrasi Peserta				
	08.30–10.00	Pembukaan				
	10.00–10.30	Kudapan				
	10.30–11.15	Prof. Dr. Dadang Sunendar	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud	Kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Upaya Pelindungan Bahasa Daerah	Dr. Asrif, M.Hum.	Rifan
		Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				
	11.15–12.00	Ir. H. Said Assagaff	Pemerintah Provinsi Maluku	Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku dalam Upaya Pelindungan Bahasa Daerah	Dr. Asrif, M.Hum.	Rifan
		Gubernur Maluku				
	12.00–13.00	Istirahat				
	13.00–13.45	Prof. James T. Collins	Universiti Kebangsaan Malaysia	Pelindungan Bahasa dan Revitalisasi Bahasa: Cagar Bahasa atau Gerakan Bahasa?	Dr. Mariana Lewier	Leonardo Jeverson Sipahelut
	13.45–14.30	PANEL I				
		Dr. Chong Shin	Universiti Kebangsaan Malaysia	Usaha Merevitalisasi Bahasa Terancam–Bahasa Sepa	Dr. Romilda da Costa	Leonardo Jeverson Sipahelut
		Bapak Jamil	STIKP Masohi	Usaha Merevitalisasi Bahasa Terancam–Bahasa Sepa		
		Dr. Sukardi Gau	Kantor Bahasa Gorontalo, Kemdikbud	Pelindungan Bahasa Daerah di Provinsi Gorontalo		
		PANEL II				
		Dr. Yulianeta	UPI Bandung	Revitalisasi Naskah Klasik Hikayat Raja Kerang ke Dalam Film Animasi sebagai Media Pembelajaran Sastra di Era Digital		

Kamis, 7 September 2017	14.30–15.15	Dr. Rahmawaty Patty	Universitas Pattimura	Pengajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah	Erniati, S.S.	Selvone Pattiser-lahun
		Noveria Anggraeni Fiadji	Universitas Brawijaya	Peran Media Sosial sebagai Strategi Penguat serta Pengenalan Bahasa Daerah kepada Masyarakat di Era Globalisasi		
	15.15–15.30	Kudapan				
	15.30–16.30	PANEL III				
		Prof. Dr. Multamia MRT Laufer	Universitas Indonesia	Kebijakan dan Strategi Pelestarian Bahasa Daerah di Era Globalisasi	Marlon Ririmasse, M.A.	Elia Wamese
		Prof. Dr. John Pieris	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI	Kebijakan DPD RI dalam Upaya Pelindungan Bahasa Daerah		
		Dr. Allan Frank Laufer	Universitas Indonesia	A Strategy for Revitalization in Indonesia: Focus on Youth and ICT		
	16.30–17.30	PANEL IV				
		Dr. Asrif	Kantor Bahasa Maluku, Kemdikbud	Kebijakan Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra di Provinsi Maluku	Wahidah, M.A.	Aprilia Joris
		Prima Zulvarina	Universitas Brawijaya	Menakar Kembali Keberadaan Dialek Jawa Timur sebagai Upaya Mempertahankan Bahasa Daerah		
		Nadir La Djamudi, M.Pd.	Universitas Muhammadiyah Buton	Pengajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah di Pulau Buton: Peluang dan Tantangan		
Jumat, 8 September 2017	07.30–08.00	Registrasi Peserta				
	08.00–09.00	PANEL V				
		Dr. Hurip Danu Ismadi	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Kemdikbud	Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah	Falantino Eryk Latupapua, M.A.	Felia de Lima
		Dr. Tri Nuke Pudjiastuti	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Kebijakan LIPI dalam Upaya Pelindungan Bahasa Daerah		
		Prof. Dr. Thomas Frans	Universitas Pattimura	Pengajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah: Peluang dan Tantangan		

Jumat, 8 September 2017

09.00–10.00	PANEL VI				
	Prof. Dr. Hanna	Universitas Halu Oleo	Bahasa Culambacu dan Tolaki dalam Prespektif Genolinguistik	Harlin, S.S.	Frengky Tuhumury
	Dr. Ir. Ruksamin, M.Si	Bupati Konawe Utara, Sultra	Kebijakan Pemertahanan Bahasa Tulang Batu		
	Sitti Romatul Jannah	SMA 1 Oheo, Konawe Utara, Sultra	Kekerabatan Bahasa Tolaki dan Bahasa Culangbucu di Konawe Utara		
Mariana Lewier dkk.	Universitas Pattimura	Sikap Bahasa dalam Kerangka Pemertahanan Bahasa Tana Sebagai Bahasa Adat di Negeri Soya, Kecamatan Sirimalu, Kota Ambon			
10.00–10.30	Kudapan				
10.30–11.30	PANEL VII				
	Dr. Wanda Listiani dkk	ISBI Bandung	Revitalisasi Aksara Daerah dalam Sastra Grafis Fashion Batik Balsara	Rudi Fofid	Wa Ode Liana
	Falantino Eryk Latupapua, M.A.	Universitas Pattimura	Peningkatan Lokalitas Sebagai Identitas? (Suatu Studi Awal Tentang Peran Bahasa dalam Nawacita Ambon City of Music)		
	Dr. Ariesa Pandanwangi	Universitas Kristen Maranatha Bandung	Peluang dan Tantangan Muatan Lokal Bahasa Visual Daerah di Indonesia		
	Evi Olivia Kumbangsila, S.Pd.	Kantor Bahasa Maluku, Kemendikbud	Sebuah Kritik Sastra dalam Film Salawaku		
11.30–12.30	PANEL VIII				
	Dr. Romilda da Costa	Universitas Pattimura	Bahasa Banda: Analisis Keruangan	Erniati, S.S.	Wa Ode Liana
	Sigit Arba'i, S.Pd.	Balai Bahasa DI Yogyakarta, Kemdikbud	Pemertahanan Bahasa Daerah oleh Mahasiswa Asal Lampung di Yogyakarta		
	Basori	Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Kemdikbud	Revitalisasi Tradisi Lisan Dayak Ngaju: Sansana		
	Ratih Rahayu, M.Hum.	Kantor Bahasa Lampung, Kemendikbud	Kondisi Bahasa Lampung Kini, Esok, dan Nanti		

Jumat, 8 September 2017

12.30–13.30	Istirahat				
13.30–15.00	PANEL IX				
RUANG A	Leonora Pesiwarissa, M.Pd.	Universitas Pattimura	Sikap Bahasa dan Pemertahanan Bahasa Tana sebagai Bahasa Adat di Negeri Soya	Wahidah, M.A.	Leonardo Jeverson Sipahelut
	Dyah Nurhayati, M.Sn.	ISBI Bandung	Gagasan Revitalisasi Aksara Jawa pada Visual Kontemporer Carakan Garuda Pancasila		
	Dr. La Aso & Maulid Taembo, M.A.	Universitas Halu Oleo	The Meaning “To Cook” in Muna Language: Natural Semantics Metalanguage		
	La Ode Yusri, M.A.	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, Kemdikbud	Enklave Muna di Pulau Buton		
	Marlon Ririmasse	Balai Arkeologi Maluku	Bahasa Benda: Arkeologi dan Sejarah Tutar di Maluku		
13.30–15.00	PANEL X				
RUANG B	Dr. Ali Basri	Universitas Halu Oleo	Multikulturalisme dalam Tradisi Lisan Orang Bajo	Evi Olivia Kumbangsila, S.Pd.	Yudi Christin
	Besse Darmawati, S.Pd.	Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kemdikbud	Heroisme dalam Osong La Mappabali Daeng Tulolo Salah Satu Wujud Revitalisasi Sastra Daerah		
	Uniawati, M.Hum.	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, Kemdikbud	Cerita Rakyat Cermin Multikultural di Sulawesi Tenggara		
	Marlon Ririmasse, M.A.	Balai Arkeologi Maluku, Kemendikbud	Bahasa Benda: Arkeologi dan Sejarah Tutar di Maluku		
15.00–16.30	PANEL XI				
	David G. Manuputty, M.Hum.	Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kemdikbud	Refleksi Budaya dalam Onomastika di Sulawesi Selatan	Erniati, S.S.	Felia de Lima
	Meske Gasperz, S.Pd.	SMAN 6 Ambon	Bahasa Daerah dalam Bingkai Otonomi Khusus di Provinsi Maluku		
Dr. Petrus Pattiasina, M.Pd.	Universitas Pattimura	Simbol Verbal Berbahasa Melayu Ambon dalam interaksi kebaktian			

Jumat, 8 September 2017

15.00–16.30		PANEL XII			
RUANG A	Mustafa	Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kemdikbud	Analisis Fungsi Pelaku dan Motif Cerita “ <i>Datu Lumuran</i> ”	Wahidah, M.A.	Yudi Christin
	Nur Israfyan Sofian, M.Hum. & Dr. Irianto Ibrahim	Universitas Halu Oleo	Model Pewarisan Cerita Rakyat melalui Lomba Storytelling		
RUANG B	Heksa Biopsi Pudji Hastuti, M.Hum.	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, Kemdikbud	Mitos Martandu: Fungsi dan Upaya Revitalisasi	Nita Handayani Hasan, S.S.	Aprilia Joris
	Rahmawati, S.S.	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, Kemdikbud	Menumbuhkan Wawasan Multikulturalisme melalui Cerita Rakyat		
16.30–18.00		PANEL XIII			
RUANG A	Adi Syaiful Mukhtar, S.S.	Kantor Bahasa Maluku, Kemdikbud	Campur Kode Raden Mas Rangga Puruhitu dalam Novel <i>De Winst</i> karya Afifah Afra	Harlin, S.S.	Elia Wamese
	Wahidah, M.A.	Kantor Bahasa Maluku, Kemdikbud	Relasi Kekerabatan Bahasa Yalahatan dan Bahasa Nuaulu di Maluku		
	Nita Handayani Hasan, S.S.	Kantor Bahasa Maluku, Kemdikbud	Korpus Bahasa Daerah pada Cerita Rakyat Datuk Urlima		
RUANG B	Erniati, S.S.	Kantor Bahasa Maluku, Kemdikbud	Adjektiva Bahasa Hitu	Evi Olivia Kumbangsila, S.Pd.	Felia de Lima
	Faradika Darman, S.S.	Kantor Bahasa Maluku, Kemdikbud	Kosakata Budaya dalam Tradisi ‘Pinamou’: Suatu Pemertahanan Bahasa Daerah Yalahatan		
	Helmina Kastanya	Kantor Bahasa Maluku, Kemdikbud	Revitalisasi Tradisi Lisan dan Peran Masyarakat Adat Di Maluku		
08.00–15.00		Tur Budaya: 1. Gong Perdamaian Dunia 2. Benteng Victoria 3. Patung Christina Martha Tiahahu 4. Jembatan Merah Putih 5. Pantai Natsepa 6. Bambu (Bulu) Gila			

KEBIJAKAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DALAM UPAYA PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

Dadang Sunendar

**Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

1. Pengantar

Amanat Undang-Undang No. 24 tahun 2009:

- 1) Utamakan Bahasa Indonesia
- 2) Lestarkan Bahasa Daerah
- 3) Kuasai Bahasa Asing

Dalam menjalankan tugas mengembangkan dan membina bahasa dan sastra yang ada di Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terurai ke dalam beberapa pusat berikut ini:

1) Pusat Pengembangan dan Pelindungan

Mengembangkan **bahasa dan sastra Indonesia dan daerah** melalui pengkajian bagi penyusunan program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

2) Pusat Pembinaan

Melaksanakan pembinaan **bahasa dan sastra Indonesia** melalui pembelajaran, pemasyarakatan, pengendalian, dan penghargaan.

3) Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

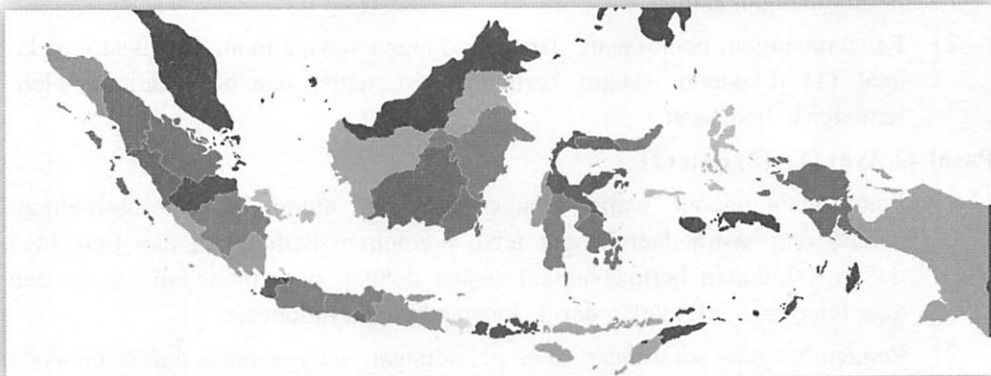
Menginternasionalisasikan **bahasa** dan **sastra Indonesia** melalui kajian strategis tentang kebinekaan bahasa di Indonesia dan diplomasi kebahasaan melalui dua cara: pengiriman guru pengajar BIPA dan penerjemahan

4) Sekretariat Badan Bahasa sebagai fasilitator.

Selain empat pusat tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan tersebar di semua provinsi se-Indonesia, yakni:

- 1) Balai Bahasa Nangroe Aceh Darussalam
- 2) Balai Bahasa Sumatera Utara
- 3) Balai Bahasa Sumatera Barat
- 4) Balai Bahasa Sumatera Selatan
- 5) Balai Bahasa Riau
- 6) Balai Bahasa Jawa Barat
- 7) Balai Bahasa Jawa Tengah
- 8) Balai Bahasa D.I. Yogyakarta
- 9) Balai Bahasa Jawa Timur
- 10) Balai Bahasa Bali
- 11) Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan Barat
- 12) Balai Bahasa Sulawesi Utara
- 13) Balai Bahasa Sulawesi Tengah
- 14) Balai Bahasa Kalimantan Tengah
- 15) Balai Bahasa Kalimantan Selatan
- 16) Balai Bahasa Kalimantan Barat
- 17) Balai Bahasa Papua dan Papua Barat
- 18) Kantor Bahasa Lampung
- 19) Kantor Bahasa Jambi
- 20) Kantor Bahasa Kalimantan Timur
- 21) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur
- 22) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
- 23) Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara
- 24) Kantor Bahasa Bangka Belitung
- 25) Kantor Bahasa Bengkulu
- 26) Kantor Bahasa Banten
- 27) Kantor Bahasa Gorontalo

- 28) Kantor Bahasa Maluku Utara
- 29) Kantor Bahasa Maluku
- 30) Kantor Bahasa Kepulauan Riau



Keterangan:

Terdapat 17 Balai Bahasa dan 13 Kantor Bahasa di Indonesia.

2. UU RI No. 24 Tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan



Pasal 41 Ayat (1), (2) dan (3)

- 1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.
- 2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.

Pasal 42 Ayat (1), (2) dan (3)

- 1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- 2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

Program Prioritas Badan Bahasa

Tahun 2017:

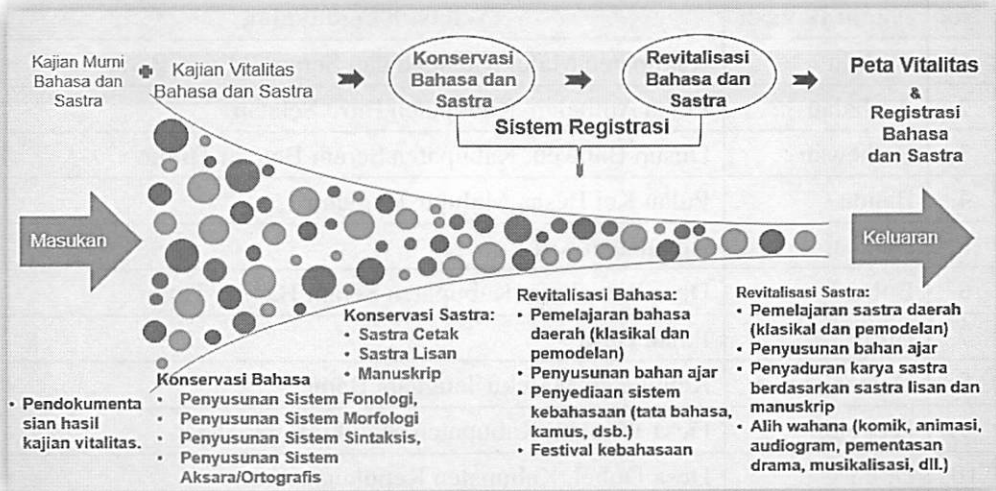
1. Pengayaan kosakata bahasa Indonesia
2. Gerakan Literasi Nasional
3. Pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik
4. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)
5. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
6. Peningkatan kemampuan pendidik bahasa Indonesia
7. Konservasi dan revitalisasi bahasa daerah
8. Penguatan mitra kebahasaan dan kesastraan
9. Layanan perpustakaan

Kebijakan

Program Pelindungan Bahasa dan Sastra:

1. Pemetaan Bahasa
2. Kajian Vitalitas Bahasa Dan Sastra
3. Registrasi Bahasa dan Sastra
4. Jurnal Bahasa dan Sastra
5. Penyusunan Sistem Bahasa Daerah

6. Konservasi Sastra (Manuskrip, Sastra Lisan, dan Sastra Cetak).
7. Jurnal Bahasa dan Sastra
8. Registrasi Bahasa dan Sastra



3. Konservasi dan Revitalisasi Bahasa Daerah

Bahasa	Jumlah Penutur	Persentase
Jawa	68.044.660	31,79%
Sunda	32.412.752	15,14%
Melayu	7.901.386	3,69%
Madura	7.743.533	3,62%
Minangkabau	4.232.226	1,98%
Bali	3.371.049	1,57%
Batak	3.316.360	1,55%
Betawi	2.244.648	1,05%
Bahasa asal Papua	1.643.325	0,77%
Bahasa asal Maluku	1.616.240	0,76%

Tahun 2015—2016, jumlah bahasa di Indonesia yang berhasil dideskripsikan bertambah, yaitu dari 578 bahasa berdasarkan 2.185 daerah pengamatan menjadi 646 bahasa berdasarkan 2.348 daerah pengamatan.

No.	Nama Bahasa	Wilayah Pemakaian
1.	Asilulu	Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat
2.	Ambalau	Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan
3.	Balkewan	Dusun Balakeu, Kabupaten Seram Bagian Timur
4.	Banda	Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara
5.	Barakai	Kepulauan Aru
6.	Bobat	Desa Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur
7.	Buru	Pulau Buru
8.	Damar Timur	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
9.	Dawelor	Desa Wiratan, Kabupaten Maluku Barat Daya
10.	Dobel	Desa Dobel, Kabupaten Kepulauan Aru
11.	Elnama	Desa Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur
12.	Emplawas	Desa Emplawas, Kabupaten Maluku Barat Daya
13.	Fordata (Iyaru)	Pulau Larat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
14.	Hoti	Desa Hoti, Kabupaten Seram Bagian Timur
15.	Illiu (Il'iiuun)	Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
16.	Kaham	Desa Ake Ternate, Kabupaten Maluku Tengah
17.	Karey	Desa Karey, Kabupaten Kepulauan Aru
18.	Kayeli	Desa Kayeli, Kabupaten Pulau Buru
19.	Kei	Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
20.	Kola	Kabupaten Kepulauan Aru
21.	Kur	Desa Lokwirin, Kabupaten Maluku Tenggara
22.	Leinam	Kampung Adabai, Kabupaten Seram Bagian Timur
23.	Letti	Desa Tutukey, Wonreli, Jerusu, dan Arwala, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
24.	Lola	Desa Lola, Kabupaten Kepulauan Aru.
25.	Loon	Negeri Latea, Kabupaten Maluku Tengah

26.	Luhu	Desa Luhutban, Buano, Waysala, dan Kaibobo, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat
27.	Marlasi	Desa Marlasi, Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru
28.	Marsela Barat	Desa Latalora Besar, Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya
29.	Marsela Tengah	Pulau Marsela, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
30.	Marsela Timur	Desa Marsela, Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya
31.	Naulu	Desa Sepa, Negeri Amahai, Kab. Maluku Tengah
32.	Nila	Desa Kokroman, Kecamatan Neon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah
33.	Oirata	Maluku Tenggara Barat
34.	Oroyliye	Desa Kroing, Pulau Babar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
35.	Piru	Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat
36.	Salas	Desa Salas, Kabupaten Seram Bagian Timur
37.	Saleman	Desa Sawai dan Desa Saleman, Kab. Maluku Tengah
38.	Samasuru	Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah
39.	Selaru	Pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
40.	Seluwarsa	Pulau Yamdena Barat, Kab. Maluku Tenggara Barat
41.	Seram	Desa Waru, Desa Geser, dan Desa Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur
42.	Serili	Desa Serili, Kec. Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya
43.	Serua	Desa Serua, Kabupaten Maluku Tengah
44.	Tagalisa	Desa Skikilale, Kabupaten Pulau Buru
45.	Tarangan Barat	Desa Uta, Desa Kilimoy, dan Desa Vatural, Kabupaten Seram Bagian Timur
46.	Telaah Babar Barat	Desa Telaah dan Desa Imroing, Babar Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
47.	Yalahatan	Desa Yalahatan, Kabupaten Maluku Tengah
48.	Yamdena	Desa Waraloin, Desa Taniwel, Desa Hulung di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Desa Olit Lama di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
49.	Yatoke	Desa Yatoke, Kabupaten Maluku Barat Daya

Wilayah	Jumlah Bahasa
Papua	375
NTT	68
Kalimantan	53
Sulawesi	53
Maluku	65
Sumatra	21
Jawa	6
NTB	4
Bali	1
Jumlah	646

Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia
(Pusbanglin, Badan Bahasa, 2016)

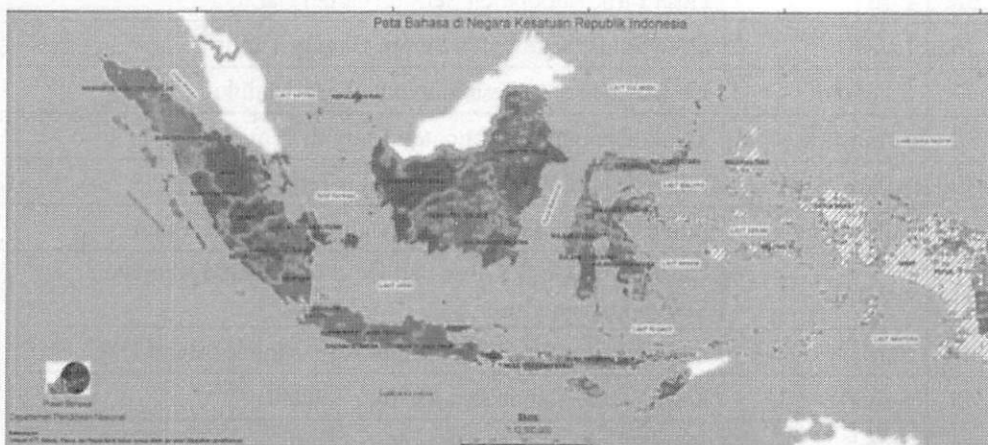
Bahasa	Jumlah Penutur	Persentase
Jawa	68.044.660	31,79 %
Sunda	32.412.752	15,1 %
Melayu	7.901.386	3,6 %
Madura	7.743.533	3,6 %
Minang-kabau	4.232.226	1,98 %
Bali	3.371.049	1,57 %
Batak	3.318.360	1,55 %
Betawi	2.244.648	1,05 %
Bahasa-bahasa asal Papua	1.643.325	0,77 %
Bahasa-bahasa asal Maluku	1.616.240	0,76 %

Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama,
dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia
(BPS: 2011)

□ 79,5 % masih berkomunikasi sehari-hari di rumah tangga dengan menggunakan bahasa daerah,

□ Dari 646 bahasa daerah yang telah di dokumentasikan dan dipetakan, baru 52 bahasa yang telah dipetakan vitalitasnya (2011– 2016)

- Aman (12 bahasa)
- Mengalami kemunduran (15 bahasa)
- Rentan (3 bahasa)
- Terancam Punah (15 bahasa)
- Kritis (9 bahasa)
- Punah (13 bahasa)



4. Bahasa Daerah Di Maluku

- 1) Terdapat **48 bahasa** daerah di Provinsi Maluku **dari 11 kabupaten** dan **kota**.
- 2) Urutan **ketiga** terbanyak setelah Provinsi Papua (348 bahasa daerah) dan
- 3) Provinsi Nusa Tenggara Timur (67 bahasa daerah).

Sumber:

Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia (Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, 2016)

Kondisi Bahasa Daerah di Maluku

No.	Bahasa	Pulau	Status
1.	Banggoi	Seram	Terancam Punah
2.	Piru	Seram	Terancam Punah
3.	Hulung	Seram	Terancam Punah
4.	Amahai	Seram	Terancam Punah
5.	Fogi	Seram	Terancam Punah
6.	Teun	Buru	Terancam Punah
7.	Lisela	Buru	Terancam Punah

No.	Bahasa	Pulau	Status
1.	Moksela	Buru	Punah
2.	Palumata	Buru	Punah
3.	Kayeli	Buru	Punah
4.	Hukumina	Buru	Punah
5.	Loun	Seram Barat	Punah

Faktor Kepunahan Bahasa

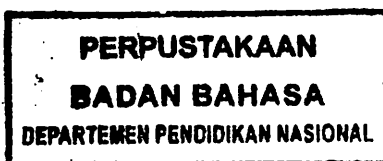
- 1) Penyusutan jumlah penutur
- 2) Perang
- 3) Bencana alam yg besar
- 4) Kawin campur antarsuku, dan sikap bahasa penuturnya
- 5) Faktor Geografis
- 6) Peubah lain

6. Tantangan Pelindungan Bahasa Daerah di Maluku

- 1) Banyak daerah (negeri) yang masyarakatnya tidak dapat menuturkan **bahasa daerah**.
- 2) Masyarakat negeri telah beralih dari **bahasa daerah** ke **bahasa Indonesia**. Negeri yang telah meninggalkan **bahasa daerah** umumnya terjadi di wilayah Maluku Tengah seperti di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Buru Selatan, serta Pulau-Pulau Lease (Haruku, Saparua, dan Nusalaut).
- 3) Banyak penduduk Provinsi Maluku yang semula berasal dari wilayah-wilayah di sekitar Provinsi Maluku. Penduduk tersebut berasal dari

etnik Sula, Cia-Cia, Wakatobi, Bugis, Makassar, Wolio, Jawa, Sunda, Flores, dan sejumlah etnik lainnya. Pada ranah keluarga, etnik-etnik tersebut menggunakan **bahasa daerah** masing-masing.

- 4) Hingga saat ini belum ada sensus jumlah penutur **bahasa daerah** di Maluku. Oleh karena itu, tidak ada data akurat mengenai jumlah penutur per **bahasa daerah**. Oleh karena itu, data yang digunakan untuk menyebutkan jumlah penutur per bahasa adalah data perkiraan yang bersumber dari Raja-Raja Negeri atau pemerintah desa setempat.



PELINDUNGAN BAHASA DAN REVITALISASI BAHASA: CAGAR BAHASA ATAU GERAKAN BAHASA?

James T. Collins

Universitas Kebangsaan Malaysia

1. Pengenalan

Dalam 50 tahun terakhir ini, warga Maluku sudah mengalami banyak perubahan. Kampus Unpatti yang ditinggalkan oleh insinyur Soviet dalam keadaan belum rampung, sudah diselesaikan dan dimanfaatkan, kemudian dimusnahkan dan akhirnya dibangun kembali. Penyeberangan dari Galela ke kampus di Poka dengan perahu semang sudah digantikan dengan feri dan sekarang dengan jembatan megah. Jumlah penduduk Maluku yang sekitar 700.000 orang 50 tahun lalu sekarang sudah melebihi 1.700.000 orang.

Tentu saja, ketiga perubahan tersebut hanya contoh yang membayangkan pembangunan dan perkembangan yang luar biasa, terutama pada infrastruktur, seperti transportasi, pendidikan, komunikasi, dan struktur demografi yang juga berubah dengan cepat. Di tengah-tengah peningkatan infrastruktur dan pengembangan tenaga manusia di Maluku, ada juga perubahan lain yang tidak melibatkan aspek material tetapi aspek mental. Selama 50 tahun terakhir ini, kita sudah menyaksikan banyak perubahan sikap dan pandangan tentang bahasa daerah.

Sebagian masyarakat Maluku tidak menghayati pentingnya bahasa daerah sampai mereka tidak menurunkan bahasa leluhur mereka kepada anaknya. Apakah sikap ini yang mendorong panitia Kongres Bahasa Daerah Maluku untuk memilih tema “Pelindungan bahasa-bahasa daerah sebagai aset dan jati diri bangsa”? Hanya

sesuatu yang terancam dalam keadaan bahaya yang memerlukan suaka, yang wajar dilindungi, bukan?

Dalam peredaran waktu 50 tahun ini, sudah beberapa bahasa yang memang telah hilang. Sudah berapa *negri* yang kehilangan penutur terakhir bahasa leluhur mereka, walaupun masih ada sejumlah kecil penutur di lokasi lain. Sudah tampak jurang antargenerasi dalam hal menggunakan bahasa daerah. Mungkin kenyataan seperti ini yang mewarnai tema yang positif, tetapi berimplikasi negatif dan bernuansa tegang ini: Pelindungan bahasa daerah.

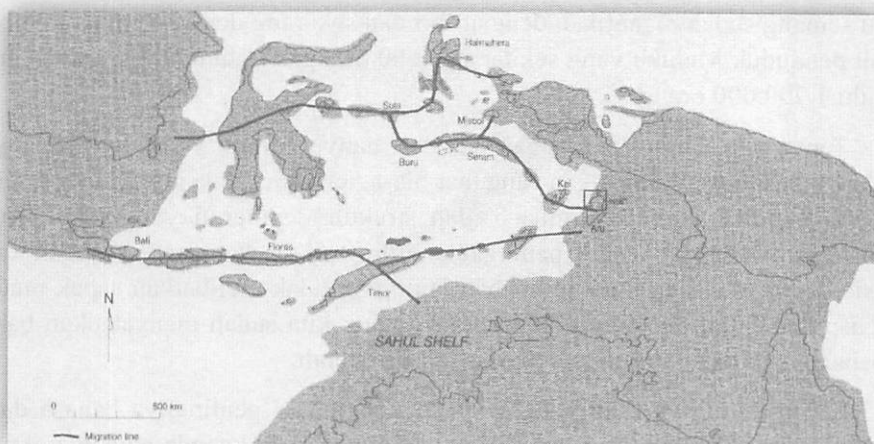
Dalam makalah ini, akan ditinjau tiga topik yang saling berkaitan:

1. Diversitas bahasa di Maluku;
2. Dokumentasi bahasa; dan,
3. Revitalisasi bahasa.

Keberagaman bahasa di Maluku memang mengagumkan. Masyarakat Maluku sebaiknya memikirkan makna dan peran keberagaman ini dalam jaringan sejarah, malah spiritual, yang mengikat semua penduduk Maluku.

2. Diversitas Bahasa di Maluku

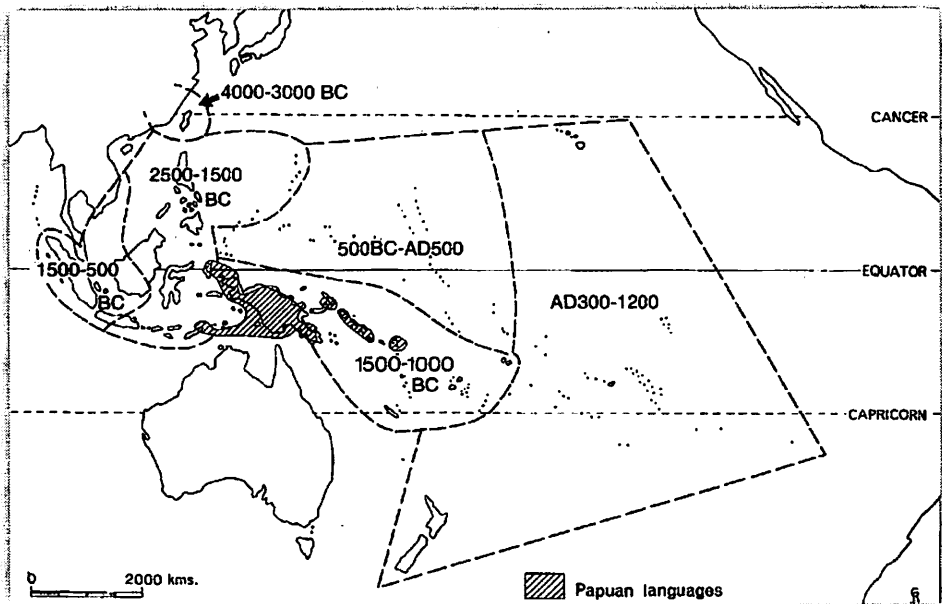
Dengan menanggung risiko besar dan menghadapi mara bahaya di laut dan di darat, umat manusia mulai mengisi Kepulauan Maluku 40.000—65.000 tahun lalu.¹ Bangsa **Australo-Melanesia** ini bermigrasi dalam jumlah yang besar dari daratan Asia ke Kepulauan Maluku dan selanjutnya mendirikan permukimannya di berbagai pulau. Malah, sebagian migran purba ini melanjutkan perjalanannya untuk merintis dan menempati hutan belantara Papua dan gurun kering Australia. Arus migrasi monumental itu diperlihatkan dalam Peta 1.



Peta 1. Migrasi manusia Australo-Melanesia (Birdsell, 1977).

¹ Baru-baru ini sudah dikemukakan bukti arkeologi bahwa migrasi ini, “the largest maritime migration yet undertaken” malah mulai 65.000 tahun lalu (Clarkson dkk., 2017).

Migrasi martimi Australo-Melanesia yang menakjubkan itu disusuli puluhan ribu tahun kemudian dengan arus migrasi besar kedua. Berdasarkan bukti arkeologi dan linguistik komparatif, sekitar 4.000 tahun lalu, bangsa, yang dikenal dengan nama **Austronesia**, berlayar dari Pulau Taiwan ke arah selatan. Di Nusantara dampak perpindahan massal kedua ini awalnya dirasakan di Kepulauan Filipina dan Kepulauan Maluku. Wilayah di periferi timur itu mulai didiami bangsa Austronesia pada 2.000 SM (Bellwood, 1997:92).² Simak saja Peta 2.



Peta 2. Tahap migrasi Austronesia dari Pulau Taiwan (Bellwood, 1997:118).

Perhatikan bahwa bangsa Austronesia bermigrasi ke Kepulauan Maluku sebelum terjadi migrasi Austronesia di Nusantara Barat (Sumatra dan Jawa). Karena migrasi berpunca dari Taiwan ke arah selatan, faktor geografi ini menentukan bahwa arus perpindahan di Nusantara Barat hanya mulai terjadi 500-1.000 tahun sesudah migrasi di Maluku dan Nusantara Timur menurut Bellwood (1997). Masyarakat Austronesia purba itu memasuki wilayah yang sudah ditempati oleh komunitas Australo-Melanesia di Maluku dan berasimilasi dengan populasi pertama di wilayah itu. Interpretasi ini sudah diterima umum oleh ahli ilmu purbakala dunia. Setelah bergabung dengan penduduk pertama di Maluku dan beberapa daerah lain di Nusantara Timur, bahasa dan budaya masyarakat gabungan itu juga berubah.

Sekian banyak inovasi linguistik membedakan bahasa Austronesia yang berpindah di Nusantara; justru itu, sekarang kelompok itu dikenal sebagai penutur

² Karena arah migrasi ini dari Taiwan ke selatan, faktor geografi ini menentukan bahwa arus perpindahan di Nusantara Barat hanya mulai terjadi 500—1.000 tahun sesudah migrasi di Nusantara Timur menurut Bellwood (1997).

bahasa Malayo-Polinesia—suatu cabang pisahan dari keluarga bahasa induknya, yaitu bahasa Austronesia (Bellwood, 1995:99). Pertanian bangsa Malayo-Polinesia itu juga berubah, disesuaikan dengan keadaan tanah dan iklim tropika. Misalnya, ketergantungan mereka pada penanaman padi harus dikurangi dengan membudidayakan keladi, sukun, pisang, ubi jalar, sagu, dan kelapa (Blust, 1984—1985). (Sila semak uraian yang lebih lengkap dalam Collins, 2014b.) Semua perubahan bahasa dan budaya ini mudah dijejaki dalam jaringan komunitas-komunitas di Maluku.

Perubahan dan asimilasi bahasa yang dinyatakan Bellwood (1995) secara umum dalam cabang bahasa Malayo-Polinesia terefleksi dalam diversitas bahasa di Maluku. Memang dari segi ilmu linguistik, keberagaman bahasa daerah di Maluku luar biasa. Hal ini sudah lama diketahui. Malah, sudah sejak kurun ke-16 (Galvão, 1544 dalam Jacobs, 1971) ditegaskan bahwa di Maluku memang terdapat banyak bahasa. Dalam surat yang tertanggal 10 Mei 1546 yang ditulis oleh Fransiskus Xaverius di Pulau Ambon ini (Sá, 1954:499) juga dinyatakan bahwa:

“Cada isla destas tiene lengua por sí y ay isla que quasi cada lugar della tiene habla diferente.”

Setiap pulau ini memiliki bahasa sendiri, malah di sebuah pulau hampir setiap kampung memiliki bahasa yang berbeda dengan yang lain.

Tentu saja pergolakan sosial yang diakibatkan strategi penjajah, termasuk perang, eksekusi mati massal, perpindahan paksa, genosida, perampasan tanah, hongi, pembudakan petani dan taktik kejam yang lainnya, telah berdampak pada daya tahan bahasa daerah.

Kita semua sudah mafhum bahwa banyak bahasa daerah di Maluku sudah punah tanpa jejak. Sesungguhnya, di seberang Teluk Ambon ini saja, bahasa yang dipuji oleh Rumphius (1701), yaitu bahasa leluhur pahlawan nasional J. Pais, sudah ratusan tahun hilang (Collins, 2003). Bahasa Hatiwe pernah mewarnai masyarakat dan kota Ambon; namun sekarang bahasa Hatiwe bukan saja tidak dituturkan lagi, tetapi juga tidak diketahui apapun tentang struktur dan kosakatanya. Hilang begitu saja.

Walau bagaimanapun, pada akhir abad ke-20, masih dapat diteliti dan didokumentasikan berbagai bahasa daerah di Maluku. Misalnya, dalam penelitian yang dijalankan pada 1977—1979, di Maluku Tengah saja tidak kurang dari **36 bahasa daerah** yang diteliti melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui bahasa leluhurnya. Untuk mengklasifikasikan bahasa-bahasa yang diturunkan dari Bahasa Maluku Tengah Purba yang pada waktu itu dituturkan di Maluku Tengah serta bagian selatan Provinsi Maluku Utara (sekarang) dan di Pulau Kei Besar (Provinsi Maluku), sebanyak 88 kampung dikunjungi (Collins, 1981a, 1981b, 1982, 1983, 1986). Peta 3 menampilkan ruang geografis penggunaan bahasa sekerabat dalam subcabang

Maluku Tengah pada akhir abad ke-20. Peta-peta yang lenig terperinci dapat disimak dalam Collins (1983, 1986), maupun *Language Atlas of The Pacific Area* (Wurm dan Hattori, 1983).



Peta 3: Ruang geografisi bahasa-bahasa turunan Bahasa Maluku Tengah Purba (Disesuaikan dari Atlas Maluku, edaran Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers Utrecht, 1998).

Provinsi Maluku dan Maluku Utara diberkati 108 bahasa (SIL International, 2017).³ Sekitar 80 bahasa dari jumlah itu dituturkan di Provinsi Maluku. Atau harus kita tulis bukan “dituturkan” tetapi **pernah** dituturkan? Berdasarkan observasi penelitian pada tahun 1977—1979 itu, bahasa daerah di banyak desa sudah di ambang kepunahan pada waktu itu juga. Misalnya, dalam Collins (2017b:22—23) situasi kebahasaan di Teluk Piru, Seram Barat (Peta 4) disoroti:

Empat puluh tahun lalu di Eti hanya dua-tiga orang yang masih ingat bahasa daerahnya (salah satu varian bahasa Kaibobo); pada waktu itu dua orang narasumber itu sudah berumur 78 dan 81 tahun. Di Waesamu hanya seorang yang benar-benar dapat bertutur dalam bahasa Kaibobo (varian Waesamu); umurnya pada waktu itu sudah 78 tahun ... Di Hatusua dikatakan ada 10—20 orang yang berumur 50 tahun ke atas yang dapat mengingatkan bahasa daerahnya. Di Piru, memang ada beberapa orang yang mengaku dapat berbahasa daerah (bahasa Luhul dalam varian Pirunya), tetapi setelah mereka diuji hanya seorang yang benar-benar menguasai bahasa daerah.

Terdapat dua bahasa Teluk Piru: bahasa Luhul yang dituturkan di Luhul dan Piru, dan bahasa Pesisir Seram Barat yang ditemukan di Eti, Kaibobo, Waesamu

³ Ada juga penulis lain, yang tidak pernah melakukan penelitian di Maluku dan hanya duduk depan skrin komputernya di Jakarta sambil menggunakan prosedur mekanistik dan data statistik yang diragukan. Mahsun dkk (2008:119) menghitung hanya 51 bahasa di kedua provinsi, Maluku dan Maluku Utara. Pernyataan ini **salah** sama sekali dan merupakan bukan saja penghinaan pada kebinekaan Indonesia, tetapi juga vonis mati pada bahasa daerah Maluku yang dianggapnya bukan bahasa.

dan Hatusua (Collins, 2012). Dengan memerhatikan umur semua narasumber yang diwawancarai 40 tahun lalu, diperkirakan bahwa dari enam desa yang diteliti pada tahun 1978, bahasa daerah sekarang hanya bertahan di Luhu dan Kaibobo, serta mungkin dengan sejumlah penutur yang sudah berumur di Hatusua.



Peta 4. Teluk Piru dan sekitarnya (petikan dari peta Google).

Malah, dikhawatirkan bahwa situasi kebahasaan pada abad ke-21 ini sebenarnya lebih genting lagi di seluruh Maluku. Pada tahun 1978 kosakata bahasa Naka'ela dicatat di Kota Taniwel (pantai utara Seram). Sebelum itu bahasa Naka'ela tidak didokumentasikan sama sekali. Namun pada waktu itu, dilaporkan hanya 3 orang yang masih mengetahui bahasa itu. Diwawancarai dua orang narasumber berumur 44 tahun dan 64 tahun. Sekarang 40 tahun kemudian mungkin sudah tidak dapat memperoleh data bahasa Naka'ela lagi. Di pantai selatan Seram bagian barat teluk kedua besar sesudah Teluk Piru adalah Teluk Elpaputi. Antara beberapa bahasa yang dituturkan di pantai teluk itu 40 tahun lalu, terdapat bahasa Paulohi di pantai barat dan bahasa Haruru di pantai timur teluk Elpaputi. Data dari dua bahasa daerah asli Seram ini dicatat dan dibahas (Collins, 1983), tetapi menurut Bapak Jamil Patty (15 Mei 2014), sekarang di Desa Elpaputi (Paulohi) dan juga di kampung Haruru sudah tidak ada penutur bahasa tradisional lagi.

Gejala yang berbeda tetapi sama mengkhawatirkan dapat disaksikan di beberapa desa lain di Maluku Tengah. Memang 40 tahun lalu, bahasa Asilulu (pantai barat laut Pulau Ambon) dituturkan oleh segenap masyarakat Asilulu, Ureng, dan Hena Lima dengan populasi sebanyak 10.000 orang; malah penduduk di beberapa lokasi di pantai utara Pulau Seram, misalnya Kasi'e, Sawai, dan Besi, mempelajari

bahasa Asilulu (Collins, 2007). Namun, sekarang warga Asilulu di bawah umur 25 tahun jarang menggunakan bahasa Asilulu dan kalau mereka berbahasa Asilulu, kemampuannya dari segi morfologi dan leksikonya sangat terbatas. Musgrave (2005), Musgrave and Ewing (2010) dan tulisan lain melaporkan keadaan yang sama di desa-desa di pantai timur Pulau Ambon, seperti Tulehu. Secara impresionis, situasi yang sama dilaporkan di desa Latu dan Sepa di pantai selatan pulau Seram. Penggunaan bahasa daerah di Maluku Tengah dan mungkin kawasan lain di provinsi Maluku sedang merosot dengan drastisnya. Keberagaman bahasa di Maluku menghadapi masa depan yang gelap.

Sesungguhnya, dalam makalah yang disampaikan pada tahun 2016, ekologi bahasa di Maluku dianggap sedang mengalami **krisis kontemporer**, suatu “krisis yang tidak diduga dan sukar diatasi” (Collins, 2017b). Krisis keterancaman dan kepunahan bahasa daerah di Maluku sering diabaikan (Collins, 2011). Kalau krisis ini diperhatikan, tindakan dapat diambil; biasanya tindakan terbagi pada dua kegiatan:

- Dokumentasi, dan
- Revitalisasi.

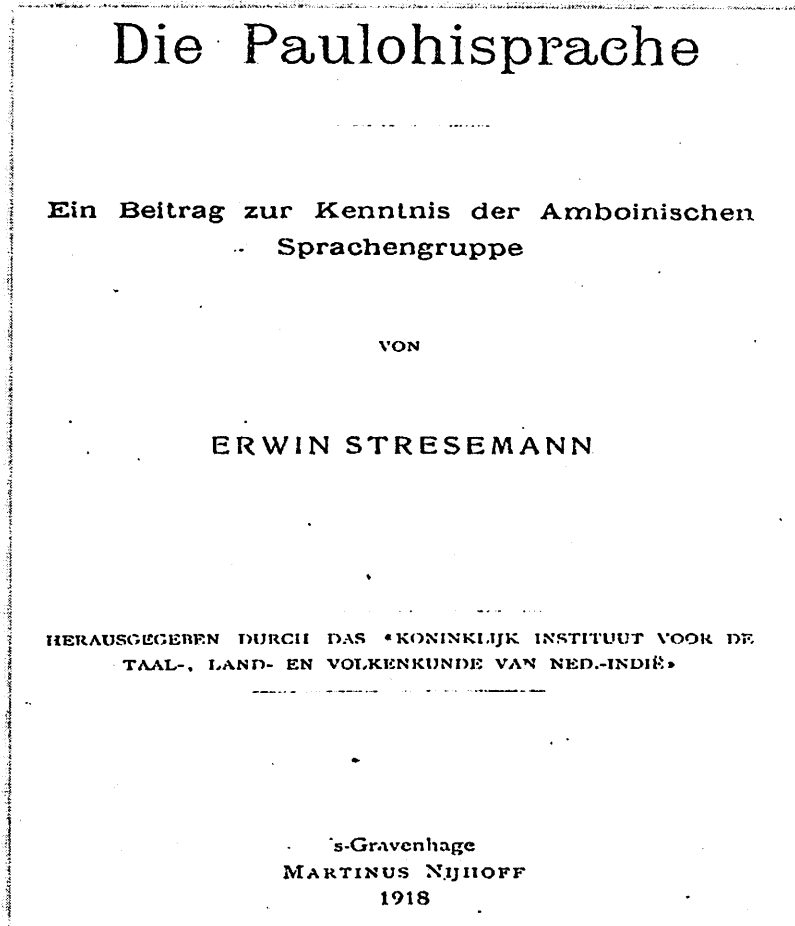
Pada kesempatan Kongres dengan tema “Pelindungan bahasa-bahasa daerah” ini, dua aktivitas ini ditinjau agar kita sama-sama memikirkan kedua usaha itu, produk yang mungkin dihasilkan, dampak yang bakal dirasakan dan komitmen yang diperlukan.

3. Dokumentasi Bahasa

Sejak pendirian ilmu linguistik modern, bahasa memang didokumentasikan. Analisis bahasa yang diteliti harus berlandaskan pada korpus data yang dicatat oleh peneliti. Biasanya korpus itu merupakan teks narasi dan kosa kata yang dicatat dan ditranskripsi. Dokumentasi bahasa yang tradisional bertahan sampai abad ke-20 tetapi pada abad ke-21 ini prosedur itu sudah mulai diganti dengan pendekatan dan metode baru.

Dokumentasi Abad ke-20. Kalau menurut prosedur ini, para linguis melakukan penelitiannya dengan kerjasama narasumber. Kadang-kadang kerjasama itu hanya dijalankan dalam format tanya-jawab untuk memperoleh kosakata atau mencari klarifikasi tentang morfologi dan tata bahasa. Akan tetapi sering juga cerita, peribahasa, teka-teki dan lagu juga dicatat, apakah melalui diktasi atau dengan alat rekam. Materi ini juga diterbitkan supaya dapat ditampilkan ‘*enough texts to permit a verification of the analysis*’ (Samarin, 1967:46). Woodbury (2003:39) menegaskan bahwa sebenarnya tujuan utama dalam penelitian dan dokumentasi tradisional ini adalah penghasilan sebuah tata bahasa dan leksikon yang hanya berstatus pengiring tata bahasa; lihat Bloomfield (1933).

Di wilayah Maluku, beberapa bahasa daerah sudah didokumenasikan pada abad ke-20. Pada era itu, Erwin Stresemann, ahli ornitologi Jerman, memang merintis penyusunan tata bahasa, sebelum dia membahas kekerabatan bahasa di Maluku Tengah. Karyanya, *Die Paulohisprache* (Stresemann, 1918), yang dihasilkan melalui kerjasama dengan Bapak Markus Mailopu, diselesaikan di Dresden (Jerman) pada tahun 1914 dan diterbitkan di Den Haag (Negeri Belanda); silakan lihat Gambar 1.

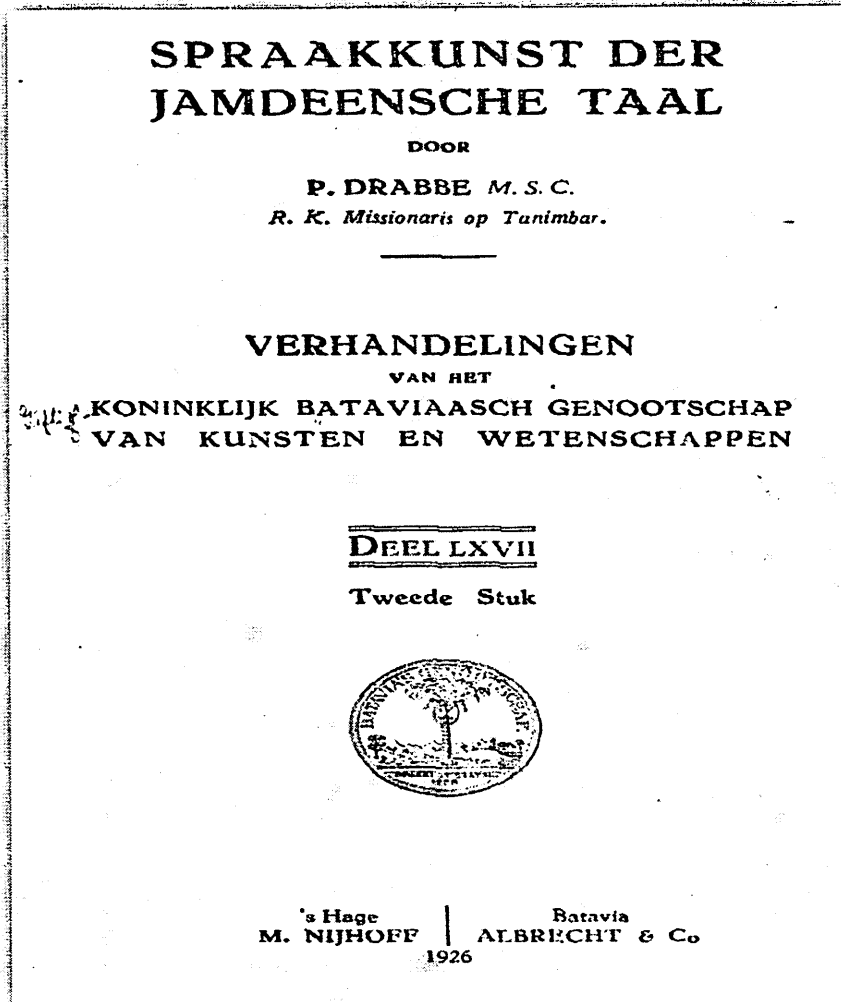


Gambar 1. Tata bahasa Paulohi, karya Stresemann (1918)

Buku ini yang setebal 243 halaman ini disusun dalam urutan yang dibayangkan di atas: tata bahasa, leksikon dan beberapa narasi. Tata bahasa ini ditulis dalam kerangka tata bahasa yang mirip dengan tata bahasa Latin.⁴

⁴ Mungkin karena bahasa daerah di Maluku Tengah biasanya memperlihatkan sistem fleksi verbal, partikel nominal yang menunjukkan status tunggal atau jamak, dan kataganti yang kadang depan kadang di belakang untuk menandakan kepemilikan (Collins, 1983; 2007), kerangka tata bahasa Latin tidak mengelirukan.

Tidak lama kemudian, buku Stresemann disusuli beberapa karya yang ditulis oleh pastor yang bertugas di Maluku Tenggara. Buku Guertjens (1921) tentang tata bahasa dan leksikon bahasa Kei dan beberapa buku Drabbe (1926a, 1926b) tentang bahasa di Tanimbar, masih dinilai penting dalam penelitian bahasa di Maluku Tenggara, misalnya tata bahasa Yamdena (Drabbe, 1926a); silakan lihat Gambar 2.



Gambar 2. Tata bahasa Yamdena, karya Drabbe (1926).

Di Maluku Tengah, selain usaha seorang antropolog Soviet, M. Chlenov (1969, 1976) dan rekannya, tidak banyak penelitian bahasa daerah sebelum tahun 1970-an. Walaupun Collins (1982, 1983, 1986 dan sebagainya) menekankan penelitian linguistik komparatif historis, usaha pada tahun 1977—1979 itu juga harus berdasarkan dokumentasi bahasa daerah. Makanya, dihasilkan juga tulisan yang

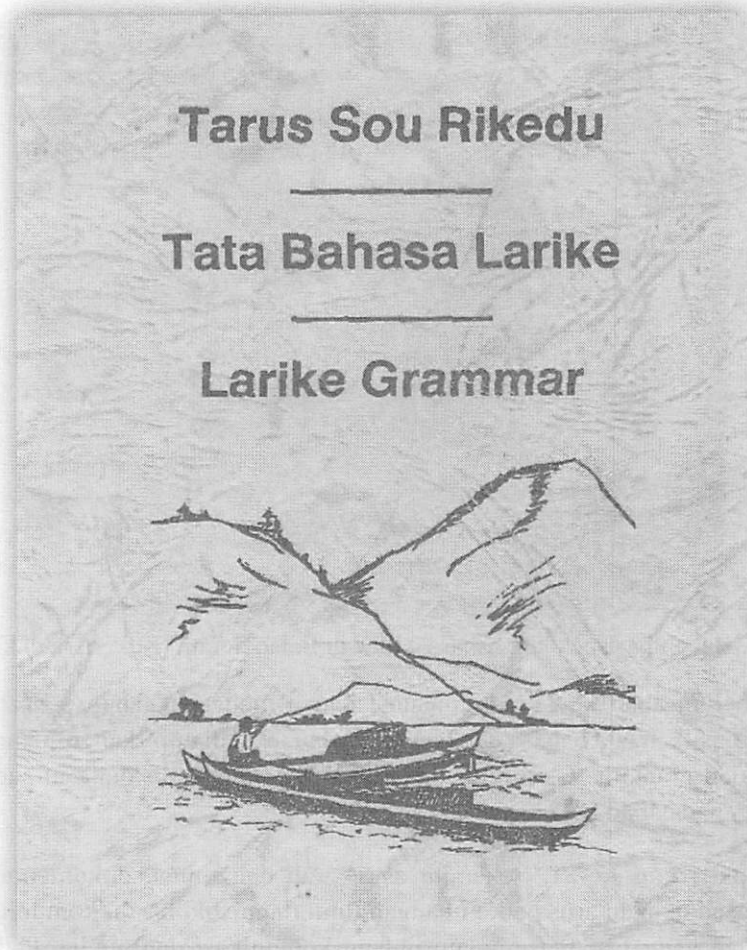
memuatkan data bahasa daerah, misalnya daftar kata enam bahasa daerah di Seram Timur dan pulau-pulau sekitarnya (Gambar 3).

	Seti	Bobot	Masiwang	Geser	Watubela	Banda
1. arm	ima-	-niman	hasan	ma	ma-	lima-
2. left	ibaYa	avet	kabalit	kubalit	balit	fitar
3. right	fiti fita	kamuin	lalait	kuanan	mela	ratu
4. leg	wai-	-yain	wai	ke	kwe-	ai-
5. walk	rak/tak	ko	uha	tangi	fana	mbo
6. path	lalam	lolan	lolon	lalano (X)	-	eren
7. come	forok	slot	boti	ratan	elat	omá
8. stir	bui	butar	hutan	futar	futal	mbutor
9. swim	nak	naky	ahás	nangu	gaha	nano
10. dirty	kailoa (A)	fofi,fofi	ba'obo?	galotak (X)	muden	monjón
11. dust	kaitaha lafna	lav	ubas	ubas	uban	ofin
12. skin	lnta	-kurit	uhit	likit	kalikit	kilit
13. back	sis-a	-kotan	karan	kotan	kotoni-	miri-
14. belly	tal- ²	-tlan	tuan	toa	kabu-	tia-
15. bone	lúil-a	-luin	lusin	ruri	luli	riri
16. intestine	tua-na	-vituan	tuan walan	utuk	utka-	tain kambun
17. liver	lali;-ata ³	-yatan	yatan	at	lamno-	raro-
18. breast	susa	-susin	susin	susu	susu	susu-
19. shoulder	mabala- (A)	-vayayan	malat	wakir	wawa-	fara-
20. know	mane	vaneta	kalelan	ruk	lunam	nbo+kaiko
21. think	bisna	fikir	ita	hi?ir (P)	-	m+fikir
22. fear	muta	mtait	katoit	matakut	matakut	mbo+takunia-
23. blood	láha	-lawa	lasa	rara	lalak	rara-
24. head	ulu- ⁴ (A)	-ulin katin (N)	ulin	lu	kulu-	ulu-
25. neck	solo-	-yonin	wosan	totolan	aliko-	enu-
26. hair	elfua	-ulin	ulin lan	uk	uka	fuk-
27. nose	ninu-	-ilin	ninin	so	hu-	nilu-
28. breathe	bo'o nawa (A)	-mesi	manowa	fai gak	fail uwak	mbilik nuwa-
29. sniff	mala	-bufmauk	mulit	fimusi	kunahi	mbok fau
30. mouth	furu-	vivin;yudin	uban	lo	hili	suo-
31. tooth	nesi-	-nifa(n)	nihan	gisik	nifo	ni-
32. tongue	lela-	-melin	leha?	kel	lama	me-
33. laugh	mamal	mli	balif?	malif	mumlifa	mbo+malik
34. weep	tatán (A)	takit	rakit	tanjís (G)	ntanji	ndaut
35. vomit	momuta	-lua	lua?	luak	luak	luako
36. spit	fito/bito	beba	batof	ginisuk	mukanihuk	mbifiru
37. eat	(k)ai	ken	kan	nga fanga	golat	mban
38. chew	lamtak (A)	mama	-	mama (G)	mamak	mamo
39. cook	bakalai (A)	-masa	hakatuln	masak	mahak	mososak
40. drink	(k)unu	niNy	nimin	inu	minu	-inu
41. bite	(k)oto	kat	kasat	karat	gukut	-iki
42. suck	sus;mo	moit;sosa	komoan	bus;sorat	bus;busa	mbuk ⁵
43. ear	tina-	talikan	talikan	tilinga	telna-	tilu-
44. hear	bulai	bloka	loka	ronan	dogan	motan
45. eye	mata	matan	mata	mata	mata	mata-
46. see	(k)ote	bla	ita	mekun	sini?	-ito
47. yawn	(k)amowo	mamawa	mumáh	maflaba	ma:f	nuak (E)
48. sleep	(k)ina	mtoly	nima	kifit	gena	muturu
49. lie down	kemeluhu	burburin	nima kanowa	bula-bula	bula bula	muturu mbolor
50. dream	mihin (A)	mnif	manih	manifi (G)	-nifi	ndososuo

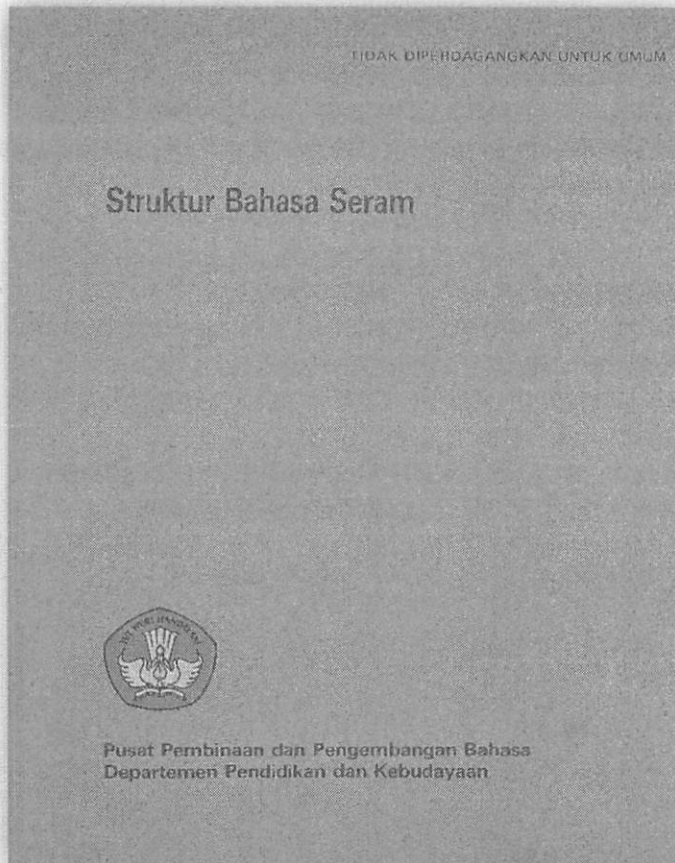
Gambar 3. Sebagian kosakata enam bahasa daerah, yakni bahasa Seti, Bobot, Masiwang, Geser, Watubela, dan Banda. (Dikutip dari Collins, 1986.)

Pada tahun 1980-an beberapa tulisan, termasuk tata bahasa dan kamus bahasa daerah Maluku, dihasilkan oleh anggota kumpulan *Summer Institute of Linguistics* (SIL). Tulisan-tulisan ini juga merupakan dokumentasi bahasa daerah dengan prosedur dan produk abad ke-20, misalnya *Tarus sou Rikedu*, karya Laidig dan Laidig (1991) yang mendeskripsikan tata bahasa Larike di pantai barat Pulau Ambon; silakan lihat Gambar 4.

Begitu juga, di bawah bimbingan Pusat Bahasa (sekarang Badan Bahasa), sarjana daerah mulai menggarap data bahasa daerah hingga menghasilkan karya yang menyumbang pada dokumentasi bahasa daerah Maluku. Misalnya, dalam Gambar 5, laporan penelitian Kakerissa dkk (1984), *Struktur bahasa Seram*, disampaikan dengan ringkas. Walaupun terdapat puluhan bahasa di Seram, rupanya “bahasa Seram” ini adalah bahasa Alune.



Gambar 4. Tata bahasa Larike (Pulau Ambon), karya Laidig dan Laidig (1991).



Gambar 5. Beberapa aspek tata bahasa Alune di Pulau Seram (Kakerissa dkk., 1984).

Sebelum abad ke-21 dokumentasi hanya mencapai tahap pencatatan data untuk menghasilkan tata bahasa dan kamus. Kalau teks dilampirkan, tujuannya hanya validasi uraian gramatis. Cara pikir dan tata kerja yang tradisional ini sudah mulai ditinggalkan pada abad ke-21.

Dokumentasi Abad ke-21. Sekarang asas, arah dan tujuan dokumentasi bahasa berubah, sesuai dengan arus perkembangan ilmu linguistik, hasrat komunitas bahasa dan kemajuan yang luar biasa dalam bidang komunikasi dan media. Pada era ini, dokumentasi harus melalui kolaborasi dengan komunitas penutur bahasa untuk menghasilkan perekaman bahasa (dokumentasi) secara audial dan video dalam berbagai konteks dan dengan beragam penutur.

Kalau dulu, penutur bahasa hanya diwawancarai dan data dipungut dan dibawa ke Jakarta atau Frankfurt atau Sydney untuk diolah, dikemas dan dipasarkan, seperti perusahaan asing menambang emas di Papua, sekarang komunitas lokal

diajak bekerja sama sepenuhnya. Gasser (2017), misalnya menulis dengan cermat tentang sambutan komunitas bahasa, terutama bahasa Wamesa dekat Manokwari, tentang usaha dokumentasinya di sana. Bukan saja izin komunitas diminta, tetapi harapan dan usulan mereka tentang proyek itu juga diperhitungkan. Gasser (2017) melaporkan:

“...An elderly speaker of Roon became emotional at the prospect of seeing his language alongside prestige varieties such as Indonesian and English on the internet.”

Ada juga warga lansia, seorang penutur bahasa Roon, yang terharu sekali ketika dia mendengar bahwa bahasanya akan tampil di internet bersama varian-varian yang berprestise seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Tahap kolegialitas yang tinggi berdampak positif dalam komunitas.

Memang fokus ilmu linguistik modern sudah lebih terbuka pada aspek sosial dalam penelitian bahasa, misalnya peran bahasa dalam suatu komunitas, pemilihan bahasa dalam masyarakat multilingual, hubungan bahasa dengan status sosial dan terutama keberagaman bahasa dan dialek di sekitar kita. Walaupun bidang sociolinguistik ini sudah dirintis sejak tahun 1960-an, hanya pada abad ini wawasannya mulai memengaruhi jenis data yang diperoleh dan cara data itu diolah. Pengaruh wawasan sociolinguistik makin kuat setelah para sarjana dan aktivis bahasa mulai sadar tentang situasi bahasa minoritas di seluruh dunia. Akhirnya sudah umum diketahui bahwa beratus-ratus bahasa minoritas terancam punah. Bukan saja di Maluku dan lokasi lain di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Diversitas bahasa yang tampak pada abad ke-20, apa lagi sebelumnya, sudah berangsur lesap. Krisis kontemporer ini sudah ditekankan dengan sorotan pada situasi Maluku dalam Bagian 1 makalah ini.

Makanya, berbagai proyek dokumentasi kurun ke-21 mengutamakan *“direct representation of naturally occurring discourse”* (Woodbury, 2003:39) dalam berbagai lingkungan. Pada saat menghadapi ancaman hilangnya warisan leluhur yang kita kenal sebagai bahasa daerah, justru perekaman wacana dalam konteks biasa dan alamiah (*“naturally occurring discourse”*), seperti dialog sesama teman, cerita pengalaman pribadi, omongan sewaktu bekerja dan bergurau, dianggap sama penting dengan dokumentasi sastra lisan tradisional—malah, mungkin lebih penting.⁵ Perekaman ini juga bukan sekadar merekam secara audial tetapi juga perekaman visual. Representasi langsung (*“direct representation”*) ini berkaitan juga dengan kemajuan teknologi pada abad ini. Perkembangan peralatan audio-visual yang kita saksikan sekarang berarti dokumentasi sebaiknya melibatkan video, selain rekaman

⁵ Woodbury (2003:46—47) menegaskan bahwa *“a good corpus is diverse; diverse in situations; in participants—people carrying various different social roles; in channels such as speech, writing, e-mail; in speech genres, including conversation, narrative, oratory, verbal art, formal and informal interaction.”*

suara. Sudah banyak alat berteknologi tinggi dan khusus yang dapat dicari untuk menghasilkan dokumentasi langsung.⁶

Perlu ditambahkan bahwa para praktisi usaha dokumentasi seharusnya mempertimbangkan dengan tuntas isu penyimpanan segala materi yang dipungutnya; semua materi ini termasuk transkripsi dan analisisnya perlu diarsipkan. Pengarsipan video dan rekaman suara yang sudah ditranskripsi tidak bertujuan mendirikan “museum bahasa”. Sebaliknya tindak lanjut pada pemungutan dan pengarsipan adalah **penyebaran**. Setiap rencana dokumentasi bahasa minoritas harus mencantumkan rincian tentang pengarsipan dan juga distribusi materi video dan rekaman audial supaya materi itu dapat dimanfaatkan baik oleh linguist maupun komunitas penutur bahasa itu.

Dapat diringkaskan bahwa, pada abad ke-21 ini, tata kerja dokumentasi bahasa menyangkut:

Perekaman (video dan audio)

Transkripsi (biasanya dalam sistem International Phonetic Alphabet)

Anotasi (tambahan informasi dari linguist)

Analisa (bahasan linguistik)

Terjemahan (dalam bahasa komunikasi yang luas penggunaannya)

Pengarsipan (umumnya arsip elektronik)

Penyebaran (Distribusi terutama melalui internet).

Semua langkah ini memerlukan waktu dan biaya. Mujur sudah terdapat beberapa badan internasional yang telah mendirikan program untuk menyokong dokumentasi bahasa minoritas yang menghadapi masa depan yang gelap. Antaranya, tercatat *Endangered Language Fund* di Amerika Serikat, *Foundation for Endangered Languages* serta *Lisbet Rausing Charitable Fund's Endangered Languages Documentation Programme*—kedua badan itu di Inggris—dan *Dokumentation Bedrohter Sprachen (DoBeS)* di Jerman. Memang sudah beberapa proyek yang pernah dijalankan di Indonesia dengan dana dari badan-badan ini, tetapi memandang jumlah bahasa minoritas di Indonesia, usaha yang sudah dilakukan jauh dari mencukupi.

3. Revitalisasi Bahasa

Menurut penjelasan yang dipaparkan di beberapa situs web yang bergiat dalam hal bahasa yang terancam punah, dokumentasi bahasa berfungsi sebagai sumber

⁶ Pada awal tahun 2017 saya diminta menilai proyek dokumentasi bahasa minoritas di Indonesia. Pembagian anggaran dalam proyek dianggap normal:

50-60%	Peralatan teknologi tinggi untuk merekam video dan sebagainya
25%	Uang perjalanan, termasuk tiket pesawat A.S.-Jakarta p.p.
15%	Honorarium konsultan dan peserta proyek lainnya.

referensi linguistik yang mampu bertahan lama dan, dengan itu, dapat menyokong:

- Pembahasan akademik tentang bahasa yang didokumentasi; serta,
- Upaya revitalisasi bahasa berbagai komunitas penutur, kalau ada komunitas yang merasa berkepentingan untuk revitalisasi.

Penyataan sedemikian membayangkan bahwa selama ini dokumentasi bahasa minoritas sebenarnya menekankan penghasilan sumber data yang dapat dimanfaatkan linguis, kalau pada kemudian hari bahasa yang terancam punah memang menjadi punah. Sepertinya, tujuan asas dan utama memang persiapan sejenis “bank bahasa”. Kalau para agronomis menyediakan bank benih untuk menyimpan benih yang akan digunakan ketika terjadi kondisi darurat atau benih tumbuhan langka yang terancam punah, tampaknya para praktisi dokumentasi menyediakan fasilitas yang berupa arsip untuk menyimpan informasi berbagai bahasa langka yang terancam punah.

Data yang didokumentasi dengan begitu cermat boleh saja digunakan oleh komunitas yang menuturkan bahasa yang terancam punah, tetapi hanya kalau komunitas itu sendiri bersungguh-sungguh mencari metode (dan dana) untuk melestarikan bahasa mereka. Maksudnya, terserah pada komunitas bahasa, apakah mereka berhasrat melestarikan bahasa leluhur mereka atau tidak—seolah-olah revitalisasi lebih merupakan suatu pikiran kemudian (*after thought*), bukan fokus utama fasilitas perarsipan yang digelar di sini sebagai “bank bahasa”.

Harus diakui memang ada akademikus yang memikirkan isu revitalisasi. Misalnya, ada beberapa tulisan perintis dokumentasi di Inggris, Prof. Peter Austin, yang mendorong rekan dan koleganya untuk berusaha menjalankan praktek dokumentasi bahasa dengan segala langkah yang diringakaskan di atas, tetapi dengan pertimbangan agar usaha itu dapat dimanfaatkan oleh komunitas penutur. Dalam tulisannya (Austin, 2016), dia mengusulkan pendekatan yang sedikit terbuka pada peran komunitas bahasa, seperti di bawah:

“...there are opportunities for language documentation to adopt a more socially-engaged approach to languages to and linguistic research, including better engagement with language revitalisation.”

“Ada juga kemungkinan bahwa usaha dokumentasi bahasa dapat memilih pendekatan terhadap bahasa dan penelitian linguistik yang lebih terarah pada masyarakat, dan lebih terkait dengan revitalisasi bahasa.

Memang ada juga sarjana yang menjalankan dokumentasi bahasa minoritas dengan partisipasi masyarakat penuturnya. Woodbury (2003:45—46), misalnya, menjelaskan proyek dokumentasi bahasa Iquito yang hanya dituturkan oleh 25 orang berumur 55 tahun (atau lebih) di hutan ulu sungai Amazon di Peru. Akan tetapi, tujuan utama proyek Iquito itu juga tetap dokumentasi dan penulisan artikel linguistik, skripsi dan kamus; lihat laporan Beier dan Lev (2006).

Perlu ditekankan di sini bahwa dokumentasi **tidak sama** dengan pelestarian. Dokumentasi berfokus pada pengumpulan materi bahasa daerah dalam berbagai format yang dapat disimpan dan dijaga. Materi (pada zaman ini biasanya materi audial dan visual) yang disimpan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh peneliti dan juga komunitas penutur bahasa tersebut. Lihat tulisan Austin (2016) tentang ciri-ciri dan prosedur dokumentasi bahasa menurut ukuran dan tuntutan kontemporer. Kalau disimak dengan cermat, ternyata dokumentasi suatu bahasa diusahakan oleh linguis untuk studi linguistik. Walau dapat diakses oleh komunitas penutur bahasa itu, biasanya tidak ada dorongan dari para linguis supaya materi itu dimanfaatkan oleh komunitas penutur hingga partisipasi komunitasnya terbatas.

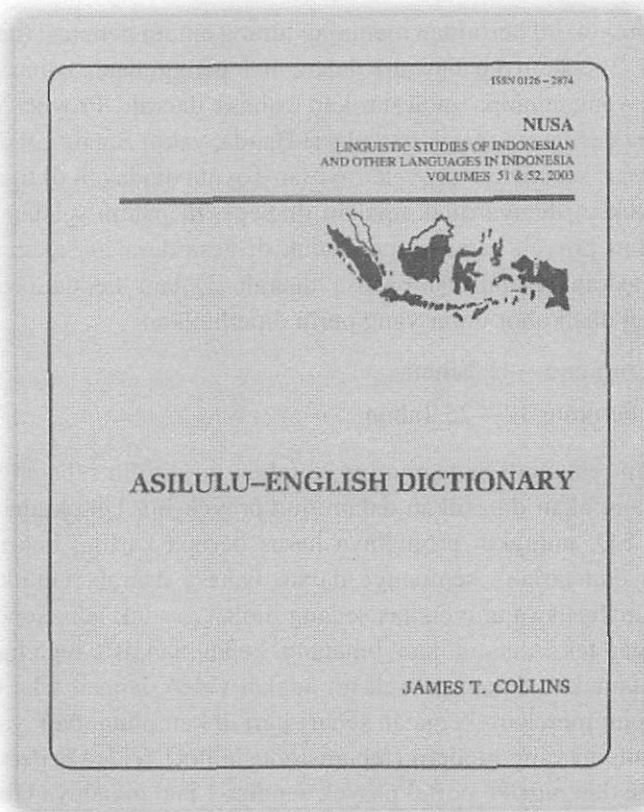
Padahal pelestarian atau revitalisasi bahasa daerah seharusnya tidak menekankan penyimpanan dan penjagaan bahasa. Revitalisasi bukan urusan permuseuman atau bank bahasa untuk para linguis, tetapi usaha pemberdayaan masyarakat. Revitalisasi bahasa yang terancam punah harus diutamakan. Revitalisasi wajar diurus duluan, bukan revitalisasi hanya muncul sebagai pikiran kemudian. Sebenarnya, bahasa suatu komunitas penutur hanya dapat dipertahankan dan dilestarikan kalau komunitas itu sendiri berpegang pada komitmen untuk memperjuangkan kelanjutan bahasa leluhur mereka. Pendek kata, komunitas penutur mesti berikhtiar dan terikat secara batin pada penggunaan, pengembangan dan penyebaran bahasa mereka melintas generasi. Komitmen individu dan komunal itu seharusnya menjelma dalam bentuk aktivitas yang mendidik dan meyakinkan orang lain dalam komunitas itu untuk berbahasa daerah dengan anak dan cucunya serta menggunakan dan mengembangkan bahasa itu.

Peranan LSM dan badan pemerintah terletak pada dua tugas dasar: pertama, menyadari anggota komunitas tentang pentingnya bahasa daerah; dan, kedua, mendanai proyek yang bertujuan melestarikan bahasa daerah. Selanjutnya, LSM dan pemerintah dapat melatih anggota komunitas agar mereka menentukan **sarana** yang perlu digunakan dan juga mengidentifikasi **kohor** atau kelompok dalam komunitas yang harus difokus usahanya. Konsep dan usaha revitalisasi ini sudah lama disebut-sebut di Maluku. Namun, pengertian konsep reviatlisasi berbeda-beda.

Umpamanya, kalau berceramah tentang pelestarian bahasa daerah, ada saja komentar dan usulan tentang pentingnya penyusunan kamus bahasa daerah. Akan tetapi, komentar tentang kamus seperti ini menunjukkan bahwa mereka yang bertanya dan mengusul belum memikirkan **kohor** dalam komunitas yang harus ditargetkan untuk melestarikan bahasa dan juga belum menentukan **sarana** yang sesuai untuk kohor itu. Kamus yang lengkap dan tuntas memang mengagumkan, malah berdiri seakan-akan monumen pada suatu bahasa. Namun, monumen tidak mencetuskan komitmen pada pelestarian karena kamus yang sudah dicetak termasuk dokumentasi bahasa, bukan revitalisasi bahasa. Siapa yang akan membeli dan menyimpan kamus bahasa daerah? Kohor dalam komunitas yang sudah berumur, yang sudah

puluhan tahun menjadi penutur bahasa daerah! Apakah kohor lansia ini yang akan menyambung tradisi berbahasa daerah?

Pada tahun 2007, dengan jumlah hadirin sekitar 100 orang, kamus Asilulu-Inggris diluncurkan dengan mewahnya di lantai atas Kantor Gubernur Maluku. Kamus itu diusahakan sejak tahun 1972 dan malah memperoleh dana khusus dari Departemen Pendidikan Amerika Serikat (Fulbright-Hays Research Abroad Award, 1986-1987) serta sokongan uang dari Universitas Hawaii dan Universitas Cornell. Beberapa orang mahasiswa di Amerika dan Malaysia membantu mengedit dan mengolah kamus itu (Collins, 2014a). Universitas Atma Jaya di Jakarta membiayai sepenuhnya penerbitannya. (Lihat Gambar 6.) Namun, 10 tahun kemudian tidak ada lanjutannya. Di Ambon dan di Asilulu mungkin tidak sampai 10 eksemplar kamus Asilulu yang dapat ditemukan. Rencana menerbitkan versi tribahasa (Asilulu-Indonesia-Inggris) tidak terlaksana. Tidak ada kamus bahasa Maluku lain yang mengikuti pola dan kerangka kamus itu. Kamus itu berfungsi sebagai monumen pada suatu bahasa yang sekarang sudah jarang digunakan oleh generasi muda di Asilulu sendiri.



Gambar 6. Kamus Asilulu-Inggris, mongraf NUSA jilid 51—52.

Sebenarnya, kalau kita bermaksud melestarikan suatu bahasa daerah, terdapat langkah atau prosedur yang wajar dipatuhi. Pertama, seperti yang dibayangkan di atas harus dipertimbangkan **kohor** yang didasarkan dan **sarana** yang sesuai untuk kohor itu. Selanjutnya harus direncanakan pendekatan dan metode, kemudian menentukan sumber dana.

Sejak tahun 2015, peneliti lapangan berbangsa Indonesia, dengan kerjasama seorang dua sarjana asing, telah bergiat dalam dua proyek yang secara khusus merintis metode dan strategi untuk merevitalisasi bahasa daerah di Maluku. Proyek pertama, **Language networks' and variation of the Bandanese, Eastern Indonesia** (Jaringan bahasa dan varian Banda, Indonesia Timur), didanai oleh Yayasan Kone di Finlandia, di bawah pimpinan Profesor Timo Kaartinen (Universitas Helsinki). Proyek kedua, **Attitudes Towards Language Choice and Ethnicity: Multigenerational Divergence and Rapprochement** ("Sikap terhadap Pemilihan Bahasa dan Etnisitas: Keterpisahan Antargenerasi dan Penyatuan Kembalinya"), dibiayai oleh Yayasan Toyota di Jepang, di bawah pimpinan Dr. Chong Shin (Universitas Kebangsaan Malaysia). Lihat Collins (2017a) tentang dua proyek ini.

Kedua proyek ini bertujuan meninjau jurang antara generasi tua dan angkatan muda (berumur 25 tahun ke bawah) dalam hal penggunaan bahasa daerah serta mencari sarana yang mampu melestarikan bahasa daerah. Proyek Yayasan Kone dijalankan di dua desa yang masih berbahasa Banda, yakni Banda Eli dan Banda Elat di Pulau Kei Besar; sedangkan proyek Yayasan Toyota diadakan di tiga lokasi, tetapi di Maluku proyek ini hanya dilaksanakan di Sepa, di pantai selatan Pulau Seram. Melalui usaha tim proyek bersama penduduk di desa-desa itu, akan dicari strategi untuk menggerakkan revitalisasi bahasa daerah. Dalam kedua proyek ini telah teridentifikasi dua kohor umur yang perlu diperhatikan:

Anak berumur 5—11 Tahun

Remaja berumur 12—25 Tahun.

Anak dan remaja di bawah umur 25 tahun ini dipilih sebagai sasaran utama untuk produk yang akan dihasilkan dalam dua proyek ini. Untuk anak-anak PAUD sampai dengan SD, mungkin produknya harus berupa kartun, buku komik, buku mewarnai, lagu dan tarian—semuanya dalam bahasa daerah. Untuk remaja SMP sampai dengan mahasiswa universitas sedang diolah produk lain, seperti buku kecil berilustrasi dengan teks tentang ikan, binatang, kendaraan dsb, juga baju kaos. Akan tetapi, yang diutamakan dalam proyek ini adalah video dengan teks bahasa daerah di bawah; video ini merekam kegiatan sehari-hari di kampung, baik yang tradisional (pukul sagu) maupun yang modern (reparasi mesin bot). Video seperti itu diunggah ke situs YouTube dan juga ke portal proyek sendiri. Lihat misalnya Gambar 7.



Gambar 7. Video “makan sirih” dalam bahasa Sepa.

Selain itu, berbagai aktivitas, seperti lomba lagu, pidato, dan sebagainya dalam bahasa daerah masih dalam proses negosiasi dengan pihak sekolah di desa masing-masing. Proses sosialisasi proyek juga sudah dimulai.

Semua usaha ini dijalankan oleh tim remaja yang berasal dari desa itu juga melalui kerjasama yang erat antara tim remaja dengan generasi tua (nenek dan kakek mereka sendiri). Kedua proyek ini masih dikembangkan, malah diubah dan disesuaikan dengan situasi di desa pilihan. Yang penting orang lokal bergotong royong untuk melestarikan bahasa lokal melalui komitmen dan ide mereka. Berbeda dengan dokumentasi, yang diutamakan memang revitalisasi. Kalau ada dokumentasi, itu dalam dua proyek ini, hal itu hanya *spin off* (hasil tambahan) dari prioritas: REVITALISASI BAHASA DAERAH.

4. Penutup

Pemahaman dan penghayatan warga Maluku sendiri tentang diversitas bahasa yang memang merupakan lingkungan sosial mereka adalah ideologi bahasa yang **akomodatif**. Pluralitas kebahasaan wilayah ini disambut oleh penduduknya dengan tenang, malah dengan penilaian yang positif. Bukan sedikitnya warga Maluku yang menguasai beragam bahasa. Usaha untuk menyederhanakan kompleksitas lingkungan bahasa di Maluku harus ditegur dan ditantang. Ideologi yang menafikan diversitas bahasa harus ditolak.

Sudah sampai waktunya diusahakan langkah pelestarian bahasa daerah, mungkin saja perubahan loyalitas bahasa akan berlaku dengan lebih cepat dan pemudaran pada semaraknya bahasa dan budaya tradisional yang terbayang dalam kosa katanya yang semakin menghilang akan terjadi tanpa diduga, tanpa disadari. Mudah-mudahan usaha revitalisasi itu tidak terlambat. Sesungguhnya, peredaran zaman tidak akan menunggu insan yang lamban dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga warisan imajinasi dan konseptualisasi leluhur. Jangan sampai ideologi anti-kebinekaan menjadi kenyataan. Pluralitas bahasa memang warisan leluhur.

Daftar Pustaka

- (Atlas Maluku). 1998. *Atlas Maluku*. Utrecht: Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers.
- Beier, C. dan Lev Michael. 2006. *The Iquito Language Documentation Project: Developing Team-Based Methods for Language Documentation*. *Linguistic Discovery* 4 (1), <http://journals.dartmouth.edu/cgi-bin/WebObjects/Journals.woa/xmlpage/1/article/303?htmlOnce=yes>
- Bellwood, P. 1995. *Austronesian Prehistory in Southeast Asia: Homeland, Expansion and Transformation*, dalam *The Austronesian: Historical and Comparative Perspectives*, diedit oleh P. Bellwood et al. hlm. 96—111. Canberra: Australian National University.
- Bellwood, P. 1997. *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Bloomfield, Leonard. 1933. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Birdsell, J.B. 1977. *The Recalibration of a Paradigm for the First Peopling of Greater Australia*. Dalam *Sunda dan Sahul: Prehistoric Studies in Southeast Asia, Melanesia and Australia*, diedit oleh J. Allen et al., hlm. 113—167. London: Academic Press.
- Blust, R.A. 1984—1985. *The Austronesian Homeland: A Linguistic Perspective*. *Asian Perspectives* 26:45—67.

- Chlenov, M.A. 1969. *Ocherki po Etnicheskoi Istorii Narodov tsentral'nykh Molukk (Indoneziia)*. Moscow, disertasi.
- Chlenov, M.A. 1976. *Naseline Molukkskikh Ostrovov*. Moscow: Nauka.
- Clarkson, C., B. Marwick, L. Wallis, R. Fullagar dan Z. Jacobs. 2017. *Buried Tools and Pigments Tell a New History of Humans in Australia for 65,000 Year*. *Scientific American*. 20 Juli 2017. <https://www.scientificamerican.com/article/buried-tools-and-pigments-tell-a-new-history-of-humans-in-australia-for-65-000-years/>
- Collins, James T. 1981a. *Preliminary notes on Proto-West Central Maluku: Buru, Sula, Taliabo and Ambelau*, in *Historical linguistics in Indonesia*, Part I, edited by R. A. Blust. NUSA 10:31—45. Jakarta: Badan Penyelenggara Seri NUSA.
- Collins, James T. 1981b. *Prothesis in the Languages of Central Maluku: An Argument from Proto-Austronesian Grammar*, in *Papers from the Third International Conference on Austronesian Linguistics*. Vol 2, *Tracking the Travellers*, edited by Amran Halim et al. *Pacific Linguistics* C75:187—200. Canberra: The Australian National University.
- Collins, James T. 1982. *Linguistic Research in Maluku: A report of recent fieldwork*. *Oceanic Linguistics* 21:73—146.
- Collins, James T. 1983. *The Historical relationships of the Languages of Central Maluku, Indonesia*. *Pacific Linguistics* D47. Canberra: The Australian National University.
- Collins, James T. 1986. *Eastern Seram: A Subgrouping Argument*, in *Focal II: Papers from the Fourth International Conference on Austronesian Linguistics*, edited by P. Geraghty and L. Carrington. *Pacific Linguistics* C94:123—146. Canberra: The Australian National University.
- Collins, James T. 2003. *Language death in Maluku: The Impact of the VOC*. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 159:247—289.
- Collins, James T. 2007. *Asilulu-English dictionary*. NUSA Volumes 51—52. Jakarta: Badan Penyelenggara Seri NUSA, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Collins, James T. 2011. *Maluku Development and Locality: Culture and Language in the Islands*. In *Seminar Internasional: Peran Program Pascasarjana dalam Pembangunan Masyarakat Kepulauan secara Berkelanjutan*, pp. 8—19. Ambon: Universitas Pattimura.

- Collins, James T. 2012. *The Languages and Dialects of Piru Bay, Seram: Endangered and Extinct*. In Bahren Umar Siregar, P. Ari Subagyo and Yassir Nasanius (editors), *Dari Menapak Jejak Kata Sampai Menyigi Tata Bahasa: Persembahan untuk Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo dalam rangka Ulang Tahunnya yang ke—60*, pp.149—183. Jakarta: Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Collins, James T. 2014a. *Shifts, Drifts, Mutability: On 40 Years of Research in Indonesia and Malaysia*. Makalah yang disampaikan di Council on Southeast Asian Studies, Universitas Yale, Amerika Serikat, 27 Maret, 2014.
- Collins, James T. 2014b. *Keragaman Bahasa dan Kesepakatan Masyarakat: Pluralitas dan Komunikasi*. Makalah yang disampaikan di Konferensi Pendidikan Berbasis Keragaman Budaya, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 November 2014.
- Collins, James T. 2017a. *Documentation and Revitalization of Indonesia's Minority Languages: A Tale of two Projects*, Kuliah umum yang disampaikan di Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin, 28 April 2017
- Collins, James T. 2017b. *Diversitas Bahasa Sekerabat di Maluku Tengah: Kenyataan Diakronis, Krisis Kontemporer*. Dalam *Prosiding Simposium Internasional Bahasa, Sastra dan Budaya*, diedit oleh Ni Made Sri Setyawanti dkk, Hlm 12—30. Kendari: Universitas Halu Oleo dan Asosiasi Peneliti Bahasa-Bahasa Lokal.
- Drabbe, P. 1926a. *Spraakkunst der Jamdeensche taal*. Weltevreden: Albrecht & Co.
- Drabbe, P. 1926b. *Spraakkunst der Fordatsche taal*. Weltevreden: Albrecht & Co.
- Gasser, Emily. 2017. *The Right to Say yes: Language Documentation in West Papua*. *Australian Journal of Linguistics* 37:1—25
- Guertjens, H. 1921. *Spraakleer der Keieesche taal*. Weltevreden: Albrecht & Co.
- Jacobs, Hubert Th.Th.M. 1971. *A Treatise on the Moluccas (c.1544), Probably the Preliminary Version of Antonio Galvão's lost Historia das Molucas. Sources and Studies for the History of the Jesuits*. Vol. 3. Rome: Jesuit Historical Institute.
- Kakerissa, O. dkk. 1984. *Struktur bahasa Seram*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa.
- Laidig, Wyn, D. dan Carol J. Laidig. 1991. *Tarus sou Rikedu. Tata bahasa Larike. Larike Grammar*. Ambon: Unpatti-SIL.

- Mahsun dkk. (Ed.) 2008. *Bahasa dan Peta bahasa di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional.
- Musgrave, Simon. 2005. Possession in Souw Amana Teru: Internally and externally motivated change. *Monash University Linguistics Papers* 4 (1): 21—32.
- Musgrave, Simon and M.C. Ewing. 2006. Language and Religion: A Case Study of two Ambonese Communities. *International Journal of the Sociology of Language* 179:179—194.
- Nettle, Daniel dan Suzanne Romaine. 2000. *Vanishing voices: The extinction of the world's languages*. Oxford: Oxford University Press.
- Rumphius, G.E. 1701. *Het Amboinsch kruid-boek*. Amsterdam: Meinard Uytwerf.
- Sá, Artur Basílio de. 1954. *Documentação para a História das Missões do Padroado Português do Oriente. Insulindia*. Jilid 1, [1506—1549]. Lisbon: Agência Geral do Ultramar.
- Samarin, William J. 1967. *Field Linguistics, a Guide to Linguistic Field Work*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sierp, A. 2008. *Minority Language Protection in Italy: Linguistic Minorities and the Media*. *Journal of Contemporary European Research* 4 (4):303—321.
- [SIL International]. 2017. *Ethnologue. Languages of the World*. <https://www.ethnologue.com/country/ID/maps>
- Stresemann, E. 1918. *Die Paulohisprache. Ein Beitrag zur Kenntnis der Ambonischen Sprachengruppe*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Vasquez Soto, Veronica. 2010. *Documenting Different Genres of Oral Narrative in Cora (Uto-Aztecan)*. Dalam *Language Documentation: Practice and Values*, Lenore A. Grenoble dan N. Louanna Furbie (ed.), Hlm. 75—88. Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.
- Woodbury, Anthony C. 2003. *Defining Documentary Linguistics*. Dalam *Language Documentation and Description*, Peter K. Austin (ed.) Jil. 1, Hlm. 36—51. London: SOAS.
- Wurm. S. A. dan S. Hattori (Ed.) 1983. *Language Atlas of the Pacific Area*. Jil. 2, Moluccan Islands. Canberra” Australian National University.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 1

Hari, tanggal	: Kamis, 7 September 2017
Waktu	: Pukul 10.30—12.00
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	: Dr. Asrif, M.Hum.
Pemakalah I	: Prof. Dr. Dadang Sunendar
Pemakalah II	: Prof. James T. Collins
Notulis	: Muhammad Rifan
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra

Makalah I

**KEBIJAKAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN BAHASA DAERAH**

Perlindungan bahasa daerah UU No. 24 Tahun 2009, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terdapat 3 pusat:

1. Pengembangan dan perlindungan, mengembangkan bahasa dan sastra indonesia melalui pengkajian.
2. Pembinaan, melalui pembelajaran.
3. Pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan melalui kajian strategis.

Sejumlah 90% negara di dunia meminjam kosakata bahasa negara lain, termasuk Indonesia. Hanya 10% negara di dunia ini yang menggunakan bahasa negaranya. Ada 17 balai dan 13 kantor bahasa di Indonesia. Dalam satu tahun tiga kali menyurati pemerintah daerah (gubernur Maluku), pemerintah daerah wajib melindungi bahasa dan sastra daerah. Sesuai dengan amanat UU Pasal 42 ayat 1 dan 2, pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan dan diharapkan pemerintah daerah bisa bersama-sama merumuskan bahasa dan sastra daerah dengan kantor bahasa. Konservasi dan revitalisasi bahasa daerah menjadi program prioritas Badan Bahasa tahun 2017. Dari 646 (2015—2016) bahasa daerah di Indonesia, hanya terdapat 100 kamus berbahasa daerah. Kebijakan menghasilkan pemetaan bahasa daerah, jurnal bahasa dan sastra, registrasi bahasa dan sastra, konservasi bahasa (manuskrip, sastra lisan), kajian vitalitas bahasa dan sastra. Kajian vitalitas-konservasi bahasa dan sastra-revitalisasi bahasa dan sastra-peta vitalitas merupakan registrasi bahasa dan sastra. Perlu adanya dokumentasi terhadap bahasa daerah yang ada, baik itu sudah punah maupun yang belum dan hampir punah. Bahasa daerah di Maluku termasuk terbanyak ketiga di Indonesia. Faktor kepunahan bahasa daerah adalah penyusutan jumlah penutur, perang, bencana alam yang besar, menikah antarsuku, letak geografis, sikap masyarakat terhadap bahasanya sendiri. Secara umum, tantangan dan perlindungan ini dikarenakan masih banyak negeri yang belum menutur bahasa daerahnya, dan banyak negeri atau daerah yang menggunakan bahasa Indonesia terutama daerah bagian Maluku Tengah. Banyak penduduk provinsi Maluku berasal dari provinsi lain. Juga belum adanya sensus jumlah penutur bahasa di Maluku maupun di Indonesia. Untuk menunjang masyarakat, kami menyediakan alamat KBBI daring, badanbahasa.kemdikbud.go.id dan atau dapat diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id. dalam satu bulan terdapat 4,7 juta orang yang mengakses KBBI. *Website* badanbahasa.kemdikbud.go.id dan kbbi.kemdikbud.go.id merupakan situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia berdasarkan informasi dari kominfo.

Tanggapan:

1. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa badan bahasa seperti diinjak-injak oleh aturan daerah yang ada. Kenapa badan bahasa tidak menginvestigasi permasalahan tersebut? Apakah badan bahasa tidak memiliki kebijakan untuk memperkenalkan pengaturan bahasa di bandara dan tempat umum di negara lain, dan sebagainya. (Peserta, dari Sulawesi Tenggara)
2. Banyak penutur bahasa di Maluku yang masih menggunakan bahasa asing. Bagaimana tanggapan Bapak? (Nurdin, MNC Ambon)
3. Apakah mungkin bahasa daerah bisa masuk dalam kurikulum di sekolah-sekolah? (Peserta, Universitas Malang)
4. Mengapa bahasa daerah di Kei makin lama makin punah? Ada larangan untuk menggunakan bahasa daerah, bahkan sampai dihukum? (Bwir, Tual)

5. Dalam satu minggu ada satu hari kita dilarang untuk berbahasa daerah di sekolah Muhammadiyah. Apakah ada riset di daerah saya untuk membuat kamus karena ketertinggalan bahasa daerah di Buton? (Nadi Ladjamudi, Sulawesi Tenggara)
6. Sejauh mana usaha yang dilakukan Badan Bahasa untuk memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? (Peserta, Tanimbar)

Jawaban:

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan memiliki aturan dan regulasi. Banyak orang asing yang bekerja di tanah air sehingga perlu penggunaan bahasa asing digunakan di tempat-tempat umum tetapi harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Terdapat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi tenaga asing, itupun jika berkediaman lama di Indonesia hingga bertahun-tahun. Aturan perundangan di Indonesia tidak anti bahasa asing dan hampir setiap bulan, dua sampai tiga kali badan bahasa melakukan penyuratan ke instansi yang bersangkutan. Bahasa Indonesia belum menjadi bahasa PBB, sehingga saat ini badan bahasa menyurati ke pemerintah untuk perubahan bahasa Indonesia menjadi bahasa PBB. Di sekolah-sekolah telah dibuat pembelajaran bahasa daerah dalam bentuk muatan lokal dan terdapat pembinaan-pembinaan bahasa untuk pengembangan bahasa. Sejauh ini belum ada hukuman, jika ada maka akan kami surati. Untuk menjadi bahasa internasional tidaklah mudah, perlu banyak tahap untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Banyak persyaratan yang harus di penuhi, seperti negaranya aktif, banyak penutur, 250 lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia di 45 negara, dan sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia itu sendiri.

Makalah II

**PERLINDUNGAN BAHASA DAN REVITALISAI BAHASA:
CAGAR BAHASA ATAU GERAKAN BAHASA?**

Kesetiaan pada bahasa daerah sudah hampir punah. Diversitas Bahasa di Maluku dikarenakan perkembangan bahasa di Maluku dari 4000 tahun lalu, banyak terjadi migrasi di Maluku menyebabkan banyaknya bahasa di Maluku.

Pada 10 Mei 1546 oleh Fransiskus Xaverius, setiap pulau di Maluku memiliki bahasanya masing-masing. Bahasa Hative adalah bahasa yang sangat dipuji pada awal abad ke 17. Beberapa pulau di Maluku seperti Sanana, Banda, Buru dan lainnya di Maluku bagian tengah memiliki bahasa yang saling berkaitan. Menurut SIL 2017, ada 108 bahasa di Maluku. Mahsun dkk, menyatakan bahwa ada 51 bahasa dan ini

menurun dari yang sudah disebutkan dan diteliti terlebih dahulu oleh SIL dan hal ini dianggap bahasa itu punah.

40 tahun lalu tidak ada orang yang bisa berbahasa daerah karena sudah diteliti dan sudah punah di daerah Piru, Hatusua, Kaibobo dan lain lain di Kawasan Teluk Biru. Bahasa Nakaela tidak masuk daftar dalam lembaga bahasa (bahasa ini pernah dituturkan di Desa Taniwel). Bahasa Maluku Tengah adalah bahasa yang sangat kompleks dan memiliki morfologi yang sangat rumit. Bahasa Paulohi dan Haruru di Elpaputi juga ada, tetapi tidak terdaftar di daftar bahasa yang punah karena tidak ada penuturnya lagi. Bahasa Luhu, Piru, Etim, Kaibobo, Waesamu sudah tidak ada penuturnya lagi sampai sekarang. Begitu juga dengan bahasa Nakaela dan Hulung juga tidak ada penuturnya lagi. Penutur bahasa Alang tidak ada lagi, bahasa Alang sama dengan bahasa Asilulu karena berasal dari Larike.

Untuk pengembangan bahasa yang hampir punah harus dilakukan dokumentasi dan revitalisasi. Dokumentasi lebih meng-korpus tata bahasa untuk dibuat suatu linguistik bahasa daerah yang hampir punah. Kadang dokumentasi bahasa tidak lengkap dan sesuai dengan tata bahasa yang sesuai, dan bukan untuk komunitas yang ingin melestarikan bahasa. Bahasa Alune tidak masuk daftar yang diakui Badan Bahasa. Abad 21, dokumentasi bahasa sudah berkembang dengan perekaman audio, pengarsipan, dan distribusi.

Revitalisasi dan dokumentasi jauh berbeda. Revitalisasi adalah pemikiran kemudian, dan kalau ingin merevitalisasi bahasa harus tahu sasarannya siapa. Perlu memperhatikan dan mengidentifikasi pengguna bahasa sebelumnya. Revitalisasi harus dibuat pelatihan untuk generasi muda. Sasaran dan komunikasi harus disesuaikan dengan pengguna bahasa. Sepa adalah contoh negeri di Maluku yang sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah oleh generasi mudanya.

Harus dipikirkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk pengembangan bahasa daerah di Maluku, misalnya lomba pidato, pembuatan lagu *hiphop*, dan apapun yang menarik perhatian generasi muda. Harus berpikir kritis dan berpikir keras bagaimana cara kita memperkenalkan bahasa daerah untuk generasi muda. Harus fokus pada pengembangan dan pergerakan kepada semua orang khususnya generasi muda untuk penggunaan bahasa daerah.

Ketika revitalisasi dan dokumentasi dilakukan maka akan timbul pergerakan penggunaan bahasa daerah.

Tanggapan:

1. Berdasarkan hasil penelitian, bagaimana orang Asia pendatang yang menyebar datang dan berbaur dengan orang lokal dan bagaimana kombinasinya sehingga bisa tercipta bahasa daerah yang sudah ada dan hampir punah?

Bagaimana pandangan Bapak tentang bahasa? (Anggota DPRD Kab. Buru Komisi C/Pendidikan)

2. Bahasa Ambon tidak ada, tetapi dialeknya ada. Bagaimana cara merevitalisasi bahasa daerah kalau bahasa Ambon sendiri tidak ada dan merupakan bahasa yang diserap dari bahasa Portugis? (Femi, Dinas Perpustakaan dan Kependidikan Prov. Maluku)

Jawaban:

Migrasi pertama 40/60 abad tahun lalu, Maluku, papua, australia kosong tidak berpenghuni, dan akhirnya diisi oleh imigran luar pertama dari luar. Dari bahasa daerah di Maluku kompleks dan belum ada penelitian yang mendalam tentang itu. Harus bisa memilih antara dokumentasi dan revitalisasi tentang pelestarian bahasa

Ada beberapa bahasa daerah di Ambon, seperti bahasa daerah Laha, Larike, dan lain-lain saling berkaitan. Ada krisis dari bahasa daerah di Ambon khususnya. Tidak bisa lagi hidupkan bahasa daerah yang punah kalau tidak ada orang yang berniat mempelajari bahasa tersebut. Kadang kita fokus pada program-program pengembangan bahasa daerah tanpa berpikir bagaimana cara membuat generasi muda tertarik dengan bahasa daerah tersebut. Harus lebih memperhatikan esensinya dan bagaimana caranya meningkatkan minat generasi muda kepada siapa sasarannya dan bagaimana fokusnya.

USAHA MEREVITALISASI BAHASA TERANCAM—BAHASA SEPA¹

Dr. Chong Shin

(Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia)

Jamil, M.A.

(STKIP Gotong Royong Masohi)

1. Pendahuluan

Menurut Krauss (1992), bahasa-bahasa di dunia boleh dibagi kepada tiga tipologi, yaitu a) bahasa-bahasa yang punah, b) bahasa-bahasa yang terancam punah, dan c) bahasa-bahasa yang masih aman. Untuk kategori “bahasa masih aman”, beliau selanjutnya menjelaskan bahwa bahasa ini masih aman karena berfungsi sebagai bahasa resmi dan mempunyai penutur yang lebih dari 100.000 orang. Namun kalau diteliti hujah beliau yang sudah berusia 25 tahun ini, apakah “bahasa yang masih aman” ini, masih aman pada hari ini? Jawabannya ialah “belum pasti” karena tiada bahasa yang akan aman di dunia ini, walaupun bahasa tersebut berstatus bahasa resmi atau *lingua franca*. Sebagai contoh, bahasa Siraya (bahasa Austronesia di Pulau Taiwan) suatu ketika dulu merupakan bahasa *lingua franca* di kalangan suku Austronesia. Bahasa ini asalnya berbentuk lisan, tetapi kemudian dirumikan menjadi bahasa di al-kitab Injil, surat perjanjian jual beli dan sebagainya. Bahkan bahasa ini juga dieja dengan aksara Mandarin untuk kegunaan di surat pajak. Pada ketika itu, bahasa ini memenuhi kriteria “bahasa masih aman” Krauss, yaitu mempunyai penutur

¹ Makalah ini dibentangkan di Kongres Internasional dan Lokakarya Bahasa Daerah Maluku 2017, yang dianjurkan oleh Kantor Bahasa Maluku (7—9 September 2017). Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yth. Dr. Asrif dan Kantor Bahasa Maluku karena memberi peluang dan ruang kepada kami untuk mempersentasikan hasil proyek di kongres tersebut.

yang cukup ramai dan digunakan oleh suku Austronesia lain sebagai bahasa interaksi; lihat Paul Li (2004). Namun oleh karena sinifikasi, yaitu perpindahan orang Tionghoa dari daratan China ke Taiwan dan selanjutnya populasinya bertambah mendadak, bahasa Siraya kian terancam dan pada hari ini, bahasa ini pupus dengan totalnya.

Sesungguhnya, fenomena bahasa terancam punah berlaku lebih drastik pada bahasa daerah. Menurut Gufran (2011), bahasa-bahasa yang terancam punah itu sebagian besarnya berada di daerah atau wilayah atau negara berkembang dan penuturnya rata-rata adalah merupakan etnik minoritas terisolasi atau minoritas yang berada dalam wilayah yang begitu beragam bahasa dan budayanya. Menurut Darwis (2011), masyarakat biasanya bersikap positif terhadap bahasa berprestis dan negatif terhadap bahasa daerah karena bahasa daerah terpantang kuno (telah menjadi milik masa lampau), adalah bahasa orang tidak berpendidikan, hanya digunakan di lingkungan kampung dan menghalangi kemajuan. Justeru karena ada sikap negatif sedemikian, bahasa daerah ditinggalkan oleh mereka dan bahasa berprestij dijadikan bahasa pilihan. Makalah sederhana ini bukan bertujuan mengulas isu-isu berhubung dengan kepunahan bahasa dan faktor penyebabnya, sebaliknya mengetengahkan satu usaha atau metode yang sedang dilakukan oleh proyek Yayasan Toyota (Kode: D-16-N-0074) untuk merevitalisasikan bahasa daerah yang terancam punah. Makalah ini dibagi kepada dua bagian utama, yaitu (1) penerangan mengenai proyek *Toyota Foundation*, (2) Sorotan tentang definisi “dokumentasi bahasa” dan “revitalisasi bahasa”, (3) usaha revitalisasi di Sepa, Ambon.

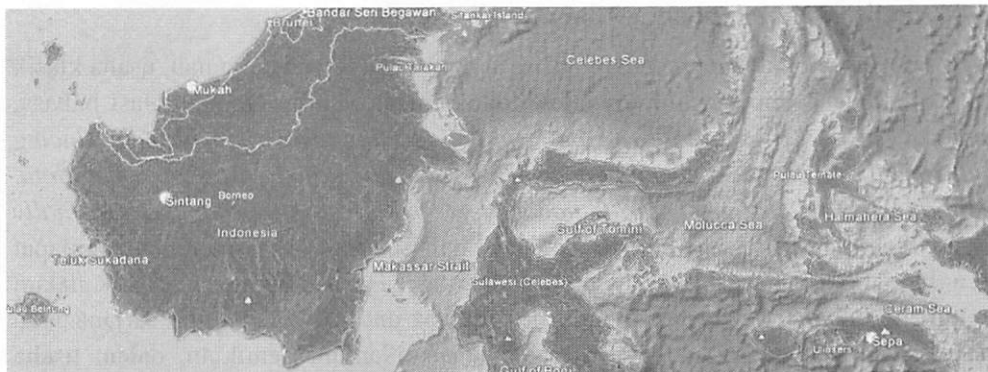
2. Proyek Yayasan Toyota (D-16-N-0074)

Proyek yang didanai oleh Yayasan Toyota ini berjudul “*Attitudes Towards Language Choice and Ethnicity: Multigenerational Divergence and Rapprochement*” (Sikap terhadap Pemilihan Bahasa dan Etnisitas: Keterpisahan Antargenerasi dan Penyatuan Kembali). Proyek ini dilakukan karena peningkatan dari segi prasarana pendidikan, transportasi, jaringan komunikasi, dan sebagainya telah memberi ancaman kepada bahasa-bahasa daerah, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Banyak komunitas, terutamanya suku minoritas telah meninggalkan bahasa ibu mereka dan beralih ke bahasa nasional ataupun bahasa mayoritas di sekitarnya.

Dalam konteks Maluku, sebagai contoh dilaporkan bahwa wujud tekanan bahasa Ternate di Maluku Utara ke atas bahasa minoritas di Halmahera Barat, seperti bahasa Ibo, bahasa Gamkonora, dan bahasa Wayoli karena dari segi sejarah, pada masa Kesultanan Ternate bahasa Ternate adalah *lingua-franca* di Maluku Utara. Bahasa ini menjadi (1) bahasa ibu bagi masyarakat di pulau Ternate, Jailolo, beberapa desa di Kecamatan Kao, Halmahera Utara, dan beberapa desa di Pulau-pulau Gurua Ici di Kecamatan Kayoa Halmahera Selatan, (2) bahasa kedua bagi penutur bahasa Sahu, bahasa Gamkonora, Waiyoli, dan, (3) bahasa Diraja yang dipakai dalam komunikasi dengan pihak kesultanan. Oleh karena itu, bahasa ini harus dikuasai oleh penutur

bahasa-bahasa minoritas. Ini mengakibatkan bahasa ini memberi tekanan kepada bahasa minoritas di sekitarnya. Kini bahasa Ternate merupakan bahasa sehari-hari di daerah ini dan merupakan bahasa ibu untuk anak-anak yang lahir dan membesar di daerah ini (Gurfan, 2011).

Seerti yang dinyatakan sebelum ini, bahasa daerah terancam punah berlaku di mana-mana daerah di Malaysia dan Indonesia. Projek ini memilih tiga titik pengamatan sebagai kegiatannya, yaitu Mukah (Sarawak, Malaysia Timur), Sintang (Kalbar, Indonesia) dan Sepa (Maluku). Lihat Peta 1.



Peta 1: Tiga Lokasi Penelitian

Ketiga-tiga tempat ini dipilih karena terdapat tingkat kepunahan bahasa yang berbeda, seperti penerangan berikut:

- i) Bahasa Melanau di Mukah menduduki kategori “mula terancam”, tetapi masih berdaya tahan. Bahasa ini dituturkan oleh suku Melanau yang beragama Katolik dan Islam. Pada umumnya, suku Melanau yang beragama Katolik masih mengekalkan bahasa ibu mereka manakala yang beragama Islam mula bertukar ke bahasa Melayu Sarawak—supaya sesuai dengan identiti agama mereka (gejala ini paling kerap berlaku pada masyarakat Melanau di Kota Sibuan dan Kuching); lihat Chong (2017).
- ii) Bahasa Desa (salah satu variasi bahasa Ibanik minoritas di Borneo Barat) pula hampir terancam punah akibat tekanan dari bahasa Indonesia. Menurut penelitian Herpanus (2013) di Kampung Pagal I, umur berpengaruh secara signifikan terhadap pengetahuan seseorang terhadap nama tumbuhan. Orang muda menunjukkan pengetahuan yang rendah tentang nama tumbuhan (*Arecaceae-Tumbuhan sepsis Palma*).
- iii) Bahasa Sepa hanya digunakan oleh generasi dewasa yang berumur 30 tahun ke atas. Untuk generasi yang berumur 30 tahun ke bawah, mereka jarang berbahasa Sepa, lebih-lebih lagi anak-anak kecil. Golongan usia ini cenderung berbahasa Melayu Ambon. Jadi boleh dikatakan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang hampir pupus.

Berdasarkan penerangan, diperhatikan satu rantai yang berbentuk kontinum mengenai derajat kepunahan. Bahasa Melanau menduduki hieraki “mula terancam” kepunahannya, bahasa Desa di Sintang pula berada di tahap sederhana manakala bahasa Sepa menduduki posisi tidak berdaya tahan lagi. Antara manfaat melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa di tiga daerah yang berbeda derajat kepunahan ialah peneliti dapat menimba pengalaman dan selanjutnya menghasilkan pendekatan/model baru yang relevan diaplikasikan untuk setiap derajat kepunahan.

3. Revitalisasi vs Dokumentasi Bahasa

Dalam usaha “menyelamatkan” sesuatu bahasa terancam punah, usaha klasik yang dilakukan oleh para linguist ialah dokumentasi bahasa. Dokumentasi bahasa, menurut Austin (2015) adalah “...*new sub-field of linguistics aimed at producing well-structured archived annotated corpora and associated resources (metadata, meta-documentation, grammar/dictionary/text, mobilization products, especially for community use*”. Usaha mendokumentasi bahasa terancam punah memang dapat menghindarkan bahasa hilang tanpa dokumentasi. Hasil dokumentasi, baik dalam bentuk digital maupun cetakan juga bermanfaat untuk para linguist, sarjana atau mahasiswa yang berkaitan pada masa hadapan. Namun, demikian, dalam usaha mendokumentasi bahasa, kita selalu mengabaikan pihak narasumber. Para informan selalunya tidak mengecapi sembarang manfaat, selain sedikit imbalan yang berbentuk uang atau materi. Proses kepunahan bahasa tetap berterusan meskipun peneliti telah selesai membuat dokumentasi. Seseorang linguist, selain meneliti, mendokumentasi, menganalisis bahasa, dan sebagainya, juga perlu ada tanggung jawab sosial pada komunitas dan bahasa yang mereka teliti. Kesedaran pada tanggung jawab sosial mungkin merupakan elemen baru yang perlu diterapkan oleh peneliti bahasa abad ke-21, lebih-lebih di era yang bahasa daerah kian berkurangan.

Antara tanggung jawab yang boleh dilaksanakan pada komunitas ialah pemberdayaan atau revitalisasi bahasa mereka. Melalui pemberdayaan, dampak yang diterima oleh masyarakat ditafsirkan jauh lebih banyak dibandingkan usaha dokumentasi bahasa mereka. Antaranya ialah mereka bisa memperoleh kesedaran tentang kepentingan bahasa daerah melalui aktivitas-aktivitas yang dianjurkan. Dalam usaha melestarikan bahasa proyek Yayasan Toyota ini, beberapa aktivitas direncanakan untuk meningkatkan kesedaran mereka, yaitu:

- a) Berbagai video dalam bahasa daerah (untuk *YouTube*, *CD*, dan sebagainya) dan buku kecil dan pamflet dengan naratif/cerita (bahasa daerah) bergambar, kosakata khusus (misalnya nama ikan, nama perangkap, dan sebagainya).
- b) Lomba pidato, cerita, lagu: Peserta SMP/SMA; hakim generasi tua
- c) Kunjungan dan dialog di sekolah dan dengan *NGO* di tiga daerah proyek.

- d) Filem dokumentari (pendek) di setiap wilayah untuk distribusi dengan pejabat pemerinatah, *NGO*, dan lain-lain.

Walau bagaimanapun, bahasa suatu komunitas penutur hanya dapat dipertahankan dan dilestarikan kalau komunitas itu sendiri berpegang pada komitmen untuk memperjuangkan kelanjutan bahasa mereka. Pendek kata, komunitas penutur mesti berikhtiar dan terikat secara batin pada penggunaan, pengembangan, dan penyebaran bahasa mereka melintas generasi. Komitmen itu seharusnya menjelma dalam bentuk aktivitas yang meyakinkan orang lain serta mendidik orang lain untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa itu. Peranan *NGO* dan badan pemerintah terletak pada tugas menyedari anggota komunitas tentang pentingnya bahasa daerah. Selanjutnya *NGO* dan pemerintah dapat melatih anggota komunitas agar mereka menentukan **sarana** yang perlu digunakan dan juga mengidentifikasikan **kohor** atau kelompok dalam komunitas yang harus difokus usahanya (Collins, 2017).

Bahasa suatu komunitas penutur hanya dapat dipertahankan dan dilestarikan kalau komunitas itu sendiri berpegang pada komitmen untuk memperjuang kelanjutan bahasa mereka. Pendek kata, komunitas penutur mesti berikhtiar dan terikat secara batin pada penggunaan, pengembangan dan penyebaran bahasa mereka melintas generasi. Komitmen itu seharusnya menjelma dalam bentuk aktivitas yang meyakinkan orang lain serta mendidik orang lain untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa itu. Peranan *NGO* dan badan pemerintah terletak pada tugas menyedari anggota komunitas tentang pentingnya bahasa daerah. Selanjutnya *NGO* dan pemerintah dapat melatih anggota komunitas agar mereka menentukan sarana yang perlu digunakan dan juga mengidentifikasikan kohor atau kelompok dalam komunitas yang harus difokus usahanya.

Bahasa suatu komunitas penutur hanya dapat dipertahankan dan dilestarikan kalau komunitas itu sendiri berpegang pada komitmen untuk memperjuangkan kelanjutan bahasa mereka. Pendek kata, komunitas penutur mesti berikhtiar dan terikat secara batin pada penggunaan, pengembangan, dan penyebaran bahasa mereka melintas generasi. Komitmen itu seharusnya menjelma dalam bentuk aktivitas yang meyakinkan orang lain serta mendidik orang lain untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa itu. Peranan *NGO* dan badan pemerintah terletak pada tugas menyedari anggota komunitas tentang pentingnya bahasa daerah. Selanjutnya *NGO* dan pemerintah dapat melatih anggota komunitas agar mereka menentukan sarana yang perlu digunakan dan juga mengidentifikasikan kohor atau kelompok dalam komunitas yang harus difokus usahanya. Bahasa suatu komunitas penutur hanya dapat dipertahankan dan dilestarikan kalau komunitas itu sendiri berpegang pada komitmen untuk memperjuang kelanjutan bahasa mereka. Pendek kata, komunitas

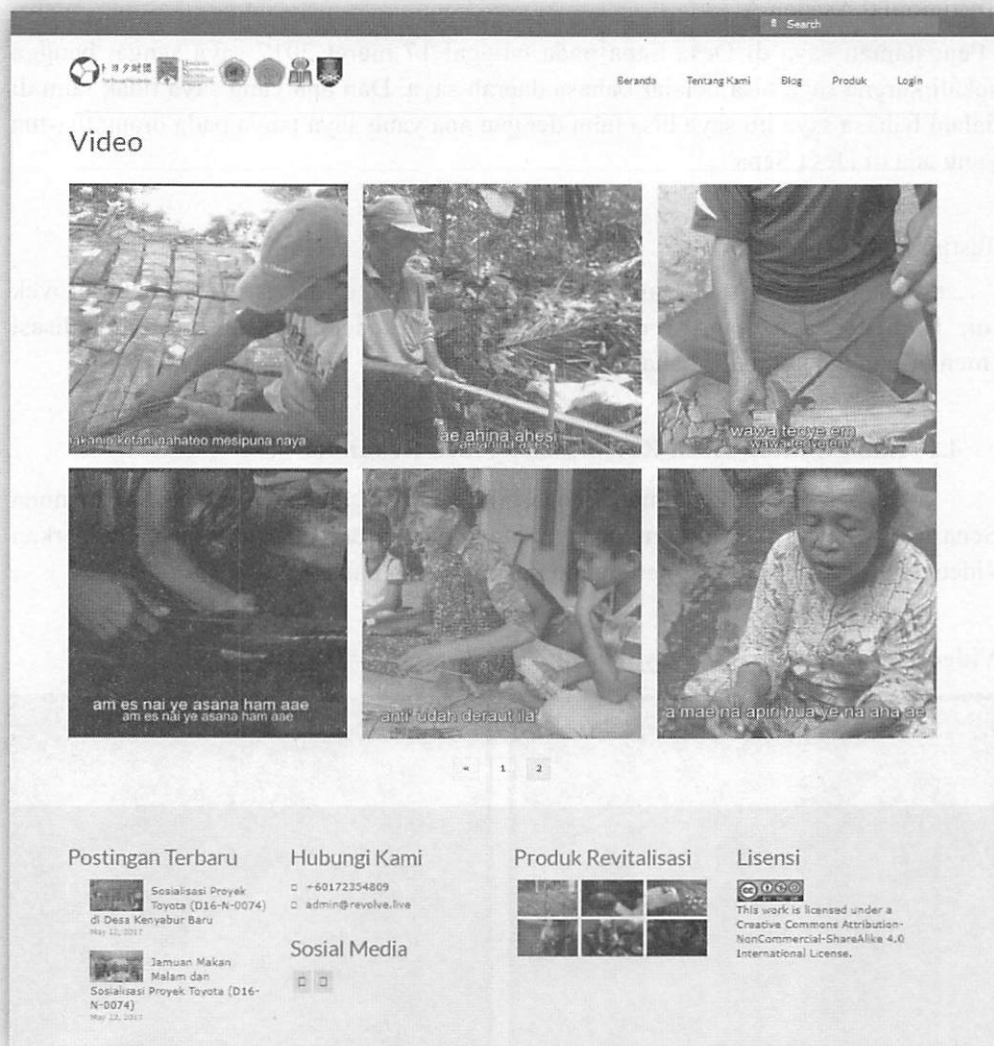
penutur mesti berikhtiar dan terikat secara batin pada penggunaan, pengembangan dan penyebaran bahasa mereka melintas generasi. Komitmen itu seharusnya menjelma dalam bentuk aktivitas yang meyakinkan orang lain serta mendidik orang lain untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa itu.

Peranan *NGO* dan badan pemerintah terletak pada tugas menyedari anggota komunitas tentang pentingnya bahasa daerah. Selanjutnya *NGO* dan pemerintah dapat melatih anggota komunitas agar mereka menentukan sarana yang perlu digunakan dan juga mengidentifikasi kohor atau kelompok dalam komunitas yang harus difokus usahanya.

4. Revitalisasi Bahasa Sepa

Bahasa Sepa adalah salah satu bahasa yang berada di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah penduduk di Desa Sepa ialah sebanyak 13.000 jiwa (jumlah ini sudah termasuk suku Nuaulu yang masuk dalam *petuanan* Desa Sepa), sementara penutur natif bahasa Sepa diperkirakan mencapai 7.000 jiwa (termasuk penutur natif bahasa Sepa yang berada di Desa Administratif Yainuelo). Salah satu ciri bahasa Sepa ialah bahasa ini merupakan bahasa vokalis dikarenakan pada pembendaharan kata/ataupun tuturan bahasa Sepa, katanya selalu berakhir dengan vokal selain kata-kata penguatan, kata-katanya senantiasa bersuku hidup.

Seperti yang diterangkan, tujuan utama proyek ini ialah merapatkan jurang antargenerasi yang terpisah akibat bahasa daerah kian tidak dipakai lagi. Maksudnya, berdasarkan situasi sekarang, satu jurang telah wujud karena generasi tua masih kompeten dalam bahasa daerah manakala generasi muda tidak. Di bagian ini, dipaparkan satu contoh kegiatan yang diusahakan oleh tim proyek di Sepa dalam merevitalisasikan bahasa Sepa. Di Sepa, Sembilan orang pemuda telah dipilih dan dilatih untuk kegiatan ini. Mereka semua berasal dari Sepa. Dari segi kompetensi bahasa, mereka semua hanya berbahasa Ambon dan kurang kompeten dalam bahasa Sepa. Mereka telah diberi latihan selama 36 jam termasuk pratikum di lokasi proyek masing-masing. Pelatihan ini menekankan pentingnya pelestarian bahasa daerah, peranan anak muda dan generasi tua dalam hal pelestarian dan teknik pemerolehan materi audio dan visual, serta cara mengolah materi itu untuk saluran komunikasi yang sesuai. Hasil rakaman mereka akan dimuatkan di *website* (laman) <http://www.revolve.live>. Setelah perlatihan selesai, mereka diminta ke lapangan untuk usaha lebih banyak video lagi.



Ilustrasi 1: Portal <http://www.revolve.live>.

Di dalam laman tersebut, sekali pandang seolah-olah proyek ini juga adalah satu usaha mendokumentasi bahasa (dengan dimuatkan rakaman video), padahal bukan karena asisten-asisten ini diminta berinteraksi dengan golongan tua sepanjang merakam aktivitas-aktivitas masyarakat Sepa. Mereka dipilih atas faktor tidak berkompeten lagi dalam bahasa ibu mereka. Pelibatan mereka dalam proyek ini memberi peluang kepada mereka belajar kosa kata berkaitan dengan aktivitas dari orang tua, mendapat bimbingan bahasa dari orang tua ketika bersama mereka dan sebagainya. Dua testimonial berikut membuktikan bahwa proyek ini mendatangkan kesan positif kepada mereka apabila dilibatkan dalam proyek ini:

Testimonial Asisten A:

“Pengalaman saya di Desa Sepa pada tanggal 17 maret 2017 saya sangat bangga sekali karena saya bisa belajar bahasa daerah saya. Dan apa yang saya tidak tahu di dalam bahasa saya itu saya bisa tahu dengan apa yang saya tanya pada orang tua-tua yang ada di Desa Sepa”.

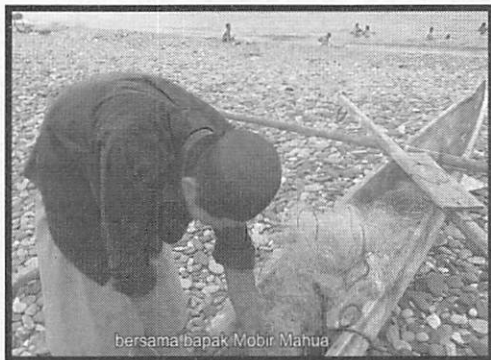
Testimonial Asisten B:

“...saya sangat merasa senang karena saya sudah dilibatkan ke dalam proyek ini. Harapan saya semoga dengan proyek ini kedepannya bisa merevitalisasi (menghidupkan kembali) bahasa daerah kami (Sepa)”.

4.1 Lima Contoh Hasil Revitalisasi: Video Rekaman

Berikut dipaparkan lima video terpilih yang diusahakan oleh pemuda-pemuda Sepa. Setiap video akan diuraikan kandungannya (karena tidak mampu memaparkan video di MS Word) dan sorotan tentang penggunaan bahasanya.

Video 1: Parau (<https://www.youtube.com/watch?v=IEgJ-HJ-ctI>)



Video ini menceritakan tentang cara mengikat *najong* (penahan cadik) pendek oleh Bapak Mobir Mahua. Terlebih dahulu, *najong* panjang dilatakan di atas *najong* pendek dan diikat menggunakan tali sampai selesai. Selanjutnya mengikat *semang* (cadik) perahu. *Semang* perahu yang diikat harus ada penyangkut (kaki ayam benda yang berbentuk huruf U). Kerja ini dilakukan berterusan sehingga diikat melingkar sampai selesai.

Video 2: Membuat Got Sagu (<https://www.youtube.com/watch?v=z-FNOWsFjAs>)



Video ini berkenaan cara membuat *got* sagu (tempat mengekstrak pati sagu) oleh Bapak Muhammad Kuniyo. Pada mulanya, buluh dan tangkai daun pelepah pohon sagu digunakan untuk dijadikan struktur asas *got*. Kemudian kepingan kain *polyester* diikat dengan tali yang diperbuat dari kulit ranting sagu. Bagian bawah *got* sagu harus diratakan dan berbentuk saluran yang mampu menyalurkan air.

Video 3: Cara Menotong Labu



Video ini mengenai seorang ibu yaitu Ibu Jahra mengajarkan anaknya Yuni cara memotong Labu. Menurut video ini, labu harus dipotong kecil-kecil lalu dicampurkan dengan daun pandan.

Video 4: Mengayam Ketupat



Video ini memaparkan seorang Ibu (Jahra) mengajarkan anaknya (Asrin) tentang proses mengayam ketupat. Prosesnya ialah: Pertama, melingkar daun kelapa dalam beberapa bagian, terus ujung daun dimasukan pada lingkaran atau bagian-bagian yang sudah di buat. Kemudian tarik sehingga semua cela-cela daun ketupat tertutup rapat agar isi beras tidak mudah terkeluar.

Video 5: Membuat Pondasi Rumah



Informan, yaitu Bapak Adam Namma menerangkan pada Asrin tentang cara-cara membuat pester semen, untuk membuat pondasi rumah. Pester ini terdiri daripada campuran semen, air, dan pasir. Kemudian semen tersebut ditempelkan ke dinding dapat melekat dengan baik.

4.2 Rumusan Pada Video-video

Video-video yang dihasilkan dalam proyek ini pada umumnya memperlihatkan empat ciri, yaitu:

- i) Melibatkan golongan muda dan tua Sepa.
- ii) Informan terdiri dari masyarakat biasa.
- iii) Bahasa Sepa ditetapkan sebagai bahasa interaksi.
- iv) Tiada batasan pada judul atau topik video (melibatkan semua aktivitas sehari-hari atau tradisional masyarakat Sepa).

Mengenai setting yang sebegini, anak-anak muda Sepa akan disediakan peluang dan ruang yang luas untuk berinteraksi dengan orang tua dalam bahasa Sepa dengan lebih dekat lagi. Mungkin ada yang berpendapat bahwa lebih menarik kalau kita merekam aktiviti tradisional masyarakat karena bisa juga merekodkan budaya tradisi sekaligus, namun kami tidak menetapkan batasan judulnya karena wawasan kami ialah mendedahkan anak muda pada bahasa daerah yang hampir mau punah. Jika batasan ditetapkan, mungkin situasi interaksi juga terbatas karena mereka hanya berinteraksi dengan informan tertentu sahaja, yaitu orang yang mahir dalam kegiatan tradisional. Sebaliknya, jika mereka diberi kebebasan topik, situasi berinteraksi akan menjadi lebih efisien karena mereka bisa merekam apa sahaja kegiatan yang mereka temui. Dengan itu, kekerapan mereka berinteraksi dengan masyarakat Sepa juga bertambah. Dengan berfokus kepada informan yang berlatar-belakangkan masyarakat biasa (bukannya ketua kampung, masyarakat, adat dan sebagainya), pertuturan juga menjadi lebih alami karena golongan yang berstatus ini kerap melakukan modifikasi atau hiperkoreksi pada pertuturan mereka.

Daripada video-video tersebut, didapati bahwa orang-orang tua masih kompeten dalam bahasa Sepa dan mereka memilih bahasa sesuai dengan kebutuhan dan komunikasi dalam menyampaikan informasi (dalam kasus ini, dengan anak-anak muda Sepa yang datang merekam). Untuk anak-anak muda, mereka cuma

dapat mengerti bahasa tersebut tetapi tidak mampu menuturkannya lagi. Dari segi bahasa yang digunakan, didapati bahwa kode bahasa Melayu Ambon yang berkaitan dengan konsep dan terminologi teradopsi ke dalam bahasa Sepa, dan sekaligus akan mengurangi kosa kata dalam bahasa Sepa. Berdasarkan situasi dan kondisi perilaku pengguna bahasa Sepa menunjukkan adanya indikasi terjadinya pergeseran dan kepunahan bahasa Sepa. Indikasi tersebut diadaptasi oleh kecenderungan penutur menggunakan Bahasa Melayu Ambon dalam lingkungan keluarga saat berada di rumah, atau kepada teman sejawat. Perilaku tindak tutur masyarakat penggunaan Bahasa Sepa selalu melakukan alih kode dan bercampur kode kepada teman sejawat, dan di tengah masyarakat umum di dalam berbagai situasi dan kondisi.

5. Penutup

Saban hari, bahasa-bahasa daerah, khususnya bahasa minoritas semakin punah, baik disadari maupun tanpa disadari oleh penuturnya. Mungkin banyak alasan atau pihak yang boleh disalahkan mengenai fenomena ini. Namun yang utama ialah sikap penutur sendiri yang negatif terhadap status bahasa ibu mereka. Hanya penutur sendiri yang mampu memberhentikan proses kepunahan bahasa dari berlaku ke tahap yang parah. Sesungguhnya, kehilangan sebuah bahasa berarti hilangnya satu khazanah warisan bangsa atau suku.

Daftar Pustaka

- Austin, P.K. 2015. *Defining Language Documentation*. Working paper dalam LLACAN Fieldwork Seminar, January.
[URL: https://www.vjf.cnrs.fr/llacan/fichiers/cours/Austin/SLT-2015-Austin-LLACAN_Lecture01.pdf].
- Krauss, M. 1992. *The World's Languages in Crisis*. *Language*. 68 (1): 4—10.
- Darwis, M. 2011. Nasib Bahasa Daerah di Era Globalisasi. Makalah yang disampaikan dalam Workshop Pelestarian Bahasa Daerah Bugis Makassar, Balitbang Agama Makassar, Hotel Pariwisata Parepare, 15 Oktober.
- Gufran, A.I. 2011. Bahasa Terancam Punah: Fakta, Sebab-musabab dan Strategi Perawatannya. *Linguistik Indonesia*. 29 (1): 35—52.

- Chong Shin. 2017. Fenonema Pertukaran Identiti Melanau: Suatu Hipotesis dan Fakta. Prosiding Seminar Terjemahan, Bahasa dan Budaya Malaysia-China 2017, hlm. 144—150. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.
- Herpanus. 2013. Pengetahuan Tradisional dan Bahasa Suku Desa dalam Cabaran Perubahan Alam Sekitar di Borneo Barat. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Collins, J.T. 2017. Diversitas, Dokumentasi, dan Pelestarian Bahasa Daerah di Kalimantan Barat. Makalah yang disampaikan di Kongres Dayak Internasional 2017, Bengkayang. 3—6 Juni.
- Li, Paul Jen-kuei. 2004. *Selected Papers on Formosan Languages. Language and Linguistics Monograph Series Number C3*. Taipei: Acedemia Sinic

PELINDUNGAN BAHASA SUWAWA: ANTARA RUANG DAN BAHASA

Sukardi Gau

Kantor Bahasa Gorontalo
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sukardigau@yahoo.com

1. Pendahuluan

Bahasa bukan hanya berkaitan dengan penutur bahasa tetapi juga berhubungan dengan isu tentang ruang. Ruang bukanlah sekadar tempat, kawasan, wilayah tuturan tetapi lebih dari itu ia berkaitan pula dengan perannya dalam perlindungan Bahasa. Dalam makalah sederhana ini, bahasa Suwawa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo akan menjadi fokus tulisan ini. Secara ringkas akan dibahas profil kajian bahasa Suwawa, situasi kebahasaannya, kuantitas penutur bahasa, dan kaitan antara ruang dengan perlindungan bahasa.

2. Profil Kajian Bahasa Suwawa

Hingga awal tahun delapan puluhan, situasi linguistik di sebagian besar pulau Sulawesi masih kurang dikenal, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa di kawasan Gorontalo. Untuk banyak bahasa, informasinya masih berupa daftar kata yang singkat, misalnya karangan Noorduyn (1991), dalam bukunya *Critical Survey of Studies on the language of Sulawesi* (lihat Sneddon, 1994). Dalam bukunya tersebut, Noordyun secara ringkas menyinggung juga bahasa Suwawa yang kali pertama dipublikasikan oleh Schroder dengan menambahkan daftar kosa kata Gorontalo pada tahun 1908. Sebuah daftar kosakata yang disebutnya sebagai dialek Bunda atau Bone. Sebagian orang-orang Gorontalo menyebutnya, *Bune*. (Noorduyn, 1991).

Ahli bahasa dari Gorontalo dan Sulawesi Utara juga cukup banyak memberi perhatian besar dalam kajian bahasa Suwawa. Sebuah laporan tentang ciri-ciri dasar tentang fonologi, morfologi, dan sintaksisnya, termasuk beberapa teks-teks ringkasan telah dipublikasikan oleh Kasim, Wahidji, dkk (1981). Juga ada sarjana lain seperti Pateda dan Pulubuhu (1985), dan sebuah laporan tentang morfologi dan sintaksis yang dikompilasikan oleh Jahja, Alitu-Pakaya, dkk (1985/1986), serta sebuah kamus dwibahasa Suwawa-Indonesia yang ditulis oleh Pateda (1985) (lihat juga Noordyun, 1991). Selanjutnya, bahasa ini juga dibahas Yuko Kitada dengan judul *The Etymology of the sociative-progressive circumfix in Suwawa (Gorontalo-Mongondowic)* (2015). Mungkin saja kajian-kajian tentang bahasa Suwawa di masa sekarang sudah pun digalakkan di kalangan akademisi dan peneliti bahasa lainnya. Akan tetapi, kajian-kajian yang mengaitkannya dengan kondisi geografis wilayah penutur belum banyak diteliti dan dipublikasikan. Isu ini—bagaimana kaitan bahasa dan ruang geografisnya—sangat memungkinkan menjadi satu isu kajian yang menarik di masa datang.¹

3. Situasi Kebahasaan

Dari segi pemerolehan bahasa, situasi kebahasaan sekarang sungguh sudah jauh berbeda dengan keadaan di era tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Jika dulunya bahasa Suwawa adalah bahasa ibunda bagi kebanyakan anak Suwawa, kini bahasa Suwawa adalah bahasa kedua generasi sekarang.² Dengan kasat mata, bahasa nasional telah menggeser bahasa Suwawa sebagai bahasa Ibunda. Singkatnya, anak Suwawa sekarang, bahasa yang dipelajari dan digunakannya pertama kali sejak dilahirkan adalah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Suwawa adalah bahasa yang mereka pelajari setelahnya.

Pada tahap ini, tentu saja situasi seperti ini masih bagus dalam kadar tertentu sebab penguasaan dan pengetahuan mereka tentang bahasa Suwawa masih terjaga baik di kalangan komunitas tertentu. Secara umum, mereka hidup secara bilingual. Meskipun demikian, rupanya tidak semua anak Suwawa sekarang masih dapat memahami bahasanya secara baik. Inilah yang agak mengkhawatirkan. Catatan laporan penulis (2014) di lapangan pun memang menunjukkan situasi kebahasaannya seperti itu. Lihat saja, anak-anak yang bermukim di wilayah Suwawa Induk, Suwawa Selatan, dan Suwawa Tengah yang memperlihatkan keumuman anak-anak Suwawa

¹ Bandingkan saja misalnya kajian yang sudah dilakukan Collins (1996) dalam meninjau sejarah, lingkungan sosial, dan ruang geografis terhadap fenomena linguistik di lembangan Sungai Muar di Semenanjung Malaysia.

² Misalnya, seorang ibu yang berprofesi sebagai guru bercerita bahwa ketika masa kecil dahulu, dia sudah dididik dalam bahasa ibunda mereka (bahasa Suwawa) di rumah sehari-hari sebelum masuk sekolah dasar. Bahasa Indonesia dikenalnya setelah masuk SD di awal tahun 1970-an. Bahkan, bahasa Indonesia baru dia pahami secara baik ketika menempuh pendidikan SMP di Kabila. Maknanya, bahasa ibundanya adalah bahasa Suwawa. Adapun bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia atau dialek Melayu Gorontalo.

yang tidak tahu-menahu bahasa Suwawa sama sekali meskipun kedua orang tuanya adalah orang Suwawa.

Fenomena ini tentu saja menarik dikaji lebih jauh, termasuk bagaimana sikap bahasa para penutur bahasa ini. Beberapa hal lain mungkin saja dapat dipertimbangkan dalam kasus seperti ini. Misalnya, apakah bahasa Suwawa tidak diajarkan lagi di ranah keluarga atau memang tidak digunakan lagi di ranah sosial. Belum lagi, pelajaran muatan lokal di sekolah mungkin juga dianggap belum mampu mengisi ruang kebahasaan itu. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam ranah sosial, keluarga, dan pendidikan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kesemua ranah itu sesungguhnya sangat berperan dalam hidup-matinya bahasa ini (lihat Gau, 2014).

4. Kuantitas Penutur Berkurang

Isu paling krusial selanjutnya adalah persoalan jumlah penutur bahasa Suwawa. Penulis cukup terkaget-kaget setelah membaca beberapa laporan mengenai jumlah penutur bahasa Suwawa. Dalam ruang terbatas ini, cukuplah dua laporan yang disebutkan. Laporan pertama adalah karya disertasi Alm. Prof. Hunggu Tadjuddin Usup (Universitas Indonesia, 1986) yang mencatatkan jumlah penutur bahasa Suwawa pada tahun 1984 sebanyak 15 ribu orang. Para penutur bahasa ini tersebar di wilayah Kecamatan Suwawa dan Pinogu, serta beberapa desa di wilayah Bone Pantai. Tidak ada perbedaan dialektal meskipun penuturnya bermukim di wilayah yang berbeda.

Laporan kedua berikutnya adalah data yang dirilis oleh *SIL International* dalam *Ethnologue* (2014). Data tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2012 populasi penutur bahasa Suwawa tinggal 5 ribu orang saja. Ya, tinggal 5 ribu orang saja! Maknanya, hanya berselang 30 tahun jumlah penutur bahasa Suwawa telah berkurang sekitar 67 persen. Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penutur yang sangat drastis dan fantastis. Anehnya, penambahan jumlah penduduk Suwawa nyatanya tidak dibarengi dengan penambahan jumlah penutur bahasanya.

Bahkan, jika kita mencermati laporan *Ethnologue* tersebut diketahui bahwa posisi dan status bahasa Suwawa saat ini termasuk dalam peringkat 7 dari 10 peringkat bahasa-bahasa terancam punah (lihat www.ethnologue.com). Artinya, jika bahasa ini menanjak 3 peringkat lagi, bahasa ini akan masuk dalam kategori bahasa yang punah (*Endangered Languages*). Dari data itu saja, kita dapat membayangkan begitu kompleksnya permasalahan bahasa Suwawa di masa depan.

Satu catatan penting dan masalah krusial yang dihadapi penutur bahasa Suwawa saat ini adalah perubahan sikap penutur dan terbatasnya ruang pewarisan bahasa Suwawa antargenerasi. Bahasa Suwawa tidak lagi sebagai alat interaksi sosial intraetnik yang multifungsi maupun sebagai wahana komunikasi sosial

antargenerasi. Kita berharap bahwa bagaimana pun dahsyatnya perubahan sosial dan lajunya perkembangan pengetahuan dan teknologi, serta tersedianya transportasi yang memadai sejatinya tidak menjadikan bahasa ini menjadi ‘kerdil’. Kerdil dalam wawasan imajinasi kebahasaan kolektif penutur dan kerdil dalam praktik tuturan kolektif (lihat Gau, 2015).

5. Ruang Geografis dan Pelindungan Bahasa

Kondisi topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Bone Bolango, khususnya wilayah yang didiami oleh penutur bahasa Suwawa yang tersebar di Kecamatan Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Selatan, Suwawa Timur, Pinogu, dan Bone pantai cukup bervariasi dengan didominasi oleh pegunungan dan lereng datar dengan kemiringan tertentu. Dengan kondisi seperti inilah yang membuat pola permukiman yang cukup variatif pula. Di wilayah ini, khususnya Suwawa Tengah hingga Suwawa Timur misalnya, permukiman penduduk yang menyusun tempat tinggalnya umumnya mengikuti jalur sungai atau jalur jalan dan membentuk deretan perumahan (*line village*). Selain itu, juga terdapat penduduk di Pinogu yang hidup suatu kelompok besar yang homogen (*nucleated village*).

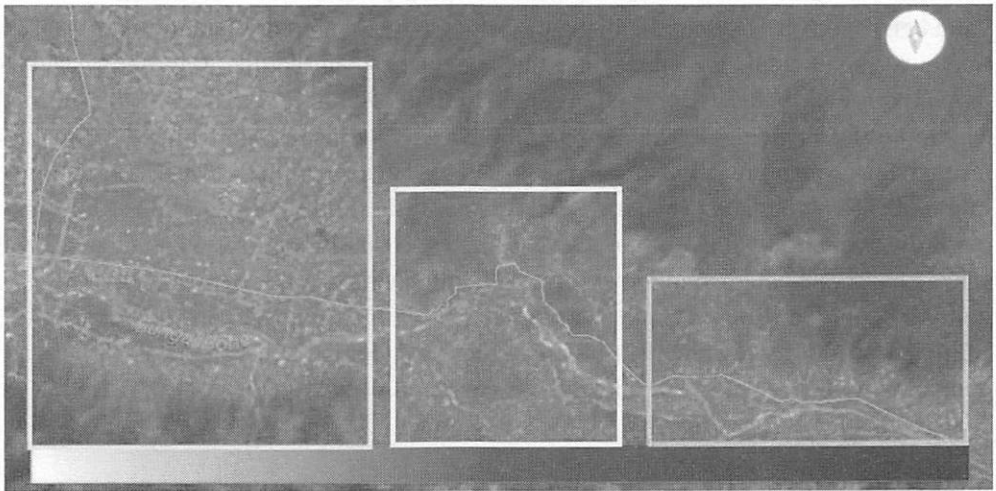


Peta 1

Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

Sumber: www.googlemap.com

Jika memperhatikan topografinya, kita akan mendapati variasi pola permukimannya. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar berikut.



Peta 2

Wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

Pada peta 2 di atas memperlihatkan bahwa penutur bahasa Suwawa yang bermukim di wilayah Suwawa Induk (Kecamatan Suwawa) didominasi oleh penduduk di wilayah dataran yang landai. Wilayah inilah yang mempunyai akses yang luas dengan wilayah sekitarnya, misalnya dengan kecamatan Kabila yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo. Pola transportasi yang dinamis dan hubungan dengan masyarakat luar sangat dinamis. Penduduknya cukup heterogen. Bukan hanya masyarakat Suwawa saja, tetapi kawasan ini juga dihuni oleh penutur bahasa Gorontalo, malahan juga penutur bahasa lain. Kawasan ini semacam kawasan enklave sebagai ruang persentuhan antara bahasa, budaya, dan latar sosial yang berbeda-beda. Dengan situasi seperti ini, dampaknya juga pada penggunaan bahasa Suwawa.

Di masa kini, bahasa Suwawa tidak lagi digunakan di kawasan ini. Malahan, bahasa Suwawa sudah tergantikan oleh bahasa Gorontalo sebagai bahasa komunikasi etnik dalam interaksi sosialnya. Secara sederhana, zona wilayah ini dapat kita lihat pada zona bergaris merah pada peta 2 di atas. Selanjutnya, di zona bergaris kuning itu menunjukkan bahwa sebagian wilayah Suwawa Tengah menggunakan bahasa Gorontalo sebagai bahasa intraetnik, sebagian lainnya bertutur dalam bahasa Suwawa. Berikutnya adalah zona bergaris hijau yang menunjukkan bahwa bahasa Suwawa masih digunakan sebagai bahasa intraetnik oleh antargenerasi, tua dan muda.

Dalam peta di atas, kita tidak bermaksud sekadar memetakan secara kasar wilayah penutur tetapi kita akan mendapati pola intensitas penggunaan bahasa di kawasan itu yang cukup variatif. Misalnya, para penutur yang mendiami wilayah yang heterogen dan bersentuhan langsung dengan wilayah luar menunjukkan bahasa Suwawa sudah tidak digunakan lagi sebagai bahasa intraetnik. Bahasanya sudah tergantikan oleh bahasa Gorontalo, dialek Melayu Manado, atau bahasa Indonesia. Makin ke dalam menuju wilayah pegunungan, penggunaan bahasa Suwawa makin terlihat dan terjaga sebab bahasa itu masih dituturkan dan menjadi bahasa komunikasi intraetnik. Sederhananya, bahasa Suwawa makin ke hulu makin terjaga. Hal yang perlu ditegaskan juga dalam makalah ini bahwa kondisi topografi wilayah sejatinya sangat berperan dalam perlindungan bahasa ini. Dengan wilayah yang bergunung-gunung seperti itu menyebabkan akses jalan raya menuju wilayah itu hanya satu. Jumlah transportasi umum yang sangat terbatas menjadikan intensitas hubungan dengan etnik lain di kawasan ini agak terbatas pula.

6. Penutup

Peran wilayah dan kawasan dalam perlindungan bahasa cukup terbukti. Dengan letaknya yang agak sulit terjangkau hingga wilayah yang agak tertutup, bahasa Suwawa dapat terjaga di beberapa bagian wilayah. Sebaliknya, bahasa ini kurang terlindungi di wilayah yang inklusif, seperti di daerah Suwawa Induk yang memiliki jumlah populasi terbesar. Gerak transportasi yang terbatas dan interaksi dengan kawasan luar yang terbatas menjadikan beberapa desa dan kampung di kawasan ini masih mempertahankan bahasa Suwawa sebagai bahasa interaksi intraetnik, khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah Suwawa Tengah, Suwawa Timur, dan Pinogu. Oleh karena itu, kajian bahasa dan kaitannya dengan ruang geografis dalam perlindungan bahasa perlu diperluas lagi.

Daftar Pustaka

- Collins, James T. 1996. *Khazanah Dialek Melayu*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ethnologue. 2014. <https://www.ethnologue.com/language/swu>
- Gau, Sukardi. 2014. Bahasa Suwawa dan Ambang Kepunahan. *Gorontalo Post*, 5 Desember.

- Jahja, M.A., H. Alitu-Pakaya, H.T. Usup, Waney-K., J. Rangubang. 1985. *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Suwawa*. Manado: PPBSIDSU.
- Kasim, M.M., Habu Wahidji, Mansoer Pateda, Husain Junus, Nani Tuloli. 1981. *Struktur Bahasa Suwawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kitada, Yuko. 2015. *The etymology of the sociative-progressive circumfix in Suwawa (Gorontalo-Mongondowic)*. Dalam *Language Change in Austronesian languages: papers from 12-ICAL*, Volume 3. Malcolm D. Ross dan I Wayan Arka (penyunting). Canberra: Asia-Pacific Linguistics College of Asia and the Pacific, The Australian National University.
- Noorduy, J. 1991. *A Critical Survey of Studies on the Languages of Sulawesi*. Volume 18 of Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde: Bibliographical series. Leiden: KITLV Press.
- Pateda, Mansoer dan Yennie P. Pulubuhu. 1985. *Kamus Suwawa-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sneddon, James. 1995. *Situasi Linguistik di Pulau Sulawesi: Suatu Tinjauan Ringkas*. *Makalah Sewindu PELLBA*, 26—27 September 1994. Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya.
- Usup, Hunggu T. 1986. *Rekonstruksi Proto Bahasa Gorontalo-Mongondow*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 2

Hari, tanggal	: Kamis, 7 September 2017
Waktu	: Pukul 13.45—14.30
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	: Dr. Romilda da Costa
Pemakalah I	: Prof. Chong Shin
Pemakalah II	: Bapak Jamil Patty
Pemakalah III	: Dr. Sukardi Gau
Notulis	: Leonardo J. Sipahelut
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra

Makalah I

USAHA MEREVITALISAI BAHASA TERANCAM–BAHASA SEPA

Usaha yang dilakukan untuk merevitalisasi bahasa yaitu mendokumentasikan, membuat kamus, dsb. Bahasa daerah bermanfaat untuk menambah pengalaman dan daya ingat generasi muda.

Ada 3 bahasa yang terancam punah, bahasa Merananu, bahasa Sepa, dan bahasa di Kalimantan. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk melatih dan meminta anak muda yang tidak tahu bahasa daerah untuk kembali bertemu dengan kakek dan neneknya di kampung dan belajar bahasa daerah. Selain itu, dapat juga melakukan kunjungan dan berdialog di sekolah, mengadakan lomba pidato, dan lain-lain.

Tanggapan:

1. Ada kekhawatiran dari saya, justru karena ingin berbahasa daerah maka mahasiswa meninggalkan bahasa Indonesia, dan bagaimana cara mengatasinya? (Ibu Mila La Saiba, IAIN Ambon)

Jawaban:

Video dibuat bukan hanya untuk dokumentasi tetapi sekaligus bahan belajar untuk peneliti disamping dia mewawancarai tapi juga langsung membuat beberapa suku kata yang akan dijadikan kamus. Ada peluang dari generasi muda untuk belajar bahasa Sepa.

Makalah II

USAHA MEREVITALISAI BAHASA TERANCAM–BAHASA SEPA

Penutur aktif bahasa daerah di Desa Sepa ada 7000 orang dan ada penutur aktif bahasa Sepa yang cukup banyak. Usaha yang dilakukan adalah bekerja sama dengan mahasiswa di Kota Ambon, untuk dilatih bagaimana cara memilih informan dan tentang data yang diambil. Juga membuat video dokumenter tentang keseharian warga Sepa.

Tanggapan:

1. Kondisi nyata dan kesenjangan dalam penggunaan bahasa daerah Sepa, apakah telah tergambar dengan sangat konkrit atau belum? Apakah telah terlihat peningkatan setelah revitalisasi? (Mercy Gaspersz Guru SMA N 6 Ambon)

Jawaban:

Merosotnya keinginan generasi muda untuk berbahasa Sepa karena banyak sekali lafal vokal yang dikurangi dalam pelafalan bahasa Sepa. Bahasa Sepa dikategorikan adalah bahasa yang akan punah dan hilang 20/30 tahun mendatang. Ada kesalahpahaman antara penduduk asli dengan masyarakat yang bertransmigrasi mengenai penggunaan bahasa daerah.

Makalah III

PERLINDUNGAN BAHASA DAERAH DI PROVINSI GORONTALO

Ada dua isu kebahasaan antara lain, latar sosial dan latar penutur serta latar ruang (geografis). Banyak teori dan pendapat tentang bagaimana cara bahasa dapat dipertahankan. Ada bahasa minoritas dengan jumlah penutur sedikit dilindungi oleh faktor geografis karena kondisi wilayah dan lingkungan yang kecil. Interaksi sosial

antar bangsa, antar suku, dan antar budaya membuat orang lebih cenderung terikat dengan bahasa sosial yang sedang berkembang. Jumlah penutur bahasa Suwawa semakin tahun semakin menurun dan berkurang hingga 75% dan hanya bertahan sebanyak 5000 orang. Perilaku bahasa dan penggunaan bahasa daerah semakin menurun intensitasnya. Usaha revitalisasi dan konservasi dilakukan di daerah Gorontalo dengan pendekatan berbeda dan latar geografis. Kebanyakan orang yang menggunakan bahasa Sentani hanya berada di pulau-pulau kecil.

Tanggapan:

1. Karena kurang kepercayaan diri generasi muda saat menggunakan bahasa daerah, apa solusinya? Selain itu solusi untuk penanganan dari sisi ruang untuk bahasa? (Komunitas Kompas)

Jawaban:

Solusinya dengan memperkuat dan memperluas wilayah tutur bahasa daerah. Kesenjangan antara penggunaan bahasa adalah dengan pelafalan dan cara pemakaian bahasa daerah tersebut.

**REVITALISASI NASKAH KLASIK *HIKAYAT RAJA KERANG*
KE DALAM FILM ANIMASI SEBAGAI
MEDIA PEMBELAJARAN SASTRA DI ERA DIGITAL**

Yulianeta¹⁾, Suci Sundusiah²⁾, Halimah³⁾

Universitas Pendidikan Indonesia

email: yaneta@upi.edu¹⁾; sundusiahsuci@gmail.com²⁾; halimah_81@upi.edu³⁾

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian atas dua penelitian mengenai alih wahana naskah klasik *Hikayat Raja Kerang* ke dalam bentuk film animasi (Yulianeta, dkk., 2015) dan film animasi sebagai media pembelajaran sastra Indonesia di SMP (Yulianeta, dkk. 2016; 2017) yang sebetulnya merupakan bentuk revitalisasi naskah klasik sebagai media pembelajaran sastra. Dengan upaya alih wahana naskah klasik ke dalam bentuk baru sebagai media pembelajaran di era digital yaitu film animasi, menjadi salah satu ikhtiar sebagai media pembelajaran yang lebih bermakna.

Kata Kunci: revitalisasi, naskah klasik, Hikayat Raja Kerang, media pembelajaran.

1. Pendahuluan

Salah satu kekayaan bangsa Indonesia adalah kekayaan karya sastra klasik. Baik itu sastra klasik lisan maupun sastra klasik tulis. Sastra klasik nusantara tersimpan di seluruh pelosok negeri, dari utara Aceh hingga penghujung Papua. Kekhasan bahasa dan budaya tercermin dalam kisah-kisah berbentuk legenda, mitos, dongeng, fabel, atau bentuk hikayat lainnya.

Hikayat, salah satu kekayaan sastra klasik tulis Nusantara, sejak ratusan tahun silam tercetak dan terdokumentasikan dalam berbagai bahasa dan tulisan daerah.

Wilayah Sumatera mengenal istilah hikayat sebagai pengganti cerita roman klasik. Daerah Sunda menyebutnya dengan *wawacan*, masyarakat Jawa mengenalnya dengan *babad*. Saat ini, naskah asli hikayat ini tersimpan di museum-museum. Dijaga kelembapannya pada ruangan dengan suhu tertentu. Tidak boleh dipegang sembarangan terlebih diperbanyak dengan mesin fotokopi.

Kesulitan pembaca memahami bahasa naskah klasik hikayat, baik itu naskah transkripsi terlebih lagi naskah asli menjadi bumerang bagi lestari nilai-nilai budaya pada naskah. Untuk itu, perlu upaya baru untuk merevitalisasi naskah klasik sehingga dapat diapresiasi oleh pembaca masa kini. Proses revitalisasi itu dapat berupa proses adaptasi atau pun proses alih wahana naskah klasik ke dalam bentuk baru, misalnya komik digital atau film animasi.

2. Sekilas tentang *Hikayat Raja Kerang*

Secara umum, hikayat dapat disebut sebagai sastra klasik nusantara yang berbentuk prosa (Baried, dkk., 1985). Menurut Hooykas dalam Baried (1985), hikayat merupakan nama jenis sastra yang menggunakan bahasa Melayu sebagai sebagai wahananya. Hikayat mengandung pengertian (1) bersifat sastra lama, (2) ditulis dalam bahasa Melayu, (3) sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana, (4) unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol, dan (5) lazimnya hikayat mencakup bentuk prosa yang panjang (Baried, dkk., 1985:9).

Saat ini, naskah sastra klasik *Hikayat Raja Kerang* tersimpan di museum nasional Jakarta. Pada salah satu naskah, tertera tulisan latin “Hikayat Raja Kerang tahun 1851” tanpa pengarang. Berikut ini tulisan salinan lengkapnya yang dikutip kembali pada buku transliterasi *Hikayat Raja Kerang* pada halaman muka,

“Inilah hikayat perannya Raja Kerang yang empunya mandura di mana di dalam pulau ondoras adanya tahun seribu delapan ratus lima puluh satu 1851” (1982:2).

Mutiara dan Sunardjo mendeskripsikan wujud *Hikayat Raja Kerang* sebagai berikut,

Pada halaman kedua, terdapat hiasan gambar daun dan bunga berwarna merah dan hijau kebiru-biruan dengan halaman kertas yang sangat kotor. Untuk kalimat “Alkisah maka tersebut perkataan” tulisannya dihiasi dengan gambar daun berwarna merah. Untuk bentuk-bentuk pantun, kalimatnya ditulis dengan tinta merah, begitu pula untuk kata-kata sahdan, hata, adapun, sebermula, tersebutlah, sebermula maka diceritakan, semuanya ditulis dengan tinta merah (Minerva Mutiara dan Sunardjo, 1982:7).

Berdasarkan isi ceritanya, *Hikayat Raja Kerang* dapat digolongkan ke dalam cerita rekaan penglipur lara. Berdasarkan penemuan yang dilakukan oleh transliterator (Putri Minerva Mutiara dan Nikmah Sutardjo, 1982) *Hikayat Raja Kerang* berasal dari India tetapi mendapat pengaruh Islam. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya kata-kata berbahasa Arab seperti *mustaib*, *faradat*, *ridha*, *Allah subhanahu wataala*.

Selain ada nama-nama tokoh yang berbau Islam, tercermin pula pengakuan bahwa kepercayaan tertinggi hanyalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Minerva Mutiara dan Nikmah Sunardjo menyatakan,

Naskah *Hikayat Raja Kerang* hanya dimiliki oleh Museum Nasional dan tercatat dalam katalog Sutaarga (KKNM) tahun 1972; katalog van Ronkel, 1909 dan Malay Manuscript, J. Howard, 1962. Menurut notulen, pada tahun 1866, naskah ini bersama 6 naskah lainnya dibeli dari Kasiem di Kampung Blandongan dengan harga 60 Gulden (1982:7—8).

Selain itu, pemilihan *Hikayat Raja Kerang* sebagai hikayat yang dialihwahanakan menjadi film animasi karena hikayat ini memiliki tema kepahlawanan (heroisme) dan sangat kental akan unsur budaya yang sangat mengakar di Indonesia. *Hikayat Raja Kerang* menceritakan tokoh utama Raja Kerang atau Indra Laksana yang terlahir dari cangkang kerang. Putra mahkota Kerajaan Biranta Pura Dewa ini diusir sejak Sang Maharaja Bikrama Indra tahu bahwa permaisurinya, Putri Cahaya Sari melahirkan seekor kerang. Beruntung seorang Pandita bernama Palangka Dewa menyelamatkan Putri Cahaya Sari dan kerang yang dibawanya itu. Ternyata dari dalam kerang muncullah seorang bayi lelaki yang gagah dan tampan. Dialah Indra Laksana yang disebut dengan Raja Kerang, karena keluar dari cangkang kerang. Sang Raja Kerang sejak kecil dilatih ilmu kanuragan dan ilmu alam dari Pandita, sehingga, setelah berusia remaja dia pun berkelana mencari ayahnya yang telah mengusirnya. Maka dimulailah petualangan Raja Kerang.

3. Revitalisasi Naskah *Hikayat Raja Kerang* ke dalam Film Animasi

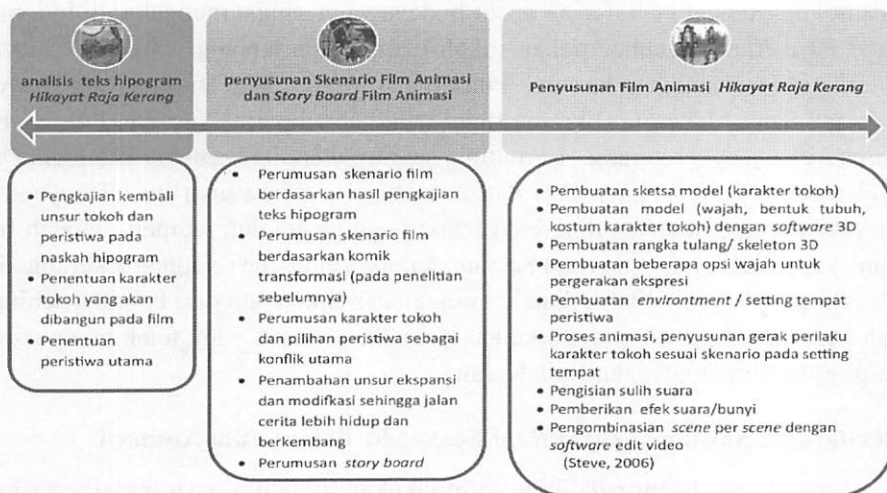
Revitalisasi dalam penelitian ini dilakukan melalui upaya transformasi atau alih wahana naskah klasik ke dalam film animasi. Alih wahana berarti perubahan bentuk karya sastra (yang memiliki struktur tertentu) ke dalam bentuk lain yang baru dengan menambah, mengurangi atau mengatur kembali struktur karya sastra yang asli (Damono, 2012). Pada tahun 1986, Ajip Rosidi melakukan transformasi carita pantun *Lutung Kasarung* tahun 1958 menjadi cerita prosais *Purba Sari Ayu Wangi*. Untuk lebih memahami batasan proses alih wahana, kajian terhadap karya alih wahana yang dilakukan oleh Pradotokusumo (1986) terhadap *Kakawin Gajah Mada* dapat dijadikan pegangan. Kajian ini memunculkan teori penerapan hipogram sebagai naskah asal. Teori penerapan hipogram itu adalah (1) ekspansi, (2) konversi, (3) modifikasi, dan (4) ekserp. Keempat teori yang dikemukakan oleh Riffaterre (1978) dan Pradotokusumo (1986) diterapkan dalam proses alih wahana *Hikayat Raja Kerang* ke dalam wujud komik.

Berkaitan dengan media di era digital ini komik dapat dialihwahanakan menjadi animasi. Pengembangan naskah klasik berbentuk hikayat menjadi film animasi merupakan salah satu revitalisasi budaya bangsa. Film animasi yang merupakan alih wahana naskah sastra klasik *Hikayat Raja Kerang* disusun sebagai

media pembelajaran sastra. Diharapkan anak-anak mampu menggali dan menghayati khasanah sastra klasik, salah satunya berbentuk hikayat. Komik maupun film animasi, akan menjembatani jarak dan waktu sehingga kegiatan apresiasi siswa akan lebih menyenangkan.

Secara umum, proses revitalisasi film animasi 3D *Hikayat Raja Kerang* ini melalui tiga tahapan yang terjadi secara simultan, yaitu: (1) analisis naskah hipogram film animasi; (2) penyusunan skenario film animasi dan (3) pembuatan film animasi. Lengkapnya proses tersebut dapat dibayangkan sebagai berikut.

Bagan 1 Alur Proses Alih Wahana Naskah *Hikayat Raja Kerang* ke dalam Film Animasi

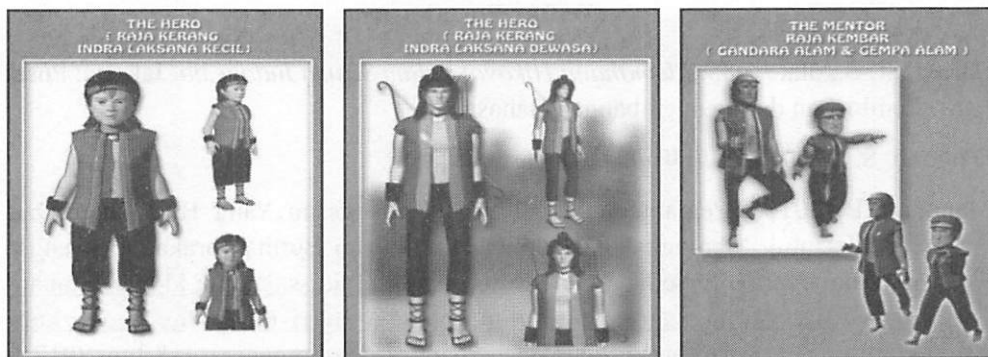


Proses alih wahana naskah sastra klasik ke dalam bentuk film animasi mengalami beberapa penyesuaian. Pertama, penyesuaian pengaluran cerita. Peneliti memilih peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap mampu menonjolkan isi cerita karena mengandung muatan konflik yang menarik. Kedua, pemilihan alur ini dilatarbelakangi oleh pemilihan karakter tokoh sentral yang akan menggerakkan cerita (Sullivan dkk., 2013). Tokoh pahlawan Raja Kerang akan berhadapan dengan tokoh *the shadow* Raja Genta Dewa pada film animasi.

Proses pembuatan film dilakukan oleh tim animator dan tim peneliti secara manual dengan bantuan beberapa program animasi digital seperti 3ds Max 2010 untuk kebutuhan animasi, *After Effect 3.0*, *4.0 etc*, *Vegas Versi 10*, *Particle Illution*, *Photoshop*, *Corel Draw*, *Sound Forge*, *Crazy Talk 2*, *Crazy Talk Animator*, dan *Canopus Pro 2*. (Sullivan dkk., 2013). Produk film animasi 3D Raja Kerang ini menjadi salah satu produk yang mengisi kekosongan hiburan edukatif bagi siswa, sekaligus menjawab tantangan era digital akan kebermanfaatan naskah klasik di masa kini.

Film animasi *Hikayat Raja Kerang* dibuat sebagai bentuk revitalisasi naskah klasik *Hikayat Raja Kerang* tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan yang terdapat di dalamnya. Upaya revitalisasi ini juga sebagai bentuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa di dalam naskah kepada generasi masa kini yang asing dengan nilai-nilai budaya klasik bernilai kebangsaan dari masa lalu.

Gambar 1
Karakter Tokoh pada Film Animasi *Hikayat Raja Kerang*



4. Film Animasi *Hikayat Raja Kerang* sebagai Media Pembelajaran Sastra

Film animasi sebagai produk penelitian (Yulianeta, dkk., 2015; 2016) telah diujicobakan di SMP sebagai salah satu alternatif media pembelajaran sastra Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memperoleh pengalaman apresiasi yang bermakna terhadap cerita klasik setelah menonton tayangan film animasi *Hikayat Raja Kerang*. Hal ini dibuktikan dengan nilai apresiasi siswa terhadap film animasi yang meningkat setelah diberikan tindakan.

Selain nilai apresiasi yang meningkat, terdapat nilai yang bermakna bagi siswa, yaitu (1) siswa memiliki pengetahuan dan pengalaman baru terhadap nilai-nilai luhur bangsa pada masa lalu yang ternyata memiliki karakter luhur yang sama dengan nilai-nilai yang berlaku di masa kini; (2) siswa menyadari bahwa nilai-nilai kebangsaan yang pada masa kini tertuang dalam dasar-dasar negara telah ada dalam naskah klasik di masa lalu. Dengan demikian, siswa pun menyadari bahwa apa yang menjadi dasar nilai kebangsaan di masa kini memiliki akar sejarah yang sama dengan nilai-nilai luhur di masa lalu.

5. Penutup

Naskah klasik *Hikayat Raja Kerang* yang dialihwahanakan ke dalam film animasi mengandung nilai-nilai luhur yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Mengapresiasi film animasi sebagai media pembelajaran sastra Indonesia

di sekolah yang bersumber dari naskah klasik memunculkan nilai-nilai kebangsaan (1) religiusitas, (2) kekeluargaan, dan (3) keadilan (Manalu, 2016). Sebagai media pembelajaran di sekolah, film animasi *Hikayat Raja Kerang* telah berkontribusi memperkenalkan naskah klasik yang memuat nilai-nilai luhur bangsa yang merupakan akar dari terbentuknya nilai-nilai kebangsaan dalam dasar negara.

Daftar Pustaka

- Baried, St. B., dkk. 1985. *Memahami Hikayat dalam Sastra Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Damono, S. D. 2012. *Alih Wahana*. Jakarta: Editum.
- Manalu, J.B. 2016. "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara". Tersedia Online : <http://dprk-subulussalam.go.id/pemantapan-nilai-nilai-kebangsaan-yang-bersumber-dari-nkri-untuk-meningkatkan-kualitas-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/> [18 Juni 2017].
- Mutiara, P. M. dan Nikmah A. Sunardjo (transliterato). 1982. *Hikayat Raja Kerang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pradotokusumo, P.S. 1986. *Kakawin Gajah Mada Sebuah Karya Sastra Kakawin Abad ke-20: Suntingan Naskah serta Telaah Struktur Tokoh dan Hubungan antar Teks*. Bandung: Binacipta.
- Riffaterre, M. 1978. *Semiotics of Poetry*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Sullivan, dkk. 2013. *Ideas for the Animated Short Finding and Building Stories*. UK: Focal Press.
- Steve, R. 2006. *Animasi Karakter 3D*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yulianeta, dkk. 2015. Pengembangan Film Animasi Alih Wahana *Hikayat Raja Kerang* sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia SMP Kurikulum 2013. Laporan Penelitian Hibah Bersaing RISTEK DIKTI.
- Yulianeta, dkk. 2016. Penggunaan Media Film Animasi *Hikayat Raja Kerang* dengan Model Pembelajaran Saintifik di Kelas VII SMP Kota Bandung. Laporan Penelitian Hibah Bersaing RISTEK DIKTI.
- Yulianeta, dkk. 2017. "Empowerment of Classic Literary Text (Manuscripts) in Comics and Film Animation as Media Learning Children Literature". *Makalah*. Dipresentasikan pada The 3th Asia Oceania Regional IBBY Congress (AORIC), May 9—12, 2017, Bangkok Thailand.

MENUMBUHKAN KARAKTER ANAK SEKOLAH DASAR MELALUI PEMBELAJARAN APRESIASI DRAMA

Dr. Rachmawati Patty
Universitas Pattimura
pattyrachma@gmail.com

Abstrak

Pendidikan karakter merupakan upaya yang direncanakan agar membuat peserta didik mengenal, sadar, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai luhur sehingga peserta didik bersikap sebagai insan kamil. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan hasil pendidikan di sekolah melalui pembentukan karakter anak didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Anak-anak SD memiliki kecenderungan untuk bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan sesuatu secara langsung. Dengan demikian diharapkan guru selalu berusaha agar siswa dapat belajar bekerja sama, dalam kelompok. Apresiasi drama adalah bentuk-bentuk penghargaan yang mendalam terhadap karya sastra yang menggambarkan aktivitas kehidupan manusia yang dalam penceritaannya menekankan dialog, laku atau tokoh, dan gerak. Tujuan drama untuk meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat diaplikasikan melalui tahap penjelajahan, tahap interpretasi, dan tahap rekreasi. Kata kunci: pendidikan karakter, anak sekolah dasar, apresiasi drama

Abstract

Character education is a planned effort to make the students getting familiar, caring and internalize the values in order to have a proper behavior as a human being. The aim of character education is to improve the quality of the implementation and results of education in schools through the character formation of students as a whole, integrated and balanced, based on the appropriate competency standards. Children in primary school love to play, having joy, moving around freely, enjoy working in groups, and love to do something that contains elements of the game, therefore teachers are expected to cultivate students move and work or study in a group. Drama is part of the literature that describes the activity of human life where its telling emphasizes dialogue, behavior or character, and motion. Drama aims to improve aspects of cognitive, affective, and psychomotor which can be applied through the exploration stage, the interpretation stage, and recreational stage.

Keywords: character education, primary school children, drama appreciation.

1. Pendahuluan

Isu pendidikan karakter menjadi mengedepan bukan hanya karena menjadi tema peringatan hari Pendidikan Nasional 2010, melainkan lebih disebabkan oleh keprihatinan kita terhadap praksis pendidikan yang semakin hari semakin tidak jelas arah dan hasilnya. Pendidikan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3). Hanya dalam kenyataan, justru banyak warga negara yang tidak berakhlak mulia (korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan), kurang mandiri (konsumtif), tidak bertanggung jawab, dan kasus lain yang justru bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa pendidikan kita belum mampu membangun karakter bangsa. Praksis pendidikan yang terjadi di kelas-kelas tidak lebih dari latihan-latihan skolastik, seperti mengenal, membandingkan, melatih, dan menghafal, yakni kemampuan kognitif yang sangat sederhana, di tingkat paling rendah (Winarno Surachmad, dkk., 2003:114).

Secara lebih ekstrem Helena Asri Sinawang (2008) mengatakan bahwa kecenderungan yang muncul, pendidikan dipersempit menjadi “persekolahan” yang kemudian dipersempit lagi dengan “pengajaran”. Selanjutnya, “pengajaran” dipersempit kembali dengan “pengajaran di ruang kelas” dan semakin sempit menjadi penyampaian materi kurikulum yang hanya berorientasi pada pencapaian target sempit ujian nasional (UN). Penyempitan seperti ini hanya mengarah pada aspek

kognitif dan intelektual. Sedangkan unsur fundamental yang berakar pada nilai moral dari pendidikan itu sendiri terlupakan. Akibatnya pendidikan hanya menghasilkan manusia yang skolastik dan pandai secara intelektual namun kurang memiliki karakter utuh sebagai pribadi. Menurut Lickona (1991:51), karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), dan motivasi (*motivations*), serta perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*). Untuk membentuk karakter bangsa harus dimulai dari sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan landasan utama untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam membangun bangsa. Karakteristik anak-anak usia sekolah dasar yang senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung yang mengandung unsur permainan, dan bekerja atau belajar dalam kelompok.

2. Kajian Pustaka

Makna karakter secara terminologis dikemukakan oleh Thomas Lickona. Menurut Lickona karakter adalah *"A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way."* Selanjutnya ia menambahkan *"Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior"* (Lickona, 1991:51). Menurut Lickona, karakter mulia meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan, sikap, dan motivasi, serta perilaku, dan keterampilan. Pengertian karakter secara etimologis, bisa berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau watak (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008:682). Orang berkarakter berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, budi pekerti, atau akhlak. Dengan demikian makna karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir (Doni Koesoema, 2007:80).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter identik dengan akhlak, yang meliputi seluruh aktivitas manusia, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku yang universal baik dalam rangka berhubungan dengan sesama manusia dengan lingkungannya, Tuhannya, bahkan dengan dirinya sendiri yang terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, sikap dan perbuatan berdasarkan tata karma, budaya, adat

istiadat, hukum positif, dan norma agama, Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter. Sejak tahun 1900-an terminologi pendidikan karakter mulai diperkenalkan oleh Thomas Lickona dalam bukunya yang terkenal yakni *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. Dunia barat disadarkan melalui buku-buku tersebut tentang pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter, menurut Ryan dan Bohlin, mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*) (Lickona, 1991:51). Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habitation*) tentang kebaikan sehingga siswa mengerti, sanggup merasakan, dan mau melaksanakan hal yang baik. Misi pendidikan karakter ini sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral.

Penumbuhan pendidikan karakter perlu dilakukan dan diwujudkan karena karakter/akhlak mulia merupakan tujuan akhir dari suatu proses pendidikan sangat diidamkan oleh setiap lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab lembaga pendidikan untuk membangun kultur akhlak mulia bagi masyarakatnya melalui pendidikan akhlak atau karakter bagi para peserta didiknya.

A. Karakteristik Anak Sekolah Dasar

Karakteristik anak-anak usia sekolah dasar yang senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung yang mengandung unsur permainan, dan bekerja atau belajar dalam kelompok, dapat dipadukan dengan pembelajaran drama. Pembelajaran drama sangat efektif dalam menunjang perkembangan anak usia sekolah dasar yang membutuhkan pembelajaran etika, karena drama memiliki beberapa faktor:

- 1) Kecocokan antara pembelajaran drama dengan karakteristik anak sekolah dasar yang suka bermain, bergerak, dan senang bersama kelompok sangat mengidentifikasi bahwa drama sesungguhnya cocok membangun dan membantu tumbuh kembang karakter anak sekolah dasar. Tujuan akhirnya adalah menanam, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah manusiawi, pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai baik dalam konteks individual maupun sosial (Boen S. Oemarjati, dalam Sumardi, 1992:196).
- 2) Mengenal karakteristik peserta didik untuk kepentingan proses pembelajaran merupakan hal penting. Pentingnya pemahaman tentang karakteristik siswa

akan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Dalam perkembangan siswa sekolah dasar terdapat beberapa aspek, yakni aspek perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral.

a. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena perkembangan fisik anak dianggap penting karena akan memengaruhi perilaku anak sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan fisik adalah teratur dan dapat diramalkan, namun terjadi keanekaragaman, setiap anak berbeda-beda di mana pertumbuhan fisik anak sifatnya sangat individual ada yang lambat dan ada yang cepat. Menurut Hurlock (1978:115) cepat lambatnya pertumbuhan anak dipengaruhi oleh perbedaan gizi dan cara perawatan kesehatan secara umum.

b. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan anak yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan anak di sekolah. Kemampuan kognitif anak mengalami pentahapan menuju kesempurnaan.

Menurut Hurlock dalam perkembangan kognitif ada tiga hal penting yang terkait dengan perkembangan kognitif anak, yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi untuk menyampaikan segala isi pikiran kepada orang lain yang berkembang tiap masanya. Kedua adalah memori, kemampuan anak dalam menyimpan dan mengembangkan suatu informasi yang telah diterima dan diharapkan memori dapat mengolahnya untuk perkembangan anak. Ketiga yaitu intelegensi atau kecerdasan anak yang memengaruhi dalam penggunaan bahasa dan kekuatan memori.

c. Perkembangan Emosi

Perkembangan emosi berperan penting dalam kehidupan seseorang, terutama perkembangan emosi anak. Dengan demikian sangat perlu untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosialnya. Menurut Hurlock (1978) pola-pola emosi yang umum terjadi pada masa anak-anak adalah takut, malu, canggung, khawatir, marah, cemburu, duka cita, keingintahuan, gembira, dan kasih sayang.

d. Perkembangan Sosial

Perkembangan sosial anak dimulai dan dipelajari sejak awal kehidupan. Perkembangan belajar ini dimulai ketika anak memasuki sekolah dasar. Lingkup pergaulan dengan teman sebayanya, tidak hanya di rumah tetapi juga diluar rumah terutama di sekolah. Interaksi sosial yang terjadi dapat menyebabkan seseorang menjadi dekat dan merasakan kebersamaan, namun jika kurang terjadi interaksi sosial maka akan mengakibatkan seseorang menjadi jauh dan terasing.

e. Perkembangan Moral

Perkembangan moral anak sekolah dasar salah satu adalah belajar berperilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Proses ini berlangsung terus hingga anak memasuki masa remaja. Perkembangan moral dipengaruhi oleh perkembangan kecerdasan. Semakin meningkat kecerdasan dan kemampuannya untuk memahami kondisi dan situasi maka akan semakin meningkat pula perkembangan moralnya.

B. Peran Sekolah dalam Menumbuhkan Karakter Siswa Sekolah Dasar

Pendidikan di sekolah dasar merupakan landasan pokok yang harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan tangguh agar peradaban suatu bangsa menjadi kokoh. Namun kenyataan yang kita lihat saat ini jauh dari harapan. Apa yang salah dengan pendidikan sehingga setelah lebih dari enam puluh tahun Indonesia merdeka, pendidikan nasional belum mampu berfungsi menunjang tumbuhnya bangsa yang berkarakter? Padahal sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dicanangkan dalam pesan Bung Karno sebagai Bapak proklamator Indonesia bahwa “Pembangunan karakter bangsa Indonesia harus diprioritaskan”.

Masalah pendidikan selama ini terkesan gagal karena kurikulum yang dilaksanakan tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan bentuk kurikulum yang digulirkan tak satu pun yang tuntas. Setiap Menteri Pendidikan yang diganti, maka kurikulum pun diganti menurut versinya sehingga siapapun boleh dan berhak mengulas masalah pendidikan. tanpa landasan falsafah yang memadai, maka potret pendidikan kita akan semakin carut-marut.

Dengan demikian maka sekolah mempunyai tanggung jawab memperhatikan dan menata sarana maupun prasarana sebagai wadah pembinaan tumbuh kembangnya anak dalam menunjang pelaksanaan pengajaran guna penumbuhan karakter anak dalam semua pelajaran. Hal ini perlu dilakukan untuk penumbuhan budaya karakter/ akhlak mulia guna tercapainya tujuan akhir dari suatu proses pendidikan menuju cita-cita bangsa yakni masyarakat yang berkarakter Indonesia. Karena itu, lembaga

pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan karakter (pendidikan moral) bagi para peserta didik dan juga membangun kultur akhlak mulia bagi masyarakatnya.

Untuk merealisasikan karakter mulia dalam kehidupan setiap orang, maka pembudayaan karakter menjadi suatu hal yang niscaya. Di sekolah atau lembaga pendidikan, upaya ini dilakukan melalui pemberian mata pelajaran pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan etika, atau pendidikan karakter. Akhir-akhir ini di Indonesia misi ini diemban oleh dua mata pelajaran pokok, yakni Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua mata pelajaran ini tampaknya tidak mampu mengantarkan peserta didik memiliki karakter mulia seperti yang diharapkan. Sebab penumbuhan karakter mulia tidak terbatas pada kedua mata pelajaran tersebut tetapi melalui berbagai disiplin ilmu diantaranya pembelajaran apresiasi sastra yang berimbaskan pada penumbuhan karakter mulia sesuai yang diharapkan.

C. Pembelajaran Apresiasi Drama

Apresiasi Drama melalui pembelajaran sastra di sekolah dasar selama ini, tampaknya memang masih sangat lemah. Hal ini disebabkan rendahnya minat baca dan lemahnya kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Lemahnya pembelajaran sastra di sekolah dapat dilacak dari beberapa segi. Pertama, komitmen pemerintah terlihat kurang serius. Kedua, secara teknis guru-guru SD bukanlah spesialis guru bahasa. Ketiga, ada kesenjangan antara karya sastra dan daya pemahaman siswa, bahkan juga guru. Keempat, implikasi lebih jauh dari kondisi di atas adalah guru cenderung menjauhi karya-karya sastra, apalagi terhadap karya sastra yang dianggap ‘aneh’.

Ada pandangan yang muncul, tugas guru bahasa Indonesia menjadi semakin banyak. Ternyata tidak karena pelajaran drama dapat menjadi suatu gabungan antara pelajaran sastra, dan pelajaran keterampilan berbahasa (menyimak, membaca, wicara, dan menulis). Sebagai contoh, jika naskah dibuat sendiri atau siswa ditugasi membuat resensi terhadap pementasan atau pembacaan, maka di dalam pelajaran ini terkandung pula pelajaran keterampilan menulis (latihan pemahaman dan penggunaan bahasa).

Lewat dramatisasi, dimungkinkan suatu pengetahuan, dapat menjadi sikap, dan kemudian menjadi tingkah laku (penghayatan dan pengamalan). Di pihak lain, murid-murid yang sering berpentas merasa sudah puas dan berlaku sebagai “aktor”. Padahal ada dimensi lain yang harus mereka kuasai lebih dari berpentas, yaitu pengetahuan yang mempertinggi tingkat apresiasi mereka. Sebaliknya mereka yang banyak berteori (seperti guru sastra) merasa bahwa pementasan dan naskah drama tidak penting untuk dibaca (dipelajari). Yang penting adalah anak dapat menguasai

teori sebab di dalam evaluasi yang dinilai adalah teorinya saja. Selain itu kurang tersedianya naskah drama untuk pembelajaran sastra, serta minimnya waktu untuk pementasan drama. Dengan demikian guru harus menyediakan waktu khusus untuk mengembangkan teori ke dalam wujud nyata/praktek melalui sanggar sekolah. Kini di dalam khazanah drama Indonesia, banyak diterbitkan naskah-naskah drama yang sudah dinilai kualitasnya, tetapi tidak banyak dibaca oleh mereka yang bernama cendekiawan, bahkan juga mereka yang dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Menurut penelitian Yus Rusyana (1979). Perbandingan kegiatan mengapresiasi prosa, puisi, dan drama berbanding: 6 : 3 : 1.

Harus diakui, bahwa naskah-naskah drama memang sulit didapat. Jalan untuk mendapatkan naskah adalah lewat bank naskah pada setiap teater ternama. Akan tetapi yang terbaik lagi jika guru dan murid mencoba menciptakan naskah-naskah sederhana. Sebagai contoh menaskahkan suatu roleplaying atau cerita-cerita daerah setempat. Untuk dapat menghargai nilai-nilai luhur dalam kehidupan global, maka drama-drama yang abadi, seperti: Oedipus Sang Raja, Hamlet, Machbeth, Othello, Julius Caesar, dan sebagainya, sebaiknya dimiliki guru untuk diperkenalkan kepada siswa. Selain itu banyak karya daerah seperti: Sri Tanjung, Panji Semirang, Ken Arok, Ande-ande Lumut, Bansacara-Ragapadmi, Airlangga, Anusapati, Damarwulan atau Minak Jinggo, Warok Suromenggolo (Jawa Timur); Joko Tingkir, Mahesa Jenar (Nogo Sosro Sabuk Inten), Roro Jonggrang (Jawa Tengah), Sang Kuriang, Si Kabayan, Prabu Siliwangi (Jawa Barat), Calon Arang (Bali), Malin Kundang, Lebai Malang, Pak Pandir (Minangkabau), dan sebagainya. Lakon-lakon dari cerita Seribu Sam Malam seperti Sinbad, Ali Baba, Putri Jauhar Manik, Aladin dengan 7 Lampu Wasiat, dan Abu Nawas dapat ditata menjadi cerita drama yang menarik untuk dipentaskan. Karena apa yang ada dalam drama merupakan cermin dari kehidupan nyata.

Dengan memahami dan mengapresiasi permasalahan yang disampaikan dalam drama, siswa dilatih untuk memecahkan masalah, yang mungkin akan ditemui dalam kehidupan di masyarakat nanti. Sebab salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia adalah perwujudan diri dengan berkreasi, hal tersebut juga ditekankan oleh Maslow 1968 (Munandar 1987:45—46) bahwa kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan dirinya, berhasil mengembangkan dan menggunakan semua bakat dan kemampuannya. Ciri afektif yang menentukan seseorang kreatif antara lain: rasa ingin tahu, tertarik terhadap tugas-tugas majemuk yang dirasakan sebagai tantangan, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, ingin mencari pengalaman-pengalaman baru, dapat menghargai diri sendiri maupun orang lain.

D. Manfaat Pembelajaran Drama

Drama adalah salah satu genre sastra memiliki peran sangat fundamental dalam pendidikan karakter. Ibarat api dengan panasnya, ibarat air dengan basahnyanya, dan ibarat kapas dengan kainnya. Hal ini disebabkan karya sastra pada dasarnya membicarakan berbagai nilai hidup dan kehidupan yang berkaitan langsung dengan pembentukan karakter manusia. Drama berarti perbuatan, tindakan atau beraksi. Yang dimaksud teks-teks drama ialah semua teks yang bersifat dialog-dialog dan yang isinya membentangkan sebuah alur. (Janvan Luxemburgh, dkk). H.B. Yasin (dalam Sufiani, 2004:6) mengatakan bahwa drama adalah rentetan kejadian yang merupakan cerita. Sedangkan menurut Rendra (dalam Sufiani, 2004: 6) mengatakan bahwa drama atau sandiwara adalah seni yang mengungkapkan pikiran dan perasaan orang dengan mempergunakan laku jasmani, dan ucapan kata-kata. Pendapat lain yakni dari Aristoteles (dalam Sufiani, 2004:6) bahwa drama adalah penyajian atau peragaan (peniruan) semua kejadian atau cerita. Selain itu, drama adalah cerita yang dipanggungkan (Hazin, 1990:90).

Meski drama adalah karya sastra yang bisa dibaca dan dianalisis secara tekstual karena menggunakan medium bahasa dalam penciptaannya, namun drama pada dasarnya ditulis untuk dipentaskan di atas panggung (*stage*). Oleh karena itu, dalam teks drama, selain terdapat unsur dialog sebagai penanda alur cerita, pembaca juga akan menemukan gambaran ekspresi dan laku (*stage direction*) yang ditulis pengarang untuk memberikan gambaran kepada para pembaca, dan audiens.

Secara ekspresif pemanfaatan karya sastra sebagai media pendidikan karakter dapat ditempuh dengan cara mengelola emosi, perasaan, semangat, pemikiran, ide, gagasan dan pandangan siswa ke dalam bentuk kreativitas menulis karya sastra dan bermain drama, teater atau film. Pementasan drama akan memberikan beberapa manfaat bagi siswa.

- a. Siswa akan belajar memahami heterogenitas budaya (multikulturalisme) yang tercermin dalam sebuah pementasan, baik yang berwujud ide, benda dan kebiasaan. dalam rangka membentuk karakter diri yang kuat. Melalui tema, tokoh, bahasa, setting, serta alur, siswa dapat belajar pesan-pesan yang berkaitan dengan aspek karakter, watak dan perilaku, tutur kata yang santun, interaksi antarmanusia, dan liku-liku kehidupan yang harus dilalui dengan karakter kuat.
- 1) Siswa akan lebih memiliki rasa percaya diri terutama ketika berhadapan dengan publik. Beban psikologis untuk berbicara, beraktualisasi, dan bertindak dihadapan orang banyak dengan sendirinya akan terkikis melalui

serangkaian proses bersama yang dijalani dalam bermain drama. Rasa canggung dan minder akan hilang secara perlahan ketika siswa berada diatas panggung.

- 2) Siswa akan mendapat kesempatan luas untuk bersosialisasi dan meningkatkan kemampuan dalam mengorganisasikan kerja tim mulai dari pemain, sutradara, penata rias, penata musik dan tim artistik panggung. Kerjasama dalam proses mengangkat teks tertulis dalam sebuah pertunjukan ini diharapkan akan memberi ruang bagi siswa untuk tidak hanya sekedar mengenal berbagai karakter anggota kelompok tetapi juga meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam manajemen, khususnya seni pertunjukan.
- 3) Siswa diberi kesempatan secara berkelompok untuk mementaskan naskah drama akan membawa mereka pada sebuah pengalaman yang menarik dan menyenangkan karena pada dasarnya siswa senang dengan pementasan yang didalamnya melibatkan unsur lampu panggung, kostum, tat arias, properti, dan juga ilustrasi musik pengiring cerita. Latihan dasar teater (*basic teater*) itu meliputi (1) mengolah tubuh, terdiri atas: kegiatan pemanasan, peregangan, pelenturan, dan pembentukan, (2) mengolah suara, terdiri atas: melatih alat pernafasan, berlatih membentuk vokal, melatih artikulasi, dan melatih kekuatan suara, (3) mengolah sukma, yang meliputi meniru gerak dan perilaku binatang, alam, dan manusia, berpura-pura menggunakan perasaan tertentu, menumbuhkan emosi dari dalam diri, dan berlatih ingatan emosi, (4) berlatih mimik dan pantomimik baik mimik netral, sedih, dan gembira.

E. Nilai-nilai Positif dalam Drama

Secara terperinci Brahim (1968:161) mengemukakan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam pengajaran drama, yaitu:

- 1) melibatkan para pelajar pada persoalan hidup,
- 2) para pelajar dapat memperdekatkan nilai-nilai kehidupan yang perlu bagi dirinya sendiri,
- 3) dapat menghargai golongan lain,
- 4) mempunyai peranan dalam pembentukan pribadi sendiri,
- 5) merupakan latihan mempergunakan bahasa dengan teratur dan baik,
- 6) melatih anak berpikir cepat,
- 7) melatih pelajar-pelajar yang lain sebagai penonton,
- 8) murid-murid dapat mengerti secara intelektual dan merasakan persoalan *social psychologist* itu.

- 9) menimbulkan diskusi yang hidup.
- 10) mendidik berani mengemukakan pendapat.
- 11) menghargai pendirian orang lain.

Pembelajaran drama, menurut Moody (dalam Waluyo, 2001:155) adalah bentuk kebudayaan yang melekat erat pada kebiasaan manusia di seluruh dunia. Pengajaran drama di sekolah yang dimaksudkan pengajaran teori drama dan apresiasi drama. Oleh karena itu, guru hendaknya mampu memperkenalkan drama kepada peserta didik dengan memberikan bimbingan tentang apresiasi drama sehingga membuat peserta didik menggemari, menyenangi, dan menjadikan drama sebagai salah satu bagian ilmu yang mengajarkan tentang kehidupannya.

3. Penutup

Siswa akan lebih memiliki rasa percaya diri terutama ketika berhadapan dengan publik. Beban psikologis untuk berbicara, beraktualisasi, dan bertindak di hadapan orang banyak dengan sendirinya akan terkikis melalui serangkaian proses bersama yang dijalani dalam bermain drama. Rasa canggung dan minder akan hilang secara perlahan ketika siswa berada di atas panggung, dan melalui dorongan dan motivasi guru dan teman-temannya, mereka dilatih untuk tidak ragu-ragu lagi memerankan tokoh dalam naskah drama.

Keberhasilan pendidikan karakter di sekolah (jalur formal) tidak bisa dilepaskan dari pendidikan karakter dalam keluarga (jalur informal) dan pendidikan karakter di masyarakat (jalur nonformal). Karena itu, pendidikan karakter harus dilakukan secara terpadu dengan memadukan dan mengoptimalkan aktivitas pendidikan formal, informal, dan nonformal, serta mengupayakan terwujudnya media informasi dan komunikasi yang berkarakter. Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Keberhasilan pendidikan karakter di sekolah harus ditopang oleh pembelajaran yang mendukung di antaranya mengoptimalkan pembelajaran apresiasi drama yang dilakukan melalui berbagai aktivitas yang ada di sekolah.

Daftar Pustaka

- Brahim. 1966. *Drama dan Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Doni Koesoema A. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo. Cet. I.
- Hurlock, Elizabeth B. 1978. *Perkembangan Anak Jilid 1*. Terjemahan dari Bahasa Inggris oleh Tjandrasa & Zarkasih. Erlangga.
- Janvan dkk. 1986. *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: PT Gramedia
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Auckland: Bantam Books.
- Munandar. (2008). *Langkah Mudah: Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sufiani. 2004. "Problematika Pengajaran Drama di SLTP Negeri 3 Bantimurung Kabupaten Maros". Skripsi. Makassar: FBS UNM.
- Sumardi, Mulyanto. 2002. *Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Waluyo, Herman. 2001. *Drama: Teori dan Pengajaranya*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha.

**PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PEMERKUAT
SERTA PENGENALAN BAHASA DAERAH
KEPADA MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI**

Noveria Anggraeni Fiaji

Pusat MPK Universitas Brawijaya

novafiaji@ub.ac.id

Abstrak

Pada era globalisasi saat ini, teknologi mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal komunikasi. Komunikasi melalui ujaran bahasa dirasa sangat penting sekali untuk selalu dan terus dijaga, karena fungsi bahasa merupakan salah satu media dalam menyampaikan dan mewariskan hasil kebudayaan antar generasi, dan di Indonesia perkembangan budaya lebih banyak terabadikan dalam tradisi lisan. Oleh karena itu, komunikasi yang terjalin melalui media sosial dikhawatirkan akan menyebabkan pergeseran bahasa karena pengguna media sosial lebih banyak berbahasa asing. Melihat fenomena tersebut, perlu adanya strategi khusus sebagai upaya pemertahanan bahasa daerah sebagai salah satu kearifan lokal melalui keterlibatan pemerintah dalam hal memberikan kebijakan kepada tiap-tiap instansi untuk (1) menggalakkan penggunaan bahasa daerah pada hari-hari tertentu, (2) pengubahan lagu populer berbahasa asing menjadi bahasa daerah yang bermakna, (3) peran selegram untuk menggunakan bahasa daerah, (4) penggunaan kamus *online* daerah dan akun berbahasa daerah untuk penyampaian kutipan (*quote*) atau mungkin motivasi bagi para warga net.

Kata Kunci: Media sosial, strategi, bahasa daerah, era globalisasi.

1. Latar Belakang

Bahasa daerah merupakan salah satu kearifan lokal yang dapat dijadikan ciri khas suatu daerah, sebagai identitas nasional. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman di era-modern, bahasa Indonesia mulai mengalami pergeseran penggunaannya dikarenakan sudah tidak ada lagi generasi penerus yang menggunakannya, menurut data yang diperoleh dari Dadang (Republika) yang menyatakan bahwa di Badan Bahasa, bahasa yang baru teridentifikasi terdapat 617 bahasa yang jumlahnya lebih dari 700 bahasa, bahasa daerah yang sudah mengalami penurunan pengguna yaitu sekitar 139 bahasa. Oleh sebab itu, pelestarian kembali bahasa daerah perlu digalakkan, tentunya hal tersebut tidak dapat terlepas dari strategi yang tepat dalam pelestarian bahasa daerah.

Menurut teori generasi, generasi muda kita saat ini merupakan generasi alfa, generasi ini lebih cenderung menggunakan dan menyerap segala informasi melalui media sosial. Penggunaan alat komunikasi berupa media sosial juga tidak terlepas dari penggunaan bahasa yang digunakan, era globalisasi memungkinkan penggunaan bahasa internasional/ Inggris di dalam dunia maya.

Melihat fenomena tersebut, ternyata pembelajaran bahasa juga dimungkinkan dapat diperoleh melalui media sosial dan dapat dijadikan sebagai suatu bentuk strategi untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah berupa bahasa atau kesenian dari suatu daerah. Dengan demikian, pembelajaran, pelestarian, serta pengenalan bahasa daerah seharusnya tidak hanya dilakukan di dalam kelas maupun di sekolah saja, melainkan juga pengenalan bahasa daerah selayaknya dapat memanfaatkan teknologi yang dekat dengan masyarakat saat ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia pada media sosial. Melihat alasan tersebut, maka makalah dengan judul “Peran Media Sosial sebagai Strategi Pemerkuat serta Pengenalan Bahasa Daerah kepada Masyarakat di Era Globalisasi” perlu ditulis dan dibahas lebih lanjut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana potret penggunaan bahasa daerah di kalangan masyarakat pada era globalisasi?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi implementasi penggunaan bahasa daerah di kalangan masyarakat pada saat ini?
3. Bagaimana strategi model pelestarian bahasa daerah melalui media sosial?

2. Pembahasan

2.1 Penggunaan Bahasa Daerah di Kalangan Masyarakat pada Era Globalisasi

Bahasa merupakan salah satu alat vital sebagai media komunikasi. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Masinambouw (dalam Crista, 2012:2) yang menyatakan bahwasanya sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi manusia di dalam masyarakat, sehingga di dalam perilaku berbahasa juga harus disertai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pada era saat ini, norma-norma masyarakat bisa dikatakan mulai bergeser seiring dengan adanya pengaruh globalisasi, norma-norma tersebut juga termasuk di dalamnya mengenai penggunaan bahasa.

Globalisasi merupakan suatu masa dimana terjadi perubahan atau pergeseran kebudayaan yang dipengaruhi oleh budaya asing. Dampak dari globalisasi tersebut juga berpengaruh terhadap penggunaan bahasa. seperti halnya yang kita ketahui pada saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang dikukuhkan penggunaannya pada tanggal 28 Oktober 1928 juga sudah mulai bergeser penggunaannya, hal ini dipengaruhi oleh adanya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang lebih dominan digunakan di dalam berinteraksi pada era globalisasi ini dengan menggunakan media internet atau di dunia maya.

Pada abad 21 saat ini, bahasa Indonesia terlebih bahasa daerah mulai dipertanyakan eksistensinya. Penggunaan bahasa Indonesia sudah mulai banyak digantikan penggunaannya oleh bahasa Inggris, terlebih lagi banyak sekali padanan kata dari bahasa Inggris yang belum diperoleh di dalam bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia sendiri sudah mulai dirasa kurang penggunaannya, padahal bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa resmi negara dan nasional, jika kita telah mengetahui hal tersebut, tentulah kita mulai bertanya-tanya bagaimana eksistensi bahasa daerah itu sendiri di negara Indonesia.

Melihat kondisi tersebut di atas, tidaklah heran jika Sumarsono (2002:78) mengatakan bahwa keanekaan bahasa dalam suatu negara selalu menimbulkan masalah atau paling tidak mengandung potensi akan timbulnya masalah. Permasalahan dari keanekabahasaan itu sendiri ternyata dialami pada era globalisasi saat ini, tidak hanya dari faktor adanya pengaruh bahasa lain, akan tetapi juga dari pengguna bahasa itu sendiri yang dipengaruhi teknologi berupa media sosial. Tuntutan globalisasi itulah yang dapat mendorong masyarakat menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa percakapan dibandingkan dengan bahasa nasional ataupun bahasa daerah yang dimiliki, sehingga eksistensi bahasa daerah saat ini sudah mulai tergerus.

2.2 Faktor Krisis Bahasa Daerah di Kalangan Remaja

(1) Faktor keluarga

Pergeseran bahasa dan pemertahanan bahasa sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Pada satu sisi, pergeseran bahasa mengacu kepada bahasa yang tergeser oleh bahasa yang lain. Pada lain sisi, pemertahanan bahasa merujuk pada suatu bahasa yang tidak tergeser oleh bahasa yang lain. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak berfungsinya lembaga-lembaga tradisional sebagai benteng pemertahanan tradisi lokal. Kedua kondisi itu merupakan akibat dari pilihan bahasa dalam jangka panjang (paling tidak tiga generasi) dan bersifat kolektif (dilakukan oleh sebagian warga) (Sumarsono, 2002:231). Dalam pemertahanan bahasa, sekelompok pengguna bahasa memilih untuk tetap melanjutkan menggunakan bahasa ibunya meskipun sudah ada bahasa kedua yang masuk dalam komunitas tersebut.

Adakalanya penggunaan bahasa ibu atau bahasa pertama yang jumlah penuturnya tidak banyak dapat bertahan terhadap pengaruh penggunaan bahasa kedua yang lebih dominan (Chaer, 2004:147) hal itu juga senada menurut pendapat Amar (2004) proses pergeseran bahasa merupakan satu peristiwa sejarah karena lambat laun bahasa ibu bagi kelompok penutur ini akan mengalami kepunahan sama sekali. Penggunaan bahasa yang tidak dilanjutkan oleh keluarga atau diajarkan oleh ibu sebagai orang pertama yang menjadi perantara bahasa tersebut dapat mengakibatkan suatu bahasa tersebut mengalami pergeseran bahasa secara nyata. Hal tersebut ditandai dengan hilangnya tradisi bercerita atau dongeng sebelum tidur yang biasanya dibacakan oleh sang ibu ketika akan menidurkan anaknya, kemudian bacaan yang tersedia sebagai bahan bacaan sebagian banyak berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Lebih lanjut, punahnya suatu bahasa ditandai dengan berkurangnya atau bahkan hilangnya bahasa lokal yang dipakai dalam pertuturan di dalam keluarga, misalnya antara keluarga dan anak-anak (2003:14—15).

(2) Faktor lingkungan

Adanya kajian sosiolinguistik agaknya perlu menjadi bahan kajian bahasa pada ranah sosial, dengan artian lingkungan sosial ternyata berpengaruh dalam perkembangan bahasa itu sendiri. Proses dari pembelajaran bahasa menjadikan manusia yang dimulai dengan anak-anak mulai mengembangkan bahasa di lingkungannya sebagai proses adaptasi, misalnya saja bahasa anak yang digunakan di sekolah kemungkinan akan berbeda dengan yang digunakan di rumah. Selain akibat dari perkembangan bahasa yang diperoleh sedari kecil, mengembangkan bahasa berdasarkan *style* ternyata juga mulai dirasakan oleh para remaja saat ini, misalnya saja para remaja yang merantau untuk berkuliah di luar daerahnya, secara otomatis lambat laun mereka akan menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan lingkungan baru dan mungkin akan sedikit kesulitan jika akan menggunakan

bahasa daerahnya kembali.

Masyarakat urban pada saat ini yang lebih cenderung acuh dan menghilangkan bahasa daerahnya ketika berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya, memang hal ini sangatlah wajar, karena jika harus menggunakan bahasa daerah dari tiap-tiap daerahnya, maka komunikasi yang terjalin juga tidak dapat berjalan dengan baik.

1.3 Strategi Media Sosial untuk Mengatasi Krisis Bahasa di Kalangan Remaja

Berikut akan disampaikan strategi yang mungkin dapat ditawarkan untuk melestarikan bahkan mungkin juga bisa sebagai media mengenalkan bahasa daerah di masyarakat.

(1) Hari nasional penggunaan bahasa daerah di berbagai wilayah

Penggunaan bahasa daerah pada hari-hari tertentu yang disampaikan melalui media sosial bisa dijadikan salah satu langkah strategis untuk mengenalkan dan memperkuat bahasa daerah itu sendiri di kalangan masyarakat. Pemerintah bisa menggunakan salah satu langkah ini sebagai cara untuk melestarikan bahasa daerah sebagai salah satu kearifan lokal. Cara yang seperti ini dirasa lebih efektif karena dapat langsung diaplikasikan kepada masyarakat melalui media sosial, terlebih mengingatkan masyarakat ketika berinteraksi dengan masyarakat lainnya di luar media sosial. Cara yang seperti ini telah dipopulerkan oleh salah satu Wali Kota di Bandung yakni Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menggunakan “Rabo Nyunda” sebagai langkah yang tepat untuk mengingatkan masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa berkomunikasi melalui media sosial. Langkah dari Ridwan Kamil ini seharusnya dapat dijadikan sebagai strategi pelestarian bahasa daerah melalui media sosial.

(2) Peubahan lirik lagu asing menjadi bahasa daerah

Banyak sekali saat ini di media sosial para warganet yang secara kreatif meubah lagu-lagu yang sedang viral di kalangan masyarakat dengan menggunakan lirik berbahasa daerah. Hal ini bisa digunakan sebagai sarana promosi bahasa daerah pada warganet, paling tidak dengan mengetahui lagunya dengan ubahan lirik yang jenaka, mereka bisa lebih tertarik untuk mempelajari bahasa daerah tersebut.

Contoh dari ubahan lagu yang belakangan ini sedang viral di media sosial adalah lagu “Despacito” yang dinyanyikan oleh Justin Beiber. Banyak ubahan dari lirik despacito yang bermakna negatif ini diubah oleh banyak warganet menjadi lirik berbahasa daerah dengan arti positif dibandingkan dengan arti pada lagu aslinya.

(3) Humor berbahasa daerah oleh selebgram

Banyak sekali cara yang dilakukan para selebgram untuk meraih perhatian warganet adalah menggunakan bahasa humor. Humor merupakan salah satu hal yang paling digemari oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya selebgram yang menjadi viral karena celotehan humor yang ia lontarkan.

Dari beberapa selebgram tersebut banyak sekali yang menggunakan bahasa daerah ketika menyampaikan humornya. Salah satu contoh selebgram yang menggunakan humor berbahasa daerah di media sosial adalah Kadir Bachmid, atau yang akrab dipanggil dengan d_kadoor. Melalui media instagram, ia mampu merebut perhatian *netizen* sebanyak 1,5 Milyar. Dalam setiap unggahannya, Kadir selalu menggunakan bahasa daerah Malang atau juga bahasa Jawa melalui setiap celotehan humornya.

(4) Kamus bahasa daerah dan *quote* berbahasa daerah

Media sosial yang ada saat ini juga menjadi salah satu fasilitas adanya kamus berbahasa *online* (daring). Saat ini mudah sekali kita mendapatkan kamus berbahasa yang gratis melalui media daring. Melalui media sosial instagram, juga sering kita jumpai adanya akun yang berisikan *quote-quote* dari tiap-tiap bahasa daerah yang memberikan arti positif dan sarat makna.

Melihat fenomena tersebut, sebetulnya pemerintah dapat menginstruksikan tiap-tiap pemimpin daerah untuk membuat akun yang berisikan nasihat-nasihat, motto, jargon, ataupun simbol-simbol berbahasa daerah yang mungkin dapat menggambarkan wilayah atau daerahnya. Hal ini tentunya membutuhkan *support* dan peran serta masyarakat dalam melestarikan bahasa daerah di tiap-tiap wilayahnya.

3. Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut. *Pertama*, Penggunaan bahasa daerah di era globalisasi sungguh sangat kritis. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kepunahan bahasa serta sedikitnya penutur bahasa daerah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peran aktif pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam pelestarian serta pemertahanan bahasa. Hal yang bisa dilakukan yakni dengan memanfaatkan media sosial melalui kegiatan-kegiatan yang dapat disosialisasikan melalui media.

Kedua, faktor yang memengaruhi punahnya bahasa daerah bisa berasal dari keluarga, sekolah, lingkungan, dan media sosial. Hal tersebut sebaiknya kita jadikan sebagai refleksi dan perenungan lebih lanjut untuk dapat mengaplikasikan bahasa daerah sebagai alat komunikasi di lingkungan kita.

Ketiga, Salah satu strategi yang dapat dijalankan pemerintah untuk melestarikan bahasa daerah sebagai melalui media sosial bisa dilakukan dengan cara (i) memberlakukan hari-hari tertentu untuk menggunakan bahasa daerah di tiap-tiap wilayah di Indonesia, (ii) peubahan lirik-lirik lagu barat menjadi lirik berbahasa daerah, (iii) peran selebgram untuk mengangkat bahasa daerahnya masing-masing dalam indak tuturnya, (iv) pembuatan kamus daring pada tiap-tiap daerah serta pembuatan akun untuk tiap-tiap daerah dalam menyampaikan jargon, motto, maupun *qote* dalam bahasa daerahnya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Amar, Rahim. 2004. Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa. Dalam situs <http://dbp.Gov.my/dbp98/majalah/pelita99/pb0399jurai.htm>. 12 Juni 2004.
- Chaer, A dan Agustina L. 2004. *Sosiolingusitik Perkenalan Awal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mbete, Aron Meko. 2003. Bahasa dan Budaya Lokal Minoritas: Asal-Muasal, Ancaman Kepunahan, dan Ancangan Pemberdayaan dalam ranga PIP Kebudayaan Universitas Udayana. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Udayana Bali.
- Saryono, Djoko. 2017. Model Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah di Provisnsi Jawa Timur. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sumarsono. 1993. *Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali*. Disertasi FSUI. Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa 1990 dalam Sumarsono (Ed) 2002 dan Chaer dan Agustina (Ed) 2004.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 3

Hari, tanggal	: Kamis, 7 September 2017
Waktu	: Pukul 13.45—14.30
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	: Erniati, S.S.
Pemakalah I	: Dr. Yulianeta
Pemakalah II	: Dr. Rachmawaty Patty
Pemakalah III	: Noveria Anggraeni Fiadji
pemakalah IV	: Adi Syaiful Mukhtar, S.S.
Notulis	: Selvone C. Pattiserlihin
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra

Makalah I

**REVITALISASI NASKAH KLASIK, HIKAYAT RAJA KERANG
KE DALAM FILM ANIMASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN
SASTRADI ERA DIGITAL**

Latar belakang penelitian berdasarkan asumsi bahwa Indonesia kaya akan kebudayaan. Negara kaya dengan kebudayaan, seperti naskah klasik. Hasil dari penelitian ini di tahun 2009 membuat komik Hikayat Raja Kerang. Tahun 2015 membuat film animasi dan lahir film Raja Kerang. Hal ini merupakan sebuah inovasi. Film animasi berbasis naskah ini dapat ditemukan di Museum Naskah Nasional. Alur proses dalam pembuatan film animasi ini adalah menganalisis teks hipogram, menyusun skenario, dan membuat film. Film ini berdurasi 40 menit. Film

ini bercerita tentang permaisuri yang diusir raja karena telah melahirkan anak kerang. Dari cangkang kerang lahir bayi yang dinamakan raja kerang.

Terdapat banyak nilai moral dalam film hikayat raja kerang seperti, tidak baik menyimpan dendam, sesuai dengan ajaran leluhur dan juga harus saling memaafkan.

Tanggapan:

1. Darimanakah naskah Hikayat Raja Kerang? (Yanti Riswara, Kantor Bahasa Lampung)
2. Kenapa film Hikayat Raja Kerang tidak dipublikasikan ke televisi? (Michele)
3. Kenapa mengambil manuskrip Raja Kerang, kenapa tidak La Galigo? (Farid)
4. Representasi v itu untuk perempuan atau laki-laki dan apakah makan kerang pemali atau tidak? Hanya sekedar simbol. Makan kerang tidak dilarang hanya merupakan sebuah simbol saja dalam film hikayat raja kerang. Agar anak-anak tidak terobsesi sama film Ultraman dan lainnya. (Prof. Pattinama, Unpatti)

Jawaban:

Naskah Melayu Riau. Dengan latar penulisan menggunakan tulisan Kepulauan Riau. Tahun ini film Raja Kerang telah mendapatkan hak cipta, hanya belum berani dipublikasikan ke nasional sebab harus di uji coba dulu. Karena La Galigo adalah naskah yang sangat besar dan sudah dipentaskan di Paris.

Makalah II

**PENGAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH :
LARFULNGABAL DI PULAU KEI**

Sebuah hukum adat di Kei yang sarat akan makna dan filosofi. Hal itu merupakan sebuah tradisi di Kei. Hukum itu masih eksis sampai sekarang walaupun bersifat lisan.

Mulok merupakan kegiatan pengenalan/peningkatan ciri khas sebuah daerah yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan atau ciri khas daerah tersebut, dipakai dalam lingkup mikro. Muatan lokal dapat diberikan di semua mata pelajaran sehingga guru harus tahu. Jika kata-kata yang tak dapat dimengerti dalam bahasa Indonesia, maka dapat dialihbahasakan ke bahasa daerah.

Terdapat unsur mengapa pelajaran ini harus diajarkan: sistem geografis, perkampungan, kematian, hukum, peradilan. Pelajaran ini menyimpan empat faktor, cerita (asal usul orang Kei, pembentukan hukum, pengangkatan raja-raja di Kei).

Tanggapan:

1. Apakah pembelajaran Larfungabal, terintegrasi atau terpisah? Untuk kota Ambon sangat multikultural, jadi belum dapat diaplikasikan. (Meske Gaspersz, Guru SMAN 6)
2. Budaya telah terkikis. Bukan hanya di otak tapi juga di hati. Bagaimana melestarikan bahasa ini? (Bapak dari Malra)

Jawaban:

Dalam memutuskan perubahan sistem/kurikulum perlu ada perundingan dalam jenjang pemerintah. Setiap hari rabu sabtu, kita bisa membuat *Kei language day*.

Makalah III

**PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PEMERKUAT
SERTA PENGENALAN BAHASA DAERAH KEPADA MASYARAKAT
DI ERA GLOABLISASI**

Teknologi penting dalam upaya menyampaikan bahasa daerah. Rumusan umum dalam penulisan ini adalah bagaimana potret penggunaan bahasa daerah di era global diantaranya kurangnya tradisi lisan, faktor lingkungan. Adapun strategi dalam penggunaan media sosial, yaitu untuk mengatasi krisis bahasa di kalangan remaja.

Faktor krisis penggunaan bahasa daerah di kalangan remaja malang, yakni faktor keluarga, lingkungan, sekolah, dan media sosial.

Pemerintah harus lebih aktif untuk melakukan kebijakan dalam pelestarian bahasa daerah. Faktor punahnya bahasa daerah adalah dari keluarga, lingkungan dan medsos. Strategi untuk meminimalisirnya dapat dilakukan melalui media sosial dengan cara mengatasi krisis bahasa di kalangan remaja. Oleh sebab itu model pelestarian bahasa daerah yang harus dilakukan adalah penggunaan bahasa daerah pada Hari Nasional di berbagai wilayah, mengubah lirik lagu asing dengan terjemahan bahasa daerah, adanya humor berbahasa daerah yang ditampilkan oleh selebgram, adanya *quote-quote* berbahasa daerah.

Tanggapan:

1. Saran saja, baiknya membuat sesuatu yang lebih menarik dengan cara penyebaran melalui teknologi. (Melania)

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELESTARIAN BAHASA DAERAH BERDASARKAN UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN RUU BAHASA DAERAH¹

Multamia RMT Lauder

Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

1. Pembuka

Tulisan ini menjajagi terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemaajuan Kebudayaan yang baru saja disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2017 oleh Presiden RI dan kaitannya dengan inisiatif penyusunan RUU Bahasa Daerah yang dilaksanakan oleh Komite III DPD RI, di bawah payung lingkup Kebudayaan.

Sejauh mana Undang-Undang Pemaajuan Kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk pelestarian bahasa daerah dan selain itu apakah dengan terbitnya UU tersebut, menyebabkan RUU Bahasa Daerah yang kini statusnya dalam antrian pembahasan di DPR RI menjadi tidak diperlukan lagi?

2. Penanganan Budaya dan Bahasa Daerah

Harus diakui, bahwa bidang budaya akhir-akhir ini sudah mulai disentuh. Namun untuk dapat menangani masalah budaya yang beranekaragam dan kompleks di Indonesia, diperlukan kemauan kerja keras, dana, serta panduan kinerja yang jelas

¹ Makalah untuk Kongres Internasional dan Lokakarya Bahasa Daerah Maluku, dengan tema: “Pelindungan Bahasa-Bahasa Daerah sebagai Aset dan Jati Diri Bangsa”. Ambon, 7—8 September 2017.

secara nasional. Penanganan budaya yang sepiantas dan sporadis, hasilnya tidak akan signifikan untuk tataran nasional, sehingga Jones pernah menyatakan bahwa budaya tetap menjadi “*a neglected area of governance*” di Indonesia (Jones, 2013:188—189). Untunglah, tekad kuat untuk menangani budaya secara komprehensif mulai terwujud, dengan terbitnya sebuah UU baru yang khusus menangani masalah budaya. Tentu saja, terbitnya UU tersebut, tidak secara otomatis dapat menangani semua masalah budaya dan juga mencegah kepunahan bahasa daerah. Namun, terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta inisiatif DPD RI menyusun RUU Bahasa Daerah perlu dihargai karena sangat diperlukan oleh banyak pihak yang bergerak dalam bidang penanganan budaya dan bahasa daerah.

Janganlah budaya itu dipahami sebatas seni pertunjukan atau pakaian adat saja. Pola pemikiran yang seperti itulah, yang membuat budaya di negeri ini tidak pernah diprioritaskan dan dianggap tidak urgen. Selain itu, jika menggagas masalah kebudayaan, kita sering dibenturkan dengan keterbatasan dana pemerintah. Hal inilah, yang pada akhirnya, meminggirkan tatanan budaya. Padahal maju tidaknya sebuah bangsa sangat tergantung pada budayanya. Huntington (2000) dalam tulisannya *Cultures Count* menyatakan bahwa budaya itu sangat penting dan diperlukan oleh sebuah komunitas atau bangsa. Selain itu, dalam buku yang sama yaitu *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, Grondona (2000) menulis mengenai *A Cultural Typology of Economic Development* yang menelisik negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Namun berdasarkan analisisnya, hanya beberapa negara saja, seperti Jerman dan Korea Selatan, yang mampu bangkit dengan cepat dari keterpurukan itu berkat budayanya. Budaya di sini lebih dimaknai sebagai tata nilai dan simbol-simbol yang mempengaruhi serta membentuk masyarakatnya berpola pikir positif dan memiliki motivasi untuk maju.

Untuk memahami nilai budaya, dapat dilakukan melalui pemahaman bahasanya karena bahasa adalah pemelihara eksistensi budaya dan juga memiliki fungsi sebagai penyimpan tata nilai budaya dalam bentuk kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Sayangnya, hingga saat ini, belum terwujud adanya penanganan atau kebijakan yang menyeluruh dan operasional dari pihak pemerintah untuk memiliki informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil budaya Indonesia. Namun di sisi lain, perlu juga disadari bahwa menggali profil bahasa daerah bukanlah hal yang mudah. Sejujurnya karena hal itu terkait dengan pengetahuan kita tentang variasi bahasa daerah yang belum lengkap dan minim. Terutama mengenai keragaman dan variasi bahasa di kawasan timur Indonesia yang sangat istimewa. Demi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia, perlu dilakukan penggalian secara serius dan sistematis mengenai bahasa daerah. Hal ini sangat diperlukan karena bahasa daerah merupakan penyimpan tata nilai budaya serta

pembentuk jatidiri bangsa yang bernaung di bawah payung NKRI.

Terkait dengan masalah bahasa sebagai penyimpan tata nilai budaya serta pembentuk jatidiri, UNESCO mendukung sepenuhnya kegiatan riset mengenai proses pewarisan bahasa-ibu di seluruh dunia yang dilakukan oleh Barreña dkk (2000:328—330). Hasil riset Barreña mendeskripsikan bahwa hanya sekitar 30% kegiatan transmisi bahasa-ibu dari generasi orangtua ke generasi anak yang berjalan dengan lancar. Kegiatan transmisi bahasa-ibu lainnya yang 70% terkendala. Kendala yang harus dihadapi antara lain menyangkut masalah sikap bahasa yang negatif, perkawinan tak seetnis, minimnya jumlah penutur, tidak adanya perhatian dari pihak pemerintah, tekanan dari pihak sekolah, emigrasi, penjajahan, diskriminasi kultural termasuk asimilasi oleh kelompok budaya yang dominan, peperangan, dan penyakit AIDS. Bahkan selain hasil riset itu, dalam menyikapi kondisi dunia saat ini, Lauder dan Lauder (2015:211) menambahkan bahwa perlu juga dipertimbangkan adanya beberapa kendala nonlinguistik lain yang sangat berkaitan untuk bertahan hidup yang dapat mempengaruhi proses pergeseran atau perubahan bahasa. Kendala nonlinguistik itu adalah perubahan iklim (*climate change*) yang mengakibatkan antara lain terjadinya cuaca ekstrim (*extreme weather*), naiknya permukaan laut (*sea level rise*), serta rawan pangan dan rawan air (*food and water shortages*). Selanjutnya masih terdapat faktor tekanan ekonomi, politik, dan globalisasi yang juga dapat mengakibatkan seseorang atau sebuah komunitas melakukan pergeseran atau perubahan bahasa demi pertimbangan kelangsungan hidup (Lauder, 2016). Dengan demikian, apabila seseorang atau sebuah komunitas memutuskan untuk meninggalkan bahasa daerahnya, dengan berbagai alasan, maka bahasa daerah itu akan punah dan berakibat pada hilangnya kekayaan warisan bangsa. Pengetahuan dan nilai-nilai budaya dengan sendirinya akan hilang lenyap apabila bahasa sebagai pendukung budaya itu punah (Harrison, 2007:205—236, Nettle and Romaine, 2000:50—77).

Berdasarkan informasi 2015 dari Ethnologue² di Indonesia sudah tercatat 13 bahasa yang punah dan tinggal 706 bahasa yang hidup. Namun perlu dicamkan bahwa dari 706 bahasa tersebut, terdapat 341 bahasa daerah yang memerlukan perhatian khusus, dengan rincian sebagai berikut: 266 bahasa *berstatus lemah* dan 75 bahasa *berstatus sekarat*. Mungkin kondisi kebahasaan yang buruk ini, belum sepenuhnya disadari oleh para linguis Indonesia apalagi oleh non-linguis. Sehubungan dengan hal itu, perlu renungan kembali, betapa minimnya pengetahuan kita mengenai kekayaan budaya nasional sehingga tak mengherankan jika kita belum berbuat sesuatu yang signifikan untuk melindungi eksistensi warisan budaya kita. Pada umumnya, bahasa-bahasa yang *berstatus lemah* dan *sekarat* cenderung minim jumlah penuturnya dan tidak memiliki sistem tulisan. Kelangsungan hidup bahasa-bahasa itu sangat

² <https://www.ethnologue.com/>

bergantung pada transmisi lisan antargenerasi. Apabila bahasa-bahasa itu tidak segera dibantu maka akan sangat sulit untuk mempertahankan eksistensi budaya mereka. Crystal (2000:20) berpendapat bahwa bahasa yang berpenutur sekurang-kurangnya 1000 orang dapat dikategorikan sebagai bahasa yang masih memiliki daya hidup (*viable but small*) dan masih mungkin untuk direvitalisasi. Namun harus ada kemauan dari masyarakat penuturnya dan juga kemauan dari pihak pemerintah untuk menyelamatkan bahasa-bahasa itu, mengingat daya saingnya sangat lemah, sehingga sulit untuk bersaing dengan bahasa Melayu setempat. Apalagi jika harus bersaing dengan bahasa nasional yang minimal wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional dan pelayanan administrasi publik.

Pada titik inilah, kita perlu menjenguk sejauh mana bahasa daerah diatur berdasarkan legislasi yang memayungi berbagai kegiatan untuk pelestarian dan penyelamatan bahasa daerah. Kepastian hukum sangat penting sebagai landasan kegiatan dan juga sebagai acuan dan pengesahan untuk mengeluarkan dana pelestarian dan pengembangan bahasa.

3. UU Pemajuan Kebudayaan

Kini, saatnya mencoba mendapatkan gambaran umum mengenai hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. UU ini terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 61 (enam puluh satu) Pasal. Intinya, konstruksi UU tersebut adalah sebagai berikut: Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Pemajuan; Bab III: Hak dan Kewajiban; Bab IV: Tugas dan Wewenang; Bab V: Pendanaan; Bab VI: Penghargaan; Bab VII: Larangan; Bab VIII: Ketentuan Pidana; serta Bab IX: Ketentuan Penutup.

Di bawah ini akan dicuplik beberapa pasal yang kemungkinan besar terkait dengan kebijakan dan strategi pelestarian bahasa daerah.

Bab I, Pasal 1, Ayat 3:

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Bab I, Pasal 3:

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| a. toleransi; | c. kelokalan; |
| b. keberagaman; | d. lintas wilayah; |

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| e. partisipatif; | i. keterpaduan; |
| f. manfaat; | j. kesederajatan; dan |
| g. keberlanjutan; | k. gotong royong. |
| h. kebebasan berekspresi; | |

Bab I, Pasal 4:

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- memperkaya keberagaman budaya;
- memperteguh jati diri bangsa;
- memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- mencerdaskan kehidupan bangsa;
- meningkatkan citra bangsa;
- mewujudkan masyarakat madani;
- meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Bab I, Pasal 5:

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| a. tradisi lisan; | f. teknologi tradisional; |
| b. manuskrip; | g. seni; |
| c. adat istiadat; | h. bahasa; |
| d. ritus; | i. permainan rakyat; dan |
| e. pengetahuan tradisional; | j. olahraga tradisional. |

Bab II, Pasal 8:

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- Strategi Kebudayaan; dan
- Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Dengan demikian, untuk Pemajuan Kebudayaan diperlukan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang berangkat dari keberagaman objek kebudayaan dan kelokalan setempat. Digarap secara berjenjang dari wilayah administrasi yang kecil menuju ke wilayah administrasi yang lebih besar yaitu dimulai dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, lalu disatukan di Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Selanjutnya menjadi Strategi Kebudayaan secara nasional, yang akhirnya menghasilkan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Bab II, Pasal 13:

- (1) Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Strategi Kebudayaan berisi:
 - a. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
 - b. visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - c. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - e. peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - f. analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Penyusunan Strategi Kebudayaan dilakukan dengan:
 - a. menggunakan pendekatan yang komprehensif;
 - b. menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan

- c. memperhatikan sifat saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung antar-Kebudayaan di Indonesia.
- (5) Anggaran penyusunan Strategi Kebudayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (6) Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Presiden.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bab II, Pasal 14:

- (1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi:
 - a. visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. perencanaan;
 - d. pembagian wewenang; dan
 - e. alat ukur capaian.
- (3) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjabaran pada Bab II, Pasal 13 dan Pasal 14, setelah Pokok Pikiran Kebudayaan terkumpul dari setiap Kabupaten/Kota di tataran Provinsi, maka langkah berikutnya adalah pembuatan Strategi Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaannya disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, kita memperoleh gambaran bahwa UU ini membantu mengarahkan secara nasional hal-hal apa yang harus dikerjakan, agar Pemerintah memiliki kebijakan yang menyeluruh dan terpadu serta memiliki informasi yang komprehensif mengenai profil budaya Indonesia.

4. Regulasi Mengenai Bahasa³

Untuk kepentingan *bahasa Indonesia* sebagai bahasa nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam lima belas ranah, yaitu: ranah peraturan perundang-undangan; dokumen resmi negara; pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri; pengantar dalam pendidikan nasional; pelayanan administrasi publik; nota kesepahaman atau perjanjian; forum resmi yang bersifat nasional atau forum resmi yang bersifat internasional di Indonesia; komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan; penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; nama geografi di Indonesia; nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, merek jasa, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia; informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia; rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan informasi melalui media massa.

Untuk kepentingan *bahasa daerah*, berdasarkan pelacakan terhadap berbagai legislasi bahasa daerah, maka di bawah ini terhimpun berbagai jenis peraturan tentang bahasa daerah dimulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah baik pada tataran provinsi, kabupaten, maupun kota:

1) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 18b, Ayat (2) berkenaan dengan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat dalam Bab Pemerintahan Daerah; serta Pasal 32, Ayat (2) berkenaan dengan Kebudayaan Nasional

2) Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Lambang dan

Bahasa serta Lagu Kebangsaan, jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

³ Pada bagian ini, sebagian telah disampaikan pada *Kongres Bahasa Daerah Nusantara*, Bandung, 2016. Kerjasama antara Yayasan Kebudayaan Rancage; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengembangan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

4) Peraturan Menteri:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

5) Peraturan Daerah:

Peraturan Daerah *Provinsi Jawa Barat* Nomor 5 Tahun 2003 jo. Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda;

Peraturan Daerah *Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* Qonun 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat

Peraturan Daerah *Provinsi Lampung* Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

Peraturan Daerah *Provinsi Kalimantan Selatan* Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah

Peraturan Daerah *Provinsi Jawa Tengah* Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa Sastra dan Aksara Jawa;

Peraturan Daerah *Provinsi Jambi* Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi

Peraturan Daerah *Provinsi Jawa Timur* Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Gubernur *Bali* No 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Daerah *Kota Yogyakarta* Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogya

Peraturan Daerah *Kota Bandung* Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penggunaan, Pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda

Peraturan Daerah *Kota Karanganyar* Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pemeliharaan Pengembangan Bahasa Sastra dan Aksara Jawa

Peraturan Daerah *Kabupaten Garut* Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1867 Tahun 2013 tentang Penggunaan Bahasa Jawa Dialek Banyumas di *Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas*.

Berdasarkan pelacakan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa legislasi mengenai bahasa daerah sudah sangat banyak. Dimulai dari aturan tertinggi berupa Undang-Undang hingga Keputusan Bupati. Pada umumnya, pembuatan legislasi itu mengacu ke aturan yang lebih tinggi yaitu mengacu ke salah satu pasal dari UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pelacakan legislasi, maka terlihat bahwa bahasa daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Namun demikian, perlu dicermati kerangka pengaturannya (Tim Ahli RUU Bahasa Daerah, 2015):

1. UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 32 Ayat (2) memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan bahasa daerah sebagai salah satu bentuk kebudayaan nasional;
2. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Lambang dan Bahasa serta Lagu Kebangsaan, terutama mengatur mengenai kewajiban pemakaian Bahasa Indonesia di berbagai ranah. Sesungguhnya UU tersebut disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat nasional khususnya mengatur atribut atau lambang yang mencirikan Indonesia sebagai sebuah negara, sehingga pengaturan terhadap Bahasa Daerah tidak maksimal;
3. Berbagai provinsi/kabupaten/kota melakukan inisiatif, menerbitkan Perda yang secara khusus mengatur bahasa daerah di wilayah masing-masing, namun ruang lingkup dan kerangka pengaturannya berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum yang lebih tinggi untuk menyatukan standar dan pola pengelolaan bahasa daerah yang operasional dan lebih komprehensif;
4. Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa kondisi bahasa daerah tetap terancam eksistensinya walaupun sudah banyak legislasi yang mengatur bahasa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan untuk melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kondisi itu menjadi landasan yang kuat untuk mengupayakan pengaturan secara khusus mengenai bahasa daerah dalam sebuah undang-undang yang bersifat nasional. Secara *yuridis*, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melahirkan beraneka ragam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bahasa daerah maupun berkaitan dengan bahasa, sastra, dan aksara daerah. Namun demikian, secara *de-facto* berbagai produk legislasi itu belum mengatur bahasa daerah secara komprehensif, dan masih terkesan parsial. Padahal menurut Pasal 32, UUD NRI Tahun 1945, secara gamblang menyatakan bahwa:

- (1) Negara **memajukan** kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan **menjamin kebebasan** masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan
- (2) Negara **menghormati** dan **memelihara** bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Kenyataan di lapangan, upaya untuk melindungi bahasa-bahasa tersebut terkendala, di antaranya yang berkaitan dengan (1) fungsi bahasa daerah, (2) persepsi masyarakat terhadap bahasa daerah, dan (3) pengaturan bahasa daerah (Tim Ahli RUU Bahasa Daerah, 2015):

- (1) Kendala pertama yaitu yang berkaitan dengan fungsi bahasa daerah. Selama ini, fungsi bahasa daerah biasanya cenderung dikaitkan dengan sumbangannya untuk bahasa nasional. Bahasa daerah hanya dianggap sebagai pendukung untuk pengayaan bahasa Indonesia. Anggapan seperti inilah yang merendahkan fungsi bahasa daerah, sehingga terkesan bahwa bahasa daerah hanya berfungsi untuk kepentingan pengayaan bahasa nasional. Bahasa daerah yang tidak dapat memberikan sumbangan untuk pengayaan bahasa nasional dianggap tidak penting sehingga tidak perlu dilindungi;
- (2) Kendala kedua yaitu yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap bahasa daerah. Persepsi masyarakat cenderung mempertentangkan antara Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara yang dianggap mewakili pemikiran dan kehidupan modern, sedangkan bahasa daerah sebagai bahasa setempat yang dianggap mewakili pemikiran dan kehidupan bersifat kedaerahan atau tradisional bahkan kadang kala diidentikkan dengan keterbelakangan. Persepsi ini diperkuat dengan kenyataan bahwa di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, bahasa daerah kurang mempunyai nilai ekonomis dan prestise dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia dipandang sebagai pemersatu bangsa, sedangkan upaya untuk melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa daerah dikhawatirkan membangkitkan isu separatisme dari NKRI. Persepsi negatif terhadap bahasa daerah ini, tentu saja menghambat bahkan mendorong masyarakat untuk menjauhi atau meninggalkan bahasa daerah;
- (3) Kendala ketiga yaitu yang berkaitan dengan pengaturan bahasa daerah. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pengaturan bahasa daerah cenderung bersifat parsial dan sporadis. Peraturan terkait bahasa daerah tersebar dalam berbagai aturan, bahkan misalnya merupakan bagian dari peraturan tentang bahasa negara, tentang sistem pendidikan nasional, dan

juga tentang hak cipta. Regulasi yang khusus mengatur bahasa daerah justru ada pada peraturan pemerintah daerah, sehingga bersifat khusus untuk daerah yang bersangkutan dan dalam beberapa hal bahkan berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Salah satu upaya yang penting adalah menunjukkan keberpihakan melalui payung hukum agar dapat mengelola bahasa daerah secara efektif. Untuk itulah RUU Bahasa Daerah diharapkan menjadi undang-undang yang dapat menjamin kelangsungan hidup bahasa-bahasa daerah di Indonesia secara terarah, sistematis, dan komprehensif. Ini adalah inisiatif DPD RI, merupakan niat baik yang layak disambut secara positif.

Ada pun langkah-langkah penyusunan RUU harus mengikuti prosedur baku dari DPD RI yaitu ada 7 tahapan kegiatan. Rinciannya adalah sebagai berikut: kegiatan (1) Penelitian Empiris, (2) Telaah Sejawat, dan (3) Finalisasi Naskah Akademik oleh Tim Ahli. Lalu, kegiatan (4) Studi Referensi oleh Anggota Komite III DPD RI, (5) Kunjungan Kerja ke Daerah, (6) Uji Sahih, dan (7) Finalisasi RUU merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota Komite III DPD RI didampingi oleh Tim Ahli.

Setelah Draf Final RUU Bahasa Daerah terwujud maka diproses lebih lanjut ke Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) khususnya Tim Ahli PPUU yang terdiri dari lima orang ahli hukum untuk melakukan harmonisasi agar tidak ada yang tumpang tindih atau bertentangan dengan UU lainnya. Hasilnya menjadi RUU Bahasa Daerah yang siap untuk diajukan ke pihak DPR RI.

5. RUU Bahasa Daerah⁴

Hasil RUU Bahasa Daerah yang telah direvisi berdasarkan harmonisasi dengan PPUU terdiri dari 9 (Sembilan) Bab, 46 (empat puluh enam) Pasal, dan 88 (delapan puluh delapan) Ayat. Konstruksi naskah RUU Bahasa Daerah adalah sebagai berikut:

⁴ Pada bagian ini, dapat disimak lebih rinci di *Mahaguru yang Bersahaja: Persembahan untuk Prof. Dr. Muhadjir*. 2016. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN....
TENTANG
BAHASA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

MENIMBANG-MENGINGAT-MENETAPKAN

- Menimbang: a. bahwa negara menghormati dan memelihara Bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional yang perlu dilindungi, dibina, dan dikembangkan sebagai sarana pembentuk jati diri bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Bahasa Daerah sebagai sarana komunikasi dan penyimpan keragaman pengetahuan budaya serta kearifan lokal dalam perkembangannya mengalami ancaman kepunahan;
- c. bahwa pengaturan Bahasa Daerah masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bahasa Daerah;

Mengingat: Pasal 18B, 22D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG BAHASA DAERAH**

Catatan:

Pada bagian ini disampaikan kewajiban negara untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah.

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dialek adalah bentuk variasi dalam Bahasa Daerah yang digunakan oleh penuturnya yang memiliki perbedaan kosa kata, tata bahasa, atau aksen.
3. Pengelolaan adalah keseluruhan upaya dalam rangka menghormati dan memelihara Bahasa Daerah yang mencakup aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian.
4. Perencanaan adalah upaya untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan di masa depan melalui serangkaian proses dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam rangka menghormati dan memelihara Bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
5. Pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah.
6. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara keberadaan Bahasa Daerah agar tetap tumbuh, berkembang, dan terhindar dari ancaman kepunahan.
7. Pembinaan adalah upaya menumbuhkan sikap positif dan meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah.
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan fungsi Bahasa Daerah sebagai sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat.
9. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah dapat terlaksana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
10. Pengevaluasian adalah penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah yang dipergunakan sebagai bahan perbaikan pada tahap selanjutnya.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Catatan:

Pada bagian ini dijabarkan semua definisi kata-kata kunci yang digunakan dalam RUU Bahasa Daerah.

Pasal 2

Pengaturan Bahasa Daerah berasaskan:

- a. kebinekaan;
- b. persatuan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterpaduan; dan
- e. keberlanjutan.

Catatan:

Untuk Pasal 2 ini perlu diberi penjelasan bahwa pada Huruf a yang dimaksud dengan *asas kebinekaan* adalah pengaturan Bahasa Daerah untuk menjaga keragaman masyarakat dan memelihara kekayaan budaya nasional. Pada Huruf b yang dimaksud dengan *asas persatuan* adalah bahwa pengelolaan bahasa daerah harus mampu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Huruf c yang dimaksud dengan *asas kepastian hukum* adalah bahwa perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah memerlukan jaminan kepastian hukum untuk menjaga keberadaannya. Pada Huruf d yang dimaksud dengan *asas keterpaduan* adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan dalam masyarakat. Pada Huruf e yang dimaksud dengan *asas keberlanjutan* adalah bahwa perlindungan, pembinaan, dan pengembangan

Bahasa Daerah dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat secara sadar memelihara dan menggunakan Bahasa Daerah

Pasal 3

Pengaturan Bahasa Daerah bertujuan:

- a. menghormati dan memelihara Bahasa Daerah;
- b. mengelola Bahasa Daerah secara terpadu dan berkesinambungan;
- c. melindungi Bahasa Daerah dari ancaman kepunahan;
- d. membina masyarakat agar bersikap positif terhadap Bahasa Daerah; dan
- e. mengembangkan Bahasa Daerah sebagai sarana komunikasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Bahasa Daerah mencakup seluruh aspek pengelolaan yaitu perencanaan, perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah.

BAB II: KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Bahasa Daerah berkedudukan sebagai kekayaan budaya nasional yang harus dihormati dan dipelihara keberadaannya.

Pasal 6

Bahasa Daerah berfungsi sebagai sarana ekspresi sastra dan budaya daerah, penyimpan pengetahuan dan kearifan lokal serta perekat jati diri masyarakat di daerah.

BAB III: PENGGUNAAN

Pasal 7

Bahasa Daerah digunakan untuk:

- a. komunikasi dalam keluarga dan masyarakat di daerah; dan
- b. mengungkap adat istiadat, hukum adat, sejarah, dan kesenian berbasis Bahasa Daerah.

Catatan:

Pada Pasal 7, Huruf b yang dimaksud dengan *kesenian berbasis bahasa daerah* adalah jenis karya seni yang menggunakan bahasa daerah sebagai media penyampaian, seperti karya sastra modern (*prosa, puisi, drama*) dan karya sastra tradisional (*pustaka, lontara, manuskrip*), seni tutur (*macapat, mabasan, sahibul hikayat, bakaba*), seni pertunjukan tradisional (*ludruk, ketoprak, mamanda*), dan lagu-lagu daerah.

Pasal 8

Selain digunakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai:

- a. sarana komunikasi di instansi pemerintah daerah pada waktu tertentu dan keadaan tertentu;
- b. bahasa pengantar pada pendidikan dasar;
- c. bahasa media massa di daerah;
- d. sarana pelaksanaan kegiatan ritual dan keagamaan; dan
- e. nama geografi, batas administratif, bangunan, jalan, dan organisasi.

Catatan:

Pada Pasal 8, Huruf a yang dimaksud dengan *pada waktu dan keadaan tertentu* yaitu penggunaan bahasa daerah yang hanya terbatas pada waktu yang ditentukan dan pada keadaan yang ditentukan juga, seperti pada harijadi daerah yang disertai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Aturan itu harus eksplisit, mengingat bahwa di instansi pemerintah wajib menggunakan bahasa Indonesia.

BAB IV: PENGELOLAAN

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Bahasa Daerah bertujuan untuk menghormati dan memelihara Bahasa Daerah.
- (2) Pengelolaan Bahasa Daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mencakup skala nasional dan daerah.
- (2) Pengelolaan Bahasa Daerah skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pengelolaan di tingkat daerah.
- (3) Pengelolaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Pengelolaan Bahasa Daerah didasarkan pada situasi dan kondisi kebahasaan di setiap daerah.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Bahasa Daerah dibuat dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka panjang dilakukan di tingkat nasional dan daerah.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka menengah dan jangka pendek dilakukan di tingkat daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (5) Penyusunan perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi kondisi dan situasi Bahasa Daerah;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan pengelolaan Bahasa

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan:

Pada Bagian Kedua mengenai Perencanaan ini, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah karena harus ada koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta memberi peluang adanya partisipasi masyarakat. Selain itu, perencanaannya harus selaras dengan perencanaan pengelolaan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing yang digunakan di Indonesia.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 14

Pelaksanaan pengelolaan Bahasa Daerah mencakup kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan.

Paragraf 1 Pelindungan

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi Bahasa Daerah agar terjamin keberadaan dan keberlanjutannya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah.

Pasal 16

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan dengan menetapkan status semua Bahasa Daerah beserta Dialek-Dialeknya sebagai kekayaan budaya nasional.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan:

Semua bahasa mendapat perlakuan yang sama. Termasuk variasi atau dialek-dialeknya sehingga tidak ada wilayah yang dipaksa menggunakan bahasa lain atau dialek lain. Hal ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah. Semua bahasa dan dialek harus dihormati dan dipelihara.

Pasal 17

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
- a. pendataan;
 - b. penelitian;
 - c. pendokumentasian;
 - d. pembuatan ortografi; dan
 - e. perevitalisasian.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup identifikasi dan inventarisasi Bahasa Daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kondisi keberadaan, keberlangsungan, dan kelestarian Bahasa Daerah.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara merekam penggunaan Bahasa Daerah dalam bentuk:
- a. audio;
 - b. audiovisual; dan/atau
 - c. transkripsi fonetis.
- (5) Pembuatan ortografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang belum memiliki sistem penulisan.
- (6) Pembuatan ortografi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan lambang bunyi dan ejaan yang berlaku di Indonesia.
- (7) Perevitalisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk menggiatkan kembali penggunaan Bahasa Daerah.

Catatan:

Pada Pasal 17, ayat (1), Huruf d yang dimaksud dengan *ortografi* adalah sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Selanjutnya pada ayat (6) yang dimaksud dengan *sistem penulisan yang berlaku di Indonesia* adalah sejumlah aksara yang selama ini secara historis digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga kasus penggunaan aksara Hangul Korea untuk bahasa Ciacia di Sulawesi Tenggara tidak terulang lagi.

Pasal 18

- (1) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang masih digunakan dilakukan dengan cara penelitian, pendokumentasian, dan pembuatan ortografi.
- (2) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan secara terbatas atau tidak digunakan sebagai alat komunikasi dilakukan dengan cara pendataan, penelitian, pendokumentasian, pembuatan ortografi, dan perevitalisasian.
- (3) Pendokumentasian terhadap Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disimpan sebagai dokumen negara di lembaga arsip nasional dan/atau daerah.

Catatan:

Pada Pasal 18 ini, pada ayat (1) dan (2) dibedakan pelindungan untuk bahasa yang “sehat dan kuat” serta pelindungan untuk bahasa yang “lemah atau berpotensi terancam punah”.

Paragraf Pembinaan

2

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dilakukan terhadap individu dan masyarakat pengguna Bahasa Daerah untuk:
 - a. menumbuhkan sikap positif berupa kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran menggunakan Bahasa Daerah;
 - b. memperluas ruang lingkup penggunaan Bahasa Daerah;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa Daerah; dan
 - d. menumbuhkan keteladanan dalam penggunaan Bahasa Daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selaras dengan pembinaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Catatan:

Pada Paragraf 2 ini yang dimaksud dengan pembinaan adalah berbagai kegiatan untuk membina penuturnya, baik individu atau komunitasnya.

Pasal 20

- (1) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:**
 - a. pemasyarakatan;
 - b. pengajaran; dan
 - c. penelitian.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah melalui pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat.**
- (3) Pembinaan Bahasa Daerah melalui pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di lingkungan pendidikan formal dan nonformal.**
- (4) Pembinaan Bahasa Daerah melalui pengajaran di lingkungan pendidikan formal dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.**
- (5) Pembinaan Bahasa Daerah melalui pengajaran di lingkungan pendidikan nonformal dilakukan pada program kesetaraan dan program nonformal lainnya yang diselenggarakan masyarakat.**
- (6) Pembinaan Bahasa Daerah melalui penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan mutu pemasyarakatan dan pengajaran.**
- (7) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.**

Pasal 21

- (1) Bahasa Daerah yang diajarkan melalui pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) merupakan Bahasa Daerah dan/atau Dialek daerah setempat.**
- (2) Dalam hal di suatu wilayah terdapat beberapa Bahasa Daerah dan/atau Dialek, penentuan Bahasa Daerah dan/atau Dialek yang diajarkan didasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.**

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitas**

pengajaran Bahasa Daerah dan/atau Dialek.

- (2) Pemberian dukungan dan fasilitas pengajaran Bahasa Daerah dan/atau Dialek dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajaran Bahasa Daerah dan/atau Dialek diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan:

Pada Pasal 21 dan Pasal 22 terdapat pengaturan mengenai penentuan serta dukungan bahasa daerah dan/atau dialek yang diajarkan didasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Hal ini perlu diatur mengingat di wilayah multilingual sering terjadi benturan dengan memaksakan batas administrasi sebagai kewenangan penentuan bahasa yang diajarkan sebagai muatan lokal.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengajaran Bahasa Daerah dan/atau Dialek di wilayah masing-masing melalui:

- a. penyusunan bahan ajar;
- b. penyediaan sumber daya manusia; dan
- c. penerbitan bahan ajar dan referensi.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyediaan sumber daya manusia untuk pengajaran Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi di daerah.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi dapat mengajukan pembukaan program studi Bahasa Daerah.
- (3) Pemerintah memfasilitasi pembukaan program studi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Khusus pada Pasal 24 ayat (2) disebutkan penyediaan sumber daya manusia karena di lapangan yang mengajar bahasa daerah antara lain adalah guru

bidang lain seperti guru fisika, guru matematika, atau guru sejarah. Guru bahasa daerah justru tidak dapat mengajar karena tidak akan dibayar karena tidak ada sertifikasinya, dengan alasan tidak ada landasan hukumnya. Selain itu, selama ini, proses pengajuan pembukaan program studi bahasa daerah juga sangat lambat karena dianggap tidak urgen dan tidak ada landasan hukumnya.

Pasal 25

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan untuk menunjang pemasyarakatan Bahasa Daerah dalam bentuk:

- a. pekan budaya daerah;
- b. festival lagu daerah;
- c. kongres bahasa daerah;
- d. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung penggunaan Bahasa Daerah.

Paragraf
Pengembangan

3

Pasal 26

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Bahasa Daerah untuk memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 27

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. pengayaan kosakata;
 - b. kodifikasi bahasa;
 - c. standardisasi;
 - d. penyusunan kamus; dan
 - e. penelitian.
- (2) Pengayaan kosakata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menambah jumlah kata sesuai dengan kebutuhan komunikasi dalam masyarakat.
- (3) Kodifikasi bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghimpun dan mengklasifikasi kaidah Bahasa Daerah.

- (4) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk membakukan kaidah Bahasa Daerah.
- (5) Penyusunan kamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menghimpun kata dan ungkapan beserta maknanya dalam Bahasa Daerah yang disusun secara alfabetis.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk mendukung pengembangan Bahasa Daerah.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Pasal 28

Selain melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pengembangan Bahasa Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. bersastra secara lisan dan tulis; dan
- b. penciptaan dan pemasyarakatan lagu daerah.

Pasal 29

Dalam rangka pengembangan Bahasa Daerah perlu dilakukan penerjemahan sumber-sumber pengetahuan untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Daerah.

Catatan:

Pada Pasal 29 ini yang dimaksud dengan *sumber-sumber pengetahuan* adalah berbagai tulisan yang bernilai dan dianggap penting oleh masyarakat daerah.

Pasal 30

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah harus didukung oleh pusat data yang berupa hasil penelitian dan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 27.
- (2) Hasil penelitian dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Pada Pasal 30, ayat (1) yang dimaksud dengan *pusat data* adalah lembaga kebahasaan, lembaga kearsipan, dan perpustakaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah.**
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 32

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui:

- a. pelaporan; dan**
- b. pemantauan.**

Pasal 33

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:**
 - a. bupati/walikota kepada gubernur; dan**
 - b. gubernur kepada Pemerintah.**
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah.**
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.**

Pasal 34

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan menelaah laporan dan mengamati pelaksanaan kegiatan.**
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan pada tahun berikutnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**

Catatan:

Pada bagian ini, pengaturan mengenai pengawasan merupakan hal yang jarang atau luput disampaikan dalam berbagai regulasi kebahasaan selama ini.

**Bagian Keempat
Pengevaluasian**

Pasal 35

- (1) Pengevaluasian dilakukan untuk menilai capaian kinerja pengelolaan Bahasa Daerah.
- (2) Pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengevaluasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan secara berkala.
- (2) Pengevaluasian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap tahun.

Pasal 37

Hasil pengevaluasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan Bahasa Daerah.

Catatan:

Pada bagian ini, pengaturan mengenai pengevaluasian juga merupakan hal yang jarang atau luput disampaikan dalam berbagai regulasi kebahasaan selama ini.

BAB V: TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 38

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan Bahasa Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dalam pengelolaan Bahasa Daerah bertugas:
 - a. menyusun perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah untuk jangka panjang dan jangka menengah;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan;
 - c. memelihara Bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional; dan
 - d. memfasilitasi program dan kegiatan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
- a. mengatur pengelolaan Bahasa Daerah;
 - b. menyusun rencana jangka panjang dan jangka menengah pengelolaan bahasa daerah skala nasional;
 - c. menetapkan standar pengelolaan Bahasa Daerah;
 - d. mengalokasikan anggaran dalam rangka pengelolaan; dan
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bahasa Daerah bertugas:
- a. menyusun perencanaan jangka panjang; jangka menengah dan jangka pendek untuk tingkat daerah;
 - b. melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan;
 - c. melindungi dan memelihara Bahasa Daerah yang ada di wilayahnya;
 - d. memfungsikan Bahasa Daerah dalam ranah keluarga dan masyarakat;
 - e. menyusun dan mengembangkan bahan ajar Bahasa Daerah; dan
 - f. menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam pengajaran Bahasa Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. mengatur pengelolaan dan penggunaan Bahasa Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran dalam rangka pengelolaan;
 - c. membentuk dan/atau menugasi lembaga untuk mengurus Bahasa Daerah; dan
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan:

Pembagian tugas dan wewenang perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat kondisi di lapangan memperlihatkan kurangnya

koordinasi antara pihak pemerintah dan pemerintah daerah. Banyak hal yang tumpang tindih bahkan bertentangan. Sehingga pengelolaan bahasa daerah tidak berjalan dengan mulus.

BAB VI: PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan Bahasa Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembiayaan pengelolaan Bahasa Daerah selain dibebankan pada anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Pada Pasal 42, ayat (2) diatur agar pembiayaan pengelolaan bahasa tidak semata-mata dari anggaran pemerintah saja, namun dapat juga berasal dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Pada ayat ini yang dimaksud dengan *badan usaha* adalah badan usaha milik Pemerintah, badan usaha milik Pemerintah Daerah, dan badan usaha swasta.

BAB VII: PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pengelolaan Bahasa Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan:

Pada bagian ini, pengaturan mengenai partisipasi juga merupakan hal yang jarang atau luput disampaikan dalam berbagai regulasi kebahasaan selama ini. Padahal sukses tidaknya upaya pengelolaan bahasa juga bergantung pada sikap bahasa dan semangat masyarakat penuturnya.

BAB VIII: KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Bahasa Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB IX: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

6. UU Pemajuan Kebudayaan dan RUU Bahasa Daerah

Berdasarkan penelisikan terhadap UU Pemajuan Kebudayaan, ruang lingkupnya terlihat lebih bersifat mengatur tatacara pembuatan Strategi Kebudayaan secara nasional, yang akhirnya diharapkan akan menghasilkan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Selain itu UU Pemajuan Kebudayaan juga mencakup pemberian penghargaan, fasilitas, dan insentif kepada setiap orang yang berjasa dan berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahkan UU Pemajuan Kebudayaan ini mencakup pula larangan dan ketentuan pidana bagi setiap orang atau korporasi yang menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan termasuk perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sedangkan RUU Bahasa Daerah memang disusun untuk mengelola Bahasa Daerah dengan tujuan untuk menghormati dan memelihara Bahasa Daerah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, Pasal 32. Secara rinci dijabarkan pokok-pokok pengelolaan Bahasa Daerah mencakup empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan (yang terdiri dari kegiatan perlindungan, pembinaan, serta pengembangan), pengawasan, dan pengevaluasian. Selama ini, ada kecenderungan energi kita terkuras pada tahap pelaksanaan saja. Sedangkan tahap perencanaan, pengawasan, dan pengevaluasian belum sempat tertangani.

Terbitnya UU Pemajuan Kebudayaan mendukung pelestarian bahasa daerah. Hal ini terlihat dengan jelas pada penjabaran objek pemajuan kebudayaan. Jika ditelisik lebih lanjut objek yang berupa tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional hampir semuanya menggunakan bahasa daerah untuk melaksanakan kegiatan budaya tersebut. Dengan demikian, agar semua objek pemajuan kebudayaan itu tidak punah, langkah awalnya adalah melestarikan bahasanya dulu. Sehingga RUU Bahasa masih perlu diperjuangkan sebagai landasan konstitusional untuk melakukan berbagai kegiatan operasional pelestarian dan pencegahan kepunahan bahasa daerah.

Berdasarkan informasi terakhir dari Sekretariat Komisi III DPD RI, pada tanggal 29 Agustus 2017, RUU Bahasa Daerah statusnya masih dalam proses antrian di tingkat DPR RI. Mengingat banyaknya RUU yang harus dibahas oleh DPR RI, kemungkinan besar RUU Bahasa Daerah baru akan dibahas pada tahun 2018, agar dapat disahkan dan diterbitkan sebagai Undang-Undang. Masih panjang perjalanan yang harus ditempuh untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang sepenuhnya mendukung pelestarian bahasa daerah.

7. Penutup

Secara linguistik, punahnya bahasa daerah berkaitan langsung dengan hilangnya pengetahuan kita mengenai budaya yang menyimpan hukum adat, pandangan hidup, tata krama, teknologi, dan kearifan menangani lingkungan. Di satu sisi, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam ranah bahasa yang merupakan penyimpan tata nilai budaya serta pembentuk jatidiri. Namun, di sisi lain, Bahasa Indonesia harus kokoh berkembang sebagai bahasa nasional dan bahasa daerah tidak punah. Dengan demikian, harus ada perencanaan bahasa yang komprehensif secara nasional. Pengelolaan bahasa dapat berjalan dengan lancar apabila ditunjang oleh perencanaan bahasa yang baik. harus diakui bahwa penyusunan perencanaan bahasa yang baik tidaklah mudah, apabila informasi yang kita miliki minim serta kita sendiri belum memahami secara rinci vitalitas bahasa serta keragaman situasi kebahasaan di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, sambil menunggu Peraturan Pelaksanan dari UU Pemajuan Kebudayaan yang harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU diundangkan pada tanggal 24 Mei 2017 (lihat Bab IX, Pasal 60), dan juga sambil menunggu kehadiran UU Bahasa Daerah yang masih dalam posisi antri di DPR RI, maka kiranya kita harus sudah mulai berkoordinasi dan bekerja keras pada saat ini. Misalnya dengan merancang Sensus Bahasa secara nasional. Hal ini akan sangat membantu perumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang diamanatkan UU Pemajuan Kebudayaan.

Mengapa Sensus Bahasa diperlukan? Sekurang-kurangnya Sensus Bahasa berpotensi untuk mendeteksi jumlah penutur yang hingga saat ini sulit didapat datanya. Selain itu, Sensus Bahasa juga dapat memberikan gambaran lokasi geografis wilayah pakai dan wilayah sebar bahasa daerah, termasuk lokasi bahasa-bahasa pencilan. Selanjutnya Sensus Bahasa dapat memberikan informasi, bahasa daerah mana yang transmisinya baik dari generasi orangtua ke generasi anak. Arel menyatakan bahwa sensus bahasa dapat merekam tiga jenis bahasa yaitu (1) bahasa pertama yang dipelajari responden, (2) bahasa yang paling sering digunakan oleh responden, dan (3) pengetahuan bahasa responden mengenai bahasa nasional/bahasa resmi (Arel, 2004: 97). Pendapat Arel tampaknya perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena belum sepenuhnya dapat merekam kompleksitas dan diversitas situasi kebahasaan di Indonesia.

Kegiatan sensus ini sangat penting karena dapat menggali informasi dasar mengenai kekayaan bahasa daerah di seluruh Indonesia. Manfaat lainnya, dapat berfungsi untuk memutakhirkan data kebahasaan yang tertera di <https://www.ethnologue.com/>. Dengan demikian, kegiatan Sensus Bahasa ini, hendaknya merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat-pemerintah daerah dengan universitas setempat dan lembaga penelitian. Bahkan jika dimungkinkan, dan KPU tidak

berkeberatan, kita bisa berangkat dari data Daftar Pemilih Pemilu 2014. Mereka menjadi data responden awal bagi Sensus Bahasa, sehingga kita tidak perlu mulai dari nol. Selanjutnya, apabila kita sudah memiliki informasi dasar mengenai kebahasaan di seluruh Indonesia, maka dapat dikembangkan menjadi aneka penelitian kebahasaan, misalnya penelitian mengenai pemakaian bahasa untuk mendeteksi vitalitas bahasa. Bahkan dapat dilanjutkan dengan penelitian struktural yang mendalam, hingga berlanjut ke penelitian mengenai faktor-faktor nonlinguistik seperti ekonomi, politik, kekuasaan, dan globalisasi yang dapat mempengaruhi pemakaian bahasa, pilihan bahasa, kontak bahasa, dan laju perubahan bahasa (Lauder and Lauder, 2016).

Dengan demikian, kini saatnya mengumandangkan tekad kuat untuk kerja bersama serta kemauan yang sungguh-sungguh untuk membantu preservasi dan revitalisasi keanekaragaman bahasa demi melestarikan kekayaan budaya nasional.

Daftar Pustaka

- Arel, Dominique. 2004. Language categories in censuses: backward- or forward-looking? In *Census and Identity: The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses*. eds. David I. Kertzer and Dominique Arel, 92—120. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
- Barreña, Andoni, Etxebarria, Maitena, Idiazabal, Itziar, Juaristi, Patxi, Junyent, Carme et al. 2000. World Languages Review: A Preliminary Approach. In *Linguistic Heritage of India and Asia*. eds. Omkar N. Koul and L. Devaki, 318—336. Mysore: Central Institute of Indian Languages.
- Crystal, David. 2000. *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grondona, Mariano. 2000. A Cultural Typology of Economic Development. In *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. eds. Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, 44—55. New York: Basic Books.
- Harrison, K. David. 2007. *When Languages Die: The Extinction of the World's Languages and the Erosion of Human Knowledge*. Oxford: Oxford University Press.
- Huntington, Samuel P. 2000. Cultures Count. In *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. eds. Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, xiii—xvi. New York: Basic Books.

- Jones, Tod. 2013. *Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy across the Twentieth Century to the Reform Era*. Leiden: Brill.
- Lauder, Allan F. 2016. Kebijakan dan Perencanaan Bahasa: Sebuah Tinjauan Kritis mengenai Isu Bahasa-Ibu [Language Policy and Planning: A Critical Review of Issues Relevant to the Mother Tongues]. Paper read at *Seminar Nasional Bahasa Ibu IX, "Strategi Pencegahan Kepunahan Bahasa-bahasa Lokal sebagai Warisan Budaya Bangsa"*. Denpasar, Bali. 26—27 Februari 201. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
- Lauder, Multamia R.M.T., and Lauder, Allan F. 2016. Peran Bahasa dan Budaya dalam Konteks Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Paper read at *Seminar Rancangan Penelitian*. Jakarta. 3 Maret 2016. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI).
- Lauder, Multamia RMT, and Lauder, Allan F. 2015. Keragaman dan Kepunahan Bahasa di Dunia Melanesia. In *Diaspora Melanesia di Nusantara*. eds. Taufik Abdullah and Mukhlis PaEni, 189—225. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nettle, Daniel, and Romaine, Suzanne. 2000. *Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages*. Oxford: Oxford University Press.
- Tim Ahli RUU Bahasa Daerah. 2015. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Bahasa Daerah Inisiatif DPD RI*. Naskah Akademik. Jakarta: Komite III, DPD RI.

A STRATEGY FOR LANGUAGE REVITALIZATION IN INDONESIA: FOCUS ON YOUTH AND ICT¹

Allan F. Lauder
Universitas Indonesia

Introduction

It is widely known that many of the world's languages are disappearing. The issue of language endangerment and language loss has been of concern for many years.

Linguists and others have suggested that academic concerns should be accompanied by activism to address the on-going loss of languages. These have been of two main kinds, language revitalization or language maintenance for those languages which are not severely endangered, merely under threat, and language documentation, primarily for languages which have no hope of being saved, the main goal being to create some record for posterity.

Regarding language revitalization, two main strategies have been put forward. The first is focus efforts on the family. The family is an important place where children acquire their first language, primarily from care givers such as parents. The second is to introduce the language into formal education, perhaps making it part of the school curriculum.

¹ Please cite as: Lauder, Allan F. 2017. A Strategy for Language Revitalization in Indonesia: Focus on Youth and ICT. In *Kongres Internasional dan Lokakarya Bahasa Daerah Maluku. Tema: Pelindungan Bahasa-Bahasa Daerah Sebagai Aset dan Jati Diri Bangsa*. Ambon, Maluku, 7—8 September 2017. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Both of these approaches are based on an understanding of the mechanisms that are involved in language loss, and of the processes of language acquisition. They also represent a wide sample of the complex nature of specific, localized cases. However, given the difficulty of revitalizing languages, further strategies would be of use.

This paper proposes a new strategy to complement the two existing ones. This strategy is to focus on young people and to exploit the use of information and communication technology (ICT).

The paper's aim is to look at this proposal in some detail, to explain the reasons why it may be useful, and to address potential objections or doubts about the potential for success.

The paper looks at a number of issues that have a role in language endangerment and revitalization, and in particular support the claim that the young generation play a pivotal role in these. These issues include: the language situation; language endangerment; and language acquisition in a bilingual setting. Taken together, they provide evidence to support the argument that focusing on the younger generation and ICT could be a promising strategy for interventions aimed at addressing language endangerment.

While there is growing discussion on youth, and on emerging technologies, and on how the two come together, the author is not aware of any specific proposal of bringing the two together as a strategy for the revitalization of endangered languages.

Why should young people be the strategic focus of efforts by experts working to revitalize endangered languages? To understand why, we need to examine a number of different but related areas: these are covered in the following sections which look at the language situation in Indonesia, first from a linguistic perspective, the number of languages, policy conceptualizations of types of language, numbers of speakers, and geographical patterns of distribution. Then we examine the problem of speaker numbers from a demographic perspective, looking at language communities and the main factors that determine their size, and how age is an important consideration related to language endangerment.

Next, the paper goes on to look at the nature of language endangerment, its causes, how different degrees of endangerment are distinguished, and one very important indicator of endangerment, the failure of intergenerational transmission.

The next section looks at language acquisition in bilingual and multilingual contexts. Indonesia is highly multilingual. When trying to understand the transmission of endangered languages, we can benefit from looking at the literature on language acquisition, the distinction between acquisition and learning, the ideal contexts and obligatory features that allow the child to acquire a first language, and how in multi-

lingual situations it is necessary to choose among the languages which are used in the setting. Special attention is paid to showing how the intergenerational transmission of a local language can be interrupted due to the lack of ideal contexts or of features that are obligatory for a first language to be successfully acquired.

The goal of language revitalization is a response to endangerment. We argue that the younger generation play a crucial role and should be target of efforts at revitalization. To do this, we propose that new technologies are used. Information and communication technologies, social media, the internet and local language computing are some of the ways that are now available. The final section provides further argument on why it would be worth trying to implement this.

The Language situation in Indonesia

Linguistic factors

The present language situation in Indonesia has been the subject of a good deal of research. Languages in Indonesia have been described from the perspective of inventories of how many languages there are; the conceptualization and treatment of languages in legislation; estimates of the number of speakers of languages; geographical distribution and variation in the languages of Indonesia; the diversity of languages; and the genetic relatedness in language families and the questions of origins, migrations and dispersals. We briefly survey these points.

How many languages are there?

The question of how many languages there are in Indonesia is hard to answer with absolute certainty. The reasons for it being hard to inventory languages was set out by Crystal. The best estimates we have are from Ethnologue and from Badan Bahasa. According to Ethnologue, for example, just over 700 languages are listed. Some of the data upon which these estimates are based is from as far back as the 1980s and a lot can have happened since then. Also, we should expect that some of these languages may either be close to extinction or have already disappeared.

What types of languages are there from a language planning perspective?

In Indonesia, the situation can be described as consisting of a number of classes or categories of language. In legislation, these are intended to perform different, complementary functions in society. We have Indonesian, the national language, intended to function as the language of unity, through its obligatory use in formal settings, education and government. Next are the regional languages (bahasa

daerah) of which there may be as many as 700. They are all indigenous to the region, related typologically and genetically and belong to two main families of language, the Austronesian and the Papuan. The regional languages are intended to function as being markers of identity and repositories of cultural heritage. The third category is foreign languages. A number of foreign languages have particular importance in Indonesia. They are English, Arabic, Dutch, Chinese, Korean, Japanese and other Asian languages, and a number of other European languages. Among these, the languages from developed countries are intended to get access to knowledge that can support development. These three categories are recognized in legislation on language. But there are also other categories that are important for this paper.

The first is that one of the foreign languages, English, is a global language. It is seen by many as a good choice of language to learn, usually for instrumental reasons. The function of providing knowledge for development surely applies more to English than other modern languages, as it is the most widely used and the largest proportion of publications and texts are in English.

The second is that there are also indigenous lingua-francas, usually based on Malay, that have been used as intermediary languages for centuries. These are used across regions and are a practical choice for people in a geographical setting with high language diversity and a common language is needed for local communication between speakers of these different languages. Finally, we might mention the languages spoken by descendants of immigrants from East Asia, in particular from China. These languages include Cantonese, Mandarin, Hakka and Tieuchew. They can be considered like the indigenous regional languages to be markers of identity and repositories of culture for their respective communities.

How many speakers are there of these languages?

When we ask the question of how many speakers there are for a particular language, we can refer to estimates given by Ethnologue. The size of the population of speakers of a language community is another demographic construct. However, we do not have data from censuses, as the national censuses do not ask a question about what language is spoken. Including language data in censuses is problematic even in Europe. In Indonesia, it would be even more so.

For one thing, responses from censuses would not be adequately reliable because the opinions of language users do not give accurate information about geographical or demographic features of a language. For that reason, Ethnologue, despite being based on data that is non-primary and which is often very dated, is still the only listing that covers all the known languages.

Geographical patterns of distribution

Where are the languages spoken? Where are the boundaries of the language areas? The geographical description of languages gives us maps denoting language areas. Because of the large number of languages, the areas of their use are bordered by neighbouring languages. When you get a wider perspective of a language map in Indonesia, it looks more and more like a jigsaw puzzle, where any language area is bordered by other languages areas. This means that most Indonesians will be in contexts where at least two languages and likely three or more are used.

The problem faced by everyone is language choice. Everywhere you go, there will be different sets of choices, often including the language of one's parents, Indonesian, perhaps a lingua franca, perhaps some of another regional language, perhaps some English, and perhaps even some other foreign language. As time and resources are limited, and because the languages to choose from and how attractive or useful they are when deciding whether to make the effort to acquire or learn the language, all vary.

Demographic Features

Population: Births and deaths

What shapes the population of speakers of the language communities? The population of a language community is like any population. In demographics, the size of a population will be shaped primarily by the relation between births and deaths. In any population, new individuals are being born, adding to the population, and older people are dying, reducing the size of the population. When births and deaths are the same, the population will be stable. When deaths outnumber births, you first get an ageing society, then as time goes on, the size of the population shrinks. In addition to knowing about births and deaths, we also need to consider ageing. This means looking at populations as they change over time. The infant of today will age, and grow into a child, an adult and then an old person. We can visualize this process by seeing the population like a ribbon in a window, moving from left to right. New individuals are born appearing in the window from the left. They get older, moving toward the right. Finally, they are in extreme old age, and exit stage right as they pass away. You can think of it like a moving ribbon or like an escalator.

Age

In demography, age is one of the constructs that are used to show the structure of a population. Demography has developed well-defined, theoretically sound ways of dividing up a population into a number of sub-groups, or cohorts, by age.

Age is an important factor for understanding language endangerment. It is not enough to know the size of the population as a whole. We need to know the number of speakers in each age cohort at any particular time. Over time, the same individual who starts as a member of the young cohort becomes a member of the next older age cohort. We need to know the answer to the question, ‘How many young speakers are there and how many older speakers, because one of the clearest indicators of a language being endangered is when the majority of speakers are older and there are fewer young speakers. It was identified by UNESCO as a warning sign of endangerment in the context of identifying the many different causes of language endangerment.

Language endangerment?

Language endangerment is a global phenomenon, and is referred to in a number of ways: language shift, language loss, language death, language genocide. This section looks at language endangerment, its causes, its measurement and description and some key indicators of the processes underlying it.

Definitions: Shrinking of population sizes

The pivotal feature in language endangerment is that the number of speakers of the language is shrinking. The number of people, of individuals may not be shrinking. However, if these people no longer use the endangered language, but have shifted to use another language, then they can’t be included as a member of the speaker population. So, the people continue to exist, but the number of language users goes down. A shrinking population has only one direction to go in if nothing can be done to save it, and that is arriving at a population of none. This happens when the last speaker dies.

Causes of endangerment

Language endangerment has a long list of possible causes. Various ways of listing and organizing these causes can be found. They include such things as conflict, natural and manmade disasters, government policy, negative language attitudes, social and cultural factors, and also large forces including modernization, development, capitalism, and globalization. These are difficult to counter because of their scale and power in relation to that of local communities.

Research that explains what the actual causes are for any particular language is useful if some kind of intervention is planned. For the appropriate intervention to be identified, we need information in particular that allows us to distinguish languages

which are moderately endangered, but which can be revitalized, from languages which are so endangered there is little chance of their survival.

Differentiating degrees of endangerment: endangerment scales

In order to provide policy makers and local governments and researchers with some sort of guide to degrees of endangerment, a number of methods have been devised. One widely referred to is EGIDS.

The EGIDS scale contains a number of levels ranging from very vital to extremely endangered. Study of the features of the language are matched against the descriptors for each level and the most appropriate level is selected for that language. Basically, at one end you have languages which no one needs to worry about. At the other are languages which are too far along the process of loss and which have no chance of being revitalized. In the middle are languages which are on the edge and might go either way. In this middle zone, the languages that are seriously endangered are distinguished from those that have a good chance of being saved based on one criteria, whether there are good numbers of young speakers of the language or whether it is spoken primarily by older people.

An important indicator of language endangerment

An important indicator that a regional language is endangered is when there are fewer and fewer young speakers and the only speakers left are old. This age-related phenomenon is referred to by UNESCO as a break in the intergenerational transmission of a language. We can consider it a warning light that identifies which languages are endangered and need assistance and which are not.

Intergenerational transmission refers to a process whereby the older generation pass on their language to their children. When this process comes under pressure, then the children in a particular family are not given a context where the language can be acquired, or they are not encouraged to acquire it, or the children themselves come to reject the parent's wish that they acquire it.

Over time, if more and more families raise children whose competence in the language is less than theirs, or if they are not able to use the language, then we can consider that a break in transmission of the language has occurred.

Unfortunately, a shrinking in the number of language users in the younger age cohort is something that is difficult to reverse. It is also the prelude to the condition where the adult age cohort also is not able to use the language. By that point, there is not much hope of the language resisting extinction.

This indicator, the presence or absence of younger users of the language, suggests that our priorities for revitalization should focus on the languages which still have younger users, and within those societies we should target the younger generation as the site for our efforts.

Language acquisition in multilingual contexts

Language acquisition studies can throw light on the process of language endangerment and loss. In particular there is a connection between language acquisition, age and the intergenerational transmission of a language. In Indonesia, we also need to consider that this is a bilingual/multilingual situation which involves language contact. The section looks at aspects of language acquisition that have implications for language endangerment in Indonesia. These include the distinction between first language and second language; between first language and foreign language; between acquisition and learning of a language; about the process of acquisition in the home, with reference to the relationship between care givers and young learners, and the situation as one of a context containing features obligatory to successful acquisition. It also goes into acquisition in bilingual situations, in particular the phenomenon of language choice.

Monolingual settings and bilingual contexts: L1 and L2

We should distinguish places where only one language is used from those where more than one is used. In a monolingual setting, children acquire their first language in settings such as the home and may or may not study a second language, a foreign language, later in life, often after puberty and possibly in a school.

In bilingual settings, such as in Indonesia, children acquire their first language in a similar way, in the home, except that they are also exposed to the use of a second language in natural settings, starting at some point after their first language has already started to be acquired. Second languages in this sense are not foreign languages, but the final level of proficiency in the language may either be similar to the first (balanced bilingualism) or lower than the first language. Bilingualism refers to proficiency of two or more languages.

Acquisition and learning

Language ability can be of two types, referred to as acquisition and learning. A first language is acquired; while a foreign language is learned. The distinction is made first because the final level of proficiency is different. First languages are acquired universally with few exceptions to a high level, sometimes referred to as

native proficiency. Foreign languages, on the other hand, are rarely learned to a native speaker level of proficiency. The second distinction is the age of the learner. First language acquisition is a process that begins at birth and is completed at some time around puberty. Foreign languages are usually learned from the school years on, often starting in adulthood. Another distinction is that first languages are acquired unconsciously, naturally and instruction is of no use. Foreign languages cannot be learned in that way. To learn a foreign language, it is necessary to choose or intend to learn, and to undergo a course of instruction.

Contexts and requirements

First language acquisition takes place automatically, driven by biologically based and psychologically driven processes, in tandem with interactions and processes at the social level. First language acquisition is automatic, unconscious, and is complete by puberty. A child born into a family will acquire the language of their parents. However, if the family moves to another country or somewhere another language is used as a dominant language, the child will learn the dominant language.

The context of language acquisition plays an important part in the process. In the early stages, the child is only exposed to the language used by the parents and other caregivers in the home. However, as the child grows, they get exposure to the dominant language in society. The context for acquisition can be seen here as a setting where the child is exposed to one or more languages. The obligatory elements of the context are that the language is used, on a daily basis by caregivers such as parents or older siblings, and that the child hears this, and is encouraged to interact with the speakers. Acquisition proceeds normally over a series of stages, the babbling stage, the first words, a two word period, and then three words and the development of syntax. The grammar is normally complete by age five or six. Schooling follows with expansion of the vocabulary, development of literacy, and understanding of different registers of use.

So, if the context contains the right support, the language should be acquired by age five with full competence attained by puberty. But what if it is not? What if the context lacks some crucial element necessary for proper first language acquisition?

We then may look at the older children, the teenagers and adolescents. It is too late for them to acquire the local language if they do not already have a basis. However, if they have some exposure, then, it should be possible to create contexts where they could restart the use of the local language and improve their level of competence to that of a second language.

Language choice in multilingual settings

In multilingual settings, more than one language is found in the home and in wider society. This presents language users, coming from different language communities, with the need to choose which languages they will use, for which purposes and in which contexts. In the home, the parents must decide which languages to use so that their young children can acquire them. There is also the question of priority, of which language is the first, or dominant language and which other languages come after that. They also need to decide which languages need not be used at an early age.

In Indonesia, the kinds of languages available will be one or more regional language, perhaps a lingua franca, and Indonesian. If the parents use the same regional language, then that is likely to be used, but in cities certainly, Indonesian is widely used in the home, and in some regions, a lingua franca may be used rather than Indonesian.

The children in such families will grow to acquire one or more of the languages they are exposed to. When it is time to enter kindergarten or primary school, Indonesian is likely to be central. For children who have only had a regional language in the home, school will be a shock. Studies of bilingualism and language endangerment suggest that including regional languages in early schooling would be beneficial. There is nothing to say that this is not the case. However, it is obvious that the sheer number of these languages presents problems about the availability of qualified teachers and teaching materials.

As the child gets older, they become aware of patterns of language use in wider society, and on the media. These surely influence the older child's views and opinions. Children will then develop attitudes to which languages that they think are worth learning. While the father and mother may have their own opinions, children will be quite capable of not following the advice or instruction of their parents. That is what makes the young generation an important focus. For if they have a negative attitude about the value of learning a regional language, then they will not give time or energy to acquiring it.

By the teenage years, adolescence, children have a better chance of modifying their behaviour based on reasoning. This means that if good arguments are presented, and they make sense to the youngsters, then they may want to act in that way. However, this is where youth psychology comes in. We need to understand the developmental, psychological factors that teens exhibit and not expect them to act in a way that makes sense to the older generation.

The reason that language choice is important is because we need to ensure that young people choose to use the language. When they don't, the process of a break in the intergenerational transmission of the language starts to work.

For teens and adolescents to choose to use the regional language is crucial. It is more important than for any other age group. For infants, they will indeed acquire what is used in the home, and that decision lies with the parents.

For adults, they can decide to use the language or not, but if their grasp of the language is already incomplete or is the status of a second or foreign language, then they won't be able to pass the language on well. This also means a break in the intergenerational transmission.

For the older generation, they may a perfect native speaker level of competence in the language, but if they are not in the context where young people acquire the language, their use of the language may not be driving the maintenance of that language.

Intergenerational transmission of language and its interruption

In this section we look in a bit more detail at the process that leads to what UNESCO has called a break in the intergenerational transmission of a language. The important factors to understand the likely path and the mechanisms which drive it are language choice and the demographic process of ageing in society.

This natural use of the language provides a context for the acquisition of the language by the child. It supports the child's emerging use of the language. This is the path to becoming a native speaker. The language is thus transmitted by the older generation to the younger generation. When the context is supportive and the conditions for acquisition are met, then acquisition proceeds naturally until the child has developed native speaker competence.

The break in this process of passing on of the parent's language to the next generation occurs when one or more of the important or necessary features are either not fully available or are totally absent. For example, we assume that the members of the older generation who are passing on the language are themselves native speakers. We also assume that the language is the main language used and that it is also used outside the home by members of the local community. It is also supportive if the language is used for a range of everyday communicative functions rather than just being found in religious or ceremonial settings. When any of these conditions is compromised, for example if the parents are not themselves native speakers, or if the situation is bilingual and their language is not the main one used, or if attitudes to the language are negative, then the acquisition process may be compromised or even suspended.

At the level of the individual family, what happens is that the child does not grown into a native speaker, like the parents, but instead either learns the language

with a lower proficiency level, or only partially understands and cannot speak, or does not learn the language at all.

The break in transmission is not the occurrence of this in individual families. It is rather where this becomes widespread in society, and becomes a demographic trend. The break happens within a time frame of a single generation, or possibly two or more.

The seriousness of compromising the transmission mechanism becomes apparent when the children who learned from native speakers but only to non-native levels themselves become adults and start a family. They now have the responsibility to raise children who can use the language. However, because they are not native speakers, the context and conditions are less supportive. The children may end up either not acquiring the language at all, or at best, acquire only a limited, impoverished version of it. If other supporting factors do not allow the children generation to regain native speaker use, then it is highly probable that the line of transmission will be broken throughout society at this point.

A break in transmission is not so likely in monolingual contexts. But the transmission process is more vulnerable in bilingual settings. In bilingual situations, language users have to choose which of the languages available for use, should be used for what particular function. In a monolingual setting, the children just pick up the language that everyone else uses. In a bilingual setting, the children will pick up the dominant language among those being used. But as they get older, and transition from childhood into teens, and adolescents and then young adults, they will make conscious decisions about what languages they will use.

All of this functions if all of the conditions that support language acquisition are functioning well. It assumes that the older generation who are the main transmitters of the language are themselves using the language for daily use. However, things don't always work in this way. The situation can be complicated by a number of factors. One is where the parents are from two different language groups. In an idealized world, they might use both equally, fifty-fifty. But what normally happens is that one becomes dominant. The other is only rarely used, and maybe not enough to support acquisition by the younger generation. Another thing that can happen is when the parents themselves don't use the language that much for a variety of reasons. Or the language may be used in the home but not widely in society. Sometimes languages are not used because the language has a low status.

Revitalization of Endangered Languages

Proposing revitalization focused on ICT and young people

Given the conditions and challenges and previous efforts, new thinking is needed on ways to support language revitalization. The proposal here can be stated at: Encourage young people to use the language through ICT. This section looks at ICT and its role in the revitalization of endangered languages. A reasoned argument is put forward for why this strategy is worth trying. A suggestion is made for how this might be implemented and some caveats that need to be considered are also raised.

What is meant by ICT?

Information and communication technology (ICT) refers broadly to the use of mobile phones, internet access, web-browsers, and other computer-based technologies for communication. An important technology is social media, including a number of online applications, Facebook, Twitter, Instagram, Path and so on. Young people have preferences of which of these they like to use and which they consider too out-dated, or too much used by adults and older people.

It can also include software tools that are designed to help speakers of minority or endangered languages, or the experts who wish to study, support or document them.

Works on new technologies in relation to language endangerment have covered a wide number of concerns, too many to give a balanced picture of here, including works for both revitalization and documentation. These include such things as development of orthographies for literacy development. The studies will often describe technologies which were designed to be used either by communities or by linguists and other experts working with the languages.

Some attention has been given to the use of ICT by young people. Common themes have been the way young people have embraced digital technology, the patterns of their use, and overuse, and the potential of ICT for a range of purposes such as leadership development, civic responsibility and activism. Studies concerned with ICT and changing identities of youth have shown a largely positive perspective on the issue. However, studies warning about potential negative influences have also emerged. Concerns include cyber-bullying, body shaming, fake news, and internet addiction, in particular with respect to online gaming.

Studies that focus on youth in different social and geographical contexts can also be observed, including studies on rural youth, and young people from minority groups. Some of the studies look at indigenous endangered languages from different geographical contexts, such as languages in Africa, the Americas and Welsh in the UK.

Among all of this literature, it is also possible to find works that look at the use of new technologies in the field of endangered languages. The topic of the use of new technologies by young people from endangered language groups is just beginning to get attention.

Why is this worth trying?

A number of reasons can be put forward in support of at least trialling the use of ICT with youth for language revitalization.

Innovation and experimentation

Due to the difficulty of reversing language shift and revitalizing endangered languages, it is not surprising that searching for new ways of tackling the problem could be of use and could supplement the existing ones. Further, although valid concerns or doubts may be raised, these in themselves do not constitute an insuperable problem because of existing trends in society that would support the provision of ICT even in rural areas. The strategy has not yet been extensively tested in different contexts so we can at least say that we don't know that it will not work. Because of this and the urgent need to take action, it is at least worth trying.

Demography and language acquisition

It is worth trying because young people are the most important demographic group for the transmission of a regional language to be able to continue, unbroken. If the younger generation are using the language, then there is the chance that it can be self-sustaining, evolving, and changing to adapt to the emerging communicative needs of the present and the future. If, on the other hand, the younger generation chooses not to use the language, then its days are numbered.

Young people: The internet generation

Young people like to use ICT. The use of new technologies do not need to be sold to the younger generation. They already make up a large proportion of ICT and social media users. Their knowledge of online and other new technologies often surpasses that of their parent's generation. The time they spend online also may be greater than their parents. It is therefore only a short step from this to young people using new media in the regional language.

The generation gap and trending local language

Young people like to be different from their parents. One way to express themselves in this way is to avoid doing things that they consider ‘dated’ or which the previous generation likes to do or prefers. One problem is that the image of the regional languages could quite possibly be linked to negative stereotypes. The default expected reaction by young people about local language use is to see it as belonging to the past. However, any language that is alive, in use, and which can be used to communicate innovatively and creatively can be seen positively. If young people see local language as belonging to them, any reservations about using it can be put aside. This means that our attitude to a language to any language which has the capacity to be revitalized, and which young people could relate to should be seen as a ‘living’ language, one subject to change. This change could also see it being used online, making local language use a trendy thing to do.

Access to new technologies is growing

You can’t get a young person online if there is no mobile network, internet connection, or money to buy a phone or computer and pay for the services. All of these services depend on infrastructure. It is true that rural or remote areas have limited access to many of these things, slower and less reliable connection speeds, villages that are not yet on the electricity grid. These need investment. Solutions to these issues necessarily involve utility companies, mobile phone operators, internet providers, mobile device manufacturers, investors, retailers, and government. But there is reason to hope that all of these problems can be solved. Reasons for investment in the infrastructure have nothing to do with language and culture. They lie more in economics. The availability and accessibility of mobile phones networks is connected with improving economic growth. There is evidence that the availability and accessibility of mobile phones networks is connected with improving economic growth. Access to the internet supports access to all sorts of information and this is empowering. Further, there are other areas which support solutions to lack of internet or phone access or to electricity. Smaller settlements, villages, or remote locations may be ‘off grid’ but this can be fixed either with conventional or new technology such as solar power and batteries. Also, barriers to access due to the affordability of these technologies are being removed as mobile phone companies produce cheaper models and service providers create low cost packages. Mobile phone use in Indonesia is high and it is likely that we can expect access to new technologies to become an expected and affordable utility rather than a luxury item.

ICT is known to be empowering and facilitating for civic involvement

There is plenty of evidence that ICT has already created new means of social communication, organization, and involvement in public life. We see for example community building, coordination of event participation, the building of communities with shared views, values and goals and so on. This has enabled a shift in power from concentrated in the hands of older and power holding individuals to young activists. It is feasible that the issue of using a local language could be presented in a way that emphasized the idea that the existence of the language was in the hands of the younger generation and that they had the power to shape the path it took in the future. This would be something that was not directed by older people. The implication of this is that the local language is living, changing and the kinds of change depend on the young. Such ownership of championing local language use potentially succeeds when the initiative is seen as modern, future oriented, not a campaign to maintain tradition, the values of the past; and is something alive, not the preservation of heritage, gathering dust in a museum. It becomes associated with future, young, creative, exciting not the past, old, heritage, boring.

Some suggestions on implementation

Conceptually, the argument in favour of taking a youth-ICT strategy to the revitalization of endangered languages is strong. However, we also need to have some idea of how this might be implemented, what specific programs could be initiated, what needs to be considered and what pitfalls need to be avoided. If we consider the complete range of technologies and uses and contexts, then we would need another article. The following section therefore restricts itself to the implementation of a program that involved and supported young people, giving them a good deal of autonomy in how the program would be played out. It also focuses on revitalization situations rather than documentation. It takes into consideration the specific kinds of technology that might be used, and also pays attention to patterns of young people's behaviour and youth psychology. It should be noted that these are initial proposals and that the local community would have a very large say in what they felt was relevant to local conditions and what they wanted to prioritize.

Using the local language on social media

It can be proposed that young people are encouraged to become involved with the local language and to use it on social media. The goal of this is to get significantly large numbers of young people using the local language on a regular basis.

This should be done in stages. In the first stage, the main goal is to identify which software they prefer to use and then to identify young leaders, individuals

who already have many followers online. Subsequently, world will get out that these leading individuals are using the local language. Young people already follow people they admire; they do so without being instructed. Therefore, there is a good chance that they would do so with this initiative. You may not be able to persuade the adolescent generation that communicating with a local language is a desirable thing, but if they see young trendsetters doing so, then others will follow, and without adult guidance or instruction. This is to avoid an approach where you bring young people in and instruct them as a group to start using the language. The problem is that young people don't like being instructed to do things that they are not comfortable with or don't find attractive, useful or desirable. Further, young people cannot be assumed to have a positive attitude towards the local language; they may be uncertain, ambivalent, or even resistant. The first hurdle is to not scare them off with an initial approach that makes local language use seem like a project that is not relevant to them or is too troublesome. It also is easier to work with a smaller group of leaders than to select large numbers to attend meetings or seminars. The success or failure of this stage is when you can get the young leaders on board and when they begin to get followers. Failure of this stage would be terminal and make any further progress difficult or perhaps impossible. In addition, there is only one shot to get them to open up to the idea at the beginning.

Considerations for achieving success in stage one are as follows:

Survey local young people's existing use of ICT in order to identify and understand their preferences in ICT and social media use.

- a) Some like Twitter, some Instagram, others will only use some other software. If you build a campaign on a software app that is not preferred by the young, your project will fail.
- b) You need to do a survey of ICT use patterns geographically and socially.
- c) Once the preferred software is identified, then it is necessary to understand how to function and excel in this context.
- d) With this understood well, a proposal be put together that will likely appeal to the initial target group of young people.

Identify young leaders in the local community who use ICT

- a) You need to know who are the leaders or most admired young people in the community. Find the ones who might be amenable to going with the idea of using local language.
- b) Design a program that outlines the goal of preserving and revitalizing the local language.

- c) Involve the young leaders in the plan, explaining their pivotal role of getting many young people to become their followers in using the local language;
- d) Make it clear that they will shape the agenda and have autonomy;
- e) Make sure they know the main goal of getting significant large numbers of the young on line and communicating in the local language;
- f) Present government institutions and academic experts as people there to support them, not to order them around
- g) You don't need to ask the young people to follow; they will do so of their own accord.

Follow up and monitor the impact of the first stage:

- a) Try to evaluate whether the young leaders are using the local language and get information on what issues are focused on and how regularly they are using the media.
- b) Get data to identify if the leaders are attracting followers and how many there are.
- c) If there is growth in the followers, then try to keep track of that growth and give it support by praising it and affirming it in or in some way that would bring it to the attention of a wider audience and / or affirm the young people as a kind of community with autonomy.
- d) Stage one is successfully complete if the young people are joining in the online activity and report on feeling comfortable with the idea of using the local language.

In subsequent stages, the efforts of young people can be supplemented by intellectuals, linguistic experts, cultural experts, poets, writers and others. In addition other initiatives can be started, meeting the needs of the community and of the experts in language endangerment, including initiatives that require the development of software for that particular language.

Discussion

This paper proposes that young people and the use of ICT can be the focus of a strategy for addressing the problem of language endangerment and assist revitalization efforts. This proposal needs qualification to ensure that it is not interpreted as a suggestion that (1) efforts directed in this way will automatically succeed, (2) that the concept is so strong that it can be applied in all cases, irrespective of the local situation, (3) that the concept should be applied irrespective of the will

of the members of the local community, and (4) that is meant to compete with the existing strategies of focus on the family and focus on education. The proposal is that a focus on youth and ICT is in principle important because of the way age functions in the demographics of communities and in the loss of language.

Any proposed intervention must be based on a thorough understanding of the key features of the local situation. It should be explained to the members of the local community but must be subordinated to the will of the community. It should seek to obtain evidence that will allow experts to identify where on a language endangerment scale the language is, and importantly, allow us to distinguish whether the response should be one of revitalization and maintenance or of documentation.

The decision on the fate of the language lies with the local community. We need to distinguish what the community want from what is feasible, what is possible. Starting from a view that in principle, all languages should be maintained, and defining a living language as one which can exist without intervention, we need first to see whether the language can provide the conditions for sustainable, independent existence. Where this is the case, we can say that experts could assist the community in the development of literacy and of the language itself. A living language is one that changes and grows to meet the emerging needs of the present and the future. A dead language does not change. All we are left with are the texts that have been preserved. The concept of heritage is normally associated with this idea of something unchanging, from the past.

While the primary goal and the most idealistic view would be for all languages to be like this, in reality, it is not possible. So linguists and other experts need to get together with the local community to prioritize.

Where a language does not provide the conditions for sustainability and independence, then we need to see if the best response should be revitalization efforts, to prevent it from its present downward direction, or whether we should concentrate on documentation. Documentation is of value for all languages, but there is no point in putting energies into cases where the language has very little or no chance of surviving.

This distinction between the response of revitalization and the response of documentation is determined by a clear understanding of the degree of endangerment and the vitality of the language and is only made operational if the community themselves wish to pursue the suggested path.

While the strategy of focusing on youth and ICT is proposed here, it does not exclude the possibility of drawing on any ideas, existing or emerging, that might be part of a coherent intervention plan.

One thing is clear, that the young people of the community play a crucial role in whether their language will continue to exist or not.

The following suggestions are presented to help reduce the chance of failure in revitalization efforts.

- a) Only move forward if all the conditions give possibility of success. That is, it is necessary to identify which languages are in a condition where they are endangered to the extent that they need intervention but not so endangered as to make them impossible to be revitalized;
- b) Involve the community and in particular the young people in the community from the very beginning. This is to show transparency of goals and to avoid the perception this is a top-down initiative that they will not 'own';
- c) Pay attention to youth psychology and youth culture. Work out plans that are likely to be received well by the young and accepted. If planners are not sure about this, simply talk to a young person;
- d) It may be that the aspirations of the young generation are not met by a program for revitalization that focuses on preservation of heritage and honouring the past. Getting a solution that allows revitalization to continue may require diplomacy and pragmatism;
- e) Get the government and IT companies on board. This comes under the rubric of involve all stakeholders. This will allow the possibility of the development of infrastructure that can facilitate the use of ICT;
- f) Define goals clearly to all parties. There are the institution's goals, the expert's goals and the local community's goals. Try to get these goals clearly identified so everyone can see what the different motivations are and so that achievable, productive goals are prioritized;
- g) Make it clear that government support for local language is given based on the constitution which seeks a balance between unity and diversity. You can't have one without the other. The diversity of local language is supported because it is part of the fabric of the country's constitution, and because it is a human right and because it preserves culture and identity. However, this all takes place within the unitary state of Indonesia. Indonesia is a nation state composed of many different languages and cultures.

Further reading

This section presents some references that might be useful for following up issues described here.

Language: Acquisition, Identity

For an introduction to first language acquisition (child language acquisition) see Bavin (2009). Second language acquisition is covered in Gass and Mackey (2012). Bilingualism is found in Bhatia and Ritchie (2013) and bilingual education in Garcia et al. (2017). An introduction to language and identity is given in Edwards (2009).

Language Endangerment

For a good general introduction to language endangerment from a linguistic perspective see Crystal (2014). Meanwhile, Harrison (2007) provides case studies demonstrating what is lost when a language dies.

Demographic works include a good introduction by Poston and Bouvier (2010). Arel (2004) covers the role of language categories in censuses and Hugo (2015) describes the demography of race and ethnicity in Indonesia.

The issue of age in first language acquisition is covered by Herschensohn (2007) while age in foreign language learning in school is covered by Lambelet and Berthele (2015).

Language maintenance, language shift and the reversing of language shift is described in Fishman (2013). An updated version of an earlier discussion of whether threatened languages can be saved and language shift reversed is given in Fishman (2001). The topic of language revitalization of languages is found in Hinton (2011) and Grenoble and Whaley (2006).

An introduction to Language Policy and Planning (LPP) is given in Ricento (2006) and Spolsky (2004). See Spolsky also for a good description of language choice.

LPP in local contexts is covered in Liddicoat and Baldauf Jr. (2008) and LPP for endangered languages is found in Sallabank (2011).

Language endangerment in Indonesia is covered in a number of works by the author. The value of and the need to maintain linguistic and cultural diversity is argued in Lauder and Lauder (2012a). A dialectology perspective on language endangerment is taken in Lauder and Lauder Lauder and Lauder (2014). A focus on the Melanesian diaspora in Indonesia is found in Lauder and Lauder (2015), while the issue of language policy and planning of the mother tongues can be found in Lauder (2016).

Youth

Youth, community service, activism, and socio-political participation can be found in Bennett (2008) and Yates and Youniss (2006). Meanwhile, youth in relation to new media and ICT is found in Boyd (2014) who looks at the pervasiveness of

mobile phones among teens and Subrahmanyam and Šmahel (2011) who explain the role of ICT in development and subjects such as identity, relationships, ethics, physical and psychological health, wellness and negative aspects such as illness, addiction and cyber-bullying.

New Technologies and Endangered Languages

Online communication and social networking is described in Whiting (2012). The impact of mobile phones on economic development and poverty reduction is covered in James (2015) Switzerland</pub-location><publisher>Springer</publisher><isbn>9783319273686</isbn><urls><related-urls><url><https://books.google.co.id/books?id=209ECwAAQBAJ></url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>. The role of new technologies in protecting cultural heritage is given in Ronchi (2008) and the development of culturally aware technology in Blanchard and Allard (2011).

An excellent general work devoted to the role that new technologies can play in responding to language endangerment is found in Jones (2015) while the role of media and ICT in safeguarding and promoting language diversity is covered in Lauder and Lauder (2012b). Meanwhile, Dyson et al. (2007) look at indigenous or minority language computing.

References

- Arel, Dominique. 2004. Language categories in censuses: backward-or forward-looking? In *Census and Identity: The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses*. eds. David I. Kertzer and Dominique Arel, 92—120. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
- Bavin, Edith L. ed. 2009. *The Cambridge Handbook of Child Language*. *Cambridge Handbooks in Language and Linguistics*. First edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bennett, W. Lance ed. 2008. *Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth*. *The John D and Catherine T Macarthur Foundation series on digital media and learning*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Bhatia, Tej K., and Ritchie, William C. eds. 2013. *The Handbook of Bilingualism and Multilingualism*. Second edition. Malden, MA & Oxford: Wiley-Blackwell.
- Blanchard, Emmanuel, and Allard, Daniele eds. 2011. *Handbook of Research on Culturally-Aware Information Technology: Perspectives and Models*. Hershey, PA & New York: Information Science Reference.

- Boyd, Danah. 2014. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Crystal, David. 2014. *Language Death*. Canto Classics Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dyson, Laurel E., Hendriks, Max A. N., and Grant, Stephen eds. 2007. *Information Technology and Indigenous People*. Hershey, PA: Information Science.
- Edwards, John. 2009. *Language and Identity: An Introduction*. Key Topics in Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fishman, Joshua A. ed. 2001. *Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Century Perspective*. Clevedon [England] and Buffalo: Multilingual Matters.
- Fishman, Joshua A. 2013. Language Maintenance, Language Shift, and Reversing Language Shift. In *The Handbook of Bilingualism and Multilingualism*, Second edition. eds. Tej K. Bhatia and William C. Ritchie, 466-494. Malden, MA & Oxford: Wiley-Blackwell.
- Garcia, Ofelia, Lin, Angel M. Y., and May, Stephen eds. 2017. *Bilingual and Multilingual Education*. 3rd edition. Cham, Switzerland: Springer.
- Gass, Susan M., and Mackey, Alison eds. 2012. *The Routledge Handbook of Second Language Acquisition*. *Routledge handbooks in applied linguistics*. London and New York: Routledge.
- Grenoble, Lenore A., and Whaley, Lindsay J. 2006. *Saving Languages: An Introduction to Language Revitalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harrison, K. David. 2007. *When Languages Die: The Extinction of the World's Languages and the Erosion of Human Knowledge*. Oxford: Oxford University Press.
- Herschensohn, Julia. 2007. *Language Development and Age*. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
- Hinton, Leanne. 2011. Revitalisation of Endangered Languages. In *The Cambridge Handbook of Endangered Languages*. eds. Peter K. Austin and Julia Sallabank, 291—311. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hugo, Graeme. 2015. Demography of Race and Ethnicity in Indonesia. In *The International Handbook of the Demography of Race and Ethnicity*. eds. Rogelio Sáenz, David G. Embrick and Néstor P. Rodríguez, 259—280. Dordrecht: Springer.
- James, Jeffrey. 2015. *The Impact of Mobile Phones on Poverty and Inequality in Developing Countries*. Cham, Switzerland: Springer.

- Jones, Mari C. ed. 2015. *Endangered Languages and New Technologies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lambelet, Amelia, and Berthele, Raphael. 2015. *Age and Foreign Language Learning in School*. Basingstoke, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
- Lauder, Allan F. 2016. Kebijakan dan Perencanaan Bahasa: Sebuah Tinjauan Kritis mengenai Isu Bahasa-Ibu [Language Policy and Planning: A Critical Review of Issues Relevant to the Mother Tongues]. Paper read at *Seminar Nasional Bahasa Ibu IX, "Strategi Pencegahan Kepunahan Bahasa-bahasa Lokal sebagai Warisan Budaya Bangsa"*. Denpasar, Bali. 26—27 Februari 201. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
- Lauder, Multamia R.M.T, and Lauder, Allan F. 2014. Language diversity, change and endangerment in Indonesia. Paper read at *Special Seminar on Linguistics*. Utrecht University, Thursday, 28th February 2014. Faculty of the Humanities, Utrecht University.
- Lauder, Multamia R.M.T., and Lauder, Allan F. 2012a. The Importance of Maintaining Linguistic and Cultural Diversity in SEA. Paper read at *National Workshop on Traditional Knowledge and Cultural Diversity*. Dili, Timor Leste, 10th May 2012. UNESCO.
- Lauder, Multamia R.M.T., and Lauder, Allan F. 2012b. The role of media and ICT in safeguarding and promoting language diversity in Asia and Europe. Paper read at *Steering Committee Meeting of the ASEM Language Diversity Forum*. Jakarta, 4—5 September 2012. Indonesian Ministry of Foreign Affairs, Directorate for Cooperation with America and Europe.
- Lauder, Multamia RMT, and Lauder, Allan F. 2015. Keragaman dan Kepunahan Bahasa di Dunia Melanesia. In *Diaspora Melanesia di Nusantara*. eds. Taufik Abdullah and Mukhlis PaEni, 189-225. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Liddicoat, Anthony J., and Baldauf Jr., Richard B. eds. 2008. *Language Planning and Policy: Language Planning in Local Contexts*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Poston, Dudley L., and Bouvier, Leon F. 2010. *Population and Society: An Introduction to Demography*. New York: Cambridge University Press.
- Ricento, Thomas K. ed. 2006. *An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Language and Social Change*. Oxford: Blackwell.
- Ronchi, Alfredo M. 2008. *eCulture: Cultural Content in the Digital Age*. Berlin & New York: Springer.

- Sallabank, Julia. 2011. Language Policy for Endangered Languages. In *The Cambridge Handbook of Endangered Languages*. eds. Peter K. Austin and Julia Sallabank, 277—290. Cambridge: Cambridge University Press.
- Spolsky, Bernard. 2004. *Language Policy*. Key Topics in Sociolinguistics. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Subrahmanyam, Kaveri, and Šmahel, David. 2011. *Digital Youth: The Role of Media in Development*. New York, Dordrecht: Springer.
- Whiting, Jim. 2012. *Online Communication and Social Networking*. Issues in the digital age series. San Diego, CA: ReferencePoint Press.
- Yates, Miranda, and Youniss, James eds. 2006. *Roots of Civic Identity: International Perspectives on Community Service and Activism in Youth*. Cambridge & New York: Cambridge University Press.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 4

Hari, tanggal	: Kamis, 7 September 2017
Waktu	: Pukul 15.30—16.30
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	: Marlon Ririmase, M.A.
Pemakalah I	: Prof. Dr. John Pieris
Pemakalah II	: Prof. Dr. Multamia MRT Lauder
Pemakalah III	: Dr. Allan Frank Lauder
Notulis	: Ellia Wamese
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra.

Makalah I

**KEBIJAKAN DPD RI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN BAHASA
DAERAH**

Judulnya lebih kepada politik kebahasaan. Kami berupaya menemukan beberapa faktor dominan yang menjelaskan bahasa daerah sebagai bahasa persatuan dalam daerah. Hal ini adalah hal yang penting karena dari sebuah bahasa daerah yang ada di Maluku kita harus menyepakati bahwa bahasa daerah yang memiliki banyak penutur dianggap sebagai *lingua franca*. Di Maluku, dominannya penutur yang banyak harus disepakati sebagai bahasa daerah yang dipakai bersama. Contohnya di Daerah Lease, Seram, dan lainnya. Selain itu dialek juga berperan penting dan berbeda disesuaikan dengan tempat tinggal yang berbeda pula. Bahasa Melayu Ambon, sebenarnya dari dulu sudah dikenal dan berkembang sejak awal abad ke-7, bertepatan

dengan perjalanan Sriwijaya yang ingin menguasai rempah di Maluku dan Maluku Utara. Sehingga mengakibatkan bahasa Melayu Ambon hampir dikikis.

Perbedaan membuat kita semakin cerdas. Sebenarnya bahasa Indonesia tidak ada. Namun karena ras Melanesia yang menolong dengan menggunakan bahasa Melayu. Sehingga munculnya bahasa Indonesia dan disepakati sebagai bahasa Indonesia dan bahasa persatuan.

Peran DPD dalam hal mempertahankan bahasa daerah ini dapat kita lihat pada UUD 1945 Pasal 28F, “Setiap Orang berhak berkomunikasi...”, UUD 1945 Pasal 32: 2, Pasal 36, UU No. 24 Tahun 2009, UU No. 31.

Adapun kesalahan pemerintah pusat dan daerah yang seharusnya mengalokasikan dana untuk melestarikan bahasa lokal atau bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan, yang membuat kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Jangan bangga dengan bahasa yang nyatanya memang pernah menjajah kita, seperti bahasa Inggris dan lain-lain.

Globalisasi menghambat perkembangan bahasa lokal kita. Maluku yang sangat kompleks membuat bahasa pemersatu kita belum bisa ditempuh dan disepakati. Saat perayaan HUT Kota Ambon, telah disisipkan $\frac{1}{4}$ bahasa lokal. Namun, yang menjadi harapan adalah memasukkannya ke dalam kurikulum tetapi belum dapat diraih karena kita belum punya kamus, dan alat-alat pembelajaran di sekolah. Tentu kami ingin bahasa lokal menjadi bahasa ilmiah.

Solusi komprehensif yang dilakukan oleh DPD RI adalah merancang UU tentang bahasa daerah di Indonesia yang sudah disepakati, dan Maluku belum masuk di dalamnya.

Penelitian di Morela dan Mamala membuktikan bahwa anak-anak di sana tidak ingin lagi berbahasa daerah dan hal itu menyebabkan bahasa di sana hampir tidak terpelihara. Namun yang sangat membuat bingung, banyak daerah Muslim yang selalu memelihara bahasa daerah. Berbeda dengan yang Kristen, bahkan tidak ingin dilestarikan yang mengakibatkan banyak daerah Kristen yang tidak bisa berbahasa daerah.

Bahasa yang disederhanakan, disahkan saja yang penting tidak membunuh maknanya. Bahasa sebagai kodrat, harus diyakini bahwa bahasa daerah dapat dikembangkan sebagai bahasa ilmiah. Contoh: kata “Mangente, Manggurebe, Sasi, dan sebagainya”. Segera dibuat kurikulum wajib bahasa daerah lembaga-lembaga formal, seperti SD, SMP, SMA-sederajat. Harus juga membuat kamus dan ensiklopedia bahasa daerah.

Tanggapan:

1. Saran, bapak dan anggota DPD yang memprakasai untuk mengangkat harkat dan martabat bahasa itu sendiri.

2. Yang perlu dilakukan oleh bapak Jhon Piris untuk menyentuh hati nurani, untuk sadar bahwa bhasa daerah adalah bahasa yang penting. Oleh karena itu, buatlah regulasi!

Jawaban:

Sulit menjadikan bahasa lokal sebagai kurikulum, karena kekurangan SDM yang memadai dalam peningkatan hal ini. Harus ada tokoh-tokoh adat yang mendukung. Mengenai bahasa gaul, hal tersebut merupakan hal yang diciptakan oleh anak-anak dan hal tersebut merupakan kreativitas anak muda, dan belum tentu menghancurkan bahasa ibu. Jadi hal tersebut tidak masalah. Aksi nyata akan dibantu para staf, dan kongres pun merupakan satu cara. Dan pemerintah pun harus turut membantu dalam penyaluran anggaran

Makalah II

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELESTARIAN BAHASA DAERAH
BERDASARKAN UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN RUU BAHASA
DAERAH**

UU Pemajuan kebudayaan yang baru saja terbit bulan Mei tahun 2017. Dampak dari UU kebudayaan adalah penanganan budaya dan bahasa daerah. Walau budaya sudah dilihat, namun belum ada kebijakan secara nasional yang menangani kebudayaan terkhususnya bahasa. Hal ini dipandang bahwa budaya hanya seperti suatu objek yang tidak penting untuk kemajuan suatu bangsa. Bahasa merupakan aspek penting yang sebenarnya harus diperhatikan. Untuk kemajuan bangsa hal ini harus dilakukan secara sistematis untuk pelestarian budaya lokal seperti bahasa daerah. 266 bahasa berstatus lemah, dan 76 bahasa yang berstatus sekarat, dan 13 yang berstatus punah. Untuk itu, maka perlu lagi kita melihat legislasi mengatasi dan membantu masalah ini.

Hasil pelacakan regulasi menghasilkan perkembangan aturan-aturan baru. Seperti UU NKRI 1945 pasal... UU No. 29 tentang hak cipta, UU No. 20, UU No. 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan daerah yang mengatur mengenai masalah kebahasaan. Secara yuridis, telah diterbitkan UU, namun secara de facto berbagai deligasi itu belum konprehensif dalam penyelesaian masalah tersebut. Oleh karena itu diperlukan badan hukum yang lebih tinggi untuk pengaturan bahasa daerah dengan lebih baik lagi.

Struktur masalah pemajuan kebudayaan, bahasa baru dapat dibahas pada tahun 2018. Tenaga masih sangat terkuras dalam pelaksanaan untuk mengoptimalkan pelestarian bahasa daerah. Hal ini tidak didukung karena pengawasan, perencanaan, dan pengevaluasian masih minim. Pembagian tugas dan wewenang juga harus

diperhatikan. Antara lain, koordinasi dengan universitas terdekat dalam kerja sama. Selain itu pendanaan juga harus diperhatikan. Harapan kami, ada rekayasa budaya, orang-orang muda Indonesia setidaknya dapat menguasai tiga bahasa (bahasa daerah pembentuk jati diri, bahasa Indonesia, dan bahasa untuk berkiprah di kancah internasional). Keputusan lada pada komunitas tersebut, jika ingin bahasa direvitalisasi, maka dijalankan, namun jika tidak berarti biarkan didokumentasi.

Undang-Undang dijelaskan bahwa dalam waktu dua tahun, semua aturan sudah harus dikerjakan. RUU bahasa daerah sebenarnya masih perlu diperjuangkan karena RUU tersebut adalah sebuah UU yang akan mengatur secara normatif apa yang harus dilakukan untuk pelaksanaan yang lebih baik. Bahasa adalah salah satu komponen kecil dalam hal pemajuan objek kebudayaan.

Sensus bahasa perlu dilakukan, dimana menggali informasi mengenai bahasa apa yang ada dalam negeri tersebut lalu apakah bahasa tersebut dapat dijadikan bahasa yang wajib dilaksanakan. Sekarang kita mempunyai kesempatan untuk menguasai sensus tersebut. Seperti kerja sama dengan pemerintah, untuk mengecek daftar pemilu, dalam pemakaian bahasa agar dapat diketahui seberapa. Perlu koordinasi antara linguistik, dan pemerintah harus tetap terjaga.

Jawaban:

Regulasi masih diperlukan namun diperlukan regulasi yang nasional untuk ditindaklanjuti. Tetap memperjuangkan RUU bahasa daerah untuk tetap diperjuangkan. Namun, yang mengajar bahasa daerah, bukan orang yang ahli bahasa daerah. Sehingga perlunya perjuangan terhadap bahasa daerah, dan pembukaan program studi bahasa daerah.

Makalah III

**STRATEGI ORANG MUDA DALAM REVITALISASI
BAHASA DAERAH DI INDONESIA**

We have to make it dynamic again for language. We have to help language to always continue. Language is caring about parent, siblings, and everyone in home, because so many language of Indonesia, because of the multicultural culture in Indonesia. Different place, also about the context, so the relation is also different to. Young generation, always use language as their condition, if they were in school they sure have to use bahasa, but with other they will use other language. Children as young generation, will change the generation if they always use the other language. Jadi anak-anak lahir, berkembang dan bersekolah. Anak-anak adalah aset yang harus diperhatikan dalam hal ini.

Tujuan dari topik tersebut adalah tentang strategi untuk mempertahankan kelestarian bahasa daerah adalah jangan pernah mengabaikan remaja dalam penggunaan bahasa mereka. Karena itu, jika ingin berbicara dengan remaja, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah berbicara dengan hal yang menyenangkan dengan mereka. Cara yang paling praktis adalah menggunakan bahasa lokal dengan menggunakan sosial media. Orang muda sangat mencintai hal tersebut, mereka menyukai *chatting*, mereka, suka segala yang berbaur dengan internet. Membuat komunitas *online* ditempat tinggal. Jika ingin berbicara dalam sosial media, bisa menggunakan bahasa lokal dan bahasa persatuan kita, karena itulah identitas kita sebagai orang Indonesia. Hal ini, harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga pemerintah pun harus memperhatikan. Semakin banyak penggunaan sosial media di lingkungan lokal, memungkinkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Tanggapan:

1. Bahasa gaul dipandang sebagai apa? Dari sisi legislator, apakah bahasa gaul itu? (Dinas Pemprov Maluku)
2. Saran dan usul dalam bentuk rekomendasi, sudah 8 pembicara. Bahasa sebagai aset, harusnya mengupayakan bahasa yang sudah ada untuk meningkat, dan merevitalisasi bahasa yang hampir punah. Sehingga ada satu rekomendasi khusus untuk memberikan satu solusi, agar Kantor Bahasa Maluku dapat meneruskannya kepada pusat untuk merevitalisasi bahasa lokal dengan upaya muatan lokal pada anak-anak Maluku, atau ditindaklanjuti lewat kerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Jawaban:

1. Mengenai bahasa gaul, pertanyaan tentang gaya tidak penting untuk mempertahankan bahasa tersebut.
2. Kepada ibu, pendidikan memang penting, penting untuk mengajar, namun sangat penting untuk mengerti apa yang anak sukai.

PENGAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH DI PULAU BUTON: PELUANG DAN TANTANGAN

Nadir La Djamudi

Universitas Muhammadiyah Buton

nadirladjamudi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peluang dan tantangan pengajaran muatan lokal bahasa daerah di Pulau Buton. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumentasi melalui berbagai sumber informasi, baik melalui buku, jurnal, maupun internet. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, menelaah, serta memaparkan data peluang dan tantangan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah di Pulau Buton.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa tantangan dalam pembelajaran muatan lokal Bahasa Daerah di Pulau Buton, meliputi; (1) Pengajaran muatan lokal bahasa daerah belum sesuai wilayah dan etnisnya, (2) Membutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang pemberlakuan dan penataan Muatan Lokal, (3) belum ada ketersediaan dan kesiapan SDM putra daerah yang memiliki kompetensi untuk mengajarkan Mulok bahasa daerah. Selain itu, peluang yang diharapkan dari pembelajaran muatan lokal bahasa daerah di Pulau Buton, meliputi

(1) Setiap bahasa daerah mendapat perlindungan dan pelestarian, (2) Keragaman bahasa daerah dapat dipertahankan agar mendapat perlakuan secara adil, (3) Setiap bahasa daerah menjadi kebanggaan bagi generasinya, (4) Melalui bahasa daerah, budaya setempat dapat diungkapkan kepada gerenasinya sejak dini.

Kata kunci: Pengajaran bahasa daerah, Buton, peluang dan tantangan

1. Pendahuluan

Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah, karena setiap etnis memiliki bahasa daerah yang berbeda satu sama lain. Kekayaan itu di satu sisi merupakan kebanggaan. Pada sisi lain menjadi tugas yang tidak ringan, terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Dalam *Ethnologue* (2012) disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia. Sebagian masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari bahwa sebagian besar bahasa itu akan punah. Menurut UNESCO, seperti yang tertuang dalam *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing*, di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah (2001:40) yang di dalamnya terdapat kurang lebih 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa), serta Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara itu, bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa).

Rendahnya daya hidup bahasa daerah pada umumnya disebabkan oleh pindahnya orang desa ke kota untuk mencari penghidupan yang dianggap lebih layak dan perkawinan antaretnis yang banyak terjadi di Indonesia. Masyarakat perkotaan, yang pada umumnya merupakan masyarakat multietnis atau multilingual, memaksa seseorang harus meninggalkan bahasa etnisnya dan menuju bahasa nasional.

Pulau Buton yang didiami oleh beberapa etnik dengan ragam bahasa yang berbeda satu sama lain perlu disikapi dengan bijak. Etnik Kepulauan Tukang Besi, etnis Cia-cia, etnis Wolio, etnis Bombana ini memiliki bahasa daerah masing-masing. Kondisi seperti ini tentu membutuhkan sikap yang proporsional yang produktif sehingga tidak ada yang dikorbankan. Pemerintah dan semua pihak terkait harus menyamakan persepsi untuk penanganan yang lebih profesional.

Dunia pendidikan dianggap sebagai salah satu pihak yang memberikan alternatif dan mewadahi penanganan kondisi multietnik yang menghasilkan multi bahasa, khususnya di Pulau Buton. Karena pentingnya semua bahasa daerah yang

tumbuh secara berdampingan ini, maka dipandang tepat jika peneliti dengan serius mengkaji eksistensi pembelajaran muatan lokal bahasa daerah pada setiap jenjang pendidikan di Pulau Buton.

Berdasarkan uraian panjang lebar tentang problematika bahasa daerah dalam dunia pendidikan di atas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian tentang harapan dan tantangan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah di Pulau Buton.

2. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional—termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003—penggunaan bahasa daerah diatur sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Bahasa daerah boleh digunakan pada tahap awal pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Baik bahasa daerah maupun bahasa asing mempunyai fungsi pendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan nasional.

Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas menjadi bukti bahwa sesungguhnya Indonesia sudah sejak tahun 1950 telah menerapkan prinsip EFA (*education for all*) yang dicetuskan oleh Unesco baru pada tahun 1990-an. Penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar dunia pendidikan merupakan upaya menjangkau peserta didik yang belum mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Hal itu sekaligus juga menjadi bukti bahwa Indonesia juga telah menerapkan program MLE (*multilingual education*) yaitu program pendidikan yang memanfaatkan bahasa pertama sebagai bahasa pengantar di peringkat awal untuk kemudian suatu saat—umumnya pada kelas III atau IV—beralih ke bahasa nasional. Program MLE itu baru dikenalkan oleh UNESCO pada tahun 2000-an.

Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing.

Berkaitan dengan upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra Indonesia kepada pemerintah pusat dan memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra daerah kepada pemerintah

daerah. Akan tetapi, dalam hal itu semua pemerintah pusat diberi juga kewenangan merumuskan kebijakan nasional kebahasaan yang di dalamnya juga memuat kebijakan tentang apa dan bagaimana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah itu harus dilakukan. Pemerintah daerah juga diberi kewajiban mendukung pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan, baik dukungan pendanaan maupun kepakaran, kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah.

Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 32 Ayat 2 serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, maka dilematis segi tiga yang terjadi antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing akan ditengahi oleh sistem pembelajaran muatan lokal bahasa daerah di setiap jenjang sekolah. Kebinekaan budaya dan bahasa daerah menuntut kita dan pemerintah pusat maupun daerah untuk secara profesional memberi perlakuan terhadap setiap bahasa daerah. Akan tetapi, tantangan dan peluang yang dihadapi untuk memenuhi tuntutan perundang-undangan tersebut, dapat dijelaskan berikut ini.

2.1 Tantangan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah di Pulau Buton

1. Pengajaran muatan lokal bahasa daerah harus sesuai wilayah dan etnisnya

Sejak tahun 2004, Politik Bahasa Nasional dan keputusan Kongres Bahasa Indonesia itu lebih menjadi draf RUU Kebahasaan yang akhirnya lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada tanggal 9 Juli 2009. Selanjutnya, sejak tahun 2009 itu, penanganan bahasa di Indonesia, baik bahasa negara, bahasa daerah, maupun bahasa asing, didasarkan pada undang-undang itu.

Kenyataan perlakuan bahasa-bahasa daerah di Kepulauan Buton ternyata belum selaras dengan harapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa daerah yang diajarkan sebagai muatan lokal di seluruh daratan Pulau Buton hanya bahasa Wolio. Sementara itu, bahasa daerah lain yang mereka miliki tidak dimasukkan dalam muatan lokal. Misalnya, di Kabupaten Wakatobi terdapat bahasa Kepulauan Tukang Besi, dialek Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Di wilayah Kabupaten Buton terdapat bahasa Cia-cia, dialek Cia-cia Laporo dan dialek Cia-cia Lapandewa.

Etnis di lingkungan sekolah tersebut sebagai pribumi akhirnya merasa dikucilkan. Generasi mereka tidak merasa bangga dengan bahasa daerah orang tuanya. Akhirnya, mereka lebih menghargai bahasa dan budaya orang

lain dari pada budaya daerah sendiri. Jika hal ini dibiarkan, kelak generasi kita akan tersesat dalam rimba budaya sendiri. Semoga hal ini tidak terjadi.

Ketika di rantau, mereka membentuk pemukiman yang cukup signifikan jumlahnya. Setelah memasuki sekolah khususnya di Sekolah Dasar, maka putra-putri mereka seharusnya mendapat pelajaran muatan lokal bahasa daerah yang digunakan di rumah bersama orang tuanya.

Kondisi bahasa ibu dari komunitas rantauan ini belum mendapatkan perhatian yang serius bahkan diterlantarkan hak-hak kebahasaannya oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, perihal bahasa daerah telah diamanatkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian dan perlindungan, berdasarkan amanat UUD 1945 yang secara rinci dikemukakan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019.

2. Membutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang pemberlakuan dan penataan muatan lokal

Kondisi perlakuan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diuraikan pada bagian pertama di atas, tentu sangat membutuhkan pengawasan yang serius dari pihak yang berkompeten. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta bahasa daerah dilindungi sebagaimana mestinya.

Secara hukum, sesungguhnya sudah jelas, bahwa pada Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penanganan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan.

Jika hal ini tergolong pelanggaran, maka semestinya jelas pula apa sanksi dan hukumannya bagi pihak yang melanggar. Kondisi seperti ini harus disikapi secara serius karena kebinekaan budaya di negara kita di dalamnya terdapat kebhinekaan bahasa daerah pula. Dengan demikian, kasus pelecehan terhadap hak-hak kebahasaan berpotensi terjadi di seluruh tanah air Indonesia.

3. Ketersediaan dan kesiapan SDM putra daerah yang memiliki kompetensi untuk mengajarkan muatan bahasa daerah.

Payung hukum sudah cukup memadai untuk memberi perlindungan dan pengembangan bahasa daerah. Undang-undang telah mengatur secara rinci sampai pada upaya untuk memfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang akan menangani bahasa daerah pada ranah pembelajaran. Hal dimaksudkan agar tujuan pembelajaran tidak menyimpang dari Tujuan Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, pembelajaran muatan lokal bahasa daerah tetap bermuara pada penyelamatan bahasa daerah dari ancaman kepunahan sehingga dapat menunjang pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional.

Penguatan perlindungan dan pengembangan bahasa daerah di sekolah dapat kita pahami dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang penanganan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan. Selain berupa pembagian tugas yang lebih terperinci, koordinasi itu dapat juga berupa fasilitasi kepakaran dan dukungan sumber daya.

Perlu ditegaskan pula bahwa penyediaan tenaga yang profesional untuk mengajarkan mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah semestinya adalah putra daerah sendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa yang lebih mahir dan menguasai fonologi dan morfologi bahasa daerah di Pulau Buton itu adalah putra daerah yang bertatus sebagai penutur asli bahasa daerah di Pulau Buton itu sendiri.

Alasan lain, mengapa kita lebih memilih putra daerah Pulau Buton yang mengajarkan muatan lokal bahasa daerah di Pulau Buton karena secara nasional bahasa daerah juga telah ditetapkan dalam perundang-undangan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar.

Oleh karena itu, sudah saatnya penyerahan tanggung jawab secara profesional kepada putra daerah untuk memahami dan mengajarkan bahasa daerahnya. Hal ini sebagai wujud penghargaan terhadap budaya sendiri, sebelum menghargai bahasa dan budaya daerah lain, termasuk budaya nasional. Hal lain yang menjadi pertimbangan penting adalah Perguruan Tinggi Keguruan di Indonesia belum mampu menghasilkan tenaga pengajar yang profesional untuk semua bahasa daerah di Indonesia.

2.2 Peluang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah di Pulau Buton

Politik Bahasa Nasional dan keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang menjadi draf RUU Kebahasaan yang akhirnya lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada tanggal 9 Juli 2009 tentang penanganan bahasa di Indonesia, baik bahasa negara, bahasa daerah, maupun bahasa asing, didasarkan pada undang-undang itu. Hal tersebut sudah cukup memberi peluang kepada bahasa daerah dalam pembelajaran muatan lokal di Pulau Buton.

Beberapa peluang Bahasa Daerah yang dapat dilakukan dalam konteks pembelajaran muatan lokal, dapat diungkapkan pada uraian berikut ini:

1. Setiap bahasa daerah mendapat perlindungan dan pelestarian

Jika setiap pemerintah daerah patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku tentang bahasa daerah, maka setiap bahasa daerah tanpa kecuali berpeluang untuk mendapatkan pembinaan di sekolah sesuai wilayah pemukiman etnis masing-masing. Setelah pembinaan secara formal dilakukan di berbagai jenjang sekolah, secara implisit tiap-tiap bahasa daerah akan mendapat perlindungan dan pelestarian di daerahnya atau wilayahnya masing-masing pula.

Hal semacam ini, perlu mendapat penguatan secara birokrasi karena di Pulau Buton memiliki bahasa daerah yang beragam sesuai dengan jumlah dan karakter etniknya. Untuk menyukseskan peluang ini, maka pemerintah dan ilmunan bahasa serta masyarakat perlu kerja sama untuk memberdayakan setiap bahasa daerah. Hasil akhir dari upaya-upaya ini adalah bermuara pada keberhasilan pemertahan budaya masing-masing.

2. Keragaman bahasa daerah dapat dipertahankan agar mendapat perlakuan secara adil

Pulau Buton yang didiami oleh etnis yang beragam, tentu memiliki bahasa daerah yang beragam pula. Adanya perundang-undangan yang berlaku tentang bahasa daerah akan memberi peluang terhadap semua bahasa daerah untuk dipertahankan. Untuk merealisasikan peluang ini, maka setiap bahasa daerah di wilayah tersebut, tanpa kecuali, perlu dimasukkan dalam kurikulum mata pelajaran muatan lokal.

Pemerintah daerah harus memberi dukungan terhadap keragaman bahasa daerah di wilayah pemerintahannya, tanpa membedakan bahasa daerah yang dengan bahasa daerah yang lainnya. Dalam satu wilayah dengan etnis yang beragam, tidak dibenarkan ada etnik yang dimarginalkan, termasuk bahasanya. Setiap bahasa daerah harus mendapat perlakuan dan perlindungan yang adil dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah.

Untuk itu, pemerintah harus memberi perhatian yang sama terhadap setiap bahasa daerahnya. Bahasa daerah sesungguhnya merupakan kekayaan budaya sekaligus sebagai kekayaan intelektual. Bahasa daerah adalah hasil kreativitas moyang kita dalam menghadapi tantangan alam, khususnya dalam berkomunikasi.

3. *Setiap Bahasa Daerah menjadi kebanggaan bagi generasinya*

Setelah bahasa daerah menjadi pembelajaran wajib di sekolahnya dalam hal ini sebagai mata pelajaran muatan lokal, maka sejak dini siswa menganggap bahwa bahasa daerahnya juga penting. Hal ini akan berjalan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, hingga muncul rasa memiliki karena bahasa daerah yang dipelajari sama dengan bahasa yang digunakan di rumah.

Muatan lokal bahasa daerah yang dipelajari dengan sendirinya menjadi tolak ukur kemampuan dirinya dari siswa yang lain, berdasarkan nilai yang diperoleh. Tantangan-tantangan dalam pembelajaran muatan lokal bahasa daerah akan mengasah kebanggaan siswa terhadap bahasa daerahnya. Regenerasi semacam ini akan melahirkan kebanggaan terhadap bahasa daerahnya masing-masing.

4. *Melalui bahasa daerah, budaya setempat dapat diungkapkan kepada generasi sejak dini*

Antara bahasa dan budaya ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sulit pisahkan karena memang bahasa merupakan salah satu bagian dari budaya, akan tetapi melalui bahasa kita dapat membentuk dan mengungkapkan budaya itu sendiri.

Jika bahasa daerah telah diperkenalkan sejak dini kepada generasi melalui bangku pendidikan, maka secara inheren budaya langsung terungkapkan. Melalui bahasa daerah kita lebih mudah mengenal budaya daerah kita sendiri. Belajar bahasa berarti belajar budaya. Belajar budaya merupakan modal utama untuk mengungkapkan budaya itu sendiri.

Dengan demikian, kita dapat kemukakan bahwa pembelajaran bahasa daerah sejak dini, secara langsung mengungkapkan budaya kepada generasi sejak dini pula.

3. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam pembelajaran muatan lokal bahasa daerah di Pulau Buton, meliputi (1) Pengajaran muatan lokal bahasa daerah belum sesuai wilayah dan etniknya, (2) Membutuhkan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang pemberlakuan dan penataan muatan lokal, (3) belum ada ketersediaan dan kesiapan SDM putra daerah yang memiliki kompetensi untuk mengajarkan muatan lokal bahasa daerah.

Selain itu, peluang yang diharapkan dari pembelajaran muatan loka bahasa daerah di Pulau Buton, meliputi (1) Setiap bahasa daerah mendapat perlindungan dan pelestarian, (2) Keragaman bahasa daerah dapat dipertahankan agar mendapat perlakuan secara adil, (3) Setiap bahasa daerah menjadi kebanggaan bagi generasinya, (4) Melalui bahasa daerah, budaya setempat dapat diungkapkan kepada generasi sejak dini.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan (Ed). 2011. *Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Lumintanintang. 1990. "Pola Pemakaian Bahasa dalam Perkewinan Campuran: Telaah terhadap Beberapa Keluarga di Jawa-Sunda Karyawan Departemen Pendidikan dan kebudayaan". (Desertasi Fakultas Pascasarjana Bahasa. Jakarta: Jambatan (Seri ILDEP).
- Moeliono, Anton. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di Dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Jambatan (Seri ILDEP).
- Purwo, Bambang Kasanti. 2006. "Memberdayakan Bahasa Ibu". Makalah Seminar Pelestarian Bahasa yang terancam Punah, Pusat Bahasa, Sabtu, 9 Desember 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Sugiono. 2017. *Perlindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan*. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1343> 30 Juli 2017. 01.8 wita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, bahasa, dan lambang negara, Serta Lagu Kebangsaan.

UNESCO. *A methodology for assessing language vitality and endangerment*. <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/language-vitality/#topPage>

Wurm, Stephen A. (ed.). 2001. *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing*. Paris: UNESCO Publishing.

PELINDUNGAN BAHASA-BAHASA DAERAH DI MALUKU¹

Asrif

Kantor Bahasa Maluku

Posel: asrif@kemdikbud.go.id

1. Maluku Negeri Multibahasa

Menurut catatan sejumlah lembaga, Provinsi Maluku disebut memiliki jumlah bahasa daerah terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) menyebutkan telah berhasil mengidentifikasi 48 bahasa daerah di Maluku, sedangkan lembaga lain yang juga melakukan penelitian kebahasaan di Indonesia menyebutkan Maluku memiliki lebih dari 100 bahasa daerah. Hingga saat ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga resmi negara masih terus melakukan penelitian di seluruh wilayah Indonesia (Sugiyono dan Ganjar Harimansyah, 2016), termasuk pada wilayah Provinsi Maluku yang diduga masih terdapat sejumlah bahasa daerah yang belum teridentifikasi.

Jumlah bahasa daerah (*bahasa tana*)² di Maluku rupanya sangat banyak

¹ Disampaikan dalam Kongres Internasional Bahasa Daerah Maluku yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Maluku, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

² Asrif dalam makalahnya berjudul “Meneguhkan Bahasa Daerah, Menjaga Budaya Pulau Buru” mendefinisikan *bahasa tana* sebagai bahasa-bahasa asli yang digunakan oleh masyarakat Maluku sebelum kehadiran bahasa Melayu di tanah Maluku.

sebagaimana dinyatakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, juga oleh para peneliti lainnya. Dari jumlah tersebut, kita dapat menyatakan bahwa Maluku tidak hanya Negeri Raja-Raja tetapi juga Negeri Multilingual atau Negeri Multibahasa. Jumlah minimal 48 bahasa daerah itu dituturkan oleh penduduk Provinsi Maluku yang hanya sekitar 1,8 juta penduduk. Itu berarti hampir tiap negeri di Maluku memiliki bahasa daerah masing-masing.

Bandingkan dengan bahasa daerah di Pulau Jawa, Sumatera, atau Kalimantan. Di Pulau Jawa, hanya ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda, dan mungkin bahasa Betawi. Di Pulau Sumatera pun tidak banyak karena di pulau itu dominan masyarakatnya berbahasa Melayu. Padahal, penduduk di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera jumlahnya sangat banyak. Berkali-kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Maluku.

Oleh karena itu, sangatlah benar kenyataan bahwa semakin ke Indonesia bagian timur, jumlah bahasa daerah semakin banyak, sebaliknya semakin ke Indonesia bagian barat, jumlah bahasa daerah semakin sedikit. Itu memang fakta yang dapat dibuktikan dengan mudah. Terbukti dari temuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menyebutkan Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Maluku sebagai tiga provinsi terbanyak pemilik bahasa daerah di Indonesia.

Jumlah bahasa daerah yang banyak itu memang telah disebutkan oleh beberapa pihak yang pernah mengunjungi Maluku ataupun melakukan penelitian di Provinsi Maluku. Collins (1980, dalam Wahidah, 2016) menyebutkan bahwa orang-orang Eropa yang mengunjungi Maluku pada sekitar abad ke-16 menyebutkan bahwa terdapat banyak bahasa daerah di Maluku. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Frances Xavier dalam salah satu dokumen tertulis berupa surat tertanggal 10 Maret 1546 yang menyatakan bahwa setiap pulau di Maluku mempunyai bahasa tersendiri dan dalam satu pulau, setiap desa mempunyai bahasa sendiri (Wahidah, 2016).

Apa yang disebutkan Collins itu benar adanya. Jika saat ini masih terlihat dengan jelas banyaknya bahasa-bahasa daerah di Provinsi Maluku, bagaimana dengan jumlah bahasa daerah pada masa lampau? Tentu lebih banyak sebagaimana yang dituturkan oleh para peneliti. Sejak masa lampau hingga saat ini, Maluku tidak hanya Negeri Raja-Raja, melainkan juga Negeri Multibahasa.

2. Kebijakan Pemerintah terhadap Pelindungan Bahasa Daerah

Jumlah bahasa daerah yang banyak tersebut seharusnya menjadi salah satu modal pembangunan bangsa. Keragaman bahasa daerah itu merupakan kekayaan kultural bangsa yang tiap satu bahasa daerah mewakili satu etnik. Bahasa daerah

menjadi hamparan budaya. Berarti, semakin banyak bahasa daerah, maka semakin banyak budayanya. Itulah Provinsi Maluku yang multibahasa yang berarti juga multibudaya.

Di balik jumlah bahasa daerah yang banyak itu, sejumlah bahasa daerah di Provinsi Maluku dilaporkan berada pada kondisi kritis (Latupapua dkk, 2013) atau terancam punah (Asrif, 2016). Lebih mirisnya lagi ternyata beberapa bahasa daerah di Maluku dinyatakan telah punah. Laporan dari Kantor Bahasa Maluku (2017) menyatakan bahwa semua bahasa daerah di Pulau Ambon, Seram, Saparua, Haruku, Nusa Laut, dan Buru berada dalam kondisi terancam punah. Fakta lain yakni banyak negeri adat yang masyarakatnya tidak menggunakan bahasa daerahnya lagi. Di Pulau Ambon, terdapat negeri adat yang telah kehilangan bahasa daerah. Begitu pula di negeri-negeri adat di Pulau Saparua, Pulau Haruku, Pulau Nusa Laut, Pulau Pulau Seram, dan Pulau Buru. Pulau-pulau itu disebut Collins sebagai Maluku Tengah (Collins, 2016)

Di pulau-pulau itu, bahasa daerah yang ada terutama di negeri-negeri adat yang masyarakatnya beragama Islam. Namun laporan dari Kantor Bahasa Maluku (2017) menyatakan bahwa bahasa-bahasa di negeri-negeri beragama Islam pun kondisinya tidak dalam keadaan aman. Hal itu dapat dibuktikan dengan sikap generasi mudanya yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia pada wilayah-wilayah pemakaian bahasa yang seharusnya berbahasa daerah, misalnya di dalam rumah, di lingkungan masyarakat, atau dalam perkumpulan sesama anak negeri.

Kondisi bahasa daerah yang aman berada di Maluku bagian tenggara. Bahasa-bahasa daerah di Kepulauan Key, Aru, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya berada dalam kondisi aman. Namun demikian, bahasa-bahasa yang berstatus aman itu perlu penguatan-penguatan agar masyarakatnya tetap melestarikan bahasa daerahnya. Bahasa daerah tetap ada bersamaan dengan bahasa negara dan bahasa asing.

Kepunahan dan teterancampunahan bahasa-bahasa daerah di Provinsi Maluku, terutama di pulau-pulau yang sebelumnya disebutkan itu sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi Maluku. Bahasa daerah tidak sekadar alat komunikasi. Bahasa daerah juga merupakan identitas, pengikat atau perekat etnik, pendokumentasi pengetahuan dan kearifan lokal, pendokumentasi sejarah lokal, dan sebagainya (Asrif, 2016). Oleh karena itu, pemerintah bersama masyarakat harus berjuang untuk melindungi dan mengembangkan bahasa daerah yang ada di wilayah masing-masing.

Pemerintah Provinsi Maluku mendukung segala usaha untuk melindungi dan mengembangkan bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh wilayah Maluku. Salah

satu bentuk pelestarian bahasa daerah yakni dengan adanya muatan lokal bahasa daerah di berbagai sekolah-sekolah. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten perlu tetap menjaga keberlangsungan muatan lokal bahasa daerah ini.

Selain itu, yang tidak kalah utamanya yakni regulasi seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tentang pelestarian bahasa daerah ini. Pemerintah daerah yang ada di Provinsi Maluku perlu memikirkan hal itu dengan sungguh-sungguh agar bahasa daerah yang ada saat ini menjadi kuat. Kita dapat bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Kantor Bahasa Maluku dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dukungan terhadap pelaksanaan kongres dan lokakarya bahasa daerah ini merupakan salah satu bentuk Pemerintah Maluku dalam mendukung upaya-upaya melestarikan bahasa daerah.

3. Penutup

Pada era globalisasi dan multimedia ini, masyarakat seharusnya tetap meneguhkan bahasa daerah bersama bahasa negara dan bahasa asing. Bahasa daerah harus tetap dihormati dan diberi ruang hidup. Bahasa daerahlah yang menjadi tonggak-tonggak bahasa negara. Oleh karena itu, meneguhkan bahasa daerah berarti sesungguhnya kita sedang menguatkan posisi dan eksistensi bahasa negara, yakni bahasa Indonesia.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat perlu bekerja sama dalam melestarikan bahasa daerah. Semua pihak harus bersatu padu dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan segala kebijakan pelestarian bahasa daerah. Jika semua pihak bekerja sama, maka usia hidup bahasa daerah pada masa yang akan datang tetap akan bersinar. Dengan lestarnya bahasa daerah, maka budaya, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi, dan sebagainya akan tetap lestari.

Daftar Pustaka

- Asrif. 2017. “Maluku menuju Monolinguiistik” dalam Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra *Martabatkan Bahasa dan Sastra, Rayakan Kebinekaan* (Editor: Asrif). Ambon: Kantor Bahasa Maluku.
- 2016a. “Revitalisasi Bahasa Daerah di Maluku Berbasis Komunitas: Studi Kasus di Negeri Haru Ukui dan di Negeri Hitu Lama”, dalam Prosiding Seminar dan Dialog Internasional Kemelayuan di Indonesia Timur (Editor: Nurhayati S. dan Muhammad Hasyim). Makassar: Puslitbang Dinamika Masyarakat, Budaya, dan Humaniora, LPPM Unhas.
- 2016b. “Meneguhkan Bahasa Daerah, Menjaga Budaya Pulau Buru: dalam *Kongres Kebudayaan Maluku* di Pulau Buru. Namlea: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buru.
- Collins, James T. 2016. “Penelitian Bahasa Daerah Maluku Tengah” dalam Ceramah Ilmiah di Kantor Bahasa Maluku, Ambon, tanggal 4 Mei 2016.
- Erniati dan Falatino Erik Latupapua. 2016. “Penguasaan Leksikon Arkais pada Kalangan Usia Muda di Wilayah Administratif Kecamatan Sirimau, Kota Ambon”. Laporan Penelitian-Belum Diterbitkan. Ambon: Kantor Bahasa Maluku.
- Kompas.com. 2016. “Puluhan Bahasa Daerah di Maluku Terancam Punah.” Sumber: (<http://regional.kompas.com/read/2015/09/21/14374211/Puluhan.Bahasa.Daerah.di.Maluku.Terancam.Punah>)
- Latupapua, Falatino Erik dkk. 2013. “Pemertahanan Bahasa *Tana* sebagai Bahasa Adat di Kabupaten Maluku Tengah”. Laporan Penelitian Hibah Bersaing pada Lembaga Penelitian Universitas Pattimura: Tidak diterbitkan.
- Nationalgeographic.co.id. 2016. “Ratusan Ragam Bahasa di Indonesia Hadapi Ancaman Kepunahan”. Sumber: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/08/ratusan-ragam-bahasa-di-indonesia-hadapi-ancaman-kepunahan>.
- Sugiyono dan Ganjar Harimansyah. 2016. Kamus sebagai Sarana Pendokumentasian dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Daerah” dalam *Kongres Bahasa Daerah Nusantara*. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

Wahidah. 2016a. “Keterancaman Bahasa-Bahasa Daerah di Maluku Akibat Dominasi Bahasa Melayu Ambon” dalam surat jabar harian *Kabar Timur*, 21 Maret 2016.

..... 2016b. “Upaya Pelestarian Bahasa-Bahasa Daerah di Maluku: Revitalisasi atau Revivalisasi?”

MENAKAR KEMBALI KEBERADAAN BAHASA DIALEK JAWA TIMUR SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN BAHASA DAERAH

Prima Zulvarina
Universitas Brawijaya
primazulvarina@ub.ac.id

Abstrak

Bahasa Jawa merupakan salah satu dari bahasa daerah yang ada di Indonesia, fungsi dari bahasa daerah adalah untuk lambang kedaerahan dan alat komunikasi antarsuku. Bahasa Jawa memiliki beragam dialek. Dialek Solo, Yogya, Surabaya, dsb. Sebagian besar bahwa bahasa Jawa yang diajarkan di sekolah adalah bahasa Jawa dengan dialek Solo dan Yogya (kowe, piye, ora, bocah, dsb). Dialek bahasa Jawa yang digunakan di wilayah Jawa Timur, sebagian besar menggunakan dialek Surabaya. Bahasa ini semakin menjauhkan peserta didik dari kebutuhan berbahasanya sehari-hari, bahkan oleh mereka yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan revitalisasi pembelajaran berbasis dialek melalui materi muatan lokal bahasa Jawa yang sesuai dengan dialek masing-masing daerah. makalah ini difokuskan pada eksistensi dan revitalisasi dialek Jawa Timuran sebagai upaya untuk mempertahankan bahasa daerah.

Kata Kunci: Bahasa Jawa, dialek Jawa Timur, revitalisasi

1. Pendahuluan

Generasi sekarang cenderung lebih bangga menggunakan bahasa asing. Seakan-akan identitas mereka sebagai suku dari daerah kian memudar. Keluarga yang

berpendidikan tinggi dan memiliki status sosial menengah ke atas seperti masyarakat perkotaan cenderung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahkan keluarga modern saat ini mengajarkan anak-anak mereka bahasa asing untuk “*first language*”. Beberapa dari keluarga modern berpikir bahwa akan lebih senang ataupun bangga melihat anak-anak mereka berbahasa asing daripada berbahasa daerah. Selain itu jika dalam satu keluarga semua anggota keluarga bisa berbahasa asing, maka lebih dipandang bermartabat.

Ethnologue (2015) mencatat sebanyak 7.102 bahasa dituturkan di seluruh dunia. Sementara itu, di Indonesia tercatat 707 bahasa yang dituturkan sekitar 221 juta penduduk. Berdasarkan data tersebut dapat dibayangkan di Indonesia dialek berjumlah ratusan, betapa jumlah ini adalah hal yang fantastis, penanda keragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Itu semua tak pernah disadari oleh penduduk Indonesia

Bahasa Jawa merupakan salah satu dari bahasa daerah yang ada di Indonesia, fungsi dari bahasa daerah adalah untuk lambang kedaerahan dan alat komunikasi antarsuku. Mengutip dari catatan Kompas, sebanyak 726 dari 746 bahasa daerah di Indonesia ternyata terancam punah. Hal tersebut disebabkan karena faktor keengganan generasi muda menggunakan bahasa daerah. Bahkan, dari 746 bahasa daerah tersebut kini hanya tersisa 13 bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur di atas satu juta orang, itu pun sebagian besar generasi tua.

Bahasa Jawa memiliki beragam dialek, dialek Solo, dialek Yogya, dialek Surabaya, dan sebagainya. Sebagian besar bahwa bahasa Jawa yang diajarkan di sekolah adalah bahasa Jawa dengan dialek Solo dan Yogya (*kowe, piye, ora*, bocah, dsb). Tidak akan menjadi masalah jika sekolah tersebut di kawasan sekitar Solo, Yogya, atau wilayah Jawa Tengah lainnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan berkomunikasi mereka sehari-hari jika diajarkan di wilayah Jawa Timur. Dialek bahasa Jawa yang digunakan di wilayah Jawa Timur, sebagian besar menggunakan dialek Surabaya yang meliputi Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik, Malang, dan sebagian Mojokerto.

Bahasa ini semakin menjauhkan peserta didik dari kebutuhan berbahasanya sehari-hari, bahkan oleh mereka yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Untuk memopulerkan kembali bahasa Jawa sebagai upaya untuk mempertahankannya, usaha yang perlu dilakukan adalah menempatkannya di wilayah paling domestik keseharian. Artinya, bahasa Jawa yang diajarkan harus menunjang dan berkontribusi secara langsung dalam kebutuhan berbahasa sehari-hari.

Contoh kasus di wilayah Malang Raya, sebagian besar sekolah mulai tingkat sekolah dasar hingga menengah mendapatkan pelajaran bahasa Jawa. Materi bahasa Jawa yang diajarkan adalah bahasa Jawa dialek Mataraman. Dialek ini jelas berbeda jauh dengan bahasa dialek yang digunakan penduduk Malang.

Selain sebagai upaya untuk mempertahankan bahasa, pembelajaran bahasa berbasis dialek ini juga akan membentuk identitas lokal sebuah daerah. Selain keluarga merupakan benteng pertahanan terakhir penggunaan bahasa daerah, akan lebih baik jika sekolah juga ikut andil dan menunjang penuh untuk pemertahanan bahasa daerah.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan revitalisasi pembelajaran berbasis dialek melalui materi muatan lokal bahasa Jawa yang sesuai dengan dialek tiap-tiap daerah. Hal tersebut perlu dilakukan agar penggunaan bahasa daerah tidak punah dan pembelajaran bahasa daerah semakin dekat dan diminati siswa.

Berdasarkan uraian singkat di atas, makalah ini difokuskan pada eksistensi dan revitalisasi dialek Jawa Timuran sebagai upaya untuk mempertahankan bahasa daerah. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan eksistensi dan revitalisasi dialek Jawa Timuran sebagai upaya untuk mempertahankan bahasa daerah.

2. Eksistensi Dialek Jawa Timur

Poedjoseodarmo (tanpa tahun) membatasi dialek sebagai varian yang walaupun berbeda masih dapat dipahami oleh penutur dari varian lain. Kridalaksana (1993:42) membatasi dialek sebagai variasi yang berbeda-beda menurut pemakai, apakah di tempat tertentu (dialek regional), oleh golongan tertentu (dialek sosial), ataukah pada waktu tertentu (dialek temporal).

Dari uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dialek merupakan sistem atau variasi bahasa. Variasi tersebut jika digunakan di wilayah geografis tertentu yang berbeda-beda menurut pemakai. Dialek dapat muncul dalam satu tempat tertentu dan digunakan oleh golongan tertentu. Dengan demikian, dialek merupakan variasi bahasa yang digunakan di tempat tertentu oleh golongan tertentu.

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan oleh suku Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam penggunaan bahasa Jawa harus memerhatikan tingkatan lawan bicara. Menurut Sudaryanto (1992:5) dalam tata baku bahasa Jawa tingkat tutur bahasa Jawa ada dua, yaitu tingkat tutur bahasa Jawa Krama dan tingkat tutur bahasa Jawa Ngoko. Setyawan (2011:68) juga mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Jawa terdapat pembagian bahasa Jawa dalam tingkat secara garis besar yaitu Krama; digunakan untuk orang yang dihormati, Madya; untuk yang seangkatan, dan Ngoko yang digunakan untuk orang yang lebih muda.

Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkatan berkomunikasi dalam bahasa Jawa ada tiga yaitu Krama, Madya, dan Ngoko. Ketiga tingkatan ini memiliki tujuan, fungsi, dan gramatikal yang berbeda. Krama digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Madya dan Ngoko digunakan untuk berkomunikasi dengan sebaya atau lebih muda.

Dialek tidak dapat terlepas dari bahasa daerah itu sendiri. Setiap bahasa pasti memiliki dialek yang bervariasi. Seperti bahasa Jawa memiliki berbagai macam dialek. Dialek Solo, Yogya, Banyumas, Surabaya, dan lain sebagainya. Setiap dialek memiliki khas karakter yang berbeda. Setyawan (2011:68) mengungkapkan Dialek Solo meliputi daerah Solo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, dan Boyolali. Dialek Yogya meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Magelang, Temanggung, sedangkan daerah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, termasuk dalam dialek Banyumas. Selanjutnya persebaran dialek Surabaya meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, dan sebagian Mojokerto.

Tanpa disadari saat kita menggunakan bahasa daerah khususnya bahasa Jawa, secara tidak langsung dialek tersebut juga akan terlihat. Akan ada perbedaan ketika berkomunikasi bahasa Jawa dengan orang yang berasal dari Malang dengan orang yang berasal dari Yogya/Solo. Sama-sama menggunakan bahasa Jawa tetapi berbeda pada penggunaan dialektanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda sudah mulai meninggalkan penggunaan bahasa Jawa. Bahkan mungkin mereka mengalami kebingungan dialek apa yang mereka gunakan ketika menggunakan bahasa Jawa. Mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau sesekali menyelipkan bahasa asing agar terdengar lebih gaul. Jika menggunakan bahasa Jawa pun, banyak dari mereka menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa Ngoko yang digunakan cenderung kepada teman sebaya, yang lebih muda, bahkan kepada orang yang lebih tua. Jika dilihat dari parameter umur, penggunaan bahasa Jawa Krama lebih dikuasai atau didominasi oleh penutur tua, sedangkan penutur muda lebih sering atau lebih menguasai bahasa Jawa Ngoko. Hal tersebut bisa dikarenakan bimbingan orang tua dan lingkungan pergaulan. Sehingga istilah orang tua, generasi penutur muda tidak memiliki '*unggah ungguh*' atau bisa disebut sopan santun saat berkomunikasi.

Ada tiga faktor yang melatarbelakangi hal tersebut bisa terjadi. *Pertama*, faktor keluarga modern yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing sebagai bahasa Ibu; *kedua*, faktor lingkungan tempat penutur tinggal. Saat mereka berinteraksi dengan teman sebaya atau yang lebih muda, ada sebagian dari mereka yang menggunakan bahasa Jawa Ngoko sehingga memengaruhi penutur-penutur yang lain. Keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa Jawa, sehingga saat berinteraksi dengan orang yang lebih tua mereka juga menggunakan bahasa Jawa Ngoko; *ketiga*, faktor pembelajaran di sekolah. Faktor ketiga ini untuk penutur sekolah dasar hingga menengah. Bahasa Jawa yang digunakan sehari-hari saja mereka belum memahami betul, kemudian di sekolah mereka mendapat muatan lokal bahasa Jawa dengan dialek Mataraman yang berbeda dengan dialek dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan buku penunjang pembelajaran yang mereka dapatkan, sebagian besar berisi bahasa Jawa dialek Mataraman. Kedua hal yang membuat penutur kebingungan membuat penutur semakin jauh dengan bahasa Jawa yang menggunakan dialek sehari-hari.

Revitalisasi Bahasa Jawa sebagai Upaya Pemertahanan Bahasa Daerah

Revitalisasi penggunaan bahasa Jawa perlu dilakukan agar tidak mengalami kepunahan. Tiga hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bahasa Jawa agar tetap eksis, antara lain: *pertama*, mengampanyekan kepada masyarakat penutur bahwa keluarga menjadi kunci pemertahanan bahasa daerah paling akhir.

Untuk dapat membentuk generasi yang santun, bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa ibu dengan pembiasaan berkomunikasi sehari-hari. “*Unggah-ungguh*” dalam berkomunikasi menjadi capaian bagi generasi penerus, penutur dapat menempatkan penggunaan bahasa Jawa Krama dan Ngoko itu sudah menjadi hal yang patut diacungi jempol, karena secara tidak sadar penutur akan memahami tata krama dalam berkomunikasi dengan lawan bicara; *kedua*, sekolah juga memiliki andil yang besar untuk menjaga eksistensi bahasa daerah.

Pembelajaran bahasa berbasis dialek akan membentuk identitas lokal sebuah daerah. Jika saat ini masih terjadi ketimpangan pembelajaran bahasa daerah di sekolah, maka sebaiknya segera dibenahi dengan mengganti secara bertahap pembelajaran bahasa daerah berbasis dialek.

Ada baiknya penyesuaian daerah dan dialek yang digunakan untuk pembelajaran bahasa daerah. Siswa akan lebih mudah memahami dan lebih mencintai jika bahasa yang diajarkan merupakan bahasa sehari-hari yang tak jauh dari kehidupan mereka. Kemudian penyusunan buku pegangan saat pembelajaran bahasa daerah juga disesuaikan dengan tema sederhana yang tak jauh dari kegiatan mereka sehari-hari. Agar buku pegangan menjadi efektif dan tepat sasaran, buku tersebut dapat disusun dalam musyawarah guru mata pelajaran bahasa daerah dalam satu wilayah tersebut sehingga pembelajaran bahasa daerah berbasis dialek akan mudah dilakukan.

Menjaga eksistensi bahasa daerah tidaklah mudah, revitalisasi akan tercapai jika semua pihak saling mendukung. Dimulai dari pihak keluarga, sekolah, dan pemerintah. Pihak pemerintah dan perguruan tinggi dapat menyusun atau merencanakan pengembangan bahasa daerah yang diberlakukan di masyarakat penutur. Tentunya jika dikemas secara unik akan sangat menarik generasi penutur selanjutnya. Selain itu juga pemberlakuan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa yang diwajibkan untuk semua jenjang sekolah juga menjadi salah satu cara tersendiri untuk mempertahankan eksistensi bahasa Jawa. Jika pada tahun 1990-an muatan lokal bahasa Jawa hanya sampai pada tingkat dasar saja, mulai awal 2000-an pemerintah pusat sudah mewajibkan muatan lokal bahasa Jawa juga masuk pada jenjang menengah. Untuk itu perlu ada pemikiran lebih lanjut jika muatan lokal bahasa daerah juga masuk di pendidikan tinggi. Sehingga eksistensi bahasa Jawa akan terus terjaga dan berkesinambungan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

3. Penutup

Ada dua cara untuk mematikan bahasa, yaitu dengan mengajarkan bahasa lain dan membinasakan bahasa sebelumnya. Eksistensi bahasa Jawa yang kian memudar, sudah sepatutnya untuk dilakukan penghidupan kembali dengan menggandeng semua pihak. Hal yang dapat dilakukan pertama adalah mencintai bahasa itu sendiri. Selanjutnya pihak keluarga menjadi benteng pertahanan bahasa Jawa terakhir. Selain itu dukungan pihak sekolah dan pemerintah juga menjadi satu hal yang harus dilakukan untuk menjaga keeksistensian bahasa Jawa. Dimulai dari keluarga, sekolah, dan dukungan pemerintah.

Keunikan bahasa Jawa yang memiliki tingkatan cara untuk berkomunikasi menjadi ciri khas unik yang dapat terus dilestarikan dan dijaga semua pihak. Bahkan di salah satu bandara internasional di Dubai untuk menyampaikan pengumuman menggunakan bahasa Jawa, hal tersebut seharusnya kita patut bangga. Orang asing saja ingin mempelajari bahasa daerah kita, bagaimana bisa kita melupakannya. Oleh karena itu revitalisasi bahasa Jawa sudah menjadi hal yang sangat penting untuk kita sukseskan bersama.

Daftar Pustaka

- Chaer, Abdul. 2010. *Pengantar Sociolinguistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kridalaksana, Harimurti. 1982. *Introduction to Word Formation and Word Classes*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, dan Charles D. Fennig (eds.). 2015. *Ethnologue: Language of the World, Eighteenth edition*. Dallas, Texas: SIL International. Diakses dari versi daring: <http://www.ethnologue.com> pada 19 Juli 2017.
- Setyawan, Aan. 2011. "Bahasa Daerah dalam Perspektif Kebudayaan dan Sociolinguistik: Peran dan Pengaruhnya dalam Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa." *Prosiding International Seminar Language Maintenance and Shift*. Universitas Diponegoro.

KORPUS BAHASA DAERAH PADA CERITA RAKYAT *DATUK URLIMA*

Nita Handayani Hasan

Kantor Bahasa Maluku

nita.handayani.hasan@kemdikbud.go.id

Abstrak

Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu pembuatan kamus bahasa daerah. Pengumpulan data-data dalam pembuatan kamus bahasa daerah dapat dilakukan menggunakan cara introspeksi dan observasi. Berkat kemajuan teknologi saat ini, teknik observasi saat ini dianggap lebih mudah karena dapat memperoleh berbagai data sebagai bahan pembuatan penyusunan korpus. Masalah penelitian ini *pertama*, bagaimana pengoperasian aplikasi *AntConc* dalam pembuatan korpus bahasa daerah Barakai berdasarkan cerita rakyat Datuk Urlima. *Kedua*, kata-kata apa saja yang dijadikan korpus bahasa daerah Barakai berdasarkan cerita rakyat Datuk Urlima. Penelitian ini menggunakan metode leksikografi untuk memperoleh korpus bahasa daerah Barakai. Peneliti akan menggunakan aplikasi *AntConc* untuk memperoleh korpus bahasa daerah pada cerita rakyat Datuk Urlima. Cerita rakyat Daruk Urlima merupakan cerita rakyat yang berasal dari Desa Longgar, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan aplikasi *AntConc* dianggap mudah digunakan. Cerita rakyat Datuk Urlima memiliki dua ratus dua puluh lima kata yang dapat diusulkan sebagai korpus. Frekuensi kemunculan kata yang tertinggi yaitu sebanyak tiga puluh tiga kali, dan yang paling rendah sebanyak satu kali.

Kata kunci: korpus, bahasa Barakai, *AntConc*

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang diberkahi beragam suku, agama, dan bahasa. Namun, keberagaman tersebut tidak dirawat dengan baik. Banyak agama lokal kini mulai menghilang, sedangkan bahasa daerah sering ditinggalkan oleh penuturnya akibat globalisasi. Bahkan beberapa bahasa daerah telah punah karena tidak pernah dilestarikan.

Penyusunan kamus-kamus bahasa daerah merupakan salah satu solusi menjaga keberadaan bahasa daerah. Inventarisasi kosakata-kosakata daerah sangat dibutuhkan dalam usaha melestarikan budaya bangsa. Kamus-kamus bahasa daerah sebagai hasil kodifikasi kosakata bahasa daerah dapat memberikan informasi bagi penggunanya dalam memaknai makna sebuah kata dalam bahasa daerah. Informasi yang disajikan dalam sebuah kamus dapat diperoleh dari observasi. Informasi melalui observasi yaitu dengan memeriksa contoh-contoh nyata dari bahasa yang digunakan, seperti pada surat kabar, novel, dan cerita rakyat, sehingga dapat diketahui penggunaan kata-kata dalam komunikasi sehari-hari.

Pada zaman dahulu, pencarian informasi melalui teknik observasi merupakan hal yang sulit dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan para pekamus harus membaca ratusan buku dan penggalan contoh yang baik dari kata-kata yang digunakan. Namun pada era teknologi komputer saat ini mempermudah pekamus dalam memperoleh banyak informasi mengenai penggunaan sebuah kata. Teknologi komputer dapat memberi akses dalam pencarian data bahasa sehingga mampu memberikan penjelasan yang benar-benar dapat diandalkan tentang kosakata suatu bahasa (Macmillan Dictionaries, 2017).

Penggunaan korpus dalam mencari informasi kata-kata dalam KBBI merupakan hal yang umum dilaksanakan oleh pekamus. Namun lain halnya dengan kosakata-kosakata bahasa daerah yang mungkin belum terdapat dalam korpus. Salah satu sumber data yang dapat dijadikan korpus dalam pembuatan bahasa daerah yaitu cerita rakyat yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan daerah.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana mengoperasikan aplikasi *AntConc* dalam pembuatan korpus bahasa daerah Barakai berdasarkan cerita rakyat Datuk Urlima? Kedua, apa saja kata-kata yang dijadikan korpus bahasa daerah Barakai berdasarkan cerita rakyat Datuk Urlima? Penelitian ini menggunakan metode leksikografi untuk memperoleh korpus bahasa Daerah Barakai. Peneliti akan menggunakan aplikasi *AntConc* untuk memperoleh korpus bahasa daerah pada cerita rakyat Datuk Urlima. Cerita rakyat Daruk Urlima merupakan cerita rakyat yang berasal dari Desa Longgar, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Aplikasi *AntConc* ialah aplikasi yang dianggap mudah digunakan bagi pemula yang ingin menyusun sebuah korpus.

Tujuan penelitian ini yaitu menunjukkan cara pembuatan korpus bahasa daerah, khususnya bahasa Barakai dengan menggunakan cerita rakyat Datuk Urlima yang telah diterjemahkan dalam bahasa Barakai sebagai sumber datanya. Dengan adanya korpus tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penyusunan kamus bahasa Barakai.

2. Pembahasan

1) Perkembangan Korpus

Pada penyusunan sebuah kamus dibutuhkan berbagai sumber data agar kamus tersusun dengan baik. Kamus sebagai hasil kodifikasi kosakata haruslah mampu menjelaskan arti sebuah kata dan menunjukkan bagaimana kata itu secara tepat dalam kalimat. Sehingga kamus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencerdaskan seorang pengguna kamus atau dalam jangkauan yang lebih luas sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa (Sunaryo, 2001:1).

Informasi yang disajikan dalam kamus dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu introspeksi dan observasi. Introspeksi yaitu melihat ke dalam otak sendiri dan mencoba mengingat semua yang diketahui tentang sebuah kata. Sumber introspeksi melibatkan penutur fasih sebuah bahasa. Penutur fasih pasti memiliki pengetahuan mengenai bahasa yang dikuasainya sehingga mampu mengetahui apa makna kata dan bagaimana kata itu digunakan. Namun dalam sebuah kamus juga harus memberikan informasi mengenai perilaku sebuah kata, sehingga diperlukan sumber observasi. Sumber observasi yaitu memeriksa contoh-contoh nyata penggunaan kata, sehingga dapat diketahui cara menggunakan kata ketika berkomunikasi (Budiwiyanto, 2017).

Pada masa lalu, penggunaan sumber observasi merupakan hal yang melelahkan. Para pekamus harus membaca ratusan buku dan menggali contoh-contoh yang baik secara teliti. Namun, perkembangan teknologi komputer saat ini sangat membantu para pekamus untuk memperoleh data bahasa dengan mudah dan memberikan penjelasan dengan baik mengenai sebuah bahasa.

Penggunaan korpus dalam penyusunan kamus merupakan hal yang baru. Pada pertengahan tahun 80-an komputerisasi data kamus dilakukan oleh Quirk dan Greenbaum. Proyek tersebut dinamai *International Corpus of English* (ICE), dan menghasilkan data korpus sebanyak satu juta kata yang terdiri atas lima ratus ribu kata dari data lisan dan lima ratus ribu data tulis.

Proyek korpus berikutnya dibuat untuk kepentingan penyusunan kamus yang berjudul *Collins Cobuild English Language Dictionary*. Kamus tersebut disusun pada pertengahan tahun 70-an dan kemudian terbit pada tahun 1987 di bawah panduan John Sinclair. Kamus tersebut ialah kamus bahasa umum pertama yang disusun berdasarkan korpus. Korpus yang dijadikan acuan pembuatan kamus tersebut terdiri

atas 18,3 juta kata. Seiring berjalannya waktu, proyek pembuatan korpus terus bermunculan, di antaranya *London-Lund Corpus of Spoken English* berisi lima ratus ribu kata lisan, *British National Corpus* berisi seratus juta kata, *Bank of English* berisi empat ratus lima puluh lima juta kata, *American National Corpus* berisi empat ratus lima puluh juta kata, dan *International Corpus of English* berisi satu juta kata dari setiap variasi regional/nasional.

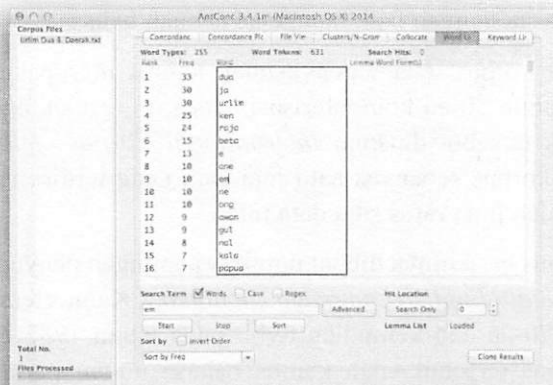
2) Program *AntConc* pada Cerita Rakyat *Datuk Urlima*

Pada penyusunan kamus, korpus sangat membantu dalam mengerjakan mikrostruktur kamus yang meliputi lema/sublema, kelas kata, definisi, dan penulisan contoh pemakaian. Pekamus dapat menggunakan program komputer untuk mengekstrak informasi dari korpus bahasa.

Salah satu program komputer yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan kajian korpus dan menyusun kamus yaitu *AntConc*. Aplikasi *AntConc* dibuat oleh Laurence Anthony yang berasal dari Universitas Waseda, Jepang. Aplikasi *AntConc* akan menunjukkan seberapa sering sebuah kata digunakan dalam suatu teks, kolokasi pada teks, dan daftar perkataan yang digunakan.

Berikut ini disajikan langkah-langkah pembuatan korpus bahasa Barakai menggunakan aplikasi *AntConc*. Penulis akan menggunakan cerita rakyat *Datuk Urlima* sebagai sumber datanya.

Langkah pertama yaitu, membuka aplikasi *AntConc* yang telah terinstal di komputer atau laptop. Sebelum membuka file data pada aplikasi *AntConc*, pastikan bahwa data tersebut telah tersimpan dalam bentuk .txt. Langkah kedua yaitu, masuk pada bagian *file*, kemudian pilih *open file(s)*, pilih *file* yang akan dimasukkan dalam aplikasi, dan *open*. Setelah itu, masuk ke bagian *Word List*, klik *file* yang telah masuk pada bagian *corpus files*, dan klik bagian *start*. Setelah itu akan muncul daftar kata-kata, frekuensi, dan rangking kemunculan kata-kata. Hasil pemilahan kata-kata pada aplikasi *AntConc* dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Hasil Pemilahan Kata pada Aplikasi *AntConc*.

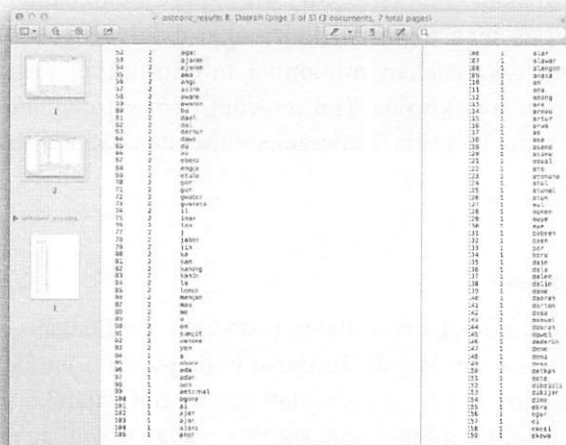
Pada gambar 1 di atas dapat dilihat berbagai macam pilihan menu yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kata bagi kepentingan pembuatan kamus. Salah satunya adalah menu *concordance* yang dapat menunjukkan contoh penggunaan kata pada *corpus file*. Contoh tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kamus. Langkah ketiga yaitu menyimpan hasil yang telah dibuat untuk dijadikan bahan pembuatan kamus. Pilih *save output to text file* pada bagian *file*. Kemudian pilih nama dan tempat penyimpanan *file*. *File* yang disimpan berbentuk *PDF*. Hasil analisis *AntConc* dapat dilihat pada gambar 2, 3, dan 4 berikut ini.



Rank	Count	Word
1	33	dua
2	30	ja
3	25	ken
4	24	raja
5	23	ur
6	22	ur
7	21	ur
8	20	ur
9	19	ur
10	18	ur
11	17	ur
12	16	ur
13	15	ur
14	14	ur
15	13	ur
16	12	ur
17	11	ur
18	10	ur
19	9	ur
20	8	ur
21	7	ur
22	6	ur
23	5	ur
24	4	ur
25	3	ur
26	2	ur
27	1	ur
28	1	ur
29	1	ur
30	1	ur
31	1	ur
32	1	ur
33	1	ur
34	1	ur
35	1	ur
36	1	ur
37	1	ur
38	1	ur
39	1	ur
40	1	ur
41	1	ur
42	1	ur
43	1	ur
44	1	ur
45	1	ur
46	1	ur
47	1	ur
48	1	ur
49	1	ur
50	1	ur

Gambar 2. Hasil Analisis *AntConc*.

Pada gambar 2 diketahui cerita rakyat Datuk Urlima memiliki 225 tipe kata, dan 631 karakter. Kata yang paling banyak muncul ialah kata *dua*. Hal tersebut terlihat pada jumlah frekuensi muncul sebanyak 33 kali. Kata *ja* dan *ur* muncul sebanyak 30 kali, kata *ken* sebanyak 25 kali, kata *raja* sebanyak 24 kali, dan seterusnya hingga urutan ke lima puluh satu. Pada urutan ke lima puluh satu ada kata *ae* yang muncul sebanyak 2 kali.



Rank	Count	Word
51	2	ur
52	2	ur
53	2	ur
54	2	ur
55	2	ur
56	2	ur
57	2	ur
58	2	ur
59	2	ur
60	2	ur
61	2	ur
62	2	ur
63	2	ur
64	2	ur
65	2	ur
66	2	ur
67	2	ur
68	2	ur
69	2	ur
70	2	ur
71	2	ur
72	2	ur
73	2	ur
74	2	ur
75	2	ur
76	2	ur
77	2	ur
78	2	ur
79	2	ur
80	2	ur
81	2	ur
82	2	ur
83	2	ur
84	2	ur
85	2	ur
86	2	ur
87	2	ur
88	2	ur
89	2	ur
90	2	ur
91	2	ur
92	2	ur
93	2	ur
94	2	ur
95	2	ur
96	2	ur
97	2	ur
98	2	ur
99	2	ur
100	2	ur
101	2	ur
102	2	ur
103	2	ur
104	2	ur
105	2	ur
106	2	ur
107	2	ur
108	2	ur
109	2	ur
110	2	ur
111	2	ur
112	2	ur
113	2	ur
114	2	ur
115	2	ur
116	2	ur
117	2	ur
118	2	ur
119	2	ur
120	2	ur
121	2	ur
122	2	ur
123	2	ur
124	2	ur
125	2	ur
126	2	ur
127	2	ur
128	2	ur
129	2	ur
130	2	ur
131	2	ur
132	2	ur
133	2	ur
134	2	ur
135	2	ur
136	2	ur
137	2	ur
138	2	ur
139	2	ur
140	2	ur
141	2	ur
142	2	ur
143	2	ur
144	2	ur
145	2	ur
146	2	ur
147	2	ur
148	2	ur
149	2	ur
150	2	ur
151	2	ur
152	2	ur
153	2	ur
154	2	ur
155	2	ur
156	2	ur
157	2	ur
158	2	ur
159	2	ur
160	2	ur
161	2	ur
162	2	ur
163	2	ur
164	2	ur
165	2	ur
166	2	ur
167	2	ur
168	2	ur
169	2	ur
170	2	ur
171	2	ur
172	2	ur
173	2	ur
174	2	ur
175	2	ur
176	2	ur
177	2	ur
178	2	ur
179	2	ur
180	2	ur
181	2	ur
182	2	ur
183	2	ur
184	2	ur
185	2	ur
186	2	ur
187	2	ur
188	2	ur
189	2	ur
190	2	ur
191	2	ur
192	2	ur
193	2	ur
194	2	ur
195	2	ur
196	2	ur
197	2	ur
198	2	ur
199	2	ur
200	2	ur
201	2	ur
202	2	ur
203	2	ur
204	2	ur
205	2	ur
206	2	ur
207	2	ur
208	2	ur
209	2	ur
210	2	ur
211	2	ur
212	2	ur
213	2	ur
214	2	ur
215	2	ur
216	2	ur
217	2	ur
218	2	ur
219	2	ur
220	2	ur
221	2	ur
222	2	ur
223	2	ur
224	2	ur
225	2	ur

Gambar 3. Hasil Analisis *AntConc*.

Minimnya tulisan-tulisan dalam bahasa daerah merupakan penyebab sulitnya membuat korpus bahasa daerah. Para peneliti sastra dan bahasa daerah hendaknya mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya, bahkan data-data yang berkaitan dengan tulisan-tulisan mengenai bahasa daerah juga sebaiknya dipublikasikan, agar dapat mempermudah pembuatan korpus bahasa daerah.

Daftar Pustaka

- Budiwiyanto, Adi. “Korpus dalam Penyusunan Kamus” dalam <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa>. Diakses 30 Agustus 2017.
- Kwary, Deny A. 2017. *How a New Word Enters a Dictionary* dalam Bengkel Leksikografi 21—25 Agustus 2017. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Sunaryo, Adi. 2001. “Pedoman Penyusunan Kamus Bahasa Daerah”. Jakarta: Pusat Bahasa.
- , Ahmad Patoni, Umi Basiroh. 1990. “Pedoman penyusunan kamus Dwibahasa”. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Redaksi KBBI. 2008. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- <http://www.macmillandictionaries.com/features/from-corpus-to-dictionary>, diakses 31 Agustus 2017.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 5

Hari, tanggal	: Kamis, 7 September 2017
Waktu	: Pukul 16.30—17.30
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	: Wahidah, M.A.
Pemakalah I	: Nadir La Djamudi, M.Pd.
Pemakalah II	: Dr. Asrif, M.Hum.
Pemakalah III	: Prima Zulvarina
Pemakalah IV	: Nita Handayani Hasan, S.S.
Notulis	: Aprilia K. Joris
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra

Makalah I

PENGAJARAN BAHASA BUTON: PELUANG DAN TANTANGAN

Di Pulau Buton bermukim banyak etnis, etnis olio dengan variasi bahasa yang beragam. Pengajaran Mulok di Buton hanya menggunakan salah satu bahasa saja. Tantangan pembelajaran mulok yang ada di pulau Buton. Pengajaran mulok bahasa daerah karena banyak etnis dan disesuaikan per murid. Juga masih perlu ditata secara rapi, serta sumber daya manusia yang harus memadai ternyata belum dapat terwujud serta juga belum masuk kurikulum. Mestinya setiap universitas di daerah menambahkan prodi bahasa daerah untuk menciptakan para pakar bahasa

daerah tersebut. Peluangnya, setiap bahasa daerah mesti mendapat perlindungan dan pelestarian, bahasa daerah merupakan kebanggaan penutur asilnya, dan melalui bahasa daerah, kebudayaan akan disebarluaskan kepada generasi selanjutnya.

Tanggapan:

1. Saran, mereka mengadakan kompetisi untuk anak-anak dan diberikan beasiswa ketika belajar bahasa daerah, ada juga lomba menenun.

Makalah II

BAHASA TANAH DI NEGERI RAJA-RAJA

Bahasa Tanah berkaitan dengan komunikasi sehari-hari dan adat istiadat. Ragam adat tak dipahami masyarakat pada umumnya. Orang menyebut bahasa Daerah dengan nama bahasa Tana. Tanah adalah tempat bertumbuh segala hal yang menghidupi segala makhluk yang ada di lahirkannya.

Salah satu bentuk pelestarian bahasa daerah Hitu telah dilakukan oleh Duta Bahasa 2016. Membangkitkan dan melerestarikan bahasa Haruku yang telah punah ratusan tahun yang lalu juga telah kami lakukan secara bertahap. Dari 5 kecamatan hanya satu daerah yang masih menuturkan bahasa yaitu negeri Laha. Untuk itu perlu adanya pendampingan walaupun aktif dituturkan. Bahasa tidak punah tetapi sudah tak ada lagi penuturnya atau penurunan. Di Pulau Saparua, bahasa Tanah masih dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di negeri Sirisori Islam, Kulur, dan Iha. Kantor Bahasa Maluku tidak dapat berjalan sendiri dalam melestarikan dan membangkitkan bahasa daerah.

Tanggapan:

1. Melakukan pemetaan bahasa dengan membuat tabel dan diskusi kelompok di dalam tiap-tiap suku yang hadir apabila di dalam kongres yang akan datang; mengecek bagaimana perkembangan bahasa tersebut. (Misye, MTB)
2. Banyak orang yang dapat membantu, komunikasi yang perlu kita tingkatkan. Setidaknya dalam kondisi apapun. (Biro Kesra)
3. Kami akan merilis kamus saku, semoga KBM dapat membantu. Kami melakukan beragam aktivitas dalam rangka melestarikan bahasa Daerah di Hulaliu. (Mercy Sahureka, Ketua Pemuda Hulaliu)

Jawaban:

Kongres yang akan datang MTB menjadi tuan rumah. Kantor Bahasa Maluku tentu memerlukan banyak bantuan dari berbagai pihak untuk melestarikan bahasa daerah. Perlu adanya rasa memiliki pada setiap penutur baik itu masyarakat yang masih memiliki bahasa daerahnya ataupun yang sudah tidak memiliki bahasa daerahnya lagi. Apa yang dilakukan oleh pemuda Hulaliu tentu sangat baik, kami akan ke Hulaliu untuk melihat apa yang dapat kami lakukan untuk membantu.

Makalah III

**MENAKAR KEMBALI KEBERADAAN DIALEG JAWA TIMUR
SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN BAHASA DAERAH**

Dialek bahasa Jawa menurut Setiawan ada di Surabaya, Banyumas, Solo, Yogya. Latar belakang makalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bahasa Jawa yang diajarkan banyak berdialek Mataraman dan menjadi masalah ketika diajarkan di daerah Jawa Timur. Sebab remaja Jawa lebih bangga menggunakan bahasa asing. Pengajaran bahasa di sekolah tidak sesuai karena beda dialek. Eksistensi dialek Jatim akan melekat pada pengguna, juga ada perbedaan dialek antara satu dengan yang lainnya, dan generasi muda cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Jawa. Faktor menurunnya eksistensi penggunaan dialek Jatim antara lain, faktor keluarga (anak diajarkan bahasa asing), faktor lingkungan tempat tinggal penutur, dan faktor pembelajaran di sekolah. Revitalisasi dapat dilakukan dengan cara, kampanye kepada keluarga bahwa bahasa daerah adalah benteng terakhir, sekolah menjaga eksistensi bahasa daerah sebagai pemilik andil terbesar, pemerintah dan pihak terkait harus menyusun pengembangan bahasa daerah.

Tanggapan:

1. Bahasa Jawa Timur untuk daerah Jatim, bagaimana pemertahanan bahasanya? Apakah generasi ke-3 dan ke-4 bahasa Jawa-nya masih ada?
2. Bahasa serapan seperti kata *danke*? Bagaimana cara mengembalikan bahasa yang bukan daerah kita yang telah menjadi bahasa turun temurun? (Regina Ursepuny, UKIM)

Jawaban:

Pemertahanan bahasa dapat dilakukan dengan cara memasukan mata pelajaran muatan lokal ke kurikulum sekolah. Dapat juga melalui seni. Jika tidak ada padanan bahasa, dapat menggunakan tetapi jangan meninggalkan bahasa Maluku sendiri.

REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Hurip Danu Ismadi

**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Abstrak

Makalah ini memaparkan (1) regulasi dan kebijakan berkaitan dengan bahasa serta perlindungan bahasa daerah. Sehubungan dengan perlindungan bahasa daerah, makalah ini secara khusus mendeskripsikan (2) konsep, penerapan, dan langkah-langkah strategis pelaksanaan revitalisasi. Tujuan pemaparan makalah ini adalah menjelaskan revitalisasi bahasa-bahasa daerah yang dilakukan oleh Badan Bahasa sebagai upaya perlindungan bahasa, termasuk sastra di dalamnya, dalam rangka memberikan sumbangan signifikan dan mengelola kekayaan batin bangsa yang terkandung dalam bahasa dan sastra daerah. Di akhir pembahasan dikemukakan juga faktor-faktor yang dapat menyebabkan sebuah bahasa atau sastra terancam punah, yakni faktor ekonomi, politik, sikap bahasa masyarakat dan pemangku kepentingannya, dan faktor dukungan lembaga (baik pemerintah maupun swasta). Faktor tersebut tentunya perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang bahasa dan sastra.

Kata kunci: perlindungan, revitalisasi, kepunahan, vitalitas bahasa dan sastra.

1. Pendahuluan

1.1 Regulasi Kebahasaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 32 Ayat 2, mengamanatkan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai klausul bahasa, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2009 (UU No. 24/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP No. 57/2014)—mengatur pengimplementasian pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia.

Teks UUD NRI 1945, UU No. 24/2009, dan PP 57/2014 ini sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Signifikansinya terletak pada isi peraturan perundang-undangan tersebut yang mengukuhkan kedudukan bahasa sebagai simbol dan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi suatu bangsa—sekaligus menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bahasa. Di sisi lain, baik dari segi hierarki maupun politis, UUD NRI 1945 dan UU No. 29/2014 menjadi landasan hukum yang kuat sekaligus strategis untuk pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Dalam perjalanannya sejarahnya, terlihat bahwa klausul tentang kebahasaan dilatarbelakangi oleh (1) amanat rakyat, (2) fakta historis, dan (3) fakta kebahasaan. Amanat rakyat di sini diasumsikan berasal dari pesan masyarakat melalui Kongres Bahasa Indonesia. Sejak Kongres Bahasa Indonesia VIII, para pakar, praktisi, pengajar, mahasiswa, dan pengguna bahasa Indonesia mengamanatkan perlunya pengaturan masalah kebahasaan di Indonesia dalam bentuk UU. Fakta historis yang paling penting adalah ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam UUD 1945, Pasal 36, pada tahun 1945.

Adapun fakta kebahasaan yang melatarbelakangi lahirnya klausul itu adalah kenyataan bahwa bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia, bahasa daerah (646 bahasa), dan bahasa asing. Keaneka-an bahasa itu merupakan cerminan keaneka-an etnis dan budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, dalam masyarakat Indonesia hidup beraneka bahasa dengan beragam dialek. Antar-bahasa atau antar-dialek itu memungkinkan terjadinya persaingan dalam upaya menempati posisi istimewa dalam peran dan fungsi tertentu. Karena masyarakat Indonesia yang secara sosial budaya beraneka ragam itu berada dalam kesatuan politis dan geografis, akan timbul masalah kebahasaan. Bagaimanapun, sumber daya bahasa itu perlu diatur agar dapat dipotensikan secara maksimal dalam pembangunan bangsa. Masalah bahasa ini sudah pasti melibatkan masyarakat tuturnya, termasuk sastra di dalamnya. Ini bukan persoalan kebahasaan dan kesastraan saja, tetapi juga politik.

1.2 Kebijakan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah

Sejak tahun 1992 hingga pertengahan tahun 2017, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memetakan 669 bahasa daerah di seluruh Indonesia. Di antara ratusan bahasa yang terdapat di Indonesia tersebut hanya tiga belas bahasa yang memiliki penutur di atas satu juta, yakni bahasa Jawa, Batak, Bali, Bugis, Madura, Minang, Rejang Lebong, Lampung, Makassar, Banjar, Bima, dan Sasak (BPS, 2010).

Namun, dari tahun ke tahun jumlah bahasa daerah tersebut terus berkurang. Apabila kita melihat peta kebahasaan di Indonesia—berdasarkan pemetaan yang dibuat Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), kita dapat menemukan bahwa bahasa-bahasa yang terancam punah tersebut terbanyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Hal tersebut dikarenakan keberagaman bahasa di Indonesia timur lebih kaya dan memang setiap bahasa itu berbeda-beda. Berbeda dengan di pulau Jawa yang hanya memiliki tiga bahasa terbesar (Jawa, Sunda, dan Madura) dengan beragam dialeknya (Moseley, 2010). Sebagai contoh di Maluku, menurut catatan Kantor Bahasa Provinsi Maluku (2016), empat bahasa di Pulau Buru (bahasa Moksela, Palumata, Kayeli, dan Hukumina) dan satu di Pulau Seram (bahasa Loun) dipastikan punah. Delapan bahasa yang terancam punah ialah bahasa Banggoi, Piru, Hulung, dan Amahai di Pulau Seram; bahasa Serua di Kepulauan Maluku Tenggara; serta bahasa Fogi, Teun, dan Lisela di Pulau Buru. Setiap tahun jumlah tersebut terus bertambah. Hanya tiga belas bahasa yang memiliki penutur di atas satu juta, yakni bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bali, Bugis, Madura, Minang, Rejang Lebong, Lampung, Makassar, Banjar, Bima, dan Sasak. Sementara itu, kurang dari 10% (mungkin hanya 5%) dari bahasa-bahasa di Indonesia telah didokumentasi oleh ahli linguistik.

Upaya pelindungan bahasa, termasuk sastra di dalamnya, memang usaha yang hasilnya tidak “nyata” secara materi-ekonomis, tetapi ini adalah perjuangan untuk memberikan sumbangan signifikan dalam rangka melindungi dan mengelola kekayaan batin bangsa (sesuatu yg menyangkut jiwa [perasaan hati, dsb]; semangat; hakikat). Kepunahan sebuah bahasa bukan sekadar kepunahan kosakata atau tata bahasa, tetapi kehilangan warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Bahkan, Unesco mengingatkan bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah (Moseley, 2010).

Selain masyarakat pemilik bahasa dan sastra itu sendiri, lembaga atau instansi pemerintah yang manakah yang berkewajiban menangani permasalahan dan kebijakan pelindungan kebahasaan ini? Kebijakan penanganan bahasa di daerah, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, sebenarnya telah diatur dalam UU No. 24/2009 dan PP 57/2014. Namun, upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa di daerah yang diatur dalam kedua perundang-undangan itu belum optimal dan

masih ada beberapa kendala, meskipun dalam implementasinya berbagai lembaga pemerintah telah mencoba mengambil kebijakan, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan beberapa provinsi dengan melahirkan peraturan terkait.

Di dalam UU No. 24/2009, Pasal 45, disebutkan bahwa pemerintah yang dimaksud Pasal 41 (2), Pasal 42 (2), dan Pasal 44 (2) adalah lembaga kebahasaan yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada menteri. Pemerintah daerah yang juga disebut sebagai “subjek”—yang mempunyai kewajiban dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah—harus tetap berada di bawah pemerintah melalui koordinasi dengan lembaga kebahasaan. Siapa lembaga yang berwenang dalam kebahasaan itu disebutkan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 24/2010 yang berisi tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I di dalam kementerian negara. Perpres No. 24/2010 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 24/2009 telah menyebutkan di dalam Pasal 452 bahwa lembaga yang melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa).

2. Revitalisasi Bahasa dan Sastra di Daerah

Dalam konteks Indonesia, revitalisasi bahasa dan sastra daerah merupakan bagian dari upaya perlindungan bahasa dan sastra, selain upaya konservasi bahasa dan sastra. Jika konservasi bahasa dan sastra ditekankan pada upaya dokumentasi dan kodifikasi bahasa dan sastra, revitalisasi bahasa diutamakan pada aksi untuk menggiatkan kembali atau bahkan menghidupkan kembali bahasa dan sastra dengan berbagai program atau kegiatan kebahasaan dan kesastraan.

Sehubungan dengan itu pula, revitalisasi lebih ditekankan pada proses pemertahanan dan perluasan penggunaan bahasa dan sastra daerah yang hampir atau terancam punah. Hal ini tentunya senada dengan pengertian revitalisasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2011:1172) yang dimaknai sebagai ‘proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali’ suatu hal yang sebelumnya kurang berdaya. Dalam pengertian secara operasional, revitalisasi bahasa dan sastra adalah membangkitkan kembali vitalitas bahasa dan sastra melalui usaha-usaha untuk menjadikan bahasa dan sastra itu menjadi penting dan menciptakan bentuk dan fungsi baru tertentu terhadap bahasa atau karya sastra (yang terancam punah) tersebut. Atau meminjam istilah Tasaku Tsunoda (2005:169) mengenai revitalisasi bahasa, revitalisasi bahasa (termasuk sastra di dalamnya) adalah upaya untuk menghentikan atau membalikkan penurunan bahasa atau untuk menghidupkan kembali salah satu bahasa (atau sastra) yang punah. Mereka yang terlibat dapat mencakup pihak seperti ahli bahasa, budaya atau kelompok masyarakat, atau pemerintah.

Revitalisasi bahasa dan sastra memang sering dikaitkan dengan penurunan jumlah penutur bahasa dan ancaman hilangnya bahasa di tengah keberagaman bahasa dan sastra sebagai warisan kekayaan dunia. Oleh karena itu pula, selain karena keinginan menjaga keanekaragaman bahasa dan sastra, masalah budaya dan identitas menjadi alasan menonjol mengapa berbagai pihak berkepentingan mendorong revitalisasi bahasa dan sastra di berbagai belahan dunia—tidak hanya di Indonesia. Banyak orang berpandangan bahwa bahasa yang unik merupakan “kekayaan budaya” suatu bangsa (Grenoble dan Whaley, 2006:20). Bahasa dan sastra milik suatu masyarakat adalah bagian yang unik dari budaya mereka, sering menghubungkan mereka dengan leluhur mereka atau dengan tanah, membuat sebuah bagian penting dari sejarah mereka dan bagaimana mereka melihat diri mereka (Tasaku, 2005).

Badan Bahasa—sebagai representasi pemerintah dalam perlindungan bahasa-bahasa daerah di Indonesia—telah melakukan berbagai revitalisasi bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Untuk merangsang pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk bersama melakukan perlindungan ini, setiap tahun Badan Bahasa mendorong, memberikan contoh, dan memotivasi untuk melakukan revitalisasi terhadap bahasa dan sastra yang hampir atau terancam punah. Misalnya, pada tahun 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa Kemdikbud) melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah terancam punah di wilayah Maluku. Kantor Bahasa Maluku sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Bahasa mengusulkan bahasa Hitu sebagai fokus pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah itu—tahun sebelumnya melakukan revitalisasi bahasa Haruku. Penetapan bahasa daerah Hitu sebagai fokus program revitalisasi didasari pertimbangan yakni semakin melemahnya eksistensi bahasa daerah Hitu di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Kondisi tersebut menjadi suatu paradoks mengingat Negeri Hitu Lama pernah menjadi pusat Kerajaan Tanah Hitu yang menjadikannya sebagai salah satu pusat peradaban Maluku yang berafiliasi dengan beberapa kerajaan Islam di Maluku, Jawa, Malaka, Sulawesi, bahkan dunia (Asrif, 2017).

Sebagai kasus bahasa Hitu ini, program revitalisasi bahasa daerah ini menggunakan pendekatan komunitas atau berbasis komunitas, yakni komunitas masyarakat Negeri Hitu Lama. Badan Bahasa yang bekerja sama dengan Kantor Bahasa Maluku dan Pemerintah Negeri Hitu Lama menetapkan langkah-langkah strategis pelaksanaan revitalisasi seperti berikut ini.

- 1) Dua puluh rumah tangga dijadikan sebagai model percontohan (*pilot project*) pelaksanaan revitalisasi. Syarat penetapan 20 rumah tangga itu yakni kedua orang tua masih mampu menggunakan bahasa daerah Hitu, dan sebaliknya anak-anak mereka menjadi penutur pasif atau bahkan tidak mampu lagi menggunakan bahasa daerah Hitu. Selama pelaksanaan revitalisasi, kedua puluh rumah tangga menjadi pusat pengajaran bahasa daerah.

- 2) Pada setiap hari Sabtu saat pelaksanaan program revitalisasi, Duta Bahasa Maluku bersama staf Kantor Bahasa Maluku melakukan evaluasi program. Halaman rumah Raja Hitu Lama menjadi pusat berkumpulnya anak-anak Negeri Hitu Lama untuk memperlihatkan kemampuannya menggunakan bahasa daerah Hitu. Bahan ajar bahasa daerah Hitu disusun oleh Duta Bahasa Maluku sebagai panduan pelaksanaan pengajaran bahasa daerah Hitu.
- 3) Pemerintah Negeri Hitu Lama menetapkan hari Minggu sebagai hari wajib berbahasa daerah. Penetapan hari Minggu didasari pertimbangan bahwa hari Minggu merupakan hari istirahat ketika semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Pada situasi seperti itu, masyarakat Negeri Hitu diharapkan berbahasa Hitu agar anggota keluarga menjadi terbiasa dan melatih kemampuan menggunakan bahasa daerah Hitu. Sejumlah sanksi ringan ditetapkan bagi pelanggar, misalnya dengan memberikan hukuman membersihkan halaman rumah dan kegiatan-kegiatan lain yang telah menjadi aktivitas keseharian.
- 4) Pemerintah Negeri Hitu Lama memasang spanduk-spanduk di beberapa kawasan sebagai seruan kepada masyarakat Negeri Hitu Lama melestarikan bahasa daerah.
- 5) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah Hitu, Pemerintah Negeri Hitu Lama dan Kantor Bahasa Maluku membangun komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kecamatan Leihitu untuk menetapkan hari Sabtu sebagai hari berbahasa daerah di lingkungan sekolah, bukan pada saat berlangsung jam pelajaran. Kehendak itu dalam rangka kembali meningkatkan prestise bahasa daerah sekaligus menghapus pandangan yang menempatkan penutur bahasa daerah sebagai masyarakat tidak terpelajar.

3. Revitalisasi Bahasa dan Sastra Bukan Upaya Utopis

Secara umum, revitalisasi bahasa dan sastra, baik yang berbasis komunitas maupun klasikal (secara bersama-sama belajar di dalam kelas atau kelompok), bertujuan agar eksistensi bahasa dan sastra di dalam suatu masyarakat bertahan dan pendukungnya bertambah. Dalam tujuan ini, revitalisasi sastra tidak hanya sekadar upaya memperluas sistem kesastraan dari suatu masyarakat penutur bahasa atau penutur/pendukung sastra, tetapi juga menciptakan ranah baru dalam penggunaannya oleh tipe pendukung yang baru pula.

Secara khusus, tujuan diadakannya revitalisasi bahasa dan sastra berbasis komunitas adalah sebagai berikut.

1. Mendayahidupkan kembali bahasa dan sastra, khususnya yang hampir atau terancam punah.
2. Memberi fungsi dan kreasi baru pada bahasa dan sastra (khususnya sastra lisan).

3. Meningkatkan peran masyarakat, terutama generasi muda, pemilik bahasa dan sastra untuk bersama-sama melindungi bahasa dan sastra.
4. Meningkatkan peran pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian dan kontribusi dalam melindungi bahasa dan sastra.

Khusus untuk revitalisasi sastra, objek atau sasaran revitalisasi sastra ditujukan pada sastra lisan. Sastra lisan yang dimaksud di sini adalah karya sastra yang disampaikan dan/atau disebarkan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Beberapa ciri sastra lisan yang dimaksud di sini, antara lain, yakni 1) penyebarannya secara lisan, 2) lahir dari masyarakat yang masih bercorak tradisional, 3) menggambarkan ciri-ciri budaya satu masyarakat, 4) mempunyai fungsi di masyarakat, dan 5) menggunakan bahasa daerah. Berdasarkan bentuknya, sastra lisan tersebut dapat berbentuk prosa, seperti dongeng-dongeng atau dapat juga yang berbentuk prosa liris, seperti sastra *kaba* (Minangkabau), sastra pantun (Sunda), atau sastra kentrung dan jemblung (Jawa [timur]). Sastra lisan dalam konteks ini sering pula disebut juga sastra rakyat, yakni sastra yang hanya bertumpu pada pertuturan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Sastra lisan ini dapat disampaikan dalam bentuk puisi, seperti jampi, mantera, pantun, peribahasa, bahasa berirama, dan teka-teki. Atau dalam bentuk-bentuk drama atau teater rakyat, seperti kethoprak, wayang orang, ludruk, makyong, atau randai.

Perlu digarisbawahi bahwa revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu bahasa dan sastra suatu kawasan atau bagian komunitas yang dulunya bahasa dan sastra karya itu pernah hidup, tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Sehubungan dengan itu, di samping upaya kebahasaan dan kesastraannya, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (*economic revitalization*) yang merujuk kepada aspek sosial-budaya serta aspek lingkungan (*environmental objectives*) di tempat bahasa dan sastra itu hidup. Hal ini mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif diharapkan akan terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan bahasa dan sastra tersebut.

Hal yang terpenting dalam revitalisasi ini adalah keterlibatan masyarakat sebagai pemilik bahasa dan sastra. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat yang terlibat di lingkungan tersebut saja, tetapi juga masyarakat luas, khususnya yang ada di sekeliling masyarakat tersebut. Selain itu, revitalisasi juga dapat ditinjau dari aspek keunikan lokasi dan tempat bersejarah atau revitalisasi dalam rangka untuk mengubah citra suatu kawasan. Dalam hal ini, masyarakat itu sendiri sebagai faktor intern pemberdayaan. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas lainnya mengarah pada kekuatan dasar masyarakat yang mandiri dan kreatif.

Menghidupkan kembali semangat kolektif masyarakat pemilik bahasa dan sastra (Badan Bahasa menyebutnya sebagai “revitalisasi berbasis komunitas”) dalam

revitalisasi merupakan salah satu metode pendekatan. Pendekatan lain yang perlu diperhatikan adalah pendekatan budaya, yakni melalui dialog budaya dalam usaha mengembalikan suku, etnik, dan masyarakat tersebut kembali menjadi komunitas-komunitas lokal yang lebih mengacu pada konsep kehidupan bersama, tenggang rasa, dan gotong royong dalam upaya melindungi bahasa dan sastranya sendiri.

Untuk kasus revitalisasi sastra, ada pendekatan lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan revitalisasi agar sastra lisan yang berbasis seni tradisi itu dapat menarik selera pasar, yakni pendekatan kreatif dan inovatif, mulai dari kreasi terhadap unsur cerita (literernya) dan penggarapan kreasinya. Misalnya, jika sastra lisan itu berbentuk seni pertunjukan, perlu ada upaya peningkatan kualitas para pemain, penata musik, penata tari, dan teknologi pementasannya, seperti tata panggung, tata cahaya, tata suara, hingga manajemen pementasannya. Upaya ini pernah dilakukan Badan Bahasa ketika melakukan revitalisasi wayang cecak yang ada di Kepulauan Riau pada tahun 2017. Salah satu contoh untuk menarik minat generasi muda dan membuka kembali “pasar” wayang cecak ini, pertunjukannya diunjukkan pada acara Festival Pulau Penyengat Syawal Serantau 2017 (25 Juli 2017). Wayang Cecak adalah salah satu jenis kesenian asli Pulau Penyengat menjadi media lisan melalui media wayang. Wayang ini dalam bentuk boneka boneka dengan beberapa dalang. Kostum boneka dibuat untuk menyesuaikan dengan cerita yang akan dibawakan. Wayang ini baru dalam sebuah panggung kecil kira kira kira 1,5 x 1,5 meter.

4. Penutup

Indonesia adalah “reservoir” keberagaman bahasa. Khazanah bahasa dan sastranya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman bahasa dan sastra itu merupakan salah satu harta terbesar umat manusia—tidak hanya warga negara Indonesia. Hilangnya ratusan bahasa dan sastra adalah bencana intelektual pada berbagai tingkatan. Misalnya, bahasa sebagai alat mengodekan pengetahuan tentang dunia alam dan budaya sekitarnya (pengetahuan yang sering tidak dikenal atau tidak ada di daerah lain), ketika bahasa atau sastra itu punah tanpa dokumentasi yang memadai, pengetahuan yang ada dalam bahasa dan sastra itu tidak bisa tergantikan. Hilangnya pengetahuan seperti itu bisa memiliki konsekuensi yang menghancurkan karena berhubungan dengan kelangsungan hidup umat manusia, yakni pengurangan keanekaragaman bahasa berarti mengurangi kekuatan adaptational dari masyarakat itu sendiri (Nettle dan Romaine, 2000).

Di luar lingkup pembahasan umum revitalisasi, sebagai penutup pembicaraan perlindungan bahasa dan sastra melalui revitalisasi, perlu kiranya dikemukakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terancamnya sebuah bahasa atau sastra. Faktor-faktor tersebut tentunya perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang bahasa dan sastra. Beberapa faktor tersebut antara lain.

1. Faktor ekonomi, faktor ini perlu mendapat perhatian serius. Bahasa yang dimiliki suatu masyarakat dianggap tidak penting karena tidak bernilai ekonomis dan masyarakatnya sendiri tidak “kuat” ekonominya, termasuk kurangnya peluang ekonomi, berlangsung industrialisasi, transformasi ekonomi yang pesat, pergeseran pola kerja, tenaga kerja migran, penipisan sumber daya, perusakan habitat, globalisasi, dan sebagainya.
2. Faktor politik, faktor ini mempengaruhi vitalitas bahasa di seluruh dunia, termasuk masalah diskriminasi, penindasan (seperti dalam kasus bahasa Indian di Amerika Utara dan bahasa Aborigin di Australia, penggunaan bahasa pribumi tersebut dilarang), kebijakan bahasa resmi, dan sebagainya.
3. Faktor sikap subyektif, yakni sikap bahasa dari penutur bahasa dan sastra terhadap bahasa dan sastra milik mereka sendiri. Misalnya, di tengah keberadaan bahasa nasional yang mengelilingi mereka ada semacam anggapan bahwa bahasa Indonesia lebih prestisius dibandingkan dengan bahasa daerah—menstigmakan bahasa lokal tersebut sebagai bahasa yang kurang berprestise.
4. Dukungan kelembagaan dianggap penting untuk menjamin vitalitas bahasa. Ketiadaan dukungan dapat memengaruhi penutur untuk beralih dari bahasa daerahnya. Dukungan kelembagaan mencakup keterwakilan di sekolah-sekolah (adanya kurikulum, bahan ajar, dan sebagainya), lembaga keagamaan (masjid, gereja, dan lain-lain), media massa di daerah, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Asrif. 2017. “Revitalisasi Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia: Studi Kasus di Negeri Hitu Lama, Maluku”. Makalah dalam Seminar Bahasa Ibu 2017 pada tanggal 27 Februari 2017 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud.
- Grenoble, Lenore A., and Lindsay J. Whaley. *Saving Languages: An Introduction to Language Revitalization*. Cambridge, UK: Cambridge UP, 2006. p. 20. Print.
- Moseley, Christopher (ed.). 2010. *Atlas of the World's Languages in Danger* (Edisi III). Paris: UNESCO Publishing. Versi daring: <http://www.unesco.org/languages-atlas/>.

- Nettle, Daniel dan Suzanne Romaine. 2000. *Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages*. New York: Oxford University Press
- Simons, Gary F. dan Charles D. Fennig (editor). 2017. *Ethnologue: Languages of the World, Edisi Ke-20*. Dallas, Texas: SIL Internasional. Versi daring: <http://www.ethnologue.com> .
- Summer Institute of Linguistics. 2006. *Bahasa-Bahasa di Indonesia (Languages of Indonesia)*. Jakarta: Summer Institute of Linguistics (SIL) Cabang Indonesia.
- Tsunoda, Tasaku. 2005. *Language Endangerment and Language Revitalization*. Berlin: Mouton De Gruyter.

PENGAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH: PELUANG DAN TANTANGAN

Thomas Frans
Universitas Pattimura

1. Pendahuluan

Landasan penyusunan kurikulum muatan lokal yaitu (1) UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (2) UU Nomor 20 tahun 2005 tentang Standar Sistem Pendidikan Nasional, (3) PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (4) Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, (5) Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, (6) Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, (7) Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, (8) Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, (9) Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Pendidikan Pengembangan Bahasa Daerah dalam dunia pendidikan, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan bukan hanya pemerintah daerah. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1954 pasal 32 ayat 2: negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Maluku atau sering dijuluki daerah seribu pulau ini terdiri atas gugusan pulau kecil dan besar, kaya dengan aneka ragam adat istiadat, kesenian, bahasa, sumber daya alam serta berbagai jenis keterampilan tradisional yang diwariskan turun temurun. Keanekaragaman budaya, kehidupan sosial dan sumber daya alam tersebut merupakan ciri khas daerah kita turut memperkaya nilai-nilai budaya dan kehidupan bangsa yang harus dilestarikan. Nilai-nilai budaya lokal yang merupakan ciri khas budaya bangsa perlu diaktualisasikan dan dibina secara terus-menerus demi kepentingan manusia Indonesia yang maju tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang merupakan karakteristik bangsa. Salah satu upaya pelestarian nilai-nilai budaya bangsa adalah melalui jalur pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai budaya daerah (lokal), mata pelajaran muatan lokal dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai yang tersirat dalam pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pendidikan nasional, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan satuan pendidikan didasarkan pada kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional, satuan pendidikan dasar dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pemberlakuan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan di tingkat dasar beberapa saat yang lalu sempat menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak di beberapa daerah. Hal tersebut berkaitan dengan rencana “perampingan” mata pelajaran sehingga secara kuantitatif, pelajaran-pelajaran tertentu akan hilang dan digabungkan dengan pelajaran lain menjadi satu mata pelajaran tertentu. Salah satu kekhawatiran yang terjadi yaitu berkaitan dengan persoalan pelajaran bahasa daerah. Seperti kita ketahui bahwa bahasa daerah di sekolah dasar selama ini diajarkan sebagai salah satu muatan lokal. Muatan lokal di setiap daerah hampir dapat dipastikan mengangkat bahasa daerah sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah walaupun sebenarnya muatan lokal boleh materi di luar bahasa daerah, misalnya budaya atau olah raga/seni.

Kekhawatiran beberapa pihak akan hal tersebut cukup beralasan. Secara umum, kondisi atau kehidupan bahasa daerah di Indonesia dapat dikatakan dalam

keadaan yang cukup memprihatinkan. Salah satu strategi revitalisasi bahasa daerah yaitu melalui jalur pendidikan, terutama pendidikan tingkat dasar. Anggapan inilah yang selanjutnya secara beramai-ramai hampir di setiap pemerintah daerah memasukkan bahasa daerah yang ada di dalam wilayahnya sebagai mata pelajaran muatan lokal. Jalur pendidikan dasar diharapkan dapat menjadi sarana untuk transfer ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat lokal yang terkandung melalui bahasa daerahnya.

Di satu sisi pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah memiliki beberapa kendala, seperti masalah sumber daya manusia guru. Sangat sedikit perguruan tinggi yang memiliki jurusan bahasa daerah. Bahkan, perguruan tinggi (negeri) pun yang notabene memiliki jurusan bahasa daerah setiap tahunnya mengalami penurunan mahasiswa, karena bahasa daerah kurang diminati oleh para lulusan SLTA. Antara *output* dan kebutuhan guru bahasa daerah yang pendidikannya bukan lulusan dari jurusan bahasa daerah yang diajarkan.

Pengembangan muatan lokal bahasa daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan seperti (1) pemerintah daerah mengidentifikasi jenis bahasa lokal/daerah yang akan dijadikan materi muatan lokal, (2) pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan dan pengadaan perangkat pembelajaran yang menyangkut pengembangan kurikulum, materi pembelajaran, pedoman pembelajaran, pengembangan alat evaluasi, pengembangan media pembelajaran, sampai dengan pelatihan guru serta implementasi, (3) pemerintah pusat menyiapkan rambu-rambu pengembangan kurikulum.

2. Upaya Pembinaan

Pembinaan dapat dilakukan melalui pemantapan kembali peran penggunaan bahasa daerah dalam berbagai bidang kehidupan, seperti di lingkungan keluarga, seni pertunjukan, sastra, upacara-upacara keagamaan dan adat. Pembinaan untuk generasi penerus dilakukan melalui jalur pendidikan. Siswa sebagai generasi penerus wajib mempelajari bahasa daerah sebagai bahasa ibu tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Penguasaan terhadap bahasa ibu menjadi penting karena bahasa ibu memiliki peran penting sebagai sarana pembentukan kepribadian anak-anak bangsa. Sementara itu, apresiasi sastra ditingkatkan melalui jalur persekolahan. Penguasaan bahasa dan sastra generasi penerus itu dilakukan melalui pengajaran bahasa dan sastra di sekolah. Pengajaran bahasa dan sastra daerah yang komprehensif dilakukan melalui pendidikan yang berkelanjutan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

2.1 Pembinaan Melalui Jalur Sekolah

Pembinaan melalui jalur sekolah dapat dilakukan apabila unsur bahasa sudah terkodifikasi. Untuk dapat melaksanakan pembinaan bahasa daerah di sekolah perlu kebijakan resmi dari pemerintah daerah memasukkan mata pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum

Bagi daerah yang bahasanya tidak beragam kebijakan ini dapat dilakukan dengan mudah. Di daerah yang bahasanya beragam seperti di Maluku pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian karena pemilihan salah satu bahasa akan meminggirkan bahasa yang lain. Pembinaan bahasa daerah melalui jalur pendidikan formal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan hidup bahasa daerah itu. Namun hal itu memerlukan biaya yang cukup besar, karena harus tersedia tenaga pengajar dan kurikulum yang ditunjang buku ajar yang memadai, ketersediaan tenaga pengajar menjadi kendala pelaksanaan pembinaan melalui jalur sekolah.

Pembinaan di sekolah penting untuk penguasaan bahasa dan apresiasi sastra daerah bagi generasi penerus. Pemelajaran bahasa dan apresiasi sastra itu memprasyaratkan penguasaan bahasa daerah secara baik dan benar oleh para pelaku dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta penyediaan sarana belajar. Para pelaku itu adalah guru dan siswa. Oleh karena itu, pendidikan bahasa dan apresiasi sastra di sekolah mencakup pengelolaan proses belajar mengajar dan lingkungan sekolah. Pendidikan bahasa dan apresiasi sastra di sekolah itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah, bukan semata-mata tanggung jawab guru yang mengajar bahasa daerah saja.

Sekolah menjadi pusat belajar bagi siswa maka sekolah hendaknya menyediakan fasilitas belajar yang memadai, baik tempat belajar, ruang perpustakaan maupun koleksi bukunya sebagai sarana belajar. Penguasaan bahasa daerah sebagai sarana berpikir akan menuntun siswa di sekolah bertindak tertib dan santun karena bahasa menuntun pemakainya ke arah itu. Penguasaan bahasa daerah sebagai sarana berekspresi akan membawa para siswa kepada suasana kreatif karena bahasa mengungkapkan pemikiran tentang ilmu, teknologi dan seni serta membentuk kecerdasan anak-anak.

2.2 Pembinaan Melalui Jalur Keluarga dan Masyarakat

Tingginya pergerakan masyarakat memungkinkan mereka kawin campur antara dua etnis yang berlainan latar belakang budayanya. Penggunaan bahasa dalam keluarga kawin campur membuktikan bahwa generasi muda dalam keluarga itu meninggalkan bahasa daerah kedua orang tua mereka (Lumintintang, 1990:362).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelestarian bahasa daerah itu sangat ditentukan oleh keluarga. Selama masih ada keluarga yang masih menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi bahasa itu akan terus hidup.

Keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan belajar yang paling efektif karena di dalam keluarga dan masyarakat mereka dapat mempraktikkan secara langsung apa yang mereka pelajari. Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat anak sangat sedikit belajar teori tetapi banyak sekali belajar praktik berbahasa, karena berbahasa adalah keterampilan, hanya dengan praktik yang banyak anak akan meningkatkan keterampilan berbahasanya.

Lingkungan masyarakat sebagai tempat anak mengenal lingkungan yang lebih luas juga merupakan tempat pembinaan bahasa daerah yang efektif. Dalam masyarakat anak dapat mengikuti kegiatan adat yang menggunakan bahasa daerah sebagaibahasa pengantarnya. Oleh karena itu, banyaknya kegiatan yang merefleksikan bahasa daerah memungkinkan anak akrab dengan bahasa daerahnya.

Pembinaan bahasa daerah di luar kelas memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Peran bahasa daerah sebagai “bahasa seni” yang terkait erat dengan kehidupan budaya masyarakat penuturnya. Pelestarian peran tersebut perlu diteruskan kepada generasi penerus, khususnya para remaja yang tidak terjangkau selolah. Pelestarian bahasa daerah pada generasi penerus di luar sekolah dilakukan melalui institusi atau pranata yang ada di masyarakat penutur bahasa daerah yang bersangkutan. Lembaga-lembaga adat perlu dimanfaatkan dalam upaya pembinaan bahasa daerah pada generasi penerus demi pelestarian bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat modern.

3. Peluang dan Tantangan

Pemerintah memberikan peluang kepada bahasa daerah untuk bertahan sebagai bahasa pertama dan bahasa pergaulan antarsuku. Dalam Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 1 dikatakan “Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 42, ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Politik Bahasa Nasional bahwa dalam kedudukannya sebagai (1) bahasa

daerah sendiri sebagai lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah; serta fungsinya sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah, (3) alat pengembang serta pendukung budaya daerah

Rekomendasi UNESCO tahun 1999 tentang pemeliharaan bahasa-bahasa ibu di dunia, mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai bahasa Ibu. Menyadari betul betapa pentingnya bahasa ibu bagi kehidupan umat manusia, maka pada tanggal 21 Februari 1999 dicanangkan Hari Bahasa Ibu Sedunia guna memajukan keanekaragaman budaya dan bahasa dunia.

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 33 ayat (2) bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Dalam penjelasan ayat tersebut pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam rangka penyediaan Sarana untuk Penanganan Bahasa Daerah di Maluku, diharapkan dapat disusul dengan regulasi-regulasi baru berupa perda yang dapat dijadikan dasar untuk pembinaan bahasa daerah, sekaligus sebagai upaya mencegah kepunahan bahasa daerah di Maluku yang tergolong kritis

Sehubungan dengan daya hidup bahasa secara lintas generasi, dengan mengambil analogi spesies biologi, Kraus (1992) misalnya mengategorikan daya hidup bahasa menjadi tiga. Pertama, *moribund*, yaitu bahasa yang tidak lagi dipelajari oleh anak-anak sebagai bahasa ibu. Kedua, *endangered*, yaitu bahasa yang meskipun sekarang masih dipelajari atau diperoleh oleh anak-anak, tetapi sudah tidak digunakan pada abad yang akan datang. Ketiga, *safe*, yaitu bahasa yang secara resmi didukung oleh pemerintah dan memiliki penutur yang sangat banyak.

Dalam hubungan ini tantangan yang dihadapi oleh bahasa-bahasa daerah di Maluku sudah tidak diperoleh dan dipelajari oleh anak-anak dan usia dewasa dalam kelompok bahasa masing-masing sebagaimana disyaratkan oleh Grims (2000:8). Artinya bahasa-bahasa daerah di Maluku mulai terdesak pertumbuhannya

Menurut Stewart (dalam Fishman, ed. 1968:536) daya hidup suatu bahasa adalah *use of the linguistic system by an un isolated community of native speakers*. Kalau suatu bahasa secara terus menerus mengalami pengurangan jumlah penutur sehingga pada akhirnya kehilangan atau kehabisan jumlah penutur aslinya sama sekali, bahasa itu sudah jelas bernasib punah. Dalam kaitan ini, Grimes (2000)

mengemukakan enam gejala yang menandai kepunahan bahasa pada masa depan, yaitu (1) penurunan secara drastis jumlah penutur aktif, (2) semakin berkurangnya ranah penggunaan bahasa, (3) pengabaian atau pengenyahan bahasa ibu oleh penutur usia muda, (4) usaha merawat identitas etnik tanpa menggunakan bahasa ibu, (5) penutur generasi terakhir sudah tidak cakap lagi menggunakan bahasa ibu, artinya tersisa penguasaan pasif (*understanding without speaking*), dan (6) contoh-contoh mengenai semakin punahnya dialek-dialek satu bahasa, keterancaman bahasa kreol dan bahasa sandi.

Summer Institute of Linguistic (SIL) (2008) menyebutkan paling kurang ada dua belas faktor yang berhubungan dengan kepunahan bahasa, yaitu (1) kecilnya jumlah penutur, (2) usia penutur, (3) digunakan atau tidak digunakannya bahasa ibu oleh anak-anak, (4) penggunaan bahasa lain secara regular dalam latar budaya yg beragam, (5) perasaan identitas etnik dan sikap terhadap bahasanya secara umum, (6) urbanisasi kaum muda, (7) kebijakan pemerintah, (8) penggunaan bahasa dalam pendidikan, (9) intrusi dan eksploitasi ekonomi, (10) keberaksaraan, (11) kebersastraan, dan (12) kedinamisan para penutur membaca dan menulis sastra.

Apabila keduabelas faktor yang menjadi variabel kepunahan bahasa sebagaimana dinyatakan oleh SIL di atas dikenakan kepada bahasa-bahasa daerah di Maluku, maka hampir semuanya relevan dengan keterancaman bahasa-bahasa daerah tersebut. Apabila dibuat persentasi akan terlihat adanya pengurangan jumlah penutur. Yang masih setia berbahasa daerah hanya terbatas pada usia lanjut, generasi muda dan anak-anak cenderung beralih ke penggunaan bahasa Indonesia dialek Ambon, bahasa Indonesia dan bahasa asing yang berstatus internasional.

Hal ini bermula sejak penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dalam kehidupan keluarga. Dalam kaitan ini bahasa Indonesia dalam politik bahasa nasional dengan sengaja dikondisikan sebagai bahasa yang berprestise, bahasa yang digunakan sebagai aspek kebudayaan yang tinggi, sehingga orang terdorong untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara ini warga masyarakat mengidentifikasikan ketinggian derajat sosial mereka melalui penggunaan simbol-simbol atau bahasa prestise tersebut. Akibatnya, masyarakat bersikap positif terhadap bahasa Indonesia sehingga pada gilirannya mereka bersikap pesimis dan negatif terhadap bahasa daerah. Lambat laun bahasa daerah tidak diperlukan lagi sebagai lambang identitas budaya dan daerah atau etnik.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa sikap negatif yang dilekatkan kepada bahasa daerah sehingga bahasa daerah terpendang tidak bermartabat. Hal ini perlu diungkapkan agar dapat diusahakan untuk mengubah sikap ini menjadi positif. Pertama, bahasa daerah dianggap kuno dan menjadi bagian dari masa lampau.

Kedua, bahasa daerah merupakan bahasa orang yang tidak berdaya, miskin dan tidak berpendidikan. Ketiga, bahasa daerah tidak berguna di luar wilayahnya. Keempat, bahasa daerah menghalangi kemajuan. Kelima, bahasa daerah tidak pernah bersentuhan dengan teknologi.

Bahasa daerah dianggap kuno karena tidak pernah dihubungkan dengan teknologi yang bersifat modern. Jarang gedung-gedung dan fasilitas-fasilitas modern diberi nama dengan ungkapan-ungkapan bahasa daerah, sehingga masyarakat akan dengan sendirinya akan mengidentifikasikan bahasa daerah itu dengan nilai-nilai kemodernan. Misalnya pernah gedung-gedung kampus Universitas Pattimura diberi nama *hotumese* yang menjadi semboyan Universitas Pattimura menjadi nilai historis. Apabila ungkapan bahasa daerah digunakan dengan sendirinya prestise bahasa daerah terangkat. Ini hanya salah satu contoh kecil yang dapat menjadi pemicu untuk membina dan mempertahankan bahasa daerah.

Kesan bahwa bahasa daerah tidak berguna di luar wilayahnya perlu dihilangkan segera dengan usaha usaha meyakinkan bahwa bahasa itu bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan juga identitas diri dan sangat diperlukan dalam pergaulan nasional maupun global. Begitu pula, kesan bahasa daerah menghalangi kemajuan dapat dihilangkan dengan menyosialisasikan bahwa orang-orang yang maju yang ada sekarang adalah orang-orang yang mempunyai karakter budaya dan sosial. Sebaliknya, orang-orang yang kehilangan identitas karakter akan terombang-ambing dan tercerabut menghadapi tatanan nilai globalisasi.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah? Dengan adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan juga adanya otonomi bahasa daerah, tetapi tampaknya hal ini masih merupakan cita-cita yang perlu diperjuangkan secara terus menerus. Dalam sistem pendidikan pun bahasa daerah bernasib marginal, suatu kebanggaan apabila bahasa daerah ditetapkan sebagai mata pelajaran muatan lokal, karena tidak sedikit kepala sekolah yang memilih bahasa Inggris sebagai muatan lokal dengan alasan internasionalisasi.

4. Penutup

Bahasa daerah dapat hidup dan berkembang bukan dengan memperbanyak kegiatan kongres, melainkan dengan menjadikannya berprestise. Agar bahasa daerah ini berprestise dan dipandang berharga oleh penuturnya sendiri, beberapa usaha perlu dilakukan, antara lain (1) keluarga-keluarga didorong untuk tetap berusaha menjadikan bahasa daerah itu sebagai bahasa pertama bagi anak-anak, (2) bahasa dan budaya daerah dijadikan mata pelajaran muatan lokal sejak sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas, (3) pelembagaan nilai-nilai budaya utama perlu

digalakkan melalui ungkapan-ungkapan dan pepatah-pepatah serta seni budaya tradisional lainnya, (4) perlu digalakkan usaha pembudayaan nilai-nilai budaya yang menjadikan generasi penerus memiliki identitas karakter, (5) perlu dihidupkan usaha penggunaan bahasa daerah formal pada upacara-upacara adat-istiadat.

Ancaman akan kepunahan bahasa daerah bukanlah kekhawatiran yang tidak beralasan. Menyusutnya citra dan nilai ekonomi bahasa daerah merupakan sebagian dari sumber permasalahan. Masalah yang lain berkenaan dengan kegagalan bahasa daerah yang harus mampu mengungkapkan masalah kekinian, karena itu tanpa upaya pelestarian yang terencana bahasa daerah tentu akan ditinggalkan penuturnya. Punah tidaknya suatu bahasa daerah berhubungan dengan ada tidaknya generasi muda sebagai tutur. Makin banyak generasi muda akrab dengan bahasa daerahnya, bahasa itu dapat terselamatkan.

Membangun kesadaran generasi muda sebagai ahli waris bahasa daerah, identik dengan membangun kecintaan generasi muda pada bahasa daerahnya. Kecintaan itu berkorelasi menyenangkan tidaknya suasana pembelajaran.

Daftar Pustaka

- Aitchison, Jean. 2004. *Language Change: Progress or Decay?* Cambridge: Cambridge University Press.
- Alwasilah, A.Ch. 1989. *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa
- Grimes, B.F. Ed. 1988. *Ethnologue: languages of the word*. Dallas, Texas: Summer Institute of Linguistics
- Krauss, M. 1992. "The world's languages in crisis". Dalam *Language*, Volume 68, Number 1.
- Poerwadi, Petrus. Tt. "Penanganan Bahasa Dayak yang Hampir Punah dan Sudah Punah" Makalah FKIP Universitas Palangkaraya

Rafiek, M. 2007. *Sosiologi Bahasa Pengantar Dasar Sociolinguistik*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.

Stewart, W.A. 1968. "A Sociolinguistic Typology for Describing Multilingualism" dalam Fishman J.A. *Readings in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.

ADJEKTIVA BAHASA HITU

Erniati, S.S.

Kantor Bahasa Maluku

erniati@kemdikbud.go.id

Abstrak

Penelitian bahasa daerah di Maluku amatlah perlu supaya bahasa-bahasa itu sudah ditulis sebelum bahasa-bahasa itu punah karena tidak dipakai lagi oleh penutur aslinya. Penelitian bahasa daerah sangatlah penting dan harus mendapat prioritas penting, tidak terkecuali dengan bahasa Hitu. Bahasa Hitu merupakan salah satu bahasa daerah yang dituturkan di negeri-negeri di Jezirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Penelitian tentang bentuk-bentuk kelas kata adjektiva bahasa Hitu merupakan salah satu upaya mencegah kepunahannya karena kemungkinan tidak dipakai lagi oleh penuturnya pada generasi berikutnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendapatkan deskripsi yang jelas tentang bentuk-bentuk kelas kata adjektiva, baik adjektiva dilihat dari semantisnya maupun dilihat dari perilaku sintaksisnya. Metode yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif struktural. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kelas kata adjektiva bahasa Hitu jika dilihat dari segi semantisnya dibedakan atas dua yaitu pertama, adjektiva bertaraf yang meliputi adjektiva pemerisifat, ukuran, warna, waktu, sifat batin, dan cerapan. Kedua, adjektiva tak bertaraf meliputi adjektiva bentuk dan adjektiva yang menunjukkan cacat tubuh. Adjektiva dilihat dari perilaku sintaksis

bahasa Hitu dibedakan atas empat, yaitu fungsi atribut, predikatif, tingkat kualitas, dan tingkat bandingan. Selain itu, ditemukan pula perulangan adjektiva bahasa Hitu yang sering disebut adjektiva polimorfemis.

Kata kunci: Morfologi, adjektiva, perilaku semantik, perilaku sintaksis, polimorfemis

Abstract

Local language research in Maluku is necessary so that the languages are written before the languages are extinct because they are not used by the native speakers. Local language research is very important and should get an important priority, not least with Hitu. Hitu is one of the regional languages spoken in countries in Jezirah Lehitu, Central Maluku District, Maluku Province. The study of Hitu's word class adjectives is one of the attempts to prevent its extinction, since it is unlikely to be used by speakers in the next generation. This study aims to know and get a clear description of the form of word class adjective, both adjectives viewed from semantiknya and seen from the behavior sintaksisnya. The method used in this research is structural descriptive. The result of the analysis shows that Hitu's class word adjectives refer to the forms of the semantic terms of the first two classes, the standard adjectives that include the characteristic adjectives, the size, the color, the time, the bathii properties, and the perception. Second, adjacent adjectives include form adjectives and adjectives that indicate defects. While Adjektiva seen from syntactic behavior of Hitu language is distinguished on four that is attribute function, predicate, level of quality, and level of comparison. In addition, there is also a recurrence of Hitu language adjectives that are often called polymorphism adjunctive.

Keywords: *Morphology, adjectives, semantic behavior, syntactic behavior, polymorfemis*

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia terdiri dari banyak suku atau kelompok etnik dan tiap-tiap suku mempunyai kebudayaan sendiri termasuk bahasanya. Bahasa yang begitu banyak ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh bangsa lain. Masih banyak bahasa daerah di Indonesia yang belum diteliti, sehingga belum diketahui bagaimana bahasa itu. Peneliti asing sebelumnya, dan baru beberapa bahasa saja yang diteliti oleh bangsa Indonesia sendiri. Penelitian bahasa daerah merupakan inventarisasi kebudayaan yang amat penting karena kita harus mengetahui kebudayaan yang kita miliki. Jika tidak mengetahui bahasa suatu masyarakat, kita tidak mungkin mengetahui kebudayaan masyarakat itu dengan baik.

Bahasa-bahasa daerah di Indonesia merupakan warisan budaya yang perlu dijaga, dibina, dan dikembangkan secara berkesinambungan agar dapat terus bertahan di tengah gempuran budaya global. Dengan demikian, penelitian bahasa-bahasa daerah di Indonesia sangatlah diperlukan sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemeliharaan bahasa-bahasa daerah serta bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bahasa-bahasa daerah di Indonesia, sebagai salah satu unsur budaya nasional, senantiasa mendapat tempat yang layak di negeri sendiri. Lagi pula perkembangan bahasa-bahasa daerah dapat mendukung perkembangan bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Bab XV pasal 36 beserta penjelasannya.

Penelitian bahasa daerah berguna pula untuk pengembangan bahasa nasional karena kosakata bahasa nasional dapat dikembangkan dari bahasa daerah. Dari hasil penelitian struktur dan kosakata bahasa dapat pula diadakan perbandingan bahasa-bahasa yang dapat mengungkapkan sejarah atau asal-usul suatu suku.

Dengan adanya rekaman terhadap struktur dan kosakata suatu bahasa, orang lain lebih gampang belajar bahasa itu, dan penutur asli belajar bahasa Indonesia lebih mudah dengan melihat dokumen kosakatanya. Keberadaan dokumen ini mempermudah kita menyampaikan informasi kepada penutur asli bahasa itu.

Bahasa Indonesia kadang-kadang dirasakan lebih penting oleh penutur asli suatu bahasa daripada bahasa ibunya terutama di Maluku yang terdiri atas banyak bahasa tetapi sedikit penutur aslinya. Sebab itu, suatu bahasa daerah mungkin saja punah. Penelitian atau penulisan bahasa daerah di Maluku amatlah perlu supaya bahasa-bahasa itu sudah ditulis sebelum bahasa-bahasa itu punah karena tidak dipakai lagi oleh penutur aslinya. Dengan penelitian ini, kita dapat mengetahui bagaimana struktur bahasa itu, baik meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan kosakata bahasa itu.

Salah satu dari bahasa daerah di Maluku yang perlu diteliti adalah bahasa Hitu. Alasan yang kuat untuk meneliti atau menginventarisasi bahasa ini ialah karena kemungkinan besar bahasa ini akan punah dan kemungkinan tidak dipakai lagi oleh penuturnya pada generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk kelas kata adjektiva bahasa Hitu. Penelitian ini bertujuan mendapatkan deskripsi yang jelas tentang bentuk-bentuk kelas kata adjektiva bahasa Hitu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pemerhati bahasa serta masyarakat umum sebagai pengembangan ilmu bahasa di Indonesia. Penelitian ini merupakan langkah kecil dalam inventarisasi linguistik daerah, namun sangat bermanfaat di masa yang akan datang sebagai sebuah dokumen inventarisasi serta sebagai bahan studi lanjut bahasa-bahasa daerah di Indonesia.

2. Kerangka Teori

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti memakai acuan dari beberapa ahli morfologi, seperti Nida, Elson dan Pickett, Matthews, Thomas, Pike, Ramlan, Hasan Alwi, dkk., dan Samsuri. Selain itu, masih dipakai juga beberapa pendapat ahli seperti Gleason, Hockett, Francis, dan Pike. Menurut Nida (1962:1) morfologi adalah suatu studi tentang morfem dan susunannya dalam membentuk kata. Selanjutnya dia mendefinisikan morfem sebagai satu unit yang mengandung arti, yang mungkin kata atau bagian kata.

Menurut Nida (1962:200) isi sebuah tulisan tentang morfologi terdiri atas 1) seksi morfofonemik yang meliputi semua alomorf baik yang dikontrol secara fonemik maupun secara morfemik, 2) seksi morfologi yang terdiri atas inventarisasi morfem dengan kelasnya dan distribusi morfem. Inventerisasi morfem meliputi akar kata dan non-akar kata setiap jenis kata, dan distribusi morfem meliputi pembentukan kata setiap jenis baik secara infleksional maupun derivasional.

Matthews (1974:3) mengatakan bahwa morfologi adalah satu istilah untuk cabang linguistik yang berisi tentang bentuk kata dalam pemakaian dan konstruksi yang berbeda. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa morfologi terdiri atas infleksi dan pembentukan kata. Pembentukan kata ini terbagi lagi atas derivasi dan kata majemuk.

Mengenai kelas kata, Hockett (1958:221) mendefinisikannya sebagai berikut:

Part of speech is a form-class of stems which show similar behavior in inflection, in syntax, or both. The part of speech system of a language is the calssification of all its stems on the basis of similarities and differences of inflectional and syntactical behavior. Since every whole word contains, by definition, just one stem, a part-of speech system can also be interpreted as a classification of whole words: the part of speech of a word is that its stem.

Francis (1958:234) membagi kata atas dasar posisi yang dapat diisi oleh kata dan fungsi yang dapat diperankan dalam bermacam-macam struktur. Selanjutnya dia mendefinisikan kelas kata sebagai kelas kata yang dibedakan dari bentuk atau penggunaan dalam kalimat dan distribusinya.

Muslich (1990:112) memberikan 6 versi penjenisan kata bahasa Indonesia, yaitu versi tradisional, versi Keraf, versi Ramlan, versi Samsuri, versi Kridalaksana, dan versi Mulyono. Versi pertama membagi jenis kata menjadi 10, yaitu nomina, verba, adjektiva, adverbialia, numeralia, pronomina, preposisi, konjungsi, kata sandang, dan kata seru; versi kedua menjadi 4, yaitu nomina, verba, adjektival, dan kata tugas; versi ketiga menjadi 3, yaitu nominal, adjektival, dan partikel, versi

keempat menjadi 5, yaitu nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan kata sarana; versi kelima menjadi 13, yaitu verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbial, interogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, interjeksi, dan kategori; versi keenam menjadi 7 yaitu verba, nomina, pronomina, numeralia, adjektiva, adverbial, dan kata tugas.

Dilihat dari definisi morfologi, maka salah satu hal yang harus dimasukkan dalam morfologi adalah proses morfologis. Ramlan (1965:27) mendefinisikan proses ini sebagai pembentukan kata-kata dari bentuk lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dia menyebutkan tiga macam proses morfologis yaitu afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Samsuri (1991:191) mendefinisikannya sebagai pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Dia menyebutkan lima proses yaitu afiksasi, reduplikasi, perubahan interen, suplesi, dan modifikasi. Selanjutnya Samsuri (1991:172) menyebutkan tiga prinsip pokok dan tiga prinsip tambahan untuk mengenal morfem.

Adjektiva (kata sifat) adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Adjektiva yang memberikan keterangan terhadap nomina itu berfungsi atributif. Keterangan itu dapat mengungkapkan suatu kualitas atau keanggotaan dalam suatu golongan. Contoh kata pemberi kualitas atau keanggotaan dalam suatu golongan itu adalah *kecil, berat, merah, bundar, gaib, dan ganda*. Seperti pada contoh berikut:

- (1) Anak *kecil*
Beban *berat*
Baju *merah*
Meja *bundar*
Alam *gaib*
Pemain *ganda*

Adjektiva juga dapat berfungsi sebagai predikat dan adverbial kalimat. Fungsi predikatif dan adverbial itu dapat mengacu ke suatu keadaan. Contoh kata pemberi keadaan ialah *mabuk, sakit, basah, baik, dan sadar*.

- (2) a. Agaknya dia sudah *mabuk*
b. Orang itu *sakit* dan tidak tertolong lagi
c. Bajunya *basah* kena hujan
d. Ia berhasil dengan *baik*
e. Hal itu dikemukakannya secara *sadar*

Adjektiva juga dicirikan oleh kemungkinannya menyatakan tingkat kualitas dan tingkat bandingan acuan nomina yang diterangkannya. Perbedaan tingkat kualitas ditegaskan dengan pemakaian kata seperti *sangat* dan *agak* di samping adjektiva. Contohnya:

- (3) a. Anak itu *sangat* kuat
- b. *Agak* jauh juga rumahnya

Tingkat bandingan dinyatakan antara lain oleh pemakaian kata *lebih* dan *paling* di muka adjektiva. Contohnya:

- (4) a. Saya *lebih* senang di sini daripada di sana
- b. Anaknya yang *paling* besar lulus kemarin

Batasan kata sifat (adjektiva) adalah segala macam kata yang dapat mengambil bentuk *se + reduplikasi kata dasar + nya*, misalnya *se + tinggi-tinggi + nya*; *se + cepat-cepat + nya*; dan *se + baik-baik + nya*. Karena tinggi, cepat, dan baik dapat mengambil bentuk *se + reduplikasi kata dasar + nya*, maka ketiga itu tergolong dalam kelas kata sifat (adjektiva).

Batasan lain yang dikemukakan oleh Keraf mengenai kata sifat dalam bahasa Indonesia adalah bahwa segala kata yang dapat diperluas dengan *paling*, *lebih*, dan *sekali* adalah kata sifat. Misalnya: *paling sedikit*, *lebih cantik*, dan *hitam sekali*.

Karena *sedikit*, *cantik*, dan *hitam* dapat diperluas dengan *paling*, *lebih*, dan *sekali*, maka ketiga kata itu tergolong dalam kelas kata sifat (adjektiva).

Adapun pengertian dan batasan adjektiva dari beberapa ahli antara lain Harimurti Kridalaksana. Menurut Harimurti Kridalaksana (1994), adjektiva atau sering juga disebut sebagai kata sifat adalah kategorisasi yang ditandai oleh kemungkinannya untuk:

- a) Bergabung dengan partikel tidak
- b) Mendampingi nomina atau
- c) Didampingi partikel seperti *lebih*, *sangat*, *agak*
- d) Mempunyai ciri-ciri morfologis seperti *-er* (*er* dalam *honorat*), *-if* (*if* dalam *sensitif*), *-i* (*i* dalam *alami*), atau
- e) Dibentuk menjadi nomina dengan konfiks *ke-an* seperti *adil* menjadi *keadilan*, *halus* menjadi *kehalusan*, *yakin* menjadi *keyakinan*.

Dari bentuknya, adjektiva dapat dibedakan menjadi:

- a) Adjektiva dasar, yaitu adjektiva yang belum mendapat proses morfologis seperti *adil*, *bagus*, *bebas*, *suci*.

- b) Adjektiva turunan, yaitu adjektiva yang telah melalui proses morfologis seperti terhormat, kebelanda-belandaan, berbakti, berminat, bernafsu, hewani, insani, berat lidah, besar mulut, keras kepala, aman sentosa, letih lesu, porak-poranda.

Terdapat dua kategori adjektiva yaitu:

- a) Adjektiva predikatif dan adjektiva atributif.
 - 1) Adjektiva predikatif yaitu adjektiva yang dapat menempati posisi predikat dalam klausa, misalnya hangat, sulit, mahal.
 - 2) Adjektiva atributif yaitu adjektiva yang mendampingi nomina dalam frase nominal. Misalnya nasional.

Pada umumnya, adjektiva predikatif dapat berfungsi sebagai atributif, sedangkan adjektiva atributif tidak dapat berfungsi secara preikatif.

- a) Adjektiva bertaraf dan adjektiva tak bertaraf
 - 1) Adjektiva bertaraf adalah adjektiva yang dapat berdampingan dengan *agak*, *sangat*, dan sebagainya. Contohnya: *agak* pekat, *sangat* makmur.
 - 2) Adjektiva tak bertaraf adalah adjektiva yang tidak dapat berdampingan dengan *agak*, *sangat*, dan sebagainya. Contohnya: nasional, intern.

Menurut Hasan Alwi dkk, adjektiva adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. adjektiva juga dapat berfungsi sebagai predikat dan adverbial kalimat yang mengacu kepada suatu keadaan.

3. Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif struktural bahasa Hitu sehingga memerlukan metode yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prosedur utama yang diikuti dalam mengumpulkan dan menganalisis data ialah prosedur yang diberikan oleh Nida (1962), dalam buku *Morphology*, Elson dan Pickett (1962) dalam bukunya *An Intruduction to Morphology and Syntax*, Hasan Alwi, dkk. dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (2003), dan Samsuri (1991) dalam buku *Analisis Bahasa*.

Teknik yang ditempuh dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik rekam serta pencatatan data dari beberapa informan utama yang didukung oleh kelompok masyarakat penutur bahasa Hitu. Data yang dikumpulkan berupa kata, frasa, dan klausa yang ditulis dalam transkripsi fonetis serta direkam untuk keperluan analisis selanjutnya. Selain teknik wawancara, peneliti juga mengumpulkan data dengan metode kepustakaan untuk melengkapi data-data sosial budaya sebagai penunjang penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan strategis yang dilakukan secara beruntun. Ketiga tahapan tersebut adalah tahap penyediaan data, tahap penganalisisan data, dan tahap penyajian hasil analisis data (Sudaryanto, 1993:5). Penyediaan data penelitian ini menggunakan metode cakap dengan teknik pancing sebagai teknik dasar dan teknik cakap semuka sebagai teknik lanjutan I, teknik catat sebagai teknik lanjutan II, dan teknik rekam sebagai teknik lanjutan III (Sudaryanto, 1993:137—139). Sementara itu, analisis data menggunakan metode padan dengan teknik pilah unsur penentu sebagai teknik dasar (Sudaryanto, 1993:21—27). Setelah data dianalisis hasilnya disajikan dengan metode formal (Sudaryanto, 1993:145).

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan berobjek bahasa, maka data bahasa yang dipakai oleh penutur bahasa Hitu yang bertempat tinggal di Desa Hitu dan sekitarnya merupakan sumber data utama. Karena itu, data bahasa Hitu dijarah dari narasumber yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang dimaksudkan di sini meliputi (1) mampu berbahasa bahasa Hitu dan bahasa Indonesia, (2) keadaan fisik normal atau tidak mempunyai kelainan alat ucap dan pendengarannya, (3) informan harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan menyeluruh tentang bahasa dan kelompok masyarakat Hitu, (4) usia informan antara 20 sampai 60 tahun dengan tidak memperhatikan jenis kelamin, (5) informan memiliki bahasa ibu bahasa Hitu, dan (6) semasa hidupnya informan paling sedikit pernah tinggal di Desa Hitu selama 10 tahun.

5. Pembahasan

5.1 Ciri-Ciri Adjektiva Bahasa Hitu

Ciri-ciri adjektiva dalam bahasa Hitu sebagai berikut.

- a. Sebagian besar berbentuk monomorfemis.
- b. Kebanyakan adjektiva bersuku dua atau tiga, tetapi ada juga yang bersuku satu.
- c. Dapat berfungsi sebagai atribut dalam frasa nomina dalam kalimat.
- d. Kebanyakan berfungsi sebagai predikat dalam kalimat.
- e. Menyatakan kualitas dan tingkat bandingan.

5.2 Adjektiva Bahasa Hitu dari Segi Perilaku Semantis

Untuk mengetahui adjektiva dalam bahasa Hitu digunakan jenis-jenis adjektiva bahasa Indonesia dari segi perilaku semantisnya yang dibedakan atas adjektiva bertaraf dan adjektiva tak bertaraf. Pembedaan adjektiva yang bertaraf dari adjektiva yang tak bertaraf bertalian dengan mungkin tidaknya adjektiva itu

menyatakan berbagai tingkat kualitas dan berbagai tingkat perbandingan. Untuk maksud itu dapat dipakai kata seperti sangat, agak, lebih, dan paling. Adjektiva tak bertaraf, sebaliknya, tidak dapat diberi pewatas tersebut.

5.2.1 Adjektiva Bertaraf Bahasa Hitu

Berdasarkan analisis data, dapat diketahui bahwa adjektiva bertaraf dalam bahasa Hitu meliputi (1) adjektiva pemerisifat, (2) adjektiva ukuran, (3) adjektiva warna, (4) adjektiva jarak, (5) adjektiva sikap batin, dan (7) adjektiva cerapan.

1) Adjektiva Pemerisifat Bahasa Hitu

Adjektiva pemerisifat jenis ini dapat memerikan kualitas dan intensitas yang bercorak fisik atau mental. Dalam bahasa Hitu dapat ditemukan adanya adjektiva pemerisifat. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa contoh sebagai berikut.

- | | |
|-------------------|-----------|
| (1) <i>yepmum</i> | ‘bersih’ |
| (2) <i>walkol</i> | ‘dangkal’ |
| (3) <i>mamin</i> | ‘panas’ |
| (4) <i>ngil</i> | ‘dingin’ |
| (5) <i>yepmum</i> | ‘aman’ |

Dalam konstruksi kalimat, adjektiva pemerisifat bahasa Hitu diilustrasikan seperti pada contoh di bawah ini.

- (1) abipa pelaka puka *yepmum*
rumah halaman itu bersih
‘halaman rumah itu bersih’
- (2) ok peka *walkol*
sungai sini dangkal
‘sungai di sini dangkal’
- (3) abenung pedingaka *mamin*
cuaca hari ini panas
‘cuaca hari ini panas’
- (4) ok wol peka abenong Desa Ambon *ngil*
sungai air ini Desa Ambon dingin
‘air sungai di Desa Ambon dingin’
- (5) abenong peka pe *yepmum*
kampung ini suasana aman
‘suasana kampung ini aman’

2) Adjektiva Ukuran Bahasa Hitu

Adjektiva ukuran mengacu ke kualitas yang dapat diukur dengan ukuran yang sifatnya kuantitatif. Dalam bahasa Hitu dapat ditemukan adanya adjektiva ukuran. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada contoh berikut ini.

- | | |
|------------------|----------|
| (1) <i>kukun</i> | 'berat' |
| (2) <i>pong</i> | 'ringan' |
| (3) <i>simit</i> | 'tinggi' |
| (4) <i>murup</i> | 'pendek' |
| (5) <i>dalo</i> | 'luas' |

Dalam konstruksi kalimat, adjektiva ukuran bahasa Hitu diilustrasikan seperti pada contoh di bawah ini.

- | | |
|-----|--|
| (1) | ade puka <i>kukun</i>
kayu itu berat
'kayu itu berat' |
| (2) | nanung mena <i>pongki</i> burabor
ibu tas ringan bawa
'ibu membawa tas yang ringan' |
| (3) | sino ninga ade <i>simitki</i> puka nginwanser
kemarin adik pohon tinggi itu panjat
'kemarin adik memanjat pohon yang tinggi itu' |
| (4) | ade darik puka <i>murup</i>
pohon jambu itu pendek
'pohon jambu itu masih' |
| (5) | botom yongapa <i>dalo</i>
bapak milik kebun luas
'bapak memiliki kebun yang luas' |

3) Adjektiva Warna Bahasa Hitu

Dalam bahasa Hitu, adjektiva warna mengacu ke berbagai warna. Penutur bahasa Hitu lebih banyak mengenal warna dasar. Selain itu, penutur bahasa Hitu juga mengenal warna yang diambil dari nama buah dan bagian tubuh. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan contoh berikut ini.

- | | |
|------------------|---------|
| (1) <i>woki</i> | 'merah' |
| (2) <i>birki</i> | 'hitam' |

- | | |
|--------------------|----------|
| (3) <i>kutki</i> | 'putih' |
| (4) <i>yakpok</i> | 'kuning' |
| (5) <i>akonpap</i> | 'hijau' |

Dalam konstruksi kalimat, adjektiva warna bahasa Hitu diilustrasikan seperti pada contoh di bawah ini.

- (1) neya opkal *woki* ngulburkosir
saya baju merah memakai
'saya memakai baju warna merah'
- (2) men *birkiya* sakomkiya ninga daretkoser
noke hitam milik nenek adik disobek
'noken hitam nenek disobek adik'
- (3) nanong opkalapa yepkiya *woki*
ibu baju baru putih
'baju baru ibu warna putih'
- (4) uwa abol nongdarkadura *yakpoki*
dia ikat kepala memakai kuning
'dia memakai ikat kepala warna kuning'
- (5) ade wisol puka *akonpap*
pohon daun itu hijau
'daun pohon itu semakin hijau'

4) Adjektiva Waktu Bahasa Hitu

Adjektiva waktu mengacu ke masa proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung sebagai pewatas. Adjektiva waktu terdapat dalam bahasa Hitu, tetapi tidak produktif. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada contoh berikut.

- | | |
|--------------------|----------|
| (1) <i>using</i> | 'lama' |
| (2) <i>dano</i> | 'cepat' |
| (3) <i>dingper</i> | 'sering' |
| (4) <i>pamtan</i> | 'lambat' |
| (5) <i>dingper</i> | 'jarang' |

Dalam konstruksi kalimat, adjektiva waktu bahasa Hitu diilustrasikan seperti pada contoh di bawah ini.

- (1) neya *using tan* mesemer pema
saya lama sudah tunggu di sini
'saya sudah lama menunggu di sini'

- (2) *uropa kanga dano nganar*
kakak babi cepat tangkap
'kakak menangkap babi dengan cepat'
- (3) *eya dingper bilendaklon mum*
dia sering berkelahi
'dia sering berkelahi'
- (4) *eya darowa etapamtan*
dia pulang lambat
'dia biasa pulang lambat'
- (5) *eya dingper uma abibpa abomar*
dia jarang datang rumah ke
'dia jarang datang ke rumah'

5) Adjektiva Jarak Bahasa Hitu

Dalam bahasa Hitu, adjektiva jarak mengacu ke ruang antara dua benda, tempat, atau maujud sebagai pewatas nomina. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut.

- (1) *kam* 'jauh'
- (2) *dalo/ngekneder* 'lebat'
- (3) *mep* 'rapat'
- (4) *yeptanmum* 'akrab'
- (5) *mep* 'dekat'

Dalam konstruksi kalimat, adjektiva jarak bahasa Hitu diilustrasikan seperti pada contoh di bawah ini.

- (1) *nuwa abibpapa gereja sona kam*
kami milik rumah gereja dari jauh
'rumah kami jauh dari gereja'
- (2) *abenong walapa ngekneder*
hutan di sana lebat
'hutan di sana lebat'
- (3) *bonengnonga mirona mepmepa do*
betatas tanam dekat-dekat jangan
'betatas jangan ditanam terlalu rapat'
- (4) *puwenga simin siripuka yeptanmum simin sirip*
pertemuan dalam itu akrab suasana
'pertemuan itu dalam suasana yang akrab'

- (5) *bayenona mep pema*
tinggalnya dekat dari sini
'tinggalnya dekat dari sini'

6) Adjektiva Sikap Batin Bahasa Hitu

Adjektiva sikap batin bertalian dengan pengacuan suasana hati dan perasaan. Adjektiva sikap batin ini terdapat juga dalam bahasa Hitu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh berikut.

- | | |
|-----------------------|-----------|
| (1) <i>ditparon</i> | 'bahagia' |
| (2) <i>angankulon</i> | 'benci' |
| (3) <i>atul</i> | 'jahat' |
| (4) <i>yol</i> | 'sakit' |
| (5) <i>podakandon</i> | 'takut' |

Dalam konstruksi kalimat, adjektiva sikap batin bahasa Hitu diilustrasikan seperti pada contoh di bawah ini.

- (1) *nanong ditparon ningkiya dakansur*
ibu bahagia adik ketemu
'ibu merasa bahagia ketemu adik'
- (2) *neyana angan kasemer*
saya benci dia
'saya benci dia'
- (3) *kakaki puka atul momki numarki tena pukona*
orang itu jahat kepada anak dia milik
'orang itu jahat kepada anaknya'
- (4) *eya sinowa eya benser yol nek*
dia kemarin tidak datang sakit karena
'dia kemarin tidak datang karena sakit'
- (5) *neya nekel mumnek podakando ewabensir*
saya sendirian takut pulang
'saya takut pulang sendirian'

7) Adjektiva Cerapan Bahasa Hitu

Adjektiva cerapan bertalian dengan pancaindera, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman atau penghiduan, perabaan, dan pencitarasaan. Adjektiva cerapan dalam bahasa Hitu akan dikemukakan pada contoh berikut.

- | | |
|-------------------|-----------|
| (1) <i>piyam</i> | 'terang' |
| (2) <i>yepki</i> | 'nyaring' |
| (3) <i>ulbom</i> | 'busuk' |
| (4) <i>yepmin</i> | 'harum' |
| (5) <i>mutar</i> | 'basah' |
| (6) <i>sitmol</i> | 'licin' |
| (7) <i>yep</i> | 'manis' |
| (8) <i>yep</i> | 'enak' |

Dalam konstruksi kalimat, adjektiva cerapan bahasa Hitu diilustrasikan seperti pada contoh di bawah ini.

- (1) *alup peka piyam yep*
lampu ini terang baik
'lampu ini menyala terang'
- (2) *eya wenga dalotan kak yepki*
dia teriak keras suara nyaring
'dia berteriak dengan suara yang nyaring'
- (3) *anon peka ulbom nesar*
anjing ini busuk bau
'anjing ini bau busuk'
- (4) *puwaset puka yepmin nesar*
bunga itu harum bau
'bunga itu bau harum'
- (5) *eya opkala amok mutkoser*
dia baju hujan kena basah
'bajunya basah kena hujan'
- (6) *eya dae anser wola sitmol*
dia jatuh jalan licin
'dia jatuh karena jalannya licin'
- (7) *alop puka dito yep*
buah itu rasanya manis
'buah itu manis rasanya'
- (8) *enonmina peka dito yep*
makanan ini rasanya enak
'makanan ini enak rasanya'

5.2.2 Adjektiva Tak Bertaraf Bahasa Hitu

Adjektiva tak bertaraf menempatkan acuan nomina yang diwatasinya di dalam kelompok atau golongan tertentu. Kehadirannya di dalam lingkungan itu tidak dapat bertaraf-taraf. Sesuatu ada di dalamnya atau di luarnya. Termasuk di dalam kelompok ini adalah adjektiva bentuk. Adjektiva tak bertaraf yang terdapat dalam bahasa Hitu adalah adjektiva bentuk dan adjektiva yang menunjukkan cacat tubuh. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada contoh berikut.

- (1) *tutun* 'lurus'
- (2) *merep* 'bengkok'
- (3) *murup* 'bulat'
- (4) *pil* 'runcing'
- (5) *sirop* 'buta'
- (6) *dender* 'lumpuh'

Dalam konstruksi kalimat, adjektiva tak bertaraf bahasa Hitu diilustrasikan seperti pada contoh di bawah ini.

- (1) *ade apkulol peka tutunki*
pohon batang ini lurus
'batang pohon itu lurus'
- (2) *kutepa korkiya murup*
tungku ibu milik bulat
'tungku ibu bulat'
- (3) *ade apkulol puka merepki*
pohon batang itu bengkok
'batang pohon itu bengkok'
- (4) *botoma silmona pakor pareser pilkiya puka*
bapak anak panah patah yang sudah jadi runcing itu
'bapak mematahkan anak panah yang runcing itu'
- (5) *putenaka paron tanmum siropneder*
anak itu dari lahir buta
'anak itu buta sejak lahir'
- (6) *urop yonaka yonadendera mamentan dender*
kakak kaki dia lumpuh panas mati
'kaki kakak lumpuh setelah panas yang tinggi'

5.3 Perulangan Adjektiva Bahasa Hitu

Kebanyakan adjektiva bahasa Hitu adalah morfofonemis, artinya terdiri atas satu morfem. Namun, ada pula adjektiva bahasa Hitu yang lebih dari satu morfem dan karena itu disebut polimorfemis. Adjektiva bahasa Hitu yang polimorfemis dibentuk dengan cara perulangan sebagian, tetapi kata yang diulang itu pun telah memiliki status sebagai adjektiva. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada contoh berikut.

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| (1) sikbit-sikbitki | 'tinggi-tinggi' |
| (2) talo-taloki | 'besar-besar' |
| (3) yep-yepki | 'cantik-cantik' |
| (4) ngorbor-ngorborki | 'kurus-kurus' |
| (5) yambul-bul | 'kecil-kecil' |

Perulangan adjektiva dalam bahasa Hitu memberikan arti tambahan, yakni orang, benda, atau binatang yang diterangkan itu tak tunggal meskipun dalam kalimat hal itu tidak dinyatakan secara eksplisit. Perhatikan kalimat berikut ini.

- | | |
|-----|---|
| (1) | adeyape balipeya <i>sikbit-sikbitki</i>
pohonnya di sini <i>tinggi-tinggi</i>
'pohon di sini tinggi-tinggi' |
| (2) | tema okwol puka <i>talo-taloki</i>
ikan sungai itu <i>besar-besar</i>
'ikan di sungai itu besar-besar' |
| (3) | wanang Ambon kikora <i>yep-yepki</i>
gadis Ambon perempuan <i>cantik-cantik</i>
'gadis Ambon cantik-cantik' |
| (4) | tena wawka <i>ngorbor-ngorborki</i>
anak di sana <i>kurus-kurus</i>
'anak di sana kurus-kurus' |
| (5) | botom kanga kiya <i>yambul-bul</i>
bapak babi masih <i>kecil-kecil</i>
'babi bapak masih kecil-kecil' |

5.4 Adjektiva Bahasa Hitu dari Segi Perilaku Sintaksis

Adjektiva bahasa Hitu dari segi perilaku sintaksis mencakup fungsi atributif dan predikatif. Untuk lebih jelasnya adjektiva bahasa Hitu dari segi perilaku sintaksis akan dikemukakan di bawah ini.

5.4.1 Fungsi Atributif

Adjektiva yang merupakan pewatas dalam frasa nominal yang nominanya menjadi subjek, objek, atau pelengkap dikatakan dipakai secara atributif. Fungsi atributif dapat diamati pada adjektiva yang berfungsi sebagai atribut dalam frasa nomina muncul sesudah inti. Hal ini dapat dilihat dalam urutan diterangkan menerangkan. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada contoh berikut.

- | | |
|-----------------------|----------------|
| (1) sikbit-sikbitki | 'gadis kecil' |
| (2) talo-taloki | 'baju putih' |
| (3) yep-yepki | 'rumah besar' |
| (4) ngorbor-ngorborki | 'suara lembut' |
| (5) yambul-bul | 'pohon tinggi' |

Dalam konstruksi kalimat, fungsi atributif bahasa Hitu diilustrasikan seperti pada contoh di bawah ini.

- (1) adeyape balipeya *sikbit-sikbitki*
gadis kecil ini sangat lucu
'gadis kecil ini sangat lucu'
- (2) tema okwol puka *talo-taloki*
ibu sedang mencuci baju putih kakak
'ibu sedang mencuci baju putih kakak'
- (3) wanang Ambon kikora *yep-yepki*
rumah besar itu rumah paman
'rumah besar itu rumah paman'
- (4) tena wawka *ngorbor-ngorborki*
suara lembut siapa itu
'suara lembut siapa itu'
- (5) botom kanga kiya *yambul-bul*
besok bapak mau menebang pohon tinggi itu
'besok bapak mau menebang pohon tinggi itu'

5.4.2 Predikatif

Adjektiva yang menjalankan fungsi predikat atau pelengkap dalam klausa dikatakan dipakai secara predikatif. Fungsi adjektiva sebagai predikat letaknya ada sesudah subjek. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada contoh berikut.

- (1) adeyape balipeya *sikbit-sikbitki*
hatinya tidak *tenang* sebelum anaknya kembali
'hatinya tidak *tenang* sebelum anaknya kembali'
- (2) tema okwol puka *talo-taloki*
durian ini tidak *mahal*
'durian ini tidak *mahal*'
- (3) wanang Ambon kikora *yep-yepki*
sedih hatinya melihat anaknya sakit
'sedih hatinya melihat anaknya sakit'
- (4) tena wawka *ngorbor-ngorborki*
kabar itu membuat mereka *gembira*
'kabar itu membuat mereka *gembira*'
- (5) botom kanga kiya *yambul-bul*
saya anggap perbuatannya sangat *memalukan*
'saya anggap perbuatannya sangat *memalukan*'

5.5 Tingkat Kualitas

Berbagai tingkat kualitas secara relatif menunjukkan tingkat intensitas yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam bahasa Hitu ditemukan adjektiva yang menunjukkan tingkat kualitas. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada contoh berikut.

- (1) adeyape balipeya *sikbit-sikbitki*
orang itu cepat *betul* jalannya
'orang itu cepat *betul* jalannya'
- (2) tema okwol puka *talo-taloki*
anak itu memang *sangat* pintar
'anak itu memang *sangat* pintar'
- (3) wanang Ambon kikora *yep-yepki*
pohon mangga kakek tinggi *sekali*
'pohon mangga kakek tinggi *sekali*'
- (4) tena wawka *ngorbor-ngorborki*
kakak saya *tidak* sombong *sama sekali*
'kakak saya *tidak* sombong *sama sekali*'
- (5) botom kanga kiya *yambul-bul*
rumah itu *terlalu* mahal
'rumah itu *terlalu* mahal'

- (6) Rinto menjadi *makin* kaya
Rinto menjadi *makin* kaya
'Rinto menjadi makin kaya'

5.5.1 Tingkat Bandingan

Pada pembagian dua maujud atau lebih dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas atau intensitasnya dapat setara atau tidak setara. Tingkat yang setara disebut tingkat ekuatif; tingkat yang tak setara dibagi dua: tingkat komparatif dan tingkat superlatif. Tiap-tiap tingkat itu secara sintaksis diungkapkan dengan bentuk yang khusus. Dalam bahasa Hitu ditemukan adjektiva tingkat bandingan yang mencakup tingkat ekuatif, tingkat komparatif, dan tingkat superlatif.

1) Tingkat Komparatif

Tingkat komparatif mengacu ke kadar kualitas atau intensitas yang lebih atau yang kurang. Dalam bahasa Hitu. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada contoh berikut.

- (1) adeyape balipeya *sikbit-sikbitki*
mangga ini *lebih enak daripada* mangga itu
'mangga ini lebih enak daripada mangga itu'
- (2) tema okwol puka *talo-taloki*
lantai rumah ini *kurang bersih daripada* lantai rumah itu
'lantai rumah ini kurang bersih daripada lantai rumah itu'
- (3) wanang Ambon kikora *yep-yepki*
Agus kalah tinggi *daripada* Jhon
'Agus kalah tinggi daripada Jhon'

6. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kelas kata adjektiva bahasa Hitu jika dilihat dari bentuk-bentuk dari segi semantisnya dibedakan atas dua yaitu pertama, adjektiva bertaraf yang meliputi adjektiva pemeris sifat, ukuran, warna, waktu, sifat batin, dan cerapan. Kedua, adjektiva tak bertaraf meliputi adjektiva bentuk dan adjektiva yang menunjukkan cacat tubuh. Sedangkan Adjektiva dilihat dari perilaku sintaksis bahasa Hitu dibedakan atas empat yaitu fungsi atribut, predikatif, tingkat kualitas, dan tingkat bandingan. Selain itu, ditemukan pula perulangan adjektiva bahasa Hitu yang sering disebut adjektiva polimorfemis. Sebagian besar adjektiva bahasa Hitu berbentuk monomorfemis. Adjektiva bahasa Hitu berfungsi sebagai atribut dalam frasa nomina dalam kalimat. Kebanyakan berfungsi sebagai predikat dalam kalimat dan menyatakan kualitas serta tingkat bandingan.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Moeliono. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Chaer, Abdul. 1993. *Linguistik Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2000. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Elson, Benyamin and Velma Pickett. 1964. *An Introduction to Morphology and Syntax*. Huntington Beach: Summer Institute of Linguistics.
- Francis, W. Nelson. 1958. *The Structure of American English*. New York: the Ronald Press Company.
- Gleason, H.A. 1961. *Descriptive Linguistics*. San Francisco: Holt, Rinehart and Winston.
- Grimer, Barbara F (ed). 2006. *Bahasa-Bahasa di Indonesia*. Jakarta: SIL International Cabang Indonesia.
- Kridalaksana, Harimurti. 2005. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Matthews, P.H. 1974. *Morphology*. London: Cambridge University Press.
- Moeliono, Anton M. (ed). 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nida, Eugene A. 1962. *Morphology*. Ann Harbour: The University of Michigan Press.
- Pike, Kenneth L. 1977. *Grammatical Analysis*. Arlington: Summer Institute of Linguistics.
- Ramlan, M. 1985. *Morfologi*. Yogyakarta: UB Karyono.
- Ramlan, M. 2005. *Sintaksis*. Yogyakarta: CV Karyono.
- Samsuri. 1991. *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Thomas, Elaine et.al. 1988. *Introduction to Grammatical Analysis Self Instruction and Correspondence Course*. Horsleys Green, England: Summer Institute of Linguistics.
- Verhaar, J. W. M. 2010. *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 1

Hari, tanggal	: Jumat, 8 September 2017
Waktu	: Pukul 08.00—09.00
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	: Falantino E. Latupapua, M.A.
Pemakalah I	: Dr. Hurip Danu Ismadi
Pemakalah II	: Dr. Tri Nuke Pudjiastuti
Pemakalah III	: Prof. Dr. Thomas Frans
Pemakalah IV	: Ernianti, S.S.
Notulis	: Felyona de Lima
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra

Makalah I

REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Ada 4 hal penting dalam bahasa daerah yang perlu dilakukan seperti, pemetaan bahasa daerah seluruh Indonesia, kajian vitalitas bahasa (melihat status bahasa), melakukan kedua hal tersebut merupakan bagian dari revitalisasi (status punah dan kritis), kedua adalah konservasi. Upaya revitalisasi harus ada strategi dan rencana aksi. Dalam upaya revitalisasi harus ada unsur pendidikan dan non-pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk konservasi mulai dari monologi, morfologi

maupun aksara. Hasil sementara pemetaan bahasa daerah, sudah dipetakan terdapat 646 bahasa daerah.

Tanggapan:

1. Di pulau Lease masih memiliki bahasa daerah dan sering digunakan sebagai bahasa pergaulan. Kamus daerah sudah dibuat bagaimana solusi dalam penerbitannya? Muatan lokal dengan pelajaran bahasa sudah dilakukan, tetapi guru sudah pensiun, apa solusinya? (Ibu Mercy Sahureka, Dosen Kehutanan UNPATTI - Ketua Pengajar Hulaliu)

Jawaban:

Solusi yang direkomendasikan yaitu perlu adanya komitmen bersama. Harus ada komitmen dari semua pihak. Perlu adanya peraturan daerah. Harus ada rencana aksi untuk apa yang harus dilakukan. Kongres ini harus merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan. Pengembangan bahasa daerah harus dilakukan terpusat dari keluarga, pendidikan, dan komunitas. Harus ada pembiasaan dalam pemakaian bahasa daerah. Dilakukan pelatihan pada guru-guru di 10 provinsi yang nilai Ujian nasional bahasa Indonesianya rendah. Diajak untuk mengunduh KBBI.

Bahasa adalah pembiasaan. Perlu ada dorongan dari aturan para pemimpin dan para ketua adat dan sebagainya. Harus ada penggerak dan memerlukan dukungan dari semua pihak. Media tidak menggunakan bahasa daerah. Contohnya bahasa Sunda memiliki surat kabar berbahasa daerah. Sehingga menjadi kebiasaan.

Makalah II

KEBIJAKAN LIPI DALAM UPAYA PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra di wilayahnya. Hegomoni bahasa merupakan hal perlu diperhatikan. Ada program revitalisasi yang dilakukan oleh pakar linguistik, dengan perhitungan faktor dominan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh LIPI adalah metode etnografi, bahasa tidak hanya dilihat dari kata-kata itu sendiri, tetapi dilihat dari konteks sosialnya. Gerakan literasi bahasa tidak hanya mempelajari bahasa saja tetapi bagaimana pelaksanaannya. Perlu membangun *grand desain* dalam penguatan bahasa. Muatan lokal harus berdampingan dengan budaya dan harus terus dikembangkan.

Tanggapan:

1. Apa solusi konkrit untuk bahasa yang sudah punah? (Engel, LPMP)

Jawaban:

Kata kuncinya adalah politik bahasa. Siapa yang memiliki pengaruh di daerah harus digandeng secara baik. Para penguasa di daerah harus merasa memiliki. Wilayah Indonesia timur penggunaan bahasa sangat heterogen. Konsep muatan lokal diperluas bukan saja formal namun juga informal. Muatan lokal harus digerakan dari komunitas-komunitas informal. Contohnya di Kabupaten Alor dilakukan pendekatan kepada gereja dan masjid untuk penggunaan bahasa daerah di Alor.

Makalah III

**PENGAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH:
PELUANG DAN TANTANGAN**

Bahasa daerah mengalami banyak kendala. Bahasa daerah dalam muatan lokal ada dalam otonomi daerah, desentralisasi, multikulturasi, pendidikan dan kurikulum. Muatan lokal melihat pada potensi dan kebutuhan lingkungan. Muatan lokal meliputi SDM, SDA, budaya, dan historinya. Pembinaan bahasa daerah dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan jalur keluarga.

Tanggapan:

1. Bagaimana operasional teknis penggunaan bahasa daerah oleh penutur yang bukan penutur asli namun ingin mempelajarinya? (Dolfinus Okra, Humas Pemda)

Jawaban:

Basis dari pemetaan bahasa daerah adalah keluarga. Ketika keluarga tidak memiliki komitmen untuk menghidupkan bahasa daerah maka itu adalah usaha yang gagal. Bahasa daerah jarang bersentuhan dengan teknologi. Upaya utama adalah penguatan melalui perda dan penguatan dari keluarga.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 2

Hari, tanggal	: Jumat, 8 September 2017
Waktu	: Pukul 09.00—10.00
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	:
Pemakalah I	: Prof. Dr. Hana
Pemakalah II	: Dr. Ir. Ruksamin, M.Si.
Pemakalah III	: Falantino E. Latupapua, M.A.
Pemakalah IV	: Dr. Petrus Pattiasina, M.Pd.
Notulis	: Frengky Tehumury, S.Pd.
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra

Makalah I

UPI HALU OLEO:

**BAHASA CULAM BACU DAN TOLAKI
DALAM PRESPEKTIF GENOLINGUISTIK**

Bahasa Cula Bacu ada dua versi, Bahasa Culam Bacu dan Bahasa Tulam Bacu (Tergantung dari penutur). Teori Genetika Kebahasaan tidak dapat dibuktikan dengan asal-asalan, perlu kolaborasi antara pakar linguistik dan pakar genetika. Bahasa di Daerah Sulawesi tenggara menurut masyarakat terdapat 119 bahasa, menurut SIL ada

15 bahasa, dan menurut kantor bahasa ada 17 bahasa. Penutur bahasa Culam Bacu belum diketahui pasti berapa jumlah penuturnya.

Jangan menjauhi bahasa daerah karena bahasa daerah adalah jati diri etnis, simbol kebanggaan daerah, pembentuk kepribadian anak, pendukung kebudayaan daerah, pemrakarya bahasa Indonesia, fondasi kebudayaan Indonesia.

Tanggapan:

1. Apa nama Bambu? Istilahnya ini disebutkan “Culambacu atau tulam batu”? Kemudian sebagai akademisi, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan bahasa? (Prof. Pattinama, Unpatti)
2. Diklarifikasikan dulu, di sana ada Culam Bacu di Ternate ada Kolam Cucu? Dan mengapa suku Culam Bacu itu dipilih sebagai orang terdekat Ternate?

Jawaban:

Filosofi mengenai Culambacu atau tulam batu, dalam bahasa sulawesi tenggara, Bambu adalah Cula, Batu adalah Bacu. Jadi artinya bambu bertumbuh di atas batu.

Makalah II

**KEBIJAKAN REKRONSTRUKSI
BAHASA CULAM BACU DAN PEMERTAHANANYA**

Sulawesi Tenggara memiliki satu bahasa, yakni “Culam Bacu”. Culam Bacu menunjukkan suku. Konawe Sulawesi tenggara memiliki bahasa yang tidak mendapat interverensi dari luar. Ada 13 Kecamatan penyebaran bahasa Culam Bacu. Ada 7 rumpun bambu, jika ada satu peristiwa, biasanya dapat diketahui dengan arah bambu tersebut.

Bahasa Culam Bacu sementara dibuatkan kamusnya dan sementara menunggu hasil untuk diseminarkan. Masyarakat Adat Culam Bacu perlu dikenal oleh masyarakat luas. Identitas jangan dilupakan.

Tanggapan:

1. Silakan memberikan penjelasan upaya yang dilakukan dalam pemertahanan sastra daerah. (Ibu Rahmawati, Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara)

Jawaban:

Upaya yang dilakukan sementara ada dalam tahapan penyempurnaan kamus. Tidak ingin ada diskriminatif. Ingin memperkenalkan suku Culam Bacu yang belum banyak dikenal orang. Karena bahasa adat di Konawe Sulawesi Tenggara tidak memiliki vokal “T”, maka dipakai kata *culam bacu* baik di pemerintahan maupun suku. Ada kemungkinan, nenek dari masyarakat Konawe Sulawesi Tenggara, berasal dari Ternate. Masih diteliti.

Makalah III

**STUDI AWAL MENGENAI SIKAP BAHASA DAN SIKAP BUDAYA
DALAM PENCANANGAN AMBON SEBAGAI KOTA MUSIK DUNIA**

Ambon Kota musik merupakan program yang cukup menyerap banyak anggaran. Ambon Kota musik, dicanangkan untuk meningkatkan ekonomi, berbasis ekonomi kreatif. Segala sesuatu yang Global (nama-nama) pusat pemerintahan maupun perbelanjaan tidak harus dengan menggunakan bahasa Inggris. Kekayaan kosakata suatu etnis akan sangat menunjukkan kemajuan suatu etnis tersebut.

Istilah Bahasa Daerah dianggap tidak bergengsi. Istilah Ambon Mansie mulai menghilang dari tuturan lisan karena adanya wacana *Ambon City Of Music*. Satu teks penulisan kreatif lirik lagu harus berbasis puitik. Satu hasil penulisan kreatif harus ada dalam proses yang dilakukan secara terus menerus dan menyentuh hati orang banyak. Musik milik universal, tetapi kita (Masyarakat Ambon) memiliki ritmik yang berbeda dari setiap komunitas. Penulis lirik lagu hampir kehilangan budaya yang justru penting. Diksi yang klise dengan kesalahan gramatikal dan filosofi budaya yang kurang baik akan menunjukkan hasil yang tidak begitu baik. Memakai bahasa Inggris tidak harus mengorbankan bahasa daerah dan bahasa lokal. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah sangat layak menjadi media artikulasi massa dalam segala model komunikasi.

Jawaban:

Sebagai akademisi kita harus berjuang untuk mempertahankan bahasa demi kepentingan orang banyak. Kita bisa saja bergaul dengan tidak terlalu terpesona dengan budaya barat.

PELUANG DAN TANTANGAN MUATAN LOKAL BAHASA VISUAL DAERAH DI INDONESIA

**Ariesa Pandanwangi
Krismanto Kusbiantoro**

Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha
ariesa.pandanwangi@maranatha.edu

Abstrak

Setiap suku di Indonesia mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda, masing-masing memiliki bahasa kata yang berbeda dalam mengungkapkan benda yang sama. Selain bahasa kata juga ada bahasa visual yang diungkapkan melalui gambar. Dengan latar belakang yang pluralistik ini, menjadi kekuatan dalam mengangkat bahasa visual daerah ke dalam muatan lokal khususnya dalam proses pembelajaran pendidikan seni rupa. Bahasa rupa yang disampaikan adalah gambar yang *representative* dapat mewakili objek aslinya dari berbagai daerah di Indonesia. Saat ini sekolah mementingkan bahasa kata, sehingga kerap banyak buku pelajaran disampaikan melalui rangkaian kata-kata saja. Padahal apabila disampaikan dengan bahasa *visual* (gambar) tentu akan lebih mudah diserap oleh peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahasa visual daerah yang dapat menjadi muatan lokal. Bahasa visual yang ditampilkan akan difokuskan pada ornamen yang terdapat rumah tradisional di Nias. Metode yang digunakan adalah metode eksplorasi lapangan. Hasil dari penelitian ini kekuatan seni tradisi yang berasal dari setiap daerah dapat menjadi muatan lokal yang dapat membentuk karakter bangsa.

Kata Kunci: Bahasa rupa, muatan lokal, tradisional

1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat dari sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki khasanah adat istiadat yang dapat digali sedemikian rupa dimulai dari wisata alam, cerita legenda asal muasalnya terjadinya suatu daerah, keunggulan kulinernya hingga seni tradisi yang terdapat pada ornamen bahkan dapat bercerita, baik di atas selembar daun lontar ataupun di atas kain. Setiap suku di Indonesia yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda, masing-masing memiliki cara dalam menyampaikan komunikasinya yaitu dengan bahasa dan kata yang berbeda dalam mengungkapkan objek yang sama. Latar belakang yang pluralistik ini menjadi kekuatan dalam mengangkat seni tradisi daerah kedalam muatan lokal khususnya dalam proses pembelajaran pendidikan seni rupa.

Pendidikan seni rupa merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam pendidikan anak, bahkan hal ini kerap di bahas untuk kemajuan dunia pendidikan, bahkan juga menjadi bagian dari terapi seni yang dikembangkan di beberapa rumah sakit besar di Indonesia. Pendidikan anak tidak terlepas dari proses kreasi yang membutuhkan kemampuan berimajinasi melalui gambar, sehingga tidak cukup hanya melalui kata saja.

Menurut Tabrani (2014) bahwa perbendaharaan gambar baik dari masa pra-sejarah, primitif, anak-anak, tradisi di Indonesia, sehingga pendidikan seni rupa bisa memanfaatkannya mulai dari sekolah dasar dan ini menjadi sumbangan yang sangat besar dari dunia seni rupa Indonesia. Paparan ini mengacu kepada hasil dari budaya seni tradisi yang dikomunikasikan oleh nenek moyang kita melalui gambar dan dapat dijadikan materi dalam proses pembelajaran tidak hanya seni rupa tetapi juga mata pelajaran lainnya.

2. Pembahasan

2.1 Bahasa Kata dan Bahasa Visual

Saat ini sekolah mementingkan bahasa kata yang disampaikan secara verbal, sehingga kerap banyak buku pelajaran disampaikan melalui rangkaian kata-kata saja. Padahal apabila disampaikan dengan bahasa *visual* (gambar) tentu akan lebih mudah diserap oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran sebuah komunikasi melalui gambar menjadi lebih mudah diserap oleh peserta didik. Proses belajar adalah suatu proses yang melibatkan antara fisik-kreatif-rasio, hal tersebut terjadi karena meleburnya kesadaran-ambang sadar-tak sadar ke dalam suatu penghayatan (Tabrani, Primadi, 2014).

Bahasa *visual* dalam seni rupa tradisi adalah gambar yang *representative* dapat mewakili objek aslinya dari berbagai daerah di Indonesia disampaikan kepada komunitasnya. Untuk mengetahui salah satu bahasa *visual* dari daerah yang dapat

dijadikan muatan lokal maka peneliti menggunakan metode eksplorasi lapangan. Metode eksplorasi lapangan adalah suatu metode yang dilaksanakan ketika peneliti terjun ke lokasi penelitian melakukan pengamatan langsung sesuai dengan apa yang akan di kaji dalam penelitiannya. Seluruh hasil pengamatan dilakukan pencatatan secara terstruktur. Lokasi yang dipilih ketika observasi lapangan adalah Nias, dengan alasan wilayah ini kerap terjadi bencana alam berupa gempa bumi, sehingga banyak peninggalan adatnya yang rusak atau termakan oleh zaman. Beberapa wilayahnya banyak yang peninggalannya dilindungi oleh pemerintah daerah ataupun oleh UNESCO.

Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan hasil yang sah maka dibutuhkan instrumen penelitian yang dapat mengukur fenomena sosial yang diamati. Adapun instrument penelitian tersebut adalah:

Table 1. Instrumen Penelitian

No.	Pertanyaan penelitian	Aspek yang diteliti	Indikator	Teori
1.	Bahasa visual apa yang tepat sebagai muatan lokal ?	Wujud ornamen	Unsur-unsur rupa: • Objek, Bentuk, Komposisi, Warna, Deskripsi Bahasa rupa • Cara Wimba; Cara khas: • Diperkecil & Diperbesar, Dari kepala sampai kaki, Perwakilan. Simbol: Bentuk, Warna	• Teori bahasa Rupa (Tabrani. 2014)
2	Apa peluang dan tantangan muatan lokal pada penggunaan <i>visual language</i> di sekolah?	Faktor internal: • Masyarakat adat Faktor ekstral: • Pengaruh luar	Observasi: Pengamatan langsung di lapangan terhadap bahasa visual. Internal: • Wawancara tokoh masyarakat • Tetua adat • Budayawan Eksternal: • Wawancara dinas pendidikan	

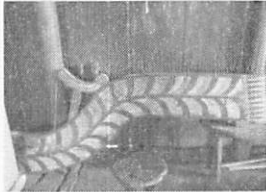
2.2 Muatan lokal

Muatan lokal adalah sebuah perencanaan yang mengatur dan mempersiapkan isi materi pembelajaran yang ditetapkan oleh daerah, sesuai dengan situasional dan karakteristik daerahnya masing-masing dan memuat panduan proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2009). Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan karakter dan potensi daerah, termasuk di dalamnya keunggulan daerah. Jadi muatan lokal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam melaksanakan pendidikan yang melibatkan potensi daerahnya masing-masing agar tidak musnah kedalam proses pembelajaran siswa sekaligus untuk mengembangkan potensi akademiknya.

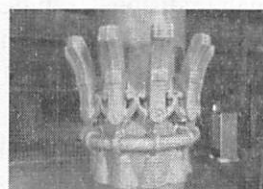
Wujud Ornamen

Indonesia memiliki keragaman bahasa visual dalam bentuk ornamen. Salah satu bahasa visual yang akan dipaparkan adalah ornamen dari salah satu daerah di Indonesia, yaitu Nias dan juga Karo. Keistimewaan ornamen ini memiliki keterkaitan dengan makna kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa pengenalan ornamen yang dapat diperkenalkan kepada peserta didik adalah diawali dengan pengenalan rumah tinggal. Setiap anak mengenal rumah tinggal sehari-hari sebagai tempat bernaung, beratapkan genting, dan memiliki ruang-ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan penghuni rumah. Hal ini berbeda dengan rumah tinggal tradisional; adanya menggunakan atap rumbia, lantainya terbuat dari kayu, berupa rumah panggung atau dikenal juga dengan rumah yang memiliki kolong. Kolong pada beberapa rumah tradisional, ada yang dimanfaatkan sebagai tempat menaruh ternak, tempat jalan pintu masuk ke dalam rumah, bahkan ada pula yang di fungsikan sebagai peredam datangnya gempa, atau memang sengaja sebagai pelindung dari serangan binatang buas. Adapun pengenalan tersebut di uraikan melalui gambar-gambar di bawah ini:

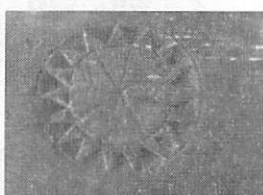
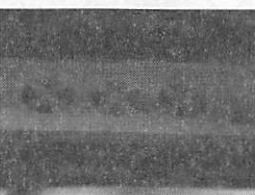
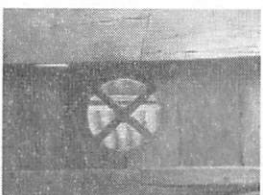
Tabel 2. Wujud Ornamen

ORNAMEN		
		

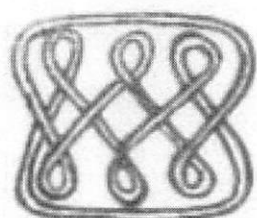
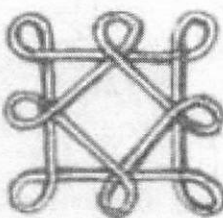
Ornamen ini terdapat pada depan rumah tradisional di salah satu daerah di Indonesia, Nias. Bentuk ornamen tersebut dibuat dengan cara menatah dan mengukir pada material kayu. Pada gambar bagian kiri di inspirasi dari bentuk pakis muda yang belum mengembang (*woli-woli*). (Duha, 2012, p. 69). Bentuk ornamen tersebut dikelompokkan kedalam bentuk flora menyerupai bentuk kelopak dengan jumlah antara delapan sampai dua belas



Ornamen ini terdapat pada depan rumah tradisional di salah satu daerah di Indonesia, Nias. Bentuk ornamen tersebut dibuat dengan cara menatah dan mengukir pada material kayu. Pada gambar bagian kiri di inspirasi dari bentuk pakis muda yang belum mengembang (*woli-woli*). (Duha, 2012, p. 69). Bentuk ragam hias tersebut dikelompokkan kedalam bentuk flora menyerupai bentuk kelopak dengan jumlah antara delapan sampai dua belas.



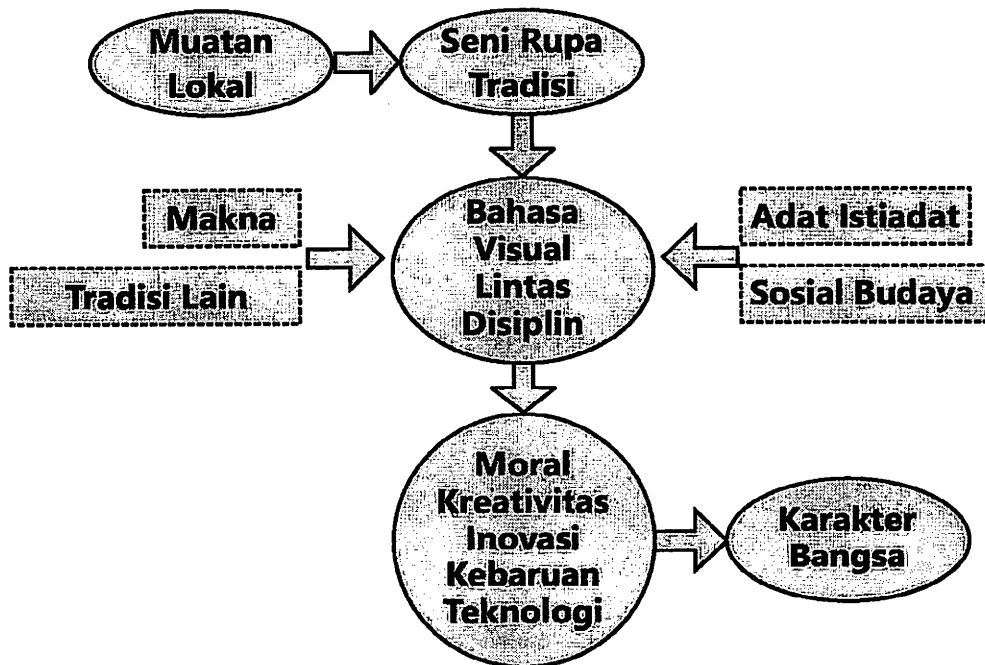
Ornamen ini terdapat pada bagian ventilasi rumah juga bisa terdapat pada bagian depan rumah, diukir berbentuk lingkaran dan pada bagian tengahnya terdapat *talakhoi* (garis) sebanyak empat, atau delapan (Fahela Harefa, et al, 2004).



Ornamen pada rumah adat batak Karo (Sabrina Rania, 2012). Pada bagian tengah tupak raja sulaeman, ornamen ini bermotif geometris berupa garis yang menyimpul dan membentuk jalinan motif bunga dan membentuk segi empat. Pada kolom ketiga adalah Bindu Matoguh. Motif ornamen bindu matoguh berupa garis yang menyilang diagonal dan membentuk persegi, melambangkan keteguhan hati masyarakat Karo untuk bertindak baik, adil, tidak melanggar norma, dan tidak merugikan orang (encikep si mehuli). (Jhoni Milala, 2012). (Asmyta Surbakti, 2011)

Tabel 2 di atas menjelaskan pengelompokan tentang ornamen pada rumah tradisional yang dapat diajarkan kepada peserta didik dari tingkat dasar hingga menengah bahwa muatan lokal yang bersumber pada kebudayaan merupakan sumber ilmu pengetahuan dari nenek moyang kita. Hal ini dapat menjadi inspirasi dan sumber gagasan dalam pengembangan mata pelajaran baik bagi guru ataupun bagi peserta didik. Guru dapat memberikan tugas kepada siswa dalam bentuk kunjungan ke rumah tradisional, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik (*student centre learning*). Selanjutnya peserta didik dapat menggambarkan bagian-bagian yang menarik dari apa yang sudah dilihatnya. Salah satunya dapat disampaikan melalui gambar, karena gambar adalah suatu garis yang sengaja dibentuk dengan membentuk sebuah objek tertentu, sehingga dapat dikenali wujudnya dengan jelas. (Pandanwangi, Pilliang, & Adisasmito, 2014; Pandanwangi, Pilliang, & Adisasmito, 2014). Materi dapat diberikan secara bertahap, sehingga ke depannya peserta didik juga dapat terbentuk karakternya.

Keterkaitan antara pengaruh muatan lokal pada pendidikan terhadap karakter bangsa dapat digambarkan seperti diagram di bawah ini:



Gambar 1: Muatan Lokal dapat menjadi dasar pembentukan karakter bangsa.

2.3 Peluang dan Tantangan Muatan Lokal Bahasa Visual

1) Peluang muatan lokal bahasa visual

Indonesia sangat kaya akan bahasa visual yang disampaikan pada banyak hasil seni tradisi, seperti ornamen di atas kain tenun, songket, ataupun batik. Selain itu juga banyak ilustrasi yang disampaikan di atas daun lontar ataupun kulit kayu yang diolah pada masanya. Bahkan rumah-rumah tradisional juga banyak yang memiliki ornamen yang bentuknya dipengaruhi dari factor internal seperti sistem kepercayaan ataupun nilai-nilai yang mereka anut yang datang dari lingkungan internal. Hal ini merupakan kekayaan hasil dari seni tradisi yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Antara seni tradisi dan pendidikan, hal yang saling berkaitan terhadap berbagai sektor kehidupan termasuk di dalamnya pembentukan karakter bangsa dalam merawat apa yang sudah dianugerahi oleh Tuhan. Saat ini salah satu tuntutan terhadap pendidikan yang menjadi penting adalah dapat menjawab tantangan perubahan dan perkembangan zaman.

2) Tantangan muatan lokal bahasa visual

Pelaksanaan proses pembelajaran muatan lokal merupakan tantangan terbesar dan bagian dari upaya perbaikan kondisi pendidikan di Indonesia. Tantangan terbesar adalah, saat ini peserta didik sudah dipenuhi oleh informasi yang berasal dari pengaruh luar yaitu teknologi, seperti internet, pencarian data dari mesin *google*, bahkan bacaan juga dapat dengan mudah diperoleh melalui *e-book*. Tidak ada yang salah dengan hal ini, justru ini adalah tantangan untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dipadankan dengan kebutuhan mengangkat seni tradisi ke dalam proses pembelajaran.

Peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi dianggap penting karena banyak mempunyai akses dalam membuat *website* terkait dengan pendataan seni tradisi yang terdapat di daerahnya. Melalui teknologi, maka pengenalan bahasa visual yang berasal dari seni tradisi di Indonesia di harapkan dapat memandu para siswa dalam mengembangkan kreativitasnya. Kuncinya guru di sekolah dapat siap mentalnya dalam memahami bahasa visual ini. Penerapan muatan lokal yang berbasis pada bahasa visual seni tradisi yang tersebar di nusantara menjadi tantangan sekaligus peluang bagi guru untuk menjadi bagian dalam mewujudkan cita-cita pendidikan. Hal ini dipertegas oleh (Tabrani, 2005) bahwa dalam era global ini para futuris justru akan mengangkat produk ke standar internasional apabila memiliki warna lokal. Nah terkait hal ini, apakah dunia pendidikan kita sudah mengangkat muatan lokal di seluruh Indonesia termasuk dunia di dalamnya dunia pendidikan?

3. Penutup

Bahasa visual dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya dari Nias dan Karo dapat menjadi muatan lokal yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran sekaligus menjadi karakteristik kurikulum di tiap daerah di Indonesia. Contoh materi yang dapat menjadi bahan ajar pada muatan lokal adalah bahasa

rupa wayang, bahasa rupa pada rumah-rumah tradisional di Nias, bahasa rupa di candi Borobudur dan lain-lain. Hal ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pengenalan seni tradisi yang terdapat di Indonesia. Proses pembelajaran aktif peserta didik dapat diajak langsung ke lapangan, ataupun melalui teknologi, yang pada akhir model pembelajaran dapat mempresentasikan perolehan data-data seni tradisi tersebut.

Daftar Pustaka

- Asmyta Surbakti. (2011, Dec 18). Retrieved July 25, 2017, from <https://karo.or.id/ornamen-rumah-tradisional-karo/>.
- Duha, N. (2012). *Omo Niha: Perahu Darat di Pulau Bergoyang*. Gunung Sitoli, Sumatera, Indonesia: Museum Pusaka Nias.
- E. Mulyasa. (2009). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (9 ed.). Bandung, Jawa Barat: Rosda Karya.
- Fahela Harefa, et al. (2004). *Omo Sebua*. Nias: Bapeda Kabupaten Nias.
- Jhoni Milala. (2012). *Seni Rupa Karo*. Retrieved July 25, 2017, from <http://limamarga.blogspot.co.id/2012/03/seni-rupa-karo.html>.
- Pandanwangi, A., Pilliang, Y. A., & Adisasmito, N. D. (2014, June). Bahasa Rupa Gambar Anak Berkesulitan Belajar dan Relasinya dengan Gambar Seni Rupa Tradisi. *Journal Panggung*, Vo.24. No.2, 157.

Sabrina Rania. (2012). Retrieved 2017, from <http://schoolproject3tangsel.blogspot.co.id/2012/08/ragam-hias-seluruh-indonesia.html>.

Tabrani, P. (2005). *Bahasa Rupa* (1 ed.). Bandung, West Java, Indonesia: Kelir.

Tabrani, Primadi. (2014). *Proses Kreasi-Gambar Anak-Proses Belajar*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.

KONDISI BAHASA LAMPUNG KINI, ESOK, DAN NANTI

Ratih Rahayu

Kantor Bahasa Lampung

Pos-el: ahza.yayaya@gmail.com

Abstrak

Sudah banyak tulisan yang mengupas kondisi bahasa Lampung masa kini dan prediksi yang akan terjadi nanti. Banyak pula pemerhati bahasa yang menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah umumnya dan bahasa Lampung pada khususnya. Sayangnya hasil evaluasi dari langkah strategis yang telah dilakukan atas dasar saran para ahli yang berbentuk perda belum dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi dari pelaksanaan perda yang diberlakukan berkaitan dengan pemertahanan bahasa Lampung. Kajian ini menggunakan metodologi deskriptif analisis untuk menjabarkan kondisi yang ada di masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pendapat yang muncul di media massa. Penetapan payung hukum jati diri bahasa Lampung oleh pemda sebagai bentuk upaya pemertahanan bahasa daerah tanpa adanya pelaksanaan yang konsisten

dan berkelanjutan serta pemberian contoh dari para penentu kebijakan hanya akan menjadi sia-sia. Perlunya ketegasan pemerintah daerah untuk menentukan dialek standar bahan pembelajaran di sekolah selayaknya cepat dilakukan serta untuk meminta dibukanya prodi Bahasa Lampung sebagai upaya penyediaan guru Bahasa Lampung yang berkompeten di bidangnya.

Kata Kunci: bahasa Lampung, perda

1. Pendahuluan

Pembukaan program studi (prodi) Seni Musik di Universitas Lampung (Unila) baru-baru ini membuat polemik di kalangan pemerhati pendidikan, sastrawan, budayawan, dan masyarakat umum. Banyak yang beranggapan bahwa pembukaan jurusan musik dirasa belum perlu karena adanya alasan bahwa selama ini industri musik di Provinsi Lampung, baik musik lokal/tradisional maupun nasional belum mengangkat nama baik Lampung. Berbeda halnya dengan soal kebahasaan dan kesastraan, Provinsi Lampung selama ini sudah terkenal sebagai gudangnya sastrawan dan pelakon teater.

Dibukanya prodi seni musik di Unila menambah kegelisahan mengenai tidak adanya prodi S-1 Bahasa Lampung dan telah dibukanya program pascasarjana Bahasa Lampung. Kegelisahan masyarakat mengenai hal tersebut wajar saja karena prodi yang dianggap lebih penting untuk segera dibuka malah terkalahkan oleh prodi yang dianggap belum perlu. Perlu diingat bahwa dengan tidak adanya prodi Bahasa Lampung tentu saja akan berimbas pada kurangnya tenaga pengajar Bahasa Lampung di sekolah-sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sesungguhnya sudah meminta Unila untuk terus memperjuangkan pendirian program S-1 Bahasa Lampung karena prodi ini sudah dirasakan menjadi kebutuhan yang mendesak. Selama ini mata pelajaran bahasa Lampung seringkali diampu oleh guru mata pelajaran lain yang tidak memiliki dasar keilmuan mengenai bahasa Lampung.

Rektor Unila menjelaskan bahwa prodi Bahasa Lampung sudah diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Beliau menginformasikan bahwa ada kendala nomenklatur untuk pendirian prodi tersebut karena yang berhak memutuskan dibukanya prodi itu adalah wewenang pusat.

Kenyataan yang dipaparkan di atas mau tidak mau membuka mata kita mengenai adanya ketidakberesan dalam pemeliharaan kekayaan bangsa. Bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan bangsa yang dilindungi oleh undang-undang. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Sejauh mana peranan pemerintah pusat dan daerah melaksanakan kewajibannya perlu dievaluasi secara terus menerus agar ketakutan akan semakin banyaknya bahasa daerah yang punah akan semakin berkurang.

2. Landasan Teori

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada pasal 42 dijelaskan bahwa, “Pemerintah daerah wajib melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia”. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga kelestarian bahasa daerahnya.

Bahasa Lampung adalah salah satu bahasa yang memiliki derajat yang tinggi karena memiliki aksara sendiri. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Abdul Wahab (2011:165) yang menyatakan bahwa budaya yang sudah memiliki sistem tulisan sendiri menandakan bahwa budaya itu memiliki derajat yang tinggi sebab dalam budaya itu segala pola pikiran, keyakinan, dan perilaku pemiliknya terekam untuk dipelajari dan kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa batas ruang dan waktu. Sangat disayangkan apabila bahasa yang mempunyai derajat yang tinggi akan punah tanpa adanya usaha untuk mempertahankan bahkan melestarikannya.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Lampung berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan juga sebagai alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa Lampung berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan sebagai alat pengembang dan pendukung kebudayaan daerah.

Bahasa menurut Sumarsono (2011:286) memperoleh jatah hidup, tetapi bukan dari hukum alam, melainkan oleh masyarakat dan budaya manusia. Nasib bahasa menurutnya terkait dengan pemakainya dan kalau bahasa merosot atau punah hal tersebut hanya karena keadaan penuturnya telah berubah.

Bahasa nasional maupun bahasa daerah mana pun selalu akan mengalami perkembangan dan perubahan. Tentu saja hal ini terjadi karena adanya perubahan di dalam kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Adanya kontak di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya dapat menyebabkan bahasa terpengaruh oleh bahasa lain. Proses saling memengaruhi antarbahasa ini tidak dapat dihindari.

Menurut Asim Gunarwan (2011:115), bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan budaya suatu masyarakat, yaitu sebagai alat transmisi budaya itu dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Oleh karena itu, melemahnya bahasa dapat menyebabkan menurunnya budaya masyarakat yang bersangkutan. Menurutnya, ada korelasi positif di antara bahasa dan ketahanan budaya.

Bahasa Lampung sebagaimana bahasa daerah lainnya pastilah akan mengalami pergeseran yang kalau tidak dijaga dan dilestarikan akan mengalami kepunahan. Penelitian mengenai adanya pergeseran beberapa bahasa daerah di Indonesia sebagai salah satu penyebab kepunahan bahasa sudah banyak dilakukan oleh beberapa ahli seperti Muhajir (1988), Gunarwan (1994), Wantamia (1996), Siregar (1998), Grimes (2001), Wilian (2005), serta Abdul Manaf (2010). Hasil penelitian mereka memprediksi terjadinya pergeseran tersebut adalah akibat adanya daya dorong dan daya tarik bahasa Indonesia. Faktor-faktor sosiokultural psikologi seperti kekuatan ikatan etnis, pola pemukiman, agama, sistem kekeluargaan, jenis kelamin, ekonomi, dan geografis juga mempunyai pengaruh terhadap kecepatan pergeseran bahasa.

Menurut Sumarsono (2011:236—237) ada beberapa kondisi yang mempengaruhi pergeseran bahasa, yaitu kedwibahasaan masyarakat yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa melalui alih generasi (intergenerasi); migrasi atau perpindahan penduduk; perkembangan ekonomi; dan sekolah.

Menurut Kloss dalam Sumarsono (2011:286) ada tiga tipe utama kepunahan bahasa, yaitu 1) kepunahan bahasa tanpa pergeseran bahasa; 2) kepunahan bahasa karena pergeseran bahasa atau bahasa itu menyerah pada pertentangan intrinsik prasarana budaya modern yang berdasarkan teknologi; 3) kepunahan bahasa nominal melalui metamorfosis (suatu bahasa turun menjadi dialek karena guyup tuturnya tidak lagi menulis dalam bahasa itu dan mulai memakai bahasa lain).

Sementara itu, Fishman (1993) menyebutkan salah satu penyebab kepunahan itu adalah tidak adanya *intergenerational mother tongue continuity* (kesinambungan bahasa ibu antargenerasi). Implikasinya, bahwa tidak akan punah selama ia diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.

Beberapa langkah yang dipandang relevan dan strategis diupayakan dalam merevitalisasi peran dan fungsi bahasa daerah (bahasa ibu) menurut Lukman (2012:118—127) adalah 1) bahasa daerah (BD) dijadikan sebagai bahasa komunikasi utama dalam keluarga/rumah; 2) pentransmisian/pewarisan bahasa daerah 3) pembentukan sikap dan perilaku positif; 4) penyerapan istilah atau ungkapan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia; 5) pemberian nama diri, jalan dan tempat umum lainnya; dan 6) membangkitkan kecintaan terhadap budaya dan kesenian daerah.

Modal utama untuk mempertahankan bahasa daerah menurut Lukman (2012:112) adalah 1) sebagai etnis kita harus memiliki kebanggaan dan kebanggaan itu lahir dari catatan sejarah, budaya, dan identitas etnik lainnya; 2) semangat dan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap bahasa daerah. Seperti yang diungkapkan Crystal dalam Lukman, matinya bahasa bukan hanya kita kehilangan alat komunikasi, melainkan pula kehilangan jati diri. Untuk itulah, revitalisasi peran dan fungsi bahasa ibu perlu dilakukan.

3. Kondisi Bahasa Lampung

Kepunahan bahasa Lampung sudah diprediksi oleh Gunarwan (1994) yang menyatakan bahwa dalam waktu 75—100 tahun lagi bahasa Lampung akan punah. Prediksi penyebab kepunahan bahasa Lampung pun telah banyak diungkapkan oleh para ahli dan pengamat bahasa Lampung seperti Farida Aryani, Danardana, Efendi Sanusi, dan lainnya.

Kekhawatiran punahnya bahasa Lampung tersebut, dilanjutkan dengan prediksi kepunahan eksistensi budaya Lampung. Sitanala Arsyad (1999) membayangkan dalam tahun 2094, Lampung sudah merupakan provinsi dengan penduduk 20 juta orang, secara statistik orang bersuku Lampung (*ulun Lappung*) yang jumlahnya sekitar tiga juta orang. Pada saat itu tidak seorang pun lagi yang memahami dan menggunakan bahasa Lampung dan tulisan Lampung.

Menurut Imran Nasri (2013), tanda-tanda kepunahan bahasa Lampung sudah mulai tampak. Orang Lampung saat ini sudah banyak yang tidak bisa berbahasa Lampung. Apalagi kalangan mudanya. Mereka lebih senang dan lebih bangga berbahasa Indonesia (dengan logat Betawi) dalam pergaulan sehari-hari. Ini, tidak hanya terjadi di kota, tetapi sudah merambah ke perdesaan di daerah-daerah di Lampung. Keluarga-keluarga muda di Lampung berkomunikasi dengan anak-anaknya lebih bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal kedua orang tuanya berasal dari kampung (*pekon*) yang sama.

Dari penelitian yang pernah penulis lakukan (2015) mengenai sikap dan pandangan guru Bahasa Indonesia tingkat SLTP terhadap bahasa dan aksara Lampung menunjukkan beberapa hal yang memprihatinkan. Bahasa yang digunakan oleh guru Bahasa Indonesia tingkat SLTP di Kabupaten Tulangbawang dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa pertama sebagian besar responden (42%) adalah bahasa Indonesia, bahasa Lampung hanya digunakan sebagai bahasa pertama oleh 10 orang responden saja (20%). Bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa kedua responden paling banyak, yaitu oleh 28 responden (56%), bahasa Lampung menempati posisi kedua (22%), dan bahasa Jawa menempati posisi terakhir (20%).

Hasil penelitian juga menunjukkan lama tinggal responden di Provinsi Lampung ternyata tidak berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa Lampungnya. Dari 50 orang responden yang telah tinggal di Provinsi Lampung lebih dari 5 tahun bahkan ada yang seumur hidupnya tinggal di Provinsi Lampung, diketahui bahwa hanya ada 15 orang (30%) saja yang mampu aktif berbahasa Lampung, 20 orang (40%) berkemampuan pasif, dan sisanya tidak mampu berbahasa Lampung. Selain itu, dari 20 orang (40%) responden yang bersuku Lampung, hanya satu orang (2%) yang menjadikan bahasa Lampung sebagai bahasa pertama yang diajarkan pada anak. Pengetahuan responden akan aksara Lampung pun cukup menyedihkan karena dari 50 responden hanya 5 orang (10%) saja yang tahu dan lancar membaca dan menulis

aksara Lampung. Sisanya tidak tahu 10 orang (20%), tahu tetapi tidak menguasai 28 orang (56%), dan 6 orang (12%) lainnya tahu dan menguasai walau tidak lancar membaca/menulis.

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa bahasa Lampung mengalami masalah *intergenerational mother tongue continuity* (kesinambungan bahasa ibu antargenerasi). Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera dilakukan langkah-langkah penyelamatannya. Sesuai dengan saran Lukman, masyarakat Lampung hendaknya diberi kesadaran untuk memiliki kebanggaan terhadap bahasa dan budayanya, baik yang berupa catatan sejarah, aneka budaya, dan identitas etnik lainnya, serta diberi kesadaran untuk memiliki semangat dan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap bahasa daerahnya. Diharapkan dengan hal tersebut menimbulkan kesadaran untuk mau mewariskan bahasa daerah dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.

Kondisi bahasa Lampung yang semakin menyedihkan juga ditulis tajuk Lampung Post 12 Juli 2013 yang berjudul *Kuburan Bahasa Lampung*. Kebijakan pemerintah daerah di sektor pendidikan yang justru semakin memarginalkan bahasa Lampung dengan peniadaan kode sertifikasi guru Bahasa Lampung menjadi akar masalahnya. Kebijakan ini sangat mengancam keberadaan guru Bahasa Lampung. Secara perlahan-lahan dan diam-diam, guru mata pelajaran Bahasa Lampung hendak disingkirkan begitu saja. Anehnya, Dinas Pendidikan di berbagai daerah di Lampung menyarankan agar guru Bahasa Lampung SD mengajukan sertifikasi sebagai guru SD dan bagi guru Bahasa Lampung SMP mengajukan sertifikasi sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saran itu, justru mendorong peniadaan guru Bahasa Lampung dan bahkan peminggiran pelajaran Bahasa Lampung dari sekolah.

Menyikapi gejala kepunahan bahasa Lampung, banyak ahli bahasa, budaya dan pemerintah daerah yang berusaha mencari jalan keluar. Beberapa hal yang telah dilakukan Pemda Lampung antara lain membuat payung hukum penguat jati diri bahasa Lampung, meminta saran ahli atau pakar, serta bekerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan bahasa Lampung.

Payung hukum penguat jati diri bahasa Lampung antara lain berupa Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Lampung No. 10229/112.L1/1990 tentang "Muatan Lokal Bahasa Lampung di Provinsi Lampung"; Isi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang "Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengembangan bahasa daerah"; Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam membangun jati diri dan citra diri masyarakat Lampung; Isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2007 tentang "Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah"; Hasil Kongres Bahasa-bahasa Daerah Wilayah Barat di Bandar Lampung pada 12—13

November 2007; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; Peraturan Gubernur No. 4 2011 tentang “Pengembangan, Pembinaan, Pelestarian Bahasa Lampung, dan Aksara Lampung”; Peraturan Gubernur Lampung No. 39 Tahun 2014 tentang “Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”.

Farida Ariyani dan A. Dharmansyah Yusie, akademisi dari perguruan tinggi mengusulkan agar secara berkelanjutan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat juga melakukan bermacam-macam kegiatan, antara lain berikut ini.

- 1) Menyusun rencana pembinaan bahasa Lampung yang baik dan serius dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan pada umumnya dan perencanaan status bahasa pada khususnya.
- 2) Melengkapi rencana itu dengan visi dan misi serta cetak biru, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, dan sistem pemantauannya.
- 3) Mendirikan Balai Bahasa Lampung untuk mengelola rencana dan pelaksanaannya.
- 4) Mempertimbangkan bentuk kerja sama dengan Bappeda
- 5) Meningkatkan apresiasi sastra dan seni budaya Lampung.
- 6) Mencari orang atau orang-orang Lampung yang mencintai budaya Lampung, yang menjadi pembinaan BL.
- 7) Mempertimbangkan pembentukan gerakan sosial penggunaan BL untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Lampung.
- 8) Mengusahakan agar ada penerbitan berkala berbahasa Lampung.
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pembinaan BL secara berkala. Selanjutnya, hasil evaluasi digunakan untuk mengubah atau merevisi rencana, terutama strategi pelaksanaannya.
- 10) Meminta bantuan biaya dan dukungan institusional pembinaan BL kepada Pemerintah Daerah dan Pusat *c.q.* Ditjen Kebudayaan/Pusat Bahasa.
- 11) Membina kerja sama dengan RRI dan TVRI Provinsi Lampung agar dapat siaran berbahasa Lampung.
- 12) Melakukan penelitian-penelitian, terutama *action research*, yang relevan dengan usaha-usaha pembalikan BL. Salah satunya adalah mengidentifikasi bagaimana sikap orang Lampung pada umumnya terhadap BL.
- 13) Membuat gerakan pembalikan pergeseran BL sesegera mungkin sebelum BL bergeser terlalu jauh.

Saran-saran yang dikemukakan di atas cukup memberikan solusi untuk mencegah kepunahan bahasa Lampung. Hanya saja saran yang dikemukakan tersebut

belum semuanya dilaksanakan oleh Pemda Lampung.

Menurut Imron Nasiri (2013), dari sisi perundang-undangan sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Di dalam peraturan daerah tersebut, dalam Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 2 dinyatakan bahwa ruang lingkup Pemeliharaan Kebudayaan Lampung mencakup aspek-aspek bahasa dan aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan dan pakaian daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 7 secara tegas dikatakan bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan. Pasal 8 menyebutkan tujuh cara pelestarian bahasa dan atau aksara Lampung. Hanya beberapa dikutipkan di sini. Pertama, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah. Kedua, sosialisasi, pemberdayaan dan pemanfaatan media massa daerah, baik cetak maupun elektronik, maupun media lain untuk membuat rubrik/siaran yang berisi tentang bahasa dan aksara Lampung. Ketiga, penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa dan aksara Lampung. Keempat, pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Lampung mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi, dan keperluan. Kelima, keharusan penggunaan bahasa Lampung sebagai: bahasa komunikasi sehari-hari baik di lingkungan keluarga atau pergaulan dan masyarakat, maupun di kantor-kantor atau sekolah-sekolah pada hari-hari tertentu sesuai dialek bahasa daerah masing-masing; Bahasa pembuka dalam penyampaian sambutan, baik oleh tokoh adat, tokoh masyarakat maupun pejabat pada acara-acara tertentu (yaitu ungkapan *tabik pun*).

Selanjutnya Imron Nasiri juga memperhatikan tentang peran dan kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung yang tertuang dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 6 Ayat 1. Kalau kita baca dari apa yang termuat dalam perda itu, sudah jelas lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengajarkan bahasa Lampung kepada murid-muridnya. Masalahnya, kalau dari pihak yang berwenang sendiri dalam hal ini Dinas Pendidikan saja sudah tidak punya perhatian, dan tidak punya rasa tanggung jawab sebagaimana yang ditulis dalam tajuk Lampung Post itu, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan bahasa Lampung.

Kristian Adi Putra merangkum proposal Richard Ruiz (2013), setidaknya memang ada 4 langkah yang harus dilakukan pemegang kebijakan dalam usaha pemertahanan bahasa Lampung. Pertama, bahasa Lampung harus mempunyai status yang jelas, dalam hal ini aturan legal penggunaannya di ranah pendidikan, media,

masyarakat, dan kantor-kantor pemerintahan (*status planning*). Kedua, pemerintah harus menetapkan standar baku bahasa Lampung yang akan dipromosikan (*corpus planning*). Ketiga, pemerintah harus mempunyai rencana yang jelas bagaimana bahasa Lampung diajarkan dan digunakan di sekolah, media, masyarakat, dan kantor-kantor pemerintahan (*acquisition planning*). Terakhir, pemerintah harus mencari cara bagaimana bahasa Lampung dipromosikan dan mendapatkan sambutan baik dari masyarakat sehingga mereka mau mempelajari dan menggunakannya (*attitude planning*).

Berkaitan dengan apa yang diungkapkan Kristian pada poin pertama sudah dilaksanakan oleh Pemda Lampung berupa payung hukum jati diri bahasa Lampung. Untuk poin kedua mengenai standar baku bahasa Lampung masih belum dilakukan karena adanya pro kontra di masyarakat mengenai dialek mana yang akan digunakan. Seharusnya pemda memiliki ketegasan untuk menentukan dialek mana yang akan digunakan sebagai bahan ajar di sekolah sekaligus bahan pembuatan buku pelajarannya. Untuk poin ketiga, rencana seringkali hanya berupa rencana tanpa ada realisasinya di lapangan. Hal tersebut biasanya karena kurangnya contoh dari para penentu kebijakan.

4. Penutup

Kondisi bahasa Lampung saat ini cukup memprihatinkan karena sudah terlihat gejala-gejala ke arah kepunahan bahasa. Perlu direncanakan langkah-langkah strategis sebagai upaya pencegahan percepatan kepunahan bahasa Lampung. Pemda dapat meminta saran ahli atau pakar, serta bekerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan bahasa Lampung. Dari berbagai pendapat dan masukan para ahli selama ini dapat disimpulkan bahwa banyak ahli yang sudah berusaha mencari jalan keluar dalam upaya pemertahanan bahasa Lampung. Namun sejauh ini hasilnya belum terlalu dirasakan oleh masyarakat terutama karena belum adanya keseriusan dari Pemda Lampung untuk mengikuti apa yang telah disarankan. Beberapa di antaranya adalah belum adanya sosialisasi mengenai pentingnya pewarisan bahasa daerah pada generasi selanjutnya serta penumbuhan rasa cinta dan semangat untuk melestarikan bahasa daerah.

Selain itu, hal yang paling penting adalah belum adanya dialek standar yang akan diajarkan di sekolah serta kurangnya tenaga pengajar bahasa Lampung yang memiliki pendidikan di bidangnya akibat tidak adanya prodi Bahasa Lampung di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Lampung.

Masukan dari para ahli dan masyarakat seharusnya dilaksanakan dan dievaluasi secara terus menerus secara serentak dan jangka panjang yang bertahap. Semua langkah itu hendaklah bermuara pada tujuan agar bahasa Lampung benar-

benar berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat daerah.

Daftar Pustaka

Ariyani, Farida dan A. Dharmansyah Yusie. *Upaya Memelihara Bahasa Lampung sebagai Budaya Daerah dalam Rangka Memperkuat Budaya Lokal.*

<http://mypostingan1210.blogspot.co.id/2015/04/upaya-memelihara-bahasa-lampung.html>

Gunarwan, Asim. 2011. “Pembalikan Pergeseran Bahasa Daerah untuk Memperkuat Budaya Bangsa” *Pemberdayaan Bahasa Indonesia, Memperkuat Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII.* Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Lukman, M.S. 2012 *Vitalitas Bahasa.* Makasar: De La Macca.

Nasri, Imron. 2013. *Kepunahan Bahasa Lampung Tinggal Menunggu Waktu.* Lampung: Lampung Post 10 September.

Putra, Kristian Adi. 2013. *Bisakah Sekolah Merevitalisasi Bahasa Lampung?* Lampung: Lampung Post, 24 September 2013.

Rahayu, Ratih. 2015. *Sikap dan Pandangan Guru Bahasa Indonesia Tingkat SLTP di Kabupaten Tulang Bawang terhadap Bahasa dan Aksara Lampung.* Laporan Penelitian.

Sumarsono. 2011. *Sosiolinguistik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Abdul. 2011. “Masa Depan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah” *Pemberdayaan Bahasa Indonesia, Memperkuat Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII.* Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

**SIKAP BAHASA DALAM KERANGKA
PEMERTAHANAN BAHASA *TANA* SEBAGAI BAHASA ADAT
DI NEGERI SOYA, KECAMATAN SIRIMAU, KOTA AMBON**

**Mariana Lewier, Falantino Eryk Latupapua, Grace Somelok,
Elsa Latupeirissa, Leonora Farilyn Pesiwarissa
Universitas Pattimura**

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan daya hidup bahasa *tana* sebagai bahasa adat di Maluku, yang telah berada dalam posisi kritis. Hal ini diasumsikan karena semakin bergesernya posisi bahasa *tana* dalam upacara-upacara adat yang lambat laun digantikan dengan bahasa Melayu Ambon (selanjutnya disingkat BMA). Lokasi penelitian bertempat di Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Masalah utama penelitian ini adalah vitalitas atau daya hidup bahasa *tana* sebagai bahasa adat dalam kaitan dengan jumlah penutur, wilayah persebaran, serta penggunaannya dalam ranah tertentu, termasuk sikap bahasa masyarakat pemakainya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori sosiolinguistik sebagai kajiannya. Pengumpulan data penelitian ini akan menggunakan tiga teknik, yaitu teknik kuesioner, wawancara mendalam, dan catatan lapangan, dengan menerapkan FGD untuk deskripsi mendalam tentang situasi kebahasaan dan karakteristik lingkungan alam, sosial, dan budaya, termasuk di dalamnya aspek mitologi dan sejarah. Penghitungan sikap bahasa dihitung dengan menggunakan skala Likert, sedangkan penggunaan bahasa menggunakan penghitungan SPSS 16.

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Negeri Soya memiliki sikap positif terhadap bahasa daerah (BMA dan bahasa *tana*), tetapi berbanding terbalik dengan penggunaan bahasa. Dalam penggunaan bahasa di Negeri Soya, pada ranah

keluarga, ranah sosial kemasyarakatan, ranah pendidikan, dan ranah agama lebih banyak menggunakan BMA dan BI. Sementara itu, penggunaan bahasa *tana* dalam upacara-upacara adat lebih banyak menggunakan gabungan bahasa *tana* dan BMA.

Kata Kunci: sikap bahasa, pemertahanan bahasa, bahasa *tana*, bahasa adat.

1. Pendahuluan

Kondisi objektif berbagai bahasa daerah di Indonesia dewasa ini, terutama bahasa-bahasa daerah yang berkedudukan sebagai bahasa ibu maupun bahasa kedua, semakin menunjukkan kecenderungan untuk mengalami penurunan jumlah penutur. Berkurangnya jumlah penutur secara simultan dapat membawa bahasa-bahasa daerah tersebut ke arah kematian, bahkan kepunahan bahasa. Grimes (2002:1) menyatakan bahwa punahnya suatu bahasa berarti punahnya suatu lingkungan manusia yang unik dari muka bumi.

Bahasa *tana* sebagai salah satu bahasa daerah yang telah lama digunakan dalam guyub tutur pada beberapa daerah di Maluku pada kenyataannya telah memasuki kondisi kritis. Kini, bahasa tersebut hanya digunakan sebagai bahasa pengantar dalam berbagai ritual adat yang berlangsung di dalam kelompok masyarakat tertentu dalam kurun waktu yang tidak tentu. Selain ranah penuturan yang semakin terbatas, teks-teks sastra lisan yang diartikulasikan dalam bahasa *tana* jumlahnya semakin sedikit dan terbatas; mulai sulit untuk dilacak keberadaan dan kelengkapannya, karena kendala pewarisan secara lisan dan kelemahan proses dokumentasi. Kenyataan tersebut dapat diduga sejak awal telah menempatkan daya hidup bahasa *tana* dalam posisi yang kritis. Latupapua, dkk (2012:33) menegaskan bahwa eksistensi bahasa *tana* dalam ranah adat dan ritual budaya telah sangat terancam. Penyebab utamanya adalah keberadaan usia para maestro atau penutur utama yang telah sangat tua, sementara proses pewarisan baik secara horizontal maupun vertikal tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Seluruh kondisi riil tersebut dapat dipandang sebagai ancaman serius yang dapat menghambat dan mematikan vitalitas bahasa *tana* sebagai bahasa adat dan alat komunikasi kultural di Maluku.

Di wilayah Pulau Ambon, salah satu negeri adat yang hingga saat ini masih cukup konsisten menjalankan berbagai ritual adat adalah Negeri Soya yang terletak di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Negeri Soya dikenal sebagai salah satu negeri adat dengan tatanan yang masih cukup terpelihara hingga kini. Ritual adat yang khas dan masih dipraktikkan hingga saat ini, antara lain cuci negeri, dan pelantikan raja. Dalam upacara-upacara adat tersebut bahasa *tana* telah dikenal sebagai bahasa pengantarnya.

Masalah utama penelitian ini adalah vitalitas atau daya hidup bahasa *tana* sebagai bahasa adat dalam kaitan dengan jumlah penutur, wilayah persebaran, serta penggunaannya dalam ranah tertentu, termasuk sikap bahasa masyarakat pemakainya. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut digunakan untuk merumuskan

model penanganan terhadap situasi kebahasaan tersebut dalam kaitan dengan upaya rekonstruksi dan revitalisasi bahasa *tana* di kalangan masyarakat penuturnya, jika memungkinkan.

2. Kerangka Teoretis

Sikap dalam KBBI mengacu pada tokoh atau bentuk tubuh, cara berdiri, perilaku atau gerak-gerik, perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, sedangkan sikap bahasa didefinisikan sebagai posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Sikap bahasa dapat digambarkan dari tindakan atau cara penutur memandang dan memperlakukan bahasanya. Namun, tidak hanya terbatas pada hal tersebut saja, karena secara luas sikap bahasa memungkinkan segala macam perilaku tentang bagaimana suatu bahasa diperlakukan termasuk sikap terhadap pemertahanan dan perencanaan bahasa.

Sikap bahasa memiliki tiga komponen, yakni komponen kognitif, afektif, dan konatif (Lambert dalam Chaer dan Leony, 2004:150). Komponen kognitif terbentuk melalui pemikiran—baik individu maupun kelompok—yang dihasilkan dari stereotip terhadap suatu bahasa dan pengguna bahasanya. Komponen afektif berkaitan dengan perasaan yang muncul terhadap suatu bahasa. Komponen perilaku berkaitan dengan dorongan perlakuan terhadap suatu bahasa, baik disadari maupun tidak.

Chaer dan Leony (2004:152—153) membagi sikap bahasa menjadi dua hal, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif bahasa diwujudkan dalam tiga hal, yakni (1) kesetiaan berbahasa, (2) kebanggaan berbahasa, dan (3) kesadaran akan adanya norma bahasa. Kesetiaan berbahasa mendorong masyarakat pemilik bahasa mempertahankan bahasanya serta mencegah pengaruh bahasa lain terhadap intensitas bahasanya. Kebanggaan berbahasa dibuktikan dengan penggunaan bahasa oleh masyarakat pemiliknya dalam aktivitas setiap hari sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Kesadaran norma bahasa dibuktikan dengan penggunaan bahasa oleh masyarakat pemiliknya secara cermat dan santun. Sementara itu, sikap negatif bahasa adalah kebalikan dari sikap positif, di mana sikap tersebut akan terjadi bila masyarakat pemiliknya tidak lagi mempunyai rasa bangga terhadap bahasanya sendiri dan kemudian mengalihkan ke bahasa lain yang dianggap lebih ber-*prestise*. Sikap negatif bahasa akan menyebabkan orang tidak mengacuhkan pembinaan dan pelestarian bahasanya. Apabila sikap negatif bahasa suatu masyarakat pemiliknya lebih besar daripada sikap positifnya, dipastikan bahasa tersebut akan bergeser atau perlahan menjadi punah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sikap bahasa adalah salah satu faktor yang menentukan kelangsungan hidup suatu bahasa.

Sikap bahasa umumnya ditandai dengan: (1) pemilihan bahasa dalam masyarakat yang multilingual, (2) distribusi perbendaharaan bahasa, dan (3) perbedaan-perbedaan dialektikal dan problema yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antara individu (Ditmar dalam Suwito, 1984:52). Dalam masyarakat yang multilingual, sikap bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain topik

pembicaraan, kelas sosial masyarakat pemakai, kelompok umur, jenis kelamin, dan situasi pemakaian. Pilihan bahasa yang digunakan dalam situasi yang berbeda, dengan topik pembicaraan yang berbeda, oleh penutur yang berasal dari kelas sosial, umur, dan jenis kelamin yang berbeda menentukan pula sikap bahasa mereka.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian penjajakan atau penelitian pendahuluan yang bersifat eksploratoris (*exploratory research*). Ditinjau dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena bahasa *tana* di Negeri Soya dari perspektif kebahasaan dan kebudayaan, terutama dalam kaitan dengan upaya pelestarian yang mengarah pada pewarisan dan pemertahanannya. Pengumpulan data penelitian ini akan menggunakan tiga teknik, yaitu teknik kuesioner, wawancara mendalam, dan catatan lapangan. *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menghasilkan deskripsi mendalam tentang situasi kebahasaan dan karakteristik lingkungan alam, sosial, dan budaya, termasuk di dalamnya aspek mitologi dan sejarah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah lembar kuesioner dan panduan wawancara.

Penelitian ini dilakukan di Negeri Soya, Pulau Ambon. Negeri Soya dipilih sebagai lokasi penelitian karena Negeri Soya sebagai salah satu negeri adat di Pulau Ambon masih menjalankan ritual adat dengan menggunakan bahasa *tana*. Namun, situasi multilingual karena adanya penggunaan bahasa daerah, bahasa Melayu-Ambon sebagai basantara (*lingua franca*), dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menyebabkan kedudukan bahasa *tana* di Soya berada dalam situasi diglosik yang berpengaruh besar terhadap ekologi bahasa.

4. Pembahasan

Sebagai penutur multilingual, masyarakat Negeri Soya juga memiliki sikap tersendiri untuk semua bahasa yang dimiliki, yakni bahasa Indonesia, bahasa Melayu Ambon, dan bahasa *tana* yang digunakan secara khusus sebagai bahasa komunikasi dalam ritual-ritual adat di negeri tersebut. Kuesioner yang disebarakan kepada 25 responden bertujuan untuk mengetahui sikap masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa daerah (dalam hal ini bahasa *tana*), penggunaan bahasa secara umum oleh masyarakat Negeri Soya, dan penggunaan bahasa *tana* secara khusus sebagai bahasa adat. Jumlah keseluruhan soal yang harus ditanggapi berjumlah 60 butir yang terdiri dari 15 pernyataan untuk sikap bahasa, 41 pertanyaan untuk penggunaan bahasa secara umum, dan 4 pertanyaan terakhir untuk penggunaan bahasa *tana* sebagai bahasa adat.

Untuk pernyataan yang berkaitan dengan sikap bahasa digunakan skala sikap yaitu melalui lima pilihan jawaban (*sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan tidak tahu*) untuk setiap instrumen. Hal ini bertujuan untuk mengukur apakah responden sangat setuju atau tidak setuju terhadap objek sikap. Untuk setiap ciri

karakteristik yang berkaitan dengan sikap bahasa dihitung berdasarkan frekuensi, persentase, dan nilai rerata (*mean*). Nilai rerata dihitung dengan menggunakan skala Likert, yaitu responden diminta melingkari salah satu pilihan pada skala penilaian 1–5 sesuai dengan pandangan responden. Nilai 1 untuk pilihan *tidak tahu*, nilai 2 untuk pilihan *tidak setuju*, nilai 3 untuk pilihan *kurang setuju*, nilai 4 untuk pilihan *setuju*, dan nilai 5 untuk pilihan *sangat setuju*. Nilai rerata untuk setiap pernyataan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(n1 \times 1) + (n2 \times 2) + (n3 \times 3) + (n4 \times 4) + (n5 \times 5)}{n1 + n2 + n3 + n4 + n5}$$

Nilai rerata tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni nilai 1,0–2,5 dianggap tidak setuju dan dikategorikan sebagai sikap negatif, sementara nilai 2,6–5,0 dianggap setuju dan dikategorikan sebagai sikap positif.

Berdasarkan hasil penghitungan kuesioner yang disebarkan kepada responden maka sikap masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa daerah adalah positif. Dari 15 pernyataan mengenai sikap bahasa yang diberikan kepada 25 responden, semua jawaban berada pada skala 2,6–5,0 dengan nilai rerata 4,2. Hasil penghitungannya akan dirincikan sebagai berikut:

Sikap Mengenai Bahasa Daerah sebagai Alat Komunikasi Sehari-hari dalam Kelompok maupun Luar Kelompok

No. Soal	Frekuensi					Rerata	Sikap Bahasa
	SS	S	KS	TS	TT		
1	13	11	0	1	0	4,4	Positif
2	1	14	7	2	1	3,48	Positif
3	9	15	0	0	1	4,24	Positif

Pernyataan nomor (1), (2), dan (3) digunakan untuk mengetahui tingkat persetujuan masyarakat Negeri Soya dalam menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi sehari-hari baik dalam kelompok masyarakat Negeri Soya maupun di luar kelompok masyarakat Negeri Soya. Nilai rerata untuk pernyataan (1) adalah 4,4; untuk pernyataan (2) adalah 3,48; dan untuk pernyataan (3) adalah 4,24. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai alat komunikasi antarsesama masyarakat Negeri Soya dan diharapkan juga dapat menjadi alat komunikasi ketika berinteraksi dengan masyarakat di luar Negeri Soya.

Sikap Mengenai Bahasa Daerah sebagai Alat Komunikasi dalam Ranah Keluarga

No. Soal	Frekuensi					Rerata	Sikap Bahasa
	SS	S	KS	TS	TT		
4	14	10	0	1	0	4,48	Positif
5	14	11	0	0	0	4,56	Positif

Pernyataan (4) dan (5) untuk mengetahui tingkat persetujuan masyarakat Negeri Soya terhadap fungsi bahasa daerah sebagai alat komunikasi di dalam ranah keluarga sekaligus persetujuan tindakan pewarisan bahasa daerah kepada generasi berikutnya. Nilai rerata pernyataan (4) adalah 4,48, dan pernyataan (5) adalah 4,56. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah dapat diterima serta menjalankan fungsinya dengan baik sebagai alat komunikasi di dalam keluarga sehingga diharapkan dapat tetap diwariskan untuk generasi berikutnya.

Sikap Mengenai Pemakaian Bahasa Daerah dalam Berbagai Ranah

No. Soal	Frekuensi					Rerata	Sikap Bahasa
	SS	S	KS	TS	TT		
6	8	16	0	1	0	4,24	Positif
7	1	7	13	4	0	3,2	Positif
8	2	11	9	3	0	3,48	Positif
9	3	12	10	0	0	3,72	Positif

Pernyataan (6) – (9) diajukan untuk mengetahui tingkat persetujuan masyarakat Negeri Soya terhadap pemakaian bahasa daerah dalam berbagai ranah. Yang dipakai sebagai patokan dalam hal ini adalah ranah pendidikan, ranah kesehatan, dan media massa. Nilai rerata pada pernyataan (6) adalah 4,24. Hal ini menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat Negeri Soya terhadap pelestarian dan pemertahanan bahasa daerah sehingga patut diajarkan di sekolah-sekolah. Pernyataan (7) adalah 3,2 sekaligus merupakan nilai rerata terendah untuk sikap bahasa. Meskipun demikian, masyarakat Negeri Soya tetap menyetujui pemakaian bahasa daerah dalam berinteraksi di puskesmas. Pernyataan (8) dan (9) berturut-turut adalah 3,48 dan 3,72. Hal ini menunjukkan kebanggaan masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa daerahnya sehingga layak digunakan sebagai alat komunikasi di media massa.

Sikap Mengenai Keberadaan Pemertahanan Bahasa Tana

oleh Masyarakat Negeri Soya

No. Soal	Frekuensi					Rerata	Sikap Bahasa
	SS	S	KS	TS	TT		
10	9	16	0	0	0	4,36	Positif
11	13	12	0	0	0	4,52	Positif
12	9	14	1	0	1	4,2	Positif

Pernyataan (10) – (13) digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Negeri Soya mengenai keberadaan bahasa daerah sebagai milik mereka yang mana upaya pelestariannya patut didukung oleh semua pihak. Nilai rerata pernyataan (10) adalah 4,36 dan masuk kategori positif. Sikap positif masyarakat

Negeri Soya menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai harapan yang tinggi kepada pemerintah agar dapat mendukung pemakaian bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari. Pernyataan (11) memiliki nilai rerata 4,52. Hal ini menunjukkan masyarakat Negeri Soya memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai keberadaan bahasa daerah sebagai warisan kekayaan yang patut dipertahankan. Upaya pemertahanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari. Pernyataan (12) memiliki nilai rerata 4,2. Hal ini menunjukkan harapan masyarakat Negeri Soya agar proses pewarisan bahasa daerah mereka dapat berjalan dengan baik, dibuktikan dengan penggunaan bahasa daerah oleh generasi muda dalam berkomunikasi sehari-hari. Pernyataan (13) memiliki nilai rerata tertinggi yakni 4,8. Hal ini menunjukkan masyarakat Negeri Soya sangat menyetujui tindakan pewarisan bahasa daerah dalam setiap kegiatan adat yang dilaksanakan di desa tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh untuk pernyataan (10) – (13), secara keseluruhan menunjukkan kesepakatan masyarakat Negeri Soya untuk mempertahankan bahasa daerah. Cara mereka mempertahankan bahasa daerah adalah dengan tetap menggunakan bahasa tersebut dalam aktivitas sehari-hari pada semua ranah sehingga terjadi proses pewarisan yang baik bagi generasi mereka berikutnya.

Pernyataan (14) dan (15) digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa daerah (bahasa *tana*) sebagai pengungkap jati diri mereka. Pernyataan (14) memiliki nilai rerata 4,52. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Negeri Soya yang tinggi terhadap keberadaan bahasa *tana* sebagai lambang identitas mereka. Kebanggaan mereka terhadap bahasa *tana* mendorong mereka untuk menghormatinya sebagai warisan leluhur yang patut untuk dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil angket pada pernyataan (15) yang menunjukkan rerata 4,72, di mana 72% responden menyatakan sangat bangga bila seluruh masyarakat Negeri Soya menghormati bahasa *tana* sebagai warisan leluhur.

Kepositifan sikap bahasa masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa *tana* merupakan hal yang signifikan untuk pemertahanan bahasa tersebut. Sebagaimana penjelasan Eastman (dalam Wulandari dan Sundari, 2012:iv) mengenai pemertahanan bahasa-sebagai suatu kondisi di mana pengguna bahasa dalam suatu komunitas bahasa melakukan usaha untuk mempertahankan suatu bahasa dengan cara memperluas penggunaannya sebagai sarana komunikasi ataupun meninggikan statusnya—masyarakat Negeri Soya dalam hal ini benar-benar menyadari keberadaan bahasa *tana* sebagai bagian dari identitas mereka serta mencerminkan kebudayaan mereka yang tinggi. Kesadaran mereka diwujudkan dalam usaha untuk mewariskan bahasa *tana* kepada anak cucu mereka, serta meninggikan status bahasa *tana* sebagai bahasa adat yang patut dihormati dan digunakan dengan baik dalam ranah-ranah adat. Mereka mempunyai harapan agar ranah pemakaian bahasa *tana* dapat diperluas bukan saja dalam ranah adat, melainkan juga dalam ranah-ranah yang lain agar keberadaan bahasa *tana* tetap terjaga.

4.1 Penggunaan Bahasa Masyarakat Negeri Soya

Mengacu pada faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa di atas, maka dalam penelitian ini penggunaan bahasa masyarakat Negeri Soya dilihat berdasarkan domain dan fungsi bahasanya. Domain yang dimaksud adalah lokasi, topik pembicaraan, dan partisipan. Sementara itu, fungsi bahasa yang internal dibatasi pada penggunaan bahasa ketika bermimpi dan menghitung dalam hati, sedangkan fungsi bahasa yang eksternal mencakup penggunaan bahasa di rumah, di luar rumah, di sekolah, di tempat-tempat layanan umum, dan di tempat ibadah.

Kuesioner penggunaan bahasa memiliki 41 pertanyaan yang terdiri dari beberapa bagian, yakni 22 pertanyaan (nomor 1–19, nomor 32 dan 40) membahas penggunaan bahasa di dalam ranah keluarga ketika responden berkomunikasi dengan anggota keluarga dan kerabat lainnya. Dua pertanyaan (nomor 20–21) membahas penggunaan bahasa oleh responden di luar rumah ketika berbicara dengan tetangga sesuku bangsa dan tetangga yang tidak sesuku bangsa. Empat pertanyaan (nomor 22–25) membahas penggunaan bahasa di tempat-tempat layanan umum seperti di kantor kelurahan, di puskesmas, di kantor pos, dan di pasar. Satu pertanyaan (nomor 26) membahas penggunaan bahasa responden di sekolah ketika berbicara dengan guru di dalam kelas maupun di luar kelas. Satu pertanyaan (nomor 27) membahas penggunaan bahasa di tempat ibadah ketika responden berbicara dengan sesama pengunjung tempat ibadah. Empat pertanyaan (nomor 28–31) membahas penggunaan bahasa ketika berbicara dengan orang yang memiliki status sosial lebih tinggi, dalam artian memiliki posisi terpandang dan dihormati di mata masyarakat, misalnya pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tetua adat. Dua pertanyaan (nomor 33–34, dan 41) membahas penggunaan bahasa ketika berada dalam situasi-situasi remi, misalnya dalam upacara adat dan upacara perayaan 17 Agustus. Dua pertanyaan (nomor 35–36) membahas penggunaan bahasa secara internal, yaitu ketika bermimpi dan berhitung dalam hati. Tiga pertanyaan (nomor 37–39) membahas penggunaan bahasa ketika responden berada dalam situasi marah. Hasil penghitungannya dirincikan sebagai berikut:

Penggunaan Bahasa dalam Ranah Keluarga

	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Sum	Mean	Std. Deviation
OptionA	21	2	1	3	43	2,05	,498
OptionB	21	1	1	2	23	1,10	,301
OptionC	21	5	3	8	131	6,24	1,091
OptionD	21	7	8	15	223	10,62	1,627
OptionE	21	3	0	3	33	1,57	,926
OptionF	21	3	2	5	66	3,14	1,014
OptionG	21	2	0	2	4	,19	,602
Valid N (listwise)	21						

Dari hasil penghitungan SPSS, nilai minimum yang didapat adalah 0 untuk option E (gabungan bahasa daerah, BMA, dan BI) serta option G (bahasa lain), sedangkan nilai maksimum adalah 15 untuk option D (gabungan BMA dan BI). Rerata yang didapat untuk nilai minimum adalah 1,57 dengan standar deviasi 0,926, dan 0,19 dengan standar deviasi 0,602. Sementara itu, untuk nilai maksimum adalah 10,62 dengan standar deviasi 1,627.

Berdasarkan jawaban dari 25 responden tersebut, kebanyakan bahasa yang digunakan di dalam ranah keluarga adalah gabungan BMA dan BI. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang memilih option D (gabungan BMA dan BI) sebanyak 60% dari jumlah keseluruhan. Penggunaan gabungan BMA dan BI dalam ranah keluarga akan ditampilkan dalam tabel berikut.

Penggunaan BMA dan BI Berdasarkan Partisipan dalam Ranah Keluarga

Descriptive Statistics

	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Sum	Mean	Std. Deviation
Ayah	7	8	1	9	25	3,57	3,101
Ibu	7	9	1	10	25	3,57	3,505
mertua_lelaki	7	11	0	11	25	3,57	3,780
mertua_perempuan	7	11	0	11	24	3,43	3,690
Kakek	7	9	0	9	25	3,57	3,101
Nenek	7	9	0	9	24	3,43	3,552
suami_istri	7	11	0	11	25	3,57	3,867
Anak	7	9	0	9	25	3,57	3,101
adik_perempuan	7	9	0	9	25	3,57	3,359
adik_lelaki	7	11	0	11	25	3,57	3,867
kakak_perempuan	7	11	0	11	24	3,43	3,867
kakak_lelaki	7	9	0	9	25	3,57	3,101
Bibi	7	10	0	10	25	3,57	3,690
Paman	7	10	0	10	25	3,57	3,599
kemenakandari_kakak	7	10	0	10	25	3,57	3,457
kemenakandari_adik	7	10	0	10	25	3,57	3,599
Ipar	7	12	0	12	25	3,57	4,315
Menantu	7	11	0	11	25	3,57	4,077
Cucu	7	10	0	10	25	3,57	3,823
pertemuan_keluarga	7	14	0	14	25	3,57	4,928
sesama_generasi_muda	7	15	0	15	25	3,57	5,127
Valid N (listwise)	7						

Penggunaan gabungan BMA dan BI tertinggi ketika terjadi komunikasi dengan sesama generasi muda dalam keluarga yaitu sebanyak 60%. Hal ini selain disebabkan mereka rata-rata masih menempuh pendidikan yang mengharuskan mereka menggunakan BI, juga disebabkan generasi muda dalam pergaulannya lebih suka menggunakan bahasa yang dianggap punya prestise dan dapat mengangkat derajat dirinya. Dalam hal ini bahasa yang dianggap ber-prestise adalah BI, sehingga mereka lebih banyak berkomunikasi menggunakan BI. Penggunaan BMA dikarenakan bahasa tersebut adalah B1 mereka, dan perannya sebagai *lingua franca* di Maluku.

Penggunaan Bahasa dalam Ranah Sosial Kemasyarakatan

Descriptive Statistics

	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Sum	Mean	Std. Deviation
OptionA	6	3	0	3	7	1,17	1,169
OptionB	6	2	0	2	6	1,00	,894
OptionC	6	8	0	8	17	2,83	3,371
OptionD	6	7	9	16	74	12,33	2,503
OptionE	6	2	0	2	5	,83	,983
OptionF	6	8	3	11	41	6,83	3,371
OptionG	6	0	0	0	0	,00	,000
Valid N (listwise)	6						

Berdasarkan hasil penghitungan SPSS, penggunaan bahasa tertinggi dalam ranah sosial kemasyarakatan adalah gabungan BMA dan BI yang memiliki nilai maksimum 16. Nilai minimum yaitu 0 (nol) dimiliki oleh option A (bahasa daerah) dengan nilai rerata 1,17, option B (bahasa daerah dan BMA) dengan nilai rerata 1,00, option C (BMA) dengan nilai rerata 2,83, option E (gabungan bahasa daerah, BMA, dan BI) dengan nilai rerata 0,83, dan option G (bahasa lain) dengan nilai rerata 0,00. Hasil ini menunjukkan masyarakat Negeri Soya selalu berkomunikasi dengan bahasa daerah (dalam hal ini bahasa *tana*), BMA, dan BI dalam ranah sosial kemasyarakatan. Perbedaannya hanya terdapat pada tingkat penggunaan bahasa masing-masing, yaitu bahasa daerah dengan nilai maksimum 3 yaitu sebanyak 12%, gabungan bahasa daerah dan BMA dengan nilai maksimum 2 yaitu sebanyak 8%, BMA dengan nilai maksimum sebanyak 8 yaitu sebanyak 32%, gabungan BMA dan BI dengan nilai maksimum 16 yaitu sebanyak 64%, gabungan bahasa daerah, BMA, dan BI dengan nilai maksimum 2 yaitu sebanyak 8%, BI dengan nilai maksimum 11 yaitu sebanyak 44%.

Penggunaan BMA dan BI Berdasarkan Lokasi dan Partisipan dalam Ranah Sosial Kemasyarakatan

Descriptive Statistics

Lokasi	Partisipan	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Sum	Mean	Std. Deviation
Luar rumah	tetangga_sesuku_bangsa	7	9	0	9	25	3,57	3,599
	tetangga_tidak_sesuku_bangsa	7	12	0	12	24	3,43	4,237
Kantor Lurah	pegawai_kelurahan	7	13	0	13	25	3,57	5,224
Puskesmas	pegawai_puskesmas	7	16	0	16	25	3,57	6,425
Kantor Pos	pegawai_kantor_pos	7	13	0	13	25	3,57	5,798
Pasar	Pedagang	7	10	0	10	25	3,57	3,359
	Valid N (listwise)	7						

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan gabungan BMA dan BI tertinggi ketika responden dan partisipan berkomunikasi di puskesmas dengan pegawai puskesmas dengan nilai maksimum 16 yaitu sebanyak 64% dari jumlah keseluruhan. Penggunaan BMA dalam hal ini mungkin terjadi ketika responden (yang BI-nya adalah BMA) mengonsultasikan kesehatannya kepada pegawai puskesmas. Penggunaan BI kemungkinan lebih banyak dilakukan oleh pegawai puskesmas karena tuntutan dalam dunia kerja untuk menggunakan BI sebagai bahasa nasional yang juga merupakan bahasa standar. Kemungkinan penggunaan gabungan BMA dan BI terjadi ketika pegawai puskesmas harus menjelaskan istilah-istilah kesehatan yang sulit dipahami oleh responden. Penjelasan tentang sesuatu hal biasanya lebih mudah dipahami penutur dengan bahasa pertamanya.

Penggunaan Bahasa dalam Ranah Pendidikan

Descriptive Statistics

	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Sum	Mean	Std. Deviation
OptionA	1	0	1	1	1	1,00.	.
OptionB	1	0	0	0	0	,00.	.
OptionC	1	0	0	0	0	,00.	.
OptionD	1	0	12	12	12	12,00.	.
OptionE	1	0	1	1	1	1,00.	.
OptionF	1	0	11	11	11	11,00.	.
OptionG	1	0	0	0	0	,00.	.
Valid N (listwise)	1						

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan dalam ranah pendidikan adalah gabungan BMA dan BI. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemerolehan nilai maksimum oleh option D (gabungan BMA dan BI) yaitu 12. Nilai minimum yaitu 0 diperoleh option A (bahasa daerah), option B (gabungan bahasa daerah dan BMA), option C (BMA), dan option G (bahasa lain). Peringkat berikut secara berturut diperoleh option F (BI) yaitu 11, diikuti option A (bahasa daerah) dan option E (gabungan bahasa daerah, BMA, dan BI) yaitu 1. Penggunaan gabungan BMA dan BI dapat dianalisis sebagai gambaran umum penggunaan bahasa dalam situasi formal maupun nonformal. Dalam situasi formal seperti rapat orang tua murid dan proses belajar-mengajar di kelas, penggunaan BI lebih diutamakan daripada BMA. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 36b, yang menyatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, maka seharusnya BI lebih banyak digunakan daripada bahasa daerah. Penggunaan BMA dalam ranah pendidikan kemungkinan terjadi dalam situasi santai di luar proses belajar-mengajar ataupun di luar situasi resmi lainnya.

Penggunaan Bahasa dalam Ranah Agama

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
OptionA	1	0	1	1	1	1,00.	.
OptionB	1	0	0	0	0	,00.	.
OptionC	1	0	3	3	3	3,00	.
OptionD	1	0	12	12	12	12,00.	.
OptionE	1	0	1	1	1	1,00.	.
OptionF	1	0	8	8	8	8,00.	.
OptionG	1	0	0	0	0	,00.	.
Valid N (listwise)	1						

Berdasarkan tabel di atas, nilai maksimum ditemukan pada option D (gabungan BMA dan BI) dengan jumlah 12. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam ranah agama, penggunaan bahasa tertinggi yaitu gabungan BMA dan BI. Hal ini dapat diartikan bahwa sering terjadi alih kode dan campur kode dalam ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Soya yang semuanya memeluk agama Kristen. Dalam suasana ibadah, kemungkinan penggunaan BI lebih tinggi dibandingkan BMA, dikarenakan masih dalam situasi resmi. Namun, tidak menutup kemungkinan alih kode dan campur kode antara BMA dan BI terjadi dalam penjelasan khotbah oleh pendeta atau majelis. Dalam situasi santai selepas ibadah kemungkinan penggunaan BMA lebih tinggi dibandingkan BI.

Penggunaan Bahasa Berdasarkan Partisipan

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
OptionA	4	3	0	3	5	1,25	1,500
OptionB	4	6	0	6	6	1,50	3,000
OptionC	4	4	0	4	6	1,50	1,915
OptionD	4	9	6	15	47	11,75	4,272
OptionE	4	4	0	4	10	2,50	1,915
OptionF	4	12	2	14	26	6,50	5,260
OptionG	4	0	0	0	0	,00	,000
Valid N (listwise)	4						

Berdasarkan tabel di atas, nilai maksimum ditemukan pada option D (gabungan BMA dan BI) senilai 15. Urutan kedua tertinggi ditemukan pada option F (BI) dengan nilai 14. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa oleh responden ketika berkomunikasi dengan partisipan yang memiliki status sosial tinggi masih berupa gabungan BMA dan BI.

Penggunaan Bahasa Secara Internal

Descriptive Statistics

	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Sum	Mean	Std. Deviation
OptionA	2	0	2	2	4	2,00	,000
OptionB	2	1	1	2	3	1,50	,707
OptionC	2	3	4	7	11	5,50	2,121
OptionD	2	1	10	11	21	10,50	,707
OptionE	2	1	1	2	3	1,50	,707
OptionF	2	4	1	5	6	3,00	2,828
OptionG	2	1	0	1	1	,50	,707
Valid N (listwise)	2						

Berdasarkan tabel di atas, nilai maksimum ditemukan pada option D (gabungan BMA dan BI) senilai 11. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Soya lebih banyak menggunakan gabungan BMA dan BI ketika bermimpi dan berhitung dalam hati. Dalam pemakaian bahasa secara tidak sadar, biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yakni gabungan BMA dan BI.

Penggunaan Bahasa Berdasarkan Suasana Hati

Descriptive Statistics

	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Sum	Mean	Std. Deviation
OptionA	3	1	1	2	5	1,67	,577
OptionB	3	2	1	3	6	2,00	1,000
OptionC	3	6	1	7	15	5,00	3,464
OptionD	3	5	10	15	36	12,00	2,646
OptionE	3	1	1	2	5	1,67	,577
OptionF	3	4	1	5	8	2,67	2,082
OptionG	3	0	0	0	0	,00	,000
Valid N (listwise)	3						

Berdasarkan hasil penghitungan SPSS, penggunaan bahasa berdasarkan suasana hati responden yang sedang marah, nilai paling tinggi ditemukan pada option D dengan nilai minimum 10 dan nilai maksimum 15. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sedang marah responden rata-rata lebih banyak menggunakan gabungan BMA dan BI. Hal ini dapat dimaklumi karena biasanya ketika kita sedang dalam kondisi emosi yang tidak bisa dikanaliskan, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.

4.2 Penggunaan Bahasa *Tana* sebagai Bahasa Adat

Untuk mengetahui penggunaan bahasa *tana* sebagai bahasa adat oleh masyarakat Negeri Soya, maka dibuat empat (4) pertanyaan terbuka kepada responden yang berkaitan dengan penggunaan bahasa *tana* dalam acara-acara adat

di Negeri Soya. Empat pertanyaan tersebut mengacu pada jawaban responden atas pertanyaan nomor (41) mengenai penggunaan bahasa dalam upacara adat di Negeri Soya yang memperoleh jawaban tertinggi gabungan bahasa daerah (bahasa *tana*) dan bahasa Melayu Ambon (option B). Rincian empat pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Jika menggunakan bahasa daerah/bahasa *tana* atau gabungan, ragam bagaimanakah yang digunakan?
- (2) Jika menggunakan bahasa daerah/bahasa *tana* atau gabungan dalam ragam lisan/tulisan, dari mana sumber teksnya?
- (3) Jika menggunakan bahasa daerah/bahasa *tana* atau gabungan, siapa saja yang menuturkannya?
- (4) Jika menggunakan bahasa daerah/bahasa *tana* atau gabungan, pada bagian manakah bahasa itu digunakan dalam upacara adat?

Jika dilihat dari keseluruhan jawaban responden mengenai keberadaan bahasa *tana* dalam penggunaannya sebagai bahasa adat, besar dugaan bahwa bahasa *tana* sedang mengalami pergeseran kedudukan sebagai bahasa adat. BMA yang biasanya digunakan dalam aktivitas keseharian sudah merambah masuk ke dalam wilayah penggunaan bahasa *tana*. Penyebabnya adalah hanya sebagian kecil dari masyarakat Soya yang mendapat pewarisan bahasa *tana*, yakni hanya orang-orang yang punya peran dalam acara-acara adat. Tidak adanya dokumen tertulis memperparah kedudukan bahasa *tana*. Berdasarkan pengakuan responden, ada beberapa kata dalam *kapata-kapata* adat yang sudah menggunakan kosakata BMA dikarenakan pewaris tidak lagi mengingat kosakata tersebut dalam bahasa *tana*. Hal ini bila tidak diperhatikan dan ditangani secepatnya, lambat laun bahasa *tana* yang penggunaannya sudah sempit (hanya digunakan dalam acara-acara adat) akan semakin digeser kedudukannya oleh BMA dan mengalami kepunahan.

4.3 Pemertahanan dan Pewarisan Bahasa *Tana* di Soya

Bahasa merupakan wahana yang paling signifikan untuk mengomunikasikan dan menjaga warisan takbenda dan kearifan lokal. Artinya, jika transmisi bahasa sebagai wahana tradisi lisan berhenti, berhenti pulalah transmisi tradisi lisan tersebut. Karena itu, ada hubungan yang erat antara perlindungan tradisi lisan dan bahasa. Hilangnya bahasa berarti hilangnya ciri kebahasaan yang unik dan juga menjadikan hilangnya tradisi lisan dan berakhir pada hilangnya kearifan lokal. Oleh sebab itu, *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003) menyatakan bahwa salah satu dari perlindungan warisan budaya takbenda ialah dimanifestasikannya perlindungan dalam ranah tradisi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda sehingga kearifan lokal yang melekat pada tradisi lisan masih bisa dipertahankan oleh kelompok pendukungnya.

5. Penutup

Sikap bahasa masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa *tana* sebagai bahasa adat menunjukkan sikap yang berbanding terbalik dengan penggunaan bahasa tersebut. Sikap positif dilihat dari jawaban para responden untuk 15 pertanyaan mengenai sikap bahasa, semua jawaban berada pada skala 2,6–5,0 dengan nilai rerata 4,2. Sementara itu, jawaban para responden untuk empat (4) pertanyaan terbuka kepada responden yang berkaitan dengan penggunaan bahasa *tana* dalam acara-acara adat di desa Soya menunjukkan bahwa mereka lebih banyak menggunakan gabungan Bahasa Melayu Ambon dan bahasa *tana*. Dalam hal ini, BMA yang bukan merupakan bahasa adat sudah merambah masuk ke dalam wilayah penggunaan bahasa *tana*. Proses pewarisan secara lisan dan tidak menyeluruh (untuk semua generasi) memperparah kedudukan bahasa *tana*. Bila tidak segera diperhatikan dan ditangani secara serius, bahasa *tana* akan semakin bergeser kedudukannya oleh BMA dan lambat laun akan mengalami kepunahan.

Meskipun demikian, masyarakat Negeri Soya menyadari bahwa bahasa *tana* yang selalu dipakai dalam kerangka adat-istiadat mereka adalah warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Mereka mempunyai harapan agar ranah pemakaian bahasa *tana* dapat diperluas bukan saja dalam ranah adat, melainkan juga dalam ranah-ranah yang lain agar keberadaan bahasa *tana* tetap terjaga. Kepositifan sikap bahasa masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa *tana* merupakan hal yang signifikan untuk pemertahanan bahasa tersebut.

Daftar Rujukan

- Budiawan. 2008. “Pengaruh Sikap Bahasa dan Motivasi Belajar Bahasa terhadap Prestasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Siswa SMA Se-Bandar Lampung”. Tesis. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fishman, J. A. 1972. *Language and Nationalism*. Massachusetts: Newbury House Publishers
- _____. 1999. *The Sociology of Language (22th edition)*. Rowley: Massachussets: Newbury House.
- Grimes, Barbara F. (2002). *Global Language Visability: Causes, Symptoms, and Cures for Endangered Languages* in [http:// www.sil.org/sociol/ndg-lg-indicators-html](http://www.sil.org/sociol/ndg-lg-indicators-html). Diakses tgl. 10 September 2013.

- Halliday, M.A.K. 2001. "New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics" dalam Muhlhausler, Peter and Alwin Fill (Eds.) *The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology, and Environment*. London and New York: Continuum.
- Holmes, Janet. 1993. "Language Maintenance and Shift in Three New Zealand Speech Community" dalam *Applied Linguistics*, vol. 14, No. 1. pp 13 - 20
- _____. 2001. *An Introduction of Sociolinguistics (Second Edition)*. Edinburg: Pearson Education Limited.
- Kamaluddin. 2011. "Bahasa Daerah di Indonesia". Artikel dalam www.kamaludinindonesia.wordpress.com. Diakses tanggal 2 Januari 2013.
- Richards J. C. & Schmidt, R. 2002. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (3rd Edition)*. Harlow: Longman.
- Sugiyono dan Sry Satria Tkatur Wisnu S. 2011. *Sikap Masyarakat Indonesia terhadap Bahasanya*. Yogyakarta: Elmatara Publishing
- Sumarsono. 2004. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Wijana, Putu, dan Muhammad Rohmadi. 2012. *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wiyanti, Sri. 2013. "Daya Hidup Bahasa Dialek Tengger" dalam *Prosiding Seminar Bahasa Ibu VI*. Denpasar: Program Studi Magister dan Doktor Linguistik, Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Penggunaan Bahasa Secara Internal

Descriptive Statistics

	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Sum	Mean	Std. Deviation
OptionA	2	0	2	2	4	2,00	,000
OptionB	2	1	1	2	3	1,50	,707
OptionC	2	3	4	7	11	5,50	2,121
OptionD	2	1	10	11	21	10,50	,707
OptionE	2	1	1	2	3	1,50	,707
OptionF	2	4	1	5	6	3,00	2,828
OptionG	2	1	0	1	1	,50	,707
Valid N (listwise)	2						

Berdasarkan tabel di atas, nilai maksimum ditemukan pada option D (gabungan BMA dan BI) senilai 11. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Soya lebih banyak menggunakan gabungan BMA dan BI ketika bermimpi dan berhitung dalam hati. Dalam pemakaian bahasa secara tidak sadar, biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yakni gabungan BMA dan BI.

Penggunaan Bahasa Berdasarkan Suasana Hati

Descriptive Statistics

	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Sum	Mean	Std. Deviation
OptionA	3	1	1	2	5	1,67	,577
OptionB	3	2	1	3	6	2,00	1,000
OptionC	3	6	1	7	15	5,00	3,464
OptionD	3	5	10	15	36	12,00	2,646
OptionE	3	1	1	2	5	1,67	,577
OptionF	3	4	1	5	8	2,67	2,082
OptionG	3	0	0	0	0	,00	,000
Valid N (listwise)	3						

Berdasarkan hasil penghitungan SPSS, penggunaan bahasa berdasarkan suasana hati responden yang sedang marah, nilai paling tinggi ditemukan pada option D dengan nilai minimum 10 dan nilai maksimum 15. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sedang marah responden rata-rata lebih banyak menggunakan gabungan BMA dan BI. Hal ini dapat dimaklumi karena biasanya ketika kita sedang dalam kondisi emosi yang tidak bisa dikanaliskan, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari.

4.2 Penggunaan Bahasa *Tana* sebagai Bahasa Adat

Untuk mengetahui penggunaan bahasa *tana* sebagai bahasa adat oleh masyarakat Negeri Soya, maka dibuat empat (4) pertanyaan terbuka kepada responden yang berkaitan dengan penggunaan bahasa *tana* dalam acara-acara adat

di Negeri Soya. Empat pertanyaan tersebut mengacu pada jawaban responden atas pertanyaan nomor (41) mengenai penggunaan bahasa dalam upacara adat di Negeri Soya yang memperoleh jawaban tertinggi gabungan bahasa daerah (bahasa *tana*) dan bahasa Melayu Ambon (option B). Rincian empat pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Jika menggunakan bahasa daerah/bahasa *tana* atau gabungan, ragam bagaimanakah yang digunakan?
- (2) Jika menggunakan bahasa daerah/bahasa *tana* atau gabungan dalam ragam lisan/tulisan, dari mana sumber teksnya?
- (3) Jika menggunakan bahasa daerah/bahasa *tana* atau gabungan, siapa saja yang menuturkannya?
- (4) Jika menggunakan bahasa daerah/bahasa *tana* atau gabungan, pada bagian manakah bahasa itu digunakan dalam upacara adat?

Jika dilihat dari keseluruhan jawaban responden mengenai keberadaan bahasa *tana* dalam penggunaannya sebagai bahasa adat, besar dugaan bahwa bahasa *tana* sedang mengalami pergeseran kedudukan sebagai bahasa adat. BMA yang biasanya digunakan dalam aktivitas keseharian sudah merambah masuk ke dalam wilayah penggunaan bahasa *tana*. Penyebabnya adalah hanya sebagian kecil dari masyarakat Soya yang mendapat pewarisan bahasa *tana*, yakni hanya orang-orang yang punya peran dalam acara-acara adat. Tidak adanya dokumen tertulis memperparah kedudukan bahasa *tana*. Berdasarkan pengakuan responden, ada beberapa kata dalam *kapata-kapata* adat yang sudah menggunakan kosakata BMA dikarenakan pewaris tidak lagi mengingat kosakata tersebut dalam bahasa *tana*. Hal ini bila tidak diperhatikan dan ditangani secepatnya, lambat laun bahasa *tana* yang penggunaannya sudah sempit (hanya digunakan dalam acara-acara adat) akan semakin digeser kedudukannya oleh BMA dan mengalami kepunahan.

4.3 Pemertahanan dan Pewarisan Bahasa *Tana* di Soya

Bahasa merupakan wahana yang paling signifikan untuk mengomunikasikan dan menjaga warisan takbenda dan kearifan lokal. Artinya, jika transmisi bahasa sebagai wahana tradisi lisan berhenti, berhenti pulalah transmisi tradisi lisan tersebut. Karena itu, ada hubungan yang erat antara perlindungan tradisi lisan dan bahasa. Hilangnya bahasa berarti hilangnya ciri kebahasaan yang unik dan juga menjadikan hilangnya tradisi lisan dan berakhir pada hilangnya kearifan lokal. Oleh sebab itu, *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003) menyatakan bahwa salah satu dari perlindungan warisan budaya takbenda ialah dimanifestasikannya perlindungan dalam ranah tradisi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda sehingga kearifan lokal yang melekat pada tradisi lisan masih bisa dipertahankan oleh kelompok pendukungnya.

5. Penutup

Sikap bahasa masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa *tana* sebagai bahasa adat menunjukkan sikap yang berbanding terbalik dengan penggunaan bahasa tersebut. Sikap positif dilihat dari jawaban para responden untuk 15 pertanyaan mengenai sikap bahasa, semua jawaban berada pada skala 2,6–5,0 dengan nilai rerata 4,2. Sementara itu, jawaban para responden untuk empat (4) pertanyaan terbuka kepada responden yang berkaitan dengan penggunaan bahasa *tana* dalam acara-acara adat di desa Soya menunjukkan bahwa mereka lebih banyak menggunakan gabungan Bahasa Melayu Ambon dan bahasa *tana*. Dalam hal ini, BMA yang bukan merupakan bahasa adat sudah merambah masuk ke dalam wilayah penggunaan bahasa *tana*. Proses pewarisan secara lisan dan tidak menyeluruh (untuk semua generasi) memperparah kedudukan bahasa *tana*. Bila tidak segera diperhatikan dan ditangani secara serius, bahasa *tana* akan semakin bergeser kedudukannya oleh BMA dan lambat laun akan mengalami kepunahan.

Meskipun demikian, masyarakat Negeri Soya menyadari bahwa bahasa *tana* yang selalu dipakai dalam kerangka adat-istiadat mereka adalah warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Mereka mempunyai harapan agar ranah pemakaian bahasa *tana* dapat diperluas bukan saja dalam ranah adat, melainkan juga dalam ranah-ranah yang lain agar keberadaan bahasa *tana* tetap terjaga. Kepositifan sikap bahasa masyarakat Negeri Soya terhadap bahasa *tana* merupakan hal yang signifikan untuk pemertahanan bahasa tersebut.

Daftar Rujukan

- Budiawan. 2008. “Pengaruh Sikap Bahasa dan Motivasi Belajar Bahasa terhadap Prestasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Siswa SMA Se-Bandar Lampung”. Tesis. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fishman, J. A. 1972. *Language and Nationalism*. Massachusetts: Newbury House Publishers
- _____. 1999. *The Sociology of Language (22th edition)*. Rowley: Massachusetts: Newbury House.
- Grimes, Barbara F. (2002). *Global Language Visability: Causes, Symptoms, and Cures for Endangered Languages* in [http:// www.sil.org/sociol/ndg-lg-indicators-html](http://www.sil.org/sociol/ndg-lg-indicators-html). Diakses tgl. 10 September 2013.

- Halliday, M.A.K. 2001. "New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics" dalam Muhlhausler, Peter and Alwin Fill (Eds.) *The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology, and Environment*. London and New York: Continuum.
- Holmes, Janet. 1993. "Language Maintenance and Shift in Three New Zealand Speech Community" dalam *Applied Linguistics*, vol. 14, No. 1. pp 13 - 20
- _____. 2001. *An Introduction of Sociolinguistics (Second Edition)*. Edinburg: Pearson Education Limited.
- Kamaluddin. 2011. "Bahasa Daerah di Indonesia". Artikel dalam www.kamaludinindonesia.wordpress.com. Diakses tanggal 2 Januari 2013.
- Richards J. C. & Schmidt, R. 2002. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (3rd Edition)*. Harlow: Longman.
- Sugiyono dan Sry Satria Tkatur Wisnu S. 2011. *Sikap Masyarakat Indonesia terhadap Bahasanya*. Yogyakarta: Elmatara Publishing
- Sumarsono. 2004. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Wijana, Putu, dan Muhammad Rohmadi. 2012. *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wiyanti, Sri. 2013. "Daya Hidup Bahasa Dialek Tengger" dalam *Prosiding Seminar Bahasa Ibu VI*. Denpasar: Program Studi Magister dan Doktor Linguistik, Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

**GAGASAN REVITALISASI AKSARA JAWA
PADA VISUAL KONTEMPORER
*CARAKAN GARUDA PANCASILA***

Dyah Nurhayati

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung

Abstrak

Dewasa ini isu kontemporer memberikan pengaruh tersendiri bagi karya desain komunikasi visual. Seni kontemporer identik dengan konsep modernisme yang bersifat plural, sehingga jika ditelaah lebih lanjut dapat memberi peluang pengembangan unsur dari nilai-nilai tradisi yang dirasa sudah tidak ada gaungnya dan perlu dihadirkan kembali melalui upaya revitalisasi, agar keberadaanya tidak hanya membawa bentuk visual baru, namun juga membawa konsep lokal adiluhung yang sarat makna. Pada penelitian ini, konsep lokal aksara Jawa, salah satu aksara daerah yang perkembangannya pesat di Nusantara menjadi pilihan yang menarik perhatian bagi sebuah karya visual, khususnya kontemporer. Aksara Jawa lekat dengan unsur budaya yang mampu menjadi inspirasi dalam sebuah karya visual kontemporer Carakan Garuda Pancasila. Metode yang digunakan adalah pendekatan Ikonografis; dengan 3 (tiga) tahapan yaitu deskripsi pra ikonografis (pokok bahasan primer), analisis ikonografis (pokok bahasan sekunder atau konvensional) dan interpretasi ikonologis (makna intrinsik). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya revitalisasi dapat memberikan pengetahuan pentingnya pengembangan nilai-nilai lokal dengan konten tradisi sebagai wacana visual baru pada media kontemporer saat ini.

Kata kunci : Aksara Jawa, konsep lokal, kontemporer, tradisi

Abstract

Today contemporary issues impact of its own for the work of design visual communication. The contemporary art identical to the concept that is plural modernism, so if review further can provide opportunities in development elements from the traditional values existing are there is no gaungnya and need to be made present back through the effort to revitalize the, that known not only bring a visual form new but also bringing a conception local adhiluhung laden meaning. In this study, the concept of java local character, one character regions progress gains in Nusantara be an option that attracts attention for a of visual works of, especially contemporary. Character java attaching with an element of cultural capable of being inspired in a work of visual contemporary carakan garuda pancasila. Methods used is the approach ikonografis; with 3 (three stage that is a description of pre ikonografis (basic) subjects of primary, analysis (basic ikonografis subjects of secondary or conventional) and interpretation of ikonologis (meaning intrinsic). This research result indicates that the effort to revitalize the can provide knowledge the importance of developing values local to content tradition as discourse visual new in a media contemporary now.

Keyword: *character java, the concept of local, contemporary, tradition*

1. Pendahuluan

Aksara daerah merupakan salah satu kekayaan Nusantara yang keberadaannya saat ini sudah mulai diabaikan, dalam arti khusus tidak digunakan secara intens dalam keseharian sehingga dampaknya lambat laun terlupakan.

Bicara mengenai aksara, tidak bisa lepas dari sebuah simbol, simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya. Menarik dicermati bahwa setiap aksara memiliki karakter masing-masing, dan perkembangannya yang paling pesat terdapat pada aksara Jawa atau biasa disebut hanacaraka, setidaknya aksara Jawa masih menjadi salah satu kurikulum muatan lokal daerah di Sekolah Dasar di wilayah Jawa Tengah, tanpa terkecuali Yogyakarta dan sekitarnya. Namun, data menunjukkan bahwa bahasa Jawa (termasuk didalamnya aksara jawa) sebagai mata pelajaran sering dikesampingkan karena hanya termasuk muatan lokal (Sukmadinata, 1997:5) kurang dianggap penting. Selain kondisi tersebut, juga terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap kurang optimalnya revitalisasai (pembelajaran bahasa dan aksara Jawa) yaitu minimnya media persuasi akan hal itu.

Penelitian ini mencoba menelaah bentuk media yang ada pada masyarakat terkait konsep lokal pada visual kontemporer, dengan studi kasus objek aksara Jawa. Penelitian ini dapat memberikan ragam bentuk baru sebagai bagian dari penyebaran nilai tradisi aksara Jawa. Aksara Jawa telah menghiasi kebudayaan tulis sejak jaman dahulu, perkembangannya terus terjaga. Selain itu, agar masyarakat lebih mencintai

budaya leluhur. Diharapkan muncul desain baru yang terinspirasi oleh bentuk kajian ini dengan aksara daerah lain yang ada di Indonesia.

Berangkat dari kegelisahan, bagaimana bentuk dan makna simbolis yang terdapat pada visual kontemporer *Carakan Garuda Pancasila*?

Beberapa indikator operasional yang membantu membatasi penelitian ini, di antaranya 1. *Interpretasi* adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan. 2. *Konsep Lokal* merupakan sesuatu hal yang telah melekat pada masyarakat dan telah menjadi ciri khas di daerah tertentu secara turun-temurun dan telah diakui oleh masyarakat. 3. *Aksara Jawa*, salah satu ragam kekayaan Indonesia yang juga bagian identitas bangsa dan harus dilestarikan. 4. *Visual* adalah salah satu cara mengorganisasikan pemikiran dan meningkatkan kemampuan berpikir dan komunikasi. 5. *Kontemporer* merupakan salah satu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi. Kontemporer itu artinya kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini; jadi seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang.

Lingkup batasan penelitian ini adalah karya visual kontemporer yang mengandung unsur nilai atau konsep konten lokal “aksara Jawa” dalam hal ini aksara hancaraka. Objek yang menjadi kajian pada penelitian ini ialah karya kontemporer, *Carakan Garuda Pancasila* dengan teks aksara Jawa dan punakawan, seperti gambar berikut:



Gb. 1. Carakan Garuda Pancasila

Sumber : <https://jakarta45.wordpress.com/bentuk-aksara-jawa/>

2. Pembahasan

2.1 Aksara Jawa Perkembangan Saat Ini

Aksara Jawa sampai sekarang masih diajarkan di sekolah-sekolah wilayah berbahasa Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, sebagai bagian dari muatan lokal kelas 3 hingga 5 SD. Walaupun demikian, penggunaan sehari-hari, seperti dalam media cetak atau televisi, masih sangat terbatas dan terdesak oleh penggunaan aksara Latin yang lebih mudah diakses. Beberapa surat kabar dan majalah lokal memiliki kolom yang menggunakan aksara Jawa. Namun selain itu, usaha-usaha revitalisasi hanya bersifat simbolik dan tidak fungsional, seperti pada penulisan nama jalan. Salah satu penghambatnya adalah tidak adanya pengembangan ortografi dan tipografi aksara, serta digitalisasi komputer yang sulit dilakukan karena kompleksitas aksara Jawa. (*id.wikipedia.org*)

Aksara Jawa pada visual kontemporer, menjadi magnet era modern saat ini, untuk upaya sekedar pengenalan kembali kekayaan Nusantara ini atau sebagai bentuk revitalisasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu pencarian fakta dengan membuat pecandran (interpretasi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat objek penelitian (Suryabrata, 2004:75). Untuk mencapai ketepatan dalam mengoperasikan terdapat tiga tahapan, yaitu: deskripsi pre-ikonografis, analisis ikonografis, dan interpretasi ikonologis, Ponofsky merumuskan langkah-langkah tersebut kedalam sebuah tabel yang memudahkan kita dalam melakukan analisis:

Dalam mengungkap fenomena seni dalam sebuah karya visual, dalam *Meaning in the Visual Arts* (1955) Erwin Panofsky menawarkan sebuah “kaca mata” yang cukup komprehensif kepada kita. Dengan mentransfer hasil-hasil analisis mengenai kehidupan sehari-hari ke dalam sebuah karya seni, kita dapat membedakan dalam pokok bahasan melalui tiga strata yang sama. Adapun tahapannya ialah:

1. Pertama adalah pokok bahasan primer atau alami, yaitu sebuah pemaparan yang bersifat faktual dan ekspresional. Ini dipahami dengan mengidentifikasi bentuk secara murni, yaitu konfigurasi tertentu dari garis dan warna, arah, tekstur, sebagai representasi atas objek alami seperti manusia, binatang, tanaman, rumah, peralatan, dan sebagainya. Dunia bentuk murni yang kemudian dikenali sebagai pembawa makna primer atau alami disebut dunia dari motif artistik. Penyebutan satu per satu dari motif ini akan menjadi deskripsi *pra-ikonografis* dari sebuah karya seni.
2. Kedua, pokok bahasan sekunder atau konvensional. Dalam tataran ini kita menghubungkan motif artistik dan kombinasi dari motif artistik (komposisi) dengan tema atau konsep. Motif yang selanjutnya dikenali sebagai pembawa makna sekunder atau konvensional dapat disebut imaji/gambaran, dan

**GAGASAN REVITALISASI AKSARA JAWA
PADA VISUAL KONTEMPORER
*CARAKAN GARUDA PANCASILA***

Dyah Nurhayati

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung

Abstrak

Dewasa ini isu kontemporer memberikan pengaruh tersendiri bagi karya desain komunikasi visual. Seni kontemporer identik dengan konsep modernisme yang bersifat plural, sehingga jika ditelaah lebih lanjut dapat memberi peluang pengembangan unsur dari nilai-nilai tradisi yang dirasa sudah tidak ada gaungnya dan perlu dihadirkan kembali melalui upaya revitalisasi, agar keberadaanya tidak hanya membawa bentuk visual baru, namun juga membawa konsep lokal adiluhung yang sarat makna. Pada penelitian ini, konsep lokal aksara Jawa, salah satu aksara daerah yang perkembangannya pesat di Nusantara menjadi pilihan yang menarik perhatian bagi sebuah karya visual, khususnya kontemporer. Aksara Jawa lekat dengan unsur budaya yang mampu menjadi inspirasi dalam sebuah karya visual kontemporer Carakan Garuda Pancasila. Metode yang digunakan adalah pendekatan Ikonografis; dengan 3 (tiga) tahapan yaitu deskripsi pra ikonografis (pokok bahasan primer), analisis ikonografis (pokok bahasan sekunder atau konvensional) dan interpretasi ikonologis (makna intrinsik). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya revitalisasi dapat memberikan pengetahuan pentingnya pengembangan nilai-nilai lokal dengan konten tradisi sebagai wacana visual baru pada media kontemporer saat ini.

Kata kunci : Aksara Jawa, konsep lokal, kontemporer, tradisi

Abstract

Today contemporary issues impact of its own for the work of design visual communication. The contemporary art identical to the concept that is plural modernism, so if review further can provide opportunities in development elements from the traditional values existing are there is no gaungnya and need to be made present back through the effort to revitalize the, that known not only bring a visual form new but also bringing a conception local adhiluhung laden meaning. In this study, the concept of java local character, one character regions progress gains in Nusantara be an option that attracts attention for a of visual works of, especially contemporary. Character java attaching with an element of cultural capable of being inspired in a work of visual contemporary carakan garuda pancasila. Methods used is the approach ikonografis; with 3 (three stage that is a description of pre ikonografis (basic) subjects of primary, analysis (basic ikonografis subjects of secondary or conventional) and interpretation of ikonologis (meaning intrinsic). This research result indicates that the effort to revitalize the can provide knowledge the importance of developing values local to content tradition as discourse visual new in a media contemporary now.

Keyword: *character java, the concept of local, contemporary, tradition*

1. Pendahuluan

Aksara daerah merupakan salah satu kekayaan Nusantara yang keberadaannya saat ini sudah mulai diabaikan, dalam arti khusus tidak digunakan secara intens dalam keseharian sehingga dampaknya lambat laun terlupakan.

Bicara mengenai aksara, tidak bisa lepas dari sebuah simbol, simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya. Menarik dicermati bahwa setiap aksara memiliki karakter masing-masing, dan perkembangannya yang paling pesat terdapat pada aksara Jawa atau biasa disebut hanacaraka, setidaknya aksara Jawa masih menjadi salah satu kurikulum muatan lokal daerah di Sekolah Dasar di wilayah Jawa Tengah, tanpa terkecuali Yogyakarta dan sekitarnya. Namun, data menunjukkan bahwa bahasa Jawa (termasuk didalamnya aksara jawa) sebagai mata pelajaran sering dikesampingkan karena hanya termasuk muatan lokal (Sukmadinata, 1997:5) kurang dianggap penting. Selain kondisi tersebut, juga terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap kurang optimalnya revitalisasi (pembelajaran bahasa dan aksara Jawa) yaitu minimnya media persuasi akan hal itu.

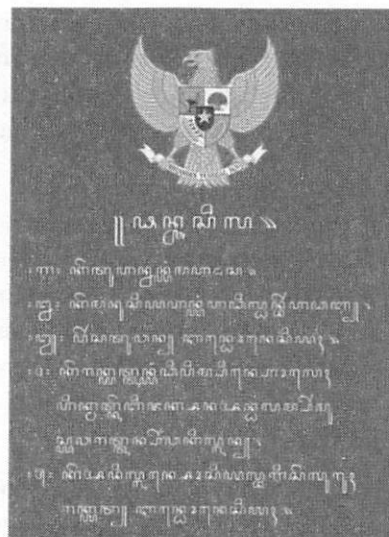
Penelitian ini mencoba menelaah bentuk media yang ada pada masyarakat terkait konsep lokal pada visual kontemporer, dengan studi kasus objek aksara Jawa. Penelitian ini dapat memberikan ragam bentuk baru sebagai bagian dari penyebaran nilai tradisi aksara Jawa. Aksara Jawa telah menghiasi kebudayaan tulis sejak jaman dahulu, perkembangannya terus terjaga. Selain itu, agar masyarakat lebih mencintai

budaya leluhur. Diharapkan muncul desain baru yang terinspirasi oleh bentuk kajian ini dengan aksara daerah lain yang ada di Indonesia.

Berangkat dari kegelisahan, bagaimana bentuk dan makna simbolis yang terdapat pada visual kontemporer *Carakan Garuda Pancasila*?

Beberapa indikator operasional yang membantu membatasi penelitian ini, di antaranya 1. *Interpretasi* adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan. 2. *Konsep Lokal* merupakan sesuatu hal yang telah melekat pada masyarakat dan telah menjadi ciri khas di daerah tertentu secara turun-temurun dan telah diakui oleh masyarakat. 3. *Aksara Jawa*, salah satu ragam kekayaan Indonesia yang juga bagian identitas bangsa dan harus dilestarikan. 4. *Visual* adalah salah satu cara mengorganisasikan pemikiran dan meningkatkan kemampuan berpikir dan komunikasi. 5. *Kontemporer* merupakan salah satu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi. Kontemporer itu artinya kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini; jadi seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang.

Lingkup batasan penelitian ini adalah karya visual kontemporer yang mengandung unsur nilai atau konsep konten lokal “aksara Jawa” dalam hal ini aksara hancaraka. Objek yang menjadi kajian pada penelitian ini ialah karya kontemporer, *Carakan Garuda Pancasila* dengan teks aksara Jawa dan punakawan, seperti gambar berikut:



Gb. 1. Carakan Garuda Pancasila

Sumber : <https://jakarta45.wordpress.com/bentuk-aksara-jawa/>

2. Pembahasan

2.1 Aksara Jawa Perkembangan Saat Ini

Aksara Jawa sampai sekarang masih diajarkan di sekolah-sekolah wilayah berbahasa Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, sebagai bagian dari muatan lokal kelas 3 hingga 5 SD. Walaupun demikian, penggunaan sehari-hari, seperti dalam media cetak atau televisi, masih sangat terbatas dan terdesak oleh penggunaan aksara Latin yang lebih mudah diakses. Beberapa surat kabar dan majalah lokal memiliki kolom yang menggunakan aksara Jawa. Namun selain itu, usaha-usaha revitalisasi hanya bersifat simbolik dan tidak fungsional, seperti pada penulisan nama jalan. Salah satu penghambatnya adalah tidak adanya pengembangan ortografi dan tipografi aksara, serta digitalisasi komputer yang sulit dilakukan karena kompleksitas aksara Jawa. (*id.wikipedia.org*)

Aksara Jawa pada visual kontemporer, menjadi magnet era modern saat ini, untuk upaya sekedar pengenalan kembali kekayaan Nusantara ini atau sebagai bentuk revitalisasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu pencarian fakta dengan membuat pecandaraan (interpretasi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat objek penelitian (Suryabrata, 2004:75). Untuk mencapai ketepatan dalam mengoperasikan terdapat tiga tahapan, yaitu: deskripsi pre-ikonografis, analisis ikonografis, dan interpretasi ikonologis, Ponofsky merumuskan langkah-langkah tersebut kedalam sebuah tabel yang memudahkan kita dalam melakukan analisis:

Dalam mengungkap fenomena seni dalam sebuah karya visual, dalam *Meaning in the Visual Arts* (1955) Erwin Panofsky menawarkan sebuah “kaca mata” yang cukup komprehensif kepada kita. Dengan mentransfer hasil-hasil analisis mengenai kehidupan sehari-hari ke dalam sebuah karya seni, kita dapat membedakan dalam pokok bahasan melalui tiga strata yang sama. Adapun tahapannya ialah:

1. Pertama adalah pokok bahasan primer atau alami, yaitu sebuah pemaparan yang bersifat faktual dan ekspresional. Ini dipahami dengan mengidentifikasi bentuk secara murni, yaitu konfigurasi tertentu dari garis dan warna, arah, tekstur, sebagai representasi atas objek alami seperti manusia, binatang, tanaman, rumah, peralatan, dan sebagainya. Dunia bentuk murni yang kemudian dikenali sebagai pembawa makna primer atau alami disebut dunia dari motif artistik. Penyebutan satu per satu dari motif ini akan menjadi deskripsi *pra-ikonografis* dari sebuah karya seni.
2. Kedua, pokok bahasan sekunder atau konvensional. Dalam tataran ini kita menghubungkan motif artistik dan kombinasi dari motif artistik (komposisi) dengan tema atau konsep. Motif yang selanjutnya dikenali sebagai pembawa makna sekunder atau konvensional dapat disebut imaji/gambaran, dan

kombinasi dari gambar-gambar adalah apa yang disebut ahli teori seni kuno sebagai *invenzioni*: biasa menyebut mereka cerita dan alegori (lambing). Identifikasi ini adalah domain dari apa yang secara normal mengacu pada *ikonografi*.

3. Ketiga, makna intrinsik atau isi. Tataran ini dapat dipahami dengan menegaskan prinsip dasar yang memaparkan perilaku dasar dari suatu bangsa, zaman, kelas, persuasi filosofis atau religiusitas tertentu yang dikualifikasikan oleh satu kepribadian dalam sebuah karya seni. Interpretasi yang sangat mendalam dari makna atau isi intrinsik mungkin menunjukkan bahwa karakter prosedur teknis dari bangsa, zaman, atau seniman tersebut bersifat gejala dari perilaku dasar yang sama yang dapat dilihat di semua kualifikasi khusus lain penciptanya.

Dari ketiga fase tersebut semua memiliki pertautan erat yang bersifat *prerequisite* atau prasyarat dari fase satu terhadap fase selanjutnya. Dengan kata lain, sebagai identifikasi deskriptif yang benar dari motif adalah prasyarat akan analisis ikonografis yang tepat, demikian halnya analisis yang tepat akan imaji, cerita, dan alegori adalah prasyarat dari interpretasi ikonologis yang benar.

Objek Interpretasi	Aksi Interpretasi	Objek : Carakan Garuda Pancasila
I. Pokok bahasan primer atau alami—(A) faktual, (B) ekspresional menyusun dunia motif artistic	<i>Deskripsi pra-ikonografi</i> (dan analisis pseudo-formal	Adalah tahapan deskripsi, dimana dilakukan pengamatan dan menguraikan sebuah karya tanpa membuat penilaian atau kesimpulan.
III. pokok bahasan sekunder atau konvensional, menyusun dunia gambar, cerita, dan alegori	<i>Analisis ikonografis</i>	Tahapan analisis formal, membahas bagaimana elemen-elemen dasar dalam suatu karya terjalin menjadi sebuah susunan halaman atau <i>layout</i> .
III. makna intrinsik atau isi, menyusun dunia nilai “simbolis	<i>Interpretasi ikonologis</i>	Adalah tahap interpretasi dan evaluasi. Interpretasi, menafsirkan makna suatu karya. Kemudian tahapan akhir, yakni tahapan evaluasi.

3. Penutup

Kesimpulan menunjukkan bahwa penelitian terkait visual kontemporer *Carakan Garuda Pancasila*:

1. Dapat memberikan pengetahuan mengenai konsepsi lokal pada bentuk visual kontemporer.
2. Penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mendesain karya kontemporer terinspirasi nilai tradisi, konsep lokal aksara daerah manapun di Nusantara.
3. Garuda Pancasila dengan penerapan aksara Jawa menjadi bukti nyata kekayaan budaya Nusantara yang adiluhung, patut dilestarikan dalam beragam media, termasuk salah satunya media visual kontemporer (dalam hal ini poster).

Daftar Pustaka

Nana, Syaodih *Sukmadinata*. 1997. Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja. Rosda Karya.

Read, Herbert. 1972. *The Meaning of Art*, New York, Washington: Praeger Publisher.

Sachari, Agus. 2007. Budaya Visual Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Soekiman, Djoko. 2000. Kebudayaan Indis. Yogyakarta: Bentang.

<https://kaligrafiantik.wordpress.com/2012/12/01/kaligrafikontemporer/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Aksara_Jawa

<http://wisatahandal.com/tips-wisata/cara-sederhana-agar-foto-travelingmu-lebih-hidup/>

https://id.wikibooks.org/wiki/Pengantar_aksara_Jawa

<http://pintaraksarajawa.com/belajar/carakan>

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 3

Hari, tanggal	: Jumat, 8 September 2017
Waktu	: Pukul 10.30—12.30
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	: Rudi Fofid
Pemakalah I	: Dr. Ariesa Pandanwangi
Pemakalah II	: Ratih Rahayu, M.Hum.
Pemakalah III	: Dyah Nurhayati, M.Sn.
Pemakalah IV	: Dr. Romilda da Costa
Notulis	: Wa Ode Liana
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra.

Makalah I

**PELUANG DAN TANTANGAN MUATAN LOKAL
BAHASA VISUAL KEPADA MASYARAKAT
DI ERA GLOBALISASI**

Penelitian ini dilakukan di Nias dengan sistem konstruksi. Ada 2 macam rumah tinggal yang dihuni yaitu Omoniha dan Omosebuah/Bangsawan). Di daerah Nias, bahasa Omosebua menjadi mata pelajaran mulok.

Bahasa visual menjadi pintu masuk dari kolong rumah atau tanda, harus tunduk kepada pemilik rumah. Kesimpulannya, bahasa visual adalah alat untuk membaca gambar. Gambar yang disampaikan kepada apresiator. Bisa gambar anak,

dan lain-lain. Kesenian bahasa ini menjadi sumbangan nasional dan menjadi seni rupa, bahasa visual harus dilakukan selain bahasa daerah.

Tanggapan:

1. Terkait dengan antropologi visual tentang pasak bumi, apakah hubungan kayu itu lepas atau bersambung dengan sesuatu yang mengikat antara satu dengan lainnya?
2. Apakah masuk lewat bawah kolong hanya untuk orang-orang atas atau juga untuk rakyat biasa?

Jawaban:

Hanya berdasarkan cerita lisan secara turun temurun. Sebelum membuat rumah mengadakan upacara terlebih dahulu. Ketinggian rumah *Omo sebua* 40 meter menandakan pemilik rumah ini adalah golongan bangsawan. Sedangkan untuk rumah rakyat biasa ditandai dengan: pintu untuk masuk dari sebelah samping rumah sebelah kiri dan kanan. Karena sudah memiliki konsep dalam hal ini pengamanan agar ketika ada pencuri yang masuk rumah tidak dapat menemukan jalan keluar. Bahasa visual juga bisa masuk ke sekolah-sekolah dan seni-seni dan menjadi mata pelajaran semacam seni rupa dan lain sebagainya. Bahasa visual yang banyak digunakan seperti Nias dan Karo (menjadi mata pelajaran), bahasa rupa (seperti wayan tradisional).

Makalah II

KONDISI BAHASA LAMPUNG KINI, ESOK, DAN NANTI

Ada polemik dengan dibukanya program studi musik. Sedangkan bahasa Lampung tidak disetujui untuk digunakan pada perguruan tinggi UNILA karena diperkirakan kurangnya tenaga kerja bahasa Lampung dan menjadi penyebab guru tidak paham bahasa Lampung. Kepunahan bahasa Lampung diprediksikan terjadi 75 atau 100 tahun lagi. Tahun 2094 Lampung sudah berpenduduk sangat banyak sehingga penuturnya bisa saja tidak lagi menggunakan bahasa Lampung. Menyikapi punahnya bahasa Lampung ini maka pemerintah Memiliki payung hukum untuk melestarikan bahasa Lampung, pemerintah mencetuskan pelajaran muatan lokal bahasa Lampung ke sekolah-sekolah.

Harapan kami, pemerintah Lampung dapat mennyosialisasikan sapaan salam pada bahasa Lampung, mengevaluasi perencanaan pembinaan bahasa Lampung, mengusahakan agar ada penerbitan buku berbahasa Lampung.

Banyak ahli yang sudah melakukan usaha pelestarian, hanya saja Pemda Lampung belum banyak melakukan sosialisasi. Kurangnya tenaga pengajar untuk

mengajarkan bahasa Lampung juga menjadi kendala. Agar bahasa Lampung tetap lestari maka sepantasnya apa yang diusahakan para ahli selalu diaplikasikan dan dievaluasi secara terus menerus agar bahasa Lampung benar-benar terjaga.

Makalah III

GAGASAN REVITALISASI AKSARA JAWA PADA VISUAL KONTEMPORER CARAKAN GARUDA PANCASILA

Ada beberapa daerah yang memiliki aksara namun tidak memiliki bahasa, begitu juga sebaliknya. Seperti, Pulau Komodo memiliki bahasa namun tidak memiliki aksara. Penelitian tahun 2016 menemukan ada 741 bahasa daerah Indonesia. Kekayaan Indonesia adalah berupa Aksara yang merupakan simbol visual, namun perkembangannya miris disebabkan minimnya upaya revitalisasi bahasa. Upaya yang harus kita lakukan adalah mendidik dan mengenalkan bahasa.

Bentuk dan fungsi simbol visual ini untuk mengenalkan aksara pada wilayah setempat. Carakan Garuda Pancasila dalam aksara Jawa mengandung konsep kearifan lokal dan unik.

Tanggapan:

1. Bahwasanya aksara mungkin hilang ketika masuk ajaran Islam. (Yanti)

Jawaban:

Makalah IV

BAHASA BANDA : ANALISIS KERUANGAN MIGRASI DAN VITALITAS BAHASA (SEBUAH PENELITIAN AWAL MELALUI SEJARAH DAN EKSPRESI KE RUANGAN)

Alasan untuk menulis tentang ini karena adanya ketertarikan lewat penyampaian sejarah hubungan kerja sama antara masyarakat Kei dengan masyarakat Banda.

Ada beberapa bahasa yang telah punah, seperti bahasa TNS, dan lain-lain. Permasalahannya adalah apakah fakta migrasi berpengaruh besar terhadap bahasa Iha Luhu dan bahasa TNS? Faktor penyebab pergeseran bahasa adalah migrasi keluar dari daerah asal. Faktor lainnya karena faktor kepentingan, pendidikan, atau masyarakat yang sengaja menghindari keterbelakangan, dll.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah heuristik, observasi, partisipasi, dan sejarah hidup.

Bahasa perlu dipertahankan karena beragam berarti semakin kaya, sebagai identitas, bahasa menyimpan sejarah dan budaya masyarakat. Perbedaan budaya tetap akan ada sekalipun kita banyak melakukan kontak dengan orang luar.

Butir penting terdiri dari 7 lapisan, antara lain lapisan tak sadar, lapisan prasadar, lapisan kesadaran yang tidak diekspresikan, lapisan kesadaran yang dapat diekspresikan, lapisan masyarakat dan budaya intim, masyarakat, dan budaya.

Jawaban:

1. Apakah migrasi penutur bahasa dapat menimbulkan suatu marginalisasi bagi penutur bahasa yang melakukan migrasi? Mungkin bisa ditemukan sekarang ketika melakukan penelitian secara langsung. Orang TNS ketika bermigrasi sudah jarang menggunakan bahasanya.
2. Apakah dengan banyak etnis dan ragam bahasa dapat berpengaruh kepada pertahanan bahasa dari kelompok tertentu atau kelompok yang menerima etnis? Tetap ada. Tetapi menganggap bahasa Banda sudah pada status bergeser. Tetapi orang Banda juga tetap berusaha untuk menggunakan bahasa Key dan tetap menggunakan bahasa Banda dengan intrakomunitas.
3. Apakah migrasi dahulu. Eksistensi bahasa TNS yang lama masih dipertahankan ataukah sudah hilang? Mungkin saja berpengaruh. Hingga dalam penelitian ini menggunakan metode ke ruangan. (Irsal Rabiding)
4. Kenapa orang Luhu begitu resisten berbahasa Iha, tetapi orang Luhu tidak bisa berbahasa Iha? Apakah bahasa Iha susah? (Rudi Fofid)

Jawaban:

Problematika bahasa daerah di seluruh wilayah Maluku memang begitu kompleks. Ada banyak elemen yang saling terkait. Perlu kajian mendalam mengenai hal-hal yang ditanyakan itu.

REFLEKSI SIKAP MASYARAKAT SULAWESI SELATAN DALAM KORELASI BUDAYA DENGAN ONOMASTIKA

David G. Manuputty
Balai Bahasa Sulawesi Selatan

Abstrak

Bahasa mengekspresikan realitas kultural; mengekspresikan fakta, ide, peristiwa yang dapat ditransmisikan karena terkait dengan pengetahuan tentang dunia; dan merefleksikan sikap dan kepercayaan serta pandangan masyarakat (Kramsch, 2000:3). Artinya, kata-kata yang dituturkan mengungkapkan fenomena serta merefleksikan sikap atau perilaku dan pandangan masyarakat penuturnya. Misalnya nama pulau *Kodingareng* yang secara etimologis berasal dari kata *kodi* ‘buruk’ dan *areng* ‘nama’. Jadi, *kodingareng* bermakna ‘buruk nama’ karena konon dahulu pulau ini merupakan lokasi pembuangan para PSK. Sehubungan dengan adanya tiga etnis yang dominan di Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, dan Toraja; makalah ini pun mengkaji masalah onomastika yang terdapat di ketiga wilayah tutur masing-masing, seperti *Bulu Dua Kodingareng*, dan *Buntu Kabobong*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif ditunjang oleh teknik pengumpulan data, yaitu menginventarisasi nama-nama lokasi, baik dari segi etimologi maupun dari segi legenda yang melatarbelakangnya. Makalah ini menunjukkan adanya korelasi budaya di lokasi suatu masyarakat tutur berada dengan

bahasa yang konon merupakan refleksi budaya lokal di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: budaya, Bugis, Makassar, Toraja.

Abstract

Language expresses cultural realities; expressing facts, ideas, events that can be transmitted by contact with the knowledge concerning the world; and reflects attitudes and beliefs, and views of community (Kramsch, 2000:3). That is, words spoken reveal the phenomenon and reflect behavior and perceptions of the native speakers. For example: name of the island Kodingareng which is etymologically derived from the word kodi 'bad' and areng 'name'. So, Kodingareng means 'bad name' perhaps in the past the island has become location of prostitutes disposal. In relation to the three dominant ethnic groups in South Sulawesi, the Buginese, Makassarese, and Torajan; this paper also examines onomastics ones contained in those regions respectively, as Bulu Dua and Buntu Kabobong.

Method used is descriptive-qualitative method supported by the data collection techniques, namely to inventory names of locations, either in terms of etymology or in terms of legend's background. This paper shows there is a correlation of culture where a speech community exists with the language having been the reflection of local culture in South Sulawesi.

Keywords: culture, Buginese, Makassarese, and Torajan.

1. Pendahuluan

Makalah ini bertujuan mendeskripsikan keterkaitan budaya di lokasi permukiman suatu masyarakat tutur dengan pertuturan bahasa, khususnya masalah etimologi dan onomastika. Tak dapat dipungkiri bahwa unsur-unsur budaya turut berpengaruh pada rutinitas masyarakat sehari-hari. Bahasa sebagai salah satu unsur budaya, banyak memengaruhi penggunaan kosakata dan peristilahan terutama yang menyangkut aspek budaya itu sendiri serta nilai rasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan atau disingkat BBLNLK telah disahkan pada tanggal 9 Juli 2009. Sesuai dengan namanya, salah satu topik yang diatur pada undang-undang (UU) ini adalah tentang bahasa negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut, masalah kebahasaan dijelaskan

secara gamblang. Pasal 1 menjelaskan tentang definisi bahasa Indonesia (bahasa resmi nasional), bahasa daerah (bahasa yang digunakan secara turun-temurun di daerah di Indonesia), dan bahasa asing (bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah).

Pada dasarnya, bahasa mengekspresikan realitas kultural; mengekspresikan fakta, ide, peristiwa yang dapat ditransmisikan karena terkait dengan pengetahuan tentang dunia; dan merefleksikan sikap dan kepercayaan serta pandangan masyarakat (Kramsch, 2000:3). Artinya, kata-kata yang diucapkan atau dituturkan masyarakat penutur bahasa terkait dengan pengalaman mereka. Misalnya kata-kata yang mengungkapkan fakta, ide (gagasan), ataupun fenomena yang berhubungan dengan pengetahuan mereka tentang dunia; dan juga yang mencerminkan perilaku, keyakinan, dan pandangan masyarakat yang bersangkutan.

2. Perumusan

Berdasarkan pengantar pada butir 1 di atas, pengkajian ini berfokus pada penggunaan kata-kata ataupun peristilahan, termasuk etimologi, baik yang berbentuk kata maupun frase serta klitik yang merupakan onomastika pada sebagian besar lokasi di Sulawesi Selatan.

Fungsi bahasa yang paling penting adalah sebagai alat komunikasi. Menurut Kramsch (2000:15), bahasa berfungsi untuk berekspresi, menambah, dan menyimbolisasikan realitas budaya. Bahasa berfungsi dengan dua cara, yaitu (1) melalui apa yang dikatakan atau apa yang dirujuk (semantik), dan (2) melalui apa yang dilakukan dalam konteks (pragmatik).

Budaya daerah, terutama bahasa, di Sulawesi Selatan yang sangat berpengaruh dan membentuk pola dan sikap masyarakat dalam bertutur kata adalah bahasa daerah Bugis, Makassar, dan Toraja. Sikap manusia sebagai pengguna bahasa senantiasa dipengaruhi oleh tradisi budaya di lingkungan tempat ia berada, seperti penyebutan arah atau penamaan lokasi, dan sebagainya. Hal ini diperkuat oleh Iswary (2011:52) yang berpendapat bahwa setiap bahasa yang diekspresikan dalam bentuk leksikal merupakan representasi atau realitas dari budaya terkait. Sejalan dengan itu, Sufika (2007:68) berpendapat bahwa bahasa merupakan bagian dari budaya yang erat kaitannya dengan cara berpikir masyarakat penuturnya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya memiliki cara berpikir tertentu yang dinyatakan dalam bahasa. Bahasa merupakan alat intelektual yang paling fleksibel dan paling kuat yang dikembangkan manusia; dengan kata lain, bahasa dapat menggambarkan budaya masyarakat (Manuputty, 2015:36).

3. Pembahasan

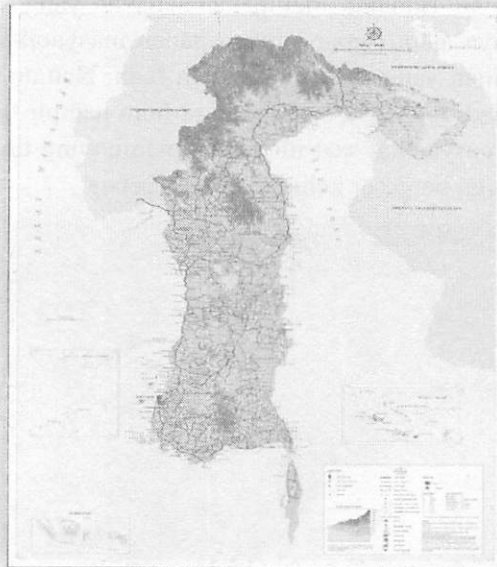
Kramsch (2000:3) menegaskan bahwa bahasa yang diekspresikan dalam bentuk leksikal merupakan representasi atau realitas dari budaya terkait, hubungan antara bahasa dan budaya sebagai berikut.

- 1) Bahasa mengekspresikan realitas kultural; mengekspresikan fakta, ide, peristiwa yang dapat diteruskan karena berhubungan dengan pengetahuan tentang dunia; dan merefleksikan sikap dan kepercayaan serta pandangan masyarakat.
- 2) Bahasa menambah realitas kultural; tidak hanya mengekspresikan pengalaman, tetapi juga menciptakan pengalaman lewat bahasa; menciptakan makna yang mudah dimengerti dan diterima oleh kelompok mereka sendiri, misalnya nada suara, aksen, gerakan tubuh.
- 3) Bahasa menyimbolisasikan realitas kultural; merupakan suatu sistem tanda-tanda yang memiliki nilai kultural.

Dengan demikian apabila terjadi komunikasi antara dua pihak (orang), pesan yang terdapat dalam tuturan tersebut akan selalu mencerminkan perilaku budaya sebagai identitas masyarakat tutur tersebut. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Wijana (2004:109) yang mengatakan bahwa keterkaitan antara bahasa dan budaya serta permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hal tersebut akan selalu tampak dalam segala aktivitas komunikasi suatu masyarakat tutur.

Jadi, bahasa mengungkapkan realitas budaya. Artinya, kata-kata yang diucapkan atau dituturkan masyarakat penutur bahasa terkait dengan pengalaman mereka. Kata-kata mengungkapkan fakta, ide (gagasan), ataupun fenomena yang dapat dilanjutkan karena berhubungan dengan pengetahuan mereka tentang dunia. Kata-kata ini juga mencerminkan perilaku, keyakinan, dan pandangan masyarakat yang bersangkutan.

Menyangkut keyakinan dan pandangan masyarakat di Kota Makassar dan sekitarnya bahwa laut terletak di sebelah barat, sehingga mereka menyebut arah barat sebagai *kalauk* atau 'ke laut'. Namun, masyarakat Kabupaten Jeneponto yang juga berbahasa Makassar, tetapi berbeda dialek dengan yang digunakan di Kota Makassar, menyebut *kalauk* sebagai selatan. Hal ini disebabkan oleh posisi laut di Kabupaten Jeneponto terletak di sebelah selatan.



Sebagai catatan, di Kota Makassar masyarakat menggunakan bahasa Makassar dialek Lakiung, sementara di Kabupaten Jeneponto masyarakat menggunakan dialek Turatea.

Keyakinan dan pandangan masyarakat Sulawesi Selatan tercermin pula pada penamaan lokasi seperti yang tertera berikut ini.

1. *Buntu Kabobong*, sebuah gunung yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja. Gunung tersebut menyerupai kelamin perempuan yang konon menurut legenda, pada zaman dahulu kala, di kaki Gunung Bambapuang terdapat suatu kerajaan tua yang bernama Kerajaan Tindalun. Konon pada suatu ketika, datanglah seseorang yang disebut “To Mallaorilangi” (orang yang turun dari langit) atau yang dalam istilah lainnya disebut To Manurung, di kampung Tindalun yang terletak di sebelah Selatan Gunung Bambapuang tersebut. To Manurung itu juga menurut riwayatnya konon datang dari Tangsa, yaitu sebuah daerah dari Tanah Toraja. Di sana ada seorang ibu muda cantik bernama Masaang yang mempunyai lima orang anak, entah karena apa, kelima anak Masoang itu terbagi-bagi. Beberapa hari kemudian, tak jauh dari sebuah perkampungan, pada suatu malam, masyarakat Tindalun melihat ada api yang berkobar seolah tak ada padamnya. Terdorong rasa keingintahuan, masyarakat mencoba mendekati sumber api tersebut, dan ternyata tak jauh dari situ ada anak laki-laki yang rupawan. Ketika si anak lelaki tersebut menginjak dewasa, ia dikawinkan dengan seorang putri raja Kerajaan Tindalun yang sangat cantik. Dari perkawinan itu, lahirlah putra mereka yang diberi nama Kalando Palapana. Kalando Palapana inilah yang setelah dewasa kemudian diangkat menjadi Raja

Tindalun selanjutnya. Tindalun merupakan wilayah yang ketika itu amat kaya dengan sumber daya alam, setiap musim panen masyarakat sangat bersuka ria karena hasil pertanian yang selalu melimpah ruah. Namun, kondisi inilah yang membuat mereka jadi lupa diri, suasana hura-hura hampir tak terlewatkan setiap saat dan perilaku masyarakat saat itu sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat leluhur, mulai bergeser kehidupan seks bebas.



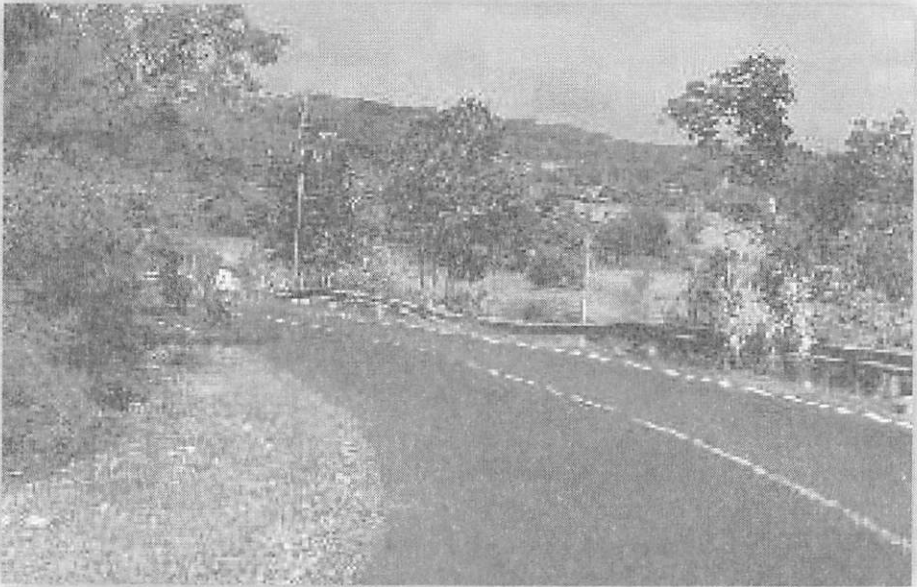
Suatu ketika datanglah bencana yang memorakporandakan wilayah Kerajaan Tindalun. Mereka yang gemar melakukan seks di luar nikah mendapat kutukan menjadi bukit-bukit. Salah satunya menyerupai alat kelamin perempuan yang dikenal dengan sebutan Buntu Kabobong dan tak jauh dari gunung itu terdapat pula gunung yang menjorok ke seberang yang bentuknya menyerupai alat kelamin laki-laki (Zhalabe, 2011).

2. *Bulu Dua*, sebuah gunung yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng. Gunung tersebut merupakan salah satu ikon atau penanda saat memasuki wilayah Kabupaten Soppeng dari arah selatan (melalui poros Makassar-Barru-Soppeng) dan merupakan gunung yang terbentuk dari batu cadas dengan dua puncak sehingga dinamakan Bulu Dua yang menyerupai buah dada (Anonim, 2009).



3. *Bukit Karamaka*, berlokasi di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Di bukit tersebut, dari arah Kota Makassar, di sebelah kanan jurang terjal yang langsung menghadap ke laut.

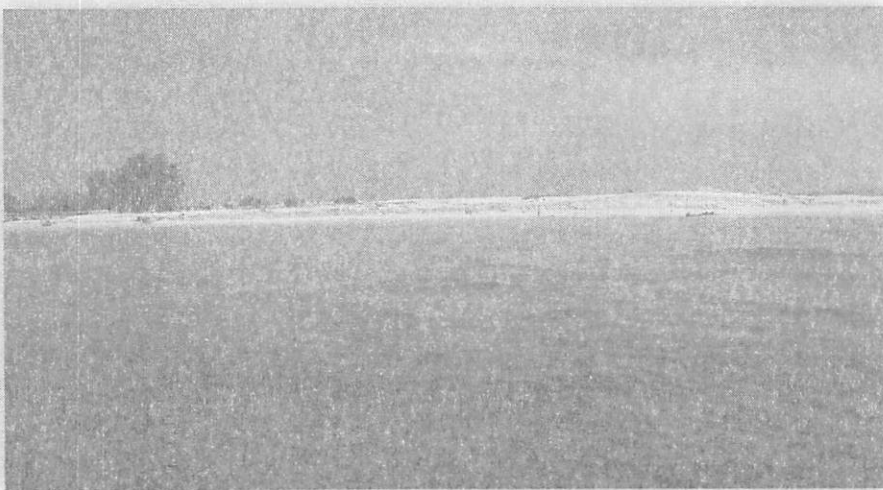
Ketinggian bukit yang menghadap langsung ke laut lepas menyebabkan hembusan angin sangat kencang sehingga dapat menghempaskan apa saja, terutama pengendara kendaraan bermotor. Berhubung rendahnya pemahaman masyarakat setempat, mereka menamai lokasi tersebut *karamaka* 'yang keramat' (Syarif, 2010).



4. *Tanru Tedong*, terletak di bagian timur Kabupaten Sidenreng Rappang. Konon menurut mitos nama Tanru Tedong berasal nama ternak yang paling banyak diperdagangkan pada masa lalu, yaitu kerbau. Kerbau-kerbau yang dibawa para pedagang untuk dijual ke kota dirampas kawanan perampok. Kerbau-kerbau hasil rampokan itu kemudian disembelih dan dikuliti. Bagian tanduk dan tulang-tulangnya dibiarkan berserakan dan akhirnya ditemukan oleh para pemburu yang kebetulan lewat di lokasi tersebut. Rombongan pemburu pimpinan Andi Palamampungan kemudian membawa pulang tanduk-tanduk tersebut dan digantungkan pada pagar halaman dan pintu gerbang, bahkan yang berukuran besar dijadikan pajangan di bagian depan atap rumah (*timpa' laja'*). Karena melihat banyaknya tanduk kerbau yang dipajang itu, maka warga setempat maupun orang-orang yang kebetulan lewat lebih mengenal daerah Lekkoe dengan nama Tanru Tedong (Matti', 2011).



5. *Pulau Kodingareng*, terletak di gugusan Kepulauan Spermonde. *Kodingareng* “buruk nama” penamaannya dikarenakan dahulu penjajah menggunakannya sebagai lokasi pengasingan orang pribumi. Versi lain mengatakan, pulau itu dinamakan Kodingareng karena nama aslinya memiliki makna yang tidak seronok. (Pranata, 2014). Konon nama pulau ini muncul menurut keterangan seorang budayawan Makassar almarhum H. Ince Nurdin Daeng Rowa kepada penulis pada bulan Juni 1989, bahwa pulau tersebut merupakan lokasi penampungan para PSK asal luar Makassar yang terusir dari Kecamatan Mariso di Kota Makassar. Nama yang semula diberikan pada pulau tersebut adalah *paddittikang* yang dalam bahasa Makassar bernuansa negatif, sehingga jika ada yang bertanya ihwal nama pulau tersebut maka jawabannya adalah *kodingareng*.



4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, nama-nama lokasi di Sulawesi Selatan ditinjau dari segi etimologi dan onomastika yang berbasis pada bahasa daerah Bugis, Makassar, dan Toraja, baik yang berupa kata maupun yang berupa frase, telah bertumbuh dan berkembang dalam skala lokal dan penggunaannya telah merupakan nama lokasi yang khas kedaerahan Sulawesi Selatan. .

Sekalipun terdapat beberapa nama lokasi yang bersifat ‘vulgar’, penulis tidak memandang fenomena tersebut sebagai ‘hal yang merusak’, tetapi justru memandangnya sebagai suatu kekhasan dan keunikan yang berazaskan budaya lokal.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa bahasa 1) merupakan sistem tanda yang memiliki nilai budaya; 2) menjadi simbol identitas sosial penuturnya; dan 3) melambangkan realitas budaya. Jadi, ada korelasi budaya di lokasi suatu masyarakat tutur berada dengan bahasa yang konon merupakan refleksi budaya lokal di Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anonim, 2000. *Bulu Dua*. Diakses dari <http://www.wikimapia.org/18954847/> pada tanggal 13 April 2015.
- Iswary, Ery dan Rahim bin Aman. 2011. “*Acculturation of Language and Culture Through Manifestation of Lexical Usage in Cross Indonesian-Malay Language*” dalam *Jurnal Melayu* halaman 49—56. Diakses dari <http://www.ukm.my> pada tanggal 24 September 2014.
- Kramsch, Claire. 2000. *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Manuputty, David G. 2015. “Eksistensi Budaya Daerah pada Pembentukan Kosakata dan Peristilahan di Sulawesi Selatan” dalam *Prosiding Seminar Internasional, Penelitian di Bidang Leksikologi, Leksikografi, Peristilahan, Etimologi, dan Toponimi*, halaman 33—49. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Matti’, Salihuddin. 2011. *Asal-Usul Nama Tanru Tedong*. Diakses dari <http://salihmattingaraebba.blogspot.com/> pada tanggal 31 Maret 2015.

- Pranata, Aan. 2014. *Di Halaman Belakang*. Diakses dari <http://www.apranata.tumblr.com/> pada tanggal 13 April 2015.
- Sufika, Arwina. 2007. "Fungsi Bahasa dalam Perspektif Promosi Pariwisata" dalam Chaianara (editor) *Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa di Asia Tenggara*. Singapura: Rancangan Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN.
- Syarif. Fadly. 2011. "Menyusuri Potensi Pariwisata Bumi Turatea". Diakses dari: <http://www.kompasiana.com/> pada tanggal 13 April 2015.
- Tim Penyusun. 2011. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan". Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wijana, I Dewa Putu. 2004. "Relasi bahasa dan Budaya serta Berbagai Permasalahannya", *Semiotika*. Volume 5, No. 2/2004, hal. 107. Diakses dari <http://www.staff.uny.ac.id/> pada tanggal 20 September 2014.
- Zhalabe. 2011. *Legenda Buntu Kabobong*. Diakses dari: <http://zhalabe.blogspot.com/> pada tanggal 13 April 2015.

ANALISIS FUNGSI PELAKU DAN MOTIF CERITA “*DATU LUMURAN*”

Mustafa

Balai Bahasa Sulawesi Selatan

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji salah satu karya sastra lisan Toraja *Datu Lumuran* tentang fungsi pelaku dan motif cerita. *Datu Lumuran* adalah salah satu karya sastra masyarakat Toraja yang sarat dengan ajaran moral utamanya konsep kehidupan. Legenda ini bercerita tentang kisah pernikahan antara dua insan yang berasal dari alam yang berbeda dan pernikahan sembunyi-sembunyi (tidak resmi). Kedua kisah yang terdapat dalam cerita tersebut dapat menjadi bahan nasihat dan pembelajaran bagi anak cucu bekal dihari mendatang agar tidak salah langkah/tersesat. Teori yang digunakan dalam mengkaji makalah ini adalah teori berdasarkan Vladimir Propp yang dicontohkan Taum dalam buku *Studi Sastra Lisan Sejarah, Teori, Metode dan Pendekatan Disertai Contoh Penerapannya* (2011:121—140). Dengan metode analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil yang ditemukan 18 fungsi pelaku dan beberapa motif cerita yang terkandung dalam cerita *Datu Lumuran*

Kata kunci: fungsi pelaku, motif, sastra lisan.

1. Pendahuluan

Cerita rakyat pada mulanya adalah peristiwa bahasa lisan; ia dituturkan, bukan dituliskan. Sebagai tuturan, cerita rakyat bekerja dengan dan melalui kombinasi berbagai kualitas suara manusia, misalnya vokal dan konsonan, tinggi-rendah suara, panjang-pendek suara, jeda, tekanan, warna suara, dan sebagainya. Kombinasi berbagai kualitas suara manusia tersebut hadir serentak dalam peristiwa lisan. Selain dari itu, tuturan juga bekerja dengan melibatkan tanda-tanda non-kebahasaan, seperti roman muka, gerak tubuh dan anggota badan, serta kadangkala dibantu pula dengan kehadiran benda-benda. Dengan demikian, peristiwa lisan sejatinya merupakan peristiwa pengungkapan dan penafsiran tanda-tanda aural, visual, maupun kinetik.

Sastra bercerita tentang pedagang, petani, nelayan, guru, penari, penulis, wartawan, orang tua, remaja, dan anak-anak. Sastra menceritakan orang-orang itu dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan segala masalah yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Tidak hanya itu, sastra juga mengajarkan ilmu pengetahuan, agama, budi pekerti, persahabatan, kesetiakawanan, dan sebagainya. Melalui sastra orang dapat mengetahui adat dan budi pekerti atau perilaku kelompok masyarakat (Sugono dalam Arisnawati, 2007:iii).

Cerita rakyat memberikan gambaran tentang kebudayaan, pola hidup, pandangan hidup, serta cita-cita masyarakat pendukungnya. Menurut Bascom (Dananjaja 2002:50) cerita rakyat terbagi ke dalam tiga golongan besar, yaitu (1) mite (*mythe*), (2) legenda (*legend*), (3) dongeng (*folktale*). Pembagian cerita rakyat ke dalam tiga kategori hanya merupakan tipe ideal, dalam kenyataannya banyak cerita yang memiliki lebih dari satu kategori sehingga sulit digolongkan.

Salah satu sastra lisan yang dijadikan sebagai objek pengkajian adalah cerita *Datu Lumuran* yang lahir dan berkembang di Toraja yang sarat dengan ajaran moral dan kehidupan terutama yang menyangkut dengan prinsip hidup.

Faktor pendorong dalam pengkajian *Datu Lumuran* ini adalah untuk melestarikan sastra Toraja. Masalah yang akan dibahas, yaitu (1) apa saja fungsi pelaku dalam cerita rakyat *Datu Lumuran*? (2) motif-motif apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat *Datu Lumuran*? Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai adalah mengungkap fungsi pelaku dan motif yang terkandung dalam cerita rakyat *Datu Lumuran*.

Pengkajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sastra terutama dalam penerapan teori strukturalisme yang dikembangkan oleh Vladimir Propp dan diharapkan juga bermanfaat untuk peningkatan apresiasi dalam memahami dan mendorong pembaca dalam menganalisis karya sastra.

2. Kerangka Teori

Menurut Propp (1987:27) bahwa pada setiap cerita rakyat berlaku empat ciri, yaitu (1) fungsi watak menjadi dasar yang stabil dan tetap dalam sebuah cerita tanpa memperhitungkan bagaimana dan siapa yang melaksanakannya, (2) bilangan fungsi

yang terdapat dalam cerita rakyat terbatas, (3) urutan fungsi selalu sama, dan (4) semua cerita rakyat adalah satu tipe dalam struktur.

Selain mengungkap fungsi pelaku, setiap pengkajian terhadap cerita rakyat perlu mengungkap motif cerita. Karena itu, cerita rakyat *Datu Lumuran* akan diungkapkan unsur dari cerita yang menonjol atau yang disebut motif sebagai penggerak atau pendorong cerita ke arah peristiwa atau perbuatan motif yang ada dalam cerita rakyat.

Menurut Propp dinamakan “fungsi” (Propp dalam Sudikan 2001:67) bahwa dalam sebuah cerita dongeng, para pelaku dan sifat-sifatnya dapat berubah, tetapi perbuatan dan peran mereka tetap sama. Peristiwa-peristiwa dan perbuatan yang berbeda-beda dapat mempunyai arti yang sama atau mengisyaratkan perbuatan. Perbuatan semacam itu oleh Propp menyatakan bahwa sebuah dongeng dimengerti sebagai cerita yang bergerak dari fungsi A menuju ke fungsi W, dari fungsi A (*villainy*/kejahatan) akan melalui fungsi-fungsi perantara yang nantinya akan menuju ke fungsi W (*wedding*/pernikahan), yaitu pemecahan masalah. Tujuh fungsi sebelum A dianggap sebagai pengantar fungsi mata rantai antara A-W, ini disebut Propp sebagai sekuen keberuntutan. Sebuah dongeng bisa terdiri dari beberapa sekuen, namun tidak selalu muncul beruntutan dan kemungkinan sebuah sekuen disisipi dengan sekuen baru.

Dalam morfologi cerita rakyat, ada 31 fungsi pelaku yang telah dikembangkan oleh Propp, dan ini dapat diterapkan di dalam cerita rakyat yang lain. Hal ini dikarenakan pada dasarnya struktur cerita rakyat hampir sama. Begitu pula cerita *Datu Lumuran* yang dapat dianalisis menggunakan teori ini, meskipun cerita *Datu Lumuran* tidak memenuhi 31 fungsi pelaku.

Analisis struktur naratif Propp menurunkan fungsi-fungsi pelaku berdasarkan susunan cerita. Pada tiap-tiap fungsi diberi (1) ringkasan isi cerita; (2) Definisi ringkas di dalam satu perkataan; (3) lambangnya yang konvensional (Propp 1987:28). Dalam rangkaian analisisnya, Propp menambahkan contoh-contoh. Kutipan contoh tersebut hanya menggambarkan dan menunjukan wujud fungsi sebagai unit generik tertentu. Semua fungsi dapat disesuaikan ke dalam sebuah cerita yang berurutan. Urutan fungsi adalah senantiasa sama, berhubungan dengan pengelompokannya perlu ditegaskan bahwa tidak seharusnya semua cerita memperlihatkan semua fungsi. Hal ini tidak akan mengubah urutan fungsi, karena ketiadaan fungsi-fungsi tertentu tidak akan mengubah susunan fungsi-fungsi yang lain. Cerita yang mempunyai fungsi-fungsi yang sama dianggap sebagai fungsi yang memiliki tipe yang sama.

Lambang-lambang diberikan dalam sebuah fungsi yang merupakan sebuah pembeda antara fungsi yang satu dengan fungsi lain. Setelah semua struktur cerita diketahui, fungsi pelaku akan dapat ditulis sesuai dengan lambang pada tiap-tiap fungsi pelaku. Dari analisis struktur naratif, Propp terhadap cerita Rusia dapat diambil kesimpulan bahwa unsur terpenting dalam sebuah dongeng yang diselidiki bukan pelaku dalam cerita (Danandjaja dalam Pudentia 1998:69).

Sementara itu, untuk membedah motif digunakan teori yang dikemukakan oleh Veselovskij (dalam Fokkema 1998:37) mengemukakan bahwa suatu motif mengacu pada suatu peristiwa khas dalam kehidupan sehari-hari atau kenyataan sosial. Menurut Danandjaja (2002:53—54) istilah motif dalam ilmu menurut Propp adalah sebuah cerita dongeng biasanya dimulai dari situasi awal, di mana seorang ahli keluarga diperkenalkan begitu saja. Walaupun situasi ini bukan merupakan suatu fungsi, namun situasi ini merupakan unsur morfologi yang terpenting.

Analisis motif yang cukup cermat diberikan oleh Propp dan menyebut motif sebagai suatu “fungsi”. Menurut Propp, fungsi adalah tindakan tertentu yang sama atau yang berbeda fungsinya yang membentuk cerita. Propp membedakan 31 fungsi motif dalam seratus cerita yang dianalisisnya. Propp menyimpulkan bahwa bukan motif, melainkan fungsi yang seharusnya dianggap sebagai bahan dasar cerita rakyat. Motif-motif yang berbeda mampu menimbulkan tindakan yang satu dan sama dalam rangkaian peristiwa dan karena itu bisa dilacak ke unit-unit yang lebih kecil. Propp menempatkan unit-unit barunya yang paling kecil (fungsi). Motif merupakan varian dari fungsi invarian yang satu dan sama (Propp dalam Fokkema, 1998:79).

Berdasarkan analisis strukturalisme Propp, dimulai dari penulisan setiap fungsi yang terdapat dalam cerita, kemudian menambahkan ringkasan isi dan memberi lambang yang konvensional sesuai dengan analisis struktur fungsi pelaku dalam cerita. Setelah diketahui fungsi-fungsi pelaku dalam cerita, akan diungkapkan peristiwa yang ditonjolkan atau yang disebut motif cerita.

3. Metode

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan objektif karena akan mengungkap unsur-unsur yang membangun dalam sebuah cerita rakyat. Pendekatan objektif memandang teks sebagai suatu yang objektif dan sasaran yang akan diungkap adalah struktur fungsi pelaku dan motif cerita yang terkandung dalam cerita *Datu Lumuran*.

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode pustaka. Metode pustaka adalah metode pencarian data dengan menggunakan sumber-sumber data tertulis dan lisan (Subroto. 2007:47). Data diperoleh melalui pembacaan *heuristik*, yaitu pembacaan berdasarkan struktur kebahasaannya, kemudian dilakukan pembacaan *hermeneutik*, yaitu pembacaan ulang sesudah pembacaan *heuristik* dengan memberikan tafsiran berdasarkan konvensi sastranya dalam sebuah karya sastra yang memberi makna dan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam cerita (Jabrohim 2001:101). Data tersebut kemudian dicatat dan dianalisis dengan metode struktural sehingga pada akhirnya ditemukan fungsi-fungsi pelaku dan motif cerita, sesuai dengan teori strukturalisme yang dikemukakan oleh Propp.

4. Pembahasan

4.1 Analisis Morfologi Cerita Rakyat Kisah *Datu Lumuran*

Ringkasan Cerita

Alkisah di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, tinggallah seorang wanita berparas cantik yang bernama *Datu Lumuran* yang berasal dari dunia air. Ia belum pernah bertemu dengan orang dari darat. Suatu waktu, ia tertarik dan sering muncul di darat memetik untuk buah pohon *kaiseq* yang berbuah lebat. Dia tidak menyadari kalau tanaman itu ada pemiliknya, ia hanya berpikir, di tempat yang sunyi itu tidak mungkin ada orang yang datang, apalagi untuk tinggal menetap.

Suatu waktu, Batara Kassaq selalu merasa heran kalau buah *kaiseq* yang ditanam setiap harinya selalu berkurang dan curiga kalau ada hal yang tidak beres di ladangnya itu. Ia pun berusaha mencari tahu apa gerakan yang terjadi dengan tanamannya itu. Pagi-pagi buta, ia ke kebunnya dan mengintip dari kejauhan siapa gerakan yang selalu mencuri buah tanamannya. Dari kejauhan, ia melihat dan mendapati seorang wanita cantik yang sedang memetik buah *kaiseq* miliknya. Secara diam-diam ia pun menghampiri wanita itu (*Datu Lumuran*) dan memegang rambutnya yang terurai panjang.

Untuk menebus kesalahan karena memetik buah *kaiseq*nya, Batara Kassaq meminta agar *Datu Lumuran* bersedia menikah dengannya. Awalnya *Datu Lumuran* menolaknya, namun karena tidak tahu dan bingung dengan cara apa ia harus mengganti buah *kaiseq* itu. Akhirnya, ia pun menerima pinangan itu dengan syarat tidak akan pernah mengucapkan kata *pida* jika mencaci seseorang. Kemudian tidak menggunakan kata *pongpai* jika menolak sesuatu yang berkenan di hati. Jika sampai janji itu dilanggar maka hubungan suami istri mereka pada saat itu juga bubar. Berselang beberapa lama setelah mereka menikah. Lahirlah seorang putri yang diberi nama Pasuloan.

Pada suatu ketika Batara Kassaq sangat marah karena dikencingi oleh anaknya sendiri dan secara tidak sadar ia melakukan pelanggaran janji yang pernah diucapkannya. Ia mengucapkan kata-kata yang dipantang oleh *Datu Lumuran*. Mendengar kata-kata suaminya, seketika itu juga *Datu Lumuran* melarikan diri dan melompat masuk ke dalam air sungai kembali ke dunianya. Batara Kassaq mengejarnya tetapi tidak berhasil. Namun, setiap pagi ia membawa putrinya, Pasuloan, ke pinggir sungai agar dapat disusukan oleh ibunya. Ini berlangsung hingga Pasuloan berhenti menyusu.

Ketika Pasuloan menginjak usia remaja, seorang pemuda tampan, bernama Kawanna jatuh cinta kepadanya hingga pada suatu kesempatan keduanya melakukan hubungan gelap. Akibat hubungan gelap itu membuat Pasuloan berbadan dua.

Mengetahui kejadian itu, dewan adat menjatuhkan hukuman kepadanya, yaitu “*ditekke bannang malata*”, artinya diusir dari kampung halaman. Menjelang pelaksanaan hukuman tersebut, muncullah Kawanna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bersedia mengawini Pasuloan. Akhirnya, hukuman itu dibatalkan. Kemudian dilaksanakanlah pesta perkawinan yang meriah. Keduanya pun hidup berbahagia.

4.2 Analisis Fungsi Pelaku

Menurut Propp, sebuah cerita dongeng biasanya dimulai dari situasi awal, yaitu ketika seorang keluarga diperkenalkan. Walaupun situasi ini bukan merupakan suatu fungsi, tetapi situasi ini merupakan unsur morfologi yang terpenting. Unsur ini dinamakan situasi awal. Situasi awal diikuti dengan fungsi-fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pertemuan *Datu Lumuran* dengan Batara Kassa (Definisi: *situasi awal*, lambang: α)
Di pinggir kali tempat kediaman *Datu Lumuran*, ada seorang petani berladang menanam *kaisaq* (semacam dupa). Petani ini bernama Batara Kassa. Pada waktu tanaman itu sudah layak panen dan ketika keesokan harinya akan dipanen, buahnya selalu hilang sehingga sang Petani heran dan bertanya-tanya, siapa gerangan yang memetik buah *kaisaq*-nya. Sang Petani pun berusaha mencari tahu penyebabnya. Di pagi buta, ia sudah datang lalu berusaha mengintip dari kejauhan. Dari kejauhan terlihat ada seorang gadis cantik sedang memetik buah *kaisaq*-nya. Secara diam-diam sang Petani menghampiri gadis itu lalu memegang rambutnya yang terurai panjang seraya berkata, “Pantas tanaman buah *kaissaku* selalu hilang karena kamu mencurinya. Namun, tidak mengapa asal kamu bersedia menjadi istriku.
- 2) Suatu tugas berat dibebankan kepada tokoh (Definisi: *tugas berat*, lambang: M).
Batara Kassa harus menyetujui persyaratan bila serius mau menikahi *Datu Lumuran*, yaitu tidak boleh mengucapkan kata ‘*pida*’ bila mencaci seseorang dan kata ‘*pongpai*’ bila melihat sesuatu, apakah itu pemandangan atau apa saja bila tidak berkenan dihatinya.
- 3) Tokoh utama menikah dan menjalani hidup rumah tangga (Definisi: *perkawinan*, lambang W)
Persyaratan yang diajukan oleh *Datu Lumuran* diterima dengan baik oleh Batara Kassa. Dengan diterimanya persyaratan itu, jadilah mereka hidup sebagai suami istri, dan memilih tempat kediaman di pinggir kali daerah asal *Datu Lumuran*.

- 4) Tokoh utama memperoleh turunan (Definisi: *turunan*; lambang: T)
Hasil dari perkawinan itu melahirkan seorang putri cantik dan diberi nama Pasuloan.
- 5) Suatu larangan/pantangan dilanggar (Definisi: *larangan*, lambang: γ)
Pada suatu hari, *Datu Lumuran* sedang menenun kain di serambi rumahnya. Bertepatan waktu itu Batara Kassaq juga sedang meraut rotan di bawah kolong rumahnya. Dengan tidak disangka-sangka, anaknya yang sedang tidur di atas rumah kencing. Batara Kassaq yang sedang asyik mengerjakan pekerjaan di kolong rumah terkejut terkena air kencing anaknya mengenai badannya dan berteriak “Wah, *pida*, Pasuloan mengencingi saya”. Teriakannya itu seolah-olah mencaci maki anaknya dengan mempergunakan kata-kata tersebut.
- 6) Tokoh utama meninggalkan rumah (Definisi: *pemergian*, lambing: t)
Cacian Batara Kassaq terdengar oleh *Datu Lumuran*. *Datu Lumuran* pun tanpa berkata sepata kata segera mengundurkan diri dari pekerjaannya lalu berangkat dengan membawa sehelai tenunannya yang disebut “*lullungna Datu Lumuran*” menuju ke sungai dan langsung menceburkan diri masuk ke dalam air.
- 7) Tokoh utama dikejar (Definisi: *pengejaran*; lambing: Pr)
Batara Kassaq sadar apa yang telah terjadi, yaitu melanggar janji yang pernah diucapkannya. Ia pun segera mengejar *Datu Lumuran* dan meminta maaf namun tidak berhasil, ia hanya sempat mendapatkan *lullungna Datu Lumuran*.
- 8) Suatu tugas yang berat dibebankan kepada Batara Kassaq (Definisi; *tugas berat*, lambing: M)
Sebagai tanggung jawabnya kepada anaknya yang masih kecil dan masih membutuhkan air susu ibunya. *Datu Lumuran* bersedia menyusui anaknya seperti biasa sampai kenyang asalkan Batara Kassaq selalu datang membawanya ke tempat itu (tepi kali).
- 9) Keanehan yang diperlihatkan tokoh utama (Definisi; *keanehan*, lambing: F).
Setiap kali Batara Kassaq membawa anaknya dating ke tepi kali untuk disusui oleh ibunya. Suatu keanehan yang terjadi, *Datu Lumuran* tidak langsung memegang anaknya apabila menyusuinya. Anaknya dipegang oleh Batara Kassaq dan hanya kelihatan anaknya seolah-olah menyusu sampai kenyang. Begitulah yang selalu dilakukan Batara Kassaq sampai akhirnya anaknya itu disapih (berhenti menyusu).
- 10) Tokoh bawahan (Pasuloan) setelah remaja dikenal masyarakat sebagai wanita pingitan (Definisi: *situasi awal*, lambang: α)
Setelah Pasuloan menginjak usia remaja, ia tidak pernah keluar (*maq tudang*). Tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya, baik gadis maupun pemuda. Ia sama sekali buta terhadap lingkungan masyarakatnya. Anak itu tidak kenal

bekerja, tidur, dan makan saja yang dilakukan.

11) Reaksi para pemuda (Definisi: *reaksi*, lambang: €)

Dengan adanya Pasuloan yang cantik jelita di kampung itu membuat banyak pemuda yang datang bermain olah raga di dekat rumahnya, sehingga tempat itu menjadi cukup ramai di sore hari. Pasuloan pun sering mengintip dan memperhatikan pemuda-pemuda itu melalui jendela. Salah seorang di antara pemuda itu ada yang menarik perhatian Pasuloan. Pemuda itu bernama Kawanna yang selalu datang bermain bahkan sering tinggal bermalam di tempat itu. Kawanna dengan Pasuloan sudah sering bertemu pandang melalui jendela ketika orang sedang bermain, namun belum pernah bertegur sapa.

12) Kawanna (tokoh bawahan) mencoba mencari cara agar bisa bertemu pandang dengan Pasuloan (Definisi; *muslihat*, lambing: η).

Kawanna sangat ingin bertatap muka dengan Pasuloan, tetapi tidak dapat karena Kawanna tidak boleh naik rumah menemui Pasuloan. Kawanna mendapat akal berpura-pura beristirahat di bawah jendela. Ketika lelah bermain, Pasuloan yang sedang makan sirih di atas rumah tanpa sengaja meludah ke bawah dan tepat mengenai kain sarung Kawann. Kawanna pun berpura-pura terkejut dan seolah-olah marah. Sarung Kawanna sudah seolah-olah kemerahan penuh ludah, ia pun menuntut supaya sarungnya itu langsung dicuci sendiri oleh Pasuloan. Permintaan itu diterima baik oleh Pasuloan sehingga ia turun dari rumah lalu perg ke sumur mencuci sarung Kawanna.

13) Tokoh berkenalan dengan seorang pemuda (Definisi: *perkenalan*, lambang: K)

Tuntutan Kawanna agar sarungnya dicuci langsung oleh Pasuloan diterima baik. Ia pun langsung turun dari rumah menuju sumur untuk mencuci sarung tersebut. Kesempatan yang baik itu digunakan oleh Kawanna bercakap-cakap dengan Pasuloan. Perkenalan itu berlanjut beberapa lama, kemudian keduanya sepakat mengadakan hubungan gelap. Beberapa bulan setelah mereka bergaul, hamillah Pasuloan.

14) Hubungan gelap Kawanna dan Pasuloan terbongkar (Definisi; *penjelasan*, lambang: Ex)

Pasuloan hamil tanpa suami, adat kampung memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada Pasuloan dengan hukuman “*Ditekte banning malate*” artinya ‘yang bersalah harus segera diusir pergi meninggalkan kampung dan pantang untuk kembali. Apabila yang bersangkutan mencoba kembali ke kampung, ia dapat dibunuh tanpa ada tuntutan bagi pembunuhnya.

15) Persiapan upacara pengusiran kepada tokoh (Pasuloan) (Definisi: *penguisran*, lambang: V)

Setelah tiba hari pelaksanaan hukuman yang telah ditetapkan oleh adat, upacara

pengusiran pun dilaksanakan. Sebelum dilakukan pengusiran, dilakukan upacara dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Semua anggota adat kampung menghadiri acara itu;
 - b. Yang kena sanksi didudukkan di atas gendang;
 - c. Kata-kata perpisahan dari budayawan daerah;
 - d. Leher, tangan, dan kaki diikat dengan benang putih;
 - e. Pelepasan atau pengusiran; dan
 - f. Peserta bubar.
- 16) Tokoh (Pasuloan) meminta waktu untuk berbicara (Definisi: *pembelaan*, lambang: N)
- Sebelum acara di mulai, Pasuloan mohon bicara untuk meminta pembelaan diri. Dia berkata, “Sebenarnya saya mempunyai seorang suami. Hari ini, suami saya akan datang untuk menikahi saya secara resmi. Nanti akan muncul seorang laki-laki dari atas gunung sebelah timur. Dia akan berteriak. Apabila ia tidak muncul sesuai waktu yang saya sebutkan ini, laksanakanlah keputusan adat sebagaimana mestinya dan saya terima dengan ikhlas.”
- 17) Tokoh (Pasuloan) terselamatkan dari hukum adat (Definisi: *hukuman*, lambang: U)
- Sesuai apa yang dikatakan Pasuloan, tiba-tiba muncul seorang laki-laki berpakaian putih dari atas gunung sebelah timur lalu berteriak seperti apa yang dikatakannya. Penduduk kampung pun terperangah dibuatnya. Kawanna tiba di tempat itu dengan maksud akan melamar dan menikahi Pasuloan secara resmi. Akhirnya, rencana hukuman yang akan ditujukan kepada Pasuloan pun dibatalkan.
- 18) Tokoh (Pasuloan) menikah dengan tokoh bawahan (Kawanna) (Definisi, *perkawinan*, lambang: W)
- Kawanna tiba di tempat pelaksanaan hukuman mati tepat waktu untuk menggagalkan acara pengusiran dan sekaligus menyelamatkan Pasuloan dari hukuman adat tersebut. Kedatangannya untuk melamar sekaligus menikahi Pasuloan secara resmi yang disetujui oleh adat. Dengan kedatangan Kawanna itu membuat keputusan adat dibatalkan dan pernikahan pun dilaksanakan. Keduanya pun hidup bahagia.

Berdasarkan analisis *Datu Lumuran* dengan penerapan teori Vladimir Propp, akhirnya ditemukan fungsi-fungsi dalam cerita *Datu Lumuran*. Vladimir Propp dalam pengkajiannya telah menemukan 31 fungsi. Namun, pada cerita *Datu Lumuran* hanya ditemukan beberapa fungsi, yaitu 18 fungsi. Ini disebabkan pada tiap-tiap cerita memiliki struktur sendiri-sendiri meski sering terdapat persamaan-persamaan cerita.

4.3 Identifikasi Pelaku

Berdasar analisis di atas, terlihat bahwa cerita *Datu Lumuran* memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut dapat diidentifikasi. Pelaku cerita yang menurut Propp hanya berjumlah 7 jenis. Namun, dalam cerita *Datu Lumuran* hanya terdapat 5 (lima) pelaku sebagai berikut:

- 1) *Datu Lumuran*, berperan sebagai tokoh utama dalam cerita ini. Ia berasal dari dunia air yang berubah wujud sebagai manusia ketika naik ke darat untuk mencari makanan. Ia wanita cantik jelita yang baik, tidak mau dihianati oleh siapapun meski itu suaminya. Ia tipe wanita yang penuh cinta kasih pada suami dan anaknya.
- 2) Karena ketidaktahuannya dan juga karena takdir ia dipertemukan dengan seorang pemuda yang bernama Batara Kassaq yang memperistrikannya. Ia menerima pinangan Batara Kassaq sebagai suaminya meski pada awalnya menolak keras karena keduanya berasal dari alam yang berbeda. Namun, karena terpaksa ia pun menerimanya dengan mengajukan syarat kepada Batara Kassaq untuk disetujui. Bila persyaratan itu dilanggar maka perkawinan mereka putus (cerai). Persyaratan yang diajukan oleh *Datu Lumuran* diterima Batara Kassaq. Dengan diterimanya persyaratan itu, menikahlah keduanya. Berselang beberapa tahun menikah lahirlah seorang putri cantik.
- 3) Batara Kassaq, tokoh bawahan yang sekaligus sebagai suami *Datu Lumuran* dalam cerita ini. Ia adalah pemuda pekerja keras dan bertanggung jawab, utamanya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hanya saja ia mempunyai perilaku yang kurang baik, yaitu pemarah, egois, tidak mampu memegang amanah, dan suka memaksakan kehendak tanpa memikirkan akibatnya. Terbukti, setelah beberapa lama keduanya hidup berumah tangga dan dikarunia seorang putri mungil dan cantik. Batara Kassaq tidak mampu memegang janjinya dan melanggarnya, akibatnya mereka akhirnya berpisah meskipun Batara Kassaq memohon dan berjanji tidak akan mengulangnya kesalahannya lagi. Namun, nasi telah jadi bubur, janji adalah janji dan harus ditepati. Akibatnya, Batara Kassaq dengan penuh penyesalan melepas kepergian istrinya yang cantik jelita itu kembali ke dunianya (dunia air).
- 4) Pasuloan, berfungsi sebagai tokoh bawahan. Ia adalah putri Batara Kassaq – *Datu Lumuran*. Ia berstatus yatim karena sejak balita ia sudah ditinggal oleh ibunya (*Datu Lumuran*). Setelah dewasa, ia berkenalan dengan seorang pemuda dari kampung sebelah. Hasil perkenalan itu membuat mereka bersepakat melakukan hubungan gelap (sembunyi-sembunyi). Beberapa bulan kemudian, ia pun hamil

tanpa ikatan nikah resmi. Akibatnya, ia akan dijatuhi hukuman *ditekte banning malatu*, yang artinya ‘pengusiran dari kampung halamannya’ oleh para tetua adat kampung karena dianggap mengotori kampung.

- 5) Ketika Pasuloan akan dijatuhi hukuman, ia pun berusaha membela diri bahwa ia ada suami meski belum resmi secara adat. Suaminya itu akan datang menjemputnya hari ini juga untuk menikahinya secara resmi tepat pada pukul 10.00. Ternyata waktu yang dikatakan Pasuloan terbukti, laki-laki yang dimaksud muncul dan menyatakan kalau ia adalah pemuda yang akan menikahi Pasuloan. Akhirnya, Pasuloan pun selamat dari hukuman tersebut.
- 6) Tokoh bawahan berikutnya adalah Kawanna. Ia adalah seorang pemuda yang baik dan pemegang janji dan patut dipercaya. Ia mengadakan hubungan gelap dengan Pasuloan (gadis pujaannya) dan berjanji akan menikahi secara resmi nantinya. Janji Kawanna itu telah dibuktikan di saat-saat Pasuloan akan dijatuhi hukuman oleh para tetua adat kampung. Kemunculan Kawanna membuat keputusan adat dibatalkan, keduanya pun akhirnya menikah secara resmi yang disaksikan oleh orang sekampung. Keduanya pun hidup berbahagia.
- 7) Tokoh bawahan lainnya adalah tetua adat dan orang kampung. Tetua adat ini merupakan pengawas tatanan adat yang berlaku di masyarakat agar dipenuhi dan tidak dilanggar. Bila terjadi ada aturan yang dilanggar maka sanksinya adalah pengenaan sanksi kepada si pelaku. Mereka tidak pernah bertindak semena-mena, mereka selalu memberi kesempatan kepada si terdakwa untuk membela diri seperti apa yang diperbuat oleh *Datu Lumuran*.

4.4 Analisis Motif dalam Cerita *Datu Lumuran*

Ada beberapa motif yang terdapat dalam cerita *Datu Lumuran*, yaitu sebagai berikut:

1. Motif Perkawinan

Datu Lumuran adalah seorang gadis cantik nan jelita dan berbakti kepada suami. Ia berasal dari alam yang berbeda dengan suaminya, yaitu alam air yang menjelmah menjadi manusia biasa ketika berada di darat untuk mencari makanan. Suatu waktu ketika *Datu Lumuran* memetik buah *kaisaq*, ia dipergoki oleh Batara Kassa. Ternyata buah yang ia petik ternyata milik Batara Kassa yang tidak diketahuinya. Disangkanya tanaman liar tak bertuan. Ketika *Datu Lumuran* tertangkap basah oleh Batara Kassa lalu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. *Datu Lumuran* tidak tahu harus berbuat apa dengan kejadian itu. Lalu Batara Kassa menawarkan jalan keluarnya, yaitu *Datu Lumuran* harus bersedia menjadi istrinya. Tawaran itu ditolak oleh *Datu Lumuran* dengan alasan bahwa mereka berbeda, berasal dari alam yang berbeda dan tidak mungkin bersatu. Namun, Batara Kassa

tetap memaksa. Akhirnya, *Datu Lumuran* menerima lamaran Batara Kassaq dengan syarat bahwa Batara Kassaq akan memenuhi persyaratan yang dimintanya, yaitu tidak boleh mengucapkan kata '*pida*' bila mencaci seseorang dan kata '*pongpai*' bila melihat sesuatu tidak berkenang dihatinya.

Dengan diterima/disetujuinya persyaratan itu, maka jadilah keduanya menjadi istri.

2. Motif Pelanggaran Janji Sakral dan Aturan Adat

Berselang beberapa lama mereka hidup sebagai suami istri, lahirlah seorang putri yang mungil dan cantik. Ketika *Datu Lumuran* sedang bertenun di serambi rumah dan Batara Kassaq sedang bekerja di bawah kolong rumah. Tak disangka, anaknya yang sedang tidur di atas rumah kencing dan air kencingnya mengenai tubuh Batara Kassaq. Batara Kassaq pun terkejut dibuatnya. Tanpa ia sadari, tiba-tiba ia berteriak, "Wah, *pida*, Pasuloan mengencingi saya." Teriakan itu didengar *Datu Lumuran* dan bersegera mengundurkan diri dari pekerjaannya lalu berangkat dengan membawa selembar hasil tenunannya menuju sungai dan langsung menyebarkan diri masuk ke dalam air.

Batara Kassaq kurang menyadari betapa penting arti kehadiran *Datu Lumuran* di sampingnya. Bahkan ia menunjukkan egonya sebagai suami yang dapat berbuat apa saja meskipun *Datu Lumuran* yang sudah berusaha berbakti secara ikhlas disia-siakannya. Akhirnya, ia merasakan sendiri akibatnya.

Datu Lumuran sebagai tokoh mitologis dalam cerita ini, telah menetapkan satu persyaratan dasar yang tidak boleh dilanggar oleh Batara Kassaq, jika ingin menikahinya. Syarat yang ditetapkan itu menunjukkan bahwa *Datu Lumuran* bukanlah wanita sembarangan, tetapi ia adalah bagian dari dunia lain entah itu Kayangan atau apa pun namanya.

3. Motif Cinta Sejati

Pada episode berikutnya, Pasuloan dan Kawanna bersepakat mengadakan hubungan gelap. Beberapa bulan setelah keduanya bergaul dan melakukan hubungan gelap (sembunyi-semunyi), hamillah Pasuloan. Akibat kehamilannya itu, masyarakat kampung menjadi marah, utamanya pemangku adat. Perbuatannya itu dianggap mengotori kampong. Hamil tanpa diketahui siapa suaminya. Saksi yang dijatuhkan kepadanya adalah pengusiran dari kampung halaman untuk selama-lamanya. Bila kembali dan ditemukan oleh seseorang maka bisa dibunuh tanpa ada sanksi bagi yang membunuhnya. Hukuman tersebut bernama hukum "*ditekte bannang malate*".

Ternyata Kawanna adalah betul-betul seorang pemuda yang patut diacungkan jempol dalam hal janji, ia membuktikan janjinya dengan cara muncul disaat detik-detik pelaksanaan hukuman untuk menyelamatkan Pasuloan. Dengan kemunculan

Kawanna membuat sanksi yang akan dijatuhkan pada Pasuloan dibatalkan dan perkawinan keduanya pun dilangsungkan.

4. Motif Teguh Memegang Janji

Sesuai apa yang dikatakan oleh Pasuloan, akan muncul seorang pemuda berpakaian putih dari atas gunung sebelah timur lalu berteriak seperti apa yang dikatakan sebelumnya oleh Pasuloan. Kawanna pun tiba tepat waktu di tempat itu dengan maksud akan menikahi Pasuloan secara resmi. Akhirnya, keputusan adat dibatalkan, pernikahan pun dilaksanakan, dan keduanya hidup berbahagia. Janji yang mereka pernah ikrarkan untuk dapat sehidup semata telah mereka buktikan.

5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil simpulan bahwa struktur fungsi pelaku yang diambil dari tuturan lisan cerita *Datu Lumuran* ditemukan 18 fungsi pelaku. Sebuah cerita rakyat tidak harus memenuhi semua fungsi seperti Vladimir Propp dalam pengkajiannya yang telah menemukan 31 fungsi karena pada tiap-tiap cerita memiliki struktur sendiri-sendiri meski sering terdapat persamaan-persamaan cerita.

Dalam cerita *Datu Lumuran* juga ditemukan beberapa motif. Motif-motif yang ditemukan adalah (1) motif pernikahan. (2) motif pelanggaran janji sakral dan aturan adat. (3) motif cinta sejati. dan (4) motif teguh memegang janji.

Daftar Pustaka

- Anonim. *Datu Lumuran* Cerita Rakyat Sulawesi Selatan (diceritakan kembali oleh Nurlina Arisnawati. 2007). Jakarta: Pusat Bahasa.
- Danandjaya, James. 2002. *Foklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Grafiti.
- Fokkema dan Elfrud Kuenne-IBSch. 1998. *Teori Sastra Abad kedua Puluh* (terjemahan dari *Theories Of Literature in The Twentieth Century* Oleh J Praptadiharja dan Kepler). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Jabrohim. 2001. *Metodologi Pengkajian Sastra*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widia.
- Selden, Raman. 1996. *Panduan Pembaca Teori Sastra Masa Kini* (diterjemahkan dari *A Readers Guide to Contemporary Literary Theory* oleh Rahmad Djoko

- Pradopo). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setia, Sudikan, Setya Yuwana. 2001. *Metode Pengkajian Sastra Lisan*. Surabaya: Citra.
- Sulastin, Sutrisno. 1983. *Hikayat Hang Tuah: Analisis Struktural dan Fungsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Propp, Vladimir. 1987. *Morfologi Cerita Rakyat* (diterjemahkan oleh Noriah Taslim). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia.
- Taum, Yoseph Yapi. 2011. *Studi sastra lisan: Sejarah, Teori, Metode, dan Pendekatan Disertai Contoh Penerapannya*. Yogyakarta: Lamalera.

ENKLAVE MUNA DI PULAU BUTON

La Ode Yusri, M.A.

Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dialektologi. Data dikumpulkan memakai teknik wawancara dengan perangkat daftar 200 kosakata dasar Swadesh dan daftar Nothofer. Analisis data secara kuantitatif memanfaatkan metode leksikostatistik (*lexicostatistic*), sedangkan secara kualitatif digunakan untuk menopang simpulan kuantitatif melalui metode inovasi bersama secara eksklusif (*exclusively shared innovation*).

Enklave bahasa Muna di Pulau Buton lebih erat hubungannya dengan bahasa Muna dialek selatan (GUMAS). Persentase kesamaan yang besar di antara keduanya sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya itu berkategori sebahasa (language). Artinya, enklave Muna di Pulau Buton merupakan variasi (secara geografis) bahasa Muna yang diturunkan dari satu bahasa purba, yaitu Prabahasa Muna (PM) yang juga menurunkan dialek-dialek dalam bahasa Muna, seperti dialek di utara (Lohia-Tongkuno) dan dialek selatan (GUMAS).

Kata kunci: Enklave, bahasa, Muna, Pulau Buton

1. Pendahuluan

Pengkajian terhadap rumpun bahasa Austronesia sudah dilakukan oleh para ahli linguistik sejak tahun 1784. Rentang waktu yang panjang itu rupanya belum cukup mematenkan pengklasifikasian secara umum mengenai rumpun bahasa Austronesia itu sendiri. Perdebatan terkait pencabangan masih kerap terjadi terutama pengelompokan terhadap bahasa Austronesia rumpun bahasa Melayu batasannya masih belum jelas (Collins, 1983:83). Hal ini kemudian dirumitkan lagi dengan belum terbitnya sebuah buku pun yang menyajikan sejarah bahasa Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura secara komprehensif dan ilmiah. Itulah kemudian klasifikasi dan pemetaan terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia menjadi sangat penting dan mendesak dilakukan.

Penelitian dialektologi dalam perkembangannya mulai menemukan bentuknya pada akhir abad ke-19, yang ditandai oleh munculnya dua penelitian yang dilakukan pada dua tempat (negara) yang berbeda dalam waktu yang relatif bersamaan. Penelitian yang pertama dilakukan di Jerman oleh Gustav Wenker pada tahun 1876 dan yang kedua dilakukan di Perancis oleh Jules Louis Gillieron pada tahun 1880 (Moulton, 1969:59). Kedua penelitian yang menjadi tonggak awal munculnya studi dialektologi tersebut secara umum bersifat diakronis (historis). Namun, oleh karena kedua penelitian itu didasarkan pada upaya pembuktian hukum perubahan bunyi yang dikemukakan kaum Neogrammarian, yang disebut dengan hukum bunyi tanpa kekecualian, maka segala kajian yang bersifat diakronis seperti hubungan dialek/dialek/subdialek-subdialek dengan bahasa induk yang menurunkannya; hubungan antara dialek-dialek/subdialek-subdialek itu satu sama lain, serta hubungan antara dialek-dialek/subdialek-subdialek itu dengan dialek-dialek/subdialek-subdialek dari bahasa lain yang diduga ikut pula membentuk kejadian dialek-dialek/subdialek-subdialek dari bahasa yang diteliti itu belum mendapat perhatian.

Hal yang sama, yang juga belum mendapat perhatian yang memadai dalam kedua kajian dialektologi di atas adalah yang berkaitan dengan aspek sinkronis. Dalam hal ini yang dimaksudkan berkaitan dengan bidang kajian linguistik yang dijadikan dasar kajiannya lebih ditekankan pada perbedaan bidang fonologi daripada bidang linguistik lainnya, seperti bidang morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik. Hal ini dapat dimaklumi karena sasarannya diutamakan pada pembuktian kebenaran hukum perubahan bunyi yang diajukan kaum neogrammarian. Dalam pada itu pula, penentuan status isolek sebagai dialek atau subdialek sepenuhnya tidak didasarkan pada perbedaan yang terdapat pada semua bidang kajian linguistik di atas.

Selanjutnya, perkembangan penelitian dialektologi pasca-Wenker dan Gillieron memperlihatkan kecenderungan ke arah terbentuknya dua pola penelitian yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, penelitian yang hanya menekankan aspek sinkronis dan yang kedua penelitian yang tidak hanya menekankan aspek

sinkronis, tetapi juga aspek diakronis. Penelitian dialektologi dilakukan oleh Teew (1958) untuk bahasa Sasak di Pulau Lombok yang menjadi tonggak awal munculnya penelitian dialektologi di Indonesia merupakan contoh penelitian dialektologi yang bersifat sinkronis. Tampaknya, dalam perkembangan selanjutnya penelitian dialek geografis jenis ini mendapat tempat yang subur dalam penelitian dialektologi di Indonesia. Hal ini berkat munculnya seorang ahli dialektologi yang berkebangsaan Indonesia yaitu Ayatrohaedi dengan bukunya yang cukup dikenal pada kalangan dialektolog Indonesia adalah *Dialektologi: Sebuah Pengantar* (1983)

Jika merujuk ke hasil pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Bahasa, kini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2008), dan oleh Grimes (2000) dalam *The Languages of The World*, di Indonesia terdapat tidak kurang 698 buah bahasa daerah dan dialeknya (dalam Masinambow dan Haenen, 2000). Bahasa daerah dan dialeknya itu memiliki jumlah pemakai dan luas daerah pemakaian yang berbeda-beda. Ada yang jumlah pemakainya sedikit misalnya bahasa Irian Jaya (Papua) dan Nusa Tenggara Timur (lihat Ayatrohaedi, 1985:1).

Bahasa Muna (BM) adalah salah satu dari 698 bahasa daerah di Indonesia yang pemakaiannya tidak hanya terdapat di Kabupaten Muna di Pulau Muna tetapi juga tersebar/terdapat di Pulau Buton. Kajian geografi dialek terhadap bahasa Muna sebelumnya sudah dilakukan oleh Sidu dkk pada 1998, tetapi kajiannya hanya sebatas Bahasa Muna di Pulau Muna. Sejauh ini kerja penelitian terkait bahasa Muna hanya menjangkau identifikasi dan pengklasifikasiannya saja yang sudah dilakukan oleh *Summer Institute of Linguistik* (SIL) pada 2006, dan Pusat Bahasa (2008).

Menurut Van den Berg (1989), bahasa Muna terdiri atas tiga dialek yaitu (1) dialek Muna standar, (2) dialek Tiworo Kepulauan, dan (3) dialek selatan (daerah Siompu dan Gulamas). Bahasa Muna juga terdapat di Kabupaten/Pulau Buton. Daerah-daerah seperti Kamaru, Liabuku, Batauga, Siompu, Gu, Lakudo, Mawasangka, sebagian Lasalimu, Bungi, sebagian Sampolawa adalah daerah-daerah di Buton yang bahasanya adalah merupakan varian bahasa Muna. Daerah-daerah enklave Muna di Buton itu mengidentifikasi diri mereka sebagai *Pancana*. *Pancana* adalah komunitas Muna yang tinggal di daerah periveral, daerah pinggiran Muna, dan di Pulau Buton bagian barat. Status *Pancana* karena pengaruh bahasa Wolio yang lebih berprestise dianggap sebagai bahasa minoritas. Dinamika Muna lebih diberi peluang untuk hidup daripada bahasa lain di samping bahasa Wolio, karena peranan Muna sebagai benteng penjaga dan penopang (barata) kesultanan adalah hal lain yang mungkin bisa menunjang.

Charles E. Grimes and Barbara D. Grimes dalam *Languages of South Sulawesi* (1987:59) menyatakan bahwa rumpun Muna-Buton masuk dalam rumpun bahasa-bahasa di Sulawesi Selatan, sedangkan La Ode Sidu dkk menyebut bahasa Muna-Buton masuk dalam rumpun Sulawesi Tenggara. Penelitian lain yang dilakukan oleh

Summer Institute of Linguistic (SIL) 2006 tidak menyebutkan adanya enklave Muna di Buton. SIL hanya mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasi bahasa Muna dalam empat dialek, yaitu Muna Utara (daerah Tongkuno, Kabawo, Lawa), Muna Selatan (daerah Gulamas), Muna Barat (daerah Lohia) Muna Timur (daerah Tiworo Kepulauan).

Relasi historis menunjukkan sangat dekatnya enklave bahasa Muna di Pulau Muna, khususnya di Muna Selatan (daerah Gu, Lakudo, Mawasangka atau diakronimkan Gulamas) dengan Siompu, Talaga, Batauga, Kapontori, Todanga, sebagian Kamaru, Lipu, Liabuku, sebagian Sampolawa, dan sebagian Lasalimu di Pulau Buton. Terdapat tiga hal yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana hubungan kekerabatan isolek-isolek Muna yang ada di Pulau Buton dengan dialek Selatan (Gu-Mawasangka), dan bahasa Muna dialek Utara (Tongkuno), (2) Bagaimana hubungan isolek-isolek Muna yang ada di Pulau Buton dengan dialek-dialek bahasa Muna di Pulau Muna, dan (3) bagaimanakah pengaruh bahasa Muna dialek Selatan (Gu-Mawasangka) terhadap isolek-isolek Muna di Pulau Buton.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dimasud menyangkut metode analisis yang digunakan dalam penentuan hubungan kekerabatan antara isolek-isolek Muna di Pulau Buton dengan dialek Selatan (Gu-Mawasangka) dan bahasa Muna dialek Utara; penentuan hubungan isolek-isolek itu dengan dialek-dialek bahasa Muna, dan penentuan pengaruh dialek Selatan (Gu-Mawasangka), dan bahasa Muna dialek Utara terhadap tiap-tiap isolek itu.

Penentuan hubungan kekerabatan, dalam hal ini keeratan hubungan antara isolek Muna dengan dialek Selatan (Gu-Mawasangka), dan bahasa Muna dialek Utara secara kualitatif menggunakan metode inovasi bersama secara eksklusif (*exclusively shared innovation*) melalui pendekatan dari atas ke bawah (*top down reconstruction*). Sedangkan penentuan tingkat kekerabatan antara masing-masing isolek itu dengan Dialek Selatan (Gu-Mawasangka), dan bahasa Muna dialek Utara dilakukan selain secara kuantitatif juga secara kualitatif. Secara kuantitatif memanfaatkan metode leksikostatistik (*lexicostatistic*), sedangkan secara kualitatif digunakan untuk menopang simpulan kuantitatif melalui metode inovasi bersama secara eksklusif (*exclusively shared innovation*).

Begitu juga penentuan hubungan isolek-isolek Muna di Pulau Buton dengan dialek-dialek bahasa Muna, penetapan awal dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode leksikostatistik, selanjutnya dilakukan pembuktin secara kualitatif melalui metode inovasi bersama. Penetapan metode leksikostatistik dilakukan dengan teknik mengumpulkan kosa kata dasar bahasa (Muna, Gu-Mawasangka, dan isolek Muna di Pulau Buton); menetapkan dan menghitung

pasangan-pasangan mana yang merupakan kata kerabat; dan menghubungkan hasil perhitungan yang berupa persentase kekerabatan dengan kategori kekerabatan. Setelah kosa kata dasar diperoleh kemudian dilakukan perhitungan jumlah kosa kata yang berkerabat dengan memperhatikan pedoman (1) mengeluarkan glos yang tidak diperhitungkan yaitu kata-kata kosong dan kata-kata pinjaman; dan (2) menetapkan kata kerabat, yang dapat berupa kata yang identik (yaitu kata yang sama makna dan formatifnya); dan kata yang memiliki korespondensi bunyi.

Penerapan metode inovasi bersama bersifat eksklusif untuk mengetahui bentuk-bentuk kebahasaan yang mengelompokkan bahasa turunan ke dalam satu kelompok yang lebih dekat hubungannya, karena memperlihatkan inovasi yang berciri linguistik eksklusif yang menyebar pada bahasa-bahasa yang diperbandingkan, termasuk penentuan hubungan kedekatan antardialek yang ada dalam satu bahasa (periksa Mahsun, 2000)

Sedangkan pembicaraan pengaruh Dialek Selatan (Gu-Mawasangka), dan bahasa Muna dialek Utara terhadap tiap-tiap isolek Muna di Pulau Buton dilakukan dengan analisis yang bersifat kualitatif dan analisis yang bersifat kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui apakah bentuk-bentuk yang terdapat pada dialek, subdialek, atau daerah pengamatan itu sebagai bentuk-bentuk inovasi atau bentuk yang diwarisi bahasa awal. Analisis kualitatif ini menggunakan metode *padan intralingual* dengan teknik *hubung banding menyamakan* (HBM) dan teknik *hubung banding membedakan* (HBB). Adapun analisis kuantitatif, digunakan untuk melihat frekuensi munculnya bentuk-bentuk pengaruh Dialek Selatan (Gu-Mawasangka), dan bahasa Muna dialek Utara terhadap isolek Muna di Pulau Buton, yang pada gilirannya digunakan sebagai dasar untuk mengkategorisasikannya sebagai isolek yang mendapat pengaruh kuat, sedang, atau rendah (Mahsun, 1995:142—143).

3. Pembahasan

1.1 Hubungan Kekerabatan Isolek-Isolek Muna di Pulau Buton dengan Bahasa Muna

Berdasarkan pengamatan dan perbandingan secara cermat terhadap sejumlah kosakata dasar (Swadesh dan daftar Nothofer) antara isolek Muna di Pulau Buton dengan bahasa Muna ditemukan sejumlah perubahan bunyi yang berupa inovasi bersama (baik yang terjadi secara teratur maupun yang tidak teratur) dan retensi bersama dari Proto Austronesia (selanjutnya disingkat PAN). Pada tingkat yang paling tinggi, PAN ditemukan inovasi bersama baik yang terjadi secara teratur maupun yang tidak teratur dan retensi bersama dari PAN, yaitu:

- (1) Inovasi bersama secara teratur berupa perubahan bunyi /ə/ dari PAN pada posisi penultima dan ultima terbuka menjadi /e/ dan /o/ ke dalam IMPB,

BM, dan Gumas. Dari data yang dikumpulkan dapat diidentifikasi bahwa perubahan /ə/ ternyata lebih banyak menjadi /o/ daripada /e/ baik itu dalam IMPB, BM, maupun Gumas (PAN : *ə/-# > IMPB, BM, GUMAS: /e/ atau /o/). Kaidah korespondensi ini menjelaskan terjadinya inovasi berupa *split*. Contoh:

GLO	PAN	IMPB	BM	Gumas
telur	*qan-təluɣ	unteli	ghunteli	unteli
pusar	*pusəɟ	pue	puhe	pue
hitam	*qitəɖm	ito	ghito	ito
telan	*təlɪəŋ	tolo/dhoku	tolo	tolo
belah	*bəlah	weta	wole	weta
tiga	*təlu	tolu	tolu	tolu

- (2) Inovasi bersama secara teratur berupa perubahan fonem diftong PAN /*uy/ pada silabe ultima menjadi fonem tinggi depan /i/ dalam IMPB, BM, dan GUMAS (*uy/-# > IMPB, BM, GUMAS : /i/). Contoh:

GLO	PAN	IMPB	BM	Gumas
babi	*babuy	wewi	wewi	wewi
api	*hapuy	ifi/ipi	ifi	if
berenang	*laŋuy	leni	leni	leni
telur	*qan-təluɣ	unteli	ghunteli	unteli

Fonem diftong PAN *uy pada posisi ultima mengalami monoftongisasi menjadi fonem tinggi depan /i/ dalam IMPB, BM, dan GUMAS. Salah satu ciri penanda dalam IMPB, BM, dan GUMAS adalah terjadinya proses monoftongisasi pada kata-kata fonem diftong yang diwariskan oleh Proto Austronesia (PAN) dan kata-kata serapan dari bahasa Indonesia. Kaidah korespondensi serupa ini lazimnya disebut sebagai inovasi berupa substitusi.

- (3) Inovasi bersama secara teratur berupa monoftongisasi fonem diftong PAN *ey dan *ay menjadi fonem tengah depan /e/ pada posisi ultima dalam IMPB, BM, dan GUMAS (PAN *ey dan *ay/-# > IMPB, BM, dan GUMAS: /e/). Contoh:

GLO	PAN	IMPB	BM	Gumas
mati	*matey	mate	mate	mate
hati	*qatey	ate	ghate	ate
kaki	*qaqay	ae	ghaghe	ae
ular	*qulay	ule	ghule	ule
lembar	*taŋkay	taŋke	taŋke	taŋke

- (4) Inovasi bersama secara teratur berupa monoftongisasi fonem PAN *aw menjadi /o/ pada silabe ultima. Contoh:

GLO	PAN	IMPB	BM	Gumas
Pisau	*pisau	piso	piso	piso

- (5) Inovasi bersama secara tidak teratur yaitu fonem konsonan PAN *p pada posisi awal kata mengalami perubahan menjadi /f/ dalam IMPB, BM, dan GUMAS. Jika fonem konsonan PAN /*p/ berada pada posisi akhir kata mengalami pelepasan menjadi zero (ϕ). (PAN *p/-# > IMPB, BM, GUMAS /f/ atau PAN *p/#- IMPB, BM, GUMAS > ϕ). Contoh:

GLO	PAN	IMPB	BM	Gumas
paha	*paqa	fa:a	fagha	fa:a
atap	*qatɔp	ato	ghato	ato

- (6) Inovasi bersama secara tidak teratur berupa perubahan fonem /*t/ PAN pada silabe ultima menjadi zero (ϕ) dalam IMPB, BM, GUMAS (PAN *t/#- > IMPB, BM, dan GUMAS : ϕ). Contoh:

GLO	PAN	IMPB	BM	Gumas
langit	*lan̩it	lani/layano	lani	lani
pahit	*paqit	paI	paghi	paI

1.2 Perbandingan Bahasa Muna Dialek Utara dan Dialek Selatan

Kajian perbandingan ini akan menemukan perangkat kata yang berkerabat (kata kognat), tingkat kekerabatan (presentase kekerabatan), dan kaidah fonologis dan leksikal yang terjadi pada bahasa Muna dialek Utara dan dialek selatan (GUMAS) berdasarkan daftar 200 kosakata dasar Swadesh. Hasil Perhitungan Persentase Kekerabatan berdasarkan kosakata dasar Swadesh Bahasa muna dialek utara (Mn) dan dialek selatan (Gumas) ditemukan hasil sebagai berikut:

X = 2 (Kata dasar yang tidak dimasukan dalam perhitungan)

+ = 166 (Perangkat kata kekerabatan)

- = 32 (Perangkat kata tidak berkerabat)

Jadi total gloss yaitu $200 - 2 = 198$

Untuk menghitung persentase kekerabatan dilakukan dengan menjumlah kata yang berkerabat dibagi dengan jumlah seluruh kata yang dianalisis (total gloss) dan kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi persentase kekerabatan bahas Muna dan Mawasangka yaitu: $= (166/198) \times 100\% = 83.8\%$

Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekerabatan

bahasa Muna dan bahasa Gu-Mawasangka (dialek selatan) adalah 83.8%. Karena hasilnya 81%, maka hubungan bahasa Muna dialek Utara (Tongkuno) dan dialek Selatan (Gu-Mawasangka) dikategorikan sebagai hubungan antardialek dalam sebuah bahasa. Hal ini sesuai dengan standar kekerabatan yang disebutkan oleh Terry Crowley (1992:70) berdasarkan analisis leksikostatistik bahwa kosa kata inti yang sumber kata kekerabatannya di atas 81% dikategorikan sebagai hubungan antardialek dalam sebuah bahasa.

Tabel 1. Korespondensi Fonem di antara Bahasa Muna Dialek Utara (Mn) dan Dialek Selatan (Gumas) yang Dapat Diidentifikasi

Jenis Fonem	Korespondensi Mn-Mw	Contoh-Contoh			Keterangan
		Mn	GUMAS	Arti	
Konsonan	/r/-/h/ (Kaidah tanpa syarat)	no-rato randa re ^{ya} fo-ro ^{wu} wora de-ŋkora do-ere robine robinento no-roko	do-hato handa he ^{ya} fo-ho ^u de-wohae de-ŋkoha do-ehe hobine hobineno no-hoko	Datang Perut Darah Minum Lihat Duduk Berdiri Perempuan Istri Tajam	Data No. 7 Data No. 14 Data No. 23 Data No. 40 Data No. 46 Data No. 51 Data No. 52 Data No. 55 Data No. 58 Data No. 81
	/G/-/ø/ (Kaidah tanpa syarat)	GaGe Ka-Gule-Gule Gate Gowe ^{ya} wuGu Gae moGane Gato de-Goli Gunteli	ae ule-ule ate owe ^{ya} wu ^u do-ae moane ato de-oli unteli	Kaki Usus Hati Bahu Leher Menangis Laki-laki Atap Beli Telur	Data No. 4 Data No. 16 Data No. 17 Data No. 19 Data No. 25 Data No. 34 Data No. 54 Data No. 62 Data No. 91 Data No. 98
	/h/-/ø/ (Kaidah tanpa syarat)	no:pandeha:ne no-tehi anahi dahu tehi ne-hamai ohae lahaeno	pandean do-tei ana ⁱ dau te ⁱ se-amai aeno laa ^{ye}	Tahu Takut Anak Anjing Laut Di mana Siapa Siapa	Data No. 20 Data No. 22 Data No. 56 Data No. 96 Data No. 124 Data No. 181 Data No. 188 Data No. 190

pada bahasa GUMAS (tondu-gundu-guntu). Adapun, vokal /o/-/u/ pada bahasa Mn mengalami asimilasi /u/-/u/.

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 3. 'guntur' | Mn [tondu] | Data no. 134 |
| 4. 'terbang' | Mn [do-horo] | Data no. 101 |
| | GUMAS [lola] | |

Fonem /r/ (ultima) pada bahasa Mn berkorespondensi dengan fonem /l/ pada bahasa GUMAS, sedangkan fonem /h/ (ultima) pada bahasa Mn terealisasi dengan fonem /l/ pada bahasa GUMAS akibat dari asimilasi sporadis (horo-holo-lola). Adapun, vokal /o/-/o/ pada bahasa Mn mengalami disimilasi /o/-/a/.

Kaitannya dengan PAN, ditemukan gejala metatesis (vokal dan konsonan) seperti yang diperlihatkan dalam bahasa GUMAS pada data no. 43 *taliŋa > Mw[taliŋa] 'telinga' dengan kaidah perubahannya yaitu taliŋa > taliŋa (met.vokal) > taliŋa (met.konsonan).

Adapun, kata-kata yang masih mempertahankan kemiripan dengan PAN dapat dilihat pada contoh berikut.

- | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------|
| 1. 'datang' | *mai | Mn [mai] | Data no. 7 |
| 2. 'susu' | *susu | Mn [susu] | Data no. 18 |
| 3. 'mati' | *matey | Mn [mate] | Data no. 75 |
| | | GUMAS [mate] | |
| 4. 'sayap' | *panji | Mn [pani] | Data no. 100 |
| | | GUMAS [pani] | |
| 5. 'bunga' | *buŋa | Mn [bunga] | Data no. 116 |
| 6. 'panas' | *ma-panas | Mn [no-pana] | Data no. 138 |
| 7. 'kuning' | *ma-kuniŋ | Mn [no-kuni] | Data no. 150 |
| | | GUMAS [ka-kuni] | |
| 8. 'tebal' | *ma-kapal | Mn [no-kapa] | Data no. 157 |
| | | GUMAS [no-kapa]. | |

Data di atas memperlihatkan beberapa persamaan (kemiripan) bahasa Muna dialek utara dan dialek selatan (GUMAS) terhadap bahasa protonya, PAN. Setiap kata dasar dalam bahasa PAN mengalami pelepasan (hilang) dalam bahasa Mn dan GUMAS karena kedua bahasa tersebut adalah bahasa vokalis. Adapun, gugus konsonan nasal /nj/ tidak dikenal dalam bahasa Muna dan GUMAS sehingga kata *panji terealisasi dengan [pani] dalam bahasa Muna dan GUMAS.

Adapun, tanda/evidensi penyatu dari bahasa Muna dialek utara dan dialek selatan GUMAS tersebut yaitu adanya persamaan afiks baik sebagai afiks pembentuk/penanda verba (no/ne, fo/fe, dan do/de) dan afiks pembentuk/penanda adjektif yang juga berupa (no/ne). contoh-contoh yang memperlihatkan semua penanda verba dan adjektif tersebut sangatlah banyak seperti yang terdapat dalam tabel 1 di atas.

Sedangkan evidensi/tanda pemisah kedua bahasa tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi yakni (1) fonem /r/ sebagai ciri khas bahasa Mn yang berbeda dengan bahasa GUMAS yang sering menggunakan fonem /h/, (2) bahasa GUMAS lebih sering memperlihatkan bunyi glotal dan variasi diftong yang disebabkan fonem /G/ dan /h/ pada bahasa Mn sering dilesapkan dalam bahasa GUMAS sehingga kata-kata dalam bahasa GUMAS sering memperlihatkan fonomena diftong, (3) bahasa Mw mengenal fonem /j/ sedangkan bahasa Mn tidak mengenal fonem /j/ seperti dalam data no. 151 Mw [ijo] 'hijau'.

Selanjutnya, hadirnya bunyi glotal (?) pada bahasa Mn dan GUMAS bersifat arbitrer (non distingtif) sehingga tidaklah membedakan makna karena bunyi glotal (?) hanyalah merupakan faktor idiolek/wicara saja. Adapun, penambahan sufiks /-e/ dalam bahasa Mn dan GUMAS bersifat arbitrer (variasi bebas) karena kehadirannya mana suka dan tidaklah membedakan makna. Selain itu, sufiks /-e/ ini juga dapat menunjukkan evidensi penyatu lainnya antara bahasa Mn dan GUMAS sebagaimana yang terlihat pada tabel 3 di bawah.

Tabel 2. Variasi Bebas Sufiks /-e/

No.	Bahasa Mn	Bahasa GUMAS	Gloss	Keterangan
1	denan̄ku	denan̄kue	Mengunyah	Data no. 38
2	de-si'a	desiyae	Menggigit	Data no. 41
3	wora	de-wohae	Melihat	Data no. 46
4	do-wetae	do-wetae	Membelah	Data no. 80
5	de-intarae	de-intahae	Memegang	Data no. 89
6	do-len̄kae	do-len̄kae	membuka	Data no. 92

Keterangan Tambahan

Pertalian makna dapat ditemukan pada sejumlah data dalam bahasa Mn seperti yang terdapat pada data no. 16 Mn [ka-Gule-Gule] 'usus' dan data no. 107 Mn [ka-Gule-Gule] 'cacing'. Kata *usus* dan *cacing* memiliki kemiripan bentuk sehingga direalisasikan dalam bahasa Mn dengan kata yang sama yaitu [ka-Gule-Gule]. Adapun, dalam bahasa GUMAS lebih sering dijumpai kata dasar yang memiliki pertalian/relasi makna seperti pada contoh-contoh berikut:

1. GUMAS [ule-ule] 'usus' (data no. 16) dan Mw [ule] 'ular' (data no. 106)
2. GUMAS [abu] 'debu' (data no. 116) dan Mw [abu] 'abu' (data no. 146).
3. GUMAS [no-gende] 'menguap' (data no. 47) dan Mw [no-gende] 'membengkak' (data no. 87).

Kata *usus* dan *ular* memiliki kemiripan bentuk sehingga direalisasikan dalam bahasa GUMAS dengan kata yang sama yaitu [ule]. Demikian pula pada kata *debu* dan *abu* terealisasi dengan kata [abu], serta *menguap* dan *membengkak* yang terealisasi dengan kata [no-gede].

Selain data di atas, kata dasar *perempuan* memiliki keterkaitan/relasi makna dengan *istri* sebagaimana *suami* memiliki relasi makna dengan *laki-laki*. Olehnya itu, untuk membentuk kata *suami/istri* dalam bahasa Mn dilakukan dengan jalan menambahkan penanda /nto/ pada akhir kata laki-laki/perempuan seperti yang terlihat pada contoh berikut:

‘laik-laki’	Mn [moGane] dan ‘suami’	Mn [moGanento]
‘perempuan’	Mn [robine] dan ‘istri’	Mn [robinento].

Hal yang sama juga terjadi pada bahasa GUMAS, hanya saja penanda /nto/ dalam bahasa Mn direalisasikan dengan /no/ dalam bahasa GUMAS seperti pada contoh berikut:

‘laki-laki’	GUMAS [moane] dan ‘suami’	GUMAS [moaneno]
‘perempuan’	GUMAS [hobine] dan ‘istri’	GUMAS [hobineno].

1.3 Tingkat Kekerabatan Isolek-isolek Muna di Pulau Buton dengan Bahasa Muna di Utara dan Dialek Selatan (Gumas)

1.3.1 Analisis Kuantitatif

Secara kuantitatif, penentuan tingkat kekerabatan salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan metode leksikostatistik, yaitu suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata (leksikon) secara statistik untuk kemudian menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain (Keraf, 1962:121). Walaupun penerapan metode ini dalam pengelompokan terhadap bahasa-bahasa khususnya bahasa-bahasa Austronesia tentang kesimpulan yang dicapai ditemui beberapa kelemahan misalnya persentase kemiripan kata-kata kerabat bahasa-bahasa nusantara rata-rata 30—40%, tidak seperti kemiripan kata-kata dasar dalam bahasa-bahasa Eropa yang berkisar antara 60—70%, tetapi penerapan metode leksikostatistik dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu selain belum ditemukan adanya metode lain yang bersifat kuantitatif dalam penentuan tingkat kekerabatan bahasa, bahwa tinggi rendahnya angka persentase yang ditunjukkan berdasarkan perhitungan leksikostatistik paling tidak dapat mengantarkan kita pada suatu kesimpulan bahwa suatu bahasa tertentu memiliki tingkat hubungan yang relative erat dibandingkan dengan yang lainnya (ditandai adanya persentase yang tinggi itu), dan sebaliknya.

Metode leksikostatistik ini dipandang sederhana dengan menggunakan alat utama berupa daftar 200 kosakata dasar Swadesh untuk menelusuri padanan kata bahasa-bahasa yang diteliti. Setelah daftar diisi, persentase kata ditetapkan dengan mengandalkan pemahaman tentang hukum perubahan bunyi yang teratur antarbahasa (Fernandez, 1996:23).

Berdasarkan pengamatan melalui pendekatan kuantitatif, tingkat kekerabatan antara ketiga isolek muna di Pulau Buton (ILB, ILP, dan IL) dengan bahasa Muna dialek utara dan dialek selatan (Gumas) melalui perhitungan leksikostatistik dengan menggunakan 200 kosa kata dasar Swadesh memperlihatkan persentase hubungan kekerabatan yang dapat diamati pada table di bawah ini.

Tabel Persentase Kesamaan Kata Kerabat Isolek-Isolek Muna di Pulau Buton dengan Bahasa Muna dialek Utara dan Dialek Selatan (Gumas) Berdasarkan Perhitungan Leksikostatistik 200 kosakata dasar Swadesh

60,29	93,00 ILP
59,29	83,64 ILB
45,45	50,15 IL
41,48	
	41,48

BM

GUMAS (Dialek Selatan)

Keterangan:

IL : Isolek Lawele

BM : Bahasa Muna

ILB : Isolek Liabuku

GUMAS : Gu-Mawasangka

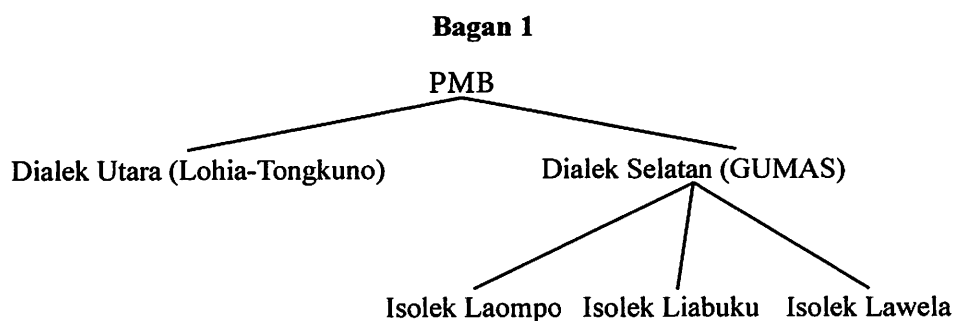
ILP : Isolek Laompo

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, persentase kesamaan/kemiripan kata-kata seasal diantara keempat isolek Muna di Pulau Buton dengan bahasa Muna dan dialek GUMAS cukup bervariasi. Variasi persentase kesamaan/kemiripan antara isolek-isolek Muna di Pulau Buton dengan bahasa Muna berada diantara 45,45% (persentase kesamaan paling rendah) —50,29% (persentase kesamaan paling tinggi), sedangkan persentase kesamaan antara isolek Muna di Pulau Buton dengan dialek selatan GUMAS berada diantara 83,64% (persentase kesamaan paling rendah) —93,00% (persentase kesamaan paling tinggi).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isolek-isolek Muna di Pulau Buton dengan dialek selatan GUMAS jauh lebih erat hubungannya dibandingkan hubungan isolek-isolek itu dengan bahasa Muna dialek utara (standar). Hal ini ditandai oleh tingginya persentase kesamaan antara isolek-isolek itu dengan dialek selatan GUMAS

dan rendahnya persentase kesamaan isolek-isolek itu dengan bahasa Muna dialek Utara. Rata-rata persentase kesamaan isolek-isolek Muna di Pulau Buton dengan bahasa Muna dialek utara yaitu 48,40%, sedangkan rata-rata persentase kesamaan isolek-isolek Muna di Pulau Buton dengan dialek GUMAS yaitu, 88,38%. Dalam hubungan dengan bahasa Muna dialek Utara, isolek Lawele menunjukkan persentase paling rendah yaitu 45,45%, sedangkan isolek Liabuku dan Laompo menunjukkan persentase paling tinggi yaitu 60,29% dan 59,29%. Dalam hubungan dengan dialek selatan GUMAS, isolek Laompo memiliki persentase kesamaan paling tinggi yaitu 93,00% dan isolek Lawela menunjukkan persentase kesamaan paling rendah yaitu 50,15%.

Jadi, bertolak dari persentase kesamaan antara isolek-isolek Muna di Pulau Buton dengan bahasa Muna dialek utara dan dialek selatan (GUMAS) dapat dikatakan bahwa isolek-isolek itu lebih erat hubungannya dengan bahasa Muna dialek selatan (GUMAS). Persentase kesamaan di atas sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya terkategori sebahasa (*language*). Artinya isolek-isolek Muna di Pulau Buton merupakan variasi (secara geografis) bahasa Muna yang diturunkan dari satu bahasa purba yaitu Prabahasa Muna (PM) yang juga menurunkan dialek-dialek dalam bahasa Muna seperti di utara dan selatan (GUMAS). Untuk memperjelas uraian di atas dapat dibuat diagram seperti di bawah ini.



4. Kesimpulan

Bertolak dari persentase kesamaan antara isolek-isolek Muna di Pulau Buton dengan bahasa Muna dialek utara dan dialek selatan (GUMAS) dapat dikatakan bahwa isolek-isolek Muna di Pulau Buton itu lebih erat hubungannya dengan bahasa Muna dialek selatan (GUMAS). Persentase kesamaan keduanya sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya itu terkategori sebagai sebahasa (*language*). Artinya isolek-isolek Muna di Pulau Buton merupakan variasi (secara geografis) bahasa Muna yang diturunkan dari satu bahasa purba yaitu Prabahasa Muna (PM) yang juga menurunkan dialek-dialek dalam bahasa Muna seperti dialek di utara (Lohia-Tongkuno) dan selatan (GUMAS).

Daftar Pustaka

- Adelaar, K. A. 1985. *Proto-Malayic: The Reconstruction of its Phonology and Part of its Lexicon and Morphology*. Alblaserdam: offsetdrukkerij kanter BV.
- Ayatrohaedi. 1983. *Dialektologi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Berg, van Den. 1989. *A Grammar of the Muna Language*. Holland. Foris
- Blust, Robert A. 1970. *Proto-Austronesian Addenda*. Oceanic Linguistics. IX/2: 104—162
- Bynon, T. 1977. *Historical Linguistics*. Cambridge University Press.
- Collins, James T. 1986. *Antologi Kajian Dialek Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Chambers, J.K. dan P. Trudgill. 1980. *Dialektologi*. Great Britain: Cambridge University Press.
- Dyen, Isodere. 1953. *The Proto Malayo Polinesia Laryn Gals*. Baltimore: The Linguistic society of America
- Esser, S.J. 1951. *Peta Bahasa-Bahasa di Indonesia*. Risalah Balai Pustaka. Djakarta: Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
- Fernandez, Inyo Yos. 1996. *Relasi Historis Kekerabatan Bahasa Flores: Kajian Linguistik Historis Komparatif Terhadap Sembilan bahasa di Flores*. Ende: Nusa Indah.
- Mahsun. 1991. *Morfologi Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh*. Tesis S2. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Mbete, Aron Meko. 1990. *Rekonstruksi Proto Bahasa Bali-Sasak-Sumbawa*. Disertasi: Universitas Indonesia
- Nothofer, Bernd. 1975. *The Reconstruction of Proto Malayo-Javanic*. S-Gravenhage-Martinus Nijhoff.
- 1990. *Tinjauan Sinkronis dan Diakronis Dialek-Dialek Bahasa Jawa di Jawa Barat dan Jawa Tengah (Bagian Barat)*. Makalah untuk Ceramah dan Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Bahasa-Bahasa Asia Tenggara-Pasifik, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 8 Desember 1990.

Poedjosoedarmo, G. (tanpa tahun). *Linguistik Historis*. Brunei Darussalam: University Brunei Darussalam.

Tawangsih Lauder, Multamia R.M. 1990. *Pemetaan dan Distribusi Bahasa-Bahasa di Tangerang*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

**BAHASA BENDA:
Arkeologi dan Sejarah Tutar di Maluku**

Marlon Ririmasse
Balai Arkeologi Maluku
ririmasse.yahoo.com

Abstrak

Sudah lewat tiga abad semenjak studi kepurbakalaan diinisiasi di Maluku. Saat itu, ilmuwan otodidak Rumphius menulis karya akademis tentang berbagai benda unik-antik dari kepulauan ini dengan segenap kisah di balik benda-benda tersebut. Kini, di era ketika riset arkeologi melekat pada pendekatan yang semakin saintifik, narasi lokal tetap setia menjadi napas yang menghidupkan objek dan situs masa lalu di wilayah ini. Sejarah tutur, dengan beragam representasinya, adalah elemen yang melekatkan jati diri Maluku pada segenap pusaka masa lalu. Elemen yang menegaskan tentang akar dari mana segenap pusaka ini berasal dan kepada siapa pengetahuan tentang segenap pusaka tersebut harus dikembalikan. Meski telah dilakukan lebih dari lima dekade, dan senantiasa bertautan dengan sejarah tutur, studi arkeologi modern di Maluku belum banyak memberi ruang bagi kajian-kajian akademis tentang hubungan sejarah tutur dan riset arkeologi. Tulisan ini merupakan tinjauan awal untuk mencoba mengamati prospek sejarah tutur dalam studi arkeologi di Maluku. Pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka dengan perhatian pada telaah atas rekam penelitian arkeologis yang bertautan dengan sejarah tutur di wilayah ini. Hasil studi awal ini menemukan bahwa pengetahuan sejarah tutur dan narasi lokal memiliki potensi luas untuk dikembangkan dalam studi kepurbakalaan di Maluku.

Kata Kunci: Arkeologi, Sejarah Tutar, Maluku

Abstract

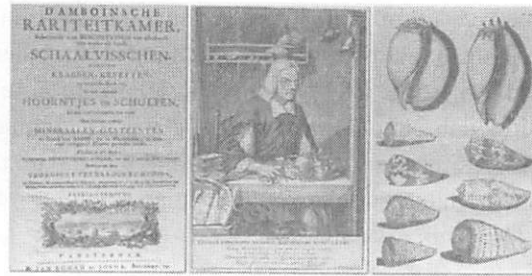
It has been three centuries since the archaeological study was initiated in Maluku. At that time, self taught scientist, Rumphius, wrote his academic work on the unique and antique objects in the archipelago followed by the stories behind those objects. Recently, when archaeological research has developed to be more scientific, local narratives remain as the key element for archaeological objects and sites in the region. Oral histories, in its various representations, have become an element that embeds Maluku identity in these heritages. An element that affirmed the origin of these heritage and to whom all of the related knowledge should be returned. Despite the record of five decades of study, archaeological research in Maluku has not shared proper focus on the relation between oral histories and archaeological studies. This paper is a preliminary review to observe the prospect of oral history contribution to the archaeological research in Maluku. Bibliographical study has been adopted as the approach in this research with the main focus on the records of previous archaeological studies that has accommodated oral history data in the research. The result of this preliminary study has confirmed that oral history and local narratives is potential to be elaborated and developed in the archaeological studies in Maluku.

Keywords: Archaeology, Oral History, Maluku

1. Awal Mula

Lebih dari tiga abad silam, ilmuwan alam asal Jerman yang tinggal di Maluku pada abad ke-17, Georg Eberhard Rumph atau dikenal sebagai Rumphius, menerbitkan karya yang berjudul *D'Amboinische Rariteitkamer* “Kamar Benda-Benda Antik dari Ambon”. Dalam bukunya, Rumphius menjelaskan mengenai himpunan koleksi aneka benda unik antik yang dikumpulkan selama ia bekerja untuk kongsi dagang Hindia Belanda di masa itu. Semua deskripsi mengenai objek-objek ini dilengkapi dengan gambar sketsa yang detail.

Buku Rumphius juga menampilkan objek-objek berupa aneka alat batu dan alat logam kuno yang ditemukan di Ambon dan sekitarnya pada masa itu. Bila menilik gambarnya, jelas ada karakter prasejarah yang kuat pada objek-objek ini. Tak heran, karya Rumphius kemudian diterima sebagai karya akademis pertama yang menjelaskan mengenai ragam benda purbakala di Indonesia. Sekaligus diterima sebagai cikal bakal studi arkeologi di negeri ini bahkan di Asia Tenggara (Ririmasse, 2017; 2012).

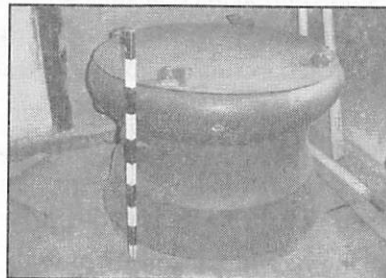


Gambar 1

Buku *Amboinsche Rariteitkamer* karya Rumphius diterbitkan pada tahun 1701
[Sumber: Balai Arkeologi Maluku]

Menarik, bahwa Rumphius tidak semata menjelaskan aspek fisik, kegunaan atau latar sejarah benda-benda ini namun juga merangkum himpunan kisah dari masyarakat setempat mengenai asal usul aneka benda tersebut. Salah satunya adalah spesimen nekara atau genderang perunggu produk budaya Dongson di Asia Daratan dari awal abad masehi yang ditemukan di Pulau Serua. Benda ini dalam sejarah tutur masyarakat setempat, dikisahkan jatuh dari langit saat terjadi badai petir hebat. Tak heran, genderang perunggu ini kemudian disebut dengan nama *tifa guntur*. Rumphius sendiri menggunakan istilah bahasa Latin yang indah sebagai padanan; *tympanum tonitrus* atau genderang halilintar (De Jonge dan van Dijk, 1995; Kempers, 1988:16).

Ulasan Rumphius yang menautkan sejarah tutur setempat dan benda purbakala kiranya merupakan salah satu catatan paling awal tentang hubungan arkeologi dan tradisi tutur di Nusantara. Setelah Rumphius beberapa karya tentang kepurbakalaan di era Hindia Belanda, juga merangkul sejarah lokal masyarakat yang melekat pada benda dan situs. Salah satunya adalah karya C. A. Lons mengenai candi Prambanan yang diterbitkan pada pertengahan abad ke-18 (Tanudirdjo, 2003).



Gambar 2

Spesimen Nekara Dong Son Tipe Heger 1 yang ditemukan di Seram Bagian Timur.
Ilustrasi untuk objek serupa yang disebutkan Rumphius dalam bukunya.
[Sumber: Balai Arkeologi Maluku]

Hari ini, situasinya tentu jauh berbeda. Selama lebih dari tiga abad, studi arkeologi dan kepurbakalaan telah berkembang dengan metode dan pendekatan yang jauh lebih maju dan lebih saintifik. Meski demikian, sejarah tutur tetap menjadi bagian yang melekat pada situs dan benda-benda purbakala yang menjadi objek penelitian arkeologi. Hampir semua situs memiliki latar sejarah lokal dalam bentuk tradisi tutur. Hampir semuanya juga bertautan dengan pengetahuan setempat yang dikemas dalam bentuk sejarah tutur, termasuk di Maluku.

2. Kondisi Saat Ini

Fenomena di atas salah satunya tercermin dari pengalaman sepuluh tahun silam saat penulis mendapat penugasan riset pertama untuk melakukan survei arkeologi di Maraina-Manusela. Salah satu titik tertinggi di Pulau Seram. Saat itu, butuh setidaknya empat hari perjalanan menerobos hutan, mendaki gunung, dan menyeberangi sungai besar sebelum mencapai tujuan. Ketika itu, riset dilakukan untuk menemukan gambaran tentang interaksi kawasan pegunungan di pedalaman dengan wilayah pesisir di Maluku. Temuan artefaktual yang dihimpun bervariasi. Dengan keberadaan himpunan objek keramik asing dan benda-benda logam impor dari abad silam sebagai penanda adanya interaksi pedalaman-pesisir di Pulau Seram di masa lalu (Ririmasse, 2015; 2006).

Menarik bahwa saat tinggal di Maraina, kami mendapat kesempatan menyaksikan prosesi tarian Maku-Maku yang dipentaskan tepat di saat bulan purnama. Lengkap dengan lantunan *kapata*, yang dinyanyikan sepanjang malam dan bertutur mengenai asal usul masyarakat di negeri yang kami kunjungi ini. Sekaligus menjadi pertautan pertama bagi kami dengan tradisi tutur dalam konteks budayanya yang orisinal (Ririmasse, 2012).

Di Maraina inilah diamati bahwa tradisi tutur tidak semata melekat pada bentuk-bentuk nyanyian dan pantun atau tuturan tradisional seperti *kapata*. Namun juga ditautkan pada aneka benda purbakala dan situs arkeologi yang dikunjungi pada saat survei. Penulis teringat, setidaknya ada tiga titik pengamatan yang dikunjungi oleh tim penelitian saat itu; dan setiap situs memiliki sejarah tuturnya sendiri.

Kini setelah melakukan studi arkeologi lebih dari satu dekade di Maluku, gambar tentang hubungan arkeologi dan sejarah tutur menjadi lebih jelas. Keduanya adalah satu. Di mana sejarah tutur menjadi napas pengetahuan lokal yang ditiupkan masyarakat setempat bagi situs dan aneka benda arkeologis yang dimiliki.

Kondisi ini kiranya merata ditemukan di seluruh Kepulauan Maluku. Hal yang membedakan adalah istilah setempat untuk sejarah tutur dan ekspresi atas tradisi khas ini. Jika di Maluku Tengah tradisi tutur dikenal dengan sebutan *Kapata*, maka di Pulau-Pulau Selatan Maluku istilah yang digunakan berbeda. Masyarakat di Kepulauan Babar menggunakan istilah *Tiarka*. Sementara masyarakat di Kepulauan Tanimbar mengenalnya sebagai *Tanlain* atau *Foruk*.



Gambar 3

Doa adat dibacakan dalam bahasa setempat oleh tetua adat sebelum kegiatan survei arkeologis dilaksanakan di Desa Lamdesar, Kepulauan Tanimbar

[Sumber: Balai Arkeologi Maluku]

Apapun sebutannya, tradisi tutur telah menjadi elemen yang melekat pada sejarah budaya masyarakat di Maluku. Tradisi ini juga menjadi wahana utama yang selama berabad-abad telah melestarikan ingatan bersama masyarakat di wilayah ini.

Dengan peran yang sedemikian melekat dengan objek-objek purbakala; pengetahuan sejarah tutur kiranya merupakan salah satu sumber data penting dan potensial dalam studi arkeologis. Melalui kalkulasi sederhana kiranya dapat dihitung, jika setiap penelitian berupa survei arkeologis merekam rata-rata dua puluh situs; dimana separuh dari situs ini memiliki tautan dengan sejarah tutur masyarakat setempat; maka bisa dibayangkan potensi data dari ribuan situs yang ada di Maluku sebagai sumber pengetahuan sejarah tutur masyarakat di wilayah ini. Di sini, studi arkeologi sejatinya dapat memberikan kontribusi besar dalam studi tradisi tutur dan upaya pelestariannya.

Hal ini yang kiranya selama ini belum mendapat perhatian semestinya dari aktivitas penelitian arkeologi yang dilakukan di Maluku. Kondisi yang sebenarnya dapat dipahami. Menimbang fokus riset arkeologi sudah semestinya diarahkan pada upaya mengumpulkan data arkeologis berupa himpunan pengetahuan yang bertautan dengan budaya bendawi. Pencuplikan data yang bersifat tradisi umumnya bersifat melengkapi data arkeologis dan biasanya melekat pada aspek etnografis.

Tidak banyak yang memberikan perhatian untuk mencoba merekam pengetahuan kebahasaan melalui sejarah tutur setempat yang melekat dengan situs

dan objek arkeologis yang diteliti. Hal mana membuat banyak potensi data terkait tradisi tutur kemudian tidak diakomodasi. Padahal ditinjau dari pertimbangan geografis, banyak wilayah yang menjadi lokus penelitian arkeologi sukar untuk dijangkau. Sehingga efektivitas pengumpulan data adalah mendasar.

Tentu disayangkan jika potensi data yang sebenarnya memungkinkan untuk dikumpulkan, ternyata tidak dihimpun secara maksimal karena minimnya pemahaman tentang nilai penting data. Di sisi lain, waktu, tenaga, dan biaya yang dikonsumsi untuk lokus riset yang sukar dijangkau selalu berbilang tinggi.

3. Pengembangan ke Depan

Maka tidak berlebihan kiranya jika Kongres Bahasa ini menjadi momentum untuk secara bertahap memperbaiki kondisi di atas. Tentang menautkan peran arkeologi dalam pencuplikan data terkait sejarah tutur yang berhubungan dengan situs dan objek arkeologi.

Studi linguistik dan arkeologi selama ini telah menjadi dua disiplin yang bahu membahu menjelaskan proses sejarah budaya manusia (Vansina, 1985; 1995). Kajian mengenai diaspora penutur bahasa Austronesia misalnya telah menjadi tema global riset arkeologi selama hampir lima dekade. Kontribusi studi kompilasi dua disiplin ini telah memberikan pengetahuan mendasar tentang mobilitas manusia dan budaya selama puluhan tahun (Belwood, 2000; Ririmasse, 2016).

Karenanya, menjadi relevan ketika studi arkeologi di Maluku, dengan bercermin pada potensi tradisi tutur di wilayah ini, juga mulai belajar merangkul data tentang sejarah tutur dan pengetahuan narasi lokal masyarakat dalam penelitiannya. Tentu pendekatan ini dilakukan tetap dengan menimbang bahwa pengumpulan data arkeologi adalah tujuan primer dalam setiap penelitian arkeologi. Tradisi tutur dan pengetahuan narasi lokal adalah data sekunder yang dihimpun untuk memberi kerangka lokalitas bagi situs dan objek arkeologi, sekaligus memperkaya konteks data arkeologi yang direkam.

Dengan basis disiplin yang berbeda, arkeologi tidak dibekali dengan pendekatan yang relevan untuk merekam pencuplikan data kebahasaan pada sejarah tutur dan narasi lokal. Karena itu, menjadi lebih masuk akal ketika kerangka kerja sama kemudian dilekatkan. Dengan setidaknya dua pilihan solusi. Pertama, bahwa para peneliti arkeologi dapat dibekali dengan pengetahuan sederhana tentang pendekatan pencuplikan data kebahasaan untuk sejarah tutur. Kedua, melaksanakan penelitian bersama dengan rekan-rekan yang memiliki kompetensi di bidang linguistik untuk topik kajian kompilasi arkeologi dan linguistik.

Riset bersama ini kiranya bukan merupakan hal baru dalam studi arkeologi di Indonesia. Kajian yang berpijak pada data linguistik sebagai dasar untuk studi

arkeologi telah cukup sering dilakukan. Fenomena ini dapat ditemui dalam studi mengenai toponimi atau asal-usul nama tempat di mana sejarah nama tempat dikorelasikan dengan segenap data arkeologis yang ditemukan di situs.

Keberadaan lembaga riset arkeologi seperti Balai Arkeologi Maluku dan lembaga riset linguistik seperti Kantor Bahasa Maluku dan Universitas Pattimura; adalah titik awal untuk memulai kerja bersama guna tujuan di atas. Tukar gagasan, tukar data, tukar pengalaman dalam ruang diskusi bisa menjadi pintu pertama tanpa harus mahal dan formal.

Tentu gagasan dalam tulisan pendek ini masih sangat mula. Ada banyak hal yang harus didiskusikan sebelum dilanjutkan sebagai kerja bersama. Meski jauh lebih baik jika segala sesuatu dimulai sesegera mungkin. Pertimbangannya sederhana, bahwa waktu berlalu. Serupa individu-individu yang menjadi sumber tradisi tutur dan narasi lokal yang juga menua dan berangsur hilang.

Sayang rasanya jika himpunan kisah dalam tradisi tutur yang memberi makna bagi benda dan tempat pusaka di Maluku kemudian punah begitu saja. Padahal, adalah narasi lokal yang telah meniupkan napas pengetahuan masa lalu dan menghidupkan benda purbakala dan situs arkeologi selama lintas generasi.

4. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Kantor Bahasa Maluku dan Rekan-Rekan Panitia yang sudah berbagi ruang dalam Kongres Internasional dan Lokakarya Bahasa Daerah Maluku 2017. Terima kasih juga disampaikan untuk Linda Heumasse S.H. yang sudah berbagi gagasan, komentar, dan masukan untuk salindia dan naskah awal tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Belwood, Peter. 2000. *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- De Jonge, N. dan van Dijk, T. 1995. *Forgotten Islands of Indonesia: The Art & Culture of the Southeast Moluccas*. Singapore: Periplus.
- Kempers, Bernet AJ. 1988. *The Kettledrums of Southeast Asia*. Rotterdam: A.A Balkema.

- Ririmasse, M. 2017. Pusaka untuk Masa Depan; Arah Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi di Maluku. *Prosiding Kongres Kebudayaan Maluku I*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Ririmasse, M. 2015. Sea, Stones and Stories; The Maritime Tradition in The Southeast Moluccas Islands. *Proceeding of The International Symposium of Austronesian Diaspora*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ririmasse, M. 2015. Abad Baru Purbakala; Memilih Arah, Menentukan Peran Penelitian Arkeologi di Maluku. *Kapata Arkeologi* Volume 11 No. 2 November 2015. Ambon: Balai Arkeologi Maluku.
- Ririmasse, M. 2012. Melagukan Masa Lalu, Melantunkan Identitas; Peran *Kapata* dalam Studi Sejarah Budaya di Maluku. *Jurnal Jantra* Vol VII No. 2 Yogyakarta; Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.
- Ririmasse, M. 2006. Survei Arkeologi di Desa Maraina dalam *Berita Penelitian Arkeologi*. Vol 2 No 2. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
- Vansina, J. 1985. *Oral tradition as history*. Wisconsin: University Press. Hal. 93—108.
- Vansina, J. 1995. “Historians, are archaeologists your siblings?” dalam *History in Africa* 22:369—408.

MULTIKULTURALISME DALAM TRADISI LISAN ORANG BAJO

La Ode Ali Basri

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Kendari

E-mail: basri.uho74@gmail.com

Abstrak

Makalah ini mengulas multikulturalisme yang terkandung dalam tradisi lisan Orang Bajo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, studi dokumen dan diskusi terfokus. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multikulturalisme dalam tradisi lisan orang Bajo adalah sebagai berikut; 1) filsafat etika orang Bajo yakni *tahang diri* (tahan diri) dan *ngatonang diri* (tahu diri). *Tahang diri* adalah konsep etika berperilaku orang Bajo bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia orang Bajo harus menahan diri dari perilaku-perilaku menyimpang. *Ngatonang diri* mengandung makna bahwa setiap individu harus menyadari segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Orang Bajo pada prinsipnya adalah manusia biasa yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan bantuan penguasa laut; 2) tradisi *falia* (pantang larang) antara lain *falia* membuat jengkel tetangga dengan membuang kulit kerang dalam perahunya dan membuang pasir di halaman rumahnya dan *falia* membunuh binatang darat seperti babi, rusa, dan binatang darat lainnya yang turun ke laut; 3) tradisi resolusi konflik orang Bajo, berupa model penyelesaian konflik melalui sistem arbitrase yakni bila ada pihak-pihak yang berkonflik, maka harus ada pihak ketiga yang bertindak mendamaikan (mediator).

Kata Kunci: tradisi lisan, multikulturalisme, orang Bajo

1. Pendahuluan

Setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi lisan sendiri-sendiri yang menjadi ciri khas sekaligus keunikan atau karakteristik pada masyarakat tersebut. Keanekaragaman tersebut merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada tiap-tiap suku bangsa, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Di samping itu, keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan.

Menurut Basri (2017) sebagai suatu warisan dan tradisi yang lahir dalam suatu kelompok masyarakat, tradisi lisan berfungsi sebagai media informasi tentang sejumlah kesan atau pandangan subjektif kolektif terhadap sesuatu yang penting, dan khas, tentang masyarakat pemilik tradisi tersebut. Sementara Willems (Arman, 2011) menyatakan bahwa tradisi lisan merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan sejarah lisan, kesusasteraan, pandangan dan pengetahuan lain menyeberangi generasi tanpa sistem tulisan. Tradisi lisan mengandung fakta budaya berupa sistem religi, sistem genealogi, kosmologi dan kosmogoni, sejarah, filsafat, etika, moral, sistem pengetahuan dan kaidah-kaidah kebahasaan dan kesusastraan, (Sedyawati, 1996).

Temuan dari hasil-hasil kajian di atas semakin menegaskan bahwa di dalam tradisi lisan, termasuk tradisi lisan yang terdapat pada masyarakat Bajo mengandung pesan-pesan moral dan perangkat-perangkat etika dan tata susila yang dapat membantu menegakkan harmoni hidup bersama sampai ke masa yang akan datang, dalam bingkai prinsip-prinsip multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kolektif (Fay, 2006). Multikulturalisme kompleksitas tentang gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh seseorang atau sekelompok orang yang majemuk baik dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, tetapi individu atau kelompok individu tersebut mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat keberagaman dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan keberagaman atau kemajemukan tersebut (Basri, et al, 2017). Sementara itu, Lubis (2006) menyatakan bahwa multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.

Konsep multikulturalisme yang demikian itu, sesungguhnya jauh-jauh hari telah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita secara oral sebagai mana kita bisa temui dalam berbagai tradisi lisan masyarakat nusantara, termasuk masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara. Orang Bajo di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi lisan tentang bagaimana mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan. Selain itu, orang Bajo juga memiliki tradisi lisan yang mengandung konsep bagaimana menyikapi perbedaan dengan penuh toleran dan semangat egaliter, serta konsepsi tentang tata cara menghargai dan

merayakan perbedaan dalam kesederajatan. Untuk itu, tulisan ini berusaha mencoba menggali tradisi lisan orang Bajo yang dipandang memiliki relevansi dengan konsep multikulturalisme, untuk harmonisasi kehidupan umat manusia yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungin, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Informan dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat yang terdiri dari tetua adat, tokoh-tokoh pemuda, dan warga masyarakat lainnya. Para informan tersebut ditentukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) pengamatan terlibat, yakni terlibat langsung dalam aktivitas para informan yang memiliki relevansi dengan fokus kajian, sekaligus mengamati secara langsung aktivitas masyarakat mereka, (2) melakukan wawancara mendalam kepada informan, khususnya tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan warga masyarakat lainnya mengenai gagasan, pengalaman, pengetahuan informan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tradisi lisan orang Bajo, (3) melakukan studi kepustakaan terutama kepustakaan yang terkait dengan budaya lokal orang Bajo.

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui model Milles dan Huberman (1991) dengan langkah-langkah sebagai berikut (1) reduksi data yakni menyusun satuan-satuan seluruh data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan dan diskusi terfokus. Data-data tersebut dibagi satu persatu, dikumpulkan sesuai golongannya, kemudian dilakukan reduksi data guna mengeliminir data yang kurang relevan, membuat transliterasi dan abstraksi serta menyusun satuan-satuan data; (2) penyajian data yakni melakukan kategorisasi data dan pengelompokkannya secara lebih baik, menyusun hubungan antarkategori, membandingkan kategori data yang satu dengan kategori data yang lainnya, dan melakukan interpretasi makna-makna setiap hubungan data tersebut; dan (3) penarikan kesimpulan yakni memberikan interpretasi dan hubungan antarkategori data yang sudah dikelompokkan sehingga dapat ditemukan makna dan kesimpulannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Multikulturalisme dalam Filsafat Etika Orang Bajo

Orang Bajo memiliki ajaran moral yang sarat dengan muatan-muatan pemikiran multikultural. Ajaran moral tersebut merupakan landasan filsafat etika rang Bajo yang disebut dengan ajaran *empe diri* (4 Diri), yakni *tahang diri* (tahan diri), *ngatonang diri* (tahu diri), *angga' diri* (harga diri) dan *matappa diri* (percaya diri). Dari empat ajaran filsafat etika di atas, dua di antaranya merupakan ajaran moral yang mengandung semangat multikulturalisme, yakni *tahang diri* dan *ngatonang*

diri. Tahang diri (tahan diri) adalah suatu ajaran moral orang Bajo yang mengandung makna bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia orang Bajo harus menahan diri dari perilaku-perilaku menyimpang. Misalnya dalam mencari nafkah, orang Bajo tidak boleh rakus, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh menghalalkan segala cara, apalagi sampai merusak hubungan dengan sesama manusia, dengan lingkungan laut dan dengan *Mbo Ma'di Lao* (dewa/penguasa laut). Laut sebagai tempat mencari nafkah, harus senantiasa dijaga dan dipelihara, karena laut selain sebagai sumber kehidupan yang utama, laut juga merupakan masa depan anak cucu mereka.

Ngatonang diri (tahu diri) mengandung makna bahwa setiap individu harus menyadari segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Orang Bajo pada prinsipnya adalah manusia biasa yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan bantuan penguasa laut. Karena itu, setiap individu harus memelihara hubungan yang baik dengan sesama, hubungan baik dengan Tuhan dan dengan alam sekitar termasuk semua makhluk yang ada di dalamnya. Sesama umat manusia umumnya, dan sesama orang Bajo khususnya harus saling menghargai, saling mempercayai dan saling melindungi.

Pemahaman tentang *ngatonang diri* dan *tahang diri* senantiasa terpatrit dalam jiwa-jiwa orang Bajo, yang ditanamkan atau diwariskan secara oral oleh generasi tua kepada generasi muda Bajo. Dalam pandangan orang Bajo, prinsip-prinsip sikap humanis terhadap sesama manusia telah diajarkan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Prinsip-prinsip tersebut adalah *sippa tappa* (saling percaya), *sikaada* (saling menerima keadaan) dan bahu-membahu atau *situlu tulu*. Maksudnya, *sippa tappa* adalah sesama anggota kelompok masyarakat harus saling mempercayai bahwa mereka tidak akan saling membohongi, tidak akan saling mencurigai. *Sikaada* yakni mereka harus saling memahami dan menerima keadaan bahwa mereka memiliki perbedaan sifat, memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. *Situlu-tulu* maksudnya mereka harus bahu membahu, tolong menolong karena mereka senasib dan sepenanggungan yakni mengadu nasib di laut yang penuh dengan tantangan dan risiko, serta mereka telah menjadi satu kesatuan sosial yakni komunitas atau masyarakat Bajo.

Kesadaran orang Bajo tentang kehidupan kolektif, telah mengubah kelakuan individu menjadi kelakuan sosial, sehingga tercipta proses interelasi yang teratur antarindividu dalam kehidupan kolektif tersebut. Kesadaran ini melahirkan kesalehan sosial, yang terefleksi dari kesadaran kolektif untuk menerapkan prinsip *situlu-tulu*, *sikaada* dan *sippatappa*, serta ajaran filsafat sosial dan etika lainnya yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Bajo. Pola tingkah laku seperti ini bukan hanya semata-mata sebagai upaya mengejar kebutuhan individu, tetapi juga lebih pada upaya melanggengkan keberadaan kelompok, sebagai konsekuensi dari persetujuan-persetujuan kontraktual di antara mereka dalam membangun jalinan kerja sama.

3.2 Multikulturalisme dalam *Pamali* (Pantang-Larang) Orang Bajo

Salah satu ajaran moral dalam kehidupan sosial kemasyarakatan orang Bajo adalah ajaran pemali membuat jengkel tetangga. Prinsip seperti ini dapat dicermati dalam pandangan orang Bajo bahwa *pemali* membuat jengkel tetanggamu dengan membuang kulit kerang dalam perahunya dan membuang pasir di halaman rumahnya. Menurut orang Bajo falsafah di atas mengandung makna “perlunya memelihara keutuhan masyarakat, dan keutuhan masyarakat itu bergantung kepada adab kesopanan dan ketinggian budi pekerti. Dengan ajaran seperti itu orang Bajo memandang dan memperlakukan tetangganya dengan baik, sebab sudah menjadi kelaziman manusia yang hidup di muka bumi ini saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Mereka berpandangan bahwa orang Bajo berkewajiban mengekalkan hubungan baik dengan tetangga demi mewujudkan kehidupan setempat yang aman dan harmoni.

Ungkapan bahwa “janganlah membuat jengkel tetanggamu dengan membuang kulit kerang dalam perahunya dan membuang pasir di halaman rumahnya”, mengisyaratkan bahwa kulit kerang itu kasar, berduri dan tajam. Jika diinjak dapat menyebabkan kaki terluka, atau membuat perasaan tidak nyaman jika diduduki, sedangkan perahu adalah simbol dari jantung kehidupan orang Bajo. Untuk itu orang Bajo tidak boleh saling melukai perasaan, merasa iri dan dengki dengan sesamanya. Orang Bajo mendirikan rumah-rumah panggung di atas permukaan air laut, dengan tiang-tiang ditancapkan ke dalam pasir. Umumnya rumah mereka tidak dilengkapi dengan kamar-kamar atau dipetak dengan dinding-dinding kamar yang memadai. Biasanya hanya kamar keluarga (suami-istri) yang dipetak, selebihnya tidak ubahnya sebuah aula besar. Jika pintunya dibuka akan kelihatan mulai dari ruang depan sampai ke dapur.

Sementara itu, lantai rumah sama tingginya atau setara dengan rangkaian papan yang berfungsi sebagai pekarangan dan jalan yang menghubungkan rumah warga yang satu dengan warga yang lainnya. Hal inilah yang melatari mengapa filsafat etika dan moral orang Bajo mengajarkan agar menjaga perasaan tetangga dengan tidak menaburkan atau menyimpan pasir di pekarangan orang lain. Sebab butir-butir pasir adalah salah satu anasir yang mudah diterbangkan angin dan jika sampai masuk ke dalam rumah tentu akan mengotori rumah dan perabotnya sehingga dapat mengganggu kenyamanan penghuni rumah bahkan dapat mengganggu jalannya proses-proses prokreasi dalam rumah tangga.

Menurut Masyarakat Bajo tetangga adalah orang yang tinggal paling dekat dengan rumah mereka, dan yang tinggal dalam lingkungan jarak 40 buah rumah daripada rumah mereka. Segala perkara yang berlaku terlebih dulu diketahui oleh tetangga. Karena itu, tetangga adalah orang paling dekat untuk memohon pertolongan ketika ditimpa musibah seperti kebakaran, kecurian atau kematian. Kekuatan hubungan ketetanggaan yang sempurna dan harmoni mengukuhkan ikatan

persaudaraan dan kasih sayang sesama orang Bajo, yang kadangkala melebihi daripada keluarga sendiri.

Untuk itu, sikap yang harus ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan bertetangga adalah tiap-tiap individu mengamalkan dan menghayati sikap berlapang dada, mengargai perbedaan pandangan, saling memahami, meningkatkan kesabaran, bertukar pendapat, mencari titik persamaan dan mengeratkan hubungan yang renggang dengan penuh hikmah serta kasih-sayang. Dalam konsepsi orang Bajo impian mempunyai tetangga yang baik tidak akan terlaksana jika kita belum menjadi tetangga yang baik terlebih dulu. Dengan adab kesopanan dan keluhuran budi pekerti ini menjadikan seseorang itu dihormati dan harmoni dalam masyarakat pun dapat terjamin.

Masyarakat Bajo merupakan salah satu masyarakat yang senantiasa hidup tentram dan damai di laut. Tidak ada sengketa dan permusuhan sesama mereka. Menurut orang Bajo binatang saja ada yang tidak boleh dibunuh atau diganggu, apalagi sesama manusia. Pantang larang tidak boleh sembarangan membunuh binatang dapat dicermati pada *pamali* orang Bajo yang tidak boleh membunuh babi atau rusa/jonga yang kebetulan turun di laut. Dalam konsepsi orang Bajo *Mbo ma' Lao* memiliki hubungan yang baik dengan penguasa daratan, sehingga mereka harus bisa menahan diri untuk tidak membunuh babi, rusa, atau hewan darat lainnya yang turun ke laut. Karena menurut mereka boleh jadi binatang tersebut merupakan penjelmaan *Mbo ma di dara* (penguasa daratan). Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil kajian Zacot (2008) yang menunjukkan bahwa orang Bajo tidak hanya mempunyai *pamali* di laut tetapi juga memiliki sejumlah pantang larang yang berkaitan dengan kehidupan di darat. Menurut Zakot *pamali-pamali* tersebut secara inheren berpengaruh dengan kehidupan orang Bajo secara menyeluruh.

Dalam perspektif sosiokultural, pantang larang atau pemali merupakan norma kesusilaan karena di dalam pemali terdapat seperangkat nilai-nilai kemanusiaan universal yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk menciptakan tertib dan harmoni sosial. Dalam pandangan Pranowo (1998) pemali atau dalam antropologi dikenal dengan istilah *taboo* (Basri, 2010) merupakan tradisi yang menjadi salah satu pandangan hidup di mana dibalik larangan tersebut terdapat unsur-unsur pendidikan budi pekerti yang dapat membentuk kepribadian anggota masyarakat agar menjadi pribadi-pribadi yang baik. *Pamali* yang berlaku dalam masyarakat Bajo merupakan pengontrol bagi seluruh warga Bajo secara kolektif agar tidak bertabiat buruk, tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak melanggar norma-norma etika dan kesusilaan, dan tidak merusak lingkungan, menghormati dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Dengan demikian konsep *pamali* dalam masyarakat Bajo, manivestasi nilai-nilai kemanusiaan universal yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar multikulturalisme.

3.3 Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Orang Bajo

Kerukunan merupakan pilar utama yang mengokohkan bangunan masyarakat Bajo, sehingga segala bentuk pertikaian dan kesalahpahaman sentiasa dihindari. Jika dua pihak terjadi kesalah pahaman, maka pihak ketiga bertindak mendamaikan. Sudah menjadi tradisi orang Bajo bahwa tetua adat bertanggung jawab penuh dalam mendamaikan suatu perkara. Kalau ada pertengkaran, orang ketiga dalam hal ini tetua adat akan datang secara terus menerus untuk menasehati bahwa marah dan hati yang panas adalah pekerjaan setan. Jika seseorang tidak mampu mengendalikan emosi atau rasa amarahnya, maka suatu pertanda bahwa orang tersebut sedang dikuasai oleh setan. Dalam kesempatan itu, pihak ketiga juga menyampaikan kepada salah satu pihak bahwa pihak lainnya merasa sedih dan ingin berdamai. Demikian seterusnya hingga kedua belah pihak saling berdamai.

Mekanisme kontrol dan pengendalian sosial masyarakat Bajo yang demikian itu, telah ada sejak lama. Pengetahuan itu diwarisi dari nenek moyang mereka secara turun-temurun, (Basri, 2010). Dalam sejarah kehidupan orang Bajo ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa pada zaman dahulu ada anak orang Bajo kakak beradik terlibat pertengkaran. Dalam peristiwa itu, datanglah salah seorang untuk mendamaikan mereka, dan akhirnya kedua anak itu berdamai dan saling memaafkan. Selain itu, ada juga kisah seorang laki-laki yang bertengkar dengan mertua laki-lakinya, kemudian datang salah seorang yang menjadi mediator untuk mendamaikan mereka. Orang tersebut datang kepada salah satu pihak dengan mengatakan bahwa pihak lainnya merasa sedih dan ingin berdamai. Pada akhirnya perdamaian antara anak menantu dan bapak mertua tersebut dapat terwujud.

Demikianlah orang Bajo mewarisi manajemen pengelolaan konflik dari ajaran para leluhurnya untuk mewujudkan tertib sosial pada internal mereka. Setiap kali memediasi konflik para tetua adat selalu memahamkan kepada pihak yang bertikai bahwa dulu nenek moyang mereka jika bertikai atau bersalah paham dengan sesamanya, selalu ada di antara mereka yang berjiwa besar. Mereka mengungkapkan perasaan bersalah kepada orang lain yang dianggap dapat menjadi mediator dan menyampaikan kepada salah satu pihak bahwa pihak lainnya merasa sedih dan ingin berdamai. Pada tataran praksis sosial, manajemen dan resolusi konflik ini terbukti mampu menciptakan keharmonisan dan ketenteraman dalam masyarakat Bajo. Semangat *dambarisan* (kebersamaan) dan persaudaraan orang Bajo demikian prominensia, sehingga Zacot (2008) menyebut masyarakat Bajo sebagai masyarakat yang cinta damai, masyarakat yang tidak suka bersungut-sungut. Menurut Zacot (2008), orang Bajo tidak menyukai kekejaman. Mereka membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang merendahkan harga dirinya kalau naik pitam secara terang-terangan. Selain beberapa percetakan antara suami dan istri yang mudah didengar melalui dinding penyekat, selebihnya tidak pernah menyaksikan pertengkaran di antara warga Bajo.

Mencermati fragmen-fragmen tradisi lisan orang Bajo seperti yang telah diuraikan di atas, tampaknya dalam tradisi lisan tersebut terdapat nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan konsep multikulturalisme sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih beradab dan humanis dalam bingkai keanekaragaman budaya, suku dan agama. Budaya hanyalah simbol atau tanda yang dapat memberi petunjuk dalam berinteraksi dengan sesama dalam kehidupan sosial, dalam interaksi dengan alam dan berinteraksi dengan Tuhan. Hal ini sejalan dengan pandangan Cassirer (Muliwana, 2008) bahwa dalam bertindak manusia sering menggunakan simbol, karena dengan simbol-simbol itu manusia akan berkreasi mengatasi kesulitan hidup dan ketidaktahuannya. Sehingga Eco (2004) menyebut manusia sebagai homo interpreticum karena kemampuannya dalam menafsir tanda atau simbol. Menurut Eco (2004) dunia ini penuh dengan tanda, tugas manusialah menginterpretasikannya sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan.

4. Penutup

Multikulturalisme dalam tradisi lisan orang Bajo antara lain dapat ditemukan dalam tradisi lisan sebagai berikut.

1. Filsafat etika orang Bajo yakni *tahang diri* (tahan diri) dan *ngatonang diri* (tahu diri). *Tahang diri* adalah konsep etika berperilaku orang Bajo bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia orang Bajo harus menahan diri dari perilaku-perilaku menyimpang. *Ngatonang diri* mengandung makna bahwa setiap individu harus menyadari segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Orang Bajo pada prinsipnya adalah manusia biasa yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan bantuan penguasa laut.
2. Tradisi *falia* (pantang larang) antara lain *falia* membuat jengkel tetanggamu dengan membuang kulit kerang dalam perahunya dan membuang pasir di halaman rumahnya dan *falia* membunuh binatang darat seperti babi, rusa, dan binatang darat lainnya yang turun ke laut.
3. Resolusi konflik orang Bajo, adalah model penyelesaian konflik dengan melalui sistem arbitrase yakni biala ada pihak-pihak yang berkonflik, maka harus ada pihak ketiga yang bertindak mendamaikan (mediator).

Daftar Pustaka

- Arman. 2011. *Nilai-nilai Tuturan tentang Ewa pada Masyarakat Muna*. (Tesis, tidak diterbitkan, Kendari: UHO
- Basri, La Ode Ali. 2010. *Pemanfaatan Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Budaya Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Etnik Bajo*. (Disertasi, tidak diterbitkan). Denpasar: Udayana.
- 2017. *Filosofi Kepemimpinan dalam Cerita Rakyat Kolope Bhala Tumbu pada Masyarakat Muna*. Dalam: Prosiding Seminar Pengembangan Pengetahuan Sastra dan Budaya Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Apresiasi Terhadap Keragaman Budaya Bangsa. Denpasar 26—27 Mei 2017. Hlm 363—370.
- Basri, La Ode, dkk. 2017. *The Valuas of Multicultural Education in Munanese Traditional Culture*. Asian Culture and History, 9(1), 33—39.
- Eco, Umberto. 2004. *Tamasya Dalam Hiperealitas*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Fay, Brian. 2006. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela
- Milles, M., B & Huberman, M., A. 1991. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Yusuf, Akhyar. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern Dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Pranowo, Bambang. 1998. *Islam Faaktual Antara tradisi dan Relasi Kuasa*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Sedyawati, Edi. 1996. *Kumpulan Sambutan (1993-1995) Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Edy Sedyawati*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zakot, Francois R. 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut*. Jakarta: Gramedia.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 4

Hari, tanggal	: Jumat, 8 September 2017
Waktu	: Pukul 13.30—15.00
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	: Wahidah, M.A.
Pemakalah I	: Dr. David G. Manuputty, M.Hum .
Pemakalah II	: Leonora Pesiwarissa, M.Pd.
Pemakalah III	: La Ode Yusri, M.A.
Pemakalah IV	: Dr. La Ode Ali Basri
Notulis	: Leonardo J. Sipahelut
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra

Makalah I

REFLEKSI BUDAYA DALAM ONOMASTIKA DI SULAWESI SELATAN

Bahasa diartikan dari beberapa ahli diartikan berdasarkan tuturan terkait dengan pandangan dan tingkah laku berbahasa itu sendiri. Contoh kata dari bahasa Makasar Kalauk → artinya barat, sedangkan di Pontoh artinya selatan. Diakibatkan, Pendekatan bahasa juga didasarkan ruang dan letak geografis. Ada beberapa bahasa daerah yang dipercayakan dan dijadikan semboyan bagi masyarakat masyarakat. Bahasa adalah sistem tanda yang punya nilai budaya.

Tanggapan:

1. Saran lebih kembangkan bahasa Maluku. (Misye Nataria Urwatu, MTB)

Jawaban:

Kita tidak boleh fanatik. Kita adalah Indonesia.

Makalah II

**SIKAP BAHASA DAN PEMARTABATAN BAHASA TANA
SEBAGAI BAHASA ADAT DI NEGERI SOYA**

Bahasa tana sekarang dalam posisi kritis karena sangat dibatasi dan jumlah penuturnya sedikit. Bahasa tana dipakai dalam ranah komunikasi dalam media komunikasi ritual. Bahasa di Ambon tidak memiliki aksara sehingga sulit menemukan dokumentasi. Penyebab punahnya bahasa tanah adalah penutur yang kurang, minimnya minat penutur muda, dan dianggap tidak menarik oleh generasi muda.

Penelitian ini dilakukan di Negeri Soya karena di sana masih sangat mempertahankan adat dan tradisi negeri. Situasi bahasa Negeri Soya saat ini, penduduknya menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu Ambon, bahasa Indonesia, dan *bahasa tana*. Masyarakat Negeri Soya mempunyai sikap positif terhadap bahasa daerah yaitu bahasa Melayu Ambon dan *bahasa tana*. Penggunaan bahasa di Negeri Soya, umumnya menggunakan bahasa Melayu Ambon dan juga bahasa Indonesia.

Ragam lisan yang digunakan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi dalam penggunaan *bahasa tana* di Soya. Faktor penghambat utama dalam penggunaan *bahasa tana* ini adalah masyarakat Negeri Soya adalah masyarakat komunikator multibahasa.

Tanggapan:

1. Saran, untuk penelitian-penelitian di Unpatti agar lebih mencari apa itu arti bahasa *tana*, bukan bahasa adat. (Prof. Pattinama, Unpatti)

Makalah III

ENKLAVE MUNA DI PULAU AMBON

Bahasa Muna adalah bahasa yang digunakan di Sulawesi Tenggara. Ada 3 dialek dalam bahasa Muna, dialek Tiwore Kepulauan, dialek Muna standar, dan dialek selatan Gumas. Budaya bahasa Muna diakibatkan karena kehidupan kerajaan

yang masih kuat di Muna. Banyak sekali terjadi perubahan vokal pada bahasa Muna yang dikumpulkan dan diidentifikasi bahwa terdapat banyak sekali perubahan fonem A menjadi fonem O. Bahasa Muna juga diakibatkan karena adanya hubungan kekerabatan keluarga yang dekat dan erat.

Makalah IV

REVITALISASI TRADISI LISAN DAYAK NGAJU: SANSANA

Sastra Kalimantan tersebar di wilayah pedalaman utamanya di daerah sungai. Kebudayaan dayak tidak mengenal tulisan dan tidak punya aksara. Hal utama sastra Kalimantan suku Dayak sangat dipengaruhi oleh terbatasnya pergerakan masyarakat.

Globalisasi menyebabkan menurunnya minat mempelajari bahasa asing. Masalah yang dihadapi adalah bahasa yang terpinggirkan, minat generasi muda yang kurang, dokumentasi bahasa sedikit karena tidak mengenal budaya tulis, dan perda yang sudah tidak diberlakukan lagi.

Solusinya, mengembalikan fungsinya, menyediakan bahan ajar muatan lokal, dokumentasi dengan media terbaru, pemanfaatan sanggar-sanggar bahasa, dan harus lebih kreatif.

BAHASA DAERAH DALAM BINGKAI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI MALUKU

Meske Gaspersz
SMA Negeri 6 Ambon

Abstrak

Bahasa daerah kini telah menjadi bagian penting dalam era otonomi khusus Maluku. Hal ini sebagai konsekuensi logis atas pengakuan hak-hak daerah termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap bahasa daerah. Pengaturan tentang bahasa daerah dalam peraturan perundang-undangan bukanlah hal utama, kecuali dalam beberapa perda. Pengaturan penggunaan bahasa daerah menjadi pelengkap pengaturan tentang bahasa Indonesia atau bahasa negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesungguhnya, masalah pembinaan dan pengembangan bahasa daerah telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab XV, Pasal 36 yang diperkukuh dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, Bab III, Pasal 42, ayat (1) dan (2). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, khususnya lembaga-lembaga terkait untuk menyelamatkan eksistensi bahasa-bahasa daerah di Indonesia, termasuk di Maluku. Akan tetapi, tanpa adanya dukungan dan sikap positif dari masyarakat penuturnya sendiri, upaya tersebut tentu akan mengalami kendala. Kesadaran sebuah kelompok penutur bahasa tertentu untuk menjaga kelestarian bahasa merupakan faktor utama yang dapat menyelamatkan sebuah bahasa dari kepunahan. Selain itu, kepedulian para pemangku kepentingan atau pemerintah setempat untuk mendukung upaya penyelamatan/pelestarian bahasa daerah setempat akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap upaya tersebut.

Berkaitan dengan kondisi bahasa daerah di Maluku yang saat ini sangat memprihatinkan, dibutuhkan berbagai langkah preservasi agar kondisi bahasa-bahasa daerah tersebut tidak semakin terpuruk dan terhindar dari ancaman kepunahan. Sejauh ini, langkah yang telah dilakukan baru sebatas penelitian, pencatatan, dan pemetaan bahasa. Padahal, langkah konkret yang perlu segera dilakukan adalah mengidentifikasi vitalitas (daya hidup) bahasa-bahasa daerah Maluku serta peraturan yang mengatur bahasa daerah khususnya di Maluku.

Kata kunci: Bahasa daerah, otonomi khusus, Maluku.

1. Pengantar

Maluku adalah provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1958 tentang penetapan UU Darurat Nomor 22 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, terbentuklah Provinsi Maluku sebagai sebuah daerah otonom dengan tiga kabupaten dan 1 kotamadya. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku Indonesia. Ibu kota Provinsi Maluku adalah Kota Ambon yang bergelar atau memiliki julukan sebagai *Ambon Manise*. Kota Ambon, berdiri di bagian selatan dari Pulau Ambon, yaitu jazirah Leitimur.

Siwalima merupakan motto lambang Provinsi Maluku yang artinya milik bersama atas dasar Siwalima, memupuk persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Logo Siwalima berlatar belakang perisai/salawaku di dalamnya terdapat lukisan daun sagu dan daun kelapa, mutiara, cengkeh, dan pala, tombak, gunung, laut dan perahu. Daun sagu, menggambarkan bahwa makanan pokok daerah Maluku adalah sagu yang melambangkan kehidupan. Daun kelapa, menggambarkan hasil bumi berupa kelapa, yang banyak terdapat di Maluku. Mutiara, merupakan hasil laut yang khas dari daerah Maluku. Tombak, menggambarkan sikap ksatria dan gagah berani. Gunung, melambangkan kekayaan hasil hutan yang melimpah. Laut dan perahu, melambangkan persatuan dan kesatuan yang abadi.

Menurut letak astronomis, maka wilayah provinsi Maluku terletak antara 30—Lintang Selatan dan —Bujur Timur dengan luas daratan 47.350,42 , luas perairan 658.294,69 dan total populasi 1.715.548 jiwa (2016). Batas wilayah Provinsi Maluku sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafuru, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Irian, dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi.

2. Fenomena Kebahasaan di Provinsi Maluku

2.1 Bahasa Daerah

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 6, mengatakan: Daerah otonom selanjutnya disebut

daerah adalah kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 5 Otonomi Daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, adanya otonomi daerah membawa dampak yang sangat luas bagi keberlangsungan bahasa-bahasa nusantara. Hal ini sebagai konsekuensi logis atas pengakuan hak-hak daerah termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap budaya (bahasa) lokal. Kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah pun semakin menguat. Tentu kondisi ini harus segera diantisipasi sebab kematian suatu bahasa tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi melalui proses yang panjang (Sobarna, 2006:31; Mbete, 2001:79—87).

Sejak diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab XV, pasal 36 yang diperkukuh dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2009, Bab III, Pasal 42, ayat (1) dan (2).

Menghadapi perubahan budaya global yang demikian cepat, termasuk di dalamnya komponen bahasa, maka refleksi dan evaluasi atas kehidupan bahasa daerah menjadi sangat penting. Realita menunjukkan bahwa gejala kehidupan, keterpeliharaan dan keberhasilan usaha pemeliharaan bahasa-bahasa daerah, antara bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lainnya, berbeda-beda. Ada bahasa-bahasa yang cukup terawat, tetapi juga ada sebagian yang lolos dari perhatian, apalagi pemeliharaan.

Keterpinggiran bahasa-bahasa daerah ini disebabkan karena terjadi persaingan antara bahasa daerah, bahasa nasional dan bahasa asing. Oleh karena itu, kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah semakin beralasan. Gejala kepunahan bahasa ditandai secara alami oleh merosotnya jumlah penutur karena adanya persaingan bahasa dan semakin berkurangnya loyalitas penuturnya terhadap pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa ibu serta sekaligus sebagai simbol budaya.

2.2 Loyalitas Bahasa Indonesia

Hampir di setiap wilayah menggunakan bahasa daerah di Provinsi Maluku, bahasa daerah hidup dan berkembang bersamaan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara dan bahasa resmi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bahasa-bahasa daerah hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia. Kendatipun berdampingan, jelaslah bahwa bahasa Indonesia lebih dominan, memiliki loyalitas yang tinggi dan besar pengaruhnya atas bahasa daerah. Keloyalitas bahasa Indonesia

ini kadang-kadang menjadi sebuah hal yang mutlak dan wajar dalam bingkai negara kesatuan.

Keseragaman memang merupakan sesuatu yang penting dalam membangun kesatuan bangsa, tetapi adalah kekeliruan besar bila menganggapnya sebagai alat yang efektif untuk membangun bangsa atas keberagaman etnik (Wijana dan Rohmadi, 2006:39).

2.3 Paradigma Baru Pelestarian Bahasa Daerah

Sejalan dengan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Daerah, sudah selayaknya menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan pelestarian bahasa daerah. Secara umum upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah di Provinsi Maluku masih sangat rendah, terutama dilakukan dan didorong oleh kesadaran masyarakat di daerahnya masing-masing untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan bahasa daerahnya berdasarkan amanat undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri orang Maluku.

Paradigma baru pelestarian bahasa daerah di era otonomi khusus di Maluku mencakup: (1) Pemberdayaan Masyarakat, yakni penyadaran akan khazanah bahasa dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber daya pembangunan. Untuk itu bahasa perlu didayagunakan bagi kepentingan masyarakatnya. Sikap mental dan perilaku kebahasaan yang positif dan kreatif, menjadi tumpuan pembangunan manusia Maluku. Pemberdayaan masyarakat dalam ranah agama, adat, dan aneka budaya etnis, merupakan tumpuan hidup bahasa daerah. Bahasa daerah adalah warna ekspresi budaya daerah dalam pelbagai aspek' (2) Penyadaran jati diri, yakni bahasa daerah sebagai identitas masyarakat daerah. Walaupun sebagian masyarakat Maluku telah beralih bahasa Ibu mereka dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia "Melayu Ambon", khususnya masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dampak pembangunan, perkawinan campuran antar-etnik, serta pembinaan generasi muda yang terlalu *ke-Indonesia-an*; (3) Integrasi pengajaran bahasa, sastra dan budaya, yakni model integrasi pendidikan yang menjadi syarat mutlak harus dijalankan dalam mengelola sumber daya masyarakat. Wujud integrasi pengajaran dapat membentuk sikap, pola, dan perilaku atau persepsi lokal terhadap kepemilikan kearifan lokal tersebut. Integrasi pengajaran ini dapat menggugah sedini mungkin masyarakat tentang pengetahuan lokal yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi pengembangan gagasan-gagasan alternatif dalam penjelajahan ilmiah yang sedang dan akan dikembangkan, seperti: pengembangan pangan spesifik lokal, obat tradisional, dan sistem klasifikasi bahasa (rumpun/vila) yang dapat digunakan sebagai acuan makna sosial budaya kehidupan masyarakat terhadap fenomena alam dan sosial tertentu, transmisi pengetahuan, penyedia makanan, dan masalah sosial kependudukan (pemukiman).

2.4 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pembinaan dan pengembangan bahasa adalah usaha-usaha yang ditunjukkan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya (Alwi dan Sugono (Ed.), 2003:9).

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku setakat ini mulai merencanakan pembinaan bahasa dalam konteks ini adalah bahasa daerah. Pembinaan bahasa daerah ini direncanakan lebih diarahkan pada dunia persekolahan. Dunia persekolahan dianggap sebagai basis untuk pembinaan bahasa daerah (dan, tentu saja, bahasa Indonesia). Siswa dari SD sampai dengan SMA, misalnya, dapat diarahkan untuk mempunyai sikap yang positif terhadap bahasa daerah (dan bahasa Indonesia), mencintai bahasa daerah, dan menggunakannya dalam pelbagai kesempatan informal khususnya. Beberapa usaha pembinaan yang direncanakan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku meliputi, antara lain, upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang diselenggarakan, antara lain, melalui pengajaran dan pemasyarakatan.

Peningkatan mutu pengajaran bahasa daerah di Provinsi Maluku direncanakan dilakukan melalui kegiatan (a) pengembangan kurikulum bahasa daerah Maluku, (b) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa, (c) pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional, (d) pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, (e) penyediaan program pendidikan bahasa daerah Maluku di jenjang pendidikan tinggi setempat sebagaimana bahasa Jawa (daerah) dan bahasa Sunda yang menjadi jurusan pada Fakultas di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sebelas Maret (untuk bahasa Jawa/daerah), dan Universitas Padjadjaran (untuk bahasa Sunda), dan (f) penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas permulaan pada jenjang pendidikan dasar.

Agar sejalan dengan kebijakan bahasa nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku juga merencanakan melakukan program pemasyarakatan bahasa daerah melalui kegiatan (a) pemberian dorongan penerbitan berbahasa daerah di Maluku, (b) pengikutsertaan tokoh masyarakat dan budayawan dalam pemasyarakatan penggunaan bahasa daerah dalam situasi tertentu, (c) peningkatan peran masyarakat (kelompok seniman tradisional) dalam memberikan informasi tentang penggunaan bahasa daerah.

Dalam pada itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku juga melakukan upaya pengembangan bahasa daerah, yakni upaya meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan mengacu pada politik bahasa nasional yang telah ditetapkan pada tingkat pusat

(dalam hal ini oleh pusat bahasa), upaya pengembangan itu, antara lain, meliputi penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan.

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sangat mendorong berbagai upaya untuk penelitian aneka bahasa daerah, khususnya yang terdapat di Provinsi Maluku dan wilayah sekitarnya. Untuk itu, direncanakan dalam tahun-tahun mendatang terutama setelah didirikannya Kantor Bahasa Maluku dilakukan penelitian bahasa daerah secara intensif. Hal ini setidaknya-tidaknya disebabkan oleh dua alasan penting: (1) penelitian berbagai aspek bahasa daerah Maluku perlu dilakukan untuk kepentingan perekaman (inventarisasi) bahasa-bahasa daerah Maluku dan pemakaiannya perlu dilakukan untuk keperluan peningkatan mutu bahasa daerah yang dipelihara oleh warga masyarakat Maluku, sebagai penutur asli bahasa daerah ini.

Pembakuan bahasa daerah Maluku direncanakan dilakukan, antara lain, melalui penyusunan kamus bahasa daerah dan tata bahasa daerah Maluku, yang melibatkan para pakar bahasa. Tentu saja upaya yang dilakukan itu harus diimbangi dengan rencana Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menerbitkan aneka karya yang bertalian dengan hasil studi atau kajian tentang bahasa (dan sastra) daerah dan karya lain yang dalam spektrum luasnya mendukung eksistensi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, kebudayaan daerah Maluku, dan kebudayaan nasional Indonesia. Direncanakan kelak semua upaya tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Bahasa Maluku/Pusat Bahasa dan pihak penerbit swasta.

2.5 Sarana untuk Penanganan Bahasa Daerah di Maluku

Dalam perspektif pengembangan dan pembinaan bahasa-bahasa daerah Maluku, sarana untuk penanganan bahasa-bahasa daerah di Provinsi Maluku sekurang-kurangnya mencakupi ketentuan perundang-undangan, organisasi, jaringan informasi, penerjemahan, penghargaan, kerja sama, dan sumber daya manusia. Ketujuh hal itu dideskripsi lebih lanjut.

Ketentuan perundang-undangan tentang kebijakan bahasa daerah khususnya bahasa daerah Maluku mengacu pada undang-undang bahasa, yang telah ditetapkan dalam undang-undang adalah untuk penanganan bahasa daerah termasuk penanganan bahasa daerah Maluku.

Sehubungan dengan organisasi yang berwenang menangani masalah kebahasaan, sudah tentu Pusat Bahasa adalah lembaga yang diberik tanggung jawab mengelola kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan. Artinya, Pusat Bahasa adalah yang mempunyai otoritas untuk itu. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mendukung upaya perekomendasi Pusat Bahasa menjadi lembaga pemerintah nondepartemen supaya hasil pengelolaannya menjadi lebih memuaskan dan lebih mempunyai kekuatan hukum dalam menentukan kebijakan kebahasaan, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Selain itu, Pemerintah

Daerah Provinsi Maluku juga menyambut baik usaha Pusat Bahasa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku membangun Balai Bahasa Maluku di wilayah Provinsi Maluku. Adanya Kantor Bahasa Maluku yang bermuara ke Pusat Bahasa berimplikasi positif bagi upaya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian bahasa-bahasa daerah di wilayah Provinsi Maluku. Pelibatan organisasi kebahasaan yang lain, baik organisasi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, dalam kerangka itu patut juga mendapatkan tempat yang sewajarnya.

Hal lain yang tidak dapat dilupakan dalam upaya penanganan bahasa daerah adalah ketersediaan jaringan informasi kebahasaan (dan kesastraan) pada tingkat daerah Provinsi Maluku, yang memungkinkan orang memperoleh, menghimpun, dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada pihak lain yang memerlukannya, bahkan pada pihak generasi muda untuk transfer kebudayaan secara lebih spesifik adalah kebudayaan daerah Maluku. Penyediaan jaringan informasi itu merupakan suatu keharusan. Di dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dengan didukung oleh masyarakat Maluku, berencana menyiapkan infrastruktur untuk itu.

Dua negara Asia yang dianggap sangat berhasil dalam program penerjemahannya adalah Jepang dan Malaysia. Harus diakui bahwa kita sepatutnya mencontoh kedua negara itu dalam hal ini. Jika program nasional penerjemahan yang telah dirintis pada tahun 1970-an perlu ditata ulang dengan perencanaan yang lebih mantap, penerjemahan karya kesastraan daerah Maluku, misalnya ke dalam bahasa Inggris, juga perlu mendapat perhatian. Produk terjemahan itu akan lebih memperkenalkan Maluku dan budayanya di mancanegara. Pada gilirannya, penerjemahan akan lebih memperkenalkan bangsa dan budaya Indonesia di dunia internasional melalui terjemahan karya sastra Indonesia dan daerah. Citra Indonesia akan lebih terangkat dengan upaya kebudayaan seperti itu. Rencana besar penerjemahan ini tentu saja juga harus didukung oleh Kantor Bahasa Maluku atau Pusat Bahasa agar suatu hari kelak dapat terealisasi. Pelibatan para penerjemah, khususnya di bawah naungan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), diasumsikan akan memperlancar jalan perealisasi rencana tersebut.

Sebagaimana Pusat Bahasa yang telah dan terus memberikan pelbagai bentuk penghargaan kebahasaan dan kesastraan dengan berbagai nama kepada putra-putri Indonesia yang dianggap berprestasi besar dalam bidang kebahasaan dan kesastraan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku juga merencanakan akan memberikan penghargaan kepada perorangan atau organisasi yang memfokuskan telaah atau yang mempunyai prestasi besar atau luar biasa dalam membina, mengembangkan, dan melestarikan bahasa (dan sastra-budaya) daerah Maluku. Sama-sama kita maklumi bahwa penghargaan yang layak dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat terhadap prestasi dalam bidang bahasa dan sastra akan mendorong lahirnya karya-karya yang lebih besar suatu hari kelak.

Dalam hal membina hubungan kerja sama, agar dapat mengembangkan dan memuktahirkan kajian bahasa (dan sastra) daerah di provinsi Maluku, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku merencanakan menggalang kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian, baik di dalam maupun di luar negeri; pemerintah daerah yang lain terutama pemerintah daerah yang berdasarkan jarak lebih dekat dengan Provinsi Daerah Maluku; organisasi profesi; instansi yang berhubungan dengan upaya pemasyarakatan bahasa (dan sastra) daerah. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku selayaknya mempunyai sistem pengembangan profesionalisme peneliti bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Untuk keperluan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku bekerja sama dengan Kantor Bahasa Maluku atau Pusat Bahasa, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

2.6 Tanggung Jawab Kelembagaan

Dalam konteks ini, ada lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah untuk menangani masalah kebahasaan ini. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab secara khusus untuk menangani masalah kebahasaan di Indonesia terdiri atas, antar lain, lembaga kebahasaan tingkat pusat (nasional) dan lembaga kebahasaan tingkat daerah.

Lembaga kebahasaan tingkat pusat sebagaimana ditegaskan Alwi dan Sugono (Ed.) (2003) bertugas menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia dan berfungsi (1) melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, (2) mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, (3) merumuskan pokok-pokok kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan, (4) mengembangkan sistem informasi kebahasaan, (5) mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan berbagai pihak yang relevan, terutama lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi profesi, dan (6) memantau pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar asing.

Selanjutnya, lembaga kebahasaan tingkat daerah bertugas menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di daerah dengan fungsi melaksanakan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di daerah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan, melaksanakan pengembangan dan/atau pembinaan bahasa dan sastra daerah, dan mengembangkan sistem informasi kebahasaan di daerah. Dalam konteks inilah salah satu alasan pentingnya upaya pendirian kantor bahasa di pelbagai wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Maluku.

3. Simpulan

Pelestarian bahasa-bahasa daerah di tanah Maluku kini harus menjadi perhatian serius. Perhatian itu sekarang telah menjadi betapa penting dengan adanya kontak antarbudaya, agama dan politik. Hal ini disebabkan jika bahasa sebagai sistem bunyi gagal mengendap dalam kantong-kantong budaya, maka masyarakat pun gagal untuk memahami dan dipahami dalam konteks komunikasi antaretnis. Pada dasarnya, masyarakat atau kelompok orang yang termarginalisasi (tersisih) karena adanya proses pemusatan kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun bidang budaya (ilmu pengetahuan, agama, ideologi, bahasa, dan kesenian).

Pelestarian bahasa-bahasa daerah di Maluku sangat bergantung kepada kebijakan bahasa, kearifan bahasa, perencanaan bahasa dan sikap positif masyarakat penuturnya. Untuk itu, di era Otonomi Khusus diharapkan adanya paradigma baru dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku terhadap penggunaan bahasa Indonesia “Melayu Ambon”, bahasa daerah dan bahasa asing dalam membangun kesetaraan bahasa di Tanah Maluku.

Ihwal upaya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian bahasa-bahasa daerah di wilayah Provinsi Maluku pada hakikatnya selain menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan lembaga kebahasaan pemerintah dan nonpemerintah juga menjadi tanggung-jawab bersama seluruh masyarakat Maluku khususnya.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 2000, “Pelestarian Bahasa Daerah”. Dalam Alwi, Hasan et al. (Ed.). 2000. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 2000. “Pengajaran Bahasa Daerah di Sekolah”. Dalam Alwi, Hasan et al. (Ed). 2000. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Mbete, Aron Meko. 2001. *Paradigma Baru Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa Daerah* dalam LINGUISTIKA, Edisi ke Empat belas, Maret 2001. Denpasar: Program Pascasarjana Magister dan Doktor Linguistik UNUD.

- Sobarna, Cecep. 2006. *Pemertahanan Bahasa Daerah: Menuju Kesetaraan Bahasa dalam Bumiku, Bahasaku*, Mahmud, dkk (Ed.) 2006. Bandung: Jurusan Sastra Indonesia Fasa UNPAD.
- Taha, Zainuddin. 2000. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah dalam Era Globalisasi". Dalam Alwi, Hasan et al. (Ed.). 2000. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wijaya, I Putu Dewa dan Muhammad Rohmadi. 2006. *Sosiolinguistik. Kajian Teori dan Analisis*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

IMPLEMENTASI CERITA RAKYAT MALUKU DALAM PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DAN MUATAN LOKAL

Faradika Darman

Kantor Bahasa Maluku

faradika.darman@kemdikbud.go.id

Abstrak

Keragaman budaya Indonesia yang tergambar dalam semboyan Bineka Tunggal Ika merupakan kekayaan tak terhingga yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kekayaan tersebut merupakan lumbung budaya dan menjadi identitas keindonesiaan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh era modernisasi tak terbendung, kekayaan budaya satu demi satu mulai punah, tidak terdengar, dan terlihat lagi keberadaannya. Bahasa dan sastra daerah adalah bagian dari budaya Indonesia. Keberadaannya sangat melimpah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Salah satunya adalah Maluku. Kekayaan bahasa dan sastra baik sastra lisan dan sastra tulis sangat banyak ditemukan di Maluku. Sayangnya, keberagaman budaya belum dimanfaatkan secara maksimal dan tidak dilihat sebagai satu peluang. Penting dan tidaknya bahasa dan sastra daerah dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat memanfaatkan dan memberdayakan kekayaan budaya tersebut. Salah satu bentuk budaya yang melimpah di Maluku adalah cerita rakyat. Cerita tersebut menyimpan banyak nilai-nilai luhur warisan dari nenek moyang. Akan tetapi, sekarang ini banyak generasi muda tidak mengetahui tentang cerita-cerita rakyat daerah Maluku. Pelajaran Bahasa Indonesia dan muatan lokal di sekolah pun tidak dimanfaatkan sebagai satu wadah untuk mengangkat isu-isu lokal daerah. Budaya sejatinya adalah identitas, hilang

budaya berarti hilang identitas atau jati diri. Lokalitas keMalukuan yang tersimpan di dalam cerita rakyat Maluku sudah sepatutnyalah diberdayakan terutama dalam bidang pendidikan melalui pelajaran muatan lokal dan bahasa dan sastra Indonesia agar menjadi benteng yang dapat memperkuat jati diri orang Maluku.

Kata kunci: cerita rakyat, Maluku, lokalitas

1. Cerita Rakyat: Kekayaan Budaya Warisan Para Leluhur

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keragaman dan kebinekaannya. Kebinekaan dan keragaman dalam suku, agama, budaya, dan bahasa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dapat membedakannya dengan daerah lainnya. Berbicara tentang budaya Indonesia yang merupakan identitas kebangsaan tentu tidak akan ada habisnya. Bangsa Indonesia akan dipandang atau tidak oleh bangsa lain tergantung dari pengetahuan masyarakatnya tentang budaya bangsa. Pengakuan terhadap satu bangsa pun dapat diukur dari sejauh mana nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki. Di Indonesia terdapat banyak aset budaya bangsa yang bernilai warisan, salah satunya adalah cerita rakyat.

Cerita rakyat adalah bagian dari folklor yang masuk dalam unsur kebudayaan lokal suatu daerah. Salah satu aset budaya ini dapat dimanfaatkan untuk pembentukan moral generasi muda. Selain itu cerita rakyat juga merupakan warisan karena bersifat turun temurun dan dituturkan secara lisan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Aset budaya ini harus dipertahankan, dilestarikan, dan diberdayakan karena merupakan wadah atau sarana pewarisan nilai. Dalam cerita rakyat inilah khayalan manusia memperoleh kebebasan yang mutlak, karena terkadang ditemukan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam cerita rakyat, nilai-nilai kehidupan disimpan, diabadikan, dan dihidupkan secara turun temurun kepada generasi selanjutnya yang merupakan penerus para leluhur. Secara tidak langsung cerita rakyat tidak hanya berfungsi sebagai bahan dongeng atau berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi dapat dijadikan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sekarang ini (Danandjaja, 2002:4).

Pembelajaran tentang kehidupan pada masa lampau tentunya memiliki perbedaan dengan kehidupan sekarang ini. Tatanan nilai dalam cerita-cerita masa lalu dipandang perlu untuk menyeimbangkan pola pikir dan pandangan tentang kehidupan agar tidak terlalu jauh meninggalkan norma-norma dan etika yang telah susah payah ditanamkan oleh para leluhur. Modernitas dan globalisasi memberikan dampak tidak hanya pada perubahan fisik namun perubahan pemikiran dan kebiasaan hidup sehari-hari yang jika terus menerus dibiarkan perlahan akan menghilangkan tradisi atau kebiasaan hidup masyarakat Indonesia yang sesungguhnya.

Pewarisan nilai dan konsepsi melalui cerita yang sudah sedemikian mapan telah menjadi budaya turun-temurun di masyarakat nusantara. Cerita tidak saja merefleksikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dahulu, tetapi juga mengantarkan nilai-nilai itu kepada masyarakat sekarang. Hal itu disebabkan cerita pada satu generasi diwariskan dari cerita masyarakat sebelumnya (Nurgiantoro, 2005:117). Dengan memahami dan menceritakan kembali cerita-cerita lama kepada anak-anak, maka proses pewarisan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya akan tetap hidup, serta menumbuhkan kecintaan pada budaya sendiri kepada setiap generasi.

Dengan adanya proses pembelajaran bahasa dan sastra yang menggunakan cerita rakyat sebagai bahan atau objek, maka proses pewarisan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya akan tetap hidup serta dapat menumbuhkan kecintaan pada budaya sendiri kepada setiap generasi. Namun sangat disayangkan, sebagai bagian dari warisan budaya daerah dan bangsa, cerita rakyat tidak sertamerta akrab dan dekat dengan generasi muda. Arus modernisasi yang identik dengan nilai-nilai budaya asing perlahan namun pasti telah menggeser kedudukan budaya daerah sendiri di hati generasi muda dan masyarakat. Budaya asing seolah menjadi primadona. Jika hal ini terus menerus dibiarkan, yakinlah pada akhirnya Indonesia tidak akan diakui keberadaannya karena hilang budaya yang merupakan identitas kebangsaan.

Sangat sedikit generasi muda yang lahir dalam era digital ini tertarik dengan cerita rakyat dan bentuk-bentuk folklor lainnya. Hal tersebut tidak hanya karena anggapan atau pandangan bahwa budaya daerah atau tradisional lebih identik dengan budaya dulu yang sudah ketinggalan zaman, namun masalah lainnya adalah karena kurang atau bahkan tidak ada lagi data dan sumber yang dapat ditemukan mengenai cerita rakyat. Dua hal ini harusnya mendapatkan perhatian serius dan secepatnya ditemukan jalan keluar sebagai bentuk penyelamatan aset budaya bangsa. Cerita rakyat sebagai warisan para leluhur harus dipelihara karena menyimpan sangat banyak nilai-nilai kehidupan yang baik serta diperlukan adanya perlindungan agar terselamatkan dari kepunahan.

2. Implementasi Lokalitas KeMalukuan dalam Cerita Rakyat

Maluku adalah salah satu provinsi tertua di Indonesia yang dikenal sebagai 'Negeri Raja-Raja'. Kepemimpinan dalam lingkup desa (negeri) dikepalai oleh seorang raja. Sebagian besar desa atau daerah memiliki raja yang masa pemerintahannya secara turun temurun namun ada pula beberapa desa atau daerah yang telah menganut sistem pemilihan langsung yang dipilih oleh masyarakat. Sistem pemerintahan negeri-negeri di Maluku kental dengan aturan-aturan adat yang mengikat. Tak sedikitnya perhelatan atau upacara pemerintahan disertakan dengan kegiatan adat. Kelokalan Maluku selalu terasa dan terlihat dalam setiap kegiatan adat dan tradisi masyarakat. Cerita tentang sejarah dan kebiasaan-kebiasaan para leluhur pun diabadikan dalam

kapata. *Kapata* adalah salah satu sumber lisan masyarakat Maluku yang menyimpan banyak cerita masa lampau. Selain *kapata*, para leluhur pun mengabadikan tentang kisah masa lalu dalam cerita rakyat Maluku yang tersebar di setiap pulau. Cerita di satu pulau dengan pulau lainnya di Maluku kadang terdapat kesamaan.

Cerita rakyat yang merupakan warisan peninggalan leluhur ini menyimpan kekayaan nilai budaya yang tak terhingga. Cerita rakyat tak hanya bernilai hiburan semata. Jika dicermati dengan baik cerita rakyat merupakan sumber sejarah masa lalu yang mengisahkan tentang kebiasaan hidup nenek moyang dengan segala keunikan dan keterbatasan pada masa itu. Cerita rakyat yang tersebar di seantero nusantara memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Tanggapan atau pandangan masyarakat pun tentang cerita-cerita tersebut tentunya berbeda. Di beberapa daerah cerita rakyat dijadikan sebagai pandangan hidup bahkan dimanfaatkan dan dikolaborasikan dengan kehidupan sekarang yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan modernisasi. Ada pula masyarakat yang memandang cerita rakyat bukanlah hal yang penting atau hanya dianggap sebagai sarana hiburan semata. Terlepas dari berbagai pandangan masyarakat tentang hal tersebut, cerita rakyat tetaplah menjadi karya abadi yang patut dijaga dan dilestarikan agar terhindar dari kepunahan. Tidak ada satu pun cerita rakyat yang diketahui dengan jelas siapa pengarangnya, sehingga cerita tersebut dianggap sebagai milik bersama atau milik kelompok masyarakat tertentu. Cerita rakyat hanya dikenal dan dapat dibedakan berdasarkan daerah atau kelompok pemilik cerita tersebut. Namun yang terpenting adalah masyarakat telah memiliki suatu tradisi atau suatu gambaran kehidupan yang direalisasikan dalam budaya bertutur dan telah mereka warisi secara turun temurun (Rafik, 2010:57).

Buku cerita rakyat nusantara adalah satu buku yang mencerminkan dan menggambarkan kebinekaan atau keragaman budaya bangsa Indonesia. Keragaman tersebut direalisasikan dalam cerita rakyat yang menggambarkan kekhasan daerah masing-masing. Namun sayangnya, cerita-cerita rakyat dari Maluku belum secara luas dikenal atau diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal ini jauh berbeda dengan cerita-cerita rakyat dari pulau Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang serius dari berbagai pihak agar nantinya Maluku pun dapat dikenal melalui cerita-cerita daerahnya dan sebagai bentuk pengakuan atau eksistensi diri.

Cerita rakyat dapat dimanfaatkan atau diberdayakan untuk mempromosikan Maluku melalui budaya. Cerita rakyat yang merupakan bagian dari folklor adalah kebudayaan suatu kolektif (kelompok) yang tersebar dan diwariskan turun temurun secara tradisional dalam versi yang berbeda-beda baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (Danandjaja, 2002:2). Jumlah cerita rakyat di Maluku tidak dapat dihitung banyaknya, namun apakah hal tersebut telah memberikan dampak atau hasil yang baik untuk Maluku? Padahal, cerita rakyat dapat digunakan sebagai salah satu sarana penting untuk

menegaskan eksistensi dan identitas diri pada kelompok-kelompok sosial masyarakat. Tidak hanya pemeliharaan, namun revitalisasi dan pelestarian menjadi faktor penting untuk menyelamatkan salah satu aset budaya daerah ini.

Di dalam era masyarakat modern yang selalu menempatkan teknologi pada posisi yang sangat penting ini tidak disangkal membawa perubahan pada tatanan nilai, ritme kehidupan, dan norma-norma. Tetapi dapat ditemui pula masyarakat dalam kelompok-kelompok yang masih primitif, sehingga sosialisasi cerita rakyat tentunya harus dengan cara dan perangkat yang berbeda-beda. Dengan mengetahui karakter masyarakat seperti ini, tentunya akan dengan mudah untuk mempersiapkan strategi yang tepat agar proses pewarisan nilai-nilai tetap berlangsung.

Maluku yang terdiri atas banyak pulau kecil ini diperlukan adanya kekuatan-kekuatan yang harus dibangun untuk merekatkan kesatuan dalam wilayah yang penduduknya punya latar sosial dan budaya yang berbeda walaupun hanya dipisahkan atau dibatasi oleh pulau. Peran penting cerita rakyat terletak pada kemampuannya mengomunikasikan tradisi, pengetahuan, dan adat-adat istiadat etnis tertentu, atau menguraikan pengalaman-pengalaman manusia baik dalam dimensi perseorangan maupun dimensi sosial kepada etnik lain. Semakin banyak membaca cerita rakyat, maka seseorang akan semakin kaya pengetahuan akan kebudayaan yang melampaui batas ruang dan waktu.

3. Cerita Rakyat dan Pengajaran Bahasa Indonesia yang Bermuatan Lokal

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran berbasis teks. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yakni kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) terdapat perubahan yang sangat mendasar karena kurikulum 2006 lebih memfokuskan pada keterampilan berbahasa dan bersastra. Bagaimanapun bentuk kurikulum yang dirancang oleh pemerintah alangkah baiknya kekayaan atau khasanah budaya Indonesia tidak dilupakan. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara pembelajaran yang memuat materi-materi lokal keindonesiaan dengan pembelajaran-pembelajaran tentang teknologi, pada kenyataannya belum terealisasi. Di samping itu, materi-materi dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang berisikan tentang Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai pengembang karakter dan budi pekerti peserta didik karena hakikatnya pembelajaran sastra tidak hanya menjadikan dan mengarahkan anak agar suka membaca dan menulis, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai wadah penanaman nilai-nilai kehidupan yang berbudaya. Walaupun terdapat perbedaan dalam proses pewarisannya yang sebelumnya adalah tradisi oral bergeser ke tradisi tulisan. Cerita tidak lagi diterima pendengarnya secara lisan, tetapi melalui tulisan. Bukan hanya hilangnya banyak ciri dan gaya kelisanan, melainkan juga yang lebih terasa adalah tiada lagi fungsi sosial yang terkandung

dalam tradisi kelisanan. Dalam era kemajuan teknologi komunikasi ini, makin panjang terasa peranan media itu dalam pergeseran tradisi kelisanan (Sugihastuti, 2002:94—95).

Pemberdayaan dan pemanfaatan cerita rakyat dalam pembelajaran akan menjadikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah pembelajaran berbasis budaya Indonesia yang sangat bermanfaat untuk memupuk rasa cinta peserta didik kepada tanah air dan budaya sendiri. Dengan melihat jumlah cerita rakyat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang tidak terhitung jumlahnya, sangat disayangkan jika cerita tersebut tidak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Namun harus tetap diperhatikan bahwa, jika cerita rakyat dimanfaatkan untuk pembelajaran cerita-cerita tersebut terlebih dahulu harus di pilah-pilih dan dipertimbangkan sesuai dengan masa perkembangan anak atau peserta didik. Pada dasarnya memang cerita rakyat dulunya diperuntukkan bagi siapa saja, tetapi ketika aset budaya tersebut dimasukkan di dalam kurikulum pembelajaran tentunya harus sesuai dengan tingkatan atau kepentingan belajar peserta didik (Murti, 2015:364).

Era modernisasi tidak hanya menuntut generasi muda untuk paham tentang teknologi, tetapi juga harus memperkaya ilmu tentang budaya lokal Indonesia agar nantinya tidak terpengaruh oleh banyaknya budaya-budaya asing yang setiap saat selalu menjadi ancaman terhadap pergeseran budaya bangsa Indonesia. Pemberdayaan cerita rakyat dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada kenyataannya belum dipraktikkan dengan baik. Pelajaran muatan lokal pun yang seharusnya memuat materi-materi lokal daerah masing-masing pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Isu-isu lokal kedaerahan, atau kekhasan daerah yang menjadi ciri di daerah masing-masing belum dimanfaatkan dengan baik. Seperti pemanfaatan unsur-unsur lokal kedaerahan seperti cerita-cerita rakyat, ungkapan tradisional, lagu bahasa daerah, dan sebagainya. Pelajaran muatan lokal lebih cenderung pada praktik atau keterampilan membuat makanan atau kerajinan tangan. Jika pelajaran muatan lokal sudah berjalan tidak sesuai dengan semestinya bagaimanakah dapat dimasukkan unsur-unsur kedaerahan dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.

Pentingnya unsur budaya dimasukkan dalam proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan tujuan agar proses penanaman nilai cinta terhadap tanah air pada peserta didik dapat secara maksimal diberikan di sekolah-sekolah. Kebudayaan nasional tidak terlepas dari kebudayaan atau budaya daerah karena sejatinya budaya nasional berangkat dari kebudayaan lokal atau daerah yang memang cukup beragam. Akan tetapi, kekayaan budaya tersebut akan tak berarti apa-apa jika generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa tidak mengambil peran dalam hal penyelamatan dan revitalisasi. Pemerintah, masyarakat, tokoh agama, adat, budaya, dan generasi muda memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk menjaga warisan identitas bangsa Indonesia ini.

4. Penutup

Cerita rakyat adalah bagian dari folklor yang merupakan peninggalan para leluhur dan diwariskan kepada seluruh generasi bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Cerita rakyat adalah aset budaya bangsa. Di dalam cerita-cerita tersebut terdapat banyak kisah dan sejarah kehidupan sehari-hari para leluhur dengan sejuta nilai-nilai positif dan norma-norma kehidupan yang patut dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan yang serba modern sekarang ini. Cerita menjadi sumber informasi bagi siapa saja untuk mengenali kembali khazanah pengetahuan, ajaran, dan imajinasi nenek moyang, kearifan lokal serta kehidupan di masa lampau, yang boleh jadi masih relevan dengan kehidupan di masa sekarang.

Era globalisasi saat ini dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi menyebabkan sebagian orang atau masyarakat memandang aset budaya seperti cerita rakyat tidak menjadi sesuatu yang penting dan bernilai. Kesadaran masyarakat akan pentingnya peninggalan leluhur menjadi hal yang sangat penting dalam rangka penjagaan dan pelestarian. Jika masyarakat tidak lagi mendapatkan manfaat dari cerita rakyat atau peninggalan-peninggalan budaya lainnya tentu saja perlahan akan ditinggalkan dan dipastikan pada masa yang akan datang tidak akan ditemukan lagi cerita-cerita rakyat Nusantara. Hidup dalam lingkungan yang multikultur, masyarakat cenderung memilih sumber-sumber global sebagai penuntun tindakan sosial. Maka tidak ada cara lain kecuali membangun strategi menjadikan cerita rakyat sebagai bagian dari sumber-sumber global itu.

Generasi muda pun harus dibekali rasa cinta terhadap tanah air. Pemberdayaan dalam dunia pendidikan adalah hal yang sangat efektif agar terhindar dari kepunahan. Peningkatan pengetahuan terkait isu-isu lokal kedaerahan pun perlu dimasukkan sebanyak-banyaknya dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa, sastra, dan budaya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jika ketiga unsur tersebut dapat dipadukan dengan baik dalam proses pembelajaran tentunya akan membawa dampak yang sangat baik dalam proses pengembangan dan penanaman nilai-nilai keindonesiaan pada generasi muda.

Daftar Pustaka

- Bunata, Murti. 2015. “Memilah, Memilih, dan Memanfaatkan Penelitian Cerita Rakyat Anak dan Remaja”. Dalam kumpulan makalah. *Metodologi kajian tradisi lisan, Asosiasi Tradisi Lisan*. Hlm 364—379. Jakarta.
- Danandjaja, James. 2002. *Folklore Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2005. *Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rafiek, M. 2010. *Teori Sastra Kajian Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama
- Sugihastuti. 2002. *Teori dan Apresiasi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sumber internet <http://bektipatria.wordpress.com/2013/10/27/mata-pelajaran-bahasa-indonesia-dalam-kurikulum-2013/>. Diakses tanggal 20 Agustus 2016. Pukul 12.00 WIT.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU**

Jalan Tihu, Rumah Tiga, Wailela, Kota Ambon 97234

Telepon (0911) 3330918; Faksimile (0911) 312756

Posel kantorbahasamaluku@kemdikbud.go.id

NOTULA

KONGRES INTERNASIONAL BAHASA DAERAH MALUKU

Panel 5

Hari, tanggal	: Jumat, 8 September 2017
Waktu	: Pukul 16.30—18.00
Tempat	: Aula Utama Hotel Marina
Susunan Acara	: 1. Penyajian makalah 2. Diskusi
Moderator	:
Pemakalah I	: Wahidah, M.A.
Pemakalah II	: Mezke Gaspersz, S.Pd.
Pemakalah III	: Evi Olivia Kumbangsila, S.Pd.
Pemakalah IV	: Faradika Darman, S.S.
Notulis	: Ellia Wamese
Peserta	: Guru, mahasiswa, dan para akademisi bahasa dan sastra

Makalah I

RELASI KEKERABATAN

BAHASA YALAHATAN DAN BAHASA NOAULU DI MALUKU

Bahasa Yalahatan dan Noaulu adalah dua bahasa daerah di Maluku yang dituturkan oleh masyarakat di Maluku tengah. Bahasa Yalahatan dan Noaulu dituturkan di beberapa desa. Terdapat hubungan kekerabatan antara penutur bahasa Yalahatan dan Noaulu.

Ada pula dua ciri linguistik antar penutur bahasa Yalahatan dan bahasa Noaulu. Kesamaan antara bahasa Noaulu dan bahasa Yalahatan 55% pada tingkat

keluarga bahasa. Secara geografis letak penutur bahasa Noaulu dan bahasa Yalahatan tinggal berdekatan. Secara fonologis terdapat perbedaan antara bahasa Noaulu dan bahasa Yalahatan. Bahasa Noaulu dan bahasa Yalahatan sekeluarga.

Tanggapan:

1. Saran, kurangnya kata-kata baru yang masuk per tahun di KBBI. (Prof. P. Pattiasina)

Jawaban:

Telah dilakukan pengayaan kosakata bahasa Indonesia, turun ke desa-desa untuk mengidentifikasi konsep-konsep baru yang ada di bahasa Daerah. Maluku telah menyumbangkan hampir 700 kosa kata baru.

Makalah II

BAHASA DAERAH DALAM OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI MALUKU

Paradigma baru pelestarian bahasa daerah adalah pemberdayaan masyarakat yakni penyadaran akan khasanah bahasa dan budaya masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan bahasa terlaksana dengan baik oleh pihak Kantor Bahasa Maluku, pegiat, maupun sastrawan. Sarana untuk penanganan bahasa daerah di Maluku juga perlu diperhatikan. Serta tanggung-jawab kelembagaan; lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Pemerintah Maluku telah berusaha melakukan langkah-langkah preventif maupun represif dalam melestarikan bahasa.

Tanggapan:

1. Menjelaskan lebih spesifik maksud bahasa daerah yang mana?
2. Yang kita pakai di Ambon bukan bahasa Melayu, tetapi dialek Melayu. Itu menurut saya.

Jawaban:

Dalam penelitian ini, kata-kata yang diambil secara umum tidak berdasarkan kategori bahasa daerah tertentu. Kita punya bahasa Melayu Ambon, terdapat penyerapan kata dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam bahasa Melayu Ambon.

REVITALISASI TRADISI LISAN DAN PERAN MASYARAKAT ADAT DI MALUKU

Helmina Kastanya

Kantor Bahasa Maluku

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Maluku sering disebut atau dikenal sebagai *Negeri Raja-Raja*. Pernyataan tersebut dapat dijumpai pada beberapa spanduk ucapan selamat datang yang dipasang di tempat umum. Tidak hanya secara tertulis beberapa kali dapat kita dengar lewat ucapan masyarakat. Pernyataan tersebut diberikan karena wilayah Maluku merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat banyak negeri adat yang dipimpin oleh raja. Secara administratif, Provinsi Maluku terdiri atas dua kota dan sembilan kabupaten.

Setiap kabupaten/kota memiliki sejumlah negeri, desa, dan dusun. Setiap negeri dipimpin oleh seorang raja. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Di dalam negeri atau desa terdapat beberapa dusun yang dipimpin oleh seorang kepala dusun. Wilayah yang disebut negeri merupakan wilayah tertentu yang memiliki aturan peradatan yang berlaku sejak dahulu kala. Sedangkan wilayah yang disebut sebagai desa tentunya tidak memiliki aturan adat sehingga pada wilayah desa pemimpinnya hanya menjabat sebagai kepala desa dan tidak sebagai raja. Akan tetapi pada wilayah negeri, pemimpin menjabat sebagai raja sekaligus kepala desa.

Negeri-negeri di wilayah Maluku memiliki aturan adat yang memiliki nilai budaya yang patut dipelihara dengan baik. Setiap aturan adat yang berlaku di masyarakat memiliki makna penting. Umumnya di masyarakat setiap orang akan

bangga disebut sebagai anak negeri tempat ia berasal. Kebanggaan tersebut perlu ditopang dengan rasa bangga terhadap tradisi lisan yang berlaku di masyarakat. Rasa bangga tersebut akan mendorong setiap orang untuk melestarikan tradisi lisan yang ada.

Sebagai contoh, seseorang yang secara garis keturunan berasal dari Negeri Hatalai akan bangga apabila di luar negerinya, ia disebut (diperkenalkan) sebagai anak Negeri Hatalai. Rasa bangga itu kadangkala tidak seiring dan sejalan dengan pengetahuannya tentang kebudayaannya. Misalnya saja, bila seorang anak dari Negeri Hatalai ditanya tentang tradisi lisan *makan samanang* yang berlaku di Negeri Hatalai, tempat ia berasal, belum tentu ia mengetahuinya.

Kasus seperti ini juga terjadi di negeri-negeri lain. Begitu banyak anak negeri yang bangga dengan negerinya, tetapi belum mampu melestarikan budaya atau tradisi lisan yang berlaku di dalam masyarakatnya untuk membuat orang lain menjadi bangga terhadap negeri kita dan Maluku menjadi terkenal sebagai bagian dari Indonesia yang kaya budaya dan tradisi leluhur.

Salah satu upaya untuk memperkenalkan Maluku ke mata dunia dapat dilakukan dengan menonjolkan tradisi masyarakat yang ada. Sebutan Maluku sebagai *Negeri Raja-Raja* sudah memiliki daya tarik tersendiri apabila ditopang dengan pelestarian budaya yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis, hanya beberapa negeri adat yang cukup aktif dan serius melakukan upaya pelestarian tradisi masyarakat. Negeri-negeri itu seperti Negeri Mamalla dan Morella yang cukup terkenal melalui tradisi *pukul sapu*; Negeri Hitu yang terkenal dengan tradisi *mandi safar*; dan Negeri Tulehu yang terkenal dengan tradisi *abdau*.

Pada tahun 2016, tradisi *pukul sapu* telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya yang berasal dari Maluku. Hal ini merupakan contoh positif yang sebaiknya ditiru oleh masyarakat negeri-negeri adat yang lain. Revitalisasi atau melestarikan (menghidupkan) kembali tradisi lisan yang ada di setiap negeri akan membuat Maluku menjadi terkenal dengan kekayaan tradisi lisan masyarakat. Jangan sampai hanya populer sebagai *Negeri Raja-Raja*, tetapi tidak ada aktivitas budaya pada masyarakat sebagai anak negeri.

Dapat dibayangkan apabila setiap negeri yang ada di Maluku merevitalisasi salah satu tradisi masyarakat yang berlaku di dalamnya. Hal itu tentu menjadi luar biasa. Maluku dapat dikenal di mata dunia sebagai salah satu daerah yang kaya tradisi lisan. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan maksimal dari para raja sebagai pemimpin negeri adat, serta masyarakat sebagai pelaku tradisi

tersebut untuk mengembangkan dan merevitalisasi tradisi masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa tradisi lisan merupakan hasil budaya masa lampau yang ikut membentuk peradaban Nusantara.

Eksistensi tradisi lisan belakangan ini mulai dipertanyakan. Pengkajian terhadap tradisi lisan, oleh beberapa kalangan, dianggap sebagai pengkajian terhadap hal-hal kuno. Kondisi itu diperparah dengan terbatasnya para pewaris tradisi lisan, serta permasalahan mengenai nilai kebenaran pada tradisi lisan terkait dengan aspek ilmu pengetahuan. Padahal, tradisi lisan bukan produk budaya yang telah kuno. Ia akan selalu ada dan berkembang bersama masyarakatnya.

Tradisi lisan merupakan hal penting karena di dalam tradisi lisan terdapat nilai-nilai moral, agama, adat-istiadat, nyanyian, dan mantra. Bascon menyebutkan fungsi tradisi lisan antara lain sebagai proyeksi, yaitu pencerminan angan-angan masyarakat, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, sebagai alat untuk mendidik anak, dan sebagai pengawas norma-norma sosial di masyarakat.

Gambaran tentang fungsi tradisi lisan ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya merevitalisasi budaya leluhur yang telah ada sejak dahulu kala. Begitu banyak harapan-harapan baik yang diinginkan oleh leluhur kita melalui tradisi lisan yang berlaku di masyarakat. Saat ini hanya dibutuhkan kemauan dan kemampuan generasi kita untuk melestarikan dan memperkenalkan di mata dunia. Maluku harus menjadi terkenal di mata dunia tidak hanya sebagai negeri yang kaya rempah-rempah, tetapi juga dikenal sebagai negeri yang kaya warisan budaya leluhur.

Daftar Pustaka

- Asrif. 2016. *Maluku menuju Monolingistik: Menyikapi Keterancampunahan Bahasa-Bahasa Daerah di Maluku*. Ambon: Kantor Bahasa Maluku.
- Dewi, Eriyanti Nurmala. 2016. "Merawat Bahasa Menjaga Budaya: Implementasi Kebijakan Bahasa Daerah di Provinsi Jawa Barat" dalam *Kongres Bahasa Daerah Nusantara*. Bandung: Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Yayasan Rancage dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- Endraswara, Suwardi. 2002. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Handayani, Nita Hasan. 2015. Pelestarian dan Pengembangan Mitos Ikan Lompa Dalam Folklore Ikan Lompa: Tinjauan Struktural Levi-Strauss (Naskah hasil penelitian). Ambon. Kantor Bahasa Maluku.
- Latupapua, Falatino Erik dkk. 2013. "Pemertahanan Bahasa *Tana* sebagai Bahasa Adat di Kabupaten Maluku Tengah". Laporan Penelitian Hibah Bersaing pada Lembaga Penelitian Universitas Pattimura: Tidak diterbitkan.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011. *Antropologi Sastra: Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DAFTAR GAMBAR

KEBIJAKAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DALAM UPAYA PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

Dadang Sunendar - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

- 3 — Peta 17 Balai Bahasa dan 13 Kantor Bahasa di Indonesia.
- 3 — UU RI No. 24 Tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- 8 — Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia

PELINDUNGAN BAHASA DAN REVITALISASI BAHASA: CAGAR BAHASA ATAU GERAKAN BAHASA?

James T. Collins - Universitas Kebangsaan Malaysia

- 12 — Peta 1. Migrasi manusia Australo-Melanesia (Birdsell, 1977).
- 13 — Peta 2. Tahap migrasi Austronesia dari Pulau Taiwan (Bellwood, 1997:118).
- 15 — Peta 3: Ruang geografisi bahasa-bahasa turunan Bahasa Maluku Tengah Purba (Disesuaikan dari Atlas Maluku, edaran Landelijck Steunpunt Educatie Molukkers Utrecht, 1998).
- 16 — Peta 4. Teluk Piru dan sekitarnya (petikan dari peta Google).
- 18 — Gambar 1. Tata bahasa Paulohi, karya Stresemann (1918)
- 19 — Gambar 2. Tata bahasa Yamdena, karya Drabbe (1926).
- 20 — Gambar 3. Sebagian kosakata enam bahasa daerah, yakni bahasa Seti, Bobot, Masiwang, Geser, Watubela, dan Banda. (Dikutip dari Collins, 1986.)

- 21 — Gambar 4. Tata bahasa Larike (Pulau Ambon), karya Laidig dan Laidig (1991).
- 22 — Gambar 5. Beberapa aspek tata bahasa Alune di Pulau Seram (Kakerissa dkk., 1984).
- 27 — Gambar 6. Kamus Asilulu-Inggris, mongraf NUSA jilid 51—52.
- 29 — Gambar 7. Video “makan sirih” dalam bahasa Sepa.

USAHA MEREVITALISASI BAHASA TERANCAM—BAHASA SEPA

Dr. Chong Shin - (Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia)

Jamil, M.A. - (STKIP Gotong Royong Masohi)

- 41 — Peta 1: Tiga Lokasi Penelitian
- 45 — Illustrasi 1: Portal <http://www.revolve.live>.
- 46 — Video 1: Parau (<https://www.youtube.com/watch?v=IEgJ-HJ-ctl>)
- 47 — Video 2: Membuat Got Sagu (<https://www.youtube.com/watch?v=z-FNOWsFjAs>)
- 47 — Video 3: Cara Menotong Labu
- 47 — Video 4: Mengayam Ketupat
- 48 — Video 5: Membuat Pondasi Rumah

PELINDUNGAN BAHASA SUWAWA: ANTARA RUANG DAN BAHASA

Sukardi Gau - Kantor Bahasa Gorontalo

- 54 — Peta 1 Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
- 55 — Peta 2 Wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

REVITALISASI NASKAH KLASIK HIKAYAT RAJA KERANG KE DALAM FILM ANIMASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SASTRA DI ERA DIGITAL

Yulianeta - Suci Sundusiah - Halimah - Universitas Pendidikan Indonesia

- 65 — Gambar 1 Karakter Tokoh pada Film Animasi Hikayat Raja Kerang

KORPUS BAHASA DAERAH PADA CERITA RAKYAT DATUK URLIMA

Nita Handayani Hasan - Kantor Bahasa Maluku

- 178 — Gambar 1. Hasil Pemilahan Kata pada Aplikasi AntConc.
- 179 — Gambar 2. Hasil Analisis AntConc.
- 179 — Gambar 3. Hasil Analisis AntConc.

180 — Gambar 4. Hasil Analisis AntConc.

PELUANG DAN TANTANGAN MUATAN LOKAL BAHASA VISUAL
DAERAH DI INDONESIA

Ariesa Pandanwangi - Krismanto Kusbiantoro - Fakultas Seni Rupa dan
Desain Universitas Kristen Maranatha

236 — Gambar 1: Muatan Lokal dapat menjadi dasar pembentukan karakter
bangsa.

GAGASAN REVITALISASI AKSARA JAWA PADA VISUAL
KONTEMPORER *CARAKAN GARUDA PANCASILA*

Dyah Nurhayati - Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung

267 — Gambar 1. Carakan Garuda Pancasila

REFLEKSI SIKAP MASYARAKAT SULAWESI SELATAN DALAM
KORELASI BUDAYA DENGAN ONOMASTIKA

David G. Manuputty - Balai Bahasa Sulawesi Selatan

279 — Peta Kota Makassar

280 — Gunung *Buntu Kabobong*, yang terletak di perbatasan antara Kabupaten
Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja

280 — Gunung *Bulu Dua*, yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Barru dan
Kabupaten Soppeng

281 — Bukit *Karamaka*, berlokasi di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto

282 — *Tanru Tedong*, terletak di bagian timur Kabupaten Sidenreng Rappang.

282 — Pulau *Kodingareng*, terletak di gugusan Kepulauan Spermonde.





KANTOR BAHASA MALUKU
KOMPLEKS LPMP MALUKU, JALAN TIHU, WAILELA,
RUMAH TIGA, AMBON, MALUKU 97234, TELEPON : (0911) 349704
POS-EL : KANTORBAHASAPROVMALUKU@GMAIL.COM
LAMAN : WWW.KANTORBAHASAMALUKU@KEMENDIKBUD.GO.ID



978-602-50294-9-3